

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung  
Tahun 2016-2021

# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Tahun 2016-2021



Pemerintah  
Kabupaten Bandung

*Sabilulungan*



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati terpilih yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan rencana dan perkembangan program pembangunan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun



- 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21);
  19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah.
  9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
  13. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Selain mengacu pada RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RPJMD Tahun 2016-2021 harus memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  - (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
  - (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - (4) Sasaran dalam RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
4. Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 28 Juni 2018  
BUPATI BANDUNG,



*Dadang M. Naser*  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 28 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,



*Sopian Nataprawira*  
SOPIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT (7/83/2018)

# DAFTAR ISI

---

Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 6
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I - 8
1.4.1. Maksud .....	I - 8
1.4.2. Tujuan .....	I - 8
1.5. Sistematika Penulisan .....	I - 9
<b>BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II - 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II - 12
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana .....	II - 17
2.1.4. Demografi .....	II - 23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 27
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II - 27
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II - 38
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II - 41
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 41
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II - 42
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II - 80
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 86
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II - 86
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II - 88
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II - 90
2.4.4. Status Desa .....	II - 93
2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia .....	II - 93
2.4.6. Tingkat Ketergantungan .....	II - 94
2.5. Gambaran Hasil Evaluasi RPJMD .....	II - 105
<b>BAB III Gambaran Keuangan Daerah .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III - 1
3.1.2. Neraca Daerah .....	III - 9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III - 15
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III - 19
3.2.2. Analisis Pembiayaan .....	III - 22
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III - 26

3.3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III - 26
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III - 30
<b>BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Dokumen-dokumen Perencanaan Terkait .....	IV - 1
4.1.1. RTRW Kabupaten Bandung.....	IV - 1
4.1.2. RPJPD Kabupaten Bandung.....	IV - 2
4.1.3. RPJM Nasional .....	IV - 3
4.1.4. RPJMD Provinsi Jawa Barat .....	IV - 4
4.1.5. Sustainable Development Goals (SDGs) .....	IV - 5
4.2. Kerjasama Antar Daerah Berbatasan .....	IV - 6
4.3. Permasalahan Pembangunan .....	IV - 7
4.4. Isu Strategis.....	IV - 12
<b>BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....</b>	<b>V - 1</b>
5.1. Visi.....	V - 1
5.2. Misi.....	V - 5
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V - 13
<b>BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah.....</b>	<b>VI - 1</b>
6.1. Strategi Pembangunan .....	VI - 1
6.2. Arah Kebijakan .....	VI - 13
6.2.1. Integrasi dan Sinergitas Pembangunan.....	VI - 34
6.3. Program Pembangunan Daerah.....	VI - 42
<b>BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.....</b>	<b>VII - 1</b>
<b>BAB VIII Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Daerah .....</b>	<b>VIII - 1</b>
<b>BAB IX Penutup .....</b>	<b>IX -1</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Posisi RPJM Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	I - 7
Gambar 1.2.	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Bandung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I - 8
Gambar 2.1.	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung .....	II - 2
Gambar 2.2.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung.....	II - 3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Bandung.....	II - 6
Gambar 2.4.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung.....	II - 10
Gambar 2.5.	Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung.....	II - 11
Gambar 2.6.	Peta Persebaran Kawasan Strategis Kabupaten Bandung .....	II - 13
Gambar 2.7.	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah.....	II - 17
Gambar 2.8.	Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Bandung .....	II - 19
Gambar 2.9.	Peta Kawasan Gunung Berapi Kabupaten Bandung .....	II - 20
Gambar 2.10.	Peta Rawan Gempa Bumi Kabupaten Bandung .....	II - 21
Gambar 2.11.	Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung .....	II - 22
Gambar 2.12.	Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011-2016.....	II - 23
Gambar 2.13.	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2016.....	II - 23
Gambar 2.14.	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2011-2016.....	II - 24
Gambar 2.15.	Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Bandung .....	II - 25
Gambar 2.16.	Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017 .....	II - 27
Gambar 2.17.	Grafik Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2016.....	II - 36
Gambar 2.18.	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 37
Gambar 2.19.	Grafik Capaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 38
Gambar 2.20.	Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 38
Gambar 2.21.	Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 39
Gambar 2.22.	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 39
Gambar 2.23.	Grafik Daya Beli Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 39
Gambar 2.24.	Grafik Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 43
Gambar 2.25.	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016....	II - 48
Gambar 2.26.	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung 2012-2016 .....	II - 86
Gambar 2.27.	Hasil Analisis Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 .....	II - 105
Gambar 3.1.	Analisis Kebijakan Perekonomian Kabupaten Bandung.....	III - 31
Gambar 4.1.	Hasil Pembobotan Isu Strategis Kabupaten Bandung .....	IV - 16
Gambar 5.1.	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 .....	V - 2
Gambar 5.2.	Perencanaan Terintegrasi Misi 1.....	V - 6
Gambar 5.3.	Perencanaan Terintegrasi Misi 2.....	V - 7
Gambar 5.4.	Perencanaan Terintegrasi Misi 3.....	V - 8
Gambar 5.5.	Perencanaan Terintegrasi Misi 4.....	V - 9
Gambar 5.6.	Perencanaan Terintegrasi Misi 5.....	V - 10
Gambar 5.7.	Keterkaitan Prioritas dalam Pencapaian Visi.....	V - 13



Gambar 5.8. Kerangka Berpikir Logis Misi 1 .....	V - 14
Gambar 5.9. Kerangka Berpikir Logis Misi 2 .....	V - 15
Gambar 5.10. Kerangka Berpikir Logis Misi 3 .....	V - 16
Gambar 5.11. Kerangka Berpikir Logis Misi 4 .....	V - 17
Gambar 5.12. Kerangka Berpikir Logis Misi 5 .....	V - 18
Gambar 6.1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Internal dan Eksternal Kabupaten Bandung .....	VI - 2
Gambar 6.2. Hasil Analisis SWOT .....	VI - 3
Gambar 6.3. Tema Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 .....	VI - 12
Gambar 6.4. Konsep 1000 Kampung .....	VI - 27
Gambar 6.5. Konsep Tematik Pariwisata .....	VI - 28
Gambar 6.6. Konsep Tematik Investasi .....	VI - 29
Gambar 6.7. Konsep Tematik Pendidikan .....	VI - 30
Gambar 6.8. Konsep Tematik Kemiskinan .....	VI - 31
Gambar 6.19. Konsep Tematik Kesehatan .....	VI - 32
Gambar 6.10. Konsep Penguatan Pembangunan Perdesaan .....	VI - 33
Gambar 6.11. Konsep Membangun dari Desa .....	VI - 34
Gambar 6.12. Ilustrasi Rencana Pengembangan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB) .....	VI - 37
Gambar 6.13. Ilustrasi Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar ....	VI - 39

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Bandung.....	II - 4
Tabel 2.2.	Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2011.....	II - 8
Tabel 2.3.	Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung.....	II - 14
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2016 .....	II - 26
Tabel 2.5.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	II - 28
Tabel 2.6.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku .....	II - 29
Tabel 2.7.	Rata-rata Indeks <i>Location Quotient</i> Sektor di Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016.....	II - 30
Tabel 2.8.	Perhitungan Indikator-indikator <i>Shift Share Analysis</i> Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2016.....	II - 33
Tabel 2.9.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 35
Tabel 2.10.	Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 36
Tabel 2.11.	Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2013-2016.....	II - 37
Tabel 2.12.	Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2015-2016.....	II - 40
Tabel 2.13.	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Bandung Tahun 2014-2015.....	II - 41
Tabel 2.14.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 43
Tabel 2.15.	Rasio Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Usia Sekolah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 44
Tabel 2.16.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 45
Tabel 2.17.	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 46
Tabel 2.18.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 46
Tabel 2.19.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 47
Tabel 2.20.	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 47
Tabel 2.21.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 48
Tabel 2.22.	Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 49
Tabel 2.23.	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 50
Tabel 2.24.	Kondisi Areal Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2016.....	II - 51
Tabel 2.25.	Kondisi DAS Citarum di Kabupaten Bandung .....	II - 52

Tabel 2.26. Kondisi Sub DAS Citarum di Kabupaten Bandung.....	II - 52
Tabel 2.27. Panjang Drainase dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016...	II - 53
Tabel 2.28. Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 55
Tabel 2.29. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016	II - 55
Tabel 2.30. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 56
Tabel 2.31. Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Wilayah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 57
Tabel 2.32. Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 57
Tabel 2.33. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 58
Tabel 2.34. Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 58
Tabel 2.35. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 59
Tabel 2.36. Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 60
Tabel 2.37. Pengujian Air dan Udara di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 62
Tabel 2.38. Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Status Kerusakan untuk Produksi Biomassa (% PI-SKT) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 64
Tabel 2.39. Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 64
Tabel 2.40. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 65
Tabel 2.41. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 65
Tabel 2.42. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 65
Tabel 2.43. Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 66
Tabel 2.44. Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 66
Tabel 2.45. Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 66
Tabel 2.46. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2013.....	II - 67
Tabel 2.47. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 67
Tabel 2.48. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014.....	II - 68
Tabel 2.49. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 68
Tabel 2.50. Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 69
Tabel 2.51. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Tahun 2013-2015.....	II - 69
Tabel 2.52. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 70
Tabel 2.53. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 70
Tabel 2.54. Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 71
Tabel 2.55. Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 71

Tabel 2.56. Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 72
Tabel 2.57. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Dilestarikan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 72
Tabel 2.58. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 73
Tabel 2.59. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 73
Tabel 2.60. Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 74
Tabel 2.61. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2013 .....	II - 74
Tabel 2.62. Realisasi dan Target Capaian Skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 75
Tabel 2.63. Realisasi dan Target Capaian Skor PPH Konsumsi Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015 .....	II - 76
Tabel 2.64. Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 76
Tabel 2.65. Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 77
Tabel 2.66. Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 77
Tabel 2.67. Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 77
Tabel 2.68. Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 78
Tabel 2.69. Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 78
Tabel 2.70. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 79
Tabel 2.71. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 80
Tabel 2.72. Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 80
Tabel 2.73. Indikator Peternakan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 81
Tabel 2.74. Indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 81
Tabel 2.75. Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 83
Tabel 2.76. Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015 .....	II - 83
Tabel 2.77. Indikator Perikanan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 84
Tabel 2.78. Indikator Capaian Perdagangan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015 .....	II - 84
Tabel 2.79. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015 .....	II - 85
Tabel 2.80. Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 85
Tabel 2.81. Angka Konsumsi Pangan Rata-rata Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2013 .....	II - 87
Tabel 2.82. Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 87
Tabel 2.83. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 88
Tabel 2.84. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	II - 89
Tabel 2.85. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 89



Tabel 2.86.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung Tahun 2014-2016 .....	II - 91
Tabel 2.87.	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 92
Tabel 2.88.	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015.....	II - 93
Tabel 2.89.	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2015 .....	II - 94
Tabel 2.90.	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	II - 95
Tabel 2.91.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung .....	II - 95
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 3
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 5
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 6
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 6
Tabel 3.5.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 8
Tabel 3.6.	Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 10
Tabel 3.7.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	III - 13
Tabel 3.8.	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 21
Tabel 3.9.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	III - 22
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 23
Tabel 3.11.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 .....	III - 24
Tabel 3.12.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016..	III - 24
Tabel 3.13.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016.....	III - 25
Tabel 3.14.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.....	III - 27
Tabel 3.15.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 .....	III - 32
Tabel 3.16.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.....	III - 35
Tabel 3.17.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 .....	III - 35
Tabel 4.1.	Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung .....	IV - 16
Tabel 5.1.	Visi RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.....	V - 1
Tabel 5.2.	Prioritas Pembangunan Berdasarkan RPJPN dan RPJPD .....	V - 1
Tabel 5.3.	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.....	V - 3
Tabel 5.4.	Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung.....	V - 10
Tabel 5.5.	Keterkaitan Antara Isu Strategis dan Misi Pembangunan.....	V - 12
Tabel 5.6.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung .....	V - 18
Tabel 5.7.	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung dengan	

Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat.....	V - 25
Tabel 6.1. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung .....	VI - 4
Tabel 6.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung.....	VI - 11
Tabel 6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung.....	VI - 18
Tabel 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1.....	VI - 22
Tabel 6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2.....	VI - 23
Tabel 6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3.....	VI - 24
Tabel 6.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4.....	VI - 25
Tabel 6.8. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 5.....	VI - 26
Tabel 6.9. Rencana Pola Ruang Kawasan KSTB.....	VI - 36
Tabel 6.10. Pembangunan Infrastruktur yang Dibiayai melalui Mekanisme Pinjaman Daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha .....	VI - 40
Tabel 6.11. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung .....	VI - 43
Tabel 6.12. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bandung	VI - 52
Tabel 7.1. Keterkaitan Prioirtas Pembangunan dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung .....	VII - 1
Tabel 7.2. Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	VII - 3
Tabel 7.3. Keterkaitan Misi, Program Pembangunan Daerah, dan Fokus Pembangunan Kabupaten Bandung .....	VII - 5
Tabel 7.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.....	VII - 8
Tabel 8.1. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung .....	VIII - 1
Tabel 8.2. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung .....	VIII - 3



### 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah dibagi ke dalam tiga *time frame* perencanaan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Dengan mengacu pada arahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 yang telah diperdakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, memberikan konsekuensi wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perubahan RPJMD ini menjadi bentuk terjemahan dari janji kepala daerah berupa visi dan misi pembangunan. Selain itu juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka sinergitas rencana jangka menengah dengan rencana pembangunan jangka panjang serta mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung serta



berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersebelahan, serta disusun berdasarkan empat pendekatan, yakni:

1. Pendekatan politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
2. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) adanya perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; (2) adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; dan (3) adanya perubahan dalam strategi, kebijakan, dan program pembangunan di sisa masa jabatan kepala daerah sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Ketiga pertimbangan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 342, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan dari rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Bupati terpilih.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:





- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6
- c. Landasan Operasional, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takniliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010



- tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN serta visi dan misi bupati terpilih. RPJMD ini yang kemudian akan dijabarkan menjadi RKPD dan juga merupakan pedoman bagi Renstra Perangkat Daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

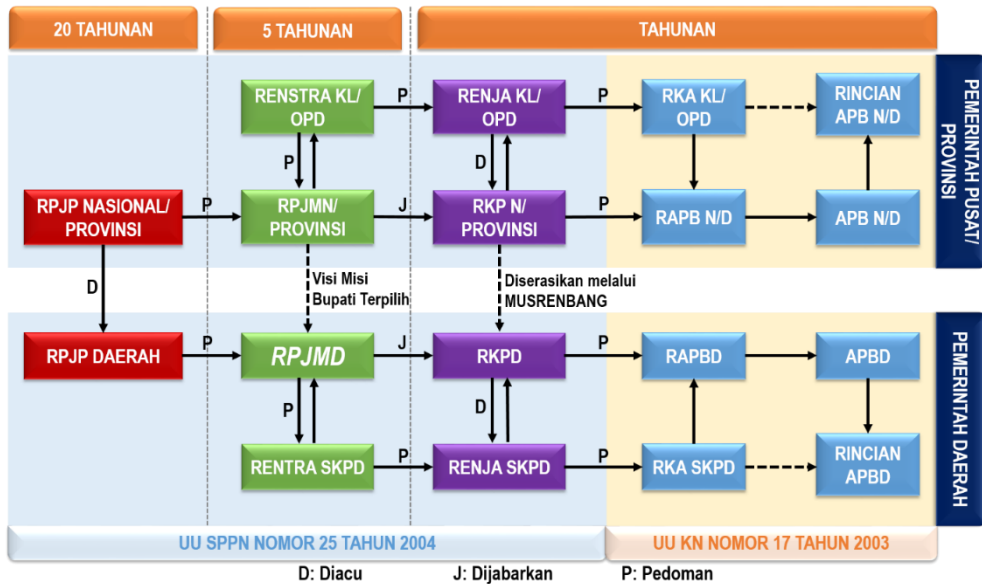
Terkait dengan Sinkronisasi antar dokumen terdapat pada pasal 159 bahwa ayat (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah. (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota. (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak



pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan Struktur dan Pola Tata Ruang dalam RTRW yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 dilakukan sebagai dasar pertimbangan penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bandung. Sementara sinkronisasi muatan RPJMD dengan muatan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rangka penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dengan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan sesuai kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Adapun, sinkronisasi RPJMD Kabupaten Bandung dengan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya dilakukan sebagai upaya penyesuaian pembangunan jangka menengah daerah untuk sektor atau urusan yang bersifat lintas kewilayahan.

Posisi RPJM Daerah dalam Sistem Rencana Pembangunan Nasional diilustrasikan oleh Gambar 1.1.



**GAMBAR 1.1.**  
**POSISI RPJM DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

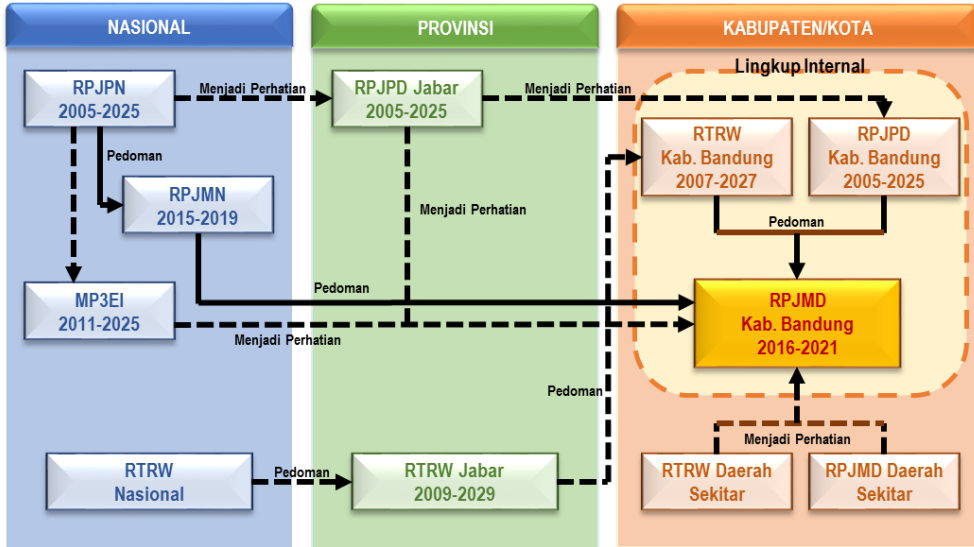
Sumber: Hasil Olahan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, lingkup internal Kabupaten Bandung, dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Bandung, yakni:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
2. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah wilayah sekitar Kabupaten Bandung;

7. Dokumen terkait lainnya (perencanaan sektoral).

Pada penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Bandung, tidak disertakan hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dikarenakan habisnya masa jabatan Gubernur dan periode berlakunya RPJMD Provinsi Jawa Barat sehingga acuan yang digunakan dalam Revisi RPJMD Kabupaten Bandung langsung pada RPJPD Provinsi Jawa Barat. Skema hubungan antara RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2.



GAMBAR 1.2.

### HUBUNGAN ANTARA RPJMD KABUPATEN BANDUNG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2017

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut.

##### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

- Menyempurnakan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah sampai dengan akhir masa jabatan.

##### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, diantaranya:

- Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 tahunan.
- Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih.
- Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan





program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bandung yang lalu.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan juga kerangka pendanaan daerah.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Rumusan isu dan permasalahan

strategis pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan tiap bidang pembangunan daerah, baik dari segi internal maupun eksternal.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini memberikan gambaran mengenai kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi pembangunan daerah dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan daerah. Pada bagian ini dilakukan analisis sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi keidah-kaidah perumusan visi, misi, dan sasaran yang akan dituju.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan dan menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, juga penurunannya ke dalam level *outcome* (program pembangunan daerah).

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan



## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

## **BAB IX PENUTUP**

Pada bab terakhir ini dijelaskan mengenai pedoman transisi meliputi pedoman transisi untuk mengisi kekosongan akibat pengaruh perubahan arahan kebijakan dan transisi pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaan dalam implementasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung yang digunakan sebagai basis data acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada subbab ini akan diuraikan penjelasan mengenai aspek geografis dan demografi Kabupaten Bandung yang mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, serta penjelasan mengenai kondisi kependudukan Kabupaten Bandung.

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada  $107^{\circ} 22'$  –  $108^{\circ} 50'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 41'$  –  $7^{\circ} 19'$  Lintang Selatan. Adapun secara administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 wilayah administratif Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan total area seluas 176.238,67 Ha.

Dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung berbatasan secara langsung dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

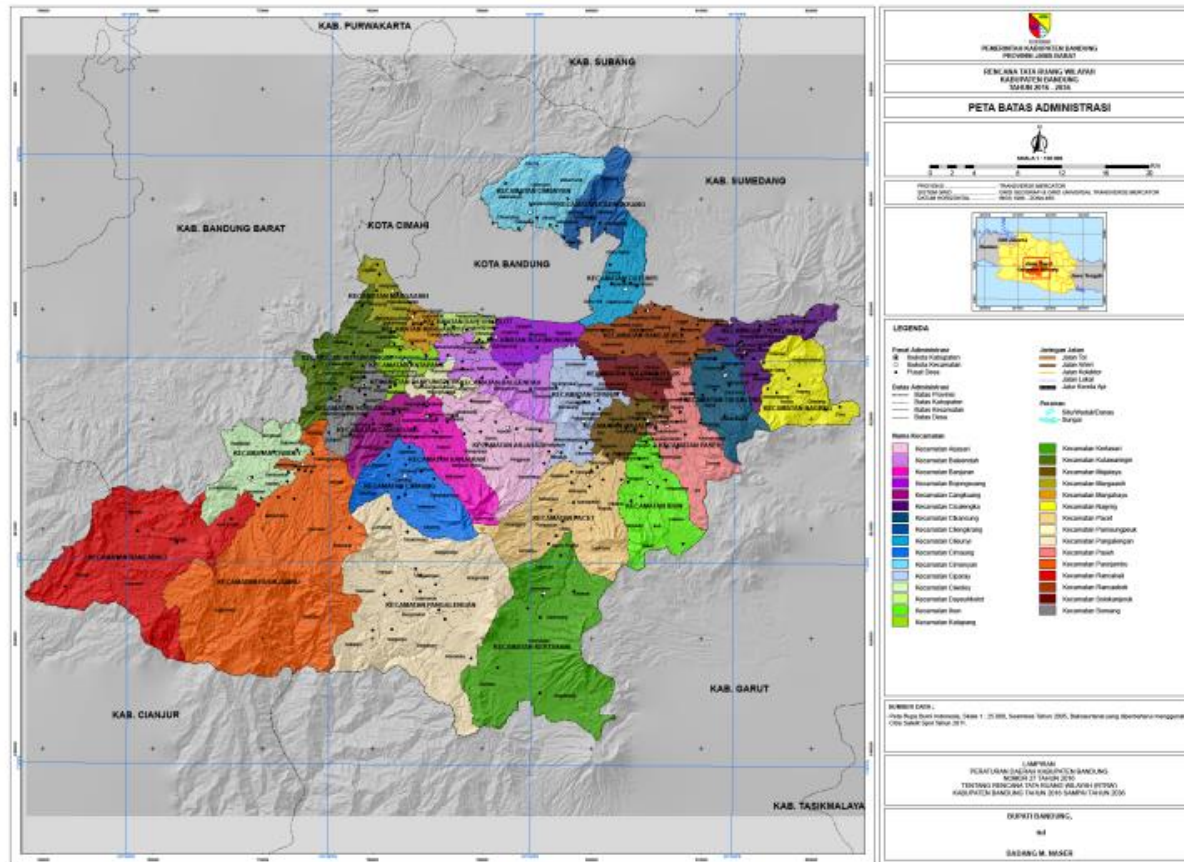
Batas wilayah administratif Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Secara rinci, orientasi wilayah Kabupaten Bandung dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat serta batas wilayah administratif Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh Gambar 2.1. dan Gambar 2.2. berikut.



**GAMBAR 2.1.**  
**PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**  
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



**GAMBAR 2.2.**  
**PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



## B. Topografi

Kabupaten Bandung termasuk wilayah dataran tinggi dengan kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung, seperti:

Berdasarkan topografinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi antara 500 m hingga 1.812 m di atas

permukaan laut. Secara tidak langsung, kondisi topografi Kabupaten Bandung inilah yang mempengaruhi iklim Kabupaten Bandung yang cenderung sejuk dengan suhu berkisar antara 18°C hingga 24°C. Secara umum topografi yaitu dataran, lereng/punggung bukit dan lembah/DAS. Topografi tersebut cenderung bervariasi untuk setiap wilayah. Informasi detail mengenai topografi setiap kecamatan di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1.**  
**KLASIFIKASI TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1	WP Soreang	Kec. Soreang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 825
		Kec. Kutawaringin	Dataran, Lereng/ Punggung Bukit	500 – 1.100
		Kec. Katapang	Dataran	675 – 700
		Kec. Rancabali	Lereng/Punggung Bukit	1.200 – 1.550
		Kec. Pasirjambu	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.000 – 1.200
		Kec. Ciwidey	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 1.200
2	WP Baleendah	Kec. Baleendah	Dataran	600 – 715
		Kec. Dayeuhkolot	Dataran	600
		Kec. Bojongsoang	Dataran	681 – 687
3	WP Banjaran	Kec. Banjaran	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	750 – 800
		Kec. Pangalengan	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	984 – 1571
		Kec. Canguang	Dataran, Lereng/ Punggung Bukit	700 – 710
		Kec. Cimaung	Lereng/Punggung Bukit	765 – 1.057
		Kec. Arjasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	550 – 1.000
		Kec. Pameungpeuk	Dataran	650 – 675
4	WP Majalaya	Kec. Majalaya	Dataran	681 – 796
		Kec. Ciparay	Dataran	678 – 805

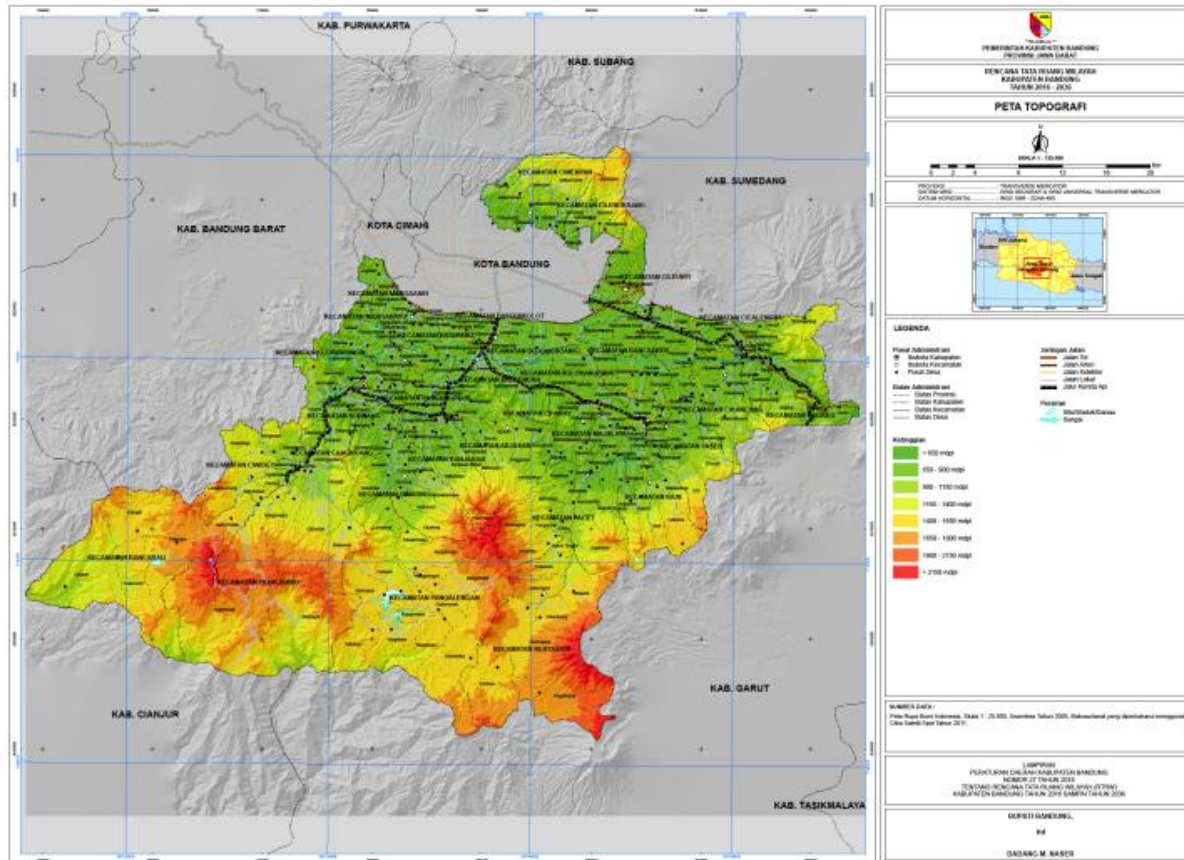


No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan	Topografi Wilayah	Ketinggian (mdpl)
		Kec. Pacet	Dataran, Lereng/Punggung Bukit, Lembah/ DAS	700 – 1.116
		Kec. Kertasari	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	1.250 – 1.812
		Kec. Paseh	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 800
		Kec. Ibum	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	700 – 1.200
		Kec. Solokan Jeruk	Dataran	671 – 700
5	WP Cicalengka	Kec. Cicalengka	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	667 – 850
		Kec. Nagreg	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	715 – 948
		Kec. Cikancung	Dataran	600 – 1.200
6	WP Cileunyi	Kec. Cileunyi	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 700
		Kec. Rancaekek	Dataran	608 – 686
7	WP Cimenyan - Cilengkrang	Kec. Cimenyan	Lereng/Punggung Bukit	750 – 1.300
		Kec. Cilengkrang	Dataran, Lereng/Punggung Bukit	600 – 1.700
8	WP Margaasih- Margahayu	Kec. Margaasih	Dataran	600
		Kec. Margahayu	Dataran	700

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2012

Kondisi topografi Kabupaten Bandung secara keseluruhan disajikan dalam Peta Topografi pada Gambar 2.3.





**GAMBAR 2.3.**  
**PETA TOPOGRAFI KABUPATEN BANDUNG**  
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036





### C. Geologi

Ditinjau berdasarkan geologi wilayah, Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung. Sekeliling Kawasan Cekungan Bandung tersebut dikelilingi oleh deretan pegunungan sebagai berikut:

- Di utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.
- Di selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.
- Di bagian barat Kawasan Cekungan Bandung, terdapat sederetan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung-punggung tidak teratur.
- Adapun di bagian timur Kawasan Cekungan Bandung di apit oleh Gunung Kreceng dan Gunung Mandalawangi.

Morfologi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Cekungan Bandung tersebut menjadikan Kabupaten Bandung tergolong potensial sebagai tempat akumulasi air tanah.

### D. Hidrologi

Kabupaten Bandung memiliki potensi hidrologi berupa sumber daya air yang cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan, serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya. Sementara pemanfaatan air

tanah dalam (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga.

Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24-60 m) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM terutama di wilayah perkotaan.

Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 3-6 mm per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.

### E. Klimatologi

Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sd. 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban antara 75% pada musim hujan dan 87% pada musim kemarau.

### F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, non pertanian, dan kawasan lainnya. Penggunaan lahan di kawasan lindung meliputi belukar, danau/ waduk, hutan, rawa, semak, dan sungai. Sedangkan kawasan budidaya pertanian meliputi kebun campur, perkebunan, sawah, ladang, dan tegal. Besaran penggunaan lahan setiap lahan disajikan dalam Tabel 2.2.



**TABEL 2.2.**  
**PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TAHUN 2011**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase(%)
I	<b>LINDUNG</b>	<b>38.121,77</b>	<b>21,63</b>
1	Hutan	37.290,79	21,16
2	Sungai	441,60	0,25
3	Danau/Waduk	357,40	0,20
4	Rawa	12,72	0,01
5	Taman	19,26	0,01
II	<b>BUDIDAYA</b>	<b>138.116,90</b>	<b>78,37</b>
1	Sawah	40.983,84	23,25
2	Sawah Tadah Hujan	10,97	0,01
3	Perkebunan/Kebun	22.577,66	12,81
4	Kebun Campur	8.171,12	4,64
5	Industri	1.408,90	0,80
6	Tambang	37,44	0,02
7	Perumahan /Komplek Permukiman	16.306,68	9,25
8	Institusi	339,70	0,19
9	Pasar/Pertokoan	3,94	0,002
10	Lapangan Golf	122,03	0,07
11	Stadion/Lapangan	26,21	0,01
12	Bandara	67,80	0,04
13	Jalan	3.567,59	2,02
14	Jalan KA	26,77	0,02
15	Stasiun/Terminal	2,44	0,001
16	Belukar	17.696,59	10,04
17	Rumput	52,81	0,03
18	Semak	3.821,50	2,17
19	Tanah Kosong	839,14	0,48
20	Tegal/Ladang	22.053,77	12,51
	<b>Jumlah (Ha)</b>	<b>176.238,67</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.4., sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh lahan budidaya dengan persentase cakupan seluas 138.116.80 ha atau sebesar 78,37% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Adapun sisanya, yaitu sebesar 21,63% merupakan kawasan lindung. Pada komponen lahan budidaya, penggunaan lahan budidaya

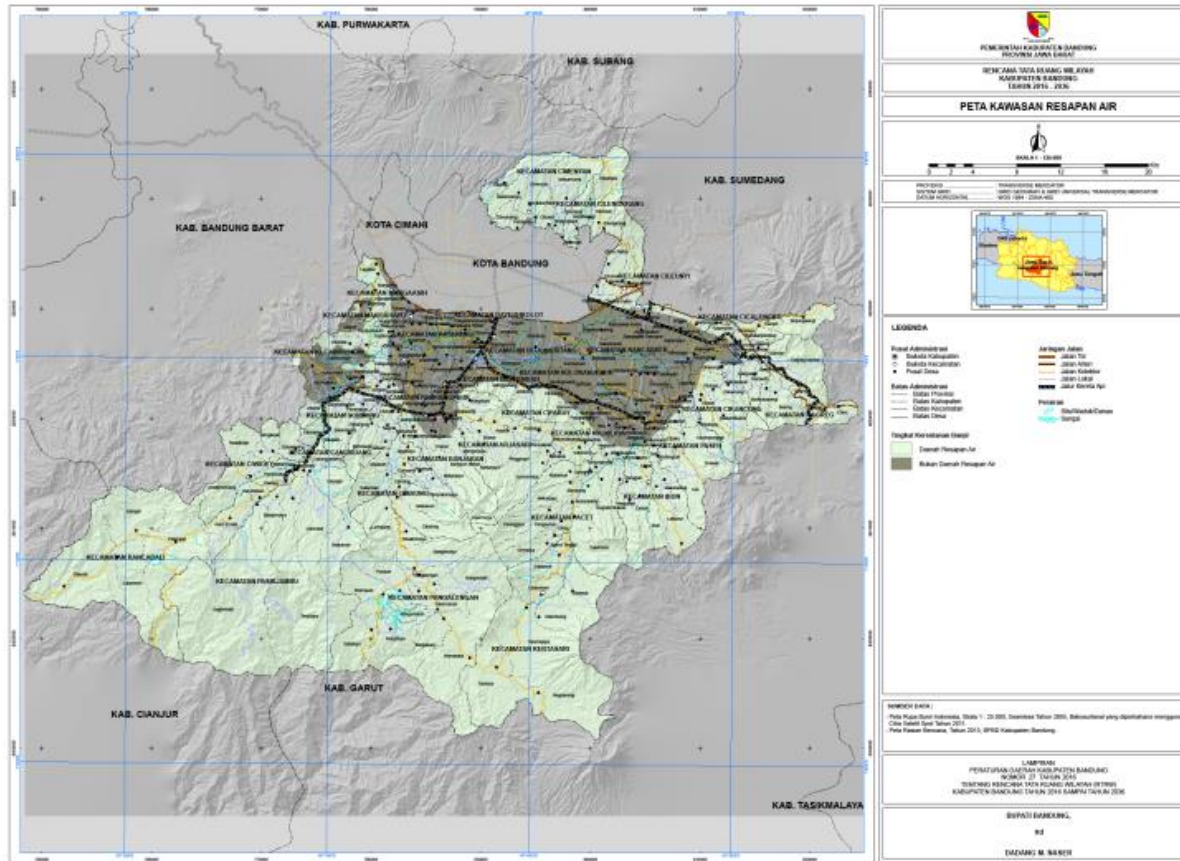
terbesar yaitu lahan sawah, dengan persentase cakupan sebesar 23,25%, kemudian diikuti oleh lahan perkebunan dengan persentase sebesar 12,81%. Meninjau persentase luas penggunaan lahan ini tampak bahwa ketersediaan lahan budidaya di Kabupaten Bandung potensial dalam mendukung fungsi pertanian. Selain dari pada itu, ketersediaan kawasan lindung dan ruang



terbuka yang ada di Kabupaten Bandung berpotensi sebagai kawasan resapan air.

Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi 5 kategori, yaitu daerah resapan utama, daerah resapan tambahan, daerah resapan tak berarti, daerah pelepasan air tanah, dan daerah kedap air. Daerah resapan utama di Kabupaten Bandung terletak lebih banyak di bagian selatan, diantaranya di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan Ciwidey. Sementara, daerah kedap air di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Kutawaringin. Daerah pelepasan air tanah di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Margahayu, Kecamatan Katapang, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Solokan Jeruk, dan Kecamatan Majalaya. Oleh sebab itu, pada musim penghujan, daerah-daerah yang berada di kecamatan tersebut seringkali mengalami masalah banjir karena merupakan kawasan pelepasan air tanah. Peta kawasan resapan air di Kabupaten Bandung secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.5.





**GAMBAR 2.5.**  
**PETA KAWASAN RESAPAN AIR KABUPATEN BANDUNG**  
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan kondisi guna lahan yang telah dipaparkan sebelumnya, guna lahan Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh kawasan budidaya dengan persentase cakupan sebesar 78,37%. Sebagian besar dari lahan budidaya tersebut merupakan lahan pertanian yang potensial dalam mendorong perekonomian Kabupaten Bandung.

Selain dipengaruhi oleh penggunaan lahan, potensi pertanian juga dipengaruhi oleh topografi dari wilayah itu sendiri. Kabupaten Bandung memiliki topografi yang bervariasi yang menyebabkan komoditas unggulan pertanian dan masing-masing wilayah juga bervariasi dan memiliki kekhasan tersendiri.

Dari segi daya saing, komoditas pertanian Kabupaten Bandung tidak hanya unggul di tingkat kabupaten, tetapi juga unggul di tingkat provinsi dan nasional. Selain dari pada itu, komoditas Kabupaten Bandung memiliki kekhasan tersendiri yang dapat dibedakan karakteristiknya dengan komoditas yang berasal dari daerah lain. Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya dalam hal jenis komoditas, besaran produksi, serta cita rasa yang dimilikinya. Beberapa komoditas pertanian khas Kabupaten Bandung yang menjadi unggulan antara lain adalah strawberry, kopi, serta sapi perah dan produk turunannya.

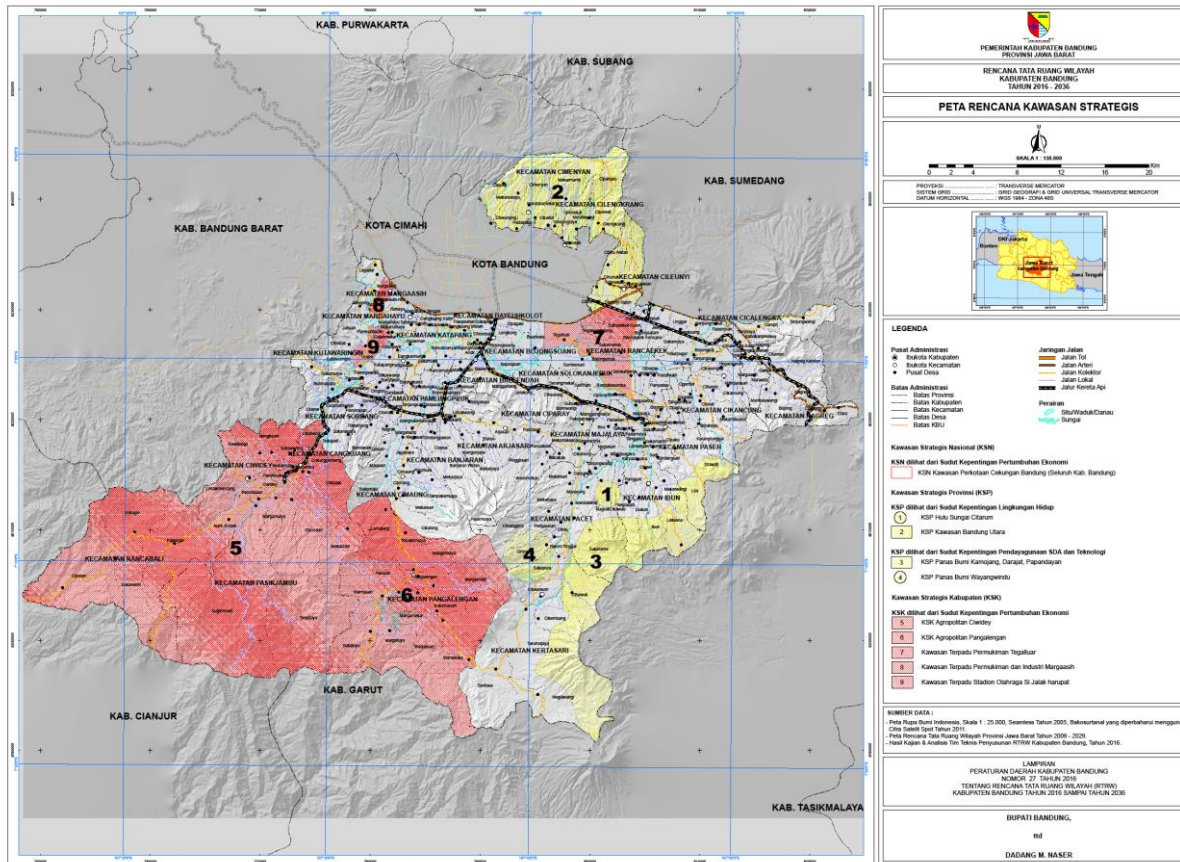
Selain pertanian, sektor industri pengolahan pun memiliki kontribusi yang berarti bagi perekonomian di Kabupaten Bandung. aktivitas industri pengolahan ini dilakukan di lahan kawasan budidaya non pertanian khususnya lahan industri. Pada tahun 2011 tercatat lahan kegiatan industri di Kabupaten Bandung mencapai luas 1.408,88 Ha dengan jumlah unit industri sebanyak 711. Industri tersebut meliputi industri besar, menengah, dan kecil yang didominasi industri tekstil dan produk turunannya.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tetapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Adapun pada level Provinsi Jawa Barat, beberapa area di Kabupaten Bandung bersifat strategis ditinjau dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hulu Sungai Citarum dan KSP Kawasan Bandung Utara. Selain strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup, beberapa area di Kabupaten Bandung juga termasuk ke dalam KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA, antara lain KSP Panas Bumi Kamojang, Darajat, Papandayan, serta KSP Panas Bumi Wayang Windu.

Sejalan dengan penetapan kawasan strategis oleh pemerintah nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung dalam RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036 telah menetapkan empat kawasan di Kabupaten Bandung sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Kawasan Terpadu yang dinilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Keempat kawasan tersebut antara lain meliputi KSK Agropolitan Ciwidey, KSK Agropolitan Pangalengan, Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar, Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih, serta Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat.

Lokasi KSN, KSP, KSK, dan Kawasan Terpadu yang berlokasi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.6.





**GAMBAR 2.6.**  
**PETA PERSEBARAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



**A. Kawasan Strategis Nasional (KSN) – KSN Cekungan Bandung**

Penetapan KSN didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028. KSN Cekungan Bandung dipandang penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari KSN Cekungan Bandung, pengembangan Kabupaten Bandung dilakukan searah dengan arahan nasional untuk pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan.

**B. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

1. KSP Hulu Sungai Citarum

Dari segi sumber daya alam, Kabupaten Bandung merupakan hulu dari Sungai Citarum yang merupakan salah satu pengembangan WS Nasional Lintas Provinsi Cidanau – Cidurian – Cisdane – Ciliwung – Citarum. Kawasan Hulu Sungai Citarum ditetapkan sebagai KSP Hulu Sungai Citarum dengan pertimbangan bahwa kawasan ini memiliki potensi dalam penyediaan sumber daya air baku dan penyeimbang ekosistem di Provinsi Jawa Barat.

2. KSP Kawasan Bandung Utara

Penetapan Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Adapun arahan utama dalam kawasan strategis Bandung Utara adalah dengan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan (khususnya dengan keberadaan hutan lindung) dan pembatasan pengendalian pembangunan sebagai upaya menghindari limpahan perkembangan pembangunan PKN Perkotaan Bandung Raya yang akan mengancam alih fungsi lahan dan perubahan pemanfaatan lahan kawasan hutan.

3. KSP Panas Bumi Kamojang, Darajat, Papandayan, dan KSP Panas Bumi Wayang Windu

Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711 MegaWatt (MW). Dari jumlah tersebut, yang sudah dimanfaatkan (ter-install) mencapai ±697 MW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan area Cibuni.

Energi yang berasal dari Kabupaten Bandung sudah mampu menyuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu, dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 MW. Bahkan sejak bulan Mei 2012, telah dimulai pembangunan PLTP Patuha Unit I dengan kapasitas 55 MW.

Informasi detil mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.3.

**TABEL 2.3.  
POTENSI PANAS BUMI DI KABUPATEN BANDUNG**

No	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan		Wayang Windu	Star Energy Geothermal	400	227





No	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
		PT Geothermal Energy	Patuha	Wayang Windu PT Geo Dipa Energi	706	-
2	Kamojang-Darajat	PT Geothermal Energy	Kamojang	PT Geothermal Energy	855	200
				Chevron Geothermal Indonesia	610	270
3	Cibuni	PT Yala Tekno Geothermal	Cibuni	PT Tekno sarana Energi Geothermal	140	0
<b>Jumlah</b>					<b>2.711</b>	<b>697</b>

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung, 2013

### C. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)/ Kawasan Terpadu

#### 1. KSK Agropolitan Ciwidey

Kawasan Agropolitan Ciwidey meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, dan Kecamatan Rancabali yang biasa disebut "Kawasan Pacira". Secara umum kawasan Pacira memiliki banyak potensi pertanian dan peternakan. Untuk potensi pertanian terdapat tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan potensi peternakan terdapat sapi perah.

Jenis komoditi unggulan yang paling banyak di wilayah Pacira untuk tingkat desa yakni sapi perah tersebar di 19 desa; padi sawah tersebar di 18 desa; buncis, tomat, dan cabe tersebar di 11 desa; alpukat dan pisang tersebar di 11 desa; teh rakyat tersebar di 9 desa; kopi tersebar di 7 desa; dan strawberry tersebar di 6 desa.

#### 2. Kawasan Agropolitan Pangalengan

Mengacu pada Masterplan Agropolitan Kecamatan Pangalengan 2006-2010, telah ditetapkan tiga komoditas unggulan untuk sektor pertanian, antara lain jagung, kentang, dan kubis. Meskipun saat ini belum ada kajian

terbaru mengenai potensi komoditas agropolitan, akan tetapi mengingat hasil pengamatan lapangan menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda, maka pengembangan komoditas jagung, kentang, dan kubis tetap perlu menjadi salah satu fokus pengembangan.

Selain produk sayuran, Pangalengan memiliki beberapa potensi di sektor perkebunan dan peternakan, yang meliputi:

- Perkebunan teh, baik milik swasta, negara, maupun perkebunan rakyat,
- Perkebunan kopi (sebagian besar milik masyarakat), dan
- Peternakan, dengan adanya industri makanan olahan seperti industri pembuatan dodol caramel, kerupuk susu, dan sebagainya.

#### 3. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar

Kawasan Terpadu Kotabaru Tegalluar merupakan kawasan strategis dengan luas ±3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduh/danau buatan, dan kawasan rekreasi.



4. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih

Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih merupakan kawasan strategis dengan luas  $\pm 450$  ha untuk pengembangan kawasan industri non polutif.

5. Kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat

Pengembangan kawasan Terpadu Stadion Olahraga Si Jalak Harupat diarahkan menjadi kawasan strategis yaitu sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan peruntukan lahan kawasan pengembangan fasilitas umum olahraga dan rekreasi. Kawasan ini memiliki luas  $\pm 740$  ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (*sport center*) dengan luas  $\pm 130$  ha dan kawasan pendukung dengan luas  $\pm 610$  ha, terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif, serta kegiatan komersial lainnya.

Disamping potensi pengembangan wilayah yang telah dijabarkan ke dalam KSN, KSP, KSK, dan Kawasan Terpadu di atas, Kabupaten Bandung juga memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata. Kabupaten Bandung banyak memiliki area dengan panorama alam yang indah dan menjadi daya tarik wisata, terutama area yang berlokasi di selatan dan utara Kabupaten Bandung. Disamping kawasan pariwisata alam, Kabupaten Bandung juga kaya akan kawasan wisata budaya.

Kawasan pariwisata Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi tujuan utama kunjungan domestik, tetapi juga menjadi tujuan wisata mancanegara. Beberapa destinasi pariwisata yang berlokasi di Kabupaten Bandung antara lain:

- a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi:
- Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan

Rancabali), Gunung Puntang, Arung Jeram Lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah Kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cileunyi, dan Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).

- b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi:
- Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah Adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumas Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Sltus Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekkek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra Wisata Benjang (Kecamatan Cileunyi).

- c. Kawasan Pariwisata Agro, meliputi:

- Agrowisata Sayuran:  
Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan.
- Agrowisata Strawberry:  
Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh.
- Agrowisata Teh:  
Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangaengan), Rancabali (Kecamatan



Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu).

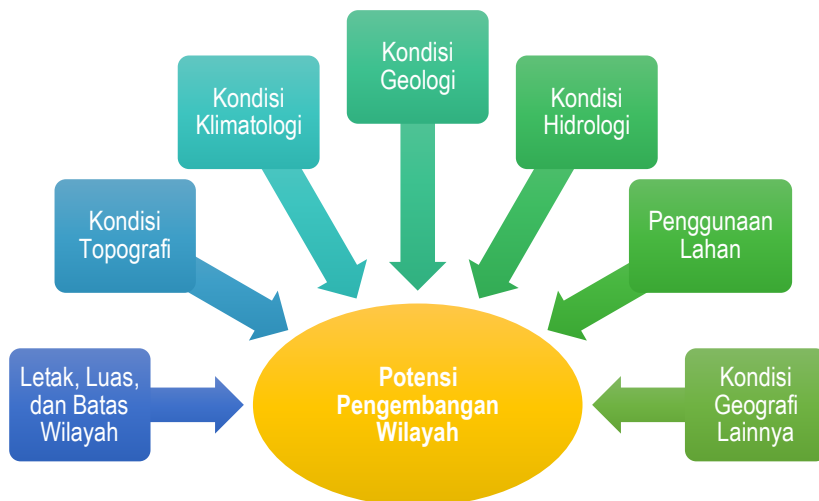
- Agrowisata Herbal:

Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pangalengan.

- d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi: Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), Area Dago Golf (Kecamatan Cimencyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimencyan (Kecamatan Cimencyan), serta

Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pangalengan).

Berdasarkan pemaparan karakteristik lokasi dan wilayah di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kondisi geografis daerah terkait dalam mendukung potensi pengembangan wilayah. Keterkaitan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan wilayah tersebut sejalan dengan arahan kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:



**GAMBAR 2.7.**  
**KERANGKA PEMIKIRAN POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH**

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bandung merupakan dataran tinggi berbentuk cekungan dengan Sungai Citarum sebagai sentral cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai dari utara, selatan, dan timur. Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat kerentanan bencana alam di Kabupaten Bandung cukup tinggi.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun

2011, Kabupaten Bandung menduduki peringkat keempat tingkat rawan bencana diantara 494 kabupaten yang ada di Indonesia. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat menempati ranking ketiga setelah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Tingginya tingkat kerentanan bencana diukur dari berbagai faktor diantaranya jumlah kasus yang terjadi hingga potensi bencana wilayahnya.

Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berupa dataran tinggi berbentuk



cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi baik dari pertanian dan daerah resapan menjadi permukiman, maupun kawasan hutan menjadi lahan pertanian musiman menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Selain itu, terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase juga berakibat pada timbulnya genangan dan banjir di beberapa titik lokasi terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung-Baleendah, Dayeuhkolot, serta jalan terusan Kopo.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh status daerah pada lokasi-lokasi tersebut yang merupakan daerah pelepasan air tanah, sehingga air tidak dapat terserap di daerah tersebut dan pada akhirnya menimbulkan banjir. Tingkat banjir dengan status tinggi terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Baleendah. Peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 2.8.

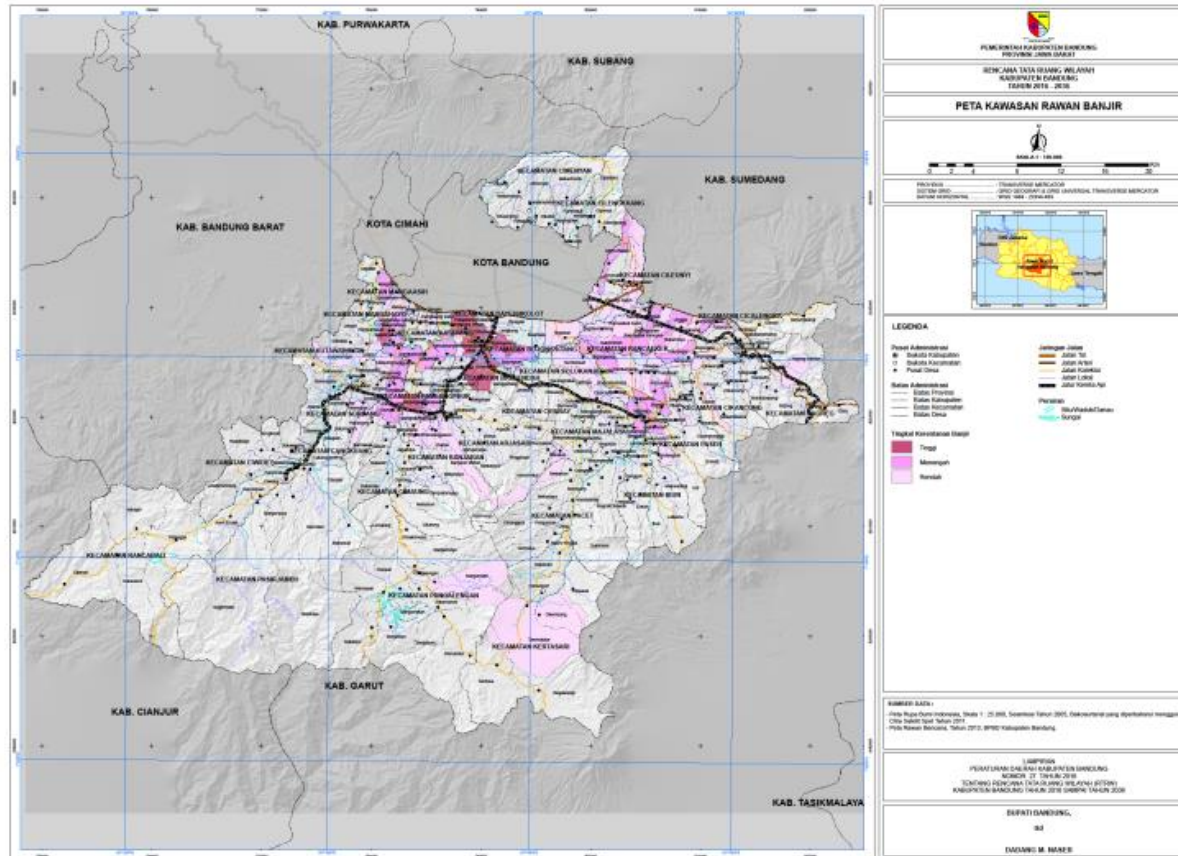
Selain itu, Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung berapi di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun, zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada zona I dan zona II, dimana bukan merupakan zona dengan tingkat ketentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di zona I bahaya gunung berapi adalah Kecamatan Kertasari, Kecamatan Ibun, dan Kecamatan Paseh. Sementara kecamatan yang berada di zona II adalah Kecamatan Kertasari dan sebagian kecil daerah di Kecamatan Ibun dan Kecamatan Paseh. Lokasi persebaran kawasan risiko gunung berapi dapat dilihat secara rinci pada Gambar 2.9.

Selain risiko bencana banjir dan gunung berapi, Kabupaten Bandung juga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tingkat risiko bencana ini cukup tinggi karena pada sebagian besar luas wilayah Kabupaten

Bandung memiliki tingkat kerentanan gempa yang tinggi dan sebagian lainnya memiliki tingkat kerencanaan menengah. Tingkat kerentanan gempa dengan status tinggi berada di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ibun, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, dan sebagian Kecamatan Rancaekek. Sementara kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan gempa dengan status menengah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.10.

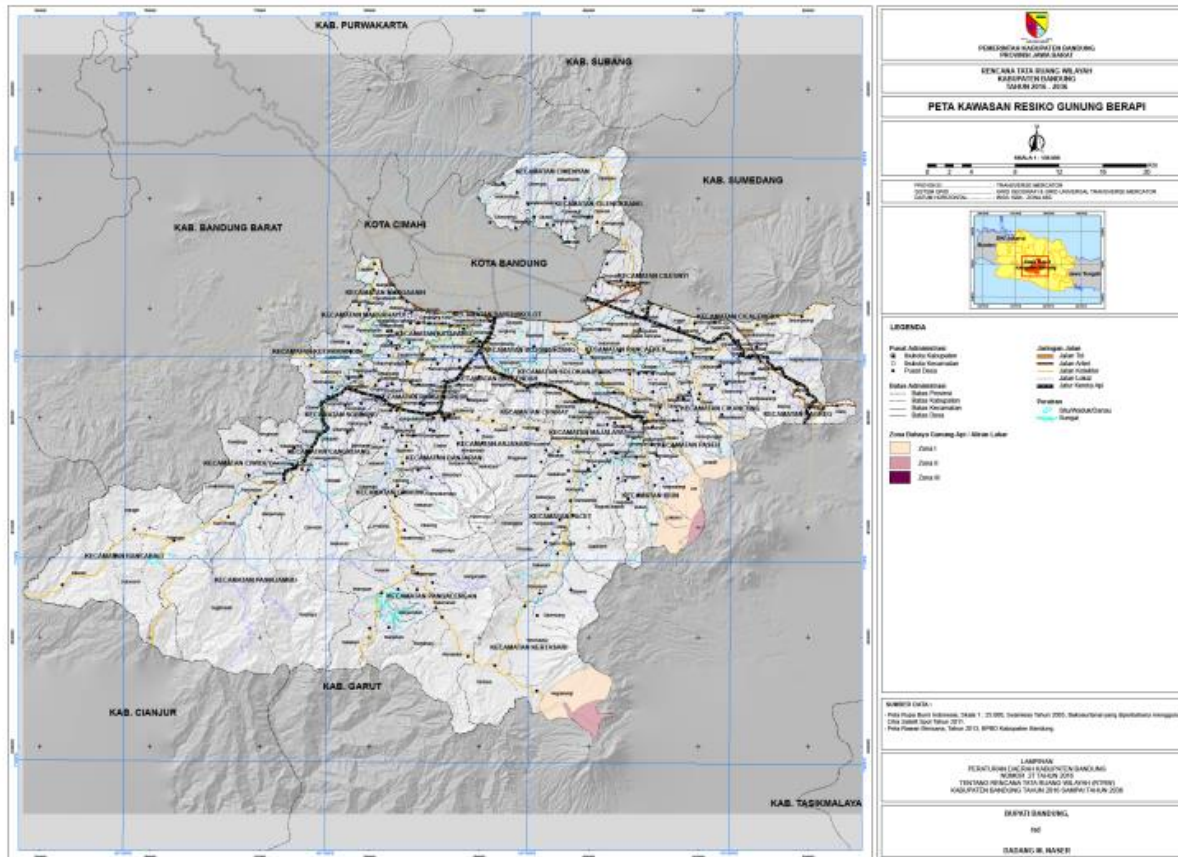
Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung adalah risiko gerakan tanah mengingat topografi dan kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dimulai dari bagian utara dengan tingkat kerentanan gerakan tanah sangat rendah, menuju bagian tengah dan selatan Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerentanan rendah dan menengah, serta beberapa kawasan di bagian selatan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

Daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi hanya terdapat sebagian kecil di daerah di Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Pasirjambu. Sementara sebagian besar daerah lainnya memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah menengah hingga sangat rendah. Secara rinci, persebaran kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.11.



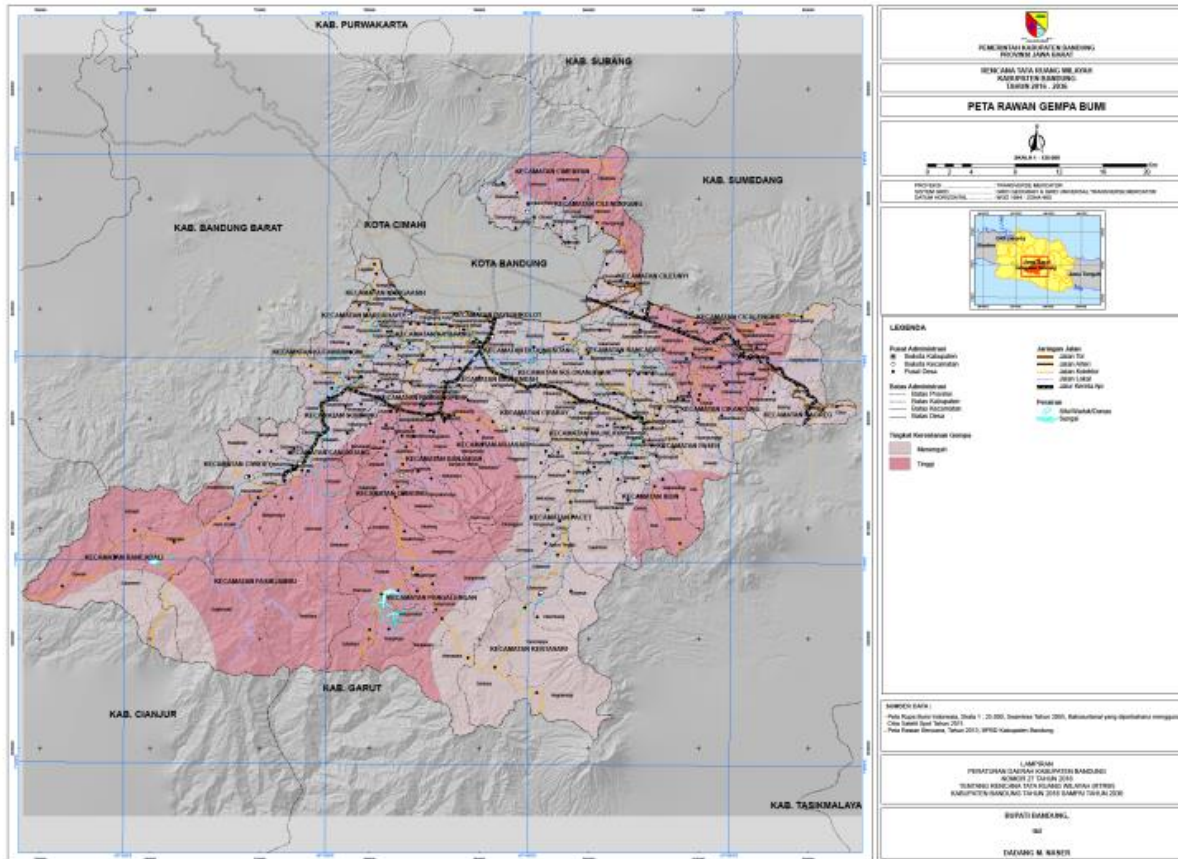
**GAMBAR 2.8.**  
**PETA KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



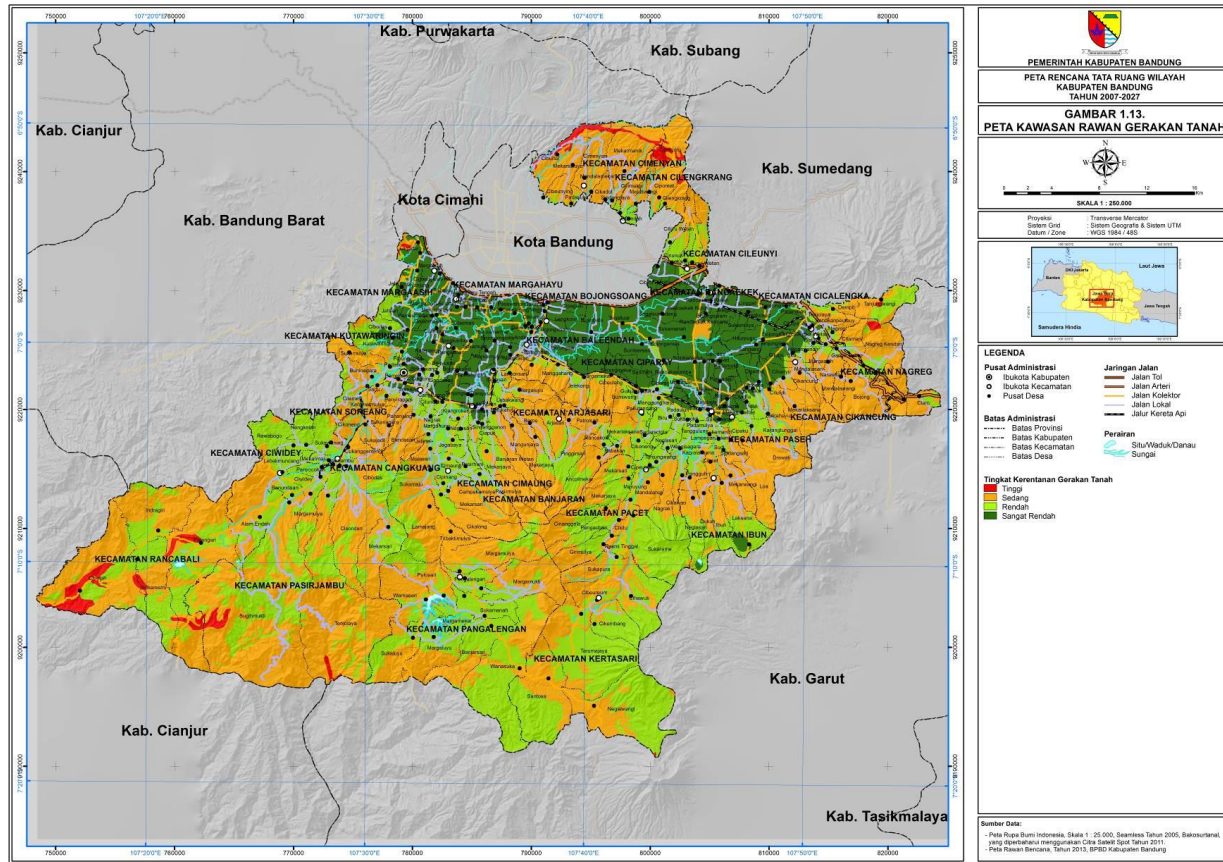
**GAMBAR 2.9.**  
**PETA KAWASAN RISIKO GUNUNG BERAPI KABUPATEN BANDUNG**  
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036





**GAMBAR 2.10.**  
**PETA RAWAN GEMPA BUMI KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



**GAMBAR 2.11. PETA RAWAN GERAKAN TANAH KABUPATEN BANDUNG**

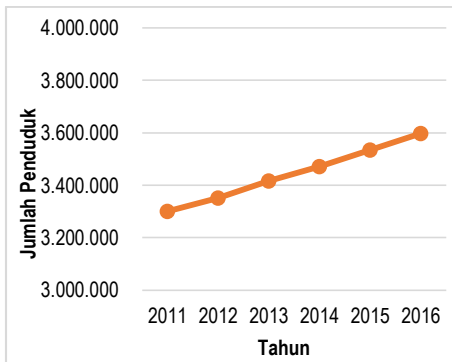
Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036





### 2.1.4. Demografi

Kabupaten Bandung merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011, penduduk Kabupaten Bandung berjumlah 3.299.988 jiwa atau sekitar 7,38% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dengan angka kepadatan penduduk sekitar 1.842 jiwa/km<sup>2</sup>. Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bandung telah meningkat menjadi sekitar 3.596.623 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.041 jiwa/km<sup>2</sup>. Meninjau perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir, *trend* perkembangan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,74% pertahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2011-2016 ditampilkan oleh Gambar 2.12.

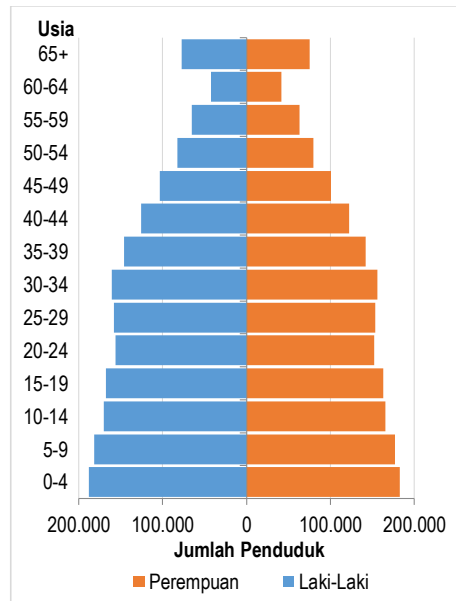


**GAMBAR 2.12.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN PENDUDUK**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-**  
**2016**

Sumber: KBDA 2011-2016, APS 2015, BPS, 2017

Ditinjau berdasarkan gender, penduduk kabupaten Bandung memiliki struktur gender yang hampir seimbang antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan. Tahun

2016, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Bandung sebesar 50,71%, sedangkan persentase penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 49,29%. Sedangkan jika ditinjau dari struktur usia, populasi penduduk Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh penduduk usia produktif dengan dependency ratio sebesar 51,15% pada tahun 2016. Dengan demikian setiap 100 penduduk produktif di kabupaten Bandung menanggung sekitar 51 Penduduk tidak produktif. Komposisi usia produktif menurut jenis kelamin pada tahun 2016 digambarkan dalam piramida penduduk berikut.



**GAMBAR 2.13.**  
**PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN**  
**BANDUNG TAHUN 2016**

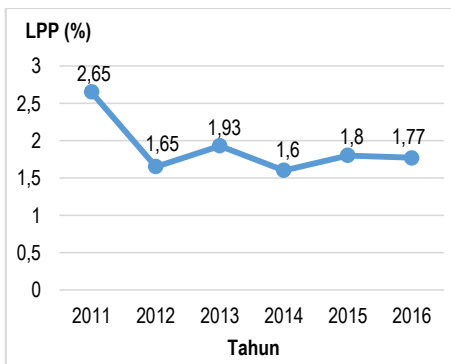
Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2017

Berdasarkan piramida penduduk di atas, tampak bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung memiliki bentuk *expansive*, yang ditandai dengan besarnya penduduk dalam kelompok umur muda terutama penduduk 0-19 tahun, serta

sedikitnya jumlah penduduk dalam kelompok usia tua. Bentuk ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang mencapai 176.238,67 ha atau 1.762,39 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu sekitar 2.041 jiwa/km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2011, kepadatan penduduk sekitar 1.872 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka kepadatan penduduk sekitar 9%.

Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2016 tercatat angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung yaitu 1,77%. Jika ditinjau pertahun, meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, namun kecenderungan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan positif seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.14.

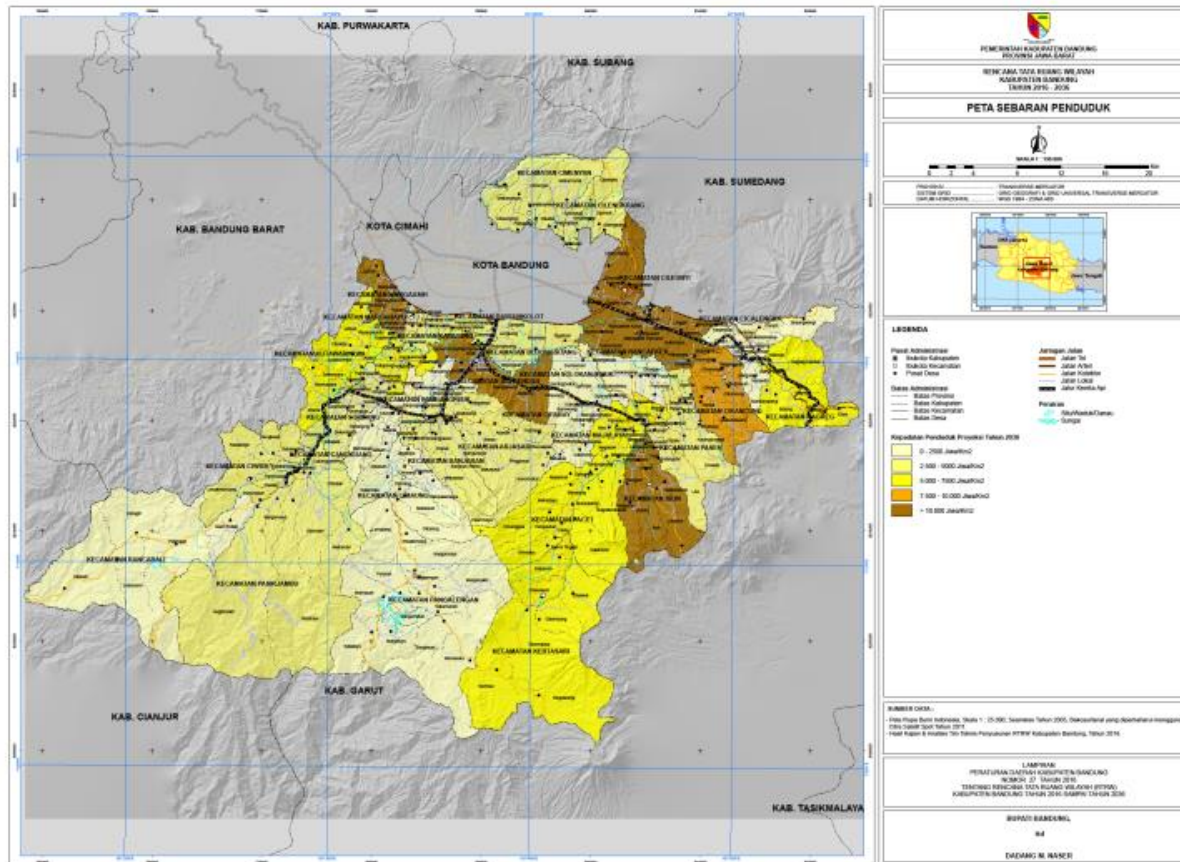


**GAMBAR 2.14.**  
**GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN**  
**PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2011-2016**

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2017

Ditinjau berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk Kabupaten Bandung cenderung terkonsentrasi di bagian utara, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, seperti Kecamatan Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, dan Cileunyi. Adapun wilayah-wilayah yang berlokasi cenderung jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Rancabali, Pasir Jambu, Kertasari, dan Pangalengan cenderung memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Di tahun 2016 tercatat Kecamatan Margahayu menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 12.405 jiwa/km<sup>2</sup>, yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Dayeuhkolot sebesar 11.021 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Margaasih sebesar 8.382 Jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu kategori kepadatan penduduk 0-2.500 jiwa/km<sup>2</sup>, 2.500-5.000 jiwa/km<sup>2</sup>, 5.000-7.500 jiwa/km<sup>2</sup>, 7.500-10.000 jiwa/km<sup>2</sup>, dan >10.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung ditampilkan dalam Gambar 2.15. dan detail informasi mengenai demografi Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.4.



**GAMBAR 2.15.**  
**PETA PERSEBARAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG**  
*Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036*



**TABEL 2.4.**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah	%	LPP (%)	Dependency Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		Muda (0-14)	Produktif (15-64)	Tua (65+)					
2012	Laki-laki	510.482	1.122.776	70.277	1.703.535	50,84			
	Perempuan	488.140	1.080.000	79.373	1.647.513	49,16			
	<b>Jumlah</b>	<b>998.622</b>	<b>2.202.776</b>	<b>149.650</b>	<b>3.351.048</b>	<b>100</b>	<b>1,55</b>	<b>52,13</b>	<b>1.901</b>
	%	29,80	65,73	4,47					
2013	Laki-laki	501.497	1.130.846	80.496	1.712.839	50,14			
	Perempuan	498.575	1.124.258	80.028	1.702.861	49,86			
	<b>Jumlah</b>	<b>1.000.072</b>	<b>2.255.104</b>	<b>160.524</b>	<b>3.415.700</b>	<b>100</b>	<b>1,93</b>	<b>51,47</b>	<b>1.938</b>
	%	29,28	66,02	4,70					
2014	Laki-laki	490.073	1.188.363	83.024	1.761.460	50,76			
	Perempuan	469.576	1.147.222	92.135	1.708.933	49,24			
	<b>Jumlah</b>	<b>959.649</b>	<b>2.335.585</b>	<b>175.159</b>	<b>3.470.393</b>	<b>100</b>	<b>1,60</b>	<b>48,59</b>	<b>1.963</b>
	%	27,65	67,30	5,05					
2015	Laki- Laki	534.003	1.189.512	69.349	1.792.864	50,73			
	Perempuan	512.389	1.148.918	79.941	1.741.248	49,27			
	<b>Jumlah</b>	<b>1.046.392</b>	<b>2.338.430</b>	<b>149.290</b>	<b>3.534.112</b>	<b>100</b>	<b>1,8</b>	<b>51,13</b>	<b>2.005</b>
	%	29,61	66,17	4,22					
2016	Laki- Laki	539.932	1.206.507	77.269	1.823.708	50,71			
	Perempuan	524.894	1.172.904	75.117	1.772.915	49,29			
	<b>Jumlah</b>	<b>1.064.823</b>	<b>2.379.411</b>	<b>152.386</b>	<b>3.596.623</b>	<b>100</b>	<b>1,77</b>	<b>51,16</b>	<b>2.041</b>
	%	29,60	66,16	4,24					

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017



## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penjelasan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum, yang dibagi secara spesifik ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga.

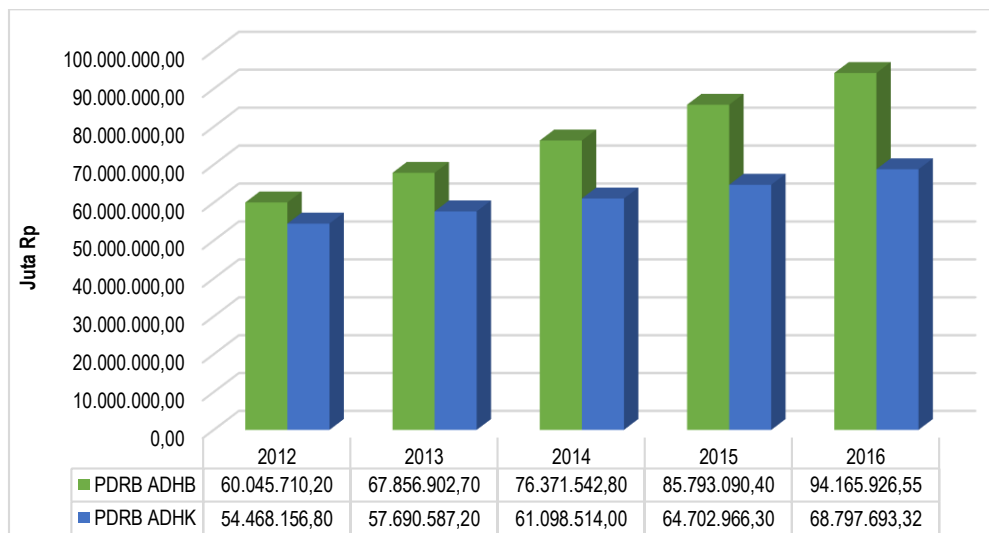
### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah sebab dari

komponen PDRB akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah yang dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan *trend* pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK berturut-turut sebesar 5,76% dan 11,90% per tahun. Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 2.16.



**GAMBAR 2.16.**  
**GRAFIK PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2017**

Sumber: BPS Kab. Bandung; LKPJ Kab. Bandung, 2017



**TABEL 2.5.**  
**NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000**

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.691.673,10	8,61	4.844.584,20	8,40	4.728.392,10	7,74	4.863.228,20	7,52	5.069.659,45	7,37
B	Pertambangan dan Penggalian	1.547.030,40	2,84	1.478.454,60	2,56	1.452.188,90	2,38	1.513.034,90	2,34	1.649.759,73	2,40
C	Industri Pengolahan	27.583.084,90	50,64	29.232.561,20	50,67	31.194.154,40	51,06	32.992.837,80	51,00	34.952.833,52	50,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	80.638,10	0,15	87.300,60	0,15	85.137,40	0,14	85.404,20	0,13	93.493,38	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.934,90	0,04	21.026,60	0,04	21.624,90	0,04	22.439,60	0,03	23.461,10	0,03
F	Konstruksi	3.242.182,60	5,95	3.524.147,80	6,11	3.847.216,10	6,30	4.129.003,40	6,38	4.439.967,50	6,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.608.564,30	13,97	8.215.856,0	14,24	8.681.126,80	14,21	9.138.154,30	14,12	9.676.959,23	14,07
H	Transportasi dan Pergudangan	1.934.075,60	3,55	2.032.834,20	3,54	2.242.870,30	3,67	2.405.115,00	3,72	2.562.252,12	3,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.318.430,70	2,42	1.390.485,40	2,41	1.455.713,00	2,38	1.559.534,90	2,41	1.660.985,60	2,41
J	Informasi dan Komunikasi	826.225,90	1,52	930.771,60	1,61	1.093.885,10	1,79	1.273.177,50	1,97	1.455.410,18	2,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.770,20	0,69	412.047,60	0,71	428.163,60	0,70	460.141,00	0,71	510.853,57	0,74
L	Real Estate	657.993,90	1,21	673.295,30	1,17	712.040,00	1,17	767.129,00	1,19	833.582,01	1,21
M,N	Jasa Perusahaan	238.678,70	0,44	255.432,20	0,44	268.150,90	0,44	291.563,50	0,45	317.112,90	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.287.662,80	2,36	1.334.376,10	2,31	1.381.517,70	2,26	1.459.064,20	2,26	1.501.702,57	2,18
P	Jasa Pendidikan	1.566.598,70	2,88	1.679.230,00	2,91	1.829.830,50	2,99	1.980.966,90	3,06	2.121.550,61	3,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	356.773,70	0,66	402.260,10	0,70	432.847,20	0,71	478.769,90	0,74	537.487,72	0,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.132.838,20	2,08	1.175.923,60	2,04	1.243.655,10	2,04	1.277.402,00	1,97	1.390.622,14	2,02
	<b>Total PDRB</b>	<b>54.468.156,80</b>	<b>100</b>	<b>57.690.587,20</b>	<b>100</b>	<b>61.098.514,00</b>	<b>100</b>	<b>64.702.966,30</b>	<b>100</b>	<b>68.797.693,32</b>	<b>100</b>
	<b>Total PDRB Tanpa Gas</b>	<b>52.952.176,60</b>	<b>97,22</b>	<b>56.242.184,10</b>	<b>97,49</b>	<b>59.674.638,80</b>	<b>97,67</b>	<b>63.211.075,00</b>	<b>97,70</b>		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung; LKPJ Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 2.6.**  
**NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**  
**ATAS DASAR HARGA BERLAKU**

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.326.175,00	8,87	5.861.571,50	8,64	6.096.791,80	7,98	6.809.055,30	7,94	7.503.285,67	7,97
B	Pertambangan dan Penggalian	1.829.360,70	3,05	1.788.536,20	2,64	1.760.364,00	2,30	1.867.979,00	2,18	2.064.735,96	2,19
C	Industri Pengolahan	29.883.859,60	49,77	34.466.754,60	50,79	39.626.723,00	51,89	44.659.612,90	52,06	49.184.397,66	52,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	80.366,00	0,13	74.936,80	0,11	75.699,90	0,10	85.047,80	0,10	109.094,43	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.805,70	0,03	22.276,60	0,03	22.955,10	0,03	24.870,80	0,03	28.257,43	0,03
F	Konstruksi	3.626.455,20	6,04	3.947.198,00	5,82	4.529.721,80	5,93	4.962.557,40	5,78	5.442.231,75	5,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.643.837,70	14,40	9.961.566,70	14,68	10.978.604,30	14,38	12.071.738,50	14,07	12.984.360,03	13,79
H	Transportasi dan Pergudangan	2.089.280,90	3,48	2.281.295,00	3,36	2.733.986,00	3,58	3.367.494,90	3,93	3.663.866,12	3,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.501.853,60	2,50	1.650.602,10	2,43	1.844.750,20	2,42	2.084.038,10	2,43	2.263.914,96	2,40
J	Informasi dan Komunikasi	810.020,70	1,35	927.398,80	1,37	1.043.808,00	1,37	1.214.306,80	1,42	1.390.045,26	1,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	392.450,30	0,65	452.639,20	0,67	492.467,20	0,64	566.854,50	0,66	649.279,15	0,69
L	Real Estate	720.740,80	1,20	764.145,30	1,13	827.348,90	1,08	920.298,00	1,07	1.013.291,49	1,08
M,N	Jasa Perusahaan	265.727,20	0,44	287.562,20	0,42	316.833,20	0,41	361.052,60	0,42	401.389,56	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.536.849,80	2,56	1.634.785,40	2,41	1.739.681,40	2,28	1.987.417,00	2,32	2.120.068,44	2,25
P	Jasa Pendidikan	1.675.628,30	2,79	1.919.573,80	2,83	2.224.296,90	2,91	2.508.549,90	2,92	2.741.260,19	2,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413.776,80	0,69	480.828,00	0,71	550.479,70	0,72	651.253,00	0,76	726.419,28	0,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.228.521,80	2,05	1.335.232,60	1,97	1.507.031,20	1,97	1.650.963,00	1,92	1.880.047,18	2,00
	<b>Total PDRB</b>	<b>60.045.710,20</b>	<b>100</b>	<b>67.856.902,70</b>	<b>100</b>	<b>76.371.542,80</b>	<b>100</b>	<b>85.793.090,40</b>	<b>100</b>	<b>94.165.926,55</b>	<b>100</b>
	<b>Total PDRB Tanpa Gas</b>	<b>58.250.901,00</b>	<b>97,01</b>	<b>66.103.092,80</b>	<b>97,42</b>	<b>74.644.969,00</b>	<b>97,74</b>	<b>83.959.891,80</b>	<b>97,86</b>		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung; LKPJ Kabupaten Bandung, 2017

Kenaikan nilai PDRB Kabupaten Bandung yang telah dipaparkan pada Gambar 2.16. secara tidak langsung ditentukan oleh adanya akumulasi input ekonomi dan perbaikan teknologi. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung kedepan antara lain dengan melakukan peningkatan pendapatan, peningkatan sektor riil yakni UMKM, peningkatan iklim investasi, peningkatan pariwisata, khususnya berbasis kemasyarakatan.

Jika ditinjau dari nilai rata-rata pertumbuhan sektor yang berkontribusi dalam PDRB Kabupaten Bandung, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai rata-rata persentase pertumbuhan kontribusi paling rendah dalam PDRB ADHK. Sementara untuk PDRB ADHB, sektor yang memiliki rata-rata persentase pertumbuhan kontribusi paling rendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Adapun sektor yang memiliki rata-rata persentase pertumbuhan kontribusi tertinggi dalam PDRB ADHK dan PDRB ADHB berturut-turut adalah pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah secara rinci berdasarkan sektor-sektornya, diperlukan analisis khusus yaitu analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA).

a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui lebih lanjut sektor perekonomian yang menjadi sektor basis (*leading sector*) perekonomian di Kabupaten Bandung, digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Penentuan sektor basis dengan analisis LQ dilakukan dengan membagi nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor di Kabupaten Bandung terhadap total PDRB Kabupaten Bandung dengan nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor provinsi terhadap total PDRB provinsi. Hasil perhitungan nilai indeks LQ untuk setiap sektor ekonomi di Kabupaten Bandung ditampilkan dalam Tabel 2.7.

**TABEL 2.7.**  
**RATA-RATA INDEKS LOCATION QUOTIENT SEKTOR DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2016**

No.	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.99	0.95	0.92	0.91	0.82	0.92
B	Pertambangan dan Penggalian	0.93	0.95	0.95	1.28	1.32	1.09
C	Industri Pengolahan	1.15	1.18	1.19	1.21	1.24	1.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	0.16	0.12	0.13	0.13	0.15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.47	0.43	0.41	0.38	0.34	0.41
F	Konstruksi	0.77	0.74	0.73	0.70	0.72	0.73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.91	0.93	0.94	0.92	0.94	0.93
H	Transportasi dan Pergudangan	0.83	0.75	0.75	0.71	0.68	0.74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.07	1.02	0.99	0.97	0.92	0.99
J	Informasi dan Komunikasi	0.55	0.57	0.55	0.54	0.52	0.55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.27	0.26	0.25	0.25	0.22	0.25
L	Real Estate	1.09	1.03	1.04	1.05	1.03	1.05





No.	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
M,N	Jasa Perusahaan	1.15	1.09	1.06	1.06	1.01	1.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.00	1.00	0.98	0.96	1.00	0.99
P	Jasa Pendidikan	1.23	1.20	1.14	1.10	1.08	1.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.17	1.24	1.15	1.09	1.02	1.13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.16	1.11	1.08	1.04	0.96	1.07

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2012 sampai 2016 terdapat tujuh sektor di Kabupaten Bandung yang memiliki nilai LQ > 1 jika dibandingkan terhadap Provinsi Jawa Barat. Sektor dengan nilai LQ > 1 terhadap Provinsi Jawa Barat antara lain meliputi sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan social; serta sektor jasa lainnya. Nilai LQ > 1 ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis Kabupaten Bandung, baik dalam lingkup perekonomian Jawa Barat. Hal ini dapat pula diartikan bahwa Kabupaten Bandung menjadi pengekspor bagi wilayah-wilayah lain di Jawa Barat.

Dari 17 sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung, sektor yang secara konstan menjadi sektor basis selama lima tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut sebagai aktor basis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung secara keseluruhan dan dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang merupakan sektor non basis.

#### b. *Shift Share Analysis*

Kinerja pertumbuhan wilayah juga dapat diukur melalui hasil analisis *shift share*. Bentuk analisis ini mempertimbangkan tiga komponen pertumbuhan yang meliputi komponen Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Konsep ini sudah memperhitungkan faktor waktu sehingga lebih bersifat dinamis dan dapat lebih menggambarkan pertumbuhan suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis *shift* Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.10. dapat diamati bahwa kolom PR atau Pertumbuhan Regional menunjukkan angka positif untuk setiap sektor. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Bandung bertumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Besaran nilai PR ini juga memberi gambaran mengenai sektor-sektor mana saja yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dari sektor lainnya. Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sektor lain di Kabupaten Bandung dengan pertumbuhan lebih cepat yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertanian, kehutanan dan



pangan. Berdasarkan hasil skor PR tersebut, maka dengan mendorong ekonomi pada tiga sektor unggulan ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung.

Kolom PP atau Pertumbuhan Proporsional menggambarkan sektor-sektor yang maju, atau tumbuh lebih cepat, serta sektor yang tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan sektor ekonomi pada lingkup wilayah di atasnya yakni provinsi. Nilai PP sektoral yang bernilai positif mengindikasikan sektor tumbuh lebih cepat dari sektor pada lingkup wilayah atasnya, sedangkan angka PP sektoral yang bernilai negatif mengindikasikan pertumbuhan sektor yang lebih lambat dari pada pertumbuhan sektor yang sama pada lingkup wilayah di atasnya. Berdasarkan hasil perhitungan PP Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat, terdapat 11 sektor di Kabupaten Bandung yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan Jawa Barat. Adapun tiga sektor dengan pertumbuhan paling cepat antara lain sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Adapun sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat jika dibandingkan pertumbuhan di sektor yang sama dalam level provinsi antara lain sektor pertambangan dan pengalihan, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor industri pengolahan yang pada komponen sebelumnya merupakan sektor yang tumbuh dengan cepat, jika dilihat berdasarkan pertumbuhan proporsional termasuk ke dalam sektor yang belum maju. Secara teori, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan subsektor

dalam permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, dan kebijakan industri. Untuk meningkatkan kemajuan sektor ini diperlukan pembenahan sistem dengan lebih baik.

Kolom PPW atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah menunjukkan daya saing suatu sektor terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih tinggi. Melalui kolom tersebut tampak bahwa beberapa sektor ekonomi Kabupaten Bandung memiliki nilai PPW positif atau memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi. Sektor industri pengolahan memiliki nilai paling baik pada pertumbuhan pangsa wilayah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan Kabupaten Bandung selain berkembang cepat di tingkat Kabupaten Bandung, juga tergolong cepat perkembangannya di tingkat Provinsi Jawa Barat.



**TABEL 2.8.**  
**PERHITUNGAN INDIKATOR-INDIKATOR SHIFT SHARE ANALYSIS KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016**

Sektor	Kabupaten Bandung (Dalam Juta Rp)		Provinsi Jawa Barat (Dalam Juta Rp)		PR	Rank	PP	Rank	PPW	Rank
	2012	2016	2012	2016						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.326.175,00	6.877.987,20	100.784.620,90	147,070,000	2,475,349,901,520.28	3	-29.301.815.745,89	12	-894.235.885.774,39	17
Pertambangan dan Penggalian	1.829.360,70	1.911.176,90	36.863.496,50	25,350,000,000	850,198,844,121.73	6	-1.421.559.133.200,32	17	653.176.489.078,59	3
Industri Pengolahan	29.883.859,60	49.645.656,80	487.760.808,00	702,140,000,000	13,888,580,250,912.90	1	-754.114.402.460,69	16	6.627.331.351.547,81	1
Pengadaan Listrik dan Gas	80.366,00	91.354,60	7.775.965,20	11,920,000,000	37,350,250,449.07	16	5.479.095.126,81	10	-31.840.745.575,88	9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampaj, Limbah dan Daur Ulang	20.805,70	25.869,40	837.627,00	1,340,000,000	9,669,488,412.62	17	2.808.884.330,98	11	-7.414.672.743,60	7
Konstruksi	3.626.455,20	5.465.372,00	88.024.137,60	134,110,000,000	1,685,401,910,787.33	4	213.262.704.439,35	4	-59.747.815.226,68	11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.643.837,70	13.437.480,30	179.461.165,10	250,300,000,000	4,017,239,914,094.50	2	-605.251.635.786,51	15	1.381.654.321.692,01	2
Transportasi dan Pergudangan	2.089.280,90	3.681.165,40	47.419.993,50	94,610,000,000	970,997,248,506.33	5	1.108.150.637.739,71	1	-487.263.386.246,04	16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.501.853,60	2.257.335,50	26.494.966,90	43,000,000,000	697,989,300,174.68	9	237.590.029.775,50	3	-180.097.429.950,18	14
Informasi dan Komunikasi	810.020,70	1.351.711,20	27.876.566,30	45,460,000,000	376,458,651,841.97	11	134.470.316.984,36	7	30.761.531.173,68	5
Jasa Keuangan dan Asuransi	392.450,30	591.236,30	27.317.166,60	46,190,000,000	182,392,018,936.03	14	88.743.316.515,64	8	-72.349.335.451,67	12
Real Estate	720.740,80	990.739,00	12.456.779,00	16,810,000,000	334,965,649,514.27	12	-83.091.229.480,26	13	18.123.779.965,99	6
Jasa Perusahaan	265.727,20	383.854,80	4.350.495,40	6,650,000,000	123,497,218,613.97	15	16.955.962.590,43	9	-22.325.581.204,40	8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.536.849,80	2.192.449,70	28.794.165,80	38,650,000,000	714,253,850,292.46	8	-188.211.980.411,20	14	129.558.030.118,74	4
Jasa Pendidikan	1.675.628,30	2.750.505,70	25.557.787,60	44,680,000,000	778,751,420,557.83	7	474.945.525.262,75	2	-178.819.545.820,57	13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413.776,80	700.269,30	6.628.823,90	12,110,000,000	192,303,550,133.33	13	149.836.102.557,47	6	-55.647.152.690,80	10
Jasa Lainnya	1.228.521,80	1.760.133,10	19.841.119,50	32,210,000,000	570,957,829,332.59	10	194.898.116.237,66	5	-234.244.645.570,25	15

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



c. Kesimpulan analisis sektoral

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bandung masih bertumpu pada sektor industri pengolahan. Dalam kurun lima tahun terakhir, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 50% terhadap total PDRB Kabupaten Bandung. Mengingat sebagian industri merupakan industri yang bersifat footloose, sedangkan di sisi lain persaingan ekonomi global semakin meningkat, maka pembangunan sektor industri, baik dari segi ketersediaan infrastruktur maupun dari segi kualitas sumber daya manusia.

Sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bandung yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi dalam lima tahun terakhir sekitar 14%. Sektor perdagangan erta kaitannya dengan distribusi barang dan jasa antara pembeli dan penjual, sehingga dalam pengembangan ke depan, eketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting bagi keberjalanan sektor ini.

Selain sektor industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Dalam lima tahun terakhir, tercatat kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Kabupaten Bandung yaitu sekitar 8%. Meskipun tren menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor ini, tetapi dari segi komposisi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung stabil sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi ketiga terhadap PDRB Kabupaten

Bandung, setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam Tabel 2.9.



**TABEL 2.9.**  
**PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016*	
		Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,61	8,87	8,40	8,64	7,74	7,98	7,52	7,94	7,20	7,31
B	Pertambangan dan Penggalian	2,84	3,05	2,56	2,64	2,38	2,30	2,34	2,18	2,25	2,03
C	Industri Pengolahan	50,64	49,77	50,67	50,79	51,06	51,89	51,00	52,06	51,29	52,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,13	0,15	0,11	0,14	0,10	0,13	0,10	0,13	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	5,95	6,04	6,11	5,82	6,30	5,93	6,38	5,78	6,44	5,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,97	14,40	14,24	14,68	14,21	14,38	14,12	14,07	14,11	14,28
H	Transportasi dan Pergudangan	3,55	3,48	3,54	3,36	3,67	3,58	3,72	3,93	3,75	3,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,50	2,41	2,43	2,38	2,42	2,41	2,43	2,40	2,40
J	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,35	1,61	1,37	1,79	1,37	1,97	1,42	2,04	1,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,69	0,65	0,71	0,67	0,70	0,64	0,71	0,66	0,69	0,63
L	Real Estate	1,21	1,20	1,17	1,13	1,17	1,08	1,19	1,07	1,18	1,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,44	0,42	0,44	0,41	0,45	0,42	0,45	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,56	2,31	2,41	2,26	2,28	2,26	2,32	2,26	2,33
P	Jasa Pendidikan	2,88	2,79	2,91	2,83	2,99	2,91	3,06	2,92	3,12	2,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71	0,72	0,74	0,76	0,73	0,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,08	2,05	2,04	1,97	2,04	1,97	1,97	1,92	1,94	1,87
	<b>Total PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*Angka Perkiraan Tim LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017

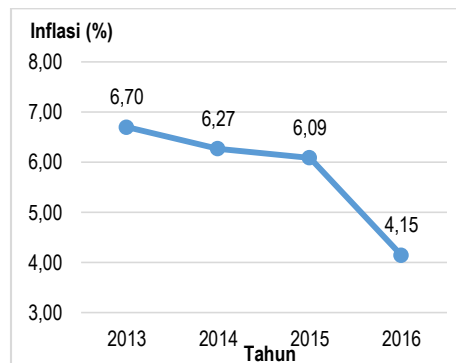
**TABEL 2.10.**  
**RATA-RATA PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Sektor	Rata-rata Pertumbuhan	
		Hk (%)	Hb (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,22	-7,96
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,82	-6,85
C	Industri Pengolahan	0,57	1,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,32	-2,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,34	-8,38
F	Konstruksi	0,97	0,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,06	1,48
H	Transportasi dan Pergudangan	0,76	-0,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,28	-1,30
J	Informasi dan Komunikasi	3,78	1,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,71	-4,82
L	Real Estate	-1,22	-1,62
M,N	Jasa Perusahaan	-0,82	-2,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,22	0,41
P	Jasa Pendidikan	2,87	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,81	-2,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-1,67	-2,59

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2017

### B. Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir inflasi di Kabupaten Bandung cenderung menurun secara stabil yang didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian. Tahun 2016 inflasi Kabupaten Bandung tercatat sebesar 4,15%, termasuk ke dalam klasifikasi inflasi ringan. Adanya penurunan ini diduga diakibatkan oleh adanya penurunan inflasi pada beberapa sektor utama. Ditinjau berdasarkan sektor penyumbang PDRB, dalam lima tahun terakhir rata-rata angka laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan, dengan rata-rata inflasi sebesar 7,58%. Tingginya laju inflasi di sektor ini lebih diakibatkan karena fluktuasi inflasi akibat adanya kenaikan harga BBM.



**GAMBAR 2.17.**  
**GRAFIK LAJU INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016



**TABEL 2.11.**  
**INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2016**

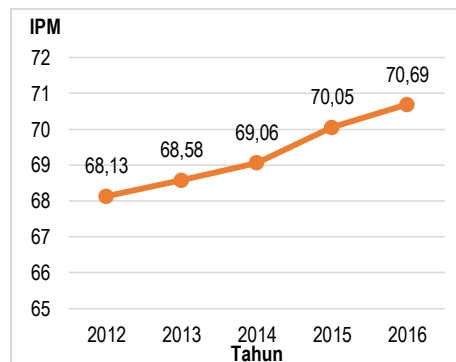
No.	Sektor	2013	2014	2015	2016*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	6,57	8,59	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	0,21	1,85	0,93
C	Industri Pengolahan	8,83	7,74	6,56	4,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-13,87	3,59	12,00	6,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,51	0,19	4,41	1,63
F	Konstruksi	0,14	5,12	2,08	3,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,73	4,30	4,46	5,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,89	8,62	14,86	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,21	6,75	5,45	3,14
J	Informasi dan Komunikasi	1,63	-4,23	-0,05	1,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	4,70	7,11	1,96
L	Real Estate	3,61	2,38	3,25	3,10
M,N	Jasa Perusahaan	1,12	4,95	4,81	1,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,65	2,79	8,17	4,74
P	Jasa Pendidikan	6,87	6,34	4,18	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	6,40	6,96	3,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,70	6,72	6,66	3,17
	<b>Total PDRB</b>	<b>6,70</b>	<b>6,27</b>	<b>6,08</b>	<b>4,15</b>

\*Berdasarkan PDRB Perkiraan Tim LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2017

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

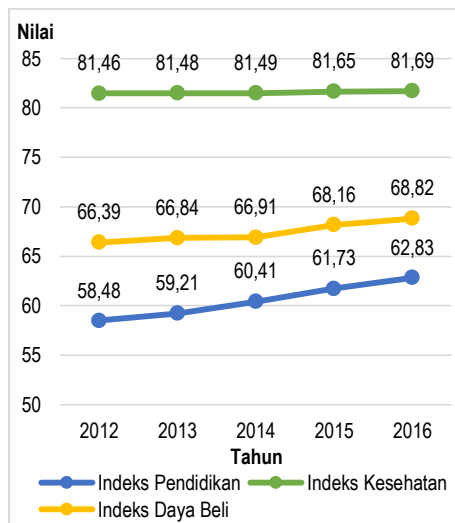
Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial, dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut antara lain adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power party*). Dengan demikian, sebagai akumulasi yang mewakili ketiga aspek ini, IPM diukur sebagai komposit dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli.



**GAMBAR 2.18.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN IPM**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.18. Selama tahun 2012-2016, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,03% per tahun, berdasarkan metode perhitungan baru. Angka pertumbuhan IPM pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berturut-turut adalah 0,66%, 0,70%, 1,43%, dan 0,91% dibandingkan dengan angka IPM pada tahun sebelumnya.



**GAMBAR 2.19.**  
**GRAFIK CAPAIAN KOMPONEN IPM**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

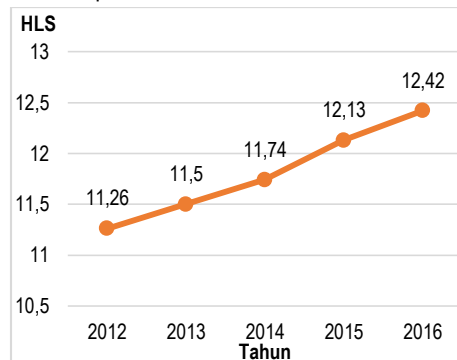
Berdasarkan perkembangan komponen IPM di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2012-2016, kenaikan nilai IPM Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh kenaikan nilai indeks pendidikan yang mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 1,81% per tahun. Adapun untuk indeks kesehatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 0,07% per tahun. Sedangkan untuk komponen indeks daya beli, pertumbuhan lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,90% per tahun.

#### A. Komponen Indeks Pendidikan

Dalam hal pengukuran indeks pendidikan, pertumbuhannya ditentukan oleh beberapa variabel. Pada penghitungan metode lama, variabel yang digunakan dalam penghitungan indeks pendidikan meliputi:

##### a. Harapan Lama Sekolah



**GAMBAR 2.20.**  
**GRAFIK HARAPAN LAMA SEKOLAH**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017

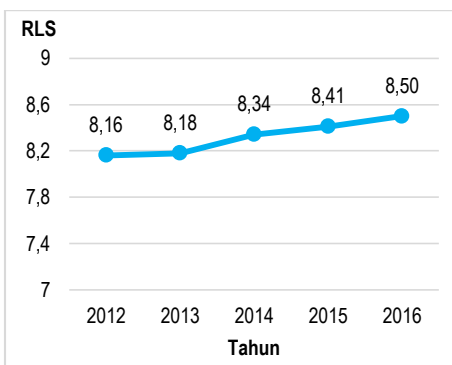
Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Bandung sebagai ukuran kondisi pembangunan sistem pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk bersekolah selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa estimasi lama sekolah penduduk Kabupaten Bandung adalah 12,42 tahun. Selama dua tahun terakhir data HLS Kabupaten Bandung sudah menunjukkan angka di atas 12 tahun, artinya diharapkan penduduk Kabupaten Bandung yang berusia 7 tahun ke atas dapat memenuhi, bahkan melampaui batas wajar dikdas 12 tahun.





b. Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, angka RLS Kabupaten Bandung sebesar 8,49. Meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi angka RLS ini masih berada di bawah wajar dikdas 12 tahun sehingga ke depannya RLS Kabupaten Bandung perlu terus didorong sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kabupaten Bandung.



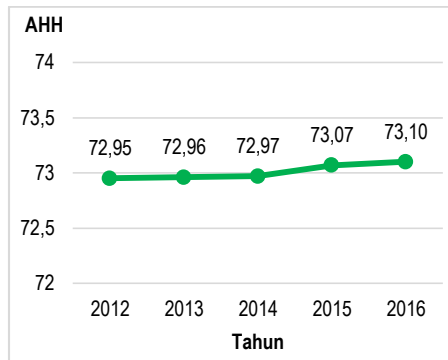
**GAMBAR 2.21.**  
**GRAFIK RATA-RATA LAMA SEKOLAH**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

**B. Komponen Indeks Kesehatan**

Kesejahteraan sosial penduduk salah satunya tercermin dari nilai indeks kesehatan. Variabel yang digunakan dalam penghitungan indeks kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan hasil evaluasi, selama kurun tahun 2012-2016, nilai indeks kesehatan Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan capaian AHH yang terus mengalami peningkatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk

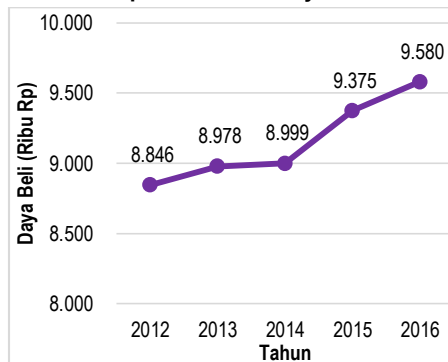
Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir semakin membaik.



**GAMBAR 2.22.**  
**GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

**C. Komponen Indeks Daya Beli**



**GAMBAR 2.23.**  
**GRAFIK DAYA BELI KABUPATEN**  
**BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Sumber: BPS Kab. Bandung, 2017; LKPJ Kab. Bandung Tahun 2016

Perkembangan daya beli penduduk Kabupaten Bandung disajikan pada Gambar 2.23. Tinggi rendahnya daya beli penduduk menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, daya beli penduduk Kabupaten Bandung cenderung



mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesejahteraan sosial penduduk yang semakin membaik.

Selain indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, kesejahteraan ekonomi penduduk juga tergambar dari indikator lain

diantaranya tingkat kemiskinan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kondisi indikator makro sosial ekonomi pembangunan Kabupaten Bandung dirangkum dalam Tabel 2.12.

**TABEL 2.12.**  
**CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015-2016**

No.	Indikator	Tahun		+/-
		2015	2016	
<b>A</b>	<b>Indikator Makro Sosial</b>			
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.534.112	3.596.623	62.511
2.	LPP (%)	1,8	1,77	-0,03
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,00	7,61	-0,39
4.	IPM (Metode Baru)	70,05	70,69	0,64
5.	RLS (th)	8,41	8,50	0,09
6.	HLS (th)	12,13	12,42	0,29
7.	AHH (th)	73,07	73,10	0,03
8.	Indeks Pendidikan (Metode Baru)	61,73	63,83	1,10
9.	Indeks Kesehatan (Metode Baru)	81,65	81,69	0,04
10.	Angka Ketergantungan	51,13	51,16	0,03
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,53		
12.	Tingkat Kesempatan Kerja	95,97		
13.	Tingkat Pengangguran	4,03		
<b>B</b>	<b>Indikator Makro Ekonomi</b>			
1.	LPE (%)	5,89	6,33*	0,44
2.	Inflasi PDRB (%)	6,09	4,15*	-1,94
3.	PDRB ADHB (juta rupiah)	85.793.090,40	94.114.297,20*	8.321.206,80
4.	PDRB ADHK (juta rupiah)	63.211.075,00	68.144.362,00*	4.933.287,00
5.	PDRB/KAP (ADHB)	24.275.714	26.167.407*	1.891.693,00
6.	PDRB/KAP (ADHK)	18.306.428	18.946.763*	640.355,00
7.	Pengeluaran (ribuan rupiah)	9.506	9.882*	376
8.	Indeks Pengeluaran	68,17	68,82	0,65

\*Angka Perkiraan Tim LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017; Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2016; LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2016



### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh global. Slogan *think globally, act locally* haruslah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tidak hanya slogan belaka. Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai kesundaan yang menjadi jati diri warga Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Bandung. Nilai-nilai kesundaan ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian Sunda, tetapi juga meliputi penggunaan Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian

merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu bidang olahraga juga dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Kebiasaan berolahraga akan menghasilkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dimana selain menyehatkan tubuh kegiatan berolahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Namun pada saat ini, olahraga belum menjadi prioritas bagi kalangan muda. Hal ini perlu mendapat penanganan serius mengingat berpotensi menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Generasi muda yang akan menjadi ujung tombak pembangunan seyogyanya merupakan generasi muda yang prima. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk memasyarakatkan kembali kebiasaan olahraga.

Pengembangan seni, budaya, dan olahraga secara tidak langsung berkorelasi positif dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang. Perkembangan sarana seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.13.

**TABEL 2.13.**  
**PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA, DAN OLARAHAGA KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2014-2015**

No	Capaian Pembangunan	2014	2015
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Terdata	684
		Terdaftar	139
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	3	2
3.	Jumlah sanggar seni	623	
4.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	74	74

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2017; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dilihat dari dua fokus



layanan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib meliputi aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang, dan perhubungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya secara merata.

#### A. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya untuk pembangunan daerah. Pelayanan pendidikan pemerintah daerah dinilai melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan meliputi:

##### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung dengan perbandingan terhadap jumlah siswa, baik pada level SD, SMP, maupun SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkat pendidikan, yakni rentang 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD/ sederajat, rentang 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat, dan rentang 16-18 tahun tingkat pendidikan SMA/ sederajat.

Secara garis besar, APS dikelompokkan ke dalam Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM menunjukkan rasio antara jumlah siswa dalam rentang usia pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah

penduduk dalam rentang usia tersebut. Sedangkan APK menunjukkan rasio antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan tertentu. Sehingga berbeda dengan APM, dalam penghitungan APK jumlah siswa yang dihitung merupakan jumlah total siswa tanpa memperhitungkan rentang usia sehingga besar kemungkinan APK memiliki nilai lebih besar dari 100%.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Secara garis besar APS tingkat SD/ sederajat di Kabupaten Bandung sudah tergolong baik dengan nilai APM dan APK di atas 90%. Adapun saat ini yang masih menjadi persoalan yaitu angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, khususnya jenjang SMA/ sederajat. Tahun 2016, nilai APM untuk jenjang SMA/ sederajat di Kabupaten Bandung baru berkisar 47,94%, sedangkan APK bernilai 59%. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang SMA/ sederajat dapat diakibatkan oleh rendahnya angka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah, yang diduga diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun



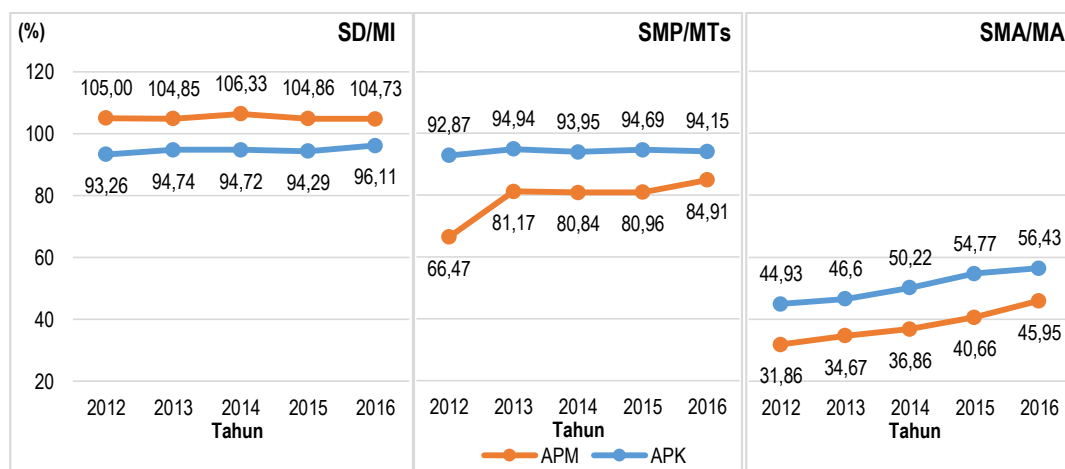
2016, lulusan SMP yang tidak melanjutkan tergolong tinggi dengan persentase sebesar 19,15%. Dengan demikian, intervensi yang dapat dilakukan adalah

peningkatan akses pendidikan menengah yang terjangkau serta peningkatan minat penduduk untuk melanjutkan ke jenjang menengah atas perlu menjadi prioritas.

**TABEL 2.14.**  
**PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	Standar	Interpretasi
<b>I. SD/MI</b>								
1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	395.113	394.941	389.681	394.209	387.863	Orang	
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	397.093	396.162	389.893	394.338	387.951	Orang	
3.	APS SD/MI	99,50	99,69	99,95	99,97	99,98	Indeks	
<b>II. SMP/MTs</b>								
1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	160.133	167.954	177.374	180.998	187.430	Orang	
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	168.281	174.344	182.833	186.440	192.883	Orang	
3.	APS SMP/MTs	95,16	96,33	97,01	97,08	97,17	Indeks	
<b>III. SMA/MA</b>								
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	63.798	70.768	73.839	82.219	95.489	Orang	
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	186.171	190.634	189.766	193.300	201.289	Orang	
3.	APS SMA/MA	34,27	37,12	38,91	42,53	47,44	Indeks	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017



**GAMBAR 2.24.**  
**GRAFIK ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017



Perkembangan angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Bandung periode tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 0,76% per tahun dan pertumbuhan rata-rata 6,68% untuk jenjang SMP/MTs, namun dengan pertumbuhan yang fluktuatif pada kedua jenjang. Sementara jenjang SMA/MA, pertumbuhan APM maupun APK terus mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata peningkatan APM sebesar 9,61% per tahun.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

Selama kurun waktu 2012-2016, rasio ketersediaan sekolah untuk sarana SD/MI cenderung berfluktuasi. Adanya tahun dimana rasio ketersediaan sekolah mengalami penurunan adalah ketika jumlah penduduk pada usia SD/MI mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan peningkatan penyediaan sarana SD/MI. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah jenjang ini terus mengalami penurunan di tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia SMP/MTs. Berbeda dengan rasio ketersediaan SMA/MA yang meningkat di setiap tahun pada periode 2012-2016. Akan tetapi rasio ketersediaan ini masih rendah, yakni baru mencapai 16,10 sekolah per 10.000 penduduk di tahun 2016.

**TABEL 2.15.**  
**RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH BERDASARKAN USIA SEKOLAH DI KABUPATEN**  
**BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. SD/MI</b>						
1.	Jumlah Sekolah	1.578	1.596	1.604	1.604	1.606
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	397.093	396.162	328.653	394.338	387.951
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 7-12	39,74	40,29	48,81	40,68	41,40
<b>II. SMP/MTs</b>						
1.	Jumlah Sekolah	456	476	478	489	493
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	168.281	174.344	176.209	186.440	192.883
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 13-15	27,10	27,30	27,13	26,23	25,56
<b>III. SMA/MA</b>						
1.	Jumlah Sekolah	269	294	312	319	324
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	186.171	190.634	186.876	193.300	201.289
3.	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Kelompok Usia 16-18	14,45	15,42	16,70	16,50	16,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017



## c. Rasio Guru/Murid

Ditinjau per jenjang pendidikan, rasio ketersediaan tenaga pengajar jenjang pendidikan SD/MI lebih rendah dibandingkan rasio ketersediaan guru SMP/MTs atau SMA/MA. Tahun 2016, ketersediaan guru SD/MI di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 420 guru per

10.000 siswa SD, jauh lebih rendah dari rasio ketersediaan SMP/MTs yang mencapai 613 dan SMA/MA sebesar 553. Rendahnya rasio ketersediaan guru SD/MI lebih disebabkan karena tenaga pengajar SD/MI sebagian besar mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus.

**TABEL 2.16.**  
**JUMLAH GURU DAN MURID JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I. SD/MI</b>						
1.	Jumlah Guru	17.097	17.069	16.944	16.763	17.063
2.	Jumlah Murid	416.951	415.578	414.578	413.501	406.319
3.	Rasio Guru/Murid	4,10	4,10	4,08	4,05	4,19
<b>II. SMP/MTs</b>						
1.	Jumlah Guru	10.988	11.205	11.266	11.416	11.140
2.	Jumlah Mrid	156.276	165.515	171.778	176.548	181.602
3.	Rasio Guru/Murid	7,03	6,76	6,55	6,46	6,13
<b>III. SMA/MA</b>						
1.	Jumlah Guru	7.736	8.212	8.783	9.017	6.284
2.	Jumlah Murid	83.648	88.828	95.288	105.879	113.596
3.	Rasio Guru/Murid	9,24	9,24	9,21	8,51	5,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2017

**B. Kesehatan**

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya tergambar dari capaian indikator-indikator di bawah ini.

## a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah posyandu terdaftar di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebanyak 4.198 unit untuk melayani jumlah balita sebanyak 289.874 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita sekitar 1:69. Artinya satu unit posyandu di Kabupaten Bandung melayani sekitar 69 balita usia 0-3 tahun. Berikut ini disajikan secara lengkap data mengenai kondisi rasio posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2016.





**TABEL 2.17.**  
**JUMLAH POSYANDU DAN BALITA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Posyandu	4.081	4.155	4.148	4.150	4.198
2.	Jumlah Balita (0-3 tahun)	287.768	269.201	277.543	289.874	289.874
3.	Rasio	1:71	1:65	1:67	1:70	1:69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

- b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk  
Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya,

semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per seribu penduduk selama empat tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan penduduk yang terjadi di tiap tahunnya, tetapi dengan kondisi sarana puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu yang jumlahnya tetap bahkan menurun di tahun 2015.

**TABEL 2.18.**  
**RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Puskesmas	62	62	62	62	62
2.	Poliklinik	24	148	148	131	131
3.	Pustu	69	86	85	78	78
<b>TOTAL</b>		<b>155</b>	<b>296</b>	<b>295</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
4.	Jumlah Penduduk	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112	3.596.623
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1:21.620	1:11.540	1:11.764	1: 13.041	1:13.272
5.	Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014; SIPD Kabupaten Bandung 2015

- c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk  
Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan

keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2015 terjadi penambahan satu unit rumah sakit swasta sehingga dibandingkan



dengan jumlah penduduk total, rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin membaik. Perkembangan capaian rasio ketersediaan rumah

sakit di Kabupaten Bandung tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.

**TABEL 2.19.**  
**JUMLAH DAN RASIO RUMAH SAKIT PER JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah Sakit Daerah	4	3	3	3	3
2.	Rumah Sakit Propinsi	0	1	1	1	1
3.	Rumah Sakit Swasta	2	2	2	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	Jumlah Penduduk	3.351.048	3.415.700	3.470.393	3.534.112	3.596.623
	Rasio	1:478.721	1:487.957	1:495.770	1: 441.764	1: 449.578

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014; SIPD Kabupaten Bandung 2015

d. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik.

anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Di Kabupaten Bandung telah banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi ini. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk cenderung mengalami penurunan. Selama tiga tahun terakhir, presentase balita gizi buruk konstan sebesar 0,03%.

**TABEL 2.20.**  
**PERSENTASE BALITA GIZI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Balita Gizi Baik	263.494	241.303	251.119	289.776	289.874
2.	Balita Gizi Buruk	99	145	97	98	98
3.	Balita Seluruhnya (Usia 0-3 tahun)	287.768	269.201	285.427	289.874	289.874
4.	Persentase :					
	a) Gizi Baik	91,56	89,64	87,98	99,97	99,97
	b) Gizi Buruk	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017; Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014; SIPD Kabupaten Bandung 2015

### C. Pekerjaan Umum

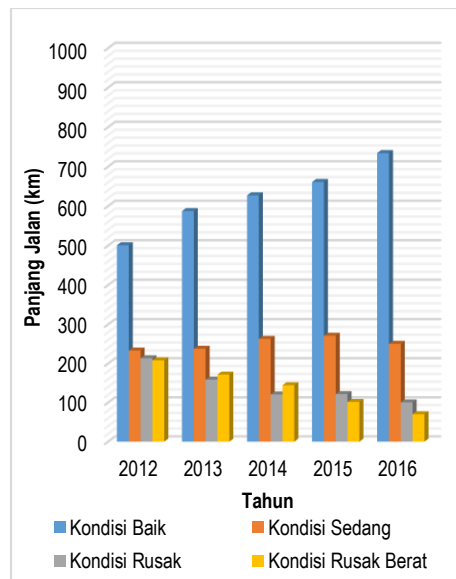
Kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum yang diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik (buatan) akan menyebabkan sulitnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yang sering dialami adalah banjir yang disebabkan tidak seimbang volume air dengan kapasitas dan fungsi sungai serta drainase. Hal ini juga yang terjadi pada kondisi jaringan transportasi dimana kapasitasnya tidak lagi mampu menampung pergerakan barang dan manusia secara ideal.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan sebagai jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama kurun waktu tahun 2012-2016, terjadi peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten. Pada tahun 2016 proporsi jalan kondisi baik tercatat sebesar 63,55%. Sedangkan kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) mencapai 85,22%.



**GAMBAR 2.25.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN PANJANG**  
**JALAN KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Bandung Tahun 2013;  
 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Kab.  
 Bandung Tahun 2013-2014

**TABEL 2.21.**  
**PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	500,78	587,416	627,11	661,16	734,22
2.	Kondisi Sedang	233,06	237,735	262,98	271,00	250,36
3.	Kondisi Rusak	213,46	158,724	120,75	121,58	100,49
4.	Kondisi Rusak Berat	208,05	171,472	144,52	101,66	70,27



No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Jalan secara keseluruhan</b>	<b>1.155,34</b>	<b>1.155,35</b>	<b>1.155,35</b>	<b>1.155,4</b>	<b>1.155,345</b>
6.	Proporsi Kondisi Baik (%)	43,34	50,84	54,28	57,22	63,55
7.	Proporsi Kondisi Sedang (%)	20,17	20,58	22,76	23,46	21,67
8.	Proporsi Kondisi Rusak (%)	18,48	13,74	10,45	10,52	8,70
9.	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	18,01	14,84	12,51	8,80	6,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2013, Data Pokok Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2015; SIPD 2016; LKPJ 2016

b. Proporsi Jumlah Jembatan

Jembatan berperan penting dalam menghubungkan daerah-daerah yang kemudian dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah yang dapat memperlancar distribusi barang dan jasa. Dengan demikian keberadaan jembatan

sekaligus akan mendukung perekonomian wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi, selama selang tahun 2014-2016 proporsi jembatan kondisi baik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016, proporsi jembatan baik di Kabupaten Bandung sebesar 88,45%.

**TABEL 2.22.**  
**PROPORSI JEMBATAN BERDASARKAN KONDISI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik (unit)	582	663	675	703	781
2.	Kondisi Rusak (unit)	222	178	220	164	102
	<b>Jumlah Keseluruhan* (unit)</b>	<b>804</b>	<b>841</b>	<b>895</b>	<b>867</b>	<b>883</b>
4.	Proporsi Kondisi Baik (%)	72,39	82,46	78,67	81,93	88,45
5.	Proporsi Kondisi Rusak (%)	27,61	17,54	21,33	18,07	11,55

\*Berdasarkan hasil pendataan tahun berjalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

c. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Bandung sebagian besar berfungsi untuk mendukung sektor pertanian, khususnya pertanian lahan basah. Jaringan ini meliputi baik jaringan irigasi teknis maupun jaringan irigasi non teknis. Ditinjau berdasarkan persentasenya, jaringan irigasi di Kabupaten Bandung cenderung didominasi oleh jaringan irigasi non teknis, dengan rata-rata persentase dalam lima

tahun terakhir sebesar 96,90% dan sisanya merupakan jaringan irigasi teknis.

Dari segi panjang jaringan irigasi, dalam kurun tahun tahun 2012-2016, terjadi fluktuasi panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bandung, baik untuk irigasi teknis maupun irigasi non teknis. Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam Tabel 2.23.



**TABEL 2.23.**  
**KONDISI JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Kewenangan	Kondisi	2012 (km)	2013 (km)	2014 (km)	2015 (km)	2016 (km)
1.	Kabupaten Bandung (Teknis)	Baik	25,51	25,98	9,01	15,93	16,93
		Rusak Ringan	6,87	6,59	6,75	7,57	7,03
		Rusak Berat	3,80	3,61	15,46	4,88	4,43
		<b>Total</b>	<b>36,18</b>	<b>36,18</b>	<b>34,68</b>	<b>28,38</b>	<b>28,39</b>
2.	Kabupaten Bandung (Non Teknis)	Baik	791,60	797,43	378,81	607,51	610,13
		Rusak Ringan	211,45	207,96	378,81	359,16	358,77
		Rusak Berat	81,33	78,99	29,80	272,36	270,12
		<b>Total</b>	<b>1.084,38</b>	<b>1.084,38</b>	<b>787,42</b>	<b>1.239,03</b>	<b>1.239,02</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

Ditinjau berdasarkan luas areal irigasi, khusus irigasi teknis, irigasi dengan luas areal 0-25 ha pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah desa. Adapun untuk irigasi dengan luas areal >25 ha pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten. Dari total area irigasi seluas ±19.520,12 ha di tahun 2016, dengan 85,41% diantaranya atau ±16.671,81 ha merupakan areal irigasi kewenangan desa. Adapun sisanya yaitu sebesar 14,59% atau ±2.848,31 ha merupakan areal irigasi kewenangan kabupaten.

Untuk irigasi non teknis dikelompokkan menjadi irigasi non teknis kewenangan kabupaten dengan luas areal <1.000 ha, irigasi non teknis kewenangan provinsi dengan luas areal 1.000-3.000 ha, serta irigasi non teknis kewenangan provinsi yang berupa irigasi lintas. Pada tahun 2016, dari total areal irigasi non teknis seluas ±46.592,40 ha, hanya 24,77% atau ±11.542,04 ha yang merupakan kewenangan kabupaten. Adapun untuk irigasi non teknis kewenangan provinsi, areal irigasi dengan luasan 1.000-3.000 ha

mencakup sekitar 16,67% atau sekitar ±7.765,12 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, diantaranya DI Leuwikuya, DI Cirasea, DI Wangisagara, DI Wanir, dan DI Ciyasana. Sedangkan untuk irigasi yang bersifat lintas irigasi, memiliki cakupan areal terluas dengan persentase 58,56% dari total luasan irigasi non teknis atau sekitar 27.285,24 ha yang tersebar di beberapa daerah irigasi, antara lain DI Leuwikuya, DI Malang, DI Lagadar, DI Sudiplak, DI Mengger, DI Depok, DI Ciranjeng, DI Ciare, DI Buang Batu, dan DI Ciateul. Berikut rincian luas area dan persentase luas irigasi yang dikelompokkan berdasarkan irigasi non teknis dan irigasi teknis Kabupaten Bandung dalam Tabel 2.24.



**TABEL 2.24.**  
**KONDISI AREAL IRIGASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016**

No	Areal Irigasi	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
<b>A. Irigasi Non Teknis</b>			
1.	Kewenangan Desa dengan Areal 0 – 25 Ha	2.848,31	14,59
2.	Kewenangan Kabupaten dengan Areal > 25 Ha	16.671,81	85,41
	<b>TOTAL</b>	<b>19.520,12</b>	<b>100</b>
<b>B. Irigasi Teknis</b>			
1.	Kewenangan Kabupaten dengan Areal < 1.000 Ha	11.542,04	24,77
2.	Kewenangan Provinsi dengan Areal 1.000 – 3.000 Ha	7.765,12	16,67
3.	Kewenangan Provinsi (Irigasi Lintas)	27.285,24	58,56
	<b>TOTAL</b>	<b>46.592,40</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

d. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan ke dalam drainase primer, sekunder, dan tersier. Jaringan drainase primer terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai lintas wilayah administratif yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara ke Laut Jawa. Dalam sektor drainase, Kabupaten Bandung memiliki peran strategis, Sungai Citarum merupakan muara bagi anak-anak sungai yang ada di Cekungan Bandung.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005, 2010, dan 2014. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.

Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Bojongsoang, Baleendah, Banjaran, dan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Kecamatan Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Canguang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, dan Cileunyi. Diharapkan pada tahun 2015, kondisi genangan air hasil dari luapan Sungai Citarum di lokasi-lokasi tersebut dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Dalam lingkup Kabupaten Bandung, Aliran Sungai Citarum menjadi muara bagi empat Sub DAS, antara lain sub DAS Citarik, Sub DAD Cirasea, Sub DAS Ciwidey dan Sub DAS Cisangkuy. Kendati demikian, drainase Kabupaten Bandung pada dasarnya turut pula dipengaruhi oleh drainase Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yaitu dari aliran Sub DAS Cikapundung dan Ciminyak. Berikut ini Tabel 2.25. dan Tabel 2.26 memuat informasi mengenai kondisi DAS Citarum dan Sub DAS Citarum.



**TABEL 2.25.**  
**KONDISI DAS CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG**

DAS/SUB DAS	Panjang (km)	Daerah Tangkapan (ha)	Debit Rata- Rata (m <sup>3</sup> /tahun)	Debit (m <sup>3</sup> /detik)
Citarum	269	268.130	14 milyar	a. Debit di Majalaya: Q50= 3,505 m <sup>3</sup> /detik Q80=0,764 m <sup>3</sup> /detik Q90 = 0,69 m <sup>3</sup> /detik b. Debit di Dayeuhkolot: Q50 = 5,105 m <sup>3</sup> /detik Q80 = 1,24 m <sup>3</sup> /detik Q90 = 0,60 m <sup>3</sup> /detik c. Debit di Nanjung: Q50=33,975m <sup>3</sup> /detik Q80 = 10,32 m <sup>3</sup> /detik Q90 = 8,77 m <sup>3</sup> /detik

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk RTRW Kabupaten Bandung

**TABEL 2.26.**  
**KONDISI SUB DAS CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG**

Sub DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m <sup>3</sup> /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
Citarik	22.952	17.295	5.657	10,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Cikancung</li> <li>- Kecamatan Cileunyi</li> <li>- Kecamatan Cilengkrang</li> <li>- Kecamatan Bojongsoang</li> <li>- Kecamatan Cicalengka</li> <li>- Kecamatan Nagreg</li> <li>- Kecamatan Rancaekek</li> <li>- Kecamatan Cimencyan</li> </ul>
Cirasea	38.110	37.219	891	22,1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Kertasari</li> <li>- Kecamatan Pacet</li> <li>- Kecamatan Ibun</li> <li>- Kecamatan Majalaya</li> <li>- Kecamatan Paseh</li> <li>- Kecamatan Solokanjeruk</li> <li>- Kecamatan Ciparay</li> <li>- Kecamatan Baleendah</li> </ul>
Ciwidey	22.169	-	-	12,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Rancabali</li> <li>- Kecamatan Ciwidey</li> <li>- Kecamatan Pasirjambu</li> <li>- Kecamatan Soreang</li> </ul>





Sub DAS	Luas (Ha)			Air Limpasan Permukaan (m <sup>3</sup> /detik)	Cakupan Wilayah
	Total	Di Kabupaten Bandung	Di Kabupaten Lain		
					- Kecamatan Katapang - Kecamatan Canguang - Kecamatan Kutawaringin
Cisangkuy	34.159	-	-	17,7	- Kecamatan Pangalengan - Kecamatan Cimaung - Kecamatan Arjasari - Kecamatan Pamengpeuk - Kecamatan Banjaran - Kecamatan Canguang - Kecamatan Baleendah

Sumber: Laporan Akhir Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk RTRW Kabupaten Bandung

Disamping drainase primer, kondisi drainase di Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh drainase sekunder dan drainase tersier berupa drainase permukiman. Belum terintegrasinya serta belum optimalnya kualitas saluran

drainase permukiman menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir tahunan di Kabupaten Bandung. Secara umum kondisi drainase di Kabupaten Bandung ditampilkan pada Tabel 2.27.

**TABEL 2.27.**  
**PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	353,32	368,03	400,43	446,49	521,60
2.	Panjang Drainase yang dipakai bangunan liar	264,96	275,99	300,29	334,83	391,20
3.	Panjang Total Drainase	626,09	652,16	709,57	791,19	924,28
4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

#### D. Perumahan Rakyat

Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Rasio Perumahan Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni  
Perumahan dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap

insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Pada tahun 2012 dan 2013, luas perumahan layak



huni di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2009-2011 dimana luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 13.008,50 ha.

Sedangkan luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung sebesar 14.297,30 ha dengan kata lain sebesar 88,22% luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung didominasi oleh permukiman layak huni. Jumlah unit rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 714.492 unit rumah dari jumlah rumah tangga yang ada sebesar 865.623 rumah tangga, yakni 85,88% rumah tangga di Kabupaten Bandung menempati rumah layak huni.

Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas permukiman layak huni menjadi seluas 14.909 ha dari total luas wilayah permukiman sebesar 16.395 ha. Hal ini berarti persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas wilayah permukiman telah mencapai 90,94%. Tahun 2015, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu sekitar 148,5 ha. Kondisi ini sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan, sedangkan Disperkimtan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan.

Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air, dan sumur dalam. Sementara sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi, juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal, serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinasikan oleh LKMD atau KPPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Disperkimtan belum menjangkau seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya diharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 dimana pada tahun 2010 jumlah jiwa yang mendapatkan akses air bersih hanya mencapai 320.269 jiwa, meningkat di tahun 2013 yang mencapai 402.795 jiwa. Pada tahun 2015, cakupan akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan tercatat sebesar 13,45 %. Nilai ini tergolong masih rendah, namun demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi *trend* peningkatan cakupan layanan air bersih perdesaan di Kabupaten Bandung.



**TABEL 2.28.**  
**JUMLAH PENDUDUK YANG MENDAPATKAN AKSES AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa)	353.536	402.795	437.890	459.250
2.	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa)	334.435	358.909	381.418	408.482
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.476.240	3.494.026
4.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (%)	9,98	10,55	10,97	11,69
5.	Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%)	10,55	11,84	12,58	13,45

*Sumber: PDAM Tirta Raharja, 2016; Disperkimtan Kabupaten Bandung, 2016*

- c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi  
Rumah tinggal bersanitasi yaitu rumah tinggal yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar/tinja. Rumah tinggal beakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun lima

tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman antara lain sebanyak 1.888.276 jiwa atau sekitar 53,43% dari total jumlah penduduk. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi bersuspek aman diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuang akhir yang terstandar, baik itu berupa septic tank individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem on-site maupun IPAL bagi pengolahan limbah sistem off-site. Gambaran persentase rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.29.

**TABEL 2.29.**  
**PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang bersuspect aman (jiwa)	1.746.300	1.790.375	1.849.372	1.888.276	2.061.620*
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.470.393	3.534.112	3.596.623
3.	Akses aman terhadap sanitasi (%)	52,11	52,63	53,29	53,43	57,32

\*Data SIPD 2016, 515.405 Rumah Tangga, asumsi 1 Rumah Tangga terdiri dari 4 jiwa

*Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017*

**E. Penataan Ruang**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan  
Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun persentase bangunan ber-IMB di Kabupaten Bandung semakin meningkat, terutama pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

**TABEL 2.30.**  
**RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	21.045	74.588	74.902	75.262
2.	Jumlah Bangunan	865.623	1.014.799	1.015.151	1.015.517
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1/2*100)	2,43%	7,35%	7,38%	7,41%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2016

- b. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB  
Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung. Ketersediaan RTH dalam kota berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi

juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30%, dimana 10% diantaranya adalah RTH privat (RTH yang berada di lahan milik pribadi) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2016 sudah mencapai 53,96 ha atau 0,22% dari luas wilayah perkotaan seluas 24.150,49 ha. Artinya, capaian luas RTH publik di Kabupaten Bandung masih jauh dari standar kebutuhan RTH yang seharusnya sebesar 52.871 Ha. Berikut ini disajikan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Bandung dalam Tabel 2.31.



**TABEL 2.31.**  
**RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN PER SATUAN WILAYAH DI KABUPATEN**  
**BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24,150	28,980	41,055	46,290	53,961
2.	Luas wilayah (Perkotaan)	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49	24.150,49
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah		0,10	0,12	0,17	0,19	0,22

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

#### F. Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah

Kabupaten Bandung. Selanjutnya membuat strategi untuk mencapai tujuan, maka disusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kedua tabel di berikut.

**TABEL 2.32.**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Indikator/Data	2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1.	Ketersediaan Dokumen RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	√		√		√		√		√	
2.	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	√		√		√		√		√	
3.	Ketersediaan Dokumen RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perbup	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.33.**  
**PENJABARAN PROGRAM RPJMD DALAM RKPD DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)
2012	156	150	104,00
2013	157	150	104,67
2014	160	156	102,56
2015	162	160	101,25
2016	165	177	93,22

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

**G. Perhubungan**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

**a. Rasio Izin Trayek**

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Bandung wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian

trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sebanyak 2.401 izin. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2014). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.34.**  
**RASIO IZIN TRAYEK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Trayek Perkotaan	421	468	2.672	2.174
2.	Izin Trayek Perdesaan	0	0	0	227
	<b>Jumlah Izin Trayek</b>	<b>421</b>	<b>468</b>	<b>2.672</b>	<b>2.401</b>
3.	Jumlah Penduduk	3.351.048	3.415.700	3.290.437	3.534.112
	<b>Rasio Izin Trayek</b>	<b>1:7.960</b>	<b>1:7.299</b>	<b>1:1.231</b>	<b>1: 1.472</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2016; SIPD, 2015

**b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten Bandung baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.



**TABEL 2.35.**  
**JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Angkutan Umum	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	15.810	11.572	73,19	38.111	29.054	76,24	10.238	7.992	78,06	2.401	1.198	49,89	2.401		
2	Mobil bus	2.815	3.085	109,59	1.033	1.008	97,58	942	744	78,98	-	62	-	-		
3	Mobil barang	22.439	16.975	75,65	11.448	10.705	93,51	32.769	32.095	97,94	22.503	261	1,16	18.752		
4	Kereta gandengan	225	2	0,89	18	13	72,22	16	2	12,50	174	-		174		
5	Kereta tempelan	225	1	0,44	22	13	59,09	35	23	65,71	1.312	-		1.312		
<b>Jumlah</b>		<b>41.514</b>	<b>31.635</b>	<b>76,20</b>	<b>50.632</b>	<b>40.793</b>	<b>80,57</b>	<b>44.000</b>	<b>40.856</b>	<b>92,85</b>	<b>26.390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2017; SIPD 2015





c. Persentase Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang

Mengacu pada data pokok perencanaan tahun 2014, jumlah angkutan darat yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yaitu sekitar 2.672 unit. Sedangkan jumlah total penumpang angkutan darat di tahun yang sama yaitu sebanyak 193.807 jiwa. Dengan demikian, satu unit angkutan umum melayani sekitar 1,38 % penumpang angkutan darat.

#### H. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Industri

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Status penataan pengendalian pencemaran lingkungan pada kegiatan industri di Kabupaten Bandung tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.36.**  
**STATUS PENATAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Pengendalian Pencemaran Air				
	- Jumlah industri yang dipantau (menghasilkan air limbah)	175	162	177	173
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas air limbah dan melaporkan secara rutin	60%	60% (pengujian) 58% (pelaporan)	62% (pengujian) 62% (pelaporan)	76% (pengujian) 62% (pelaporan)
	- Petaatan Pengendalian Pencemaran Air	57%	55%	56%	54%
2.	Pengendalian Pencemaran Udara				
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan emisi)	189	189	191	191
	- Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	80%	85 %	86%	88%
	- Petaatan Pengendalian Pencemaran Udara	77%	85%	86%	87%
3.	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3				
	- Jumlah industri yang dipantau (menimbulkan limbah B3)	174	195	201	207



No	Uraian	2012	2013	2014	2015
	- Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan pengelolaan limbah B3	61%	54%	50%	35%
	- Petaatan Pengelolaan Limbah B3	50%	44%	45%	43%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2016

b. Kualitas Air Sungai dan Kualitas Udara

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



**TABEL 2.37.**  
**PENGUJIAN AIR DAN UDARA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Pengujian Kualitas Air Sungai</b>					
Lokasi Pengujian	70 lokasi, 3x pengujian	75 lokasi, 3 x pengujian	75 lokasi, 3x pengujian	68 lokasi, 3x pengujian 7 lokasi 12x pengujian	68 lokasi, 3x pengujian 7 lokasi, 12x pengujian
Status Mutu Air	93% cemar berat	100% cemar berat	Storet 100% Cemar berat IP=41% Cemar berat	Storet 100% Cemar berat IP=53% Cemar berat	
	7% cemar sedang	-	59% cemar sedang	47% cemar sedang	
Skor Storet Terburuk	S. Cisuminta Hilir (-123), S. Cibaligo (-111), S. Cikacembang hilir (-110)	S. Cipadaulun (-131) S. Cibaligo Hilir (-126) S. Cisuminta hilir (-123) S. Cicurugdogdog (-117) S. Cipadaulun hilir (-115) S.Cikacembang hilir (-109)	S. Cisuminta (-140) S. Cipadaulun setelah Cikacembang (-134)	S. Cibaligo Hilir (-286) S. Cisuminta Hilir (-286)	
<b>Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk</b>					
- BOD		486 mg/L	1.245 mg/L	642 mg/L	
- COD	508 mg/L	415 mg/L	1.920 mg/L	1.280 mg/L	
	640 mg/L	575 mg/L			
<b>Pengujian Kualitas Udara Ambien</b>					
Lokasi Pengujian	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	4 lokasi; 10 titik	6 lokasi; 13 titik	
Parameter Tidak Memenuhi Baku Mutu	Kebisingan 85,59 dB	Kebisingan 72,23 dB	Kebisingan 70,56 dB		
	TSP (debu) 636 µg/m <sup>3</sup> , dan 318 µg/m <sup>3</sup>	TSP (debu) 309 µg/m <sup>3</sup> , dan 282 µg/m <sup>3</sup>	TSP (debu) 240 µg/m <sup>3</sup>	TSP (debu) 11.162 µg/m <sup>3</sup> , dan 243 µg/m <sup>3</sup>	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2017



Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99 % berstatus mutu “cemar berat” dan hanya 1-4 % berstatus “cemar sedang”. Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata antara lain fecal coliform, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr6+.

Status “cemar berat” ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu fecal coliform. Fecal coliform pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan.

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi).

Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.

c. Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa

Kerusakan hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup luas, melalui kemerosotan keanekaragaman

hayati, banjir, longsor, kekeringan, penurunan kualitas tanah dan air hingga perubahan iklim ditingkat global yang saat ini kita hadapi.

Tantangan bagi kita semua untuk mengendalikan kerusakan hutan dan lahan tersebut melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Di sisi lain kegiatan produksi biomassa yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga dapat menurunkan mutu dan fungsinya, pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah tersebut terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk produksi biomassa secara normal. Salah satu jenis pelayanan minimal bidang lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota adalah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

**TABEL 2.38.**  
**PERSENTASE PENCAPAIAN SPM PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN TANAH**  
**UNTUK PRODUKSI BIOMASSA (% PI-SKT) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pencapaian SPM	80	100	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2017

d. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Kabupaten Bandung memiliki 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan yang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 6.763 m<sup>3</sup> per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 2.112 m<sup>3</sup> per hari (31,23%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebanyak 68,77% yang belum terangkut/terbuang ke TPSA. Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Bandung secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2010-2015.

**TABEL 2.39.**  
**PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m <sup>3</sup> )	947	1.056	986,16	912,16
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m <sup>3</sup> )	6.936	6.936	5.918,05	4.296,3
3.	Persentase	13,65	15,22	16,66	21,22

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sebanyak 48 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung TPSS tersebut

sebesar 76,80 ton. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,022 ton.



**TABEL 2.40.**  
**RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPSS (unit)*	42	45	48	91
2.	Jumlah Daya Tampung TPSS (m <sup>3</sup> )	252	270	280	364
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.351.048	3.401.984	3.490.691	3.494.062
4.	Rasio Daya Tampung TPSS terhadap Jumlah penduduk	1:27,5	1:25,6	1:12,2	1:19,23

\*Lokasi TPSS ada di pasar dan pabrik

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

#### I. Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di

daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

**TABEL 2.41.**  
**PERSENTASE LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (ha)	Luas Wilayah Kabupaten Bandung (ha)	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)
2012	40.758	176.239	23,13
2013	42.751	176.239	24,26
2014	1.429.071	176.239	81,02
2015	1.512.294	176.239	85,80

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, 2017

#### J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum lingkungan yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil salah satunya ditunjukkan oleh persentase penduduk yang memiliki

administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini dijabarkan lagi ke dalam empat bentuk catatan sipil, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta lahir, dan akta nikah.

**TABEL 2.42.**  
**RASIO PENDUDUK BER-KTP PER SATUAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
2012	2.348.092	3.156.448	74,14
2013	1.975.553	2.014.804	98,05
2014	2.012.105 (e-KTP)	2.707.121	75,62



Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
2015	1.995.516	2.301.817	86,69
2016	2.133.363	2.397.045	89,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.43.**  
**RASIO PENDUDUK BER-KK PER SATUAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga
2012	294.685	1.169.794	100
2013	406.579	1.208.376	40,00
2014	583.289	1.288.438	66,30
2015	840.454	1.636.878	68,69
2016	956.805	1.137.816	84,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.44.**  
**RASIO CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2012	1.835.801	3.064.366	59,91
2013	1.975.800	3.404.549	58,03
2014	2.081.674	3.462.971	60,11
2015	2.188.127	3.494.469	62,62
2016	2.276.697	3.512.189	64,82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.45.**  
**PENERBITAN AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-**  
**2016**

Tahun	Realisasi Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Target Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim
2012	150	100	150
2013	185	150	123,33
2014	343	150	228,66
2015	372	350	106,28
2016	358	380	94,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, 2017





### K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

#### a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.46.**  
**PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2010-2013**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	701.392	603.912	706.412	707.132
2.	Jumlah pekerja perempuan	908.102	911.907	1.073.746	1.074.841
3.	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	51	51	52	52

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Bandung, 2017

### L. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka

partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

**TABEL 2.47.**  
**RASIO AKSEPTOR KB DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2012	517.007	638.141	81,02
2013	539.345	658.143	81,95
2014	550.087	669.469	82,17
2015	555.205	679.239	81,73
2016	580.334	703.383	82,51

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Bandung, 2017

### M. Sosial

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

#### a. Penanganan PMKS Fakir Miskin

Pada tahun 2014, pemerintah semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial fakir miskin. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah



PMKS fakir miskin yang ditangani terhadap total PMKS fakir miskin yang ada, yaitu sebesar 18,66%. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari dua tahun

sebelumnya, dimana persentase penanganan PMKS fakir miskin hanya mencapai 0,35% pada tahun 2012 dan 0,57% pada tahun 2013.

**TABEL 2.48.**  
**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIR MISKIN**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2014**

Tahun	Jumlah PMKS FM yang Tertangani	Jumlah PMKS FM yang Ada	Penanganan PMKS FM (%)
2012	830	238.224	0,35
2013	643	113.740	0,57
2014	39.792	213.293	18,66

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2017

b. Penanganan PMKS Anak Terlantar  
Pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar di Kabupaten Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PMKS anak

terlantar yang ada, yaitu sebesar 7,43%. Hal ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya, dimana persentase penanganan PMKS anak terlantar hanya mencapai 3,68% pada tahun 2012 dan 1,05% pada tahun 2013.

**TABEL 2.49.**  
**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR DI**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

Tahun	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Tertangani	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Ada	Penanganan PMKS Anak Terlantar (%)
2012	610	16.577	3,68
2013	238	22.592	1,05
2014	985	13.260	7,43
2015	783	10.098	7,75

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2017

c. Jumlah Sarana Sosial  
Meninjau *trend* ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bandung tampak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah unit sarana sosial. Untuk unit panti asuhan, dari semula tahun 2012 tersedia 61 unit panti asuhan, pada tahun 2015 berkurang menjadi sekitar 45 unit. Demikian halnya dengan panti jompo, meskipun sempat terjadi peningkatan ketersediaan unit panti

jompo di tahun 2012, namun pada tahun 2015 unit ketersediaan kembali berkurang menjadi hanya 1 unit panti. Berbeda dengan panti asuhan dan panti jompo, untuk sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA terjadi peningkatan sebanyak 2 unit sarana. Hal ini diduga dipicu seiring makin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bandung.



**TABEL 2.50.**  
**JUMLAH SARANA SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2012	61	1	0
2013	61	1	0
2014	51	2	0
2015	45	1	2

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung, 2017

#### N. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

##### a. Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap usia angkatan kerja (15 tahun ke atas).

Berdasarkan hasil Sakernas 2014, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.628.076 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia kerja yang tercatat sebanyak 2.460.982 jiwa. Hal ini

menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sebesar 66,16%.

##### b. Pengangguran

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yaitu indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, dalam lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung terus mengalami perbaikan. Dari angka 10,15% di tahun 2013, TPT Kabupaten Bandung menurun menjadi 4,03% di tahun 2015.

**TABEL 2.51.**  
**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013-2015**

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013	124.555	1.226.670	10,15
2014	138.045	1.628.076	8,48
2015	60.368	1.498.733	4,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin

besar rasio daya serap PMA/PMDN maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Meski dari segi pengangguran, angka TPT di Kabupaten Bandung terus mengalami perbaikan, lain halnya dengan penyerapan



tenaga kerja. Rasio daya serap Tenaga kerja di Kabupaten Bandung cenderung mengalami penurunan. Tahun 2012 tercatat rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bandung sebesar 350 tenaga kerja per unit PMA/PMDN. Angka ini terus mengalami penurunan, hingga tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja menjadi sekitar 308 tenaga kerja per unit PMA/PMDN. Meninjau kondisi rasio daya

serap tenaga kerja Kabupaten Bandung lima tahun terakhir, dalam rangka peningkatan pembangunan sektor ketenagakerjaan, perlu ada kebijakan untuk mendorong peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Informasi detail mengenai perkembangan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.52.

**TABEL 2.52.**  
**RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	211.316	216.112	218.677	214.381
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	604	646	677	696
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	350	335	323	308

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

#### O. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

##### a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi, rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Jumlah koperasi pada kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, ditinjau dari produktivitas koperasi, kinerja koperasi di Kabupaten Bandung masih tergolong rendah. Dari total koperasi yang telah terbangun, selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 50% koperasi yang berstatus koperasi aktif. Meninjau potensi koperasi terbangun, maka perlu upaya mendorong kinerja koperasi, serta menghidupkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif. Informasi mengenai perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.53.

**TABEL 2.53.**  
**PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	820	870	888	964	861
2.	Jumlah koperasi	1.560	1.593	1.610	1.686	1.722
3.	Persentase koperasi aktif (%)	52,56	54,61	55,16	55,98	55,74

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2017

##### b. Jumlah UKM Non BPR/LKMUUKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif



yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan

kapasitas. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah koperasi dan pelaku UMKM. Berikut informasi mengenai jumlah pelaku UMKM dan jumlah koperasi di Kabupaten Bandung.

**TABEL 2.54.**  
**JUMLAH PELAKU UKM DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pelaku UKM	7.894	8.432	9.003	9.615	24.459
2.	Koperasi	1.560	1.593	1.610	1.686	1.722

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2017

c. Jumlah Omzet

Jumlah omzet menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Omzet koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung

mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah semakin berkembang tiap tahunnya.

**TABEL 2.55.**  
**JUMLAH OMZET KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Kegiatan	Omzet				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Koperasi	663.592.871.075	673.546.764.141	684.323.516.386	684.323.516.386	684.323.516.386
2.	UMKM	3.084.145.158.000	3.089.449.828.528	3.094.869.600.625	3.099.772.278.625	3.106.363.027.825

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, 2017

**P. Penanaman Modal**

Realisasi investasi di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Ditinjau dari jumlah proyek, tahun 2016 proyek PMDN di Kabupaten Bandung berjumlah 2.240 proyek. Jumlah ini menurun dibandingkan jumlah proyek PMDN pada tahun 2012 yang mencapai 3.190 proyek. Berbanding terbalik dengan sektor PMDN, sektor PMA Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan. Jumlah PMA di Kabupaten Bandung tahun 2016 berjumlah 67 proyek, meningkat dua kali lipat dari tahun 2012 yang hanya mencapai 38 proyek.

Fluktuasi jumlah proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap nilai realisasi investasi. Ditinjau dari segi nilai realisasi investasi, meskipun sempat terjadi penurunan dari tahun 2012 ke 2013, nilai investasi kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Tahun 2016 total realisasi investasi di Kabupaten Bandung tercatat sebesar Rp 8.175.002.462.846,-.

Informasi detail mengenai jumlah proyek dan realisasi investasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.56. sebagai berikut.



**TABEL 2.56.**  
**JUMLAH INVESTASI PMDN DAN PMA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Proyek			Realisasi Investasi			Penyerapan Tenaga Kerja	
	PMDN	PMA	Total	PMDN	PMA	Total	Indonesia	Asing
2012	3.190	38	3.228	4.470.565.958.912	1.816.712.696.913	6.287.278.655.825	57.180	114
2013	2.462	6	2.468	7.304.235.269.502	944.138.205.500	8.248.373.475.002	52.806	62
2014	2.502	32	2.534	5.472.067.707.548	803.058.396.105	6.275.126.103.653	51.828	65
2015	2.631	67	2.698	5.964.221.569.580	3.454.165.551.237	9.418.387.120.817	66.869	144
2016	2.240	67	2.307	5.297.733.143.668	2.877.269.319.178	8.175.002.462.846	67.027	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2017

#### Q. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan cerminan jati diri masyarakat pada suatu daerah. Pelestarian budaya diupayakan melalui pemeliharaan benda-benda, situs, dan kawasan cagar budaya, serta

penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Berikut ini merupakan data mengenai benda-benda cagar budaya yang dilestarikan serta data perkembangan kesenian di Kabupaten Bandung dalam kurun tahun 2012-2016.

**TABEL 2.57.**  
**BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)
2012	11	50	22
2013	108	108	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2017

#### R. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

##### a. Jumlah Organisasi Pemuda

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Bandung terdapat 59 organisasi pemuda berdasarkan data tahun 2015 dengan total

kegiatan kepemudaan sebanyak 29 kegiatan.

##### b. Jumlah Organisasi Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga. Pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Bandung selain dimotori oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga juga dimotori oleh masyarakat umum yang diwadahi dalam klub dan organisasi olah raga. Tahun 2015, tercatat



terdapat sebanyak 100 klub olah raga dan 90 organisasi olah raga.

### S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

#### a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara

dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Selama kurun lima tahun terakhir, rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan secara signifikan.

**TABEL 2.58.**  
**RASIO JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah polisi pamong praja	80	85	262	346	365
Jumlah penduduk	3.351.048	3.415.700	3.404.549	3.534.112	3.596.623
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,24	0,25	0,77	0,98	1,01

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2017

#### b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas Pemda untuk memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**TABEL 2.59.**  
**RASIO JUMLAH LINMAS PER 10.000 PENDUDUK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Linmas	5.560	5.600	5.600	5.600	5.600
Jumlah penduduk	3.351.048	3.415.700	3.404.549	3.534.112	3.596.623
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	16,59	16,39	16,45	15,84	15,84

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2017





**T. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, dan Persandian**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya:

a. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.60.  
PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I.</b>	<b>Penegakan Perda</b>					
1.	Jumlah Pelanggaran Perda	40	64	110	122	160
2.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	40	64	110	122	160
3.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100
<b>II.</b>	<b>Penegakan K3</b>					
1.	Jumlah Pelanggaran K3	61	94	187	943	1.020
2.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	61	94	187	943	1.020
3.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bandung, 2017

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu, data IKM dapat menjadi bahan

penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

**TABEL 2.61.  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013**

Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2013	Mutu Pelayanan	Kinerja Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2012
Kesehatan	74,48	B	Baik	73,53
Ekonomi	72,81	B	Baik	74,33
Administrasi Penduduk	73,79	B	Baik	70,85



Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2013	Mutu Pelayanan	Kinerja Bidang Pelayanan	Nilai IKM Konversi 2012
Ketenagakerjaan	75,56	B	Baik	71,93
Sanitasi	75,21	B	Baik	73,64
Kebersihan	74,08	B	Baik	75,22
Pendidikan	72,47	B	Baik	70,56
Rata-rata IKM Kabupaten Bandung	74,06	B	Baik	72,87

Sumber: Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bandung, 2017

#### U. Ketahanan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan dapat diindikasikan dengan:

##### a. Ketersediaan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk di wilayah yaitu berdasarkan jumlah ketersediaan energi dan zat gizi per-orang per hari.

Berdasarkan SPM Ketahanan Pangan, kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia adalah 2.200 kkal, kebutuhan protein sebesar 57 gram, dengan jumlah Skor (PPH) sebesar 100. Realisasi dan target capaian skor PPH Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

**TABEL 2.62.**  
**REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KETERSEDIAAN PANGAN**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Pangan hewani	21,6	22,0	22,5	23,0	23,5
4.	Minyak dan lemak	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7
5.	Buah/Biji berminyak	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8
6.	Gula	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Sayur dan buah	10,3	14,2	18,2	22,1	26,1
8.	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total PPH</b>		<b>73,9</b>	<b>79,1</b>	<b>84,3</b>	<b>89,6</b>	<b>94,8</b>

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017

##### b. Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan (NBM), pada tahun 2014 jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung sudah mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini ditandai dengan Angka Ketersediaan Energi (AKE) dan dan Angka

Ketersediaan Protein (AKP) yang melebihi angka kecukupan gizi ketersediaan pangan (ketersediaan energi sebesar 106,3% AKE dan ketersediaan protein 158,6% AKP), walaupun keberagamannya masih belum ideal ditandai dengan skor PPH tahun 2014 sebesar 86,60. Dari data tersebut, rata-rata penduduk Kabupaten



Bandung mengkonsumsi bahan makanan energi yang melebihi standar kecukupan

gizi, namun konsumsi terhadap bahan makanan yang berprotein masih kurang.

**TABEL 2.63.**  
**REALISASI DAN TARGET CAPAIAN SKOR PPH KONSUMSI PANGAN**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Kelompok Pangan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Konsumsi Energi (%AKE)	116,1	109,7	106,3	214,9
2.	Konsumsi Protein (%AKP)	151,9	141,2	158,6	105,9
<b>Total PPH</b>		<b>97,6</b>	<b>98,7</b>	<b>86,60</b>	<b>78,9</b>

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017

#### V. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya:

- a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat

sejahtera, maju dan mandiri. Jika di tahun-tahun sebelumnya jumlah PKK mengalami peningkatan, di tahun 2016 jumlah PKK mengalami penurunan dengan persentase PKK yang aktif hanya berkisar 90,80%. Namun jumlah kelompok binaan PKK yang ada di tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Informasi lengkap mengenai kelompok binaan PKK di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.64.

**TABEL 2.64.**  
**KELOMPOK BINAAN PKK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah PKK	4.158	64.591	66.748	65.800	56.809
	Jumlah PKK Aktif	4.158	64.591	66.748	65.800	51.582
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	90,80
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	1.014	58.631	1.161	1.120	5.227
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,24	0,60	0,02	0,18	0,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2017

- b. Jumlah LSM yang Aktif  
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi

peningkatan jumlah LSM, baik jumlah LSM terdaftar maupun jumlah LSM aktif. Tahun 2015, sekitar 92 LSM terdaftar di Kabupaten Bandung memiliki status aktif.



**TABEL 2.65.**  
**JUMLAH LSM AKTIF DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LSM terdaftar	271	271	n/a	286	265
2.	Jumlah LSM tidak aktif	8	42	n/a	22	32
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	263	229	38	264	233

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Bandung, 2017

#### W. Statistik

Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2012-2016.

**TABEL 2.66.**  
**KETERSEDIAAN DOKUMEN STATISTIK DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√			√	√		√	
2.	IPM	√		√			√	√		√	
3.	Suseda		√		√		√		√		√
4.	KBDA	√			√		√	√		√	
5.	Indeks Gini Ratio		√		√		√		√		√
6.	Input Output		√		√		√		√		√
7.	IKM	√		√	√		√		√		√
8.	IHK		√		√		√		√		√
9.	Data Pokok	√		√		√		√		√	

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

#### X. Kearsipan

Dalam hal kearsipan, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung telah menerapkan kearsipan secara baku. Informasi detail disajikan pada Tabel 2.67. Namun demikian, jumlah arsiparis di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung masih terbatas. Tahun 2016, jumlah arsiparis justru mengalami penurunan. Informasi perkembangan jumlah arsiparis di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.68.

**TABEL 2.67.**  
**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Perangkat Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Badan	9	9	9	9	9
2.	Dinas	14	14	14	14	14



No.	Perangkat Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Bagian	10	10	10	10	10
4.	RSUD	3	3	3	3	3
5.	Lembaga Teknis Daerah	4	4	4	4	4
6.	Kecamatan	31	31	31	31	31
7.	Kelurahan	9	9	9	9	9
8.	Desa	60	60	60	60	60
Total		140	140	140	140	140

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.68.**  
**JUMLAH ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No.	Indikator/Data	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Arsiparis Penyelia	3	3	3	7	7
2.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	2	2	2	7	6
3.	Arsiparis Pelaksana	13	13	13	4	3
4.	Arsiparis Pertama	-	-	-	-	1
Total		18	18	18	18	17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2017

#### Y. Komunikasi dan Informatika

Dari aspek komunikasi dan informatika, sejak tahun 2013 seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung telah dilengkapi akses terhadap internet. Dalam mendukung kelancaran transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, beberapa sistem informasi lokalpun terus dikembangkan dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Selama kurun

lima tahun, terus terjadi peningkatan jumlah sistem informasi. Tahun 2012, jumlah sistem informasi di Kabupaten Bandung berjumlah 38 unit. Pada tahun 2016, jumlah sistem informasi tersebut telah meningkat menjadi sebanyak 69 unit. Secara detail, informasi mengenai jumlah ketersediaan sarana/ prasana komunikasi dan informasi di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.69.

**TABEL 2.69.**  
**JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA/PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Surat Kabar	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	28	72	72	72	72
2.	Jumlah sistem informasi yang ada	38	38	38	61	71
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	5	5	5	5	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2017



## Z. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, diantaranya:

### a. Jumlah Perpustakaan

Salah satu sarana pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yaitu sarana perpustakaan. Perpustakaan selain berperan dalam mencerdaskan siswa sekolah, juga berperan untuk mencerdaskan masyarakat secara umum, terutama dengan berkembangnya perpustakaan masyarakat di Kabupaten Bandung. Memandang pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan pendidikan warga, dalam kurun 2012-2016 pemerintah Kabupaten Bandung

senantiasa terus melakukan pembangunan perpustakaan, baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan masyarakat.

Meskipun dalam selang tahun 2012-2014 pembangunan perpustakaan di Kabupaten Bandung sempat mengalami stagnasi, tetapi mulai tahun 2015 terjadi pembangunan perpustakaan secara signifikan. Dalam rentang tahun 2015-2016, pemerintah Kabupaten Bandung bekerjasama dengan masyarakat dan LSM telah berhasil membangun sebanyak 100 unit perpustakaan baru di Kabupaten Bandung. Informasi detail disajikan pada Tabel 2.70.

**TABEL 2.70.**  
**JUMLAH PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Jenis Perpustakaan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perpustakaan Desa/Kelurahan	276	276	276	276	276
2.	Perpustakaan SD	33	33	33	43	66
3.	Perpustakaan SMP	37	37	37	47	64
4.	Perpustakaan SMA/SMK	15	15	15	25	40
5.	Perpustakaan SKPD	8	8	8	18	28
6.	Perpustakaan PONTREN	17	17	17	27	37
7.	Perpustakaan Masyarakat (TBM, RUPIN, dsb)	15	15	15	25	50
Total		401	401	401	461	561

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2017

### b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Minat baca masyarakat di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bandung. Tahun 2012, persentase kunjungan ke perpustakaan sekitar 27,96% dari cakupan jumlah populasi yang

harus dilayani. Pada tahun 2016, persentase kunjungan ke perpustakaan telah meningkat menjadi 92,73% dari total populasi yang harus dilayani. Informasi detail mengenai jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.71.



**TABEL 2.71.**  
**JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan ke perpustakaan	10.951	24.684	25.345	34.672	55.072
2.	Populasi yang Harus Dilayani	39.157	40.000	40.000	40.000	59.388

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung, 2017

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri atas beberapa urusan, di antaranya:

#### A. Pertanian dan Peternakan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Indikator Pertanian. Perkebunan, dan Hortikultura  
Indikator pertanian, perkebunan, dan hortikultura Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.72.

**TABEL 2.72.**  
**INDIKATOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I.</b>	<b>Jumlah pencapaian produktivitas komoditas (kw/ha)</b>					
1.	Padi	63,66	64,33	62,87	64,77	63,64
<b>II.</b>	<b>Luas areal pengembangan hortikultura unggulan (ha)</b>					
1.	Alpukat	18	27	36	45	64
2.	Strawberry	3	6	8	12	87
3.	Jeruk	3	4	5	6	225
4.	Jambu biji	3	4	5	6	12
5.	Krisan	4.000	7.000	9.500	12.000	14.600
6.	Sedap malam	2.000	3.000	4.000	5.000	11.205
7.	Mawar	0	500	1.000	1.000	308
<b>III.</b>	<b>Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)</b>	<b>2,01</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,43</b>	<b>2,74</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas hortikultura</b>					
1.	Sayuran (kw/ha)	198,13	204,07	210,19	216,50	253,92
2.	Buah-buahan (kw/ha)	98,00	100,00	102,00	104,00	124,23
3.	Tanaman hias (tangkai/ha)	13,53	16,81	17,14	17,48	28,87
4.	Tanaman obat (kw/ha)	3,07	3,13	3,19	3,25	3,30

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017

b. Indikator Peternakan

Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi *trend* peningkatan dalam persentase

penanggulangan ternak prioritas. Tahun 2016 tercatat persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi





sebesar 32%. Hal ini diikuti dengan peningkatan pencapaian status kesehatan hewan menjadi sebesar 74,30% di tahun 2016, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 4,5% per tahun selama kurun lima tahun terakhir. Secara umum peningkatan

persentase capaian indikator peternakan mengindikasikan adanya peningkatan kualitas peternakan di Kabupaten Bandung. Informasi detail mengenai capaian indikator peternakan Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.73.

**TABEL 2.73.**  
**INDIKATOR PETERNAKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	20,00	24,00	28,00	32,00	32,00
2.	Status kesehatan hewan (%)	62,50	63,75	67,40	67,40	74,30
3	Kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (%)	45,69	68,16	116,11	131,34	131,34
4.	Pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)	40	48	66	200	200
5.	Pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	167	147	88	587	587
6.	Sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	63,54	63,95	69,5	79	83,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017

#### B. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kehutanan. Praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kritis Sabilulungan merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai pencapaian indikator Kehutanan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2012-2016.

**TABEL 2.74.**  
**INDIKATOR KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah luas lahan kritis yang tertanami (ha)	13.538,66	4.415,00	32.057,80	24.542,50	703
2.	Persentase luas lahan kritis yang tertanami (%)	32,86	63,72	66,37	66,37	67,08



No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Jumlah kelompok agroforestry	35	40	45	50	50
4.	Jumlah kelompok tani berbasis Aneka Usaha Kehutanan	35	40	45	50	50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017

### C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu sebagai berikut.

#### a. Energi

Potensi energi di Kabupaten Bandung terdiri dari panas bumi (geothermal), mikrohidro, biogas (limbah ternak), bahan bakar nabati (limbah organik) dan tenaga surya (PLTS).

##### - Panas Bumi

Terdapat 5 wilayah pengembangan yaitu wilayah Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Cibuni, dan Darajat. Perolehan DBH panas bumi Kabupaten Bandung Tahun 2013 sebesar Rp.51.718.860.646,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.105.298.055.081,55, dan tahun 2011 sebesar Rp.53.860.362.127,00.

##### - Ketenagalistrikan

Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik PLN sebanyak 731.428 KK atau sekitar 82,86% dari total jumlah KK. Pemenuhan listrik penduduk Kabupaten Bandung, disamping dipenuhi oleh listrik PLN juga dipenuhi oleh tenaga mikro hidro. Tahun 2014 tercatat jumlah pengguna energi mikro hidro di Kabupaten Bandung sebanyak 34 KK (Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu) dan pengguna energi surya sebanyak 150 KK masing-masing sebanyak 50 KK yang

terletak di Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg, Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan, dan Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu.

##### - Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Bandung umumnya bergerak di kegiatan hilir yaitu SPBU sebanyak 50 unit usaha dan agen LPG sebanyak 52 agen.

#### b. Sumber Daya Mineral

Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi sumber daya pertambangan dan sumber daya air tanah.

##### - Pertambangan

Keberadaan sumber daya mineral di Kabupaten Bandung berupa andesit, tanah urug, dan emas yang tersebar di Kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk, dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif.

Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengelolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan



konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Pada tahun 2014 jumlah luasan pertambangan berijin sebesar 91,56%.

- Sumber Daya Air Tanah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'one basin one management'. Menurut

hasil penelitian dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung-Soreang adalah 368,5 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m<sup>3</sup>.

**TABEL 2.75.**  
**INDIKATOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga miskin	14,15	20,34	38,55	40,48
2.	Persentase luasan pertambangan berijin (%)	89,77	90,65	91,56	92,48
3.	Rata-rata pemakaian air tanah per sumur setiap bulan (m <sup>3</sup> /sumur)	16.954,97	16.885,17	17.845,21	17.206
4.	Persentase ketersediaan peta zonasi kerentanan gerakan tanah	62,50	75,00	100	71

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung, 2016

**D. Pariwisata**

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar didominasi oleh wisata alam dan agro. Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Rancaupas, Tebing Keraton, Curug Cinulang.

Banyaknya objek wisata di Kabupaten Bandung membangkitkan perekonomian Kabupaten Bandung. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata antara lain menumbuhkan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta peningkatan terhadap mitra kerja pariwisata. Informasi detail mengenai capaian indikator capaian pariwisata di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.76.

**TABEL 2.76.**  
**INDIKATOR CAPAIAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	5.645.569	6.234.555	1.650.000	1.723.001



No	Indikator	2012	2013	2014	2015
2.	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	45	50	55	80
3.	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	1.224	1.312	1.442	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2016

**E. Kelautan dan Perikanan** Kabupaten Bandung selama kurun waktu Berikut adalah gambaran secara tahun 2011-2015. lengkap mengenai indikator perikanan di

**TABEL 2.77.**  
**INDIKATOR PERIKANAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan (kelompok)	126	186	294	726
2.	Pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (orang)	34	49	79	199
3.	Masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan kawasan budidaya (pokmaswas)	3	3	9	9
4.	Kelestarian ikan diperairan umum (lokasi)	18	27	40	144
5.	Pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)	35	50	84	84
6.	Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (orang)	197	10	n/a	47

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, 2017

**F. Perdagangan** sektor paling besar ketiga setelah sektor industri dan pertanian. Perkembangan sektor perdagangan Kabupaten Bandung tahun 2012-2015 dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selama kurun lima tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan reatoran menjadi

**TABEL 2.78.**  
**INDIKATOR CAPAIAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penyelesaian kasus dalam fasilitasi advokasi perlindungan konsumen	10	35	20	17
2.	Jumlah nilai eksporbarang dan jasa (US \$)	833.686.178,32	821.019.618,92	777.105.000.000	508.950.000



No	Indikator	2012	2013	2014	2015
3.	Jumlah Pasar tradisional yang sudah ditata	5	7	2	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2017

### G. Perindustrian

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi

besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

**TABEL 2.79.**  
**PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

Tahun	Industri Kecil		Industri Menengah	Industri Besar	Total
	Non Formal	Formal			
2012	4.070	7	3	14	4.094
2013	3.927	140	270	302	4.639
2014	4.085	424	37	44	4.590
2015			207	117	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, 2017

### H. Transmigrasi

Transmigrasi yang terjadi di Kabupaten Bandung terbatas meliputi transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang disponsori dan dibiayai oleh pemerintah. Berdasarkan perkembangannya, dalam kurun lima tahun terakhir jumlah transmigrasi umum di Kabupaten Bandung terus mengalami

penurunan. Penurunan jumlah transmigran ini sejalan dengan telah meningkatnya taraf kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Informasi mengenai perkembangan jumlah transmigrasi di Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 2.80.

**TABEL 2.80.**  
**JUMLAH TRANSMIGRASI MENURUT JENIS DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Jenis Transmigrasi		2012	2013	2014	2014	2016
Transmigrasi Swakarsa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0
Transmigrasi Umum	Jumlah KK	40	25	25	17	8
	Jumlah Jiwa	136	90	111	53	31
Transmigrasi Bedol Desa	Jumlah KK	0	0	0	0	0
	Jumlah Jiwa	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

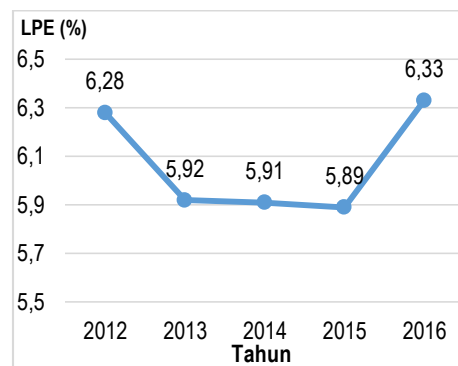
## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies* (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

Sebelum meninjau lebih jauh mengenai daya saing Kabupaten Bandung, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai perkembangan Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, capaian LPE Kabupaten Bandung cenderung mengalami penurunan, yang mana hal ini turut dipengaruhi oleh melemahnya perkembangan beberapa sektor kontributor PDRB. Ditinjau dari aspek PDRB ADHK, hampir seluruh sektor PDRB memiliki *trend* pertumbuhan negatif, kecuali sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa pendidikan. Adapun ditinjau dari aspek PDRB

AHB, dari 17 sektor PDRB, 11 diantaranya memiliki pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan positif, hanya meliputi sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa pendidikan. Perkembangan capaian LPE Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.



**GAMBAR 2.26.**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN LAJU**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN**  
**BANDUNG TAHUN 2012-2016**

*Sumber: Analisis Pembangunan Ekonomi Kab. Bandung, 2017*

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bandung antara lain tergambar dari capaian indikator kinerja sebagai berikut.

- Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan/Angka Konsumsi Rata-rata Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)  
Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga



terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan

di Kabupaten Bandung mencapai Rp.1.291.800 yang terdiri dari bahan pangan sebesar Rp.442.500 dan non pangan sebesar Rp.849.300. Angka ini pada tiap tahunnya terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 2.81.**  
**ANGKA KONSUMSI PANGAN RATA-RATA RUMAH TANGGA PER KAPITA**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2013**

No	Uraian	2012	2013
1.	Total Pengeluaran Rumah Tangga	398.000	442.500
2.	Jumlah Rumah Tangga	825.800	849.300
3.	Konsumsi Per Kapita	1.223.800	1.291.800

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Bandung, 2017

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100

berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Mengingat nilai NTP Kabupaten Bandung belum tersedia, maka sebagai acuan menggunakan NTP Provinsi Jawa Barat.

Nilai tukar petani di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.82.

**TABEL 2.82.**  
**NILAI TUKAR PETANI (NTP) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Diterima Petani	156,01	167,02	117,74	126,97
2.	Indeks Dibayar Petani	143,20	152,53	112,74	120,83
3.	Nilai Tukar Petani	<b>108,93</b>	<b>109,51</b>	<b>104,43</b>	<b>105,07</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2017



## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah,

fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kabupaten Bandung.

### A. Aksesibilitas Daerah

Untuk melihat sejauh mana aksesibilitas daerah di Kabupaten Bandung digunakan indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.83.**  
**RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan	n/a	1.155,35	1.155,34	1.155,54	
2.	Jumlah Kendaraan					
	- Roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Roda 2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Rasio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

### B. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih dilihat menggunakan indikator persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



**TABEL 2.84.**  
**PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH**  
**DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Sumber Air Bersih	2012	2013	2014
1.	Ledeng (Perpipaan)	151.049	n/a	78.168
2.	Sumur Lindung	165.751	n/a	582.167
3.	Sumur Tidak Terlindung	18.344	n/a	n/a
4.	Mata Air Terlindung	143.129	n/a	245.729
5.	Mata Air Tidak Terlindung	19.077	n/a	n/a
6.	Sungai	-	n/a	7.728
7.	Air Hujan	-	n/a	n/a
8.	Air Kemasan	50.102	n/a	n/a
9.	Pompa	110.348	n/a	n/a
10.	Air lainnya	245.244	n/a	26.723
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	620.379	n/a	940.515
12.	Jumlah Rumah Tangga	865.623	n/a	940.551
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	71,67	n/a	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, 2017

### C. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga yang telah

menggunakan listrik sebanyak 353.815 rumah tangga. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama kurun waktu 2010-2015.

**TABEL 2.85.**  
**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LISTRIK DI KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2015**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Tangga	850.768	874.664	882.739	902.552
2.	Jumlah RT Berlistrik (PLN dan Non PLN)	554.946	601.564	731.428	775.924
3.	Rasio Elektrifikasi	65,23	68,78	82,86	85,97

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bandung, 2016



### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim investasi di Kabupaten Bandung dapat terukur melalui indikator-indikator berikut.

#### **A. Kemudahan Perizinan**

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kemudahan prosedur perijinan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan, sehingga memudahkan calon investor dalam mengurus proses perizinan. Melalui kemudahan proses perizinan diharapkan akan menjadi insentif dan stimulus bagi calon investor untuk menjalankan kegiatan di Kabupaten Bandung. Lingkup perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan izin penyelenggaraan reklame. Informasi detail mengenai lama proses perizinan di Kabupaten Bandung untuk setiap jenis perizinan disajikan pada Tabel 2.86.



**TABEL 2.86.**  
**LAMA PROSES PERIZINAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014-2016**

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari Kerja)			Jumlah Persyaratan (Dokumen)			Biaya Resmi (Rata-Rata Max rupiah)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Izin Lokasi	14	12	12	6	6	6			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	14	14	15	15	15	7.500 – 12.500/m <sup>2</sup>	7.500 – 12.500/m <sup>2</sup>	7.500 – 12.500/m <sup>2</sup>
3.	Izin Gangguan (HO)									
a.	Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, dan Perdagangan	14	5	5	8	8	8	175/m <sup>2</sup>	175/m <sup>2</sup>	175/m <sup>2</sup>
b.	Kawasan Wisata	14	5	5	8	8	8	350/m <sup>2</sup>	350/m <sup>2</sup>	350/m <sup>2</sup>
c.	Kawasan Pertanian	14	5	5	8	8	8	525/m <sup>2</sup>	525/m <sup>2</sup>	525/m <sup>2</sup>
d.	Kawasan Permukiman	14	5	5	8	8	8	700/m <sup>2</sup>	700/m <sup>2</sup>	700/m <sup>2</sup>
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	14	2	2	8	7	7	Gratis	Gratis	Gratis
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	14	2	2	8	7	7	Gratis	Gratis	Gratis
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	2	2	8	7	7	Gratis	Gratis	Gratis
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	14	5	5	14	14	14	Gratis	Gratis	Gratis
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	14	5	5	8	8	8	Gratis	Gratis	Gratis
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	10	2	2	8	7	7	Gratis	Gratis	Gratis
10.	Izin Penyelenggaraan Reklame	14	6	6	8	7	7	Gratis	Gratis	Gratis
11.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (IPLC)	14	3	3	13	86	8	Gratis	Gratis	Gratis

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, 2017

**B. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)**

**TABEL 2.87.**  
**JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>186.141.858.448</b>	<b>287.766.327.300</b>	<b>298.560.799.112,40</b>	<b>340.007.248.935</b>	<b>384.495.956.018</b>
a.	Pajak Hotel	2.311.227.053	2.400.777.599	3.152.714.621	3.166.803.625	4.204.098.463
b.	Pajak Restoran	6.894.597.594	7.823.365.492	9.243.209.080	10.509.296.081	12.774.005.471
c.	Pajak Hiburan	706.313.905	1.142.433.048	1.301.036.970	1.368.506.270	1.773.066.735
d.	Pajak Reklame	2.712.275.886	2.770.273.862	2.931.017.940	2.995.714.596	3.239.576.910
e.	Pajak Penerangan Jalan/Genset	83.975.194.771	96.023.473.031	113.787.984.323	131.892.127.013	131.591.826.182
f.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	192.014.591	222.557.970	238.350.677	189.169.660	151.490.752
g.	Pajak Parkir	453.376.485	381.466.950	439.472.038	495.865.495	520.316.508
h.	Pajak Air Bawah Tanah	3.751.205.768	3.982.794.379	9.146.429.830	10.700.994.842	11.248.115.353
i.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	67.052.728.657	71.167.501.228	79.322.352.852	93.198.190.759
j.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	85.145.652.395	105.966.456.312	87.153.082.405	99.366.418.501	125.795.268.885
<b>2.</b>	<b>Retribusi</b>	<b>41.045.068.255</b>	<b>49.547.220.662</b>	<b>30.590.439.477</b>	<b>22.945.707.326</b>	<b>26.937.588.476</b>
a.	Jumlah Retribusi Jasa Umum	28.870.860.124	35.746.478.813	15.417.984.700	4.395.000.000	9.138.798.200
b.	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.714.816.500	4.077.403.500	4.616.290.500	17.181	3.856.910.500
c.	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	9.459.391.631	9.723.338.349	10.556.164.277	2.341.764.941	13.941.879.776

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016



Mengacu pada tabel realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bandung diatas, dalam kurun lima tahun menunjukkan trend pertumbuhan positif. Lima tahun terakhir pajak daerah Kabupaten Bandung tumbuh dengan rata-rata persentase sebesar 18,79% pertahun. Adapun untuk pendapatan retribusi daerah, dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Dalam selang tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi penurunan jumlah retribusi daerah. Faktor penyumbang terhadap menurunnya retribusi daerah Kabupaten Bandung diantaranya yaitu penurunan pada beberapa komponen penyumbang retribusi jasa umum.

#### 2.4.4. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

**TABEL 2.88.**  
**PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	176	186	186	193
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	6	4	12	18
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	0	0		
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	182	182	198	211
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	0%	0%	0,17	0,15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, 2017

#### 2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

##### A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja dimana sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.



**TABEL 2.89.**  
**RASIO LULUSAN S1, S2, DAN S3 DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	n/a	n/a	n/a	87.227
2.	Jumlah lulusan S2	n/a	n/a	n/a	5.880
3.	Jumlah lulusan S3	n/a	n/a	n/a	859
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	72.899	n/a	1.471	93.966
5.	Jumlah penduduk	3.351.048	n/a	3.470.393	3.534.112
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	217,54	n/a	4,24	37,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, 2017

#### 2.4.6. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2012-2016.



**TABEL 2.90.**  
**RASIO KETERGANTUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	998.622	1.000.072	959.649	1.046.392	1.064.826
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	149.650	160.524	175.159	149.290	152.386
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	1.148.272	1.160.596	1.134.808	1.195.682	1.217.209
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	2.202.776	2.255.104	2.335.585	2.338.430	2.379.411
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	52,13	51,47	48,59	51,13	51,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 2.91.**  
**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>1.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)							
1.1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	60.045.710,20	67.856.902,70	76.371.542,80	85.793.090,40	94.165.926,55	Juta Rp	
a.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.326.175,00	5.861.571,50	6.096.791,80	6.809.055,30	7.503.285,67	Juta Rp	
b.	Pertambangan dan Penggalian	1.829.360,70	1.788.536,20	1.760.364,00	1.867.979,00	2.064.735,96	Juta Rp	
c.	Industri Pengolahan	29.883.859,60	34.466.754,60	39.626.723,00	44.659.612,90	49.184.397,66	Juta Rp	
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	80.366,00	74.936,80	75.699,90	85.047,80	109.094,43	Juta Rp	
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.805,70	22.276,60	22.955,10	24.870,80	28.257,43	Juta Rp	
f.	Konstruksi	3.626.455,20	3.947.198,00	4.529.721,80	4.962.557,40	5.442.231,75	Juta Rp	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.643.837,70	9.961.566,70	10.978.604,30	12.071.738,50	12.984.360,03	Juta Rp	
h.	Transportasi dan Pergudangan	2.089.280,90	2.281.295,00	2.733.986,00	3.367.494,90	3.663.866,12	Juta Rp	
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.501.853,60	1.650.602,10	1.844.750,20	2.084.038,10	2.263.914,96	Juta Rp	
j.	Informasi dan Komunikasi	810.020,70	927.398,80	1.043.808,00	1.214.306,80	1.390.045,26	Juta Rp	
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	392.450,30	452.639,20	492.467,20	566.854,50	649.279,15	Juta Rp	
l.	Real Estate	720.740,80	764.145,30	827.348,90	920.298,00	1.013.291,49	Juta Rp	
m,n.	Jasa Perusahaan	265.727,20	287.562,20	316.833,20	361.052,60	401.389,56	Juta Rp	
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.536.849,80	1.634.785,40	1.739.681,40	1.987.417,00	2.120.068,44	Juta Rp	
p.	Jasa Pendidikan	1.675.628,30	1.919.573,80	2.224.296,90	2.508.549,90	2.741.260,19	Juta Rp	
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413.776,80	480.828,00	550.479,70	651.253,00	726.419,28	Juta Rp	
r,s,t,u.	Jasa Lainnya	1.228.521,80	1.335.232,60	1.507.031,20	1.650.963,00	1.880.047,18	Juta Rp	
1.1.1.2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	54.468.156,80	57.690.587,20	61.098.514,00	64.696.966,10	68.797.693,32	Juta Rp	
a.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.691.673,10	4.844.584,20	4.728.392,10	4.863.228,20	5.069.659,45	Juta Rp	
b.	Pertambangan dan Penggalian	1.547.030,40	1.478.454,60	1.452.188,90	1.513.034,90	1.649.759,73	Juta Rp	
c.	Industri Pengolahan	27.583.084,90	29.232.561,20	31.194.154,40	32.992.837,80	34.952.833,52	Juta Rp	
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	80.638,10	87.300,60	85.137,40	85.404,20	93.493,38	Juta Rp	
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.934,90	21.026,60	21.624,90	22.439,60	23.461,10	Juta Rp	
f.	Konstruksi	3.242.182,60	3.524.147,80	3.847.216,10	4.129.003,40	4.439.967,50	Juta Rp	
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.608.564,30	8.215.856,00	8.681.126,80	9.138.154,30	9.676.959,23	Juta Rp	
h.	Transportasi dan Pergudangan	1.934.075,60	2.032.834,20	2.242.870,30	2.405.115,00	2.562.252,12	Juta Rp	
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.318.430,70	1.390.485,40	1.455.713,00	1.559.534,90	1.660.985,60	Juta Rp	
j.	Informasi dan Komunikasi	826.225,90	930.771,60	1.093.885,10	1.273.177,50	1.455.410,18	Juta Rp	
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.770,20	412.047,60	428.163,60	460.141,00	510.853,57	Juta Rp	
l.	Real Estate	657.993,90	673.295,30	712.040,00	767.129,00	833.582,01	Juta Rp	
m,n.	Jasa Perusahaan	238.678,70	255.432,20	268.150,90	291.563,50	317.112,90	Juta Rp	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.287.662,80	1.334.376,10	1.381.517,70	1.459.064,20	1.501.702,57	Juta Rp	
p.	Jasa Pendidikan	1.566.598,70	1.679.230,00	1.829.830,50	1.980.966,90	2.121.550,61	Juta Rp	
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	356.773,70	402.260,10	432.847,20	478.769,90	537.487,72	Juta Rp	
r,s,t,u.	Jasa Lainnya	1.132.838,20	1.175.923,60	1.243.655,10	1.277.402,00	1.390.622,14	Juta Rp	
1.1.1.3.	Laju Inflasi		6,70	6,27	6,09	3,21	%	
<b>1.2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
<b>1.2.1.</b>	<b>Indikator Makro</b>							
1.2.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,13	68,58	60,06	70,05	70,69	Indeks	
1.2.1.2.	Indeks Pendidikan	58,48	59,21	60,41	61,73	62,83	Indeks	
a.	Harapan Lama Sekolah	11,26	11,50	11,74	12,13	12,42	Tahun	
b.	Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,18	8,34	8,41	8,50	Tahun	
1.2.1.3.	Indeks Kesehatan	81,46	81,48	81,49	81,65	81,69	Indeks	
a.	Angka Harapan Hidup	72,95	72,96	72,97	73,07	73,10	Tahun	
1.2.1.4.	Indeks Pengeluaran	66,39	66,84	88,91	68,16	68,82	Indeks	
a.	Daya Beli	8.846	8.978	8.999	9.375	9.580	Ribu Rp	
1.2.1.5.	Gini Ratio	0,36	0,36	0,37	0,40	0,40	Rasio	
1.2.1.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka		10,15	8,48	4,03		%	
<b>2.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
<b>2.1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
a.	SD/MI	99,5	99,69	99,95	99,97	99,98	Indeks	
b.	SMP/MTs	95,16	96,33	97,01	97,08	97,17	Indeks	
c.	SMA/MA	34,27	37,12	38,91	42,53	47,44	Indeks	
2.1.1.2.	Angka Partisipasi Murni (APM)							
a.	SD/MI	105,00	104,85	106,33	104,86	104,73	Indeks	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
b.	SMP/MTs	66,47	81,17	80,84	80,96	84,91	Indeks	
c.	SMA/MA	31,86	34,67	36,86	40,66	45,95	Indeks	
2.1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
a.	SD/MI	93,26	94,74	94,72	94,29	96,11	Indeks	
b.	SMP/MTs	92,87	94,94	93,95	94,69	94,15	Indeks	
c.	SMA/MA	44,93	46,60	50,22	54,77	56,43	Indeks	
2.1.1.4.	Rasio Ketersediaan Sekolah							
a.	SD/MI	39,74	40,29	48,81	40,68	41,4	%	
b.	SMP/MTs	27,1	27,3	27,13	26,23	25,56	%	
c.	SMA/MA	14,45	15,42	16,7	16,5	16,1	%	
2.1.1.5.	Rasio Guru Murid							
a.	SD/MI	4,1	4,1	4,08	4,05	4,19	%	
b.	SMP/MTs	7,03	6,76	6,55	6,46	6,13	%	
c.	SMA/MA	9,24	9,24	9,21	8,51	5,53	%	
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.2.1.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	1:71	1:65	1:67	1:70	1:69	Rasio	
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk	1:21.620	1:11.540	1:11.764	1:13.041	1:13.272	Rasio	
2.1.2.3.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1:478.721	1:487.957	1:495.770	1: 441.764	1: 449.578	Rasio	
2.1.2.4.	Jumlah Balita Gizi Baik	263.494	241.303	251.119	289.776	289.874	Jiwa	
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>							
2.1.3.1.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	43,34	50,84	54,28	57,22	63,55	%	
2.1.3.2.	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	72,39	82,46	78,67	81,93	88,45	%	
2.1.3.3.	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik							
a.	Teknis	70,51	71,81	25,98	56,13	59,63	%	
b.	Non Teknis	73,00	73,54	48,11	49,03	49,24	%	
2.1.3.4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	%	
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.4.1.	Akses Aman terhadap Air Bersih							
a.	Perkotaan	9,98	10,55	10,97	11,69		%	
b.	Perdesaan	10,55	11,84	12,58	13,45		%	
2.1.4.2.	Akses Aman terhadap Sanitasi	52,11	52,63	53,29	53,43	57,32	%	
<b>2.1.5.</b>	<b>Penataan Ruang</b>							
2.1.5.1.	Persentase Bangunan Ber-IMB Per Seluruh Bangunan	2,43	7,35	7,38	7,41		%	
2.1.5.2.	Rasio RTH Per Satuan Wilayah Ber-HPL/HGB	0,1	0,12	0,17	0,19	0,22	%	
<b>2.1.6.</b>	<b>Perhubungan</b>							
2.1.6.1.	Rasio Izin Trayek	1:7.960	1:7.299	1:1.231	1: 1.472		Rasio	
2.1.6.2.	Persentase Angkutan Umum yang Sudah Uji KIR	76,20	80,57	92,85			%	
<b>2.1.7.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
2.1.7.1.	Status Penataan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Industri							
a.	Pencemaran Air	57	55	56	54		%	
b.	Pencemaran Udara	77	85	86	87		%	
c.	Pencemaran Limbah B3	50	44	45	43		%	
2.1.7.2.	Persentase Penanganan Sampah	13,65	15,22	16,66	21,22		%	
2.1.7.3.	Rasio Daya Tampung TPSS terhadap Jumlah Penduduk	1:27,5	1:25,6	1:12,2	1:19,23		Rasio	
<b>2.1.8.</b>	<b>Pertanahan</b>							
2.1.8.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	23,13	24,26	81,02	85,80		%	
<b>2.1.9.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
2.1.9.1.	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk	74,14	98,05	75,62	86,69	89,2	%	
2.1.9.2.	Rasio Penduduk Ber-KK per Satuan Penduduk	100	40	66,3	68,69	84,09	%	
2.1.9.3.	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	59,91	58,03	60,11	62,62	64,82	%	
2.1.9.4.	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim	150	123,33	228,66	106,28	94,21	%	
<b>2.1.10.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>							
2.1.10.1.	Rasio Akseptor KB	81,02	81,95	82,17	81,73	82,51	%	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>2.1.11.</b>	<b>Sosial</b>							
2.1.11.1.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin	0,35	0,57	18,66			%	
2.1.11.2.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	3,68	1,05	7,43	7,75		%	
2.1.11.3.	Jumlah Sarana Sosial							
a.	Panti Asuhan	61	61	51	45		Unit	
b.	Panti Jompo	1	1	2	1		Unit	
c.	Panti Rehabilitasi	0	0	0	2		Unit	
<b>2.1.12.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>							
2.1.12.1.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1:350	1:335	1:323	1:308		Rasio	
<b>2.1.13.</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>							
2.1.13.1.	Persentase Koperasi Aktif	52,56	54,61	55,16	55,98	55,74	%	
2.1.13.2.	Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi							
a.	Pelaku UKM	7.894	8.432	9.003	9.615	24.459	Orang	
b.	Koperasi	1.560	1.593	1.610	1.686	1.722	Unit	
2.1.13.3.	Jumlah Omzet Koperasi dan UMKM							
a.	Koperasi	663.592.871.075	673.546.764.141	684.323.516.386	684.323.516.386	684.323.516.386	Rp	
b.	UMKM	3.084.145.158.000	3.089.449.828.528	3.094.869.600.625	3.099.772.278.625	3.106.363.027.825	Rp	
<b>2.1.14.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
2.1.14.1.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA							
a.	PMDN	4.470.565.958.912	7.304.235.269.502	5.472.067.707.548	5.964.221.569.580	5.297.733.143.668	Rp	
b.	PMA	1.816.712.696.913	944.138.205.500	803.058.396.105	3.454.165.551.237	2.877.269.319.178	Rp	
<b>2.1.15.</b>	<b>Kebudayaan</b>							
2.1.15.1.	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22	100	100	100	100	%	
<b>2.1.16.</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>							
2.1.16.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,24	0,25	0,77	0,98	1,01	Rasio	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.16.2.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	16,59	16,39	16,45	15,84	15,84	Rasio	
<b>2.1.17.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, dan Persandian</b>							
2.1.17.1.	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum							
a.	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	%	
b.	Penegakan K3	100	100	100	100	100	%	
2.1.17.2.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	72,87	74,06				Indeks	
<b>2.1.18.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>							
2.1.18.1.	Skor PPH Ketersediaan Pangan	73,9	79,1	84,3	89,6	94,8	%	
2.1.18.2.	Skor PPH Konsumsi Pangan	97,6	98,7	86,6	78,9		%	
<b>2.1.19.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
2.1.19.1.	Persentase PPK Aktif	100	100	100	100	90,8	%	
2.1.19.2.	Jumlah Kelompok Binaan PPK	1.014	58.631	1.161	1.120	5.227	Kelompok	
2.1.19.3.	Jumlah LSM Aktif	263	229	38	264	233	Unit	
<b>2.1.20.</b>	<b>Kearsipan</b>							
2.1.20.1.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku	140	140	140	140	140	Unit	
2.1.20.2.	Jumlah Arsiparis di Lingkungan Pemerintahan	18	18	18	18	17	Orang	
<b>2.1.21.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
2.1.21.1.	Jumlah Sistem Informasi di Pemerintahan	38	38	38	61	71	Unit	
<b>2.1.22.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
2.1.22.1.	Jumlah Perpustakaan	401	401	401	461	561	Unit	
2.1.22.2.	Kunjungan Perpustakaan	10.951	24.684	25.345	34.672	55.072	Kali	
<b>2.2.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>							
<b>2.2.1.</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>							
2.2.1.1.	Indikator Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura							
a.	Jumlah Produktivitas Padi	63,66	64,33	62,87	64,77	63,64	kw/ha	
b.	Luas Areal Pengembangan Hortikultura Unggulan	6.027	10.541	14.554	18.069	26.501	ha	
c.	Indeks Pertanaman	2,01	2,27	2,28	2,43	2,74	Indeks	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.2.	Indikator Peternakan							
a.	Jumlah Penyakit Hewan Prioritas yang Tertanggulangi	20	24	28	32	32	%	
b.	Status Kesehatan Hewan	62,5	63,75	67,4	67,4	74,3	%	
c.	Kapasitas Pelaku Usaha Pembudidayaan Ternak yang Mendorong Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	45,69	68,16	116,11	131,34	131,34	%	
d.	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Ternak yang Bersertifikat	40	48	66	200	200	Unit	
e.	Pemanfaatan Teknologi Peternakan	167	147	88	587	587	Orang	
f.	Sarana dan Prasarana Pemotongan Ternak di RPH	63,54	63,95	69,5	79	83,5	%	
<b>2.2.2.</b>	<b>Kehutanan</b>							
2.2.2.1.	Jumlah Luas Lahan Kritis yang Tertanami	13.538,66	4.415,00	32.057,80	24.542,50	703	ha	
2.2.2.2.	Persentase Luas Lahan Kritis yang Tertanami	32,86	63,72	66,37	66,37	67,08	%	
2.2.2.3.	Jumlah Kelompok Agroforestry	35	40	45	50	50	Kelompok	
2.2.2.4.	Jumlah Kelompok Tani Berbasis Aneka Usaha Kehutanan	35	40	45	50	50	Kelompok	
<b>2.2.3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
2.2.3.1.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Miskin	14,15	20,34	38,55	40,48		Rasio	
2.2.3.2.	Persentase Luasan Pertambangan Berizin	89,77	90,65	91,56	92,48		%	
2.2.3.3.	Rata-rata Pemakaian Air Tanah Per Sumur Setiap Bulan	16.954,97	16.885,17	17.845,21	17.206		m3/sumur	
2.2.3.4.	Persentase Ketersediaan Peta Zonasi Kerentanan Gerakan Tanah	62,5	75	100	71		%	
<b>2.2.4.</b>	<b>Pariwisata</b>							
2.2.4.1.	Jumlah Kunjungan Wisata	5.645.569	6.234.555	1.650.000	1.723.001		Orang	
2.2.4.2.	Jumlah Daya Tarik Wisata	45	50	55	80		Lokasi	
2.2.4.3.	Jumlah Mitra Kerja Pariwisata	1.224	1.312	1.442			Orang	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>2.2.5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
2.2.5.1.	Kapasitas Kelompok/UPR Pembenihan dan Pembudidayaan Ikan/Pokdakan	126	186	294	726		Kelompok	
2.2.5.2.	Pelaku Usaha Budidaya Perikanan Bersertifikat CBIB	34	49	79	199		Orang	
2.2.5.3.	Masyarakat yang Aktif Mengawasi Lingkungan Kawasan Budidaya/Pokmaswas	3	3	9	9		Kelompok	
2.2.5.4.	Kelestarian Ikan di Perairan Umum	18	27	40	144		Lokasi	
2.2.5.5.	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Bersertifikat	35	50	84	84		Unit	
2.2.5.6.	Jumlah SDM Pengembang Sistem Penyuluhan Perikanan	197	10	n/a	47		Orang	
<b>2.2.6.</b>	<b>Perdagangan</b>							
2.2.6.1.	Jumlah Penyelesaian Kasus dalam Fasilitas Advokasi Perlindungan Konsumen	10	35	20	17		Kasus	
2.2.6.2.	Jumlah Nilai Ekspor Barang dan Jasa	833.686.178,32	821.019.618,92	777.105.000.000	508.950.000		US \$	
2.2.6.3.	Jumlah Pasar Tradisional yang Sudah Ditata	5	7	2	3		Unit	
<b>2.2.7.</b>	<b>Perindustrian</b>							
2.2.7.1.	Jumlah Industri	4.094	4.639	4.590			Unit	
a.	Industri Kecil	4.077	4.067	4.507			Unit	
b.	Industri Menengah	3	270	37	207		Unit	
c.	Industri Besar	14	302	44	117		Unit	
<b>2.2.8.</b>	<b>Transmigrasi</b>							
2.2.8.1.	Jumlah Transmigrasi	136	90	111	53	31	Jiwa	
<b>3.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
3.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,28	5,92	5,91	5,89	6,33	%	
3.1.2.	Angka Konsumsi Pangan Rata-rata Rumah Tangga Per Kapita	1.223.800	1.291.800				Rp	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.3.	Nilai Tukar Petani	108,93	109,51	104,43	105,07		Indeks	
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
<b>3.2.1.</b>	<b>Aksesibilitas Daerah</b>							
3.2.1.1.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan							
<b>3.2.2.</b>	<b>Ketersediaan Air Bersih</b>							
3.2.2.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	71,67		100			%	
<b>3.2.3.</b>	<b>Fasilitas Listrik</b>							
3.2.3.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	65,23	68,78	82,86	85,97		%	
<b>3.3.</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
<b>3.3.1.</b>	<b>Kemudahan Perizinan</b>							
3.3.1.1.	Rata-rata Lama Mengurus Perizinan	13,71	5,21	5,21			Hari Kerja	
<b>3.3.2.</b>	<b>Pengenaan Pajak Daerah</b>							
3.3.2.1.	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	186.141.858.448	287.766.327.300	298.560.799.112,40	340.007.248.935	384.495.956.018	Rp	
3.3.2.2.	Jumlah Realisasi Retribusi	41.045.068.255	49.547.220.662	30.590.439.477	22.945.707.326	26.937.588.476	Rp	
<b>3.4.</b>	<b>Status Desa</b>							
3.4.1.	Persentase Desa Swasembada	0	0	17	15		%	
<b>3.5.</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
3.5.1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	217,54	n/a	4,24	37,61		Rasio	
3.6.	Rasio Ketergantungan	52,13	51,47	48,59	51,13	51,16	Rasio	

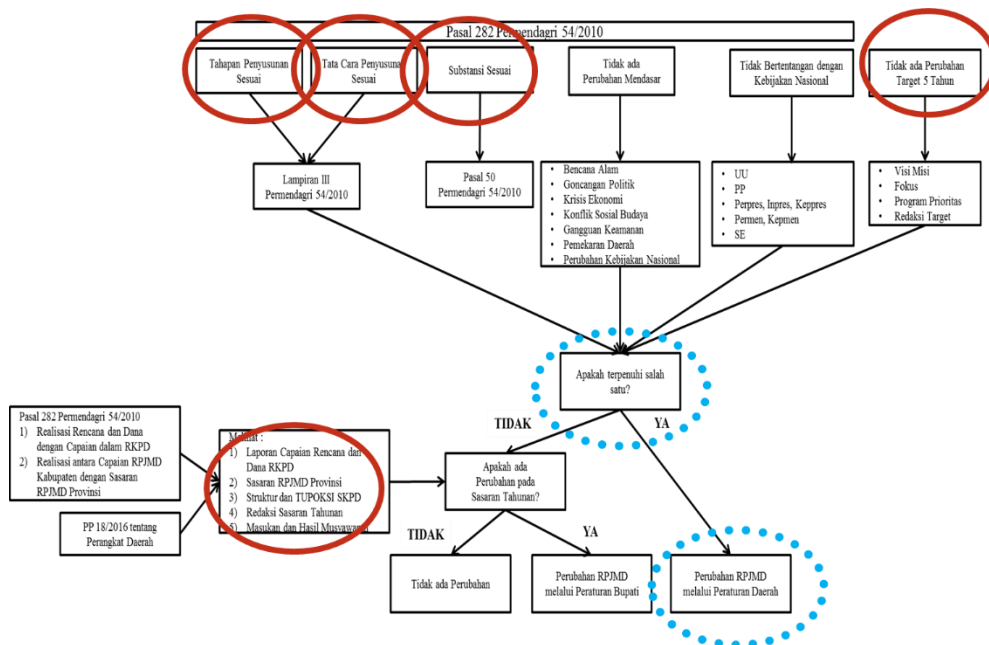
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



## 2.5. Gambaran Hasil Evaluasi RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan, didapatkan poin-poin yang dirasa perlu dilakukan perbaikan dikarenakan masih kurang sesuai dengan dasar acuan penyusunan dokumen RPJMD pada saat dokumen disusun, yaitu

Permendagri No. 54 Tahun 2010. Evaluasi dokumen RPJMD Kabupaten Bandung masih dilakukan berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 karena belum dipublikasikannya peraturan pengganti yakni Permendagri No. 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah dilakukan tim evaluasi, berikut area-area yang belum memenuhi kategori belum sesuai atau memerlukan perubahan.



**GAMBAR 2.27.**  
**HASIL ANALISIS EVALUASI DOKUMEN RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Dalam Gambar 2.27. didapatkan kesimpulan bahwa dokumen RPJMD yang ada perlu dilakukan perubahan atau revisi. Kesimpulan dari hasil evaluasi dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan gambar di atas, maka dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021 memerlukan perbaikan pada area tahapan dan tatacara penyusunan, substansi, perubahan program prioritas, perubahan pembagian urusan

pemerintahan dan nilai sasaran. Selain hal-hal di atas diperlukan juga perubahan redaksional untuk indikator-indikator program dan nama dari program.

2. Jika dilihat berdasarkan hasil analisa RCA untuk mengatasi masalah-masalah di atas, diperlukan:
  - Peta Induk Program
  - Peta Turunan Outcome pada Kegiatan
  - Penamaan Ulang Program sesuai Manfaat yang diharapkan



- Standarisasi Pemaknaan Kata Kunci Program
  - Melengkapi status dan data capaian awal Indikator Kinerja Daerah dan pembahasan prioritas program secara spesifik.
3. Jika dilihat berdasarkan hasil analisa SWOT, strategi untuk mengoptimalkan sisa periode yang ada:
- Identifikasi status capaian Indikator Kinerja Daerah.
  - Prioritasi Program Unggulan yang memberikan dampak luas ataupun memberikan impresi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
  - Pembangunan Fisik yang berfokus pada area spesifik seperti kawasan strategis, berkualitas tinggi dan mengundang kebangkitan ekonomi multiplier.
  - Penyiapan skema investasi dan platform untuk daya tawar dan daya tarik terhadap investor.
  - Identifikasi model substitusi ataupun model subsidi dengan memanfaatkan swasata.
  - Penyesuaian sebagian tematik program dengan harapan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dan kementerian yang sesuai temanya untuk dimanfaatkan untuk pembangunan.
4. Dokumen RPJMD sebelum direvisi melalui 28 proses penyusunan dari 36 proses sehingga nilainya adalah 77,78%. Jika dinilai berdasarkan jumlah output yang dihasilkan menggunakan tatacara Pedoman maka nilainya adalah 25%.

Hasil dari evaluasi dokumen RPJMD juga berupa poin-poin rekomendasi mengenai perbaikan yang perlu dilakukan dalam dokumen RPJMD revisi. Rekomendasi untuk perbaikan kualitas dokumen RPJMD

Kabupaten Bandung 2016-2021 terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

- **Kesinkronan**, untuk menunjang kesinkronan program ke arah hulu program, diperlukan induk program yang diusulkan berupa Indikator Kinerja Daerah, Sasaran Pokok RPJPD dan Program Kepala Daerah. Semakin banyak keterkaitan outcome suatu program dengan 3 hal di atas maka bisa dikatakan program tersebut semakin penting dalam memenuhi hal-hal tersebut.
- **Pendalaman Strategi Pembangunan**, dengan mempertimbangkan secara lebih kritis sisa periode pembangunan yang ada, pendanaan yang tersedia, prestasi yang dibutuhkan, serta kecenderungan kutub strategi yang dipilih seperti : kualitas vs kuantitas, luas vs sempit, reaktif vs preventif, dana internal vs dana eksternal, percepatan vs penghematan, urutan proses dan lainnya.
- **Mendefinisikan Sudut Manfaat Program**, yakni antara untuk masyarakat, internal, lembaga ataupun keuangan. Secara masyarakat berarti terkait produk yang dihasilkan apakah kualitas terbaik, apakah unik atau apakah dengan biaya semurah mungkin.
- **Membuat sistem ranking untuk prioritas program secara lebih spesifik dan terintegrasi**, yakni suatu sistem kombinasi yang melihat jenis induk program, jenis urusan pemerintahan, strategi dan arah kebijakan, dan perspektif manfaat.
- **Membuat standarisasi pemahaman redaksional**, sehingga penggunaan redaksi dapat memberikan pemahaman yang sama dan konsisten antara nama program dan output serta indikator program.
- **Menyepakati ukuran pembagi populasi dari penerima dampak program**, yakni



dengan memperhatikan kasusnya antara kasus peningkatan kapasitas atau kuantitas, dengan pengukuran pada peserta program atau populasi seluruh kabupaten.

- **Menerapkan metode pengukuran yang sudah digunakan secara ilmiah**, misalkan CCI (*Community Capacity Index*) untuk mengukur dampak program peningkatan kapasitas, CSI (*Customer Satisfaction Index*) untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau fasilitas publik, ASCE (*American Society of Civil Engineers*) untuk mengukur nilai kondisi infrastruktur dari kacamata profesional.
  - **Menegaskan masalah pembagian peran dan wewenang**, terkait target program yang belum dijelaskan persinya misalkan rasio elektrifikasi (antara PLN dan ESDM), lubang resapan air, rekrutasi PNS wanita.
  - **Penambahan kolom “induk program”**, pada perencanaan RPJMD sehingga dapat diketahui keterkaitan program ke hulu.
  - **Penambahan kolom “satuan”**, pada tabel hasil E-Monev sehingga nilai kinerja dapat langsung dibagi dengan target.
  - **Kinerja dituliskan dengan dalam bentuk nilai non presentase**, karena akan dibagi dengan nilai target.
  - **Konsisten dalam penulisan redaksi**, yakni kesinkronan nama program dengan manfaat yang dihasilkan program.
  - **Konsisten dalam penggunaan singkatan atau tidak**, misalkan dalam penyingkatan nama SKPD di dalam beberapa dokumen terkait..
  - **Tidak ada program yang namanya sama dalam 1 SKPD.**
  - **Tidak ada program 1 SKPD yang kegiatannya beda SKPD penanggung jawab** (misalkan kecamatan).
- **Pada E-Monev, nama SKPD penanggungjawab diisi pada level program** sehingga tidak ada kekosongan untuk pengolahan data.
  - **Masing-masing SKPD memiliki 1 program khusus** untuk pengumpulan data kinerja program lainnya di SKPD masing-masing.



Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah (*money follow programs*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah serta rencana kerangka pendanaan pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis terhadap potensi, kapasitas dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bandung dalam mendanai pembangunan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pola/trend pengelolaan keuangan, digunakan analisis timeseries terhadap data lima tahun terakhir. Adapun yang dimaksud dengan analisis rencana kerangka pendanaan pembangunan yaitu prakiraan kemampuan pendanaan daerah berdasarkan hasil proyeksi gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir.

### 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditinjau melalui kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

#### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi komponen pendapatan, belanja serta pembiayaan. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Secara detail, kinerja pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut.



### A. Pendapatan Daerah

Mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah antara lain meliputi:

1. Pendapatan asli daerah, yaitu hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Adapun komponen pendapatan asli daerah meliputi:
  - a. Pajak Daerah  
Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Bandung meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  - b. Retribusi Daerah  
Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bandung meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar dan Banten.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
2. Dana perimbangan, yaitu pendapatan daerah yang bertujuan untuk menutup celah fiskal sebagai akibat selisih

kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dana perimbangan meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
  - i. Dana Bagi Hasil Pajak
  - ii. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
  - iii. Dana Alokasi Umum
  - iv. Dana Alokasi Khusus
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
  - i. Dana Penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Provinsi
  - i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang meliputi:
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Pendapatan Lainnya

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 ditampilkan pada Tabel 3.1.



**TABEL 3.1.**  
**RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.902.414.601.182,00</b>	<b>3.368.043.981.175,50</b>	<b>4.038.777.825.787,08</b>	<b>4.476.751.164.755,60</b>	<b>4.607.669.372.893,37</b>	<b>12.43</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>366.316.690.578,00</b>	<b>507.243.684.130,50</b>	<b>702.045.372.759,08</b>	<b>784.149.788.135,60</b>	<b>856.514.244.254,37</b>	<b>24.45</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	186.141.858.448,00	287.766.327.300,00	298.589.031.519,00	340.007.248.935,00	384.495.956.018,00	21.33
1.1.2.	Retribusi Daerah	41.045.068.255,00	49.547.220.662,00	30.590.439.477,00	31.267.911.502,00	26.937.588.476,00	-7.30
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.168.813.789,00	50.139.506.724,00	56.527.342.258,00	53.451.614.657,00	62.792.013.347,00	8.94
1.1.4.	Lain-Lain PAD Sah	93.960.950.086,00	119.790.629.444,50	316.338.559.505,08	359.423.013.041,60	382.288.686.413,37	52.89
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.432.896.865.494,00</b>	<b>2.724.549.456.516,00</b>	<b>3.092.824.175.044,00</b>	<b>3.412.982.695.746,00</b>	<b>3.751.155.128.639,00</b>	<b>11.44</b>
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.954.099.527.667,00	2.104.760.856.008,00	2.261.962.786.050,00	2.310.509.110.606,00	2.992.226.054.296,00	11.71
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	143.431.554.029,00	84.447.979.092,00	101.357.375.100,00	86.988.871.253,00	122.598.021.996,00	1.41
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	124.927.690.638,00	131.155.157.916,00	105.461.590.950,00	120.744.114.353,00	127.864.485.604,00	1.45
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	1.518.230.253.000,00	1.730.063.709.000,00	1.897.769.300.000,00	1.957.538.845.000,00	2.096.677.101.000,00	8.48
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	167.510.030.000,00	159.094.010.000,00	157.374.520.000,00	145.237.280.000,00	645.086.445.696,00	82.59
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	318.054.232.000,00	428.493.318.000,00	523.804.154.000,00	734.583.731.000,00	195.728.743.000,00	5.96
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	318.054.232.000,00	428.493.318.000,00	523.804.154.000,00	734.583.731.000,00	195.728.743.000,00	5.96
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	160.743.105.827,00	191.295.282.508,00	307.057.234.994,00	367.889.854.140	381.354.984.993,00	25.75
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Lainnya	160.743.105.827,00	191.295.282.508,00	307.057.234.994,00	367.889.854.140	381.354.984.993,00	25.75
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>103.201.045.110,00</b>	<b>136.250.840.529,00</b>	<b>243.908.277.984,00</b>	<b>279.618.680.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.42</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	1.490.141.040,00	1.301.402.183,00	1.192.458.160,00	0,00	-5.26
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	103.201.045.110,00	134.760.699.489,00	242.606.875.801,00	278.426.222.714,00	0,00	6.34

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2012-2016





Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, pada periode 2012-2016 dapat diringkas sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah dalam kurun lima tahun terakhir tercatat tumbuh dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 28,61%. Peningkatan PAD terbesar terjadi dalam rentang tahun 2012-2013 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 38,47% per tahun. Peningkatan pada tahun 2013 diakibatkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Sedangkan peningkatan pada tahun 2014 lebih diakibatkan adanya kenaikan signifikan dari pos Lain-lain PAD yang Sah akibat masuknya pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke pos ini. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung telah berkembang cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan.
- Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dalam kurun lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,44% setiap tahunnya. Ditinjau berdasarkan besar pendapatan, nilai dana perimbangan di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 3.751.155.128.639,00. Ditinjau berdasarkan angka pertumbuhan, pertumbuhan dana perimbangan terbesar terjadi tahun 2014 dengan angka pertumbuhan sebesar 13,52%. Meninjau rata-rata pertumbuhan dana perimbangan secara keseluruhan, tampak bahwa nilai rata-rata pertumbuhan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan positif, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan oleh aparatur

pemerintah Kabupaten Bandung telah berjalan cukup baik.

- Pertumbuhan rata-rata Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu sebesar 6,42%. Penerimaan terbesar dari pos ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan kenaikan baik pada pos pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat pendapatan yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan yang sah.

## **B. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun yang dimaksud dengan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Ditinjau perkomponen penyusunnya, sekitar 60% belanja Kabupaten Bandung digunakan untuk belanja tidak langsung. Sedangkan proporsi belanja langsung yaitu sekitar 40%. Secara detail, Belanja Kabupaten Bandung tahun 2012-2016 ditampilkan pada Tabel 3.2.





**TABEL 3.2.**  
**RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.851.978.727.413,00</b>	<b>3.242.165.132.570,00</b>	<b>3.823.064.504.314,00</b>	<b>4.607.334.886.118,00</b>	<b>4.640.244.294.782,49</b>	<b>13.21</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.736.329.871.127,00</b>	<b>1.938.719.940.170,00</b>	<b>2.196.885.719.863,00</b>	<b>2.546.255.642.757,00</b>	<b>2.685.314.082.415,00</b>	<b>11.58</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.511.662.036.637,00	1.675.145.253.728,00	1.864.492.136.306,00	1.982.292.982.263,00	2.111.118.233.447,00	8.73
2.1.2.	Belanja Hibah	41.734.739.950,00	45.795.244.500,00	100.173.730.800,00	169.528.017.394,00	86.120.723.750,00	37.13
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	1.855.669.700,00	3.193.750.000,00	9.951.500.000,00	14.098.500.000,00	809.750.000,00	57.78
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	61.050.186.000,00	79.808.834.300,00	77.609.872.900,00	248.191.375.600,00	267.228.456.500,00	63.86
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	114.480.114.940,00	132.970.226.420,00	143.374.965.000,00	129.324.752.500,00	216.023.280.984,00	20.30
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	5.137.123.900,00	1.806.631.222,00	1.283.514.857,00	2.820.015.000,00	4.013.637.734,00	17.06
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.115.648.856.286,00</b>	<b>1.303.445.192.400,50</b>	<b>1.626.178.784.451,00</b>	<b>2.061.079.243.361,00</b>	<b>1.954.930.212.367,49</b>	<b>15.80</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	130.434.550.552,00	160.091.690.247,00	213.305.481.562,00	52.412.198.523,00	66.803.856.551,00	2.00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.931.103.551,00	694.275.377.489,50	939.501.476.184,00	1.300.202.518.141,00	1.318.682.566.812,99	28.92
2.2.3.	Belanja Modal	491.283.202.183,00	449.078.124.664,00	473.371.826.705,00	708.464.526.697,00	569.443.789.003,50	6.71

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2012-2016



Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, pada periode 2012-2016 dapat diringkas sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,58% per tahun. Ditinjau per komponen, pada tahun 2016 sekitar 78,61% komposisi belanja tidak langsung Kabupaten Bandung digunakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai ini menjadi komponen terbesar pertama dalam belanja tidak langsung Kabupaten Bandung. Sedangkan komponen terbesar kedua dalam belanja tidak langsung digunakan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, dengan persentase sebesar 3,20%.
- Belanja Langsung dalam kurun lima tahun terakhir tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,80% per tahun.

Pada tahun 2016, kontributor terbesar terhadap belanja langsung Kabupaten Bandung yaitu belanja barang dan jasa, dengan persentase sebesar 67,45%.

Ditinjau berdasarkan realisasinya, anggaran belanja daerah belum seluruhnya terserap. Dalam kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tampak terjadi penurunan persentase penyerapan belanja daerah. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya kinerja implementasi perencanaan di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, untuk pembangunan kedepan perlu didorong adanya peningkatan efisiensi implementasi perencanaan. Informasi detail mengenai perbandingan target dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.3.

**TABEL 3.3.**  
**TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2012	3.063.111.044.168,65	2.851.978.727.413,00	93,11	(211.132.316.755,65)
2013	3.556.435.069.635,98	3.242.165.132.570,50	91,16	(314.269.937.065,48)
2014	4.340.959.468.801,78	3.823.064.504.314,00	88,07	(517.894.964.487,78)
2015	5.142.388.330.904,74	4.607.334.886.117,81	89,60	(535.053.444.786,93)
2016	5.090.337.098.276,41	4.640.244.294.782,49	91,16	(450.092.803.493,92)

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2012-2016

Salah satu yang menjadi komponen dalam belanja daerah yaitu belanja pegawai. Kondisi ideal adalah apabila semakin tinggi penyerapan belanja pegawai menunjukkan optimalnya ketersediaan aparatur pemerintah untuk melakukan belanja program. Untuk

mengetahui kondisi keterserapan belanja pegawai di Kabupaten Bandung, pada Tabel 3.4. berikut disajikan target dan realisasi belanja pegawai di Kabupaten Bandung tahun 2012-2016.

**TABEL 3.4.**  
**TARGET DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2012	1.597.946.955.673,65	1.511.662.036.637,00	94,60	(86.284.919.036,65)



Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2013	1.876.339.109.506,48	1.675.145.253.728,00	89,28	(201.193.855.778,48)
2014	2.074.563.228.250,35	1.864.492.136.306,00	89,87	(210.071.091.944,35)
2015	2.228.852.612.988,65	1.982.292.982.263,00	88,94	(246.559.630.725,65)
2016	2.359.849.878.960,65	2.111.118.233.447,00	84,46	(248.731.645.513,65)

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam kurun lima tahun terakhir terjadi penurunan penyerapan belanja pegawai, khususnya untuk belanja pegawai yang masuk ke dalam kategori belanja tidak langsung. Penurunan dapat diakibatkan oleh berbagai sebab diantaranya akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, adanya pegawai yang meninggal dunia pada tahun berjalan atau akibat ketidaktepatan dalam menyusun prediksi alokasi anggaran belanja pegawai.

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran.

Berdasarkan hasil tinjauan erhadap pembiayaan daerah Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, tampak bahwa penerimaan pembiayaan setiap selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Khusus aspek penerimaan pembiayaan, sebagian besar penerimaan pembiayaan Kabupaten Bandung didominasi oleh Sisa lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan selanjutnya. Ditinjau dalam hal

perkembangannya, SiLPA Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, dengan demikian maka untuk mendorong perencanaan pembangunan kedepan perlu dilakukan efisiensi pembiayaan daerah, mengoptimalkan belanja daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Dalam aspek Pengeluaran pembiayaan, sebagian besar didominasi oleh pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana realtif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Gambaran detail mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 3.5.



**TABEL 3.5.**  
**REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>289.538.157.773,76</b>	<b>308.272.511.842,76</b>	<b>426.666.150.586,76</b>	<b>671.962.101.523,84</b>	<b>526.080.122.611,48</b>
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	288.707.585.817,76	308.234.711.842,76	417.841.242.686,76	611.926.101.523,84	525.908.303.877,48
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	8.823.407.900,00	60.000.000.000,00	0,00
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	830.571.956,00	37.800.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	48.425.168,00
1.7.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	123.393.566,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>32.000.000.000,00</b>	<b>18.365.313.000,00</b>	<b>30.425.138.130,00</b>	<b>15.500.000.000,00</b>	<b>5.500.000.000,00</b>
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000,00	1.630.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	1.735.313.000,00	5.425.138.130,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>		<b>295.530.052.754,06</b>	<b>257.538.157.773,76</b>	<b>289.907.198.842,76</b>	<b>396.241.012.456,76</b>	<b>520.580.122.611,48</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>287.664.144.919,76</b>	<b>307.974.031.542,76</b>	<b>415.786.047.447,76</b>	<b>611.926.101.523,84</b>	<b>488.056.779.022,36</b>

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2012-2016



### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca keuangan daerah merupakan salah satu pelaporan keuangan daerah yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah. Neraca ini dapat menunjukkan kinerja keuangan daerah sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan daerah. Berikut ini merupakan neraca keuangan Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan neraca daerah pada tahun 2011-2015 secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Selama kurun lima tahun terakhir, jumlah aset pemerintah Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,30% per tahun. Ditinjau per komponen penyusunnya, aset pemerintah meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai aset daerah terbesar tercatat pada tahun 2014 yang disebabkan terjadi kenaikan nilai yang signifikan pada Aset Lainnya. Kenaikan Aset Lainnya ini disebabkan adanya kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu berupa aset yang dimanfaatkan berbentuk tanah yang operasionalnya tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tetapi dimanfaatkan oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Perjanjian.
- Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana tercatat sebesar 6,26%. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana terbesar terjadi pada tahun 2014, dimana terjadi kenaikan pada beberapa pos yaitu Ekuitas Dana Investasi, (Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)) dan Ekuitas Dana Lancar (SiLPA yang besar akibat penyerapan anggaran tahun sebelumnya yang kurang optimal, Cadangan untuk Piutang, dan Pendapatan yang Ditangguhkan).

Informasi detail mengenai rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2012-2016 ditampilkan pada Tabel 3.6.



**TABEL 3.6.**  
**NERACA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
<b>1.</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>	<b>387.521.718.829,57</b>	<b>485.638.640.812,87</b>	<b>894.498.667.656,95</b>	<b>785.403.828.248,09</b>	<b>786.187.736.847,23</b>	<b>0,24</b>
1.1.1.	Kas	310.559.810.358,87	416.340.114.817,36	612.320.476.394,84	529.594.159.555,63	489.800.351.471,36	0,15
1.1.2.	Piutang	36.735.587.165,00	26.045.088.854,54	226.286.921.830,94	208.435.690.095,75	242.647.494.446,74	1,87
1.1.3.	Piutang Lainnya	5.992.821.019,50	7.188.653.785,00	13.267.549.977,50	878.986.392,95	730.470.949,18	-0,01
1.1.4.	Persediaan	33.785.993.984,83	35.630.200.022,64	42.623.719.453,67	46.180.280.395,80	52.801.872.937,04	0,12
1.1.5.	Biaya Dibayar Dimuka	447.506.301,37	434.583.333,33	0,00	314.711.807,96	207.547.042,91	-0,09
<b>1.2.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>253.335.811.403,22</b>	<b>256.210.095.010,65</b>	<b>268.713.792.401,12</b>	<b>269.539.755.582,92</b>	<b>277.217.519.354,23</b>	<b>0,02</b>
1.2.1.	Investasi Non Permanen	4.392.500.000,00	4.389.700.000,00	4.388.200.000,00	4.369.699.625,00	4.361.199.625,00	0,00
1.2.2.	Investasi Permanen	248.943.311.403,22	251.820.395.010,65	264.325.592.401,12	265.170.055.957,92	272.856.319.729,23	0,02
<b>1.3.</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>6.005.517.210.614,07</b>	<b>6.749.067.731.519,00</b>	<b>7.379.997.428.785,98</b>	<b>6.502.011.061.760,63</b>	<b>7.607.623.027.121,00</b>	<b>0,07</b>
1.3.1.	Tanah	2.493.411.319.733,00	2.514.485.808.599,00	2.480.777.114.182,00	2.523.145.309.140,00	2.966.947.552.217,00	0,05
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	451.583.825.333,92	613.237.794.442,00	581.426.044.487,78	725.144.109.850,00	891.087.980.675,00	0,20
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.343.272.674.120,15	1.541.291.886.570,00	1.759.398.908.136,13	2.041.381.623.487,00	2.246.220.041.170,00	0,14
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.658.716.692.054,00	2.012.236.459.457,00	2.448.848.181.003,51	3.114.693.187.302,00	3.672.279.731.670,00	0,22
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	28.942.227.757,00	51.046.068.586,00	70.079.288.094,56	91.815.414.426,00	130.100.179.229,00	0,47
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.590.471.616,00	16.769.713.865,00	39.467.892.882,00	47.279.771.078,00	25.987.550.650,00	0,17
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan				(2.041.448.353.522,37)	(2.325.000.008.490,00)	0,03
<b>1.4.</b>	<b>Dana Cadangan</b>	<b>24.449.273.420,00</b>	<b>40.967.098.322,00</b>	<b>48.505.290.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
1.4.1.	Dana Cadangan	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	0,00	0,21
<b>1.5.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>16.553.228.449,53</b>	<b>16.758.877.555,53</b>	<b>274.627.042.860,53</b>	<b>286.462.417.205,23</b>	<b>282.428.970.958,38</b>	<b>3,86</b>
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	195.579.348,00	195.579.348,00	195.579.348,00	215.113.745,00	4.244.293,38	-0,22
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	69.180.753,53	69.180.753,53	2.016.900.490,53	0,00	0,00	7,04
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	240.784.811.475,00	243.265.576.475,00	0,00



No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	10.317.874.990,00	8.837.857.745,00	13.119.246.820,00	14.910.125.700,00	0,00	-0,13
1.5.5.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	(3.826.433.495,00)	0,00	-
1.5.6.	Aset Lain-lain	5.970.593.358,00	7.656.259.709,00	259.295.316.202,00	34.378.799.780,00	39.159.150.190,00	8,11
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.687.377.242.716,39</b>	<b>7.548.642.443.220,05</b>	<b>8.866.342.222.287,58</b>	<b>7.843.417.062.796,87</b>	<b>8.953.457.254.280,84</b>	<b>0,08</b>
<b>2.</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>6.167.011.682,62</b>	<b>9.902.963.747,60</b>	<b>5.114.179.382,15</b>	<b>25.978.607.061,10</b>	<b>22.747.193.502,64</b>	<b>1,02</b>
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	320.774.779,11	418.641.683,60	41.515.837,00	10.169.620,00	1.965.600,00	-0,54
2.1.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	200.397.718,51	0,00	684.972.500,15	982.082.973,70	1.280.059.399,64	0,18
2.1.4.	Utang Beban	0,00	0,00	0,00	22.355.120.047,40	20.305.721.603,00	-0,02
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.145.839.185,00	8.984.322.064,00	3.887.691.045,00	2.131.234.420,00	659.446.900,00	-0,24
<b>2.2.</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>3.137.276.621,00</b>	<b>2.637.276.621,00</b>	<b>2.079.384.471,00</b>	<b>1.578.530.971,00</b>	<b>1.078.530.971,00</b>	<b>-0,23</b>
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	3.137.276.621,00	2.637.276.621,00	2.079.384.471,00	1.578.530.971,00	1.078.530.971,00	-0,23
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.571.445.092,07</b>	<b>9.304.288.303,62</b>	<b>12.540.240.368,60</b>	<b>27.557.138.032,10</b>	<b>23.825.724.473,64</b>	<b>0,61</b>
<b>3.</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>381.354.707.146,95</b>	<b>475.735.677.065,27</b>	<b>889.384.488.274,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA)	309.929.497.577,76	415.786.047.447,76	611.954.333.929,84	0,00	0,00	0,20
3.1.2.	Cadangan untuk Piutang	43.175.914.485,87	33.668.325.972,87	239.554.471.808,44	0,00	0,00	1,47
3.1.3.	Cadangan untuk Persediaan	33.785.993.984,83	35.630.200.022,64	42.623.719.453,67	0,00	0,00	0,06
3.1.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(5.724.182.080,51)	(9.352.629.058,00)	(5.047.315.662,15)	0,00	0,00	0,04
3.1.5.	Pendapatan yang Ditangguhkan	187.483.179,00	3.732.680,00	299.278.745,00	0,00	0,00	19,55
<b>3.2.</b>	<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>6.272.268.973.845,82</b>	<b>7.019.399.427.464,18</b>	<b>7.921.258.879.576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	253.335.811.403,22	256.210.095.010,65	268.713.792.401,12	0,00	0,00	0,02



No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
3.2.2.	Diiinvestasikan dalam Aset Tetap	6.005.517.210.614,07	6.749.067.731.519,00	7.379.997.428.785,98	0,00	0,00	0,05
3.2.3.	Diiinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	16.553.228.449,53	16.758.877.555,53	274.627.042.860,53	0,00	0,00	3,85
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(3.137.276.621,00)	(2.637.276.621,00)	(2.079.384.471,00)	0,00	0,00	-0,09
<b>3.3.</b>	<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>24.449.273.420,00</b>	<b>40.967.098.322,00</b>	<b>48.505.290.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
3.3.1.	Diiinvestasikan dalam Dana Cadangan	24.449.273.420,00	40.967.098.322,00	48.505.290.583,00	0,00	0,00	0,21
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>6.053.672.961.870,66</b>	<b>6.678.072.954.412,77</b>	<b>7.536.102.202.851,45</b>	<b>8.859.148.658.434,43</b>	<b>7.815.859.924.764,77</b>	<b>0,07</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>6.058.244.406.962,73</b>	<b>6.687.377.242.716,39</b>	<b>7.548.642.443.220,05</b>	<b>8.886.705.796.466,53</b>	<b>7.839.795.649.238,41</b>	<b>0,07</b>

Sumber: Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011-2016 dan Hasil Analisis Bappeda 2015





Untuk mengidentifikasi kualitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio akan menjadi dasar pertimbangan dan membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam pencapaian pembangunan daerah dan prospeknya di masa datang. Selain dari pada itu, hasil analisis rasio akan berfungsi untuk

menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Analisis rasio yang dapat dilakukan terhadap APBD ini yaitu rasio atas neraca dan rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.7.

**TABEL 3.7.**  
**ANALISIS RASIO KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>I. Rasio atas Neraca</b>						
1.	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> ); {Aset Lancar / Kewajiban Lancar}	6.283,78	4.903,97	17.490,56	3.023,27	3.299,74
2.	Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> ); {Kas + Surat Berharga / Kewajiban Lancar}	5.035,82	4.204,20	11.973,00	2.038,58	2.055,76
3.	Rasio Quick ( <i>Quick Ratio</i> ); {Kas + Surat Berharga + Piutang / Kewajiban Lancar}	5.631,50	4.467,20	16.397,69	2.840,91	3.074,19
<b>II. Rasio atas LRA</b>						
4.	Rasio Kemandirian; {PAD / Total Pendapatan}	12,62	15,06	17,38	14,99	18,59
5.	Rasio Efektivitas PAD; {Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD}	114,85	117,93	120,26	116,59	112,59
6.	Rasio Keserasian (Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Tidak Langsung / Total APBD}	60,88	59,80	57,46	55,27	42,13
7.	Rasio Keserasian (Belanja Langsung terhadap Total APBD); {Belanja Langsung / Total APBD}	39,12	40,20	42,54	44,73	57,87

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Melalui tabel di atas dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung yang didasarkan atas analisis rasio yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancar Kabupaten Bandung periode tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan rasio yang positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp. 1,00 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh aset lancar minimal Rp. 302.327,00 pada tahun 2015.

2. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas Kabupaten Bandung periode tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp. 1,00 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas dan surat berharga minimal Rp. 203.858,00 pada tahun 2015.

3. Rasio *Quick* (*Quick Ratio*)

Rasio *quick* merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga, dan piutang dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio *quick* Kabupaten Bandung periode tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp. 1,00 kewajiban lancar kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga, dan piutang minimal Rp. 284.901,00 pada tahun 2015.

4. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung (otonomi fisik) dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap bantuan pihak luar (pemerintah pusat dan provinsi).

Rasio kemandirian Kabupaten Bandung selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 rata-rata sebesar 15,73%. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada tahun 2016, yaitu sebesar 18,59%, artinya bahwa dari total pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Bandung tahun 2016 kontribusi PAD-nya sebesar 18,59%.

5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Bandung selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 rata-rata sebesar 116,44%. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Selama periode tahun 2012 hingga 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai target perolehan PAD. Rasio efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2014, yaitu sebesar 120,26%.

6. Rasio Keserasian Belanja Tidak

Langsung terhadap Total Belanja APBD  
Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya



pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan, dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio keserasian belanja tidak langsung Kabupaten Bandung selama periode 2012 hingga 2016 rata-rata mencapai 55,11% dari total belanja APBD. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rasio keserasian belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD terus mengalami penurunan, rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 42,13%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 60,88%.

#### 7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD

Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan, dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi.

Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten Bandung selama periode 2012 hingga 2016 rata-rata mencapai 44,89% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 39,12%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2016 yaitu sebesar 57,87%. Berbanding terbalik dengan rasio keserasian belanja tidak langsung, rasio keserasian belanja langsung terhadap total belanja APBD mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini

mengindikasikan adanya pergeseran prioritas alokasi belanja APBD dari belanja tidak langsung ke belanja langsung.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2012-2016 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan dana masyarakat dan mitra.

#### A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2012-2016 memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bisa diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2012-2016 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:



1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan PAD dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meliputi:
    - a. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
    - b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
    - c. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
    - d. Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
    - e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
    - f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil;
    - g. Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
    - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
    - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
  2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
    - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan untuk meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.
- B. Arah Kebijakan Belanja Daerah**
- Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2012- 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin



efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2012-2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2012 yang baru mencapai sebesar 68,13 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2012-2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program/kegiatan serta melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi



- di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
  11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
  12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
  13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
    - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
    - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
    - f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    - g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah;
    - h. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan



yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### D. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012-2016 adalah:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

### E. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2012-2016 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

### F. Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan tahun 2011-2015 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bandung. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bandung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bandung;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan



- pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
  4. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
  5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
  6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

#### A. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.8.

Dalam aspek belanja tidak langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 91,86%. Jika ditinjau per komponen, belanja bantuan sosial memiliki rata-rata penyerapan anggaran terendah dengan persentase serapan sebesar 51,81%. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya anggaran yang belum tersalurkan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial terkait dengan pengajuan bantuan sosial secara langsung oleh individu/kelompok masyarakat/lembaga melalui proposal kegiatan pada tahun n-1. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja bantuan sosial, kemungkinan besar diakibatkan masih rendahnya animo masyarakat untuk mengajukan bantuan sosial kepada pemerintah daerah.

Komponen pada belanja tidak langsung yang memiliki persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu komponen belanja bagi hasil kepada pemerintah desa. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata persentase serapan yaitu sebesar 98,17%. Tingginya angka serapan menunjukkan efektifnya pengalokasian anggaran dalam meningkatkan pembangunan perdesaan.

Dalam aspek langsung, rata-rata anggaran yang terrealisasi baru sekitar 89,58%. Komponen belanja langsung yang persentase penyerapannya terendah yaitu komponen belanja modal dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 81,82%. Sedangkan komponenn belanja langsung yang persentase penyerapannya paling tinggi yaitu komponen belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Rata-rata persentase penyerapan belanja pegawai pada komponen belanja langsung selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 103,14%.





**TABEL 3.8.**  
**PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012			2013			2014			2015			2016			Rata-Rata (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.855.126.650.283,65</b>	<b>1.736.329.871.127</b>	<b>93,60</b>	<b>2.167.357.178.307,26</b>	<b>1.938.719.940.170</b>	<b>89,45</b>	<b>2.433.290.691.135,78</b>	<b>2.196.885.719.863</b>	<b>90,28</b>	<b>2.821.656.195.357,51</b>	<b>2.546.255.642.757,00</b>	<b>90,24</b>	<b>2.943.607.843.422,31</b>	<b>2.685.314.082.415,00</b>	<b>91,23</b>	<b>91,86</b>
1.	Belanja Pegawai	1.597.946.955.673,65	1.511.662.036.637	94,60	1.876.339.109.506,48	1.675.145.253.728	89,28	2.074.563.228.250,35	1.864.492.136.306	89,87	2.228.852.612.988,65	1.982.292.982.263,00	88,94	2.359.849.878.960,65	2.111.118.233.447,00	89,46	91,49
2.	Belanja Hibah	45.150.945.868,00	41.734.739.950	92,43	50.918.941.500,00	45.795.244.500	89,94	107.530.617.500,00	100.173.730.800	93,16	177.044.015.725,00	169.528.017.394,00	95,75	87.873.847.925,00	86.120.723.750,00	98,00	94,90
3.	Belanja Bantuan Sosial	7.409.833.382,00	1.855.669.700	25,04	11.569.497.064,00	3.193.750.000	27,60	13.850.000.000,00	9.951.500.000	71,85	17.717.250.000,00	14.098.500.000,00	79,57	2.081.250.000,00	809.750.000,00	38,91	51,81
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	62.048.680.093,60	61.050.186.000	98,39	79.858.117.825,77	79.808.834.300	99,94	83.045.166.756,27	77.609.872.900	93,46	254.559.303.682,23	248.191.375.600,00	97,50	268.746.770.886,66	267.228.456.500,00	99,44	98,17
5.	Belanja Bantuan Keuangan	120.144.536.010,00	114.480.114.940	95,29	135.218.245.920,00	132.970.226.420	98,34	144.357.939.099,00	143.374.965.000	99,32	133.270.795.649,63	129.324.752.500,00	97,04	216.056.095.650,00	216.023.280.984,00	99,98	97,92
6.	Belanja Tidak Terduga	22.425.699.256,40	5.137.123.900	22,91	13.453.266.491,01	1.806.631.222	13,43	9.943.739.530,16	1.283.514.857	12,91	10.212.217.312,00	2.820.015.000,00	27,61	9.000.000.000,00	4.013.637.734,00	44,60	24,86
B.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.207.984.393.885,00</b>	<b>1.115.648.856.286</b>	<b>92,36</b>	<b>1.389.077.891.328,72</b>	<b>1.303.445.192.401</b>	<b>93,84</b>	<b>1.907.668.777.666,00</b>	<b>1.626.178.784.451</b>	<b>85,24</b>	<b>2.320.732.135.547,23</b>	<b>2.061.079.243.360,81</b>	<b>88,81</b>	<b>2.146.729.254.854,10</b>	<b>1.954.930.212.367,49</b>	<b>91,07</b>	<b>89,58</b>
1.	Belanja Pegawai	104.811.661.970,00	130.434.550.552	124,45	157.617.214.516,00	160.091.690.247	101,57	201.672.646.168,00	213.305.481.562	105,77	58.002.194.458,00	52.412.198.523,00	90,36	66.544.144.715,00	66.803.856.551,00	100,39	103,14
2.	Belanja Barang dan Jasa	512.732.044.950,00	493.931.103.551	96,33	723.239.437.752,66	694.275.377.490	96,00	1.062.274.310.541,00	939.501.476.184	88,44	1.456.202.990.578,27	1.300.202.518.140,81	89,29	1.457.464.273.363,10	1.318.682.566.812,99	90,48	92,77
3.	Belanja Modal	564.591.683.234,00	491.283.202.183	87,02	508.221.239.060,06	449.078.124.664	88,36	643.721.820.957,00	473.371.826.705	73,54	806.526.950.510,96	708.464.526.697,00	87,84	622.720.836.776,00	569.443.789.003,50	91,44	81,82
	<b>TOTAL</b>	<b>3.063.111.044.168,65</b>	<b>2.851.978.727.413</b>	<b>93,11</b>	<b>3.556.435.069.635,98</b>	<b>3.242.165.132.570</b>	<b>91,16</b>	<b>4.340.959.468.801,78</b>	<b>3.823.064.504.314</b>	<b>88,07</b>	<b>5.142.388.330.904,74</b>	<b>4.607.334.886.117,81</b>	<b>89,60</b>	<b>5.090.337.098.276,41</b>	<b>4.640.244.294.782,49</b>	<b>91,16</b>	<b>90,97</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



## B. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat

keterserapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2012-2016 yaitu:

**TABEL 3.9.**  
**ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran {Belanja + Pembiayaan Pengeluaran} (Rp)	Persentase
	(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
2012	1.642.096.587.189,00	2.883.978.727.413,00	56,94
2013	1.835.236.943.975,00	3.260.530.445.570,00	56,29
2014	2.077.797.617.868,00	3.853.489.642.444,00	53,92
2015	2.034.705.180.786,00	4.622.834.886.117,81	44,01
2016	2.177.922.089.998,00	4.645.744.294.782,49	46,88

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Dalam kurun lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan jumlah total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Kendati demikian, jika dibandingkan terhadap total pengeluaran, proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara garis besar, gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.177.922.089.998,00
2. Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.622.834.886.117,81.
3. Persentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 56,94%.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah akan menghasilkan keputusan mengenai besarnya surplus yang perlu disalurkan atau defisit yang harus ditutup. Penentuan keputusan tersebut ditentukan dengan membandingkan antara total pendapatan belanja daerah. Sebagai informasi awal, rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.10.



**TABEL 3.10.**  
**REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Realisasi Belanja</b>
<b>2012</b>	2.902.414.601.182,00	2.851.978.727.413,00
<b>2013</b>	3.368.043.981.175,50	3.242.165.132.570,00
<b>2014</b>	4.038.777.825.787,08	3.823.064.504.314,00
<b>2015</b>	4.476.751.164.755,60	4.607.334.886.117,81
<b>2016</b>	4.607.669.372.893,37	4.640.244.294.782,49

*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

Pada tabel rekapitulasi di atas, tampak bahwa antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, nilai realisasi belanja Kabupaten Bandung lebih besar dibandingkan nilai realisasi pendapatan. Sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016, realisasi belanja Kabupaten Bandung bernilai lebih besar dibandingkan nilai realisasi pendapatan. Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel 3.11 berikut.



**TABEL 3.11.**  
**DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan	2.902.414.601.182,00	3.368.043.981.175,50	4.038.777.825.787,08	4.476.751.164.755,60	4.607.669.372.893,37
Dikurangi:						
2.	Realisasi Belanja	2.851.978.727.413,00	3.242.165.132.570,00	3.823.064.504.314,00	4.607.334.886.117,81	4.640.244.294.782,49
3.	Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000,00	18.365.313.000,00	30.425.138.130,00	15.500.000.000,00	5.500.000.000,00
<b>Defisit Riil</b>		<b>18.435.873.769,00</b>	<b>107.513.535.605,50</b>	<b>185.288.183.343,08</b>	<b>-146.083.721.362,21</b>	<b>-38.074.921.889,12</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016

**TABEL 3.12.**  
**KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	288.707.585.817,76	308.234.711.842,76	417.841.242.686,76	611.926.101.523,84	525.908.303.877,48
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	8.823.407.900.000,00	60.000.000.000,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	830.571.956,00	37.800.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	48.425.168,00
7.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	123.393.566,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>289.538.157.773,76</b>	<b>308.272.511.842,76</b>	<b>426.666.150.586,76</b>	<b>671.962.101.523,84</b>	<b>526.080.122.611,00</b>

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung Tahun 2012-2016



**TABEL 3.13.**  
**REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012-2016**

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>288.707.585.817,76</b>	<b>100%</b>	<b>308.234.711.842,76</b>	<b>100%</b>	<b>417.841.242.686,76</b>	<b>100%</b>	<b>611.926.101.523,84</b>	<b>100%</b>	<b>488.056.779.022,36</b>	<b>100%</b>
a.	Pelampauan penerimaan PAD										
b.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
c.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
d.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
e.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
	Kegiatan lanjutan										

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan tahun 2016-2021 perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Analisis ini akan terbagi menjadi analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Bandung dalam lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi disusun dengan menarik tren perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir, tahun 2012 hingga 2016. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap tren pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung lima tahun ke depan.

Di dalam penyusunan proyeksi ini, pendapatan di tahun 2017 dan 2018 sudah ditetapkan dengan adanya Perda mengenai APBD, sehingga data yang dipakai untuk kedua tahun tersebut adalah data anggaran berdasarkan APBD Murni Tahun 2017 dan 2018. Data dasar yang digunakan dalam proyeksi ini adalah pagu indikatif RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018. Informasi mendetil mengenai hasil proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 3.14.

Berdasarkan hasil proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah, tampak terjadi peningkatan pendapatan. Berdasarkan APBD

Murni Tahun 2017, total pendapatan daerah Kabupaten Bandung bernilai Rp. 4.536.385.612.873,90. Pada tahun 2021, diprediksi nilai tersebut menurun menjadi sekitar Rp. 4.236.518.790.461,50 yang diakibatkan oleh proyeksi murni dilakukan hanya pada komponen Pendapatan Asli Daerah, sementara untuk komponen lainnya terdapat dana-dana yang dianggap konstan dan dana-dana yang tidak dimasukkan ke dalam proyeksi karena diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung.



**TABEL 3.14.**  
**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021**

No	Uraian	Pertumbuhan	APBD Tahun 2017 (Sebelum Perubahan)	APBD Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,034</b>	<b>762.256.352.460,90</b>	<b>813.568.015.667,51</b>	<b>833.385.932.513,33</b>	<b>851.054.124.991,70</b>	<b>870.526.683.461,50</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	0,046	329.775.000.000,00	378.428.000.000,00	383.360.000.000,00	386.940.000.000,00	392.450.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	-0,005	27.377.348.705,90	26.806.281.904,51	25.344.876.228,33	26.082.159.706,70	26.764.536.176,50
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,005	64.599.661.644,00	65.881.835.563,00	65.881.835.563,00	65.881.835.563,00	65.881.835.563,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,032	340.504.342.111,00	342.451.898.200,00	358.799.220.722,00	372.150.129.722,00	385.430.311.722,00
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>-0,065</b>	<b>3.142.533.223.676,00</b>	<b>3.123.675.917.000,00</b>	<b>2.331.524.979.000,00</b>	<b>2.331.524.979.000,00</b>	<b>2.331.524.979.000,00</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-0,022	297.387.988.676,00	271.322.282.000,00	271.322.282.000,00	271.322.282.000,00	271.322.282.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	-0,004	2.096.677.101.000,00	2.060.202.697.000,00	2.060.202.697.000,00	2.060.202.697.000,00	2.060.202.697.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,058	748.468.134.000,00	792.150.938.000,00	-	-	-
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>0,176</b>	<b>631.596.036.737,00</b>	<b>1.126.970.137.600,00</b>	<b>1.034.467.128.000,00</b>	<b>1.034.467.128.000,00</b>	<b>1.034.467.128.000,00</b>
1.3.1	Hibah	38,247	2.282.430.000,00	351.471.000.000,00	351.471.000.000,00	351.471.000.000,00	351.471.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dan Dari Pemerintah Daerah lainnya	0,005	379.899.357.737,00	387.112.418.000,00	387.112.418.000,00	387.112.418.000,00	387.112.418.000,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,000	-	34.250.000.000,00	34.250.000.000,00	34.250.000.000,00	34.250.000.000,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	92.503.009.600,00	-	-	-
1.3.7.	Dana Desa	0,012	249.414.249.000,00	261.633.710.000,00	261.633.710.000,00	261.633.710.000,00	261.633.710.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>-0,011</b>	<b>4.536.385.612.873,90</b>	<b>5.064.214.070.267,51</b>	<b>4.199.378.039.513,33</b>	<b>4.217.046.231.991,70</b>	<b>4.236.518.790.461,50</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>						
2.1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>2.996.435.446.061,90</b>	<b>2.832.952.475.078,13</b>	<b>2.882.511.036.162,41</b>	<b>2.912.942.950.433,43</b>	<b>2.933.560.445.130,23</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai		2.361.891.443.153,99	2.173.540.355.675,90	2.226.887.603.425,90	2.256.887.603.425,90	2.276.887.603.425,90



No	Uraian	Pertumbuhan	APBD Tahun 2017 (Sebelum Perubahan)	APBD Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
2.1.2.	Belanja Bunga		-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah		68.716.853.750,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial		797.250.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa		36.959.859.734,91	45.076.946.925,63	40.877.574.836,51	41.309.489.107,53	41.926.983.804,33
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah		504.876.895.758,00	510.375.522.476,60	510.786.207.900,00	510.786.207.900,00	510.786.207.900,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga		23.193.143.665,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>		<b>1.861.019.138.515,00</b>	<b>2.642.918.449.921,00</b>	<b>1.789.939.479.159,00</b>	<b>1.797.905.912.669,00</b>	<b>1.805.912.178.388,00</b>
	BL Urusan SKPD		184.025.491.856,00	236.485.165.011,68	229.023.792.703,00	230.409.267.442,00	229.568.003.748,00
	BL Urusan Program		1.676.993.646.659,00	2.406.433.284.909,32	1.560.915.686.456,00	1.567.496.645.227,00	1.576.344.174.640,00
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>		<b>4.857.454.584.576,90</b>	<b>5.475.870.924.999,13</b>	<b>4.672.450.515.321,41</b>	<b>4.710.848.863.102,43</b>	<b>4.739.472.623.518,23</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>		<b>(321.068.971.703,00)</b>	<b>(411.656.854.731,62)</b>	<b>(473.072.475.808,08)</b>	<b>(493.802.631.110,73)</b>	<b>(502.953.833.056,73)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>		<b>366.568.971.703,00</b>	<b>466.235.385.717,62</b>	<b>473.072.475.808,08</b>	<b>493.802.631.110,73</b>	<b>502.953.833.056,73</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)		366.568.971.703,00	466.235.385.717,62	473.072.475.808,08	493.802.631.110,73	502.953.833.056,73
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-	-
3.1.7.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal		-	-	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>45.500.000.000,00</b>	<b>54.578.530.986,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





No	Uraian	Pertumbuhan	APBD Tahun 2017 (Sebelum Perubahan)	APBD Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi)		45.000.000.000,00	53.500.000.000,00	-	-	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang		500.000.000,00	1.078.530.986,00	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>321.068.971.703,00</b>	<b>411.656.854.731,62</b>	<b>473.072.475.808,08</b>	<b>493.802.631.110,73</b>	<b>502.953.833.056,73</b>
<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>			-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 akan difokuskan pada peningkatan LPE yaitu dengan menggenjot PDRB. Peningkatan PDRB ini akan diupayakan melalui berbagai aspek, yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah, yang bersumber dari potensi keuangan/pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengoptimalkan pendapatand aerah melalui berbagai cara berikut:
  - a. Optimalisasi PAD terutama dengan mendorong penerimaan pada pos terkait bidang jasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.
  - b. Peningkatan transparansi objek pajak.
  - c. Pendataan ulang wajib pajak secara akurat dan aktual.
  - d. Memisahkan Perangkat Daerah yang mengupayakan pendapatan daerah dengan yang mengelola keuangan daerah.
  - e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer.
  - f. Mengaktualisasi data kekayaan alam untuk penghitungan dana bagi hasil yang lebih akurat.
  - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Selain optimalisasi pendapatan, terdapat pula kebijakan belanja sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi belanja dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik.

- b. Menekan belannja pegawai dengan tidak menambah jumlah aparatur pemerintah di Kabupaten Bandung.

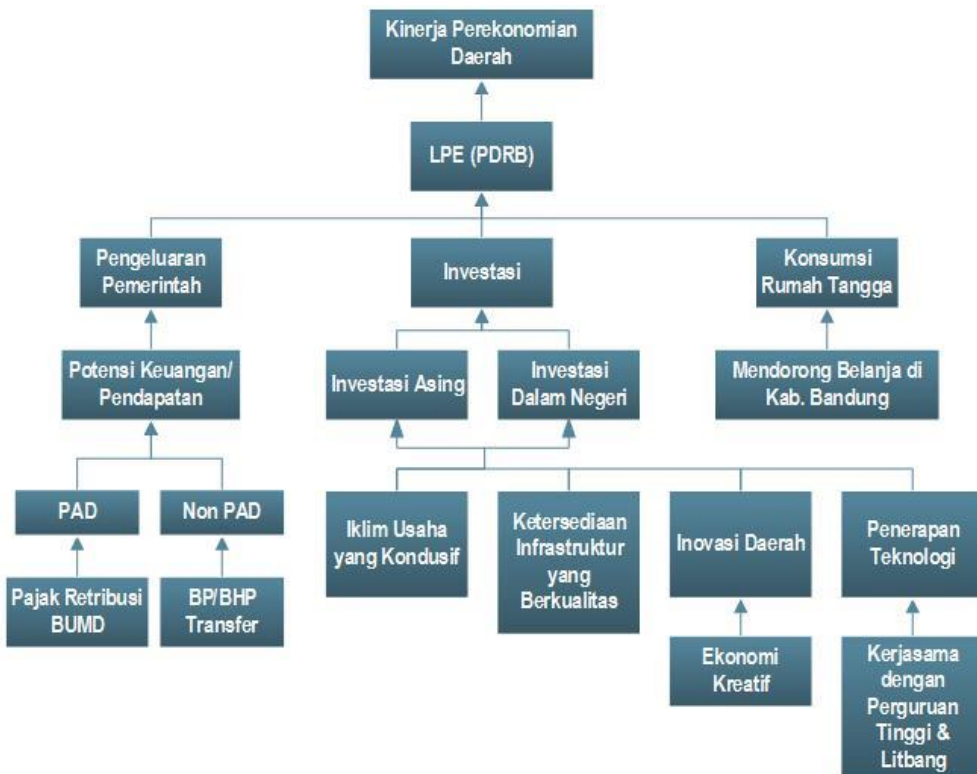
Sedangkan pada pembiayaan daerah perlu dilakukan peninjauan secara terukur sehingga dapat terwujud penganggaran yang seimbang.

2. Investasi, yang bersumber dari investasi asing dan investasi dalam negeri. Peningkatan investasi ini dilakukan melalui upaya berikut:
  - a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, yaitu dengan mempermudah perizinan dan memberlakukan sistem insentif bagi usaha yang sejalan dengan rencana pemerintah dan sistem disinsentif bagi usaha yang bertentangan dengan arahan pemerintah/mencemari lingkungan.
  - b. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, diantaranya dengan membangun infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Bandung, infrastruktur air limbah, dll. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diandalkan efektif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.
  - c. Pengembangan inovasi daerah, terutama dengan mengembangkan perekonomian kreatif di Kabupaten Bandung.
  - d. Penerapan teknologi dengan cara meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
3. Konsumsi rumah tangga, yaitu dengan cara mendorong pembelanjaan di Kabupaten Bandung. Untuk meningkatkan konsumsi di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas jalur penghubung



Kabupaten Bandung dengan daerah lain, khususnya Kota Bandung, serta dengan menerapkan *regional branding* atas produk dan citra Kabupaten Bandung. Selain itu

juga dengan meningkatkan daya beli masyarakat lokal Kabupaten Bandung sehingga tingkat konsumsi lokal semakin baik.



**GAMBAR 3.1.**  
**ANALISIS KEBIJAKAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Berdasarkan hasil proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tahun 2017-2021, diperoleh rencana pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.15. Pengeluaran wajib dan mengikat ini akan menjadi Rencana Anggaran untuk Prioritas I yang sifatnya penting bagi pemenuhan kepentingan publik serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.



**TABEL 3.15.**  
**PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.957.186.164.606,50</b>	<b>2.807.363.160.501,53</b>	<b>2.542.150.012.725,73</b>	<b>2.604.218.893.073,57</b>	<b>2.630.994.986.570,55</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.361.891.443.153,99	2.173.540.355.675,90	1.920.984.542.202,90	1.973.474.014.202,90	1.999.474.014.202,90
2.1.2.	Belanja Hibah	68.716.853.750,00	93.066.900.000,00	83.979.325.000,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	797.250.000,00	892.750.000,00	1.005.500.000,00	1.005.500.000,00	1.005.500.000,00
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	36.959.859.734,91	45.076.946.925,63	41.394.437.622,83	41.886.270.970,67	42.662.364.467,65
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah	488.820.757.967,60	494.786.207.900,00	494.786.207.900,00	494.786.207.900,00	494.786.207.900,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>928.025.633.281,00</b>	<b>1.444.161.017.190,00</b>	<b>833.334.647.289,52</b>	<b>869.761.115.167,46</b>	<b>894.860.805.056,96</b>
2.2.1.	Belanja Langsung Perangkat Daerah	184.025.491.856,00	218.104.094.458,00	183.308.624.747,40	224.258.515.861,10	208.706.858.902,58
2.2.2.	Belanja Urusan Pendidikan	170.593.622.809,00	535.828.526.675,00	101.661.169.890,13	102.908.836.265,94	110.977.343.037,96
2.2.3.	Belanja Urusan Kesehatan	573.406.518.616,00	690.228.396.057,00	548.364.852.652,00	542.593.763.040,42	575.176.603.116,43
<b>Jumlah (2.1. + 2.2.)</b>		<b>3.885.211.797.887,50</b>	<b>4.251.524.177.691,53</b>	<b>3.375.484.660.015,26</b>	<b>3.473.980.008.241,03</b>	<b>3.525.855.791.627,51</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tersebar dalam pos belanja langsung dan tidak langsung. Dalam pos belanja langsung, pengeluaran wajib dan mengikat merupakan representasi dari total belanja pegawai (berupa honorarium kegiatan khusus dan beasiswa pendidikan PNS) serta belanja modal (berupa belanja jasa kantor, belanja sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor), yang dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung Perangkat Daerah. Selain dari pada itu, pos belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat juga meliputi seluruh belanja program untuk urusan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 bahwa kedua urusan ini merupakan komponen dasar utama dan memegang peran penting bagi peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan hasil proyeksi, dapat diamati bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan terjadi peningkatan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Bandung, kecuali pada tahun 2018, yang mana pada tahun ini terjadi penurunan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Penurunan ini diakibatkan oleh penetapan data belanja program tahun 2016 sebagai basis data proyeksi tahun 2018 sampai tahun 2021. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 telah ditetapkan sebelum RPJMD Kabupaten Bandung ditetapkan, maka sebagai implikasinya anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 perlu di akomodir dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Adapun untuk tahun 2017, penentuan anggaran belanja tidak dilakukan melalui metode proyeksi. Nilai anggaran yang dicantumkan merupakan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah, sejalan

dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Mengingat pada saat penyusunan RPJMD ini anggaran tahun 2017 masih berfluktuasi (belum ditetapkan), maka sebagai basis data proyeksi tahun 2018-2021 digunakan data tahun 2016 sebagai basis data.

Nilai perkiraan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bandung tahun 2017-2021 di atas akan menjadi dasar bagi penentuan kapasitas riil kemampuan daerah. Kapasitas riil daerah yaitu suatu ukuran yang menunjukkan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan hasil perhitungan, teridentifikasi bahwa untuk tahun 2017-2021 terjadi peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Tahun 2016, kapasitas riil kemampuan Kabupaten Bandung untuk mendanai prioritas II dan III pembangunan adalah sebesar Rp. 675.485.753.985,00. Tahun 2021, kemampuan pendanaan diprediksi meningkat menjadi sebesar Rp. 858.134.712.442,72. Informasi mendetil mengenai kapasitas riil kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2017-2021, disajikan pada Tabel 3.16.

Besaran kapasitas riil kemampuan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mendanai pembanguna diluar pengeluaran wajib dan mengikat. Dengan kata lain, kapasitas riil kemampuan daerah menunjukkan ketersediaan anggaran untuk pendanaan prioritas II dan prioritas III. Prioritas II merupakan prioritas di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dalam hal ini rencana anggaran prioritas II meliputi seluruh belanja langsung urusan setelah dikurangi anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan. Total rencana alokasi anggaran prioritas II tahun



2016 yaitu sebesar Rp. 663.125.066.335,00. Dalam kurun tahun 2017-2021 terjadi peningkatan alokasi anggaran prioritas II. Tahun 2021, anggaran prioritas II sebesar Rp. 828.634.712.442,72. Sisa pengurangan kapasitas riil keuangan daerah dengan rencana alokasi prioritas II menjadi alokasi bagi prioritas III yang antara lain meliputi belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan. Informasi mendetil mengenai rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditampilkan pada Tabel 3.17.



**TABEL 3.16.**  
**KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021**

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pendapatan	4.536.385.612.873,90	5.064.214.070.267,51	3.838.896.539.513,33	3.858.572.159.433,70	3.881.036.671.013,50
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	366.568.971.703,00	466.235.385.717,62	473.072.475.808,08	493.802.631.110,73	502.953.833.056,73
Total penerimaan		4.902.954.584.576,90	5.530.449.455.985,13	4.311.969.015.321,41	4.352.374.790.544,43	4.383.990.504.070,23
Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.885.211.797.887,50	4.251.524.177.691,53	3.375.484.660.015,26	3.473.980.008.241,03	3.525.855.791.627,51
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>		<b>1.017.742.786.689,40</b>	<b>1.278.925.278.293,60</b>	<b>936.484.355.306,15</b>	<b>878.394.782.303,40</b>	<b>858.134.712.442,72</b>

*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

**TABEL 3.17.**  
**RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021**

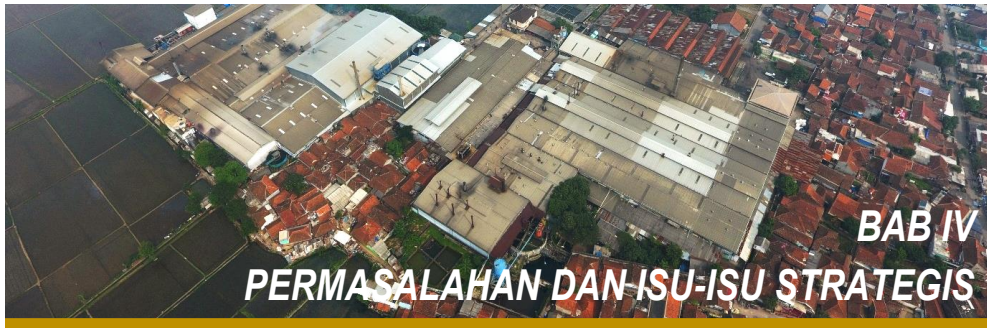
No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>I.</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I</b>					
I.a.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.885.211.797.887,50	4.251.524.177.691,53	3.375.484.660.015,26	3.473.980.008.241,03	3.525.855.791.627,51
	<b>Total Prioritas I</b>	<b>3.885.211.797.887,50</b>	<b>4.251.524.177.691,53</b>	<b>3.375.484.660.015,26</b>	<b>3.473.980.008.241,03</b>	<b>3.525.855.791.627,51</b>
<b>II.</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II</b>					
II.a.	Belanja Langsung Program	1.676.993.646.659,00	2.424.814.355.463,00	1.540.378.384.348,27	1.494.397.381.609,76	1.514.788.658.597,10
	Dikurangi:					
II.b.	Belanja Langsung Urusan Pendidikan dan Kesehatan	744.000.141.425,00	1.226.056.922.732,00	650.026.022.542,13	645.502.599.306,36	686.153.946.154,39
	<b>Total Prioritas II</b>	<b>932.993.505.234,00</b>	<b>1.198.757.432.731,00</b>	<b>890.352.361.806,15</b>	<b>848.894.782.303,40</b>	<b>828.634.712.442,72</b>
<b>III.</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III</b>					



No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
III.a.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.017.742.786.689,40	1.278.925.278.293,60	936.484.355.306,15	878.394.782.303,40	858.134.712.442,72
	Dikurangi:					
III.b.	Rencana Alokasi Prioritas II	932.993.505.234,00	1.198.757.432.731,00	890.352.361.806,15	848.894.782.303,40	828.634.712.442,72
	<b>Total Prioritas III</b>	<b>84.749.281.455,40</b>	<b>80.167.845.562,60</b>	<b>46.131.993.500,00</b>	<b>29.500.000.000,00</b>	<b>29.500.000.000,00</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017





#### 4.1. Dokumen-dokumen Perencanaan Terkait

Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya merupakan salah satu bentuk penyelarasan perencanaan daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, penelaahan yang perlu dilakukan antara lain adalah terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat.

##### 4.1.1. RTRW Kabupaten Bandung

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 adalah **“Mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan”**. Kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Bandung terdiri atas lima poin, yakni:

1. Kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata.
2. Kebijakan pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi

sesuai fungsi pusat kegiatan dan sistem sarana prasarana yang terpadu.

3. Kebijakan pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya dengan prinsip keberlanjutan.
4. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan.
5. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting dalam RTRW, wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh kawasan lindung dan budidaya pertanian (sawah dan sawah tadah hujan). Dari luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, lebih dari tiga perempat wilayah Kabupaten Bandung bukan merupakan lahan terbangun. Wilayah dengan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Berbeda dengan kondisi eksisting, rencana pola ruang Kabupaten Bandung yang disusun menunjukkan adanya peruntukan lahan khusus untuk kawasan potensi pariwisata, baik itu pariwisata alam, budaya, maupun buatan, dan kawasan potensi pertambangan, baik panas bumi maupun batuan.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Bandung, pembangunan



kawasan yang berdaya saing akan didasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya manusia serta berwawasan lingkungan, maka kegiatan akan diarahkan contohnya pada pariwisata dan pertambangan yang ramah lingkungan, serta kegiatan industri kecil. Untuk pengembangan industri kecil/industri rumah tangga dapat dikembangkan pada kawasan permukiman perkotaan (permukiman terorganisir) maupun permukiman pedesaan (permukiman individual) disesuaikan dengan potensi pengembangan wilayahnya dalam bentuk klaster-klaster wilayah tematik seperti kampung jins, kampung strauberi, kampung kambing, kampung sepatu, kampung topi, kampung konveksi, kampung kerajinan, dan lain sebagainya.

#### 4.1.2. RPJPD Kabupaten Bandung

Sebagai landasan dan acuan, poin-poin dalam RPJPD Kabupaten Bandung menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung. RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan ketiga pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja Tahun 2025”**. Adapun visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang aman dan tertib
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Menciptakan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing

Dalam tahapan ketiga pembangunan daerah Kabupaten Bandung di RPJPD Kabupaten Bandung, ditetapkan prioritas pembangunan, yakni **“Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing”**. Dalam kalimat prioritas tersebut terdapat dua kata kunci utama yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perekonomian daerah yang berdaya saing. Kedua kata kunci ini selanjutnya akan diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD.

Penetapan prioritas pembangunan tahap ketiga ini berkaitan dengan tahapan sebelum dan setelahnya. Dimana hasil perwujudan perencanaan pembangunan di tahap kedua menjadi dasar dalam keberlangsungan implementasi di tahap ketiga ini. Keberhasilan dari implementasi pembangunan di tahap ketiga kemudian menjadi bahan atau dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di tahap selanjutnya.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perekonomian daerah yang berdaya saing, maka beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk diterapkan di tahun 2015-2020 (tahap ketiga RPJP) untuk urusan lingkungan hidup antara lain: (a) meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor; (b) memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perbaikan lahan kritis secara mandiri; (c) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi



bencana; dan (d) optimalisasi fungsi BPBD. Sedangkan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, kebijakan yang ditetapkan untuk urusan inudstri, koperasi dan UMKM, penanaman modal, serta perdagangan antara lain: (a) meningkatkan ketertiban masyarakat lokal untuk terlibat di dalam kegiatan jasa perdagangan; (b) meningkatkan pengetahuan, pembinaan, dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM, dan industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran, dan kemudahan untuk mengakses permodalan; (c) meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan jasa perdagangan, UMKM, dan industri kreatif; (d) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jasa perdagangan, dari skala kabupaten menjadi skala regional (antar kabupaten); (e) mendorong peningkatan investasi terhadap UMKM dan industri kreatif; serta (f) meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional. Kebijakan yang ditujukan untuk urusan lainnya selebihnya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan pada tahapan ketiga.

#### 4.1.3. RPJM Nasional

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang akan diwujudkan pada akhir periode RPJMN adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun tujuh misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan prioritas tersebut disebut Nawa Cita, yang berisi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019 tentang agenda pembangunan wilayah, arah pembangunan dibagi berdasarkan karakteristik suatu lingkup wilayah, yakni pulau-pulau besar di Indonesia. Untuk Pulau Jawa dan Bali, arah kebijakan yang sudah ditetapkan memiliki tema tersendiri yang menjadi pembeda dengan wilayah lainnya. Tema besar pembangunan Wilayah Jawa-Bali diambil berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah Jawa-Bali, yakni sebagai **“Lumbung pangan nasional dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari”**. Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung, yang didalamnya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang, menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi lokasi prioritas dengan fokus pengembangan diarahkan sebagai pusat kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan pariwisata perkotaan (*urban tourism*).

#### 4.1.4. RPJMD Provinsi Jawa Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlaku yakni Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025. Tema pada tahapan ini adalah tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah **“Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka disusun lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik.
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Kabupaten Bandung dalam konteks RPJMD Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan tersendiri sesuai dengan wilayah koordinasi maupun wilayah perencanaan yang menaunginya. Dalam skenario pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP), Kabupaten Bandung termasuk ke dalam WKPP IV (Wilayah Priangan), dengan skenario pembangunan:

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Mengembangkan kluster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap,



- serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
  4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;
  5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran dan Rancabuaya.

Selain termasuk ke dalam WKPP IV, Kabupaten Bandung juga termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Bandung Raya (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang), yang pengembangannya difokuskan pada:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampah);
- d. Pembangunan infrastruktur transportasi;
- e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
- f. Peningkatan mutu air baku;
- g. Pengendalian pencemaran air;
- h. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- i. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Pengembangan energi baru terbarukan;
- k. Pengembangan jasa dan perdagangan;
- l. Penataan daerah otonom.

Sebagai salah satu bagian dari 3 wilayah metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang termasuk di dalam Wilayah Metropolitan Bandung Raya, memiliki

arah kebijakan tersendiri. Wilayah Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan Modern, dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif, dan pengembangan iptek.

#### 4.1.5. Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam Dokumen Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dijelaskan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif.

SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas



5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energy bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan permukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang tertinggal”. Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan, dan pemuda. Setiap platform tersebut memiliki peran masing-masing, namun saling terkait.

SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target namun juga cara pelaksanaan yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4.2. Kerjasama Antar Daerah Berbatasan**

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan yang lebih luas, sehingga dalam implementasinya pembangunan suatu daerah tidak dapat terlepas dari pembangunan daerah lain di sekitarnya. Keterkaitan antar daerah terjadi hampir dalam seluruh aspek pembangunan, baik itu dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial, pemerintahan, maupun pelayanan publik. Pada wilayah-wilayah perbatasan, sering kali terjadi persoalan yang penanganannya perlu melibatkan beberapa kabupaten/kota seperti misalnya dalam penyelesaian persoalan banjir, persampahan, dan transportasi. Sebagai implikasinya maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Kerjasama tidak hanya penting dalam menyelesaikan masalah yang bersifat lintas batas, tetapi juga penting untuk membangun simbiosis mutualisme dalam optimalisasi pembangunan daerah.

Menyadari pentingnya kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menginisiasi pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota berbatasan, yaitu antara lain dengan Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 130/2786-Bag.KS/2016 dan Nomor 130/13-Pemum/2016 dengan ruang lingkup kerjasama meliputi:





1. Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakarya, dan sumber daya air, khususnya penanggulangan masalah persampahan dan banjir;
2. Penataan ruang, lingkungan hidup, serta pemukiman, pertanian dan pertanian/ketahanan pangan;
3. Permukiman, perumahan, dan sanitasi;
4. Transportasi dan perhubungan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif;
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Kebudayaan dan pariwisata;
9. Promosi dan pengembangan industri, perdagangan dan investasi, serta kemetretologian; serta
10. Bidang lain, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Khusus dalam bidang pembangunan infrastruktur, melalui inisiasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 Kabupaten Bandung tergabung dengan beberapa kabupaten/kota lain di Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (BKPP) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kerjasama daerah. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bersama dalam acara Gelar Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan di Wilayah IV pada tanggal 26 November 2015 dengan ruang lingkup kerjasama antara lain meliputi:

1. Akselerasi infrastruktur di Wilayah IV. Beberapa infrastruktur strategis yang berlokasi di Kabupaten Bandung yaitu Tol Soroja dan akses Tol Soroja serta Tol Bandung Intra Urban serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan;
2. Pengembangan penanganan sampah regional;
3. Pengembangan transportasi massal Bandung Raya;

4. Pembangunan berbasis kewilayahan, yang berdasarkan pada tata ruang, Wilayah Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi;
5. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarannya;
6. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi kreatif antara perkotaan dan perdesaan;
7. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk menciptakan sinergitas dan pengembangan ekonomi kreatif;
8. Peningkatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi;
9. Peningkatan kerjasama dalam penanganan masalah sosial PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar), ketentraman dan ketertiban umum di perbatasan; serta
10. Penetapan Pantai Selatan Jawa Barat sebagai pintu masuk dalam kemaritiman.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung sampai dengan sisa masa periode RPJMD Kabupaten Bandung, maka Pemerintah Kabupaten Bandung perlu berkomitmen mendorong peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan kabupaten/kota yang berbatasan. Disamping untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dalam lingkup wilayah administratif Kabupaten Bandung, melalui kerjasama antar daerah juga diharapkan dapat membangun keterpaduan perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

#### 4.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan ketidaksesuaian antara kondisi dan kinerja pembangunan yang ada saat ini dengan apa yang direncanakan, serta apa



yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan tersebut dibuat. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah ini umumnya timbul akibat kekuatan yang belum diperdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap rencana program pada periode sebelumnya, hasil kajian literature dan master plan bidang-bidang, hasil evaluasi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pengumpulan potensi dan permasalahan daerah dari masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu sebagai upaya untuk mengetahui alternative strategi yang harus dilakukan di masa mendatang untuk mengantisipasi atau mengatasi potensi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan ini diuraikan berdasarkan urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Secara rinci, permasalahan pembangunan sektoral di Kabupaten Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Pendidikan

Permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Kabupaten Bandung yaitu masih rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat. Permasalahan pendidikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rendahnya rata-rata lama sekolah
- b. Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar

- c. Tenaga kependidikan belum terstandarisasi
- d. Peran serta masyarakat dalam gerakan budaya baca sangat tinggi

#### 2. Kesehatan

Sejalan dengan upaya peningkatan taraf kesehatan penduduk, pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa upaya kuratif, preventif, maupun promotif. Pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat pengaruhnya yang tinggi terhadap aspek pembangunan lain, salah satunya terhadap produktivitas dan kondisi ekonomi Kabupaten Bandung. Permasalahan pembangunan bidang kesehatan antara lain:

- a. Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata
- b. Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal
- c. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah

#### 3. Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan

Inti dari permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bandung yaitu adanya ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh dinamika pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali, dimana seringkali berdampak pada alih fungsi lahan. Kedua, ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh tidak terimplementasinya rencana tata ruang secara utuh. Dalam konteks Kabupaten Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah telah mendelineasi kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan strategis, akan tetapi dalam praktik di lapangan sarana dan prasarana di





kawasan-kawasan tersebut belum memadai dalam mendukung perkembangan wilayah strategis. Permasalahan dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akses infrastruktur berkualitas belum mencakup seluruh kawasan
- b. Ketersediaan sarana prasarana pendukung belum merata
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal
- d. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dengan wilayah berbatasan
- e. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis
- f. Banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, baik permukiman maupun perdagangan dan jasa
- g. Banyak daerah yang memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi
- h. Pembangunan berbasis kewilayahan yang berdasarkan pada tata ruang, Wilayah Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi
- i. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya

#### 4. Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi isu lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD, terdapat sembilan isu lingkungan utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pencemaran lingkungan
2. Kerusakan lingkungan
3. Pengelolaan sumber daya air
4. Perumahan
5. Ketahanan pangan
6. Transportasi

7. Pariwisata
8. Kesehatan masyarakat
9. Perubahan iklim dan kebencanaan

Secara rinci, permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- a. Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah
- b. Pengolahan limbah sampah belum optimal
- c. Polusi udara akibat industri dan kendaraan bermotor tinggi
- d. Pengembangan penanganan sampah regional

#### 5. Sumber Daya Air

Persoalan pembangunan utama dalam sektor sumber daya air di Kabupaten Bandung yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Secara umum, lingkup sumber daya air dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, meliputi drainase dan pemanfaatan air baku.

Secara garis besar, permasalahan pembangunan aspek sumber daya air antara lain:

- a. Pengelolaan drainase belum optimal
- b. Pemanfaatan air baku belum optimal
- c. Pemanfaatan perairan umum belum optimal

#### 6. Perumahan Rakyat

Rumah atau aspek papan merupakan sarana dasar pokok yang idealnya wajib dipenuhi setelah aspek pangan dan sandang terpenuhi. Meskipun demikian kondisi riil di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 menunjukkan bahwa luas permukiman layak huni baru mencapai sekitar 90,94%. Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat sekitar 9,06% penduduk Kabupaten Bandung yang kawasan permukiman tidak layak huni. Kondisi tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya:



- a. Relokasi tempat tinggal ke tempat layak huni belum optimal
- b. Persentase rumah layak huni di kawasan permukiman tergolong tinggi

## 7. Perhubungan

Dalam sektor perhubungan, persoalan utama yang timbul yaitu belum memadainya sarana dan prasarana transportasi penumpang dan barang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jika dirinci lebih detail, persoalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Rendahnya pelayanan angkutan publik terhadap penumpang
- b. Masih rendahnya pemanfaatan sistem angkutan massal
- c. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai masih terbatas
- d. Masih rendahnya *Level of Service* (LOS) jalan
- e. Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- f. Belum adanya sistem angkutan barang yang terpadu
- g. Masih belum tertatanya sistem parkir

## 8. Sosial

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya

penanganan PMKS oleh perangkat-perangkat daerah yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial. Permasalahan pembangunan daerah aspek sosial antara lain:

- a. Kesejahteraan masyarakat rendah
- b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih rendah
- c. Kuantitas sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum memadai
- d. Tingkat pengangguran tinggi
- e. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Bandung
- f. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bandung cukup besar
- g. *Sense of belonging* masyarakat desa masih tinggi sehingga dapat menjadi pendorong pembangunan desa mandiri
- h. Tantangan globalisasi (degradasi budaya, peningkatan tenaga kerja perempuan)
- i. Pasar global (MEA) mengakibatkan masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Kabupaten Bandung
- j. Peningkatan kerjasama dalam penanganan masalah sosial PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar), ketentraman dan ketertiban umum di perbatasan

## 9. Ekonomi

Sebelum membahas secara detail mengenai isu strategis sektor ekonomi Kabupaten Bandung, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi ekonomi makro Kabupaten Bandung. Secara umum, PAD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu subsektor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bandung yaitu peningkatan penerimaan pajak, berupa pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak reklame. Dari penerimaan pajak dapat dilihat bahwa Kabupaten Bandung belum mengoptimalkan



perolehan pajak dari sumber-sumber lainnya seperti sektor pariwisata, yakni pajak hotel, restoran dan hiburan, demikian juga pajak dari reklame dan parkir. Oleh karena itu perlu ada penggalian potensi pajak yang belum terpungut untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bandung. Selain itu kedepan, potensi pajak perlu ditingkatkan, diantaranya dengan meningkatkan jumlah pengunjung hotel dan restoran, dengan meningkatkan upaya-upaya mengembangkan pariwisata dan regional branding. Selain didukung oleh peningkatan nilai pajak, peningkatan PAD Kabupaten Bandung juga didorong oleh peningkatan retribusi. Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi peningkatan retribusi dengan penerimaan retribusi terbesar yaitu retribusi jasa umum, kemudian diikuti perizinan jasa usaha.

Sejalan dengan adanya peningkatan subsektor PAD di atas, sehingga pengembangan sektor perekonomian harus mendapat perhatian pada periode pembangunan berikut dan menjadi fokus pembangunan disamping upaya peningkatan tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Perekonomian disisi lain dapat menjadi roda penggerak pembangunan. Namun Perekonomian harus diiringi dengan kualitas SDM yang baik. Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan iklim investasi, peningkatan pariwisata, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing umkm dan produk pertanian, dengan pendekatan ekonomi lokal dan pembangunan seluas-luasnya berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan adanya efek multiplier pengembangan ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian sehingga kemampuan keuangan daerah juga meningkat (dengan meningkatnya pajak dan sebagainya).

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan sektor ekonomi di

Kabupaten Bandung, permasalahan pembangunan akan dibagi berdasarkan beberapa sektor meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor koperasi dan UKM serta sektor penanaman modal.

- a. Produktivitas pertanian rendah
- b. Pemasaran produk pertanian masih rendah
- c. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah
- d. Sebagai sentra penghasil produk pertanian dan komoditas perdagangan lainnya
- e. Daya saing industri kecil dan mikro rendah
- f. Terbatasnya sumber daya manusia lokal berkualitas dalam sektor industri
- g. Industri besar masih bersifat *footloose* dan belum ramah lingkungan
- h. Transaksi perdagangan masih belum optimal
- i. Adanya sentra perdagangan besar di wilayah berbatasan
- j. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi kreatif antara perkotaan dan perdesaan
- k. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk menciptakan sinergitas dan pengembangan ekonomi kreatif
- l. Banyak sektor perdagangan dan jasa yang berkembang sebagai penunjang kegiatan pariwisata
- m. Destinasi wisata belum tergal optimal
- n. Banyaknya potensi objek wisata baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan
- o. Adanya kekayaan budaya khas daerah
- p. Banyaknya pelaku kesenian daerah
- q. *Branding* dan pemasaran objek wisata belum berjalan baik
- r. Peningkatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi
- s. Kuantitas dan produktivitas koperasi dan usaha kecil dan mikro belum optimal



- t. Banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro yang bergerak di berbagai bidang
- u. Jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing masih rendah
- v. Daya saing investasi dengan wilayah lain masih rendah
- w. Kondisi prasarana, sarana, dan utilitas di wilayah berbatasan menarik kegiatan keluar dari wilayah Kabupaten Bandung

#### 10. Pemerintahan

Dalam aspek pemerintahan, beberapa permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut:

- a. Kapasitas aparatur pemerintahan daerah masih rendah
- b. Kualitas dan kuantitas produk hukum yang dihasilkan masih rendah
- c. Pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi belum optimal
- d. Adanya media publikasi pemerintah berupa media cetak maupun elektronik (*website*)
- e. Meningkatnya aspek pelayanan terpadu masyarakat di wilayah
- f. Terdapat kebijakan yang menunjang *good governance*
- g. Dukungan APBD untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan

#### 4.4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka pada subbab ini akan dilakukan perumusan isu strategis pengembangan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa depan. Apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi diprediksi akan menimbulkan

kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu strategis Kabupaten Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Merupakan kondisi/keadaan yang bersifat penting, mendasar, dan mendesak;
5. Memiliki dampak yang besar dan luas bagi daerah dan masyarakat jika tidak segera ditangani;
6. Merupakan permasalahan pembangunan jangka panjang; dan
7. Memiliki kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat diperoleh beberapa isu strategis di Kabupaten Bandung, yaitu:

##### 1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka perlunya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Jaminan ini dapat berupa keterjangkauan yang mudah dilihat dari segi jarak dan jumlah sarana, maupun kualitas pelayanan yang baik dilihat dari segi kapasitas sarana dan kualitas serta kapabilitas tenaga pendidikan dan kesehatan.



Di Kabupaten Bandung, sampai dengan tahun 2016 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan masih belum terpenuhi secara optimal. Hal ini dilihat dari berbagai indikator yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni rasio ketersediaan sekolah dan rasio guru. Rasio ketersediaan sekolah baik untuk jenjang kelompok usia SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA masih sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan penyediaannya. Begitu pula dengan rasio guru per 10.000 murid di setiap jenjang, masih belum sesuai dengan kebutuhan. Penerapan program wajar dikdas atau wajib belajar pendidikan dasar sampai dengan jenjang SMP/MTs pun dianggap masih belum optimal.

Pada bidang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan publik semakin lama semakin menurun. Hal ini diakibatkan jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak diiringi dengan peningkatan jumlah sarana kesehatan bagi penduduk. Dengan kondisi ini maka kebutuhan penduduk akan jaminan kesehatan akan menurun akibat pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tidak optimal.

## **2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan**

Peningkatan perekonomian daerah tidak semata mengejar peluang dalam menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah, tetapi juga didalamnya terdapat unsur masyarakat yang perlu ditingkatkan taraf perekonomiannya. Pada tahun 2016, angka tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebesar 0,39%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi ekonomi penduduk Kabupaten Bandung meski angkanya belum signifikan. Jika ditinjau dari penanganan masyarakat miskin, data terakhir angka penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial fakir miskin yang didapatkan tidak lebih dari 20%. Artinya, sebetulnya masih banyak penduduk miskin yang belum tertangani. Maka dari itu, penanganan kemiskinan di Kabupaten Bandung dirasa masih belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya.

## **3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar lingkungan**

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung, diperlukan prasarana atau infrastruktur sebagai pendukung dari segala aktivitas yang sedang berkembang dan yang akan dikembangkan. Infrastruktur ini antara lain meliputi transportasi, air bersih, dan sanitasi. Di Kabupaten Bandung, infrastruktur dasar ini masih belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal, baik ditinjau dari segi sebarannya atau kuantitas, maupun dari segi kualitas. Salah satunya yang sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian adalah infrastruktur jalan. Pemerataan jaringan jalan, panjang jalan, dan kualitas jalan perlu ditingkatkan demi mendukung mobilitas penduduk. Selain infrastruktur, diperlukan juga sarana pelayanan publik yang memadai dan sesuai dengan standar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk, termasuk di dalamnya berupa sarana khusus bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel, yang sampai saat ini masih belum tersedia secara optimal. Kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebagai aktor pelayanan publik.

## **4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan**

Banjir dan kekeringan menjadi dua permasalahan musiman yang timbul di Kabupaten Bandung. Sebagai wilayah yang



menjadi DAS Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum, banjir sudah menjadi permasalahan menahun yang seringkali muncul terutama pada saat musim penghujan. Hal ini diakibatkan sedimentasi di aliran sungai dan kurangnya kuantitas serta kualitas jaringan drainase sebagai saluran air buangan. Sampai saat ini, penanganan dari permasalahan banjir ini masih belum optimal dilihat dari frekuensi dan lama banjir serta luas genangan di Kabupaten Bandung.

Kondisi yang berbeda terjadi di musim kemarau. Kekeringan menjadi permasalahan yang timbul akibat dari kurangnya pasokan air di Kabupaten Bandung. Belum optimalnya pemanfaatan air baku dan perairan umum menjadi salah satu penyebab dari kekeringan dan kurangnya pasokan air pada saat kemarau. Padahal penggunaan air banyak diperlukan dalam kegiatan perekonomian, salah satunya yang paling utama adalah dalam pengairan lahan pertanian yang menjadi penentu ketahanan pangan daerah dan sektor unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung.

#### **5. Belum optimalnya kinerja pemerintah dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan**

Sebagai pemegang peranan utama dalam pelayanan publik, kinerja pemerintah ikut menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan daerah. Sampai saat ini, kinerja pemerintah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan dengan baik dan akuntabilitas aparat pemerintahan yang masih rendah. Padahal dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sangat bergantung pada kinerja dan kualitas aparatur pemerintah, tidak hanya di level kebijakan tetapi juga di level teknis. Dalam keberlangsungan pembangunan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum

dan keamanan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan demi menciptakan situasi yang kondusif selama keberjalanan pembangunan daerah.

#### **6. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa**

Kabupaten Bandung memiliki karakteristik kondisi fisik wilayah yang didominasi oleh perdesaan yang selain menjadi potensi tetapi juga menjadi tantangan tersendiri. Karakteristik yang berbeda di setiap desa memungkinkan adanya potensi yang beragam yang dapat dikembangkan di masing-masing desa. Pengembangan desa tidak semata hanya pembangunan fisik dan ekonomi saja, ada pula unsur sosial di dalamnya sebagai bagian penting yang menjadi penggerak pembangunan desa, dalam hal ini adalah masyarakat desa. Kualitas masyarakat desa di Kabupaten Bandung saat ini masih kurang mumpuni untuk dapat secara inisiatif dan inovatif melakukan pengembangan potensi perdesaan sesuai dengan karakteristiknya. Mulai dari mengeksplor, mengolah, sampai dengan mengelola sumber daya perdesaan yang ada. Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat membangun perdesaan yang mandiri sebagai modal dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

#### **7. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan**

Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang besar yang didukung dengan kondisi penggunaan lahan eksisting untuk kegiatan pertanian sebesar lebih dari 50% dari luas wilayahnya, yang berupa sawah, sawah tadah hujan, ladang, kebun, dan kebun



campur. Dengan begitu banyaknya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sudah selayaknya produksi pertanian menjadi fokus dalam upaya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung. Tetapi nyatanya, dilihat dari kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan pun masih belum bisa bersaing secara optimal dengan produk-produk daerah lainnya, baik dalam lingkup provinsi, nasional, maupun internasional, karena sistem promosi, mulai dari pengemasan sampai dengan pemasaran, masih belum optimal. Meskipun kualitas produk yang dihasilkan sudah baik dan memiliki keunikan tersendiri yang membedakan produk Kabupaten Bandung dengan produk daerah lain. Maka dari itu diperlukan peningkatan produksi dan daya saing produk unggulan dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Bandung.

#### **8. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan**

Pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah. Ketahanan dan kemandirian pangan sendiri memiliki definisi yang berbeda, dimana ketahanan pangan adalah kondisi aman terhadap bahan pangan, dengan jenis yang beragam, dan kualitas serta kuantitas yang baik dan cukup bagi kebutuhan seluruh penduduk di suatu wilayah. Sementara kemandirian pangan adalah kondisi dimana penduduk di suatu wilayah dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan akan pangannya dengan memanfaatkan potensi

dan produk hasil pertanian sendiri secara optimal sehingga dapat menjamin kesejahteraan pangan penduduk tersebut. Kondisi Kabupaten Bandung yang ada saat ini dinilai masih belum dapat memenuhi kedua hal tersebut, ketahanan dan kemandirian pangan. Hal ini dilihat dari beberapa faktor, yakni ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesejahteraan pangan. Dalam upaya pertumbuhan perekonomian daerah, pemerintah juga perlu memastikan ketahanan dan kemandirian pangan Kabupaten Bandung.

#### **9. Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Dengan banyaknya kegiatan yang sudah berkembang maupun akan berkembang di Kabupaten Bandung, permasalahan pencemaran lingkungan menjadi salah satu isu yang akan selalu ada dan perlu dipecahkan demi tercapainya kenyamanan dan kelestarian lingkungan. Penanganan limbah industri di Kabupaten Bandung tahun 2015 dianggap masih belum optimal, dengan penanganan pencemaran air 54%, pencemaran udara 87%, dan pencemaran limbah B3 43%. Selain itu, penanganan sampah di tahun 2015 pun masih sebesar 21,22% dari total volume sampah yang dihasilkan. Artinya masih diperlukan penanganan yang lebih intensif baik untuk limbah industri maupun limbah rumah tangga.

Kelestarian lingkungan tidak hanya dilihat dari penanganan limbah tetapi juga dari luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan, baik sebagai penyumbang oksigen maupun sebagai resapan air. Jumlah RTH Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2015 masih jauh dari ketentuan penyediaan, yakni hanya 0,22% dari total luas wilayah, sementara ketentuan mengharuskan penyediaan sebesar 20% untuk RTH publik. Maka dari itu, untuk



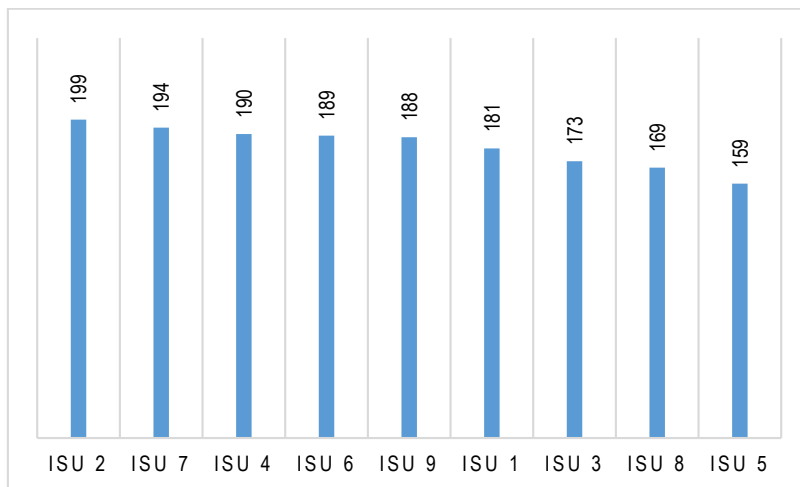
mewujudkan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan penyediaan RTH publik yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dari *stakeholder* yang diperoleh melalui forum konsultasi publik, 9 poin isu strategis Kabupaten Bandung kemudian dibobotkan untuk mengetahui isu mana yang dinilai paling krusial dan perlu dijadikan prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan penilaian oleh *stakeholder* meliputi:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Dari hasil pembobotan terhadap penilaian isu strategis Kabupaten Bandung diperoleh informasi bahwa isu strategis yang dianggap paling krusial dibandingkan dengan yang lainnya adalah isu “*masih perlunya penanggulangan kemiskinan*”, sementara untuk urutan kedua dan ketiga adalah “*masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan*” dan “*belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan*”. Hasil pembobotan isu-isu strategis Kabupaten Bandung ditampilkan pada Gambar 4.1. berikut.



**GAMBAR 4.1.**  
**HASIL PEMBOBOTAN ISU STRAGIS KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Untuk menindaklanjuti isu-isu strategis tersebut, maka dibuat prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga

perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 4.1.





**TABEL 4.1.**  
**ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG**

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
Masih perlunya penanganan kemiskinan	Penanganan kemiskinan dan PMKS
Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia dan difabel	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan	Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Reformasi birokrasi
	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa	Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
Belum mantapnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau	Pengendalian pencemaran lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



### 5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-

2025 Tahap III. Perumusan visi untuk RPJMD 2016-2021 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

**TABEL 5.1.**  
**VISI RPJPD, RPJMN, DAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT**

VISI RPJP	VISI RPJM	
Kabupaten Bandung (Tahun 2005-2025)	Nasional (Tahun 2015-2019)	Jawa Barat (Tahun 2013-2018)
Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025	Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur	Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sementara itu, prioritas pembangunan berdasarkan RPJP Tahap III, baik secara nasional maupun daerah diarahkan pada kemandirian perekonomian yang berdaya

saing. Hal ini dituangkan dalam prioritas pembangunan RPJPN Tahap III, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap III, dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahap III.

**TABEL 5.2.**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJPN DAN RPJPD**

RPJP Nasional Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Jawa Barat Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Kabupaten Bandung Tahap III (Tahun 2016-2021)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan <b>menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian</b> berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai <b>kemandirian masyarakat Jawa Barat</b> dalam segala bidang <b>sehingga tingkat ketergantungan terhadap</b>	Peningkatan <b>kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.</b>



RPJP Nasional Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Jawa Barat Tahap III (Tahun 2015-2020)	RPJP Kabupaten Bandung Tahap III (Tahun 2016-2021)
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.	pihak eksternal dapat direduksi.	

Sumber: RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

**“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”**

Di dalam visi pembangunan Kabupaten Bandung di atas, terkandung pokok-pokok visi yang secara rinci dapat diterjemahkan sebagai berikut.



**GAMBAR 5.1.  
PENJELASAN VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 5.3.**  
**PENJELASAN VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi	Indikator Pokok-Pokok Visi
<p>“Memantapkan Kabupaten Bandung yang <b>Maju, Mandiri</b> dan <b>Berdaya Saing</b>, melalui <b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> dan <b>Sinergi Pembangunan Perdesaan</b>, Berlandaskan <b>Religius, Kultural</b> dan <b>Berwawasan Lingkungan</b>”</p>	Maju	Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta didukung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.	Mengalami peningkatan dalam aspek kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi, serta penggunaan teknologi untuk menunjang segala aktivitas daerah
	Mandiri	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.	Mampu mengeksplorasi, mengolah, dan mengelola potensi lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
	Berdayasaing	Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam konteks sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.	Memiliki kondisi perekonomian yang kreatif, inovatif, dan kompetitif, serta mampu bersaing dengan wilayah lainnya
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan,	Memiliki sistem pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, berlandaskan hukum, responsif, adil dan akuntabel melalui peran aktif dari pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi	Indikator Pokok-Pokok Visi
		demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel.	
	Sinergi Pembangunan Perdesaan	Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai aspek pembangunan, dengan memperhatikan peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.	Mampu meningkatkan kondisi perdesaan baik dalam segi sumber daya, ekonomi, maupun sarana dan prasarana di perdesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan perdesaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai aspek
	Religius	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.	Memiliki kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai agama, serta menjaga kerukunan antar agama
	Kultural	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.	Mampu menanamkan dan mengembangkan budaya sunda sebagai jati diri masyarakat dengan tetap menghargai pluralitas masyarakat
	Berwawasan Lingkungan	Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan	Menerapkan kepedulian lingkungan dalam segala kegiatan pembangunan sebagai upaya melestarikan alam dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi	Indikator Pokok-Pokok Visi
		hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

## 5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, sebagai bentuk upaya efektivitas dan efisiensi sembilan misi pembangunan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan lima misi pembangunan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**
- b. **Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing**
- c. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah**
- d. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**
- e. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Misi 1

#### “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”

Misi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Kualitas sumber daya manusia

yang akan ditingkatkan dilihat berdasarkan kualitas penduduk Kabupaten Bandung khususnya dari segi pendidikan, kualitas kesehatan penduduk, serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. Kualitas pendidikan menjadi aspek penting yang perlu diintervensi oleh pemerintah, karena masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan perlu memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung

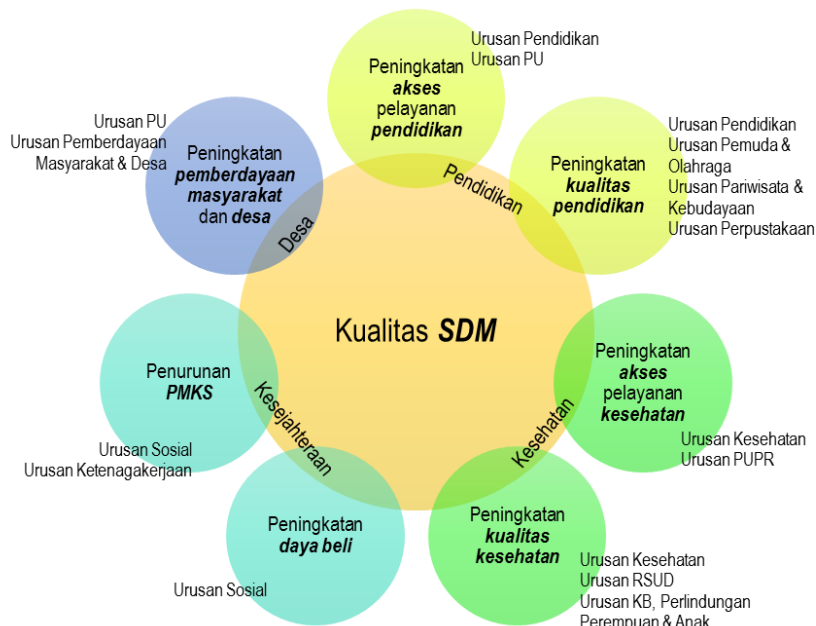
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dibutuhkan pula intervensi dalam bidang kesehatan sebagai salah satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki kualitas kesehatan yang baik, maka akan memberikan pengaruh langsung terhadap produktivitas penduduk. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh derajat kesehatan penduduk yang tinggi.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penentu kondisi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah adalah dengan melihat bagaimana kesejahteraan dari penduduknya. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan

secara tidak langsung menciptakan stabilitas keamanan wilayah di Kabupaten Bandung.

Sebagai wilayah yang didominasi oleh kawasan perdesaan, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung juga dilihat dari kondisi masyarakat perdesaannya. Pembangunan perdesaan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih

dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.



**GAMBAR 5.2.**  
**PERENCANAAN TERINTEGRASI MISI 1**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

## 2. Misi 2

### “Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing”

Dalam perwujudan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, peningkatan perekonomian penduduk menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Bandung, tidak hanya berfokus pada kegiatan perekonomian itu sendiri, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi

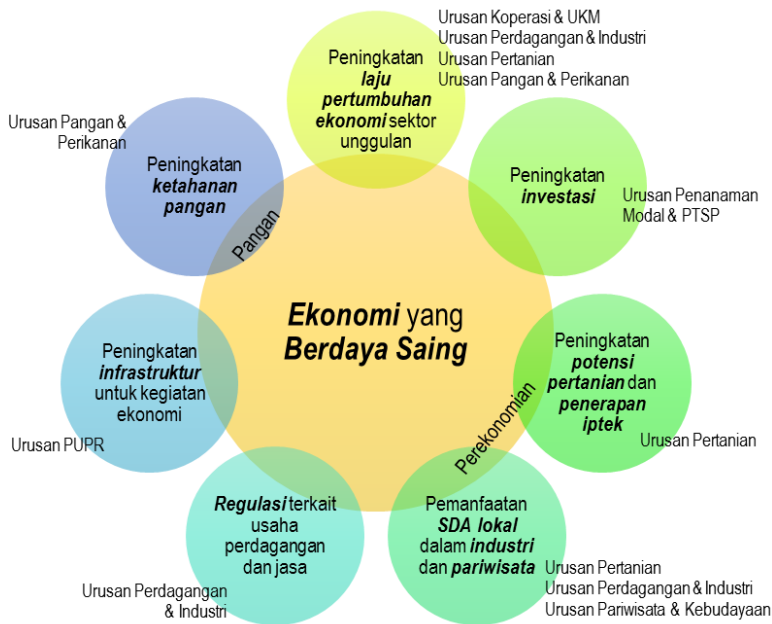
penduduknya. Dalam hal ini diukur dengan menggunakan ketahanan pangan dari Kabupaten Bandung sendiri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga akan melibatkan peran aktif dari pelaku usaha lokal dengan pemanfaatan sumber daya dan produk-produk lokal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.





Pembangunan ekonomi didalamnya mencakup sektor perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, koperasi dan UKM, serta investasi dan modal. Sektor pertanian sebagai sektor basis diarahkan untuk peningkatan hasil produksi dari segi kualitas dengan mengedepankan ciri khas produk Kabupaten Bandung yang menjadi pembeda dengan produk dari wilayah lain. Sektor perdagangan dan jasa yang sangat erat kaitannya dengan transaksi, diarahkan untuk mendorong transaksi melalui berbagai upaya dan didukung oleh regulasi yang mengkoridori transaksi tersebut. Sektor industri, koperasi,

dan UKM diarahkan untuk menerapkan kemajuan teknologi sebagai penunjang kegiatan produksi serta menerapkan konsep ramah lingkungan. Sektor pariwisata diarahkan untuk eksplorasi dan pengembangan potensi-potensi wisata baru baik alamiah maupun buatan. Dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, penerapan teknologi dalam setiap proses ekonomi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan perekonomian Kabupaten Bandung yang berdaya saing.



**GAMBAR 5.3.**  
**PERENCANAAN TERINTEGRASI MISI 2**  
 Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

**3. Misi 3**

**“Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah”**

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi,

infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan



secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut

didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kelentingan terhadap bencana.



**GAMBAR 5.4.**  
**PERENCANAAN TERINTEGRASI MISI 3**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

#### 4. Misi 4

##### **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”**

Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang

berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralkan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk



memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan

pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.



**GAMBAR 5.5.**  
**PERENCANAAN TERINTEGRASI MISI 4**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

## 5. Misi 5

### “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”

Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya-upaya

yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Pembangunan wilayah sendiri tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah, juga terhadap keberjalanan kelembagaan pemerintah dan pelayanan publik. Selain untuk melindungi penduduk dari segala macam ancaman, upaya peningkatan keamanan dan ketertiban juga merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari bentuk pemerintahan yang baik.



**GAMBAR 5.6.**  
**PERENCANAAN TERINTEGRASI MISI 5**  
*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

Penetapan lima misi pembangunan di atas selain sejalan untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, juga sejalan dengan penetapan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penetapan misi pembangunan Kabupaten Bandung selain sebagai upaya peningkatan

kualitas pembangunan di Kabupaten Bandung juga bertujuan mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sinergitas antara misi pembangunan Kabupaten Bandung dengan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.4.

**TABEL 5.4.**  
**MISI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI JAWA BARAT, DAN KABUPATEN BANDUNG**

Misi RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025	Misi Pembangunan Jangka Menengah		
	Kabupaten Bandung (Tahun 2016-2021)	Jawa Barat (Tahun 2013-2018)	Nasional (Tahun 2015-2019)
1. Mewujudkan kabupaten bandung yang aman dan tertib; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan;	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;	1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;



Misi RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025	Misi Pembangunan Jangka Menengah		
	Kabupaten Bandung (Tahun 2016-2021)	Jawa Barat (Tahun 2013-2018)	Nasional (Tahun 2015-2019)
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 5. Menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; 6. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing.	terpadu dengan tata ruang wilayah 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik; 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan; 5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan local.	2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sumber: RPJMN 2015-2019; RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018; RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021

Kelima misi strategis di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari isu strategis yang telah dianalisis dan dipaparkan pada bab sebelumnya. Misi pembangunan kesatu, yaitu misi peningkatan kualitas sumber daya manusia ditetapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis kesatu, kedua, dan keenam yang berfokus pada sumber daya manusia. Sedangkan misi pembangunan kedua, yaitu misi menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, ditetapkan untuk mengantisipasi isu strategis ketujuh dan kedelapan mengenai perekonomian dan ketahanan pangan. Adapun misi mewujudkan

pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah ditetapkan sebagai upaya untuk mengantisipasi isu strategis ketiga yaitu masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel serta untuk mengantisipasi isu strategis keempat berupa belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan. Secara lengkap bentuk sinergi atau keterkaitan antara isu strategis dengan misi pembangunan Kabupaten Bandung disajikan pada Tabel 5.5.



**TABEL 5.5.**  
**KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN MISI PEMBANGUNAN**

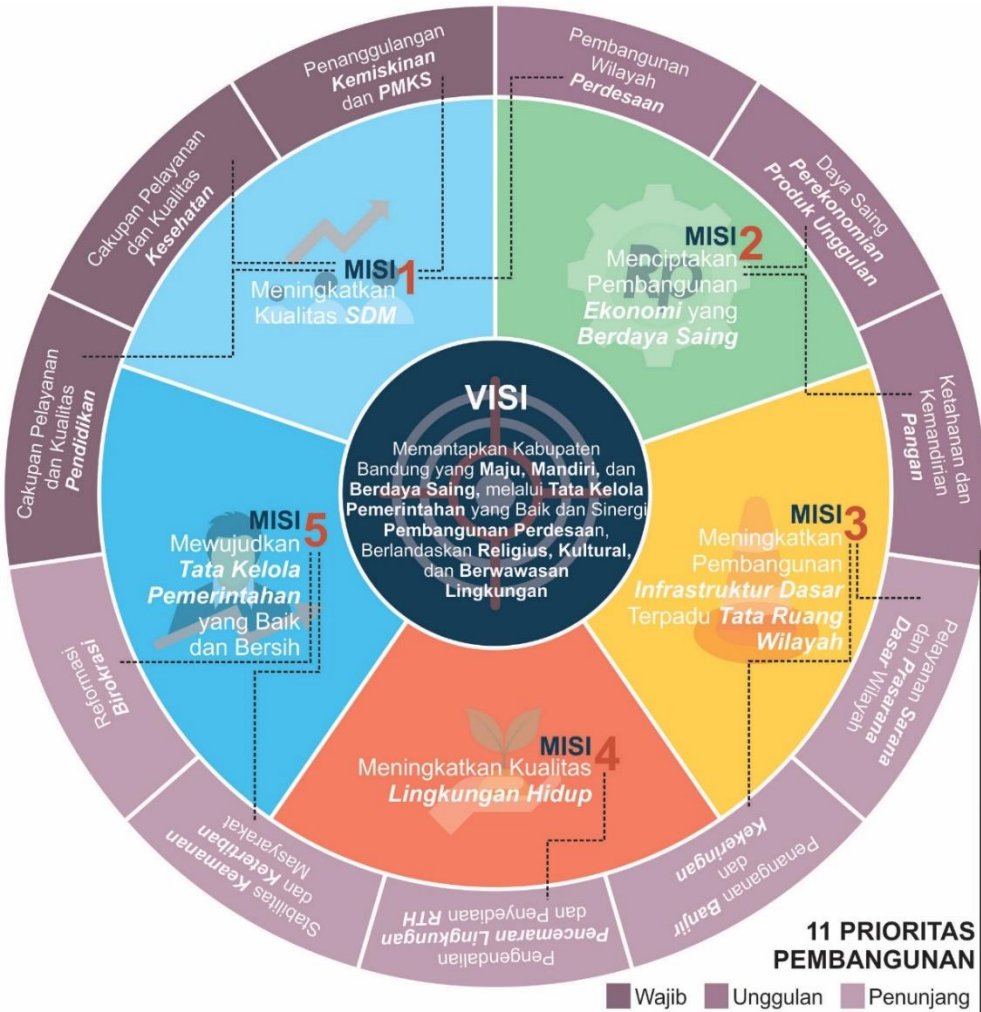
Misi Pembangunan		Isu Strategis	
M 1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IS 1	Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
		IS 2	Masih perlunya penanggulangan kemiskinan
		IS 6	Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa
M 2	Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing	IS 7	Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan
		IS 8	Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan
M 3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah	IS 3	Masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar lingkungan
		IS 4	Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
M 4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	IS 4	Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan
		IS 9	Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau
M 5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	IS 5	Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan
		IS 5	Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan

*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2016*

Visi dan misi pembangunan daerah kemudian dijabarkan ke dalam 11 prioritas pembangunan yang diarahkan pada isu strategis. Prioritas pembangunan ini terbagi berdasarkan target peningkatan, yakni kualitas sumber daya manusia, perekonomian, dan penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian.

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 3 prioritas wajib:
  1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
  2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
  3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS.
- b. Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan:

1. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
2. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
3. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan.
- c. Penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian melalui 5 prioritas penunjang:
  1. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
  2. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
  3. Reformasi birokrasi;
  4. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH;
  5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.



**GAMBAR 5.7.**  
**KETERKAITAN PRIORITAS DALAM PENCAPAIAN VISI**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan

sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Misi 1

Dalam rangka pencapaian misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka ditetapkan dua tujuan, yaitu **meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan**, **meningkatnya kesejahteraan masyarakat**, dan **mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan**

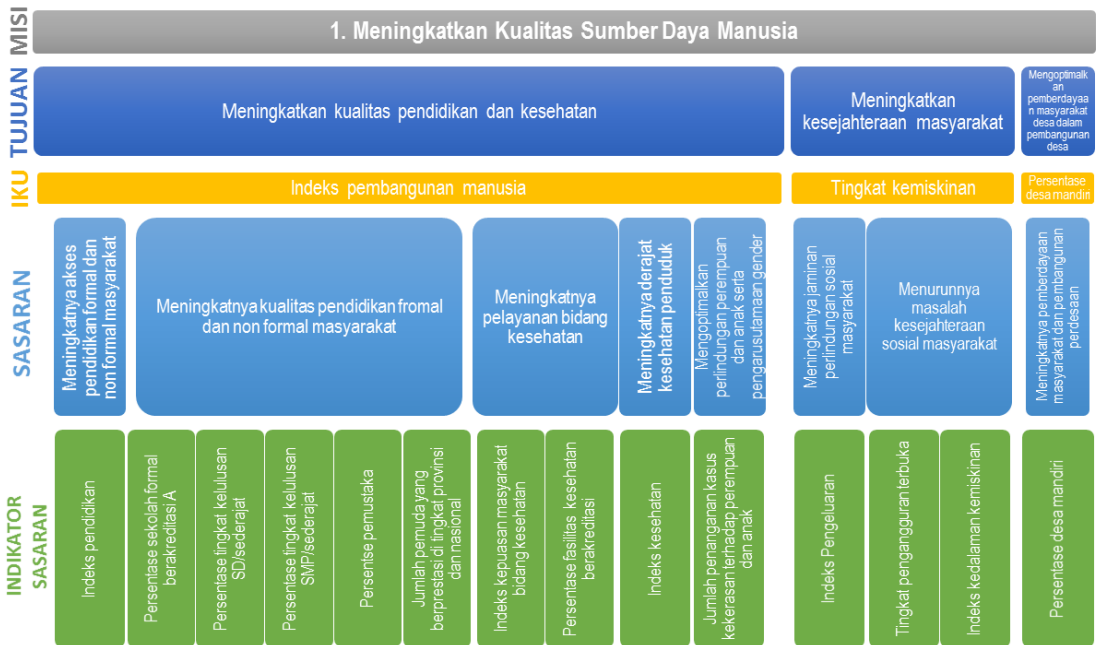


**desa.** Adapun sasaran dari tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
  - a. Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat
  - b. Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
  - c. Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan
  - d. Meningkatnya derajat kesehatan penduduk
  - e. Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - a. Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat
  - b. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat
3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa
  - a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan perdesaan

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 1** berikut ini.



**GAMBAR 5.8.**  
**KERANGKA BERPIKIR LOGIS MISI 1**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



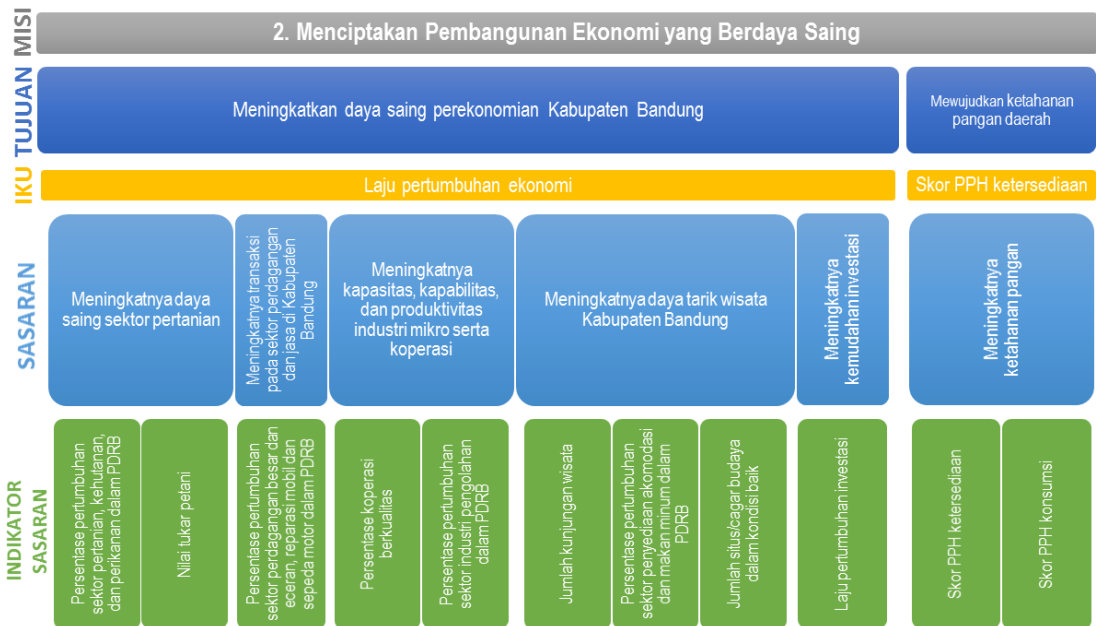


## 2. Misi 2

Dalam rangka pencapaian misi menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah **meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung** dan **mewujudkan ketahanan pangan daerah**. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung
  - a. Meningkatnya daya saing sektor pertanian
  - b. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung

- c. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi
  - d. Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung
  - e. Meningkatnya kemudahan investasi
  2. Mewujudkan ketahanan pangan daerah
    - a. Meningkatnya ketahanan pangan
- Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 2** berikut ini.



**GAMBAR 5.9.**  
**KERANGKA BERPIKIR LOGIS MISI 2**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

## 3. Misi 3

Dalam rangka pencapaian misi meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah **meningkatkan kualitas infrastruktur dasar**

**yang berkelanjutan**. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi



- b. Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi
  - c. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
  - d. Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
  - e. Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana
  - f. Meningkatnya penanggulangan banjir
- Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 3** berikut ini.



**GAMBAR 5.10.**  
**KERANGKA BERPIKIR LOGIS MISI 3**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

#### 4. Misi 4

Dalam rangka pencapaian misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah **menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, serta perubahan iklim**. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 4** berikut ini.



**GAMBAR 5.11.**  
**KERANGKA BERPIKIR LOGIS MISI 4**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

### 5. Misi 5

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah **meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik** dan **meningkatkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah**. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik
  - a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik
  - b. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah

2. Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah
  - a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian **Misi 5** berikut ini.



**GAMBAR 5.12.**  
**KERANGKA BERPIKIR LOGIS MISI 5**  
*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

Dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD maka dibutuhkan konsistensi dari penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur yang menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Di bawah ini dijabarkan konsistensi penurunan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada Tabel 5.6.

Penyusunan tujuan dan sasaran tersebut juga sejalan dengan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Informasi detail mengenai sandingan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.7.



**TABEL 5.6.**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BANDUNG**

Visi: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks pendidikan	62,83	62,89	63,45	64,30	65,15	65,99	65,99	
			Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,46	8,47	8,50	8,53	8,56	8,60	8,60	
				Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	96,81	96,88	96,92	96,97	96,99	97,05	97,05	
				Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	96,30	96,45	96,60	96,78	96,80	97,00	97,00	
				Persentase pemustaka	7,86	8,25	8,33	8,41	8,50	8,58	8,58	
				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	383	154	375	163	410	175	175	
				Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	76,09	76,75	76,83	76,92	77,19	77,35	77,35



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2018	2019	2020	2021		
				Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	N/A	48,39	50,15	69,23	92,31	100,00	100,00	
			Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Indeks kesehatan	81,69	81,74	81,78	81,83	81,87	81,91	81,91	
			Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	68	68	75	80	85	85	
		Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Indeks pengeluaran	68,82	69,69	70,00	70,46	70,92	71,36	71,36	
			Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,73	3,60	3,50	3,40	3,30	3,30	
				Indeks kedalaman kemiskinan	1,00	1,12	1,01	0,97	0,87	0,8	0,8	
		Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	N/A	0,37	4	8	12	16	16	
2.	Menciptakan pembangunan	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase pertumbuhan sektor pertanian,	4,24	4,25	4,26	4,27	4,28	4,28	4,28	



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	
	ekonomi yang berdaya saing			kehutanan, dan perikanan dalam PDRB								
				Nilai tukar petani	104,86	105,36	105,86	106,36	106,86	107,36	107,36	
			Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	5,90	6,00	6,08	6,12	6,19	6,22	6,22	
			Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas usaha mikro, industri kecil dan menengah serta koperasi.	Persentase koperasi berkualitas	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50	
				Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	5,94	6,04	6,09	6,12	6,14	6,17	6,17	
			Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Jumlah kunjungan wisata	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	
				Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	6,53	6,65	6,75	6,85	6,95	7,00	7,00	
				Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	35	45	55	65	75	85	85	



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2018	2019	2020	2021		
			Meningkatnya kemudahan investasi	Laju pertumbuhan investasi	2,70	2,72	2,74	2,76	2,78	2,80	2,80	
			Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	86	89	92	94	94
					Skor PPH Ketersediaan	81,3	86	88,3	90,6	93	95,3	95,3
3.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Moda share	1,41	1,45	1,57	1,84	2,16	2,16	2,16	
				Level of service (LOS) jalan	D	D	D	C	C	C	C	
		Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	N/A	40	45	50	55	60	60		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Akses aman terhadap air bersih	76,04	77,12	76,64	76,94	77,24	80,00	80,00		
			Akses aman terhadap sanitasi	70,20	70,51	90	100	100	100	100		
			Persentase kawasan kumuh	0,72	0,65	0,49	0,35	0,25	0,15	0,15		
		Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	56	56,5	57	57,5	58	58	58		



No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi 2017	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2018	2019	2020	2021		
			Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Response time terhadap kejadian kebakaran	55,35	60	65	70	75	80	80	
				Persentase penanganan kebencanaan	100	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya penanggulangan banjir	Luas genangan	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,55	
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air	20	19	21	22	24	25	25	
				Indeks kualitas udara	60	72	75	77	78	80	80	
				Persentase pengelolaan sampah	24	26	35	50	65	75	75	
			Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Luas ruang terbuka hijau	38,283	46,546	47,01	47,48	47,95	48,43	48,43	
				Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai SAKIP kabupaten	54,61	57,00	63,00	68,00	72,00	77,00	77,00	
				Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	N/A	1,2	2,0	2,5	3,0	3,2	3,2	





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021		
				Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80,46 (Baik)	80,75 (Baik)	81,12 (Baik)	81,78 (Baik)	82,70 (Baik)	82,70 (Baik)	
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	2	1	1	1	1	1	1	
				Tingkat kemandirian fiskal	N/A	18	18,10	18,20	18,30	18,40	18,40	
		Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	15	20	25	30	30	
				Persentase penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



TABEL 5.7.

**SINKRONISASI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI JAWA BARAT**

Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata
		Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK
			Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata
		Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata
		Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
		Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	



Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
	Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
			Meningkatnya daya saing usaha pertanian
		Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi	Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
		Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
		Meningkatnya kemudahan investasi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Mewujudkan ketahanan pangan daerah		Meningkatnya ketahanan pangan	Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan	Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis



Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan		
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	
		terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	
		Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi		
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
		Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang		Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
		Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana		
		Meningkatnya penanggulangan banjir		
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, serta perubahan iklim	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana	
		Terselenggaranya konservasi sumber daya alam		
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang modern	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur	



Tujuan Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
	Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten		Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK
	Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatkan stabilitas di daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut kedalam Strategi dan Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan tersebut yaitu metode analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*). Dengan metode ini, berbagai potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode SWOT ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan.

### **6.1. Strategi Pembangunan**

Strategi pembangunan merupakan serangkaian langkah-langkah yang berisikan proses perwujudan visi dan misi pembangunan yang menyasar pada sasaran strategis daerah. Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati, telah disusun tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penerjemahan visi yang ideal ke dalam level yang lebih mudah dicapai (*achievable*). Rumusan strategi

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perumusan strategi didasarkan pada isu-isu strategis yang terdapat di Kabupaten Bandung yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Isu-isu ini berupa potensi dan permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal wilayah. Penyusunan strategi berdasarkan isu-isu ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien, yakni menjawab permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Identifikasi potensi dan permasalahan internal dan eksternal Kabupaten Bandung yang dikelompokkan dalam kolom SWOT dapat dilihat pada Gambar 6.1.



	POTENSI	PERMASALAHAN
INTERNAL	<p><b>STRENGTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya potensi objek wisata baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan</li> <li>Adanya kekayaan budaya khas daerah</li> <li>Banyaknya pelaku kesenian daerah</li> <li>Peran serta masyarakat dalam gerakan budaya baca sangat tinggi</li> <li>Adanya media publikasi pemerintah berupa media cetak maupun elektronik (website)</li> <li>Terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis</li> <li>Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bandung cukup besar</li> <li>Banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro yang bergerak di berbagai bidang</li> </ul>	<p><b>WEAKNESS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya rata-rata lama sekolah</li> <li>Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar</li> <li>Tenaga kependidikan belum terstandarisasi</li> <li>Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata</li> <li>Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal</li> <li>Banyaknya alih fungsi lahan dan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, baik pemukiman maupun perdagangan dan jasa</li> <li>Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industry masih rendah</li> <li>Pengolahan limbah sampah belum optimal</li> <li>Polusi udara akibat industri dan kendaraan bermotor tinggi</li> <li>Pengelolaan drainase belum optimal</li> <li>Pemanfaatan air baku belum optimal</li> <li>Pemanfaatan perairan umum belum optimal</li> <li>Banyak daerah yang memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi</li> <li>Akses infrastruktur berkualitas belum mencakup seluruh kawasan</li> <li>Kesejahteraan masyarakat rendah</li> <li>Relokasi tempat tinggal ke tempat layak huni belum optimal</li> <li>Rendahnya pelayanan angkutan publik terhadap penumpang</li> <li>Ketersediaan jaringan jalan yang memadai masih terbatas</li> <li>Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>Penanganan PMKS masih rendah</li> <li>Kuantitas sarana penanganan PMKS belum memadai</li> <li>Tingkat pengangguran tinggi</li> <li>Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Bandung</li> <li>Produktivitas pertanian rendah</li> <li>Pemasaran produk pertanian masih rendah</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan pangan local sesuai potensi daerah</li> <li>Daya saing IKM rendah</li> <li>Terbatasnya SDM local berkualitas dalam sektor industri</li> <li>Industri besar masih <i>footloose</i> dan belum ramah lingkungan</li> <li>Transaksi perdagangan masih belum optimal</li> <li>Destinasi wisata belum tergali optimal</li> <li>Branding dan pemasaran objek wisata belum berjalan baik</li> <li>Kuantitas dan produktivitas koperasi dan UKM belum optimal</li> <li>Jumlah PMDN dan PMA masih rendah</li> <li>Ketersediaan sarana prasarana pendukung belum merata</li> <li>Kapasitas aparatur pemerintahan daerah masih rendah</li> <li>Kualitas dan kuantitas produk hokum yang dihasilkan masih rendah</li> <li>Pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi belum optimal</li> </ul>
	<p><b>OPPORTUNITY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akselerasi infrastruktur di Wilayah IV (Tol Soroja, Tol Bandung Intra Urban, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan)</li> <li>Pengembangan penaganan sampah regional</li> <li>Pengembangan transportasi massal Bandung Raya</li> <li>Pembangunan berbasis kewilayahan yang berdasarkan pada tata ruang, Wilayah Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi</li> <li>Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya</li> </ul>	<p><b>THREAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dengan wilayah yang berbatasan</li> <li>Daya saing investasi dengan wilayah lain masih rendah</li> <li>Tantangan globalisasi (degradasi budaya, peningkatan tenaga kerja perempuan)</li> <li>Kondisi PSU di wilayah perbatasan menarik kegiatan keluar dari wilayah Kabupaten Bandung</li> <li>Adanya sentra perdagangan besar di wilayah berbatasan</li> <li>Pasar global (MEA) mengakibatkan masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Kabupaten Bandung</li> </ul>
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi kreatif antara perkotaan dan perdesaan</li> <li>Peningkatan kerjasama antar daerah untuk menciptakan sinergitas dan pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>Peningkatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi</li> <li>Oeningkatan kerjasama dalam penanganan masalah sosial PGOT (pengemis, gelandangan, orang terlantar), ketentraman dan ketertiban umum di perbatasan</li> </ul>	

**GAMBAR 6.1.**  
**IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL KABUPATEN BANDUNG**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Berdasarkan hasil identifikasi terhadap *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat* tersebut, diperoleh empat jenis strategi melalui analisis silang dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O), yaitu strategi untuk menggunakan potensi internal dalam rangka memaksimalkan dalam menangkap peluang eksternal;
2. Strategi *Strength – Threat* (S-T), yaitu strategi untuk menggunakan potensi

internal untuk menangkal berbagai tantangan eksternal;

3. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O), yaitu strategi yang dilakukan untuk meminimalisir kelemahan internal dengan menggunakan peluang eksternal; dan
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T), yaitu strategi untuk meminimalisir kelemahan internal dalam menangkal tantangan eksternal.

<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menciptakan iklim perekonomian berdaya saing berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal</li> <li>▪ Memanfaatkan potensi perdesaan secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat desa</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjamin kualitas pendidikan dan kesehatan serta kemudahan akses pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai modal dalam pembangunan sumber daya manusia</li> <li>▪ Menjamin kondisi masyarakat yang sejahtera dalam aspek ekonomi dan sosial</li> <li>▪ Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang kegiatan perekonomian daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menciptakan pemerintahan yang kondusif dan terintegrasi melalui penerapan kesadaran hukum dan reformasi birokrasi</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjamin ketahanan pangan daerah dan meningkatkan daya saing produk unggulan melalui optimalisasi produksi pertanian lokal</li> </ul>

**GAMBAR 6.2.**  
**HASIL ANALISIS SWOT**

*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

Jika melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki Kabupaten Bandung berdasarkan faktor internal dan eksternal yang kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT, diperoleh tujuh strategi yang dapat dilakukan pada kuadran S-O, S-T, W-O, dan W-T. Strategi pada masing-masing kuadran dianggap paling tepat dalam mengoptimalkan potensi dan menghadapi permasalahan yang ada. Dengan strategi-strategi di atas, penyelenggaraan pembangunan daerah akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Strategi-strategi tersebut diambil hanya berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada dan belum dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. Untuk menyesuaikan strategi dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka hasil dari analisis SWOT yang sudah dilakukan kemudian dibandingkan dengan masing-masing sasaran strategis daerah sehingga didapatkan strategi pembangunan sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 6.1. berikut.





**TABEL 6.1.**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Hasil SWOT	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
<b>Strategi S-O</b>			
Menciptakan iklim perekonomian berdaya saing berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan potensi sumber daya lokal	4. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	2. Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan jasa
		3. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi	Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan KUMKM-IKM dan koperasi unggulan berbasis ekonomi kreatif
		4. Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Peningkatan jumlah destinasi obyek wisata
		5. Meningkatnya kemudahan investasi	Menyederhanakan prosedur perizinan investasi
Memanfaatkan potensi perdesaan secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat desa	3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa
<b>Strategi S-T</b>			
Menciptakan pemerintahan yang kondusif dan terintegrasi melalui penerapan kesadaran hukum dan reformasi birokrasi	8. Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i> Operasi sistem perencanaan dan penganggaran kelitbangan Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal
		2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah



Hasil SWOT	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
	9. Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
<b>Strategi W-O</b>			
Menjamin kualitas pendidikan dan kesehatan serta kemudahan akses pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai modal dalam pembangunan sumber daya manusia	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
		2. Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah, serta Mewujudkan pengembangan kawasan pendidikan terpadu
		3. Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan
		4. Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Meningkatkan AHH dan menurunkan angka kesakitan
Menjamin kondisi masyarakat yang sejahtera dalam aspek ekonomi dan sosial	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	5. Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
	6. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Daerah	1. Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Menekan tingkat pengeluaran masyarakat
Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang kegiatan perekonomian daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang	6. Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar yang berkelanjutan	2. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja
		1. Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik
		2. Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi
			Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih



Hasil SWOT	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		3. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi Meningkatkan kualitas permukiman penduduk
		4. Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
		5. Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran
			Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
		6. Meningkatnya penanggulangan banjir	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
		7. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
	2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam		Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau
<b>Strategi W-T</b>			
Menjamin ketahanan pangan daerah dan meningkatkan daya saing produk unggulan melalui optimalisasi produksi pertanian lokal	4. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	1. Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Peningkatan produksi dan komoditas pertanian unggulan
	5. Mewujudkan ketahanan pangan daerah	1. Meningkatnya ketahanan pangan	Mengembangkan keanekaragaman tanaman pangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**Strategi S-O** merupakan strategi yang paling diharapkan, dimana suatu daerah memiliki potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dalam pemilihan strategi untuk kuadran S-O ini pada umumnya diterapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Dalam mendukung pertumbuhan yang agresif, maka perlu strategi yang difokuskan kepada pertumbuhan kegiatan yang dominan yang didukung oleh kebijakan pada level yang lebih tinggi. Kabupaten Bandung dengan segala macam potensi wilayah termasuk kawasan perdesaannya, diharapkan mampu menjadi roda penggerak pertumbuhan perekonomian daerah. Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat dominan yakni kondisi fisik wilayahnya yang sebagian besar merupakan perdesaan dengan masing-masingnya memiliki potensi alam, wisata, pertanian, dan industri rumahan yang berbeda-beda yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sementara itu, peluang terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung adalah adanya program pembangunan perdesaan oleh pemerintah pusat yang memungkinkan adanya bantuan berupa bantuan teknis maupun nonteknis dalam perwujudan pembangunan perdesaan, khususnya dalam mengembangkan potensi yang beragam yang menjadi karakteristik masing-masing wilayah perdesaan. Maka dari itu, strategi yang dipilih untuk kuadran S-O adalah:

1. Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan jasa
2. Mengembangkan sentra dan kluster pengembangan KUMKM-IKM dan koperasi unggulan berbasis ekonomi kreatif
3. Peningkatan jumlah destinasi obyek wisata
4. Menyederhanakan prosedur perizinan investasi
5. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa

Pembangunan daerah yang difokuskan pada pertumbuhan perekonomian di perdesaan secara tidak langsung akan mendorong segala macam kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bandung. Perdesaan tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga dipandang sebagai subjek pembangunan. Dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan maka akan terbentuk simpul-simpul kegiatan ekonomi baru dengan ciri khasnya masing-masing, yang tidak hanya menjadi atraksi bagi pendatang maupun investor tetapi juga menjadi sarana pengembangan kapasitas dan peningkatan perekonomian penduduk lokal. Hal ini juga menjawab keresahan perekonomian Kabupaten Bandung saat ini, yakni kurangnya daya saing ekonomi dengan wilayah lain. Dengan strategi yang berfokus pada pengembangan kawasan perdesaan, maka produk-produk unggulan dari usaha kecil dan mikro di kawasan perdesaan dapat terdorong dalam segi produksi dan pemasaran sehingga kemampuan daya saingnya akan meningkat. Hal ini sejalan dengan Program Sabilulungan 1000 Kampung Kabupaten Bandung oleh Bupati.

Salah satu bidang yang perlu diperbaiki dalam memajukan perekonomian perdesaan Kabupaten Bandung adalah koperasi. Dengan peran serta koperasi yang aktif dan efektif akan terwujud kegiatan ekonomi yang seimbang terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro juga industri rumahan yang umumnya memiliki skala produksi yang tidak begitu besar. Adanya peran koperasi di dalam perekonomian perdesaan memungkinkan adanya perantara antara produsen dan



konsumen, juga produsen dan penyuplai bahan produksi.

Perekonomian perdesaan tidak terbatas hanya pada usaha kecil dan mikro tetapi juga pengembangan kegiatan pariwisata yang menjadi salah satu potensi yang banyak dimiliki Kabupaten Bandung tetapi belum tergali secara optimal. Dengan perkembangan kegiatan pariwisata maka atraksi Kabupaten Bandung terhadap pendatang (wisatawan) akan meningkat. Hal ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pengusaha lokal untuk dijadikan target pasar sehingga kegiatan ekonomi yang lebih besar dapat terbentuk di objek-objek wisata. Tidak hanya itu, dengan adanya banyak pendatang maka menjadi atraksi tersendiri bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bandung. Hal ini tentunya dapat didukung oleh kemudahan proses perizinan investasi. Sehingga terjadi sinergitas pertumbuhan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan.

**Strategi S-T** merupakan strategi dalam mengatasi ancaman eksternal Kabupaten Bandung dengan menggunakan potensi-potensi daerah yang ada. Strategi yang umumnya digunakan dalam kuadran S-T ini biasanya merupakan *mobilization strategy*, yakni menggunakan potensi yang ada untuk menggali peluang jangka panjang dari ancaman yang ada. Dalam merumuskan strategi yang dapat menghasilkan peluang jangka panjang, dilihat kekuatan atau potensi apa yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung yang dianggap paling bisa menjadi roda pemutar ancaman menjadi peluang di masa depan. Kabupaten Bandung memiliki potensi sumber daya aparatur yang mencukupi yang dianggap mampu menggali peluang jangka panjang apabila diberdayakan secara optimal. Kondisi pemerintahan yang ada saat ini dianggap masih belum optimal dengan segala macam kekurangan, baik dalam segi teknis

maupun administratif. Begitu pula dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah diterapkan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal yang seharusnya mampu mendukung segala macam kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Dari potensi tersebut, maka strategi di kuadran S-T yang dipilih adalah:

1. Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem *reward and punishment*
2. Operasi sistem perencanaan dan penganggaran kelitbangan
3. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Meminimalisasi terhadap ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dalam penyusunan strategi S-T, digunakan alat yang sekiranya mampu menjadi penggerak dalam menggali potensi jangka panjang. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dianggap tepat untuk diterapkan dalam strategi ini karena pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah memiliki wewenang dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua hal ini merupakan parameter dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana suatu perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat tepat sasaran dan berjalan dengan efektif dan efisien, serta bagaimana pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Untuk memastikan semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur dan kelembagaan yang berkualifikasi dan memiliki



integritas dalam menjalankan wewenang yang dimiliki.

Pemerintah yang diharapkan untuk terwujud dalam strategi ini adalah pemerintah yang kompeten dan akuntabel, yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan pemerintahan dan memiliki integritas dalam mengemban amanat. Akuntabilitas menjadi hal yang penting mengingat peran aktif pemerintah dalam hal anggaran dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah yang mampu mewujudkan kerjasama antar sektor maupun antar wilayah sangat diperlukan demi mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, faktor keamanan dan ketertiban lingkungan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dengan stabilitas lingkungan yang aman dan tertib maka segala proses pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bandung akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, faktor keamanan dan ketertiban juga menjadi bagian dari strategi S-T, dengan tujuan stabilitas lingkungan ini dapat menjadi pendukung dari penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.

**Strategi W-O** merupakan strategi untuk menanggulangi kelemahan dan permasalahan internal yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi yang diambil untuk kuadran ini adalah strategi *investment*, yakni dengan cara melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan internal untuk bisa dijadikan kekuatan dan potensi. Kondisi kelemahan (*weakness*) yang dominan di Kabupaten Bandung adalah kondisi fisik infrastruktur yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kegiatan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Selain itu, kelemahan lain yang dimiliki

Kabupaten Bandung adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka disusunlah strategi-strategi pembangunan untuk kuadran W-O, yaitu:

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
2. Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah, serta mewujudkan pengembangan kawasan pendidikan terpadu
3. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan AHH dan menurunkan angka kesakitan
5. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
6. Menekan tingkat pengeluaran masyarakat
7. Meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik
9. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi
10. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih
11. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi
12. Meningkatkan kualitas permukiman penduduk
13. Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang
14. Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran
15. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
16. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
17. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan



#### 18. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau

Strategi-strategi yang telah disusun difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk *investment* dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang diharapkan dapat menjadi potensi di masa depan. Sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah merupakan aspek yang harus diperhatikan karena kualitas dan produktivitas sumber daya manusia berbanding lurus dengan proses pembangunan daerah. Semakin produktif penduduk di Kabupaten Bandung otomatis berpengaruh positif terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung. Pembangunan ini juga akan berpengaruh secara simultan terhadap kondisi kesejahteraan penduduk.

Infrastruktur dan tata ruang, yang didalamnya terdapat aspek lingkungan dan kebencanaan, merupakan dua hal yang saling terkait yang dalam perencanaannya juga diperlukan keselarasan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah tidak terlepas dari aspek fisik yang menjadi penunjang. Dengan tersedianya jaringan infrastruktur dan sarana-sarana pendukung yang memadai dan berkualitas, maka segala macam kegiatan perekonomian, mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan pemasaran akan berjalan dengan lancar. Hal ini juga terkait visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan menambah nilai daya saing wilayah Kabupaten Bandung.

**Strategi W-T** merupakan strategi yang mengharuskan pemerintah mampu menjawab kelemahan daerahnya sekaligus ancaman

eksternal yang ada secara bersamaan. Penyusunan strategi ini biasanya bersifat defensif, dengan kata lain melakukan upaya-upaya memperkuat kondisi internal dalam mempersiapkan diri menghadapi kondisi eksternal yang ada. Strategi yang disusun adalah strategi yang memungkinkan Kabupaten Bandung bertahan bahkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan dengan kesadaran akan ancaman-ancaman yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kuadran W-T adalah strategi yang terkait dengan pertanian, baik sebagai bentuk modal Kabupaten Bandung untuk *survive* maupun sebagai modal untuk peningkatan perekonomian dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan wilayah lain. Strategi-strategi untuk kuadran W-T antara lain:

1. Peningkatan produksi dan komoditas pertanian unggulan
2. Mengembangkan keanekaragaman tanaman pangan

Kegiatan pertanian perlu ditingkatkan dengan tujuan tidak hanya pemenuhan ketahanan pangan daerah, tetapi juga sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah. Penetapan kegiatan pertanian sebagai strategi untuk menjawab kelemahan dan ancaman dianggap tepat karena dengan berkembangnya kegiatan pertanian maka tidak hanya kesejahteraan pangan masyarakat saja yang dapat terwujud, tetapi juga daya saing perekonomian dapat disokong melalui sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam kuadran W-T ini dipilih strategi untuk meningkatkan produksi dan komoditas pertanian unggulan serta peningkatan variasi tanaman pangan untuk pasokan pangan lokal, juga sebagai pasokan produk pertanian ekspor yang berdaya saing.

Berikut Tabel 6.2. berisi keterkaitan antara strategi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung..



**TABEL 6.2.**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

<b>Visi: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>		
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
	Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah, serta mewujudkan pengembangan kawasan pendidikan terpadu
	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan
	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Meningkatkan AHH dan menurunkan angka kesakitan
	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Menekan tingkat pengeluaran masyarakat
	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja
Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa
<b>Misi 2: Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing</b>		
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Peningkatan produksi dan komoditas pertanian unggulan
	Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan jasa
	Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas usaha mikro, industri kecil dan menengah serta koperasi.	Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan KUMKM-IKM dan koperasi unggulan berbasis ekonomi kreatif
	Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Peningkatan jumlah destinasi obyek wisata
	Meningkatnya kemudahan investasi	Menyederhanakan prosedur perizinan investasi
Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Mengembangkan keanekaragaman tanaman pangan
<b>Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah</b>		





<b>Visi: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik	
	Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih
			Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi
			Meningkatkan kualitas permukiman penduduk
	Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang	
	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana		Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran
Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana			
Meningkatnya penanggulangan banjir		Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	
<b>Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>			
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, serta perubahan iklim	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan	
	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	
<b>Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>			
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment	
		Operasi sistem perencanaan dan penganggaran kelitbangan	
		Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



## 6.2. Arah Kebijakan

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Bupati dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut.



**GAMBAR 6.3.**  
**TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

### 1. Tema Pembangunan Tahun 2016

Di tahun awal berlakunya RPJMD Kabupaten Bandung, tahun 2016, dipilih tema pembangunan yang bertujuan untuk mempersiapkan pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Bandung melalui pemantapan aspek sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah. Maka dari itu, tema pembangunan pada tahun ini adalah: **“Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aktor**

**pembangunan daerah dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar”**.

Penetapan tema ini sebagai tema di awal periode RPJMD dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting yang memegang peranan utama dalam pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana sumber daya manusia di daerah tersebut dapat melaksanakan



pembangunan itu sendiri. Mulai dari tahapan perencanaan, bagaimana sumber daya manusia yang didalamnya adalah penduduk sipil dan aparat pemerintahan dapat mengelola segala macam potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, sampai dengan tahapan pelaksanaan, bagaimana kesiapan penduduk sipil dan aparat pemerintahan dalam menerima perkembangan yang terjadi di daerahnya dan bagaimana tata cara yang diambil untuk melakukan pembangunan yang positif tanpa mengurangi kearifan lokal. Maka dari itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam tema tahun 2016 ini sebagai bentuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

Dalam rangka memantapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat pun menjadi fokus utama dalam tema ini. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi penting berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam pembangunan.

## 2. Tema Pembangunan Tahun 2017

Memasuki tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Bandung, tema yang ditetapkan masih berkaitan dengan persiapan Kabupaten Bandung untuk melakukan pembangunan. Selagi pemantapan sumber daya manusia masih berjalan, dilakukan juga persiapan dalam aspek fisik sebagai salah satu penunjang segala macam kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung. Tema untuk tahun 2017 ini adalah:

***“Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan daya saing perekonomian”.***

Infrastruktur merupakan aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Infrastruktur menjadi pemegang peran penghubung antar satu wilayah dan wilayah lainnya, baik dalam sektor transportasi yang didalamnya terdapat jaringan jalan dan jembatan beserta kelengkapannya dan sarana transportasi umum, maupun sektor air bersih dan sanitasi, yang didalamnya mencakup jaringan irigasi, air bersih, dan sanitasi. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat berpengaruh terhadap setiap kegiatan perekonomian di Kabupaten Bandung, mulai dari kegiatan pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Dengan kelancaran yang didapatkan dari infrastruktur yang baik, maka kegiatan-kegiatan perekonomian pun menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain sebagai pendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah. Berkembangnya suatu wilayah dapat diinisiasi oleh banyak hal, salah satunya adalah dengan adanya jaringan jalan. Jaringan dan kegiatan memiliki hubungan yang erat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Adanya kegiatan yang berkembang di suatu wilayah membutuhkan adanya jaringan sebagai penunjang, tetapi disamping itu jaringan yang sudah ada terlebih dahulu di suatu wilayah menjadi pendorong berkembangnya kegiatan di wilayah tersebut. Sehingga untuk menjamin berkembangnya Kabupaten Bandung pun,



dibutuhkan pembangunan jaringan untuk menarik kegiatan ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung diharapkan selain mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah ada, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung.

### 3. Tema Pembangunan Tahun 2018

Dalam pertengahan periode berlakunya RPJMD Kabupaten Bandung, kondisi yang diharapkan terjadi di Kabupaten Bandung adalah kualitas sumber daya manusia yang sudah meningkat dan kondisi fisik infrastruktur yang mulai merata. Kedua kondisi ini sudah memungkinkan dimulainya pengembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Bandung dengan diikuti oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang juga terus diupayakan. Oleh karena itu, tema yang diambil untuk tahun 2018 ini adalah: “**Pengembangan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultur dan pemberdayaan masyarakat desa**”.

Jika dilihat dari kondisi eksisting Kabupaten Bandung yang memiliki banyak potensi alam dan potensi budaya di masyarakat, maka pengembangan perekonomian yang dianggap paling tepat dalam optimalisasi potensi yang ada adalah dengan pengembangan kegiatan pariwisata, baik berupa wisata alam maupun wisata seni budaya. Pengembangan kegiatan wisata ini selain mengoptimalkan potensi yang sudah ada, dapat pula dijadikan sebagai salah satu sarana bagi Kabupaten Bandung untuk terus mengeksplor potensi-potensi yang dapat dikembangkan terkait kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang

dikembangkan pada akhirnya tidak hanya wisata alam dan seni budaya, tetapi juga dapat merambah wisata dengan atraksi buatan, contohnya seperti jembatan hias ataupun taman tematik.

Kegiatan lain yang akan dikembangkan dalam tema pembangunan tahun 2018 ini adalah ekonomi kreatif. Dengan perkembangan zaman dan peningkatan persaingan ekonomi yang pesat, kegiatan ekonomi juga perlu beradaptasi demi tercapainya *economic sustainability* sebelum akhirnya menuju perekonomian yang berdaya saing. Inovasi dan ide-ide baru dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan produktivitas ekonomi maupun sebagai ciri khas produk yang dihasilkan yang berfokus pada subsektor seni pertunjukan, aplikasi dan games, kriya, kuliner, dan *fashion*.

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Bandung yang dapat mengadaptasi ekonomi kreatif antara lain adalah kegiatan pertanian serta industri dan usaha kecil dan mikro (IKM dan UKM). Pertanian merupakan salah satu kegiatan utama penduduk Kabupaten Bandung dengan hasil produksi yang berkualitas dan memiliki ciri khas. Sementara itu, potensi IKM dan UKM di Kabupaten Bandung cukup tinggi dengan jenis produk yang beragam yang tersebar di setiap kecamatan. Kualitas dan variasi produk Kabupaten Bandung sampai saat ini belum cukup dikenal masyarakat karena proses produksi dan pemasaran yang masih tradisional. Tanpa diintervensi oleh kreativitas berupa inovasi dan ide-ide baru, maka produk-produk tersebut akan kalah bersaing dengan produk wilayah lain yang sudah menerapkan ekonomi kreatif.



Selain perkembangan perekonomian dilihat berdasarkan sektor dan konsep yang digunakan, perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan pelaku pembangunan. Salah satu pelaku pembangunan yang paling mencolok di Kabupaten Bandung adalah masyarakat desa. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa desa tidak hanya menjadi objek suatu perencanaan tetapi juga sebagai aktor yang terlibat aktif dalam pembangunan.

#### 4. Tema Pembangunan Tahun 2019

Kondisi yang diharapkan sudah terjadi di tahun 2019 adalah kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan sudah mulai berkembang yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang baik. Dengan sudah tersedianya modal-modal dasar dalam pembangunan daerah, tahapan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan kegiatan perekonomian yang menjadi pendorong dalam pembangunan Kabupaten Bandung dengan mengedepankan konsep perekonomian mandiri. Maka dari itu, tema yang dianggap paling merepresentasikan pembangunan di tahun 2019 ini adalah: ***"Peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui Sabilulungan 1000 Kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja"***.

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memuat keadaan makro ekonomi suatu daerah. Angka PDRB ini selain sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. PDRB Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor-sektor ekonomi yang

bergerak di dalamnya, termasuk pertanian dan pariwisata.

Sektor pertanian dan pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Kontribusi kedua sektor ini dalam PDRB dilihat dari berbagai hal, diantaranya produksi, pendapatan, pengeluaran, tenaga kerja, dll. Artinya dalam upaya untuk memantapkan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Bandung, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedua sektor tersebut. Peningkatan nilai dan jumlah produksi serta balas jasa dalam sektor pertanian, dan peningkatan kegiatan dan pendapatan dalam sektor pariwisata merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memantapkan kontribusi kedua sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian dan pariwisata juga menjadi hal lainnya yang dapat mempengaruhi kontribusinya terhadap PDRB.

Seiring dengan perkembangan kegiatan dalam sektor pertanian dan pariwisata, diharapkan sektor-sektor lain dapat ikut berkembang. Sektor lainnya ini dapat berupa penunjang maupun kegiatan lainnya yang muncul akibat dari berkembangnya pertanian dan pariwisata Kabupaten Bandung. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di Kabupaten Bandung tersebut pada akhirnya akan saling mengisi dan saling mempengaruhi peningkatan kontribusinya masing-masing. Dengan begitu, diharapkan perekonomian Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih mandiri yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan penduduk Kabupaten Bandung akan barang dan jasa dengan diikuti oleh berkurangnya kegiatan impor dari luar



wilayah dan meningkatnya kegiatan ekspor komoditas lokal.

##### 5. Tema Pembangunan Tahun 2020

Di akhir periode RPJMD Kabupaten Bandung, kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur yang baik dan merata, serta kontribusi kegiatan ekonomi yang diunggulkan dalam kondisi mantap. Tercapainya kondisi tersebut memungkinkan fokus pembangunan dapat mulai bergeser dari peningkatan kemampuan internal menjadi eksternal, yakni kemampuan Kabupaten Bandung dalam bersaing dengan wilayah lain dalam level provinsi, nasional, maupun global. Tema di akhir periode RPJMD ini adalah: ***“Pemantapan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional”***.

Visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi tujuan akhir dalam segala bentuk pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bandung. Setelah dilakukan berbagai macam pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun 2020 ini adalah titik akhir dimana visi Kabupaten Bandung dapat diwujudkan. Daya saing wilayah Kabupaten Bandung, baik dalam segi ekonomi, sumber daya manusia, maupun fisik infrastruktur, diharapkan sudah mampu bersaing dengan wilayah lain.

Selain memiliki daya saing, Kabupaten Bandung di tahun 2020 ini juga diharapkan mampu membangun infrastruktur yang terintegrasi internal dan dengan wilayah yang berbatasan di sekitarnya. Integrasi antar wilayah ini bertujuan untuk mempermudah alur distribusi barang dan transportasi penumpang. Dengan kata lain, adanya keterhubungan jaringan dengan wilayah sekitar menjadi

pendukung pertumbuhan dan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung. Selain itu, integrasi antar wilayah ini juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan mempermudah kerjasama antara wilayah berbatasan dalam penyelesaian permasalahan bersama.

Kabupaten Bandung sebagai entitas juga merupakan wadah bagi berbagai kegiatan yang berjalan di dalamnya. Daya tampung dan daya dukung lingkungan Kabupaten Bandung sangat penting untuk diperhatikan demi menjamin keberlangsungan kehidupan yang berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan lingkungan demi mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan agar hasil dari pembangunan yang dilakukan dalam periode RPJMD tahun 2016-2021 tidak hanya dirasakan oleh generasi yang ada saat ini, tetapi juga pada generasi-generasi yang akan datang.

Tema-tema pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan agar lebih terarah dan sistematis dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk memperjelas bagaimana sistematika dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai turunan dari visi dan misi daerah, maka disusun arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Arah kebijakan ini fungsinya adalah sebagai penajaman sasaran dalam penurunannya ke dalam program pemerintah daerah.

Berikut keterkaitan arah kebijakan dan tema pembangunan tahunan, serta keterkaitan antara tujuan sampai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.



**TABEL 6.3.**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Arah Kebijakan				
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
"Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan daerah dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar"	"Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan daya saing perekonomian"	"Pengembangan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultur dan pemberdayaan masyarakat desa"	"Peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui Sabilulungan 1000 Kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja"	"Pemantapan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional"
1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	1. Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	1. Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A	1. Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu
2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A	2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A	2. Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A	2. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	2. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan	3. Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan	3. Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan	3. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
4. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	4. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	4. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	4. Peningkatan daya beli masyarakat	4. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	5. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	5. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	5. Peningkatan perluasan kesempatan kerja	5. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
6. Peningkatan daya beli masyarakat	6. Peningkatan daya beli masyarakat	6. Peningkatan daya beli masyarakat	6. Meningkatkan kesiagaan aparaturnya ketentraman dalam mengamankan wilayah	6. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing
7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja	7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja	7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja	7. Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu	7. Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa
8. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	8. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	8. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	8. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	8. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif



Arah Kebijakan				
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
"Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan daerah dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar"	"Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan daya saing perekonomian"	"Pengembangan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultur dan pemberdayaan masyarakat desa"	"Peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui Sabilulungan 1000 Kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja"	"Pemantapan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional"
9. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan	9. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan	9. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan	9. Peningkatan ketersediaan air bersih	9. Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung
10. Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal	10. Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal	10. Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal	10. Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan	10. Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi
11. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	11. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	11. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	11. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang	11. Peningkatan sentra produksi tanaman pangan
12. Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah	12. Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah	12. Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah	12. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
	13. Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu	13. Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu	13. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana	
	14. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	14. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	14. Peningkatan infrastruktur rawan banjir	
	15. Peningkatan ketersediaan air bersih	15. Peningkatan ketersediaan air bersih	15. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	16. Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan	16. Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan	16. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang	





Arah Kebijakan				
Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
"Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan daerah dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar"	"Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan daya saing perekonomian"	"Pengembangan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultur dan pemberdayaan masyarakat desa"	"Peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui Sabilulungan 1000 Kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja"	"Pemantapan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional"
			dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	
	17. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang	17. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang	17. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	
	18. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	18. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	18. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	
	19. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana	19. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana	19. Peningkatan kualitas produk pertanian yang bedaya saing	
	20. Peningkatan infrastruktur rawan banjir	20. Peningkatan infrastruktur rawan banjir	20. Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa	
	21. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	21. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	21. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif	
	22. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	22. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	22. Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung	
		23. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	23. Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi	
		24. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	24. Peningkatan sentra produksi tanaman pangan	
		25. Peningkatan kualitas produk pertanian yang bedaya saing		
		26. Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa		



<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>
"Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aktor pembangunan daerah dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dasar"	"Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan daya saing perekonomian"	"Pengembangan industri pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultur dan pemberdayaan masyarakat desa"	"Peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui Sabilulungan 1000 Kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja"	"Pemantapan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional"
		27. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif		
		28. Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung		
		29. Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi		
		30. Peningkatan sentra produksi tanaman pangan		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 6.4.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 1**

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
	Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah, serta mewujudkan pengembangan kawasan pendidikan terpadu	Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A
		Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang olahraga	Peningkatan fasilitasi pemuda berprestasi
	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan
	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Meningkatkan AHH dan menurunkan angka kesakitan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
Menurunnya Tingkat Kemiskinan Daerah	Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Menekan tingkat pengeluaran masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat
	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja
Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 6.5.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 2**

Misi 2: Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Peningkatan produksi dan komoditas pertanian unggulan	Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing
	Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan jasa	Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa
	Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi	Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan KUMKM-IKM dan koperasi unggulan berbasis ekonomi kreatif	Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif
	Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Peningkatan jumlah destinasi obyek wisata	Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung
	Meningkatnya kemudahan investasi	Menyederhanakan prosedur perizinan investasi	Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi
Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Mengembangkan keanekaragaman tanaman pangan	Peningkatan sentra produksi tanaman pangan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 6.6.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 3**

Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik	Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu	
	Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi	Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih		Peningkatan ketersediaan air bersih
		Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi		Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan
		Meningkatkan kualitas permukiman penduduk		Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang		Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana		Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana
Meningkatnya penanggulangan banjir	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air		Peningkatan infrastruktur rawan banjir	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 6.7.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 4**

Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



**TABEL 6.8.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 5**

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem reward and punishment	Peningkatn kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
		Operasi sistem perencanaan dan penganggaran kelitbangan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan
		Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal	Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Di samping arah kebijakan umum yang dibuat berdasarkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan, disusun pula kebijakan yang bersifat lebih terpadu (*integrated*) dan spesifik dalam rangka mendukung terciptanya rencana pembangunan yang efektif dan mengakomodir terlaksananya percepatan pembangunan Kabupaten Bandung. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan konsep tematik perencanaan terpadu Bandung 1000 Kampung.

Rencana pembangunan Kabupaten Bandung akan lebih diarahkan ke dalam lima tematik pembangunan unggulan meliputi tematik pariwisata, tematik investasi, tematik *cluster* pendidikan, tematik kemiskinan, dan tematik Bandung sehat. Penetapan lima tematik pembangunan ini sejalan dalam mendukung optimalisasi pengembangan kapasitas masyarakat lokal, serta optimalisasi pengembangan potensi wilayah. Dengan demikian dengan mendorong implementasi lima tematik pembangunan ini diharapkan

mampu mendorong pengembangan wilayah, khususnya kawasan perdesaan. Pembangunan tematik Kabupaten Bandung memiliki pengertian sebagai pembangunan terpadu yang mengkaitkan beberapa tema pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih terintegrasi, serta agar memiliki kesamaan tujuan antar sektor pembangunan. Pemilihan konsep tematik didasarkan pada persoalan eksisting, yang mana sektor-sektor pembangunan cenderung berfokus pada pembangunan sektor masing-masing dengan mengabaikan keterkaitannya dengan sektor lain. Terkotak-kotaknya sektor pembangunan seringkali mengakibatkan adanya ketidaksinkronan pembangunan antar sektor yang dapat menghambat pembangunan wilayah. Melalui pengembangan tematik diharapkan akan tercipta sinergi yang memperkuat pembangunan wilayah. Dengan kata lain, pengintegrasian sektor pembangunan akan menjadi katalisator bagi pembangunan.



**GAMBAR 6.4.**  
**KONSEP 1000 KAMPUNG**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



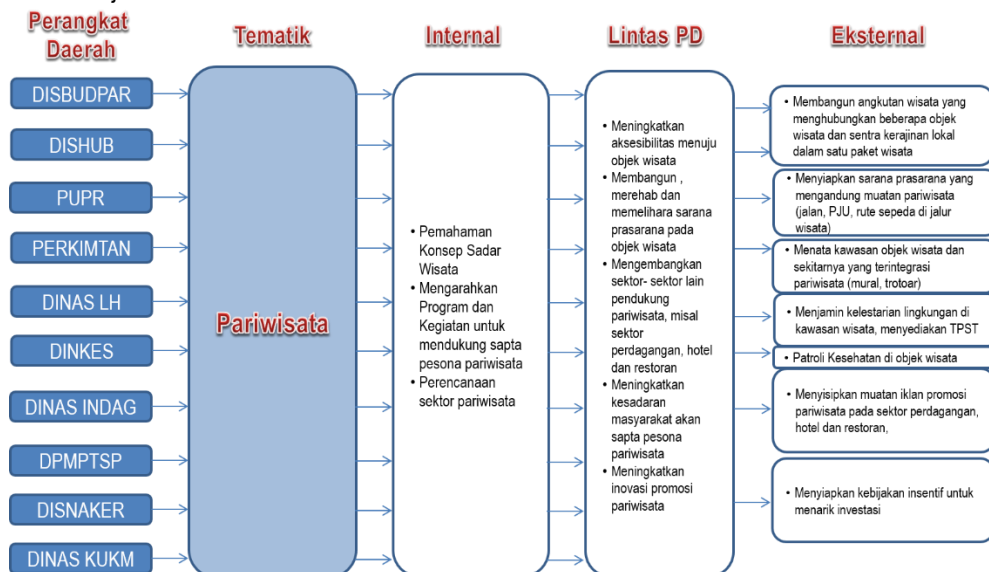
Pemilihan lima tematik pembangunan 1000 Kampung didasarkan pada potensi eksisting serta prediksi prospek kedepan. Dengan pengembangan lima tematik pembangunan ini diharapkan akan menjadi pendorong percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bandung dalam memantapkan pembangunan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing pada tahun 2021. Adapun yang menjadi kegiatan pembangunan unggulan setiap tematik pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Tematik Pariwisata

Pada kondisi eksisting, Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi pariwisata, baik yang itu untuk objek-objek wisata yang sudah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan. Objek-objek wisata Kabupaten Bandung yang telah berkembang tidak menjadi destinasi bagi wisatawan domestik, tetapi juga bagi wisatawan internasional. *Trend* kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dalam kurun tahun

2011-2015 telah terjadi peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) Kabupaten Bandung Tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung pada tahun 2016 sebanyak 715.847 jiwa wisatawan domestik dan 7.154 wisatawan mancanegara. Meninjau potensi dan perkembangan pariwisata Kabupaten Bandung eksisting, diprediksi pengembangannya kedepan akan berdampak signifikan bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Konsep pengembangan tematik pariwisata di Kabupaten Bandung bertujuan untuk menggabungkan sektor-sektor diluar sektor pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Bandung. Sektor di luar pariwisata yang berpotensi dikembangkan dalam mendukung pariwisata beserta perannya tertera pada Gambar 6.6.



**GAMBAR 6.5.**  
**KONSEP TEMATIK PARIWISATA**  
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

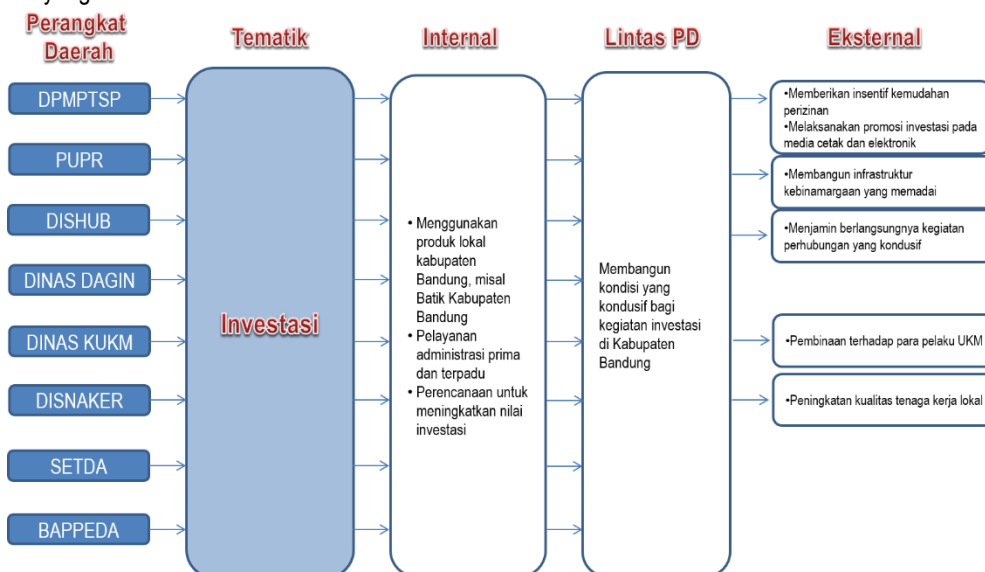


## 2. Tematik Investasi

Sebagai salah satu faktor produksi, modal atau modal merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan *output* produksi. Didasari pemikiran tersebut, pemerintah kabupaten Bandung memandang penting investasi sebagai salah satu determinan untuk menggerakkan perekonomian wilayah. Pengembangan investasi di Kabupaten Bandung menjadi inovatif sebab diarahkan pada pengembangan UKM kreatif melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada para pelaku UKM. Insentif yang diberikan antara lain berupa kemudahan pengurusan perizinan UKM, fasilitasi pembuatan desain kemasan, serta pemberian pelatihan wirausahawan kepada para pelaku UKM-UKM yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan komunitas. Disisi lain, komunitas lokasi UKM akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan yang diharapkan akan menjadi magnet bagi potensi investasi yang lebih besar.

Selain dari pada itu, pengembangan tematik investasi di Kabupaten Bandung yaitu adanya konsep untuk menggabungkan sektor-sektor diluar sektor investasi untuk mendukung pembangunan investasi Kabupaten Bandung. Pengintegrasian ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi investasi di Kabupaten Bandung. Sektor yang berpotensi dikembangkan dalam mendukung investasi antara lain sektor infrastruktur, perhubungan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, serta institusional dan regulasi.

Melalui implementasi kebijakan tematik investasi ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mendukung terwujudnya pembangunan 1000 kampung. Tematik investasi dalam implementasinya akan melibatkan beberapa stakeholder, mulai dari perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha. Beberapa perangkat daerah yang terlibat beserta peran fungsinya ditampilkan pada Gambar berikut.



**GAMBAR 6.6.**  
**KONSEP TEMATIK INVESTASI**

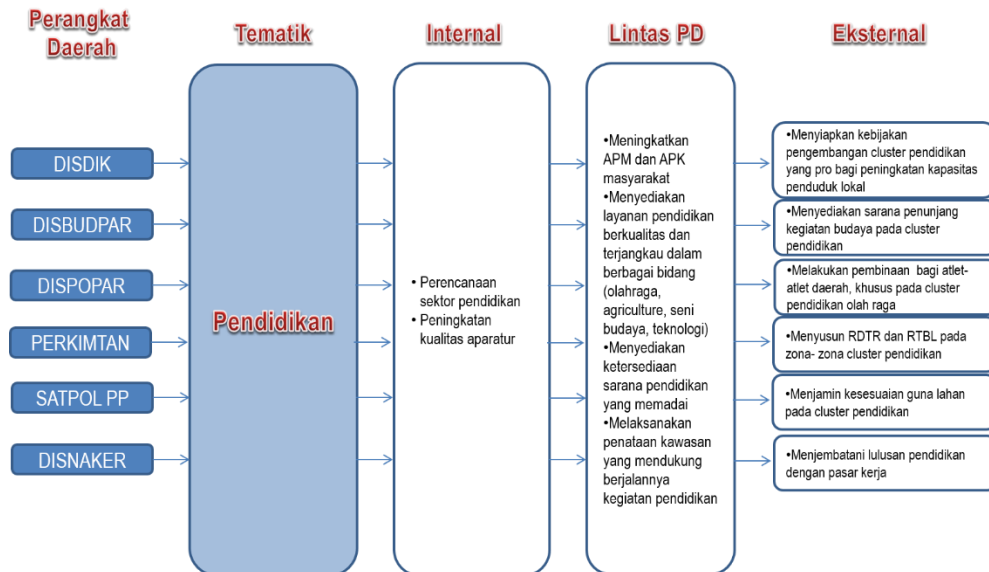
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

### 3. Tematik Pendidikan

Penetapan tematik pendidikan dilatarbelakangi oleh adanya potensi strategis wilayah, antara lain kawasan SOR Soroja sebagai *cluster* olah raga terpadu, kawasan sekitar puseur budaya dan Gedong Budaya Sabilulungan sebagai *cluster* seni budaya, serta kawasan pendidikan tinggi, diantaranya Telkom University sebagai *cluster* teknopolis. Pengembangan tematik *cluster* pendidikan ini sejalan dengan adanya persoalan utama sektor pendidikan di Kabupaten Bandung, yaitu masih rendahnya angka APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) jenjang pendidikan SMA. Melalui pengembangan *cluster-cluster* pendidikan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengurangi

pengurangan angka tidak melanjutkan SMP ke SMA, serta meningkatkan jumlah penduduk kabupaten Bandung yang melanjutkan ke jenjang pendidikan D3/S1. Selain dari pada itu, pengembangan *cluster* tematik pendidikan dengan tema-tema pendidikan yang bervariasi (olahraga, agrikultur, seni budaya, teknologi) akan mampu menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang unggul. Lebih daripada itu, pembangunan *cluster* pendidikan disamping akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga akan mendukung dalam percepatan pembangunan Kabupaten Bandung.

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan konsep tematik *cluster* pendidikan dapat dilihat pada Gambar 6.8.



**GAMBAR 6.7.**  
**KONSEP TEMATIK CLUSTER PENDIDIKAN**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Dalam implementasinya, pengembangan *cluster* pendidikan akan melibatkan multi sektor. Pengembangan *cluster* pendidikan

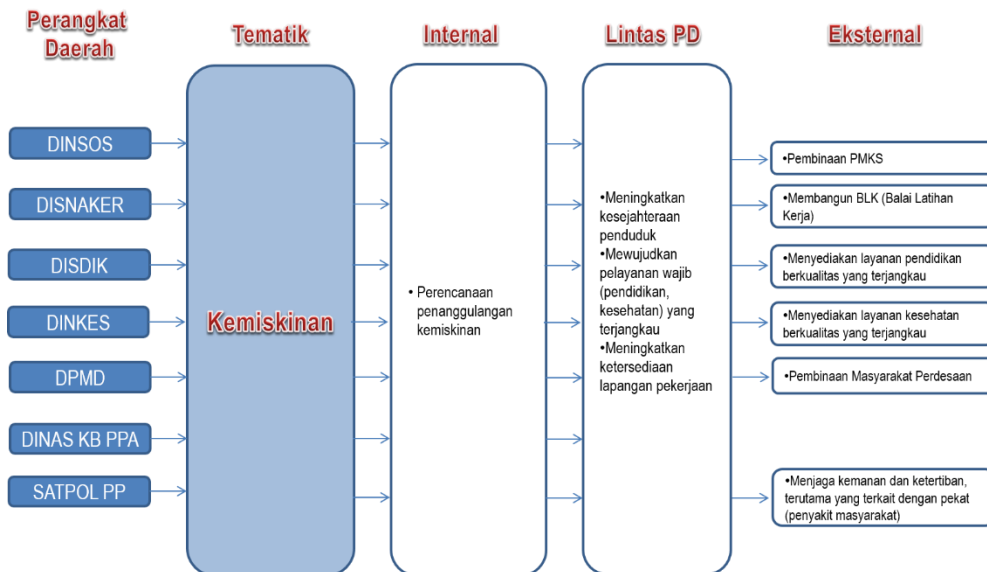
yang memiliki tema-tema spesifik (olahraga, agrikultur, seni budaya, dan teknologi) akan berpengaruh terhadap



adanya perbedaan karakteristik kebutuhan fasilitas dan program pengembangan. Dampak lain dari pembangunan *cluster* pendidikan yaitu akan terjadinya pergeseran fungsi lahan di kawasan sekitar *cluster* pendidikan. Keberadaan *cluster* pendidikan akan menciptakan *multiplier effect* terhadap sector jasa dan perdagangan (misalnya kosan, *photocopy*, *laundry*, dan tempat makan). Dengan demikian, guna lahan permukiman diprediksi rentan terhadap alih fungsi lahan. Sebagai antisipasi maka pengembangan tematik *cluster* pendidikan juga perlu didukung oleh perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### 4. Tematik Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 berada pada kisaran angka 8,00%. Meskipun angka ini relative masih lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat, akan tetapi mengingat isu kemiskinan merupakan persoalan krusial yang dapat berdampak pada timbulnya isu-isu lainnya seperti misalnya isu kesehatan, pendidikan, serta isu keamanan dan ketertiban wilayah, maka pemerintah Kabupaten Bandung memandang penting penanggulangan kemiskinan. Peran fungsi setiap perangkat daerah dalam pembangunan tematik kemiskinan dijabarkan pada Gambar 6.9.



**GAMBAR 6.8.**  
**KONSEP TEMATIK KEMISKINAN**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Salah satu inovasi yang diusung bagi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bandung yaitu melalui pengembangan rasta (beras sejahtera). Disamping itu penanggulangan kemiskinan juga akan

diarahkan melalui penekanan tingkat pengangguran yang terintegrasi dengan pengembangan investasi di sektor UKM yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan

kemiskinan ini akan bersifat lintas sektor. Disamping Dinas Sosial sebagai *leading sector* penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung akan bersifat lintas perangkat daerah dengan turut melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas pertanian, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Tematik Bandung Sehat

Kegiatan Bandung Sehat dianggap menjadi inovasi bagi pengembangan Kabupaten Bandung. Penetapan sembilan tatanan Bandung Sehat akan membantu perkuatan seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Bandung, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur serta sektor keamanan dan ketertiban wilayah. Kesembilan tatanan dalam perwujudan Bandung Sehat adalah:

- Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum
- Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi
- Kawasan pertambangan sehat
- Kawasan hutan sehat
- Kawasan industri perkantoran sehat
- Kawasan pariwisata sehat
- Kawasan pangan dan gizi
- Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri
- Kehidupan sosial yang sehat

Berdasarkan sembilan tatanan tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan konsep tematik Bandung Sehat melibatkan konsep tematik Bandung Sehat melibatkan berbagai macam sektor. Keterlibatan sektor-sektor diwujudkan oleh peranan Perangkat Daerah dalam pengembangan Bandung Sehat. Perangkat Daerah yang terlibat dalam tematik ini dapat dilihat pada Gambar 6.10.



**GAMBAR 6.9.**  
**KONSEP TEMATIK KESEHATAN**  
 Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

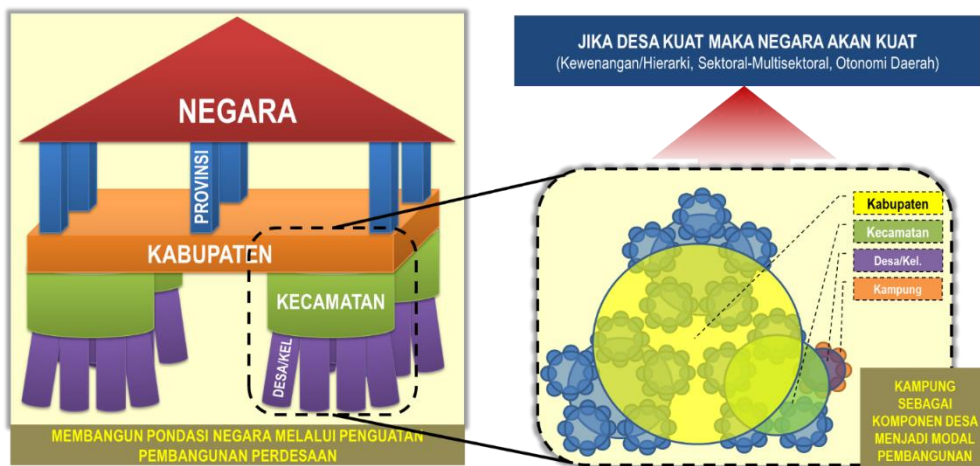


Perwujudan Bandung 1000 Kampung berperan pula dalam proses mencapai salah satu kunci dalam visi Kabupaten Bandung yaitu sinergi pembangunan perdesaan. Program 1000 Kampung yang fokus pada pembangunan kawasan perdesaan dianggap sesuai untuk diterapkan ke dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung karena sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh kawasan perdesaan. Dengan adanya 1000 Kampung ini maka integrasi perencanaan dan pembangunan, baik dalam hal sektoral maupun kewilayahan, dapat terakomodasi.

Pembangunan suatu wilayah akan lebih mudah dan lebih terarah apabila terjadi sinergi antara pembangunan wilayah itu sendiri dengan wilayah yang lingkungannya lebih kecil, dalam hal ini Kabupaten Bandung dengan desa/kampung, serta sinergi antar desa. Begitu pula dalam lingkup desa yang didalamnya terdapat kampung-kampung yang memiliki potensi yang berbeda-beda yang

dapat dikembangkan. Pengembangan pusat kegiatan baru yang disebut kampung ini selain bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Perekonomian yang umumnya terjadi biasanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada di kawasan perkotaan. Dengan adanya fenomena ini maka pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi di sekitar pusat kegiatan tersebut, sementara kawasan lainnya, termasuk di dalamnya kawasan perdesaan, kurang terdampak. Hal ini memungkinkan adanya ketimpangan antar kawasan yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya kawasan ibukota kabupaten dan wilayah pinggiran kabupaten. Maka dari itu dibuat suatu perencanaan yang memungkinkan kawasan perdesaan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan daya tarik ekonomi wilayahnya tanpa menghilangkan karakteristik yang sudah ada.



**GAMBAR 6.10.**  
**KONSEP PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Desa-desa yang secara ekonomi sudah mandiri dan sudah dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya

akan menjadi pusat-pusat baru yang dapat menjadi akselerator perekonomian dan secara tidak langsung akan memberikan kontribusi

positif terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Bandung. Dengan lima tematik yang menjadi wadah intervensi multisektoral akan terbentuk kondisi-kondisi tertentu yang spesifik sesuai dengan tema terkait. Dampak

jangka panjang yang dapat dihasilkan dari pembangunan yang bermula dari kawasan perdesaan ini nantinya juga akan berkontribusi pada pembangunan di tingkatan yang lebih luas, yaitu provinsi dan nasional.



**GAMBAR 6.11.**

**KONSEP MEMBANGUN DARI DESA**

*Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017*

### 6.2.1. Integrasi dan Sinergitas Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, disusun juga strategi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan serta skema pendanaan alternatif dengan berbasis kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk memungkinkan seluruh tujuan dan sasaran pembangunan dapat terwujud.

#### A. Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Perencanaan berbasis kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang akan memetakan langsung lokasi pembangunan secara spesifik. Dengan demikian, implementasi pembangunan diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Beberapa perencanaan berbasis kewilayahan yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bandung antara lain adalah pembangunan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB) dan pembangunan Kota Baru Tegalluar (KBT).

##### a. Pembangunan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB)

Pengembangan kawasan KSTB dilatarbelakangi oleh adanya potensi internal wilayah serta kemungkinan perkembangannya yang diprediksi akan semakin pesat terkait kedudukan strategisnya di lingkup regional Provinsi Jawa Barat dan nasional. Ditinjau dari potensi internal, pada kondisi eksisting kawasan KSTB merupakan kawasan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, secara tidak langsung kawasan ini menjadi *landmark* serta mewakili wajah Kabupaten Bandung ketika dilihat dari kaca mata eksternal. Selain itu, sebagai pusat pemerintahan, kawasan ini





memegang peranan penting sebagai pusat pelaksanaan pengembangan dan pengendalian Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Sebagaimana umumnya pusat-pusat pemerintahan wilayah administratif lain di Indonesia, kawasan KSTB juga menjelma menjadi pusat komersial dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terlebih lagi dengan adanya potensi dalam sektor industri, jasa, pertanian, perdagangan, dan UKM.

Dengan luas kawasan kurang lebih sekitar 2.523 Ha, kawasan KSTB meliputi empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang dan Margaasih (Ang-Kut-Ka-Sih). Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan ini, selain dipengaruhi oleh kualitas sumber daya masyarakat lokal, serta ketersediaan sumber daya alam, juga turut dipengaruhi oleh faktor geografis. Kawasan KSTB memiliki posisi strategis dengan jarak 5-10 Km dari Kota Bandung, yang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Selain dari pada itu, kawasan ini juga dilalui jaringan kolektor primer yang menjadi penghubung dalam jalur pergerakan arah utara-selatan di Provinsi Jawa Barat.

Ditinjau dari konteks regional Provinsi Jawa Barat dan nasional, KSTB merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang dalam RTRW Nasional Tahun 2008-2028 ditetapkan sebagai kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan dan dipandang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dalam lingkup regional provinsi dan nasional. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Cekungan Bandung, pertumbuhan di kawasan KSTB akan berdampak pada perkembangan Kawasan Cekungan Bandung. Pertumbuhan KSTB kedepan diprediksi akan semakin meningkat dengan dibangunnya Jl. Tol Soroja (Soreang – Pasir Koja) yang meningkatkan aksesibilitas terhadap Kota Bandung, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Tol Soroja akan membangkitkan pergerakan barang dan jasa dari dan menuju kawasan KSTB dan kawasan lainnya di Kabupaten Bandung. Kawasan KSTB akan menjadi gerbang dari dan menuju Kabupaten Bandung sekaligus menjadi hub pergerakan barang dan jasa. Seiring meningkatnya pergerakan, sebagai implikasinya diprediksi akan terjadi peningkatan aktivitas komersial, jasa dan permukiman disekitar koridor jalan tol. Terlebih lagi dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sejak tahun 2016. Kemudahan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bandung akan menjadi magnet bagi pertumbuhan kegiatan di Kabupaten.

Didasari oleh adanya prediksi- prediksi perkembangan kedepan, maka kemungkinan perkembangan ini perlu didukung oleh ketersediaan sarana prasarana, seperti sarana prasarana transportasi, permukiman, air bersih dan air limbah, drainase, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta sarana jasa dan komersial lainnya. Untuk menjamin terwujudnya rencana, maka rencana pengembangan KSTB perlu dipayungi suatu regulasi, salah satunya yaitu dengan mengakomodir rencana pengembangan dalam rencana pengembangan kawasan, baik itu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun rencana tapak dengan skala yang lebih besar. Melalui perencanaan pengembangan kawasan, selain akan menjamin terwujudnya rencana juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan isu dan persoalan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah. Beberapa isu tersebut antara lain terjadinya pembangunan kawasan perkotaan yang tidak terarah (urban sprawl), kemacetan lalu lintas terutama sekitar gerbang Tol Soroja, pertumbuhan permukiman kumuh dan liar (slump and squatter), termarginalisasinya masyarakat lokal oleh pendatang yang memiliki kemampuan skill yang lebih baik, serta isu terjadinya degradasi lingkungan sebagai trade off antara sektor ekonomi dan lingkungan.

Pengembangan KSTB didasarkan pada dua konsep, yaitu konsep pembangunan kawasan terpadu (*compact city*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep *compact city* dalam hal ini merujuk pada pembangunan kawasan yang menerapkan penggunaan lahan





campuran (*mixed land use*), yang menggabungkan fungsi permukiman, komersial, kultural, institutional, perkantoran, industri dan fungsi lainnya secara terintegrasi dalam satu kawasan. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan dapat meningkatkan fungsi kawasan serta dapat menmereduksi waktu perjalanan antar fungsi guna lahan, sehingga lebih jauh lagi penerapan konsep *compact city* akan berdampak pada penghematan energi.

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang pertama kali dicetuskan dalam Brundtland Report diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan mengacu pada konsep ini, pembangunan KSTB akan dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang menggabungkan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian pembangunan Kabupaten Bandung kedepan diharapkan dapat berdayasaing dari segi ekonomi (*economically viable*), mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk (*socially equitable*), serta ramah lingkungan (*environmentally bearable*).

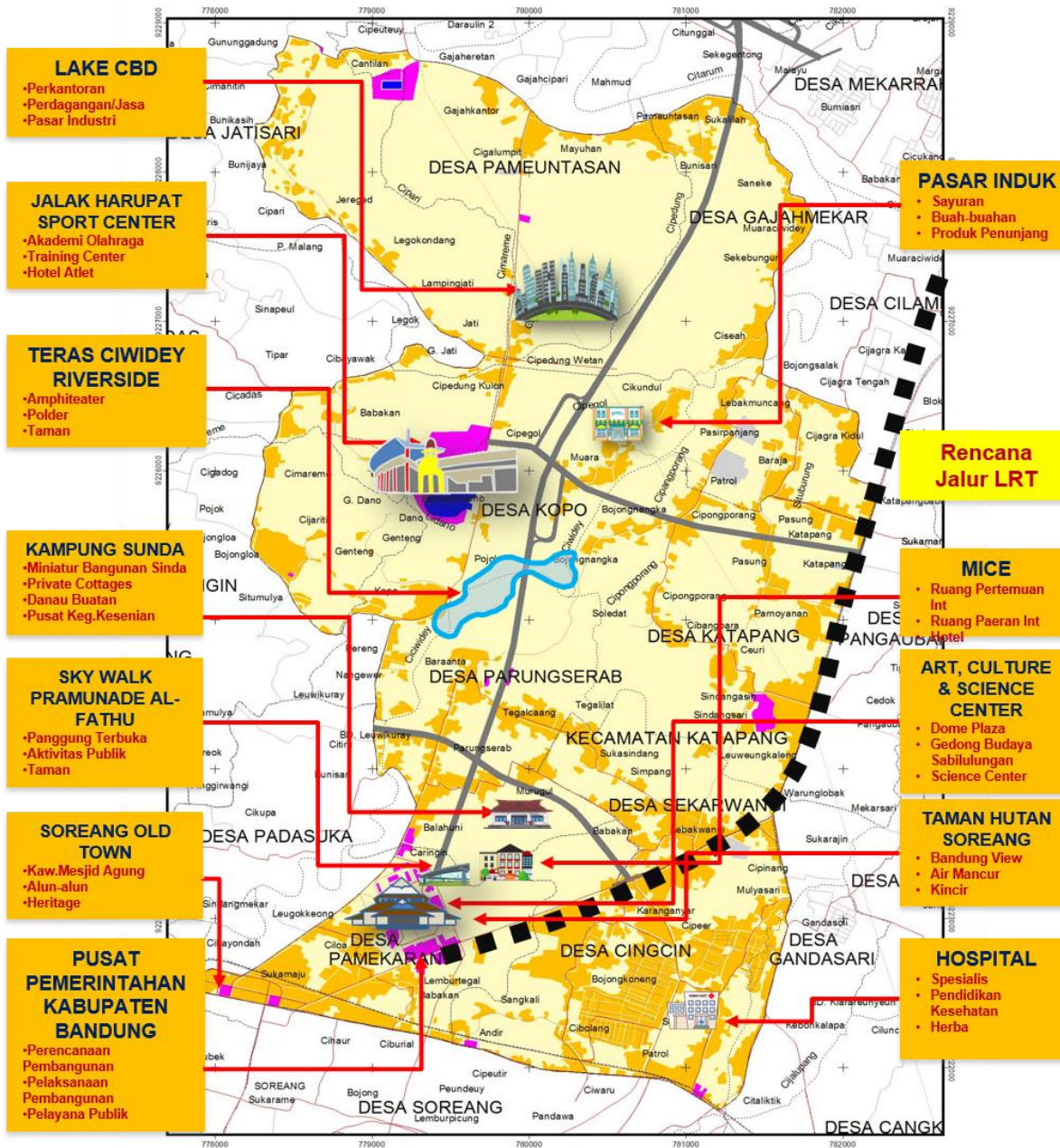
Untuk mendukung pembangunan KSTB, tahun 2018 direncanakan untuk dilaksanakan pembangunan antara lain *Central Business District* (CBD), rumah sakit, universitas dan akademi olahraga serta pusat pelatihan olah raga (*sport training center*), puseur ilmu, seni dan budaya, serta sarana pendukung MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*). Selain dari pada itu pembangunan KSTB akan didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan infrastruktur pengendali banjir (kolam retensi, rumah pompa, amenitas *river front*), infrastruktur pengelolaan air limbah (*waste water treatment plant*), ketersediaan ruang terbuka hijau, serta ketersediaan permukiman vertikal (rusunawa dan rusunami). Mengacu pada rencana pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2021, fungsi guna lahan di Kawasan KSTB ditampilkan pada Tabel 6.9.

**TABEL 6.9.**  
**RENCANA POLA RUANG KAWASAN KSTB**

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Industri	235,13
2	Perumahan	1.278,17
3	Perairan dan Sempadan	128,35
4	Fasilitas Umum dan Sosial, Pemerintahan dan Hankam	260,57
5	Perdagangan dan Perkantoran	561,74
6	Taman dan RTH	0,82
7	Kawasan Pertanian dan Tanaman Tahunan	58,22
	<b>TOTAL</b>	<b>2.523,00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung

Adapun beberapa rencana pembangunan yang akan dikembangkan di kawasan KSTB antara lain ditampilkan pada peta rencana sebagai berikut.



**GAMBAR 6.12.**  
**ILUSTRASI RENCANA PENGEMBANGAN KOTA SOREANG**  
**TERPADU BERKELANJUTAN (KSTB)**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Pengembangan KSTB akan dilakukan melalui beberapa strategi pengembangan, antara lain:

1. Mengembangkan regulasi pengelolaan KSTB. Melalui regulasi ini, diharapkan dapat meminimalisir spekulasi lahan terkait pertumbuhan kawasan ini. Adapun bentuk alternatif regulasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan KSTB antara lain melalui penetapan *land freezing* (pembekuan lahan pasca penetapan kebijakan pembangunan).
2. Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan KSTB. Strategi ini ditetapkan sebagai antisipasi terjadinya urban sprawl dan isu perkotaan lainnya. Perencanaan Kawasan antara lain dapat disusun dalam bentuk RDTR yang didetailkan dalam Rencana Tapak.
3. Mengoptimalkan sumber pendanaan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bentuk *Public Private Partnership* (PPP).

b. Pembangunan Kota Baru Tegalluar (KBT)

Mengacu pada RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, Kawasan Kota Baru Tegalluar ditetapkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi. Penetapan ini didasari oleh potensi ekonomi kawasan yang akan berpengaruh secara regional terhadap ekonomi Kabupaten Bandung khususnya Kabupaten Bandung bagian timur seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur strategis di kawasan tersebut. Beberapa infrastruktur yang akan dibangun antara lain Kereta Api Cepat Indonesia China, jalur LRT (*Light Rapid Transit*), Tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya, Tol Cileunyi – Tasik. Selain akan menjadi hub pergerakan dalam internal Kabupaten Bandung, Kota Baru Tegalluar juga akan menjadi hub bagi

pergerakan dari dan menuju Jakarta dan priangan timur.

Dalam jangka panjang, Kota Baru Tegalluar akan dibangun sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman skala besar, perdagangan dan jasa, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan rekreasi. Adapun untuk tahun 2018, pembangunan di kawasan Kota Baru Tegalluar antara lain: 1) Pengembangan kawasan permukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan wisata, 2). Pengembangan IPAL kawasan, 3). Pengembangan dan peningkatan teknologi pengolahan limbah terpadu kawasan industri, 4). Peningkatan kapasitas sistem drainase, 5). Pengendalian penanganan banjir dan genangan, 6). Penyusunan RTR, 7). Pembangunan Tol Tegalluar yang menghubungkan Ujungberung – Gedebage – Majalaya, 8). Pembangunan stasiun dan depo bagian dari pengembangan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung.

Ilustrasi rencana pengembangan Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar ditampilkan pada Gambar 6.13. sebagai berikut.



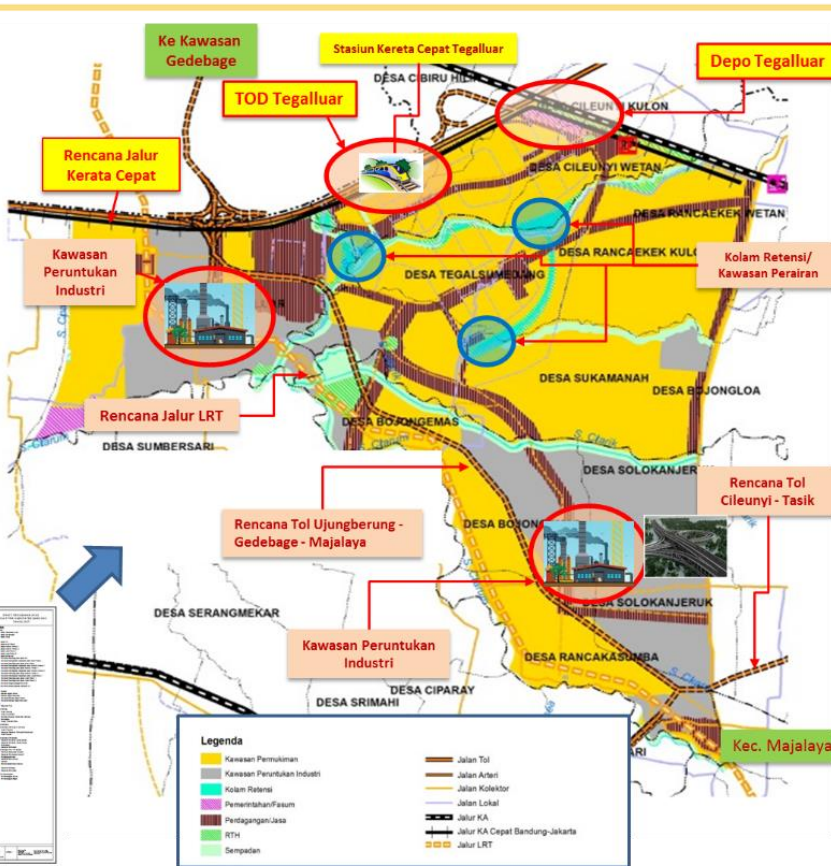
**Rencana Pengembangan KAWASAN TERPADU PERMUKIMAN TEGALLUAR**

**KTPT**

Luas KTPT ± 3.500 Ha ( Bojongsoang, Solokan Jeruk, Rancaekek, Cileunyi). Ketinggian rata-rata 650 mdpl (kemiringan < 5%).

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)
1	Industri Besar	838,11
2	Perumahan	1.850,30
3	Kolam Retensi, Perairan dan Sempadan	239,98
4	Facilitas Umum dan Sosial	37,12
5	Perdagangan dan Perkantoran	517,28
6	Taman dan RTH	87,97
<b>Jumlah</b>		<b>3.570,76</b>

Penyesuaian Rencana Tata Ruang dalam Perda Revisi RTRW No.27 Tahun 2016 untuk kebutuhan Jalur, TOD (Transit Oriented Development) dan Depo Kereta Cepat



**GAMBAR 6.13.**  
**ILUSTRASI RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU PERMUKIMAN TEGALLUAR (KTPT)**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

**B. Skema Pendanaan Alternatif**

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tidak

terlepas dari perencanaan penganggaran yang akan membiayai pelaksanaannya. Dalam menyusun perencanaan penganggaran



pembangunan, sumber dana yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah (APBD) tetapi dapat juga berasal dari sumber pembiayaan non APBD. Sumber-sumber pembiayaan non APBD terbagi menjadi dua jenis, yakni pinjaman daerah dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBUs).

Pembagian penggunaan sumber pembiayaan yang akan digunakan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kelayakan secara ekonomi dan finansial, baik bagi pemerintah sebagai pelaksana program dan kegiatan, maupun bagi pihak pemberi pinjaman dan pihak badan usaha. Apabila pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian dan kondisi finansial di masa yang akan datang, maka besar peluang program dan kegiatan tersebut untuk dapat diterima dalam skema pembiayaan KPBUs. Selain dampak ekonomi dan finansial yang positif, perkiraan kebutuhan anggaran yang tinggi juga dapat menjadi salah satu

pertimbangan dalam pemilihan skema pembiayaan suatu program atau kegiatan.

Beberapa keunggulan dalam penggunaan skema pembiayaan KPBUs antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Efisien dan efektif** dalam upaya penyediaan jasa/layanan public dalam jangka panjang
2. **Alokasi resiko** kepada pihak-pihak yang kompeten (Pemerintah: resiko politik dan perubahan kebijakan, Badan Usaha: resiko konstruksi, pasar, dan operasi)
3. **Transparansi** untuk mengurangi intervensi politik
4. **Kepastian pengembalian investasi**
5. **Value for money**, adanya kontrak yang mengikat antara pembelanjaan pemerintah dengan layanan yang akan diberikan oleh pihak swasta

Berikut beberapa program dan kegiatan Kabupaten Bandung yang diajukan untuk dibiayai melalui skema pembiayaan pinjaman daerah dan KPBUs.

**TABEL 6.10.**  
**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DIBIYAI MELALUI MEKANISME PINJAMAN DAERAH SERTA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Anggaran
<b>Bidang Fisik</b>			
1	Pengembangan Kawasan Komersial (industri, jasa/perdagangan serta perumahan) serta Pembangunan dan Pengelolaan Air Baku (Danau) di Kawasan Tegalluar	Tegalluar	7.551.235.000.000
2	Pengembangan Kawasan Komersial (industri, jasa/perdagangan serta perumahan) Perkotaan Soreang - Kutawaringin	Soreang , Kutawaringin	7.000.000.000.000
3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Majalaya, Rancaekek dan Katapang	Majalaya, Rancaekek, Katapang	300.000.000.000
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Bandung Selatan	Ibun, Paseh,...	546.828.000.000
5	Revitalisasi TPA Babakan & TPS (Waste To Energi System)	TPA Babakan,Ciparay, dan tersebar di	150.285.000.000



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Anggaran
		Kabupaten Bandung	
6	Penataan Bangunan Lingkungan Permukiman (Kumuh)		50.000.000.000
7	Tower Skywalk Al Fathu	Soreang	75.000.000.000
8	Pengembangan Sistem Transportasi Massal dan Terminal di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1.500.000.000.000
9	Rest Area dan Gedung Parkir Gerbang Tol Soreang – Pasirkoja (Soroja)	Soreang	100.000.000.000
10	Pembangunan Jalan Tol Gedebage- Majalaya – (Banjar)	Bojongsoang, Solokanjeruk, Majalaya	1.100.000.000.000
11	Pembangunan Jalan & Kawasan TOD Lingkar Katapang-Baleendah-Majalaya (South Outer Ringroad of Metro Bandung)	Katapang, Baleendah, majalaya	5.000.000.000.000
12	Pembangunan Jalan Lingkar Banjaran	Banjaran	47.000.000.000
13	Pembangunan Jalan Lingkar Cileunyi-Rancaekek	Cileunyi	250.000.000.000
14	Pembangunan Rest Area Jalan Ibum-Monteng (Kamojang)	Ibum	50.000.000.000
15	Pembangunan Terminal Type A Cileunyi	Cileunyi	500.000.000.000
16	Pembangunan Terminal Type B Soreang	Soreang	250.000.000.000
17	Pembangunan Terminal Type B Banjaran	Banjaran	250.000.000.000
18	Teras Ciwidey Riverside	Kutawaringin	100.000.000.000
19	Taman Hutan Art, Culture, & Science Centre	Soreang	100.000.000.000
20	Rusunami	Perbatasan Kab/Kota	500.000.000.000
21	Kolam Retensi	Soreang, Tegalluar	300.000.000.000
22	Lake CBD	Kutawaringin	300.000.000.000
23	Pembangunan Jalan Lingkar Majalaya terintegrasi dengan Danau Retensi	Majalaya	300.000.000.000
24	BRT dan Park n Ride	Soreang, Tegalluar	300.000.000.000
25	Pembangunan Common Ducting	Perkotaan Kabupaten Bandung	200.000.000.000
26	Sewerage Perkotaan	Perkotaan Kabupaten Bandung	100.000.000.000
27	Long Storage Sungai Ciwidey	Kutawaringin	300.000.000.000
28	Pembangunan Jalan Akses Menuju Kawasan Kampus UN PAD di Arjasari	Baleendah Arjasari	200.000.000.000
29	Revitalisasi Kampung Citarum (Citarum Residence)	Baleendah	1.000.000.000.000
		<b>TOTAL FISIK</b>	<b>28.420.348.000.000</b>
<b>Bidang Ekonomi</b>			
1	Pembangunan Pasar Terpadu Soreang	Soreang	55.000.000.000



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Anggaran
2	Pembangunan Pasar Terpadu Banjaran	Banjaran	60.000.000.000
3	Pembangunan Pasar Terpadu Baleendah	Baleendah	50.000.000.000
4	Pasar Burung / Unggas	Soreang	60.000.000.000
5	Pasar Industri Katapang	Katapang	60.000.000.000
6	Pasar Induk Agro Kutawaringin	Kutawaringin	75.000.000.000
7	MICE Soreang	Soreang	300.000.000.000
8	Kampung Sunda	Soreang, Ibun	300.000.000.000
9	Pasar Ikan (Fish Market)	Soreang	100.000.000.000
		<b>TOTAL EKONOMI</b>	<b>1.060.000.000.000</b>
<b>Bidang Sosial</b>			
1	Relokasi RSUD Soreang	Soreang	300.000.000.000
2	Pembangunan Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Kabupaten Bandung	Baleendah	70.000.000.000
3	Sarana Olah Raga Si Jalak Harupat (Jalak Harupat Sport Centre)	Kutawaringin	300.000.000.000
4	Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan PNS	Kutawaringin	100.000.000.000
		<b>TOTAL SOSIAL</b>	<b>770.000.000.000</b>
	<b>Total Rencana Bidang Fisik + Ekonomi + Sosial</b>		<b>30.250.348.000.000</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawabnya. Sebagai bentuk mewujudkan perencanaan yang implementatif, sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Baik strategi maupun arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai

tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah dilakukan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perumusan program-program pembangunan daerah juga dibuat berdasarkan Janji Bupati yang diberikan pada masa kampanye. Dalam periode menjabat selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati Kabupaten Bandung menetapkan beberapa program pembangunan daerah, yakni:

1. Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
2. Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal



3. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan derajat kesehatan penduduk
5. Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
6. Program jaminan sosial masyarakat
7. Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
8. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan
9. Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik
10. Program pengembangan perdagangan dan jasa yang kompetitif
11. Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif
12. Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah
13. Program peningkatan efektivitas investasi
14. Program pemantapan kemandirian pangan
15. Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi
16. Program optimalisasi jaringan irigasi
17. Program peningkatan kualitas kawasan permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)
18. Program pengendalian pemanfaatan ruang
19. Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana
20. Program penanggulangan banjir
21. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)
22. Program konservasi sumber daya alam
23. Program peningkatan profesionalisme birokrasi
24. Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
25. Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah

Program yang sudah dibuat ini selanjutnya akan diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik targetnya berikut lokasinya, untuk mencapai indikator sasaran yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Program-program pembangunan daerah di atas memiliki definisi tersendiri sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pelaksanaannya. Untuk memperjelas bagaimana keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan program pemerintah daerah dengan nomenklatur sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah, berikut definisi program pembangunan daerah berdasarkan Permendagri beserta Perangkat Daerah penanggung jawab dalam Tabel 6.11.

**TABEL 6.11.**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
1	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Program pendidikan anak usia dini	Disdik
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Disdik
	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	Program pendidikan non formal	Disdik
		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Disdik





Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program manajemen pelayanan pendidikan	Disdik
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Disdik, Dispusip
		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Dispora
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dispora
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Dispora
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Dispora
		Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Dispora
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Dispora
		Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Dispora
		Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dispusip
	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	Dinkes, RSUD
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinkes, RSUD
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Dinkes, RSUD
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	Dinkes
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinkes
	Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Program obat dan perbekalan kesehatan	Dinkes
		Program pengawasan obat dan makanan	Dinkes
		Program perbaikan gizi masyarakat	Dinkes
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinkes
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinkes
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinkes
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinkes
		Program pengembangan lingkungan sehat	Dinkes
		Program keluarga berencana	DP2KBP3A
		Program kesehatan reproduksi remaja	DP2KBP3A
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	DP2KBP3A
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk HIV/AIDS	DP2KBP3A
		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	DP2KBP3A
		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	DP2KBP3A
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	DP2KBP3A



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
	Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	DP2KBP3A
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	DP2KBP3A
	Program jaminan sosial masyarakat	Program bantuan bidang pendidikan	Disdik
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Dinkes, RSUD
	Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker
		Program peningkatan kesempatan kerja	Disnaker
		Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Disnaker
		Program transmigrasi regional	Disnaker
		Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinsos
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinsos
		Program pembinaan anak terlantar	Dinsos
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Dinsos
		Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Dinsos
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinsos
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Dinsos
		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		DPMD
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		DPMD
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		DPMD
	2	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan kualitas produk unggulan pertanian			Distan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distan		
Program pemberdayaan penyuluh pertanian	Distan		
Program peningkatan kesejahteraan petani	Distan		
Program pengembangan pengembangan dan jasa yang kompetitif	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Disdagin	
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Disdagin	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Disdagin	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Disdagin	
Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	DiskopUKM	
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DiskopUKM	



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	DiskopUKM
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	DiskopUKM
		Program peningkatan produktivitas koperasi	DiskopUKM
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Disdagin
		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Disdagin
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Disdagin
	Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Disparbud
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Disparbud
		Program pengembangan kemitraan	Disparbud
		Program pengembangan nilai budaya	Disparbud
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Disparbud
		Program pengelolaan keragaman budaya	Disparbud
	Program peningkatan efektivitas investasi	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Disparbud
		Program peningkatan kapasitas pelayanan perizinan	DPMPSTP
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	DPMPSTP
		Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	DPMPSTP
	Program pemantapan kemandirian pangan	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	DPMPSTP
		Program ketahanan pangan	Dispangan
		Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Distan, Dispangan
		Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Dispangan
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dispangan
		Program peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat	Dispangan
		Program pengembangan konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan	Dispangan
		Program penguatan ekonomi masyarakat (DBHCHT)	Dispangan
		Program pengembangan budidaya perikanan	Dispangan
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Distan
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distan
		Program peningkatan produksi tanaman pangan	Distan
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Distan
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Distan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Distan		
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Distan		
Program penjaminan produk asal hewan/ternak	Distan		
3	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Program pembangunan jalan dan jembatan	DPUPR
		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	DPUPR
		Program pembangunan turap/talud/bronjong	DPUPR
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	DPUPR
		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	DPUPR
		Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	DPUPR



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	DPUPR
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	DPUPR
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DPUPR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	DPUPR
		Program pembinaan jasa konstruksi	DPUPR
		Program pengembangan data/informasi	DPUPR
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan penumpang	Dishub
		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dishub
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Dishub
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Dishub
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dishub
		Program pembinaan keselamatan transportasi	Dishub
		Program pengembangan layanan angkutan barang	Dishub
	Program optimalisasi jaringan irigasi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DPUPR
	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)	Program lingkungan sehat perumahan	Disperkimtan
		Program pemberdayaan komunitas perumahan	Disperkimtan
		Program pengembangan perumahan	Disperkimtan
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Disperkimtan
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Disperkimtan
		Program pengembangan kawasan permukiman	Disperkimtan
		Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh bidang perumahan permukiman	Disperkimtan
		Program pengembangan data/informasi bidang perumahan permukiman	Disperkimtan
		Program perencanaan pembangunan daerah bidang perumahan permukiman	Disperkimtan
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Disperkimtan
		Program pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Disperkimtan
	Program penataan tapal batas wilayah	Disperkimtan	
Program pengendalian pemanfaatan ruang	Program perencanaan tata ruang	DPUPR	
	Program pemanfaatan ruang	DPUPR	
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	DPUPR	
	Program pengawasan dan pengendalian bangunan	DPUPR	
Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	BPBD	
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	BPBD	
	Program penanganan darurat kebencanaan	BPBD	



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana	BPBD
		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	BPBD
		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	BPBD
		Program pengembangan data/informasi	BPBD
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD
		Program pengendalian banjir	BPBD
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Diskar
		Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	Diskar
		Program peningkatan kesiagaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Diskar
		Program penanggulangan banjir	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		DPUPR
	Program pengendalian banjir		DPUPR
	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong		DPUPR
	4	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			DLH
Program peningkatan pengendalian polusi			DLH
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			DLH
Program konservasi sumber daya alam		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Disperkimtan, DPUPR
		Program pengelolaan areal pemakaman	Disperkimtan
		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	DLH
5	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Program pelayanan administrasi perkantoran	Seluruh SKPD
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Seluruh SKPD
		Program peningkatan disiplin aparatur	Seluruh SKPD
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Seluruh SKPD
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Seluruh SKPD
		Program unit pelayanan terpadu	Dishub
		Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	BKPPD
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat
		Program perencanaan tata ruang	Bappeda
		Program pengembangan data/informasi	Bappeda
		Program kerjasama pembangunan	Bappeda
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Bappeda



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
		Program perencanaan sosial dan budaya	Bappeda
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bappeda
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKPPD
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	BKPPD, Setda
		Program peningkatan kehidupan beragama	Setda
		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Setda, Diskominfo
		Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Setda, Diskominfo
		Program kerjasama informasi dengan media massa	Setda, Diskominfo
		Program perencanaan pembangunan daerah	Setda
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Setda
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda, Diskominfo
		Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Setda, Setwan
		Program penataan peraturan perundang-undangan	Setda, Setwan
		Program penataan daerah otonomi baru	Setda
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Setwan
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Diskominfo
		Program persandian untuk pengamanan informasi	Diskominfo
		Program penataan administrasi kependudukan	Disdukcapil
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Dispusip
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dispusip
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Dispusip
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Dispusip
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dispusip
		Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Program pendidikan anak usia dini	Kecamatan
		Program pendidikan menengah	Kecamatan
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kecamatan
		Program pendidikan non formal	Kecamatan
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Kecamatan
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kecamatan
		Program pengembangan lingkungan sehat	Kecamatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kecamatan
		Program upaya kesehatan masyarakat	Kecamatan
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kecamatan



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kecamatan
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kecamatan
		Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Kecamatan
		Program lingkungan sehat perumahan	Kecamatan
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan
		Program perencanaan pembangunan daerah	Kecamatan
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Kecamatan
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kecamatan
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kecamatan
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kecamatan
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kecamatan
		Program penataan administrasi kependudukan	Kecamatan
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kecamatan
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Kecamatan
		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Kecamatan
		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Kecamatan
		Program peningkatan kesempatan kerja	Kecamatan
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kecamatan
		Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	Kecamatan
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Kecamatan
		Program pengembangan nilai budaya	Kecamatan
		Program pengelolaan keragaman budaya	Kecamatan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kecamatan
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Kecamatan
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kecamatan
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kecamatan
		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Kecamatan
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kecamatan
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kecamatan
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kecamatan
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan



Misi	Program Pembangunan Daerah	Program PD (berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006)	PD Penanggung Jawab
		Program ketahanan pangan	Kecamatan
		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kecamatan
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kecamatan
		Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kecamatan
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kecamatan
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kecamatan
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Kecamatan
	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	BKD
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	BKD
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BKD
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah	BKD
	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Bakesbangpol
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Bakesbangpol
		Program pendidikan politik masyarakat	Bakesbangpol
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Satpol PP
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Satpol PP
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Satpol PP

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Program-program yang disebutkan di atas merupakan terjemahan dari program pembangunan daerah yang juga merupakan turunan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk mengetahui keterkaitan antara visi sampai dengan program pembangunan, serta untuk menilai bagaimana ketercapaian dari masing-masing program dalam kaitannya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, berikut program pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang disertai pagu indikatif tertera dalam Tabel 6.12.





**TABEL 6.12.**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN BANDUNG**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
<b>Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>																		
1		Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks pembangunan manusia	70,69	71,02	741.399.702.041	71,35	1.262.805.242.277	71,84	630.490.875.416	72,32	620.893.191.891	72,8	662.789.161.532	72,8	662.789.161.532		
1	1	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks pendidikan	62,83	62,89	149.305.420.281	63,45	511.606.052.393	64,3	71.849.542.007	65,15	55.635.411.459	65,99	60.131.876.031	65,99	60.131.876.031	Disdik	
1	1	1	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks pendidikan	62,83	62,89	149.305.420.281	63,45	511.606.052.393	64,3	71.849.542.007	65,15	55.635.411.459	65,99	60.131.876.031	65,99	60.131.876.031	Disdik
1	2		Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,46	8,47		8,5		8,53		8,56		8,6		8,6	Disdik, Dispusip, Dispora	
				Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	96,81	96,88		96,92		96,97		96,99		97,05		97,05	Disdik	
				Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	96,3	96,45	51.276.645.014	96,6	92.559.331.670	96,78	40.580.111.022	96,8	56.557.064.115	97	61.096.978.151	97	61.096.978.151	Disdik
				Persentase pemustaka	7,86	8,25		8,33		8,41		8,5		8,58		8,58	Disdik, Dispusip	
				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	383	154		375		163		410		175		175	Dispora	
1	2	1	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,46	8,47		8,5		8,53		8,56		8,6		8,6	Disdik, Dispusip, Dispora	
				Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	96,81	96,88		96,92		96,97		96,99		97,05		97,05	Disdik	
				Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	96,3	96,45	51.276.645.014	96,6	92.559.331.670	96,78	40.580.111.022	96,8	56.557.064.115	97	61.096.978.151	97	61.096.978.151	Disdik
				Persentase pemustaka	7,86	8,25		8,33		8,41		8,5		8,58		8,58	Disdik, Dispusip	
				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	383	154		375		163		410		175		175	Dispora	
1	3		Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	76,09	76,75	483.090.125.138	76,83	597.959.667.263	76,92	497.320.709.492	77,19	490.645.155.104	77,35	520.853.494.519	77,35	520.853.494.519	Dinkes
				Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	N/A	48,39		50,15		69,23		92,31		100		100	Dinkes, RSUD	
1	3	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	76,09	76,75	483.090.125.138	76,83	597.959.667.263	76,92	497.320.709.492	77,19	490.645.155.104	77,35	520.853.494.519	77,35	520.853.494.519	Dinkes



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	N/A	48,39		50,15		69,23		92,31		100		100		Dinkes, RSUD
1 4	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Indeks kesehatan	81,69	81,74	55.562.911.608	81,78	58.110.182.255	81,83	19.569.679.287	81,87	16.922.632.436	81,91	19.491.135.824	81,91	19.491.135.824	DP2KBP3A
1 4 1	Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Indeks kesehatan	81,69	81,74	55.562.911.608	81,78	58.110.182.255	81,83	19.569.679.287	81,87	16.922.632.436	81,91	19.491.135.824	81,91	19.491.135.824	DP2KBP3A
1 5	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	68	2.164.600.000	68	2.570.008.696	75	1.170.833.608	80	1.132.928.777	85	1.215.677.006	85	1.215.677.006	DP2KBP3A
1 5 1	Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	68	2.164.600.000	68	2.570.008.696	75	1.170.833.608	80	1.132.928.777	85	1.215.677.006	85	1.215.677.006	DP2KBP3A
2	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Tingkat kemiskinan	7,61	7,36	114.777.517.091	7,13	122.095.804.082	6,9	106.707.099.000	6,68	103.092.987.566	6,41	108.439.967.654	6,41	108.439.967.654	
2 1	Meningkatnya perlindungan jaminan sosial masyarakat	Indeks pengeluaran	68,82	69,69	44.185.098.916	70	48.124.852.600	70,46	52.345.123.000	70,92	57.619.634.260	71,36	59.075.854.649	71,36	59.075.854.649	Dinkes, RSUD
2 1 1	Program jaminan sosial masyarakat	Indeks pengeluaran	68,82	69,69	44.185.098.916	70	48.124.852.600	70,46	52.345.123.000	70,92	57.619.634.260	71,36	59.075.854.649	71,36	59.075.854.649	Dinkes, RSUD
2 2	Menurunkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,73	70.592.418.175	3,6	73.970.951.482	3,5	54.361.976.000	3,4	45.473.353.306	3,3	49.364.113.005	3,3	49.364.113.005	Disnaker
		Indeks kedalaman kemiskinan	1	1,12		1,01		0,97		0,87		0,8		0,8	Dinsos	
2 2 1	Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,73	70.592.418.175	3,6	73.970.951.482	3,5	54.361.976.000	3,4	45.473.353.306	3,3	49.364.113.005	3,3	49.364.113.005	Disnaker
		Indeks kedalaman kemiskinan	1	1,12		1,01		0,97		0,87		0,8		0,8	Dinsos	
3	Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Persentase desa mandiri	N/A	0,37	9.511.538.121	4	6.982.554.200	8	5.805.887.326	12	6.949.062.897	16	6.393.927.586	16	6.393.927.586	
3 1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Persentase desa mandiri	N/A	0,37	9.511.538.121	4	6.982.554.200	8	5.805.887.326	12	6.949.062.897	16	6.393.927.586	16	6.393.927.586	Disperkintan, BPBD, DPMD
3 1 1	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Persentase desa mandiri	N/A	0,37	9.511.538.121	4	6.982.554.200	8	5.805.887.326	12	6.949.062.897	16	6.393.927.586	16	6.393.927.586	Disperkintan, BPBD, DPMD
<b>Misi 2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing</b>																
4	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Laju pertumbuhan ekonomi	6,33	6,17	38.887.446.415	6,175	71.356.415.169	6,18	55.009.827.818	6,185	65.965.601.464	6,19	70.188.971.829	6,19	70.188.971.829	
4 1	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase pertumbuhan sektor pertanian,	4,24	4,25	1.799.918.235	4,26	5.893.345.000	4,27	5.320.998.730	4,28	6.711.600.000	4,28	7.201.810.000	4,28	7.201.810.000	Distan



Revisi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
		kehutanan, dan perikanan dalam PDRB																
		Nilai tukar petani	104,86	105,36		105,86		106,36		106,86		107,36		107,36			Distan, Dispangan	
4	1	1	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	4,24	4,25	1.799.918.235	4,26	5.893.345.000	4,27	5.320.998.730	4,28	6.711.600.000	4,28	7.201.810.000	4,28	7.201.810.000	Distan
		Nilai tukar petani	104,86	105,36		105,86		106,36		106,86		107,36		107,36			Distan, Dispangan	
4	2		Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	5,9	6	5.201.045.226	6,08	6.713.964.168	6,12	11.075.540.484	6,19	11.497.498.656	6,22	11.408.116.518	6,22	11.408.116.518	Disdagin
4	2	1	Program pengembangan perdagangan dan jasa yang kompetitif	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	5,9	6	5.201.045.226	6,08	6.713.964.168	6,12	11.075.540.484	6,19	11.497.498.656	6,22	11.408.116.518	6,22	11.408.116.518	Disdagin
4	3		Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,5	2		3		3,5		4		4,5		4,5	DiskopUKM	
				Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	5,94	6,04	8.945.251.831	6,09	10.852.711.019	6,12	9.360.901.826	6,14	11.650.054.016	6,17	12.818.328.872	6,17	12.818.328.872	Disdagin
4	3	1	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,5	2		3		3,5		4		4,5		4,5	DiskopUKM	
				Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	5,94	6,04	8.945.251.831	6,09	10.852.711.019	6,12	9.360.901.826	6,14	11.650.054.016	6,17	12.818.328.872	6,17	12.818.328.872	Disdagin
4	4		Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Jumlah kunjungan wisata	2.100.000	2.150.000		2.200.000		2.250.000		2.300.000		2.350.000		2.350.000		Disparbud
				Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	6,53	6,65	19.759.716.050	6,75	45.340.364.927	6,85	26.285.000.000	6,95	32.894.393.607	7	35.301.199.956	7	35.301.199.956	Disparbud
				Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	35	45		55		65		75		85		85		Disparbud
4	4	1	Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.100.000	2.150.000		2.200.000		2.250.000		2.300.000		2.350.000		2.350.000		Disparbud
				Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	6,53	6,65	19.759.716.050	6,75	45.340.364.927	6,85	26.285.000.000	6,95	32.894.393.607	7	35.301.199.956	7	35.301.199.956	Disparbud
				Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	35	45		55		65		75		85		85		Disparbud



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
4	5	Meningkatnya kemudahan investasi	Laju pertumbuhan investasi	2,7	2,72	3.181.515.073	2,74	2.556.030.055	2,76	2.967.386.778	2,78	3.212.055.185	2,8	3.459.516.483	2,8	3.459.516.483	DPMTSP	
4	5	1	Program peningkatan efektivitas investasi	Laju pertumbuhan investasi	2,7	2,72	3.181.515.073	2,74	2.556.030.055	2,76	2.967.386.778	2,78	3.212.055.185	2,8	3.459.516.483	2,8	3.459.516.483	DPMTSP
5		Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	49.411.669.908	86	48.403.177.986	89	38.233.445.439	92	30.599.639.930	94	33.017.280.669	94	33.017.280.669		
5	1	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	49.411.669.908	86	48.403.177.986	89	38.233.445.439	92	30.599.639.930	94	33.017.280.669	94	33.017.280.669	Distan, Dispangkan	
			Skor PPH Ketersediaan	81,3	86		88,3		90,6		93		95,3		95,3		Distan, Dispangkan	
5	1	1	Program pematapan kemandirian pangan	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	49.411.669.908	86	48.403.177.986	89	38.233.445.439	92	30.599.639.930	94	33.017.280.669	94	33.017.280.669	Distan, Dispangkan
			Skor PPH Ketersediaan	81,3	86		88,3		90,6		93		95,3		95,3		Distan, Dispangkan	
<b>Misi 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan</b>																		
6		Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Kualitas pelayanan infrastruktur	60,52	60,15	506.532.442.975	61,83	665.472.333.488	70,7	500.220.300.151	71,9	481.713.051.360	73,33	444.335.548.370	73,33	444.335.548.370		
6	1	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas, dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Moda share	1,41	1,45	301.921.859.098	1,57	376.210.086.983	1,84	292.350.371.275	2,16	291.918.536.608	2,16	275.956.702.390	2,16	275.956.702.390	Dishub, DPUPR	
			Level of service (LOS) jalan	D	D		D		C		C		C		C		Dishub, DPUPR	
6	1	1	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Moda share	1,41	1,45	301.921.859.098	1,57	376.210.086.983	1,84	292.350.371.275	2,16	291.918.536.608	2,16	275.956.702.390	2,16	275.956.702.390	Dishub, DPUPR
			Level of service (LOS) jalan	D	D		D		C		C		C		C		Dishub, DPUPR	
6	2	Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	N/A	40	26.908.914.830	45	57.739.221.500	50	28.926.540.404	55	21.355.559.831	60	23.623.320.830	60	23.623.320.830	DPUPR	
6	2	1	Program optimalisasi jaringan irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	N/A	40	26.908.914.830	45	57.739.221.500	50	28.926.540.404	55	21.355.559.831	60	23.623.320.830	60	23.623.320.830	DPUPR
6	3	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Akses aman terhadap air bersih	76,04	77,12		76,64		76,94		77,24		80		80		Disperkimtan	
			Akses aman terhadap sanitasi	70,2	70,51	80.191.238.568	90	115.414.858.731	100	68.500.605.503	100	64.455.600.000	100	31.728.109.345	100	31.728.109.345		Disperkimtan
			Persentase kawasan kumuh	0,72	0,65		0,49		0,35		0,25		0,15		0,15		Disperkimtan	
6	3	1	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)	Akses aman terhadap air bersih	76,04	77,12		76,64		76,94		77,24		80		80		Disperkimtan
			Akses aman terhadap sanitasi	70,2	70,51	80.191.238.568	90	115.414.858.731	100	68.500.605.503	100	64.455.600.000	100	31.728.109.345	100	31.728.109.345		Disperkimtan
			Persentase kawasan kumuh	0,72	0,65		0,49		0,35		0,25		0,15		0,15		Disperkimtan	



Revisi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
6	4	Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang		56	56,5	3.113.000.000	57	2.859.296.000	57,5	3.495.000.000	58	6.427.901.280	58	6.897.390.148	58	6.897.390.148	DPUPR
6	4	1 Program pengendalian pemanfaatan ruang		56	56,5	3.113.000.000	57	2.859.296.000	57,5	3.495.000.000	58	6.427.901.280	58	6.897.390.148	58	6.897.390.148	DPUPR
6	5	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	55,35	60	9.037.007.489	65	15.574.377.539	70	9.042.887.813	75	9.722.453.641	80	10.484.406.907	80	10.484.406.907	Diskar BPBD, Disperkimtan	
6	5	1 Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	55,35	60	9.037.007.489	65	15.574.377.539	70	9.042.887.813	75	9.722.453.641	80	10.484.406.907	80	10.484.406.907	Diskar BPBD, Disperkimtan	
6	6	Meningkatnya penanggulangan banjir	1,3	1,35	85.360.422.990	1,4	97.674.492.735	1,45	97.904.895.156	1,5	87.833.000.000	1,55	95.645.618.750	1,55	95.645.618.750	BPBD, DPUPR, DLH	
6	6	1 Program penanggulangan banjir	1,3	1,35	85.360.422.990	1,4	97.674.492.735	1,45	97.904.895.156	1,5	87.833.000.000	1,55	95.645.618.750	1,55	95.645.618.750	BPBD, DPUPR, DLH	
<b>Misi 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>																	
7		Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim		20	19	48.317.182.726	21	58.783.776.194	22	50.832.694.994	24	44.680.768.645	25	40.139.611.075	25	40.139.611.075	
7	1	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan		20	19	38.233.958.421	21	45.321.335.294	22	42.728.675.461	24	29.057.885.336	25	31.368.132.242	25	31.368.132.242	DLH Dishub DLH
7	1	1 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)		20	19	38.233.958.421	21	45.321.335.294	22	42.728.675.461	24	29.057.885.336	25	31.368.132.242	25	31.368.132.242	DLH Dishub DLH
7	2	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam		38,28	46,55	10.083.224.305	47,01	13.462.440.900	47,48	8.104.019.533	47,95	15.622.883.310	48,43	8.771.478.833	48,43	8.771.478.833	DLH, DPUPR DLH
7	2	1 Program konservasi sumber daya alam		38,283	46,546	10.083.224.305	47,01	13.462.440.900	47,48	8.104.019.533	47,95	15.622.883.310	48,43	8.771.478.833	48,43	8.771.478.833	DLH, DPUPR DLH
<b>Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>																	
8		Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik		N/A	N/A	325.195.823.576	37,09	370.678.529.189	40,23	304.133.587.953	45,18	342.184.875.549	50,01	333.874.479.234	50,01	333.874.479.234	
8	1			54,61	57	309.696.124.827	63	356.761.145.157	68	290.956.433.607	72	327.831.197.717	77	318.688.670.052	77	318.688.670.052	Seluruh SKPD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
		Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan publik	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	N/A	1,2		2		2,5		3		3,2		3,2		Seluruh SKPD	
			Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80,46		80,75		81,12		81,78		82,7		82,7		Seluruh SKPD	
8	1	1	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Nilai SAKIP kabupaten	54,61	57	63		68		72		77		77		Seluruh SKPD	
				Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	N/A	1,2	309.696.124.827	2	356.761.145.157	2,5	290.956.433.607	3	327.831.197.717	3,2	318.688.670.052	3,2	318.688.670.052	Seluruh SKPD
				Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80,46		80,75		81,12		81,78		82,7		82,7		Seluruh SKPD
8	2		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	2	1	15.499.698.749	1	13.917.384.032	1	13.177.154.346	1	14.353.677.832	1	15.185.809.182	1	15.185.809.182	BKD
				Tingkat kemandirian fiskal	N/A	18		18,1		18,2		18,3		18,4		18,4		BKD
8	2	1	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	2	1	15.499.698.749	1	13.917.384.032	1	13.177.154.346	1	14.353.677.832	1	15.185.809.182	1	15.185.809.182	BKD
				Tingkat kemandirian fiskal	N/A	18		18,1		18,2		18,3		18,4		18,4		BKD
9			Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	26.985.815.662	15	36.340.617.335	20	32.253.290.998	25	22.576.718.168	30	24.316.569.551	30	24.316.569.551	
9	1		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	26.985.815.662	15	36.340.617.335	20	32.253.290.998	25	22.576.718.168	30	24.316.569.551	30	24.316.569.551	Bakesbangpol, Satpol PP
				Persentase penegakan Perda	100	100		100		100		100		100		100		Bakesbangpol, Satpol PP
9	1	1	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	26.985.815.662	15	36.340.617.335	20	32.253.290.998	25	22.576.718.168	30	24.316.569.551	30	24.316.569.551	Bakesbangpol, Satpol PP
				Persentase penegakan Perda	100	100		100		100		100		100		100		Bakesbangpol, Satpol PP

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Setelah dibuat keterkaitan antara indikator sasaran pembangunan dan program yang mendukung masing-masing sasaran, maka dibuat indikasi rencana program prioritas perangkat daerah. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi

perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan sebelas prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang sudah dilakukan sebelumnya kemudian diserasikan dengan program pembangunan daerah yang menjadi program pembangunan Kabupaten Bandung yang diprioritaskan. Hal ini dilakukan agar didapatkan keterkaitan antara prioritas pembangunan yang diambil langsung dari isu-isu strategis yang ada di lapangan dengan program pembangunan daerah yang akan dilakukan sehingga didapatkan perencanaan yang tepat untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan Program Bupati tertera pada Tabel 7.1.

**TABEL 7.1.  
KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
	Program peningkatan derajat kesehatan penduduk
	Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
Penanganan kemiskinan dan PMKS	Program jaminan sosial masyarakat



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah
	Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi
	Program optimalisasi jaringan irigasi
	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)
	Program pengendalian pemanfaatan ruang
Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana
	Program penanggulangan banjir
Reformasi birokrasi	Program peningkatan profesionalisme birokrasi
	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah
Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan
Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik
	Program pengembangan pengembangan dan jasa yang kompetitif
	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif
	Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah
	Program peningkatan efektivitas investasi
Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan	Program pemantapan kemandirian pangan
Pengendalian pencemaran lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)
	Program konservasi sumber daya alam

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

11 Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung perlu dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Secara detail, sandingan keterkaitan antara prioritas Kabupaten Bandung dengan prioritas

pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dijabarkan pada Tabel 7.2.





**TABEL 7.2.**  
**SINERGITAS DAN SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG**  
**DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
– Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	– Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan – Peningkatan peran pemuda dan olah raga	– Revolusi mental – Pelayanan pendidikan
– Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	– Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan kualitas tenaga kesehatan – Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB dan kependudukan	– Pelayanan kesehatan
– Penanganan kemiskinan dan PMKS	– Penanganan kemiskinan	– Pemerataan antar kelompok pendapatan
– Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	– Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan – Peningkatan penataan ruang daerah	– Pembangunan perumahan dan permukiman – Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan – Pembangunan desa dan kawasan perdesaan – Pembangunan perkotaan
– Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	– Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan – Penanganan Resiko Bencana	– Pembangunan desa dan kawasan perdesaan – Pembangunan perkotaan
– Reformasi birokrasi	– Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	– Reformasi fiskal – Reformasi agraria – Revolusi mental – Konsolidasi demokrasi efektivitas diplomasi – Reformasi birokrasi
– Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan	– Peningkatan penataan ruang daerah	– Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
– Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	– Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha	– Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha – Kemaritiman dan kelautan



Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri</li> <li>– Peningkatan destinasi wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan pariwisata</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan cadangan pangan pemerintah, ketersediaan informasi, harga, dan akses pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, serta penanganan daerah rawan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kedaulatan pangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengendalian pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas penanganan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan desa dan kawasan perdesaan</li> <li>– Pembangunan perkotaan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> <li>– Peningkatan kesadaran politik dan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilitas keamanan dan ketertiban</li> <li>– Kepastian dan penegakan hukum</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Sejalan dengan penetapan sembilan misi pembangunan yang telah dipaparkan pada Bab V serta penetapan 25 program pembangunan daerah sebagai program prioritas di atas, Bupati Bandung memiliki gagasan untuk mengembangkan lima fokus pembangunan. Kelima fokus pembangunan tersebut meliputi: 1). Sumber Daya Manusia, 2). Kualitas Infrastruktur, 3). Ekonomi, 4). Ketahanan Pangan, serta 5). Kualitas Lingkungan. Pada dasarnya lima fokus pembangunan mewakili baik misi pembangunan maupun prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Penetapan fokus pembangunan dianggap

mampu mengemas misi dan program pembangunan daerah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami publik, tanpa mengurangi inti penting dari misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Harapannya melalui penetapan fokus pembangunan melalui penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan sederhana, lima misi pembangunan Kabupaten Bandung dapat lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat luas.

Adapun keterkaitan antara misi pembangunan, program pembangunan daerah, dan fokus pembangunan disajikan pada Tabel 7.3.



**TABEL 7.3.**  
**KETERKAITAN MISI, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN FOKUS PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

<b>Misi Pembangunan</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>Fokus Pembangunan</b>
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	
	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	
	Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	
	Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	
	Program jaminan sosial masyarakat	
	Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	
Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	Ekonomi
	Program pengembangan pengembangan dan jasa yang kompetitif	
	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	
	Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	
	Program peningkatan efektivitas investasi	
	Program pemantapan kemandirian pangan	Ketahanan Pangan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Kualitas Infrastruktur
	Program optimalisasi jaringan irigasi	



Misi Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Fokus Pembangunan
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	
	Program penanggulangan banjir	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)	Kualitas Lingkungan
	Program konservasi sumber daya alam	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Sumber Daya Manusia
	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	
	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

Selain pencetusan fokus pembangunan, Kepala Daerah Kabupaten Bandung memberi perhatian khusus bagi pembangunan di sektor ekonomi, fisik dan sosial, yang dituangkan dalam janji kampanye kepala daerah. Secara detail janji kampanye Bupati Bandung diantaranya:

1. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
  - Pembangunan infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan sektor ekonomi
  - Penanganan lahan kritis dalam bentuk bank pohon dan pembuatan embung-embung sumur resapan
  - Implementasi bank sampah
2. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  - Mendorong pembentukan OVOP (*One Village One Product*) atau kampung-kampung yang memiliki produk unggulan (ternak/sapi, strawberry, kopi, *fashion*)

- Meningkatkan pertanian terpadu berbasis organik
  - Pengembangan ekonomi kreatif
  - Peningkatan pembangunan kepariwisataan melalui pembentukan BUMD bidang pariwisata, dll
  - Pembangunan pasar induk agro dan pasa industri/tekstil
3. Janji Kampanye dalam Bidang Perencanaan Sosial
    - Peningkatan SDM pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, serta pada karakter masyarakat yang bersifat universal
    - Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)
    - Peningkatan angka melek Al-Quran
    - Mendorong terciptanya Soreang sebagai Kota Religius/Kota Dzikir dan Sholawat
    - Peningkatan kapasitas kecamatan, kelurahan, dan desa



- Penguatan regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait RAKSA
- Mendorong optimalisasi PAD
- Meningkatkan kerja sama perbatasan
- Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi

Baik misi, program pembangunan daerah, fokus pembangunan, maupun janji kampanye Bupati Bandung akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program-program prioritas. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Bandung tersebut, maka pada pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional pada masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran pendanaan, dapat disimpulkan total belanja langsung seluruh Perangkat Daerah pada tahun ke-1 (2017) sebesar Rp. 1.861.019.138.515,00, pada tahun ke-2 (2018) sebesar Rp. 2.642.918.449.921,00 pada tahun ke-3 (2019) sebesar Rp. 1.789.939.479.159,00, pada tahun ke-4 (2020) sebesar Rp. 1.797.905.912.669,00, sementara pada tahun ke-5 (2021) sebesar Rp 1.805.912.178.388,00. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 7.4.

Penjabaran secara lengkap mengenai indikasi rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang disertai pendanaan untuk pembangunan jangka menengah terdapat pada lampiran kebutuhan pendanaan setiap Perangkat Daerah.



**TABEL 7.4.**  
**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017-2021**

No.	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.996.435.446.061,90</b>	<b>2.832.952.475.078,13</b>	<b>2.882.511.036.162,41</b>	<b>2.912.942.950.433,43</b>	<b>2.933.560.445.130,23</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.361.891.443.153,99	2.173.540.355.675,90	2.226.887.603.425,90	2.256.887.603.425,90	2.276.887.603.425,90
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	68.716.853.750,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00	93.066.900.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	797.250.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00	892.750.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa	36.959.859.734,91	45.076.946.925,63	40.877.574.836,51	41.309.489.107,53	41.926.983.804,33
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah	504.876.895.758,00	510.375.522.476,60	510.786.207.900,00	510.786.207.900,00	510.786.207.900,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	23.193.143.665,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.861.019.138.515,00</b>	<b>2.642.918.449.921,00</b>	<b>1.789.939.479.159,00</b>	<b>1.797.905.912.669,00</b>	<b>1.805.912.178.388,00</b>
2.2.1.	BL Urusan SKPD	184.025.491.856,00	236.485.165.011,68	229.023.792.703,00	230.409.267.442,00	229.568.003.748,00
2.2.2.	BL Urusan Program	1.676.993.646.659,00	2.406.433.284.909,32	1.560.915.686.456,00	1.567.496.645.227,00	1.576.344.174.640,00
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.857.454.584.576,90</b>	<b>5.475.870.924.999,13</b>	<b>4.672.450.515.321,41</b>	<b>4.710.848.863.102,43</b>	<b>4.739.472.623.518,23</b>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab													
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021																	
	Selilih SubTotal dan Paqu Proq Pemd					0		0		0		0		0		0										0			
1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	76,09 %	76,75 %	483.090.125.138	76,83 %	597.959.667.263	76,92 %	497.320.709.492	77,19 %	490.645.155.104	77,35 %	520.853.494.519	77,35 %	2.589.869.151.516														
1.2.1	DINAS KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	N/A %	48,39 %		50,15 %	69,23 %	92,31 %	100 %																				
1	URUSAN WAJIB																												
1 01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																												
1 01 02	KESEHATAN																												
1 01 02 23	1.1.1.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi		77 %	4.919.195.250	76 %	5.826.807.250	77 %	1.094.500.000	77 %	1.267.860.000	77 %	1.404.243.500	77 %	14.512.606.000	Dinkes													
1 01 02 25	1.1.1.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar		100 %	21.321.302.500	100 %	17.694.387.500	100 %	17.640.715.000	100 %	18.360.000.000	100 %	19.810.450.000	100 %	94.826.855.000	Dinkes													
1 01 02 28	1.1.1.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penguatan pelayanan kesehatan primer		65 %	8.278.826.500	73 %	8.321.409.550	81 %	8.458.936.000	89 %	8.672.872.830	100 %	8.781.452.659	100 %	42.513.497.539	Dinkes													
1 01 02 16	1.1.2.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Yankes Penderita Hipertensi		100 %	223.772.930.223	100 %	214.674.556.963	100 %	127.508.928.492	100 %	131.171.318.164	100 %	133.148.397.373	100 %	830.276.131.215	Dinkes													
1 01 02 19	1.1.3.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		55 %	988.390.000	60 %	2.093.780.000	65 %	555.130.000	70 %	652.800.000	75 %	722.370.000	75 %	5.012.470.000	Dinkes													
	1.2.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA																											
1 01 02 16	1.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien yang dapat dilayani		100 %	90.000.000.000	100 %	96.000.000.000	100 %	102.000.000.000	100 %	108.325.000.000	100 %	114.325.000.000	100 %	510.650.000.000	RSUD Majalaya													
1 01 02 19	1.1.1.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				100.000.000		0		0		0		0		100.000.000	RSUD Majalaya													
1 01 02 26	1.1.1.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar		76 %	2.351.516.000	77 %	22.000.146.166		0		0		0	77 %	24.351.662.166	RSUD Majalaya													
1 01 02 27	1.1.1.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS yang dilakukan Pemeliharaan			0		0		0		0		0		0	RSUD Majalaya													
	1.2.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG																											
1 01 02 16	1.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jumlah Pasien Yang Terlayani		100 %	72.269.520.184	100 %	76.268.000.000	100 %	77.246.400.000	100 %	81.108.720.000	100 %	93.212.168.742	100 %	400.104.808.926	RSUD Soreang													
1 01 02 19	1.1.1.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Media Informasi Sadar Hidup Sehat		3 Paket	100.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	150.000.000	5 Paket	153.765.000	5 Paket	165.820.854	5 Paket	719.585.854	RSUD Soreang													
1 01 02 26	1.1.2.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terlaksananya Pembangunan RS		100 %	21.671.665.481	100 %	103.394.413.834	100 %	130.666.100.000	100 %	103.192.819.110	100 %	111.283.591.390	100 %	470.208.589.815	RSUD Soreang													
	1.2.4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGA																											
1 01 02 16	1.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit		12 Bulan	33.588.529.000	12 Bulan	30.000.000.000	12 Bulan	32.000.000.000	12 Bulan	35.000.000.000	12 Bulan	38.000.000.000	12 Bulan	168.588.529.000	RSUD Cicalengka													
1 01 02 33	1.1.1.33 Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Rumah Sakit		100 %	60.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	60.000.000	RSUD Cicalengka													
1 01 02 26	1.1.2.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Medik		100 %	2.968.250.000	100 %	21.536.166.000	100 %	0	100 %	2.740.000.000	100 %	0	100 %	27.244.416.000	RSUD Cicalengka													
1 01 02 23	1.1.3.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Akreditasi		12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	0	0	12 Bulan	0	0	0	0	700.000.000	RSUD Cicalengka														
	Sub Total Paqu Program SKPD				483.090.125.138		597.959.667.263	940	497.320.709.492	965	490.645.155.104	969	520.853.494.519	2.589.869.151.516															
	Selilih SubTotal dan Paqu Proq Pemd				0		0		0		0		0	0															
1.1.4.1	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Penduduk	Indeks kesehatan	81,69 %	81,74 %	55.562.911.608	81,78 %	58.110.182.255	81,83 %	19.569.679.287	81,87 %	16.922.632.436	81,91 %	19.491.135.824	81,91 %	169.656.541.411														
1.2.1	DINAS KESEHATAN																												
1	URUSAN WAJIB																												
1 01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																												
1 01 02	KESEHATAN																												
1 01 02 15	1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata - Rata Belanja Obat yang bermutu per kapita (Rp/Kap)		4630	Rp/kapita 9.474.095.263	4.775	Rp/kapita 11.789.683.769	4.924	Rp/kapita 8.520.563.910	5.077	Rp/kapita 5.542.457.710	5.236	Rp/kapita 5.967.397.602	5.236	Rp/kapita 41.294.198.255	Dinkes													
1 01 02 17	1.1.1.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Produk olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar		40 %	140.000.000	45 %	180.000.000	48 %	197.840.000	50 %	224.400.000	52 %	243.008.472	52 %	985.248.472	Dinkes													
1 01 02 20	1.1.2.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100 %	948.579.300	100 %	1.022.918.500	100 %	1.026.632.000	100 %	1.224.000.000	100 %	1.346.235.000	100 %	5.568.364.800	Dinkes													



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab						
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
			Tarjet	Anggaran	2018		2019		2020		2021												
1 01 02 22	1.1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			100	%	2.840.412.000	100	%	2.611.209.925	100	%	2.525.199.250	100	%	2.928.420.000	100	%	3.245.192.500	100	%	14.150.433.675	Drinkes
1 01 02 29	1.1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			100	%	0	100	%	0			0			0			0			0	Drinkes
1 01 02 30	1.1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			100	%	100.000.000	100	%	200.000.000	100	%	127.200.000	100	%	255.000.000	100	%	273.625.000	100	%	955.825.000	Drinkes
1 01 02 32	1.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			100	%	31.258.208.000	100	%	26.995.842.000	100	%	1.401.585.000	100	%	1.637.495.966	100	%	1.765.882.875	100	%	63.059.013.841	Drinkes
1 01 02 21	1.1.3.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			100	%	1.370.000.000	100	%	1.344.222.000	100	%	1.400.000.000	100	%	469.200.000	100	%	1.669.112.500	100	%	6.252.534.500	Drinkes
	2.8.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				0	
1		Urusan Wajib																				0	
1 02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				0	
1 02 #		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				0	
1 02 #	15	1.1.1.15	Program Keluarga Berencana		84	%	6.282.900.000	82	%	9.778.202.317	83	%	1.540.740.801	83	%	1.812.053.745	83	%	1.944.404.729	83	%	21.358.301.591	DP2KBP3A
1 02 #	16	1.1.1.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		29	%	256.174.925	29	%	926.966.865	29	%	341.770.939	29	%	376.699.005	29	%	404.212.805	29	%	2.305.824.539	DP2KBP3A
1 02 #	18	1.1.1.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KWR yang mandiri		5	%	2.362.542.120	5	%	2.344.902.120	5	%	2.160.509.468	5	%	2.204.739.657	5	%	2.365.772.113	5	%	11.438.465.478	DP2KBP3A
1 02 #	21	1.1.1.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		29	%	150.000.000	29	%	102.561.866			0			0			29	%	252.561.866	DP2KBP3A	
1 02 #	22	1.1.1.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		115	%	70.000.000	115	%	41.063.346	115	%	40.216.724	115	%	42.041.058	115	%	45.111.704	115	%	238.432.833	DP2KBP3A
1 02 #	23	1.1.1.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		4	%	310.000.000	4	%	772.609.547	4	%	287.421.195	4	%	206.125.294	4	%	221.180.524	4	%	1.797.336.561	DP2KBP3A
			<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>				<b>55.562.911.608</b>			<b>58.110.182.255</b>	<b>5.708</b>	<b>0</b>	<b>19.569.679.287</b>	<b>5.863</b>	<b>0</b>	<b>16.922.632.436</b>	<b>6.024</b>	<b>0</b>	<b>19.491.135.824</b>			<b>169.656.541.411</b>	
			<b>Selisih SubTotal dan Pagu Proa Pemda</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
		1.1.5.1	Program Optimalisasi perlindungan perempuan dan anak																				
		2.8.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
1			Urusan Wajib																				
1 02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
1 02 02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																				
1 02 02 16	1.1.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			4	%	1.304.600.000	4	%	1.681.603.312	5	%	661.421.766	5	%	610.268.698	5	%	654.842.245	5	%	4.912.736.021	DP2KBP3A

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab								
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021													
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																
1 02 02 17	1.1.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		6	410.000.000	6	%	330.852.050	6	%	207.786.409	7	%	212.962.137	7	%	228.516.725	7	%	1.390.117.321	DP2KBP3A				
1 02 02 18	1.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		6	450.000.000	6	%	557.553.334	6	%	301.625.433	7	%	309.697.942	7	%	332.318.036	7	%	1.951.194.745	DP2KBP3A				
		<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>			<b>2.164.600.000</b>			<b>2.570.008.696</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1.170.833.608</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1.132.928.777</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1.215.677.006</b>			<b>8.254.048.087</b>					
		<b>Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>					
	1.2.1.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat	Indeks pemenuhan	69,62	%	69,69	%	44.185.098.916	70	%	48.124.852.600	70,46	%	52.345.123.000	70,92	%	57.619.634.260	71,36	%	59.075.854.649	71,36	%	261.350.563.425		
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN																							
	1	Usuran Wajib																							
	1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																							
	1 01 01	Usuran Pendidikan																							
	1 01 01 25	1.1.3.25 Program Bantuan Bidang Pendidikan						0			0			16.500.000.000			17.952.000.000			19.263.200.000		53.715.200.000	Dsdik		
	1.2.1	DINAS KESEHATAN																							
	1	Usuran Wajib																							
	1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																							
	1 01 02	Usuran Kesehatan																							
	1 01 02 24	1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan uran	100	%	100	%	21.185.098.916	100	%	34.124.852.600	100	%	21.845.123.000	100	%	22.527.559.860	100	%	24.336.041.574	100	%	124.018.675.950	Drnkes	
	1.2.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA																							
	1 01 02 24	1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang ditangani	100	%	100	%	10.000.000.000	100	%	6.000.000.000	100	%	6.000.000.000	100	%	7.317.100.000	100	%	6.632.834.175	100	%	35.949.934.175	RSUD Majalaya	
	1.2.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG																							
	1 01 02 24	1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Terlayani	12	Bulan	12	Bulan	10.000.000.000	12	Bulan	5.000.000.000	12	Bulan	5.000.000.000	12	Bulan	6.747.674.400	12	Bulan	5.527.361.813	12	Bulan	32.275.036.213	RSUD Soreang	
	1.2.4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGA																							
	1 01 02 24	1.1.1.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100	%	100	%	3.000.000.000	100	%	3.000.000.000	100	%	3.000.000.000	100	%	3.075.300.000	100	%	3.316.417.088	100	%	15.391.717.088	RSUD Cicalengka	
		<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>						<b>44.185.098.916</b>			<b>48.124.852.600</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>52.345.123.000</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>57.619.634.260</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>59.075.854.649</b>		<b>261.350.563.425</b>			
		<b>Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			
	1.2.2.1	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	%	3,73	%	70.592.418.175	3,60	%	73.970.951.482	3,50	%	54.361.976.000	3,40	%	45.473.353.306	3,30	%	49.364.113.005	3,30	%	293.762.811.968		
			Indeks kedalaman kemiskinan	1	%	1,12	%	1,01	%	0,97	%	0,87	%	0,80	%	0,80	%	0,80	%	0,80	%	0,80	%		
	1.6.1	DINAS SOSIAL																							
	1	Usuran Wajib																							
	1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																							
	1 01 06	Usuran Sosial																							
	1 01 06 15	1.1.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi	16	%	25.910.864.250	16	%	36.670.337.758	17	%	4.411.902.000	17	%	4.669.640.000	18	%	5.161.873.000	18	%	5.161.873.000	18	%	76.824.617.008	Dnsos
	1 01 06 16	1.1.1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Mampu Menadapi Situasi Krisis Termasuk Korban Bencana	15	%	5.513.530.000	21	%	5.079.510.661	28	%	7.849.908.873	35	%	8.745.568.204	43	%	9.978.555.000	43	%	37.167.072.738	43	%	37.167.072.738	Dnsos
	1 01 06 17	1.1.1.17 Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Inklusifitasnya	17	%	796.736.518	18	%	1.083.938.879	24	%	1.860.000.000	29	%	2.733.200.000	35	%	2.531.278.026	35	%	9.005.153.423	35	%	9.005.153.423	Dnsos
	1 01 06 18	1.1.1.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Yang Berfungsi Secara Fisik	54	%	1.930.400.000	62	%	1.650.381.254	63	%	1.695.591.127	65	%	2.249.100.000	66	%	2.373.275.284	66	%	10.098.747.665	66	%	10.098.747.665	Dnsos
	1 01 06 19	1.1.1.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu Berintegrasi Sosial	78	%	350.000.000	68	%	177.155.988	75	%	525.000.000	82	%	459.000.000	89	%	629.337.500	89	%	2.140.493.488	89	%	2.140.493.488	Dnsos
	1 01 06 20	1.1.2.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	48	%	80.000.000	54	%	130.000.000	46	%	133.150.000	62	%	341.700.000	78	%	366.657.500	78	%	1.051.507.500	78	%	1.051.507.500	Dnsos
	1 01 06 21	1.1.2.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	35	%	2.752.050.000	38	%	3.315.666.020	39	%	4.758.072.500	40	%	6.923.840.000	41	%	7.439.817.416	41	%	25.189.445.936	41	%	25.189.445.936	Dnsos
																							0		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021									
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021												
1	2.1.1	DINAS TENAGA KERJA																			
1		Urusan Wajib																			
1	02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			
1	02	01	Urusan Tenaga Kerja																		
1	02	01	15	1.1.2.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		17.253.353.907		6.052.044.225		8.947.783.000		8.874.000.000		9.522.150.000			50.649.331.132	Disnaker		
1	02	01	16	1.1.2.16	Program Peninokatan Kesempatan Kerja		12.506.483.500		14.867.449.047		19.195.429.000		6.560.678.505		7.276.495.280			60.406.535.332	Disnaker		
1	02	01	17	1.1.2.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		3.149.000.000		4.426.197.650		3.835.139.500		3.694.266.597		3.846.073.000			18.950.676.747	Disnaker		
2	0	0			Urusan Pilihan														0	Disnaker	
2	0	0			Urusan Pilihan															0	Disnaker
2	0	8			Transmigrasi															0	Disnaker
2	0	8	17		Program transmigrasi regional		350.000.000		318.270.000		1.150.000.000		222.360.000		238.601.000			2.279.231.000	Disnaker		
					Sub Total Pagu Program SKPD		70.592.418.175		73.970.951.482	292	54.361.976.000	330	45.473.353.306	370	49.364.113.005			293.762.811.968			
					Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Penda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1.3.1.1	Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan		9.511.538.121	4	6.982.554.200	8	5.805.887.326	12	6.949.062.897	16	6.393.927.586	16		35.642.970.130		
					2.7.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
					Urusan Wajib																
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
					07	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
1	02	07	15	1.1.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		20	4.975.699.188	20	3.288.582.700	20	1.926.000.000	20	2.410.062.897	20	2.243.725.000	20		14.844.069.785	DPMD	
1	02	07	16	1.1.1.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		20	175.838.933	20	99.700.000	20	916.000.000	20	1.122.000.000	20	1.030.877.586	20		3.344.416.519	DPMD	
1	02	07	18	1.1.1.18	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa yang sudah mendapat pelatihan		20	1.640.000.000	20	1.429.922.000	20	1.133.887.326	20	1.377.000.000	20	1.094.500.000	20		6.675.309.326	DPMD	
1	02	07	17	1.1.2.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		10	2.720.000.000	10	2.164.349.500	10	1.830.000.000	10	2.040.000.000	10	2.024.825.000	10		10.779.174.500	DPMD	
					Sub Total Pagu Program SKPD			9.511.538.121		6.982.554.200	70	5.805.887.326	70	6.949.062.897	70	6.393.927.586			35.642.970.130		
					Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Penda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing		88.299.116.323		119.759.593.155		93.243.273.257		96.565.241.394		103.206.252.498			501.073.476.627		
					2.1.1.1	Program Pengembangan Pertanian Berdaya Saing Berbasis Organik		4,24	1.799.918.235	4,26	5.893.345.000	4,27	5.320.998.730	4,28	6.711.600.000	4,28	7.201.810.000	4,28		26.927.671.965	
					3.3.1	DINAS PERTANIAN															
					Urusan Pilihan																
2	00	03	15	2.2.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		26	618.583.072	36	2.075.000.000	0	0	0	0	0	0	0		2.693.583.072	Distan	
2	00	03	20	2.2.2.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		22	828.335.163	40	1.602.120.000	0	0	0	0	0	0	0	40		2.428.455.163	Distan
2	00	03	31	2.2.1.31	Program Peningkatan pemberdayaan penyuluhan pertanian		0	0	0	0	45	1.186.385.980	55	1.861.500.000	55	1.997.462.500	55		5.045.348.480	Distan	
2	00	03	17	2.2.2.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		1	355.000.000	1	2.216.225.000	1	1.888.410.500	1	2.142.000.000	1	2.298.450.000	1		8.900.085.500	Distan	
2	00	03	29	2.2.2.29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian		0	0	0	0	2	2.246.202.250	3	2.708.100.000	3	2.905.897.500	3		7.860.199.750	Distan	
					Sub Total Pagu Program SKPD			1.799.918.235		5.893.345.000	48	5.320.998.730	59	6.711.600.000	4	7.201.810.000			26.927.671.965		
					Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Penda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2.1.2.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa yang Kompetitif		5,9	5.201.045.226	6,08	6.713.964.168	6,12	11.075.540.484	6,19	11.497.498.656	6,22	11.408.116.518	6,22		45.896.165.052	
					3.6.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN															
					Urusan Pilihan																
2	00	06	17	2.1.1.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		854.796.852	205.000.000	863.712.617	248.953.450	868.476.968	470.000.000	897.710.575	714.000.000	906.687.681	809.930.000	906.687.681		2.447.883.450	Disperin	
2	00	06	15	2.2.1.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		5	243.000.000	10	1.673.672.563	12	1.336.727.500	15	1.826.542.050	20	1.840.587.268	20		6.920.529.381	Disperin	
2	00	06	18	2.2.2.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		6	4.653.045.226	6	4.691.401.155	6	8.718.812.984	6	7.936.956.606	6	8.319.799.251	6		34.320.015.222	Disperin	
2	00				Urusan Pilihan															0	
2	00	05			Energi dan Sumberdaya Mineral															0	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggungjawab									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
				Target	Anggaran																								
2 00 05 17	2.4.1.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan luas panas bumi yang dimanfaatkan			92	%	100.000.000	93	%	99.937.000	93	%	550.000.000	94	%	1.020.000.000	94	%	437.800.000	94	%	2.207.737.000	Disperin					
		Sub Total Pagu Program SKPD						5.201.045.226			6.713.964.168			868.477.079			11.075.540.484			897.710.690			11.497.498.656	906.687.801		11.408.116.518			45.896.165.052
		Selisih SubTotal dan Pagu Proq Pemda						0			0			0			0			0			0			0			0
	2.1.3.1	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif.	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,5	%	2	%	8.945.251.831	3	%	10.852.711.019	3,5	%	9.360.901.826	4	%	11.650.054.016	4,5	%	12.818.328.872	4,5	%	53.627.247.563						
			Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	5,94	%	6,04	%		6,09	%		6,12	%		6,14	%		6,17	%		6,17	%							
	2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																											
1		Urusan Wajib																											
1 02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
1 02 #		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																											
1 02 # 15	2.1.1.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Usaha mikro Kecil menengah	6	%	192.000.000	8	%	420.000.000														0	8	%	612.000.000			0
1 02 # 17	2.1.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah umkm yang mengikuti kegiatan sosialisasi PIRTT dan Halal	110	UMKM	130.251.831	28	UKM	1.017.621.318														0	138	UMKM	1.147.873.149			0
1 02 # 18	2.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Baru	20	Koperasi	1.197.000.000	25	Koperasi	2.412.635.961	25	Koperasi	900.136.315	35	Koperasi	1.107.046.870	50	Koperasi	1.229.821.631	155	Koperasi	6.846.640.778								
1 02 # 19	2.1.1.19	Program Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat			0			0	21	%	450.000.000	21	%	1.173.000.000	22	%	1.313.400.000	22	%	2.936.400.000								
1 02 # 16	2.2.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha Kecil	0	%	2.412.000.000	0	%	1.724.371.566	4	%	2.283.815.511	5	%	1.342.607.145	6	%	1.363.464.441	6	%	9.126.258.663								
	3.6.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																											
2 00		Urusan Pilihan																											
2 00 06		Urusan Perdagangan																											
2 00 06 19	2.2.3.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10	%	454.000.000	15	%	447.646.700	20	%	75.000.000	25	%	515.100.000	30	%	612.263.300	30	%	2.104.010.000								
2 00 06 15	2.3.1.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Kontribusi sub sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bandung	6	%	2.340.000.000	6	%	2.737.234.250	6	%	2.462.750.000	6	%	2.845.800.000	6	%	3.283.500.000	6	%	13.669.284.250								
2 00 06 16	2.3.2.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan IKM Berdaya Saing	5	%	478.000.000	6	%	211.865.900	7	%	790.000.000	7	%	841.500.000	8	%	843.859.500	8	%	3.165.225.400								
2 00 06 17	2.3.3.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk	1	%	1.742.000.000	2	%	1.881.335.324	4	%	2.399.200.000	5	%	3.825.000.000	6	%	4.172.020.000	6	%	14.019.555.324								
		Sub Total Pagu Program SKPD						8.945.251.831			10.852.711.019	87	0	9.360.901.826	104	0	11.650.054.016	128	0	12.818.328.872									53.627.247.563
		Selisih SubTotal dan Pagu Proq Pemda						0			0			0			0			0									0
	2.1.4.1	Program Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.100.000	Org	2.150.000	Org	19.759.716.050	2.200.000	Org	45.340.364.927	2.250.000	Org	26.285.000.000	2.300.000	Org	32.894.393.607	2.350.000	Org	35.301.199.956	2.350.000	Org	159.580.674.540						
			Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	6,53	%	6,65	%		6,75	%		6,85	%		6,95	%		7	%		7	%							
			Jumlah Situs/ Cagar budaya dalam kondisi baik	35	Situs/ Cagar	45	Situs/ Cagar	55	Situs/ Cagar	65	Situs/ Cagar	75	Situs/ Cagar	85	Situs/ Cagar	85	Situs/ Cagar												
	3.2.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																											
2 00		Urusan Pilihan																											
2 00 02		Urusan Pariwisata																											
2 00 02 15	2.1.1.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan	2150000	Org	2.090.000.000	2.200.000	Org	2.716.755.700	225.000	Org	2.725.000.000	2.300.000	Org	3.957.079.936	2.350.000	Org	4.761.075.000	2.350.000	Org	16.249.910.636								
2 00 02 16	2.1.1.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata	66	Objek Wisata	8.149.335.000	66	Objek Wisata	22.622.707.450	68	Objek Wisata	6.760.000.000	70	Objek Wisata	12.874.326.486	72	Objek Wisata	12.362.500.000	72	Objek Wisata	62.768.868.936								
2 00 02 17	2.1.1.17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah MoU Yang terjalin			944.787.550			750.000.000			1.900.000.000			2.754.000.000			2.955.150.000											9.303.937.550
1		Urusan Wajib																											
1 02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
1 02 #		Urusan Kebudayaan																											
1 02 # 15	2.1.2.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event Pagelaran Seni / Budaya	11	Event	4.336.840.000	12	Event	3.747.210.125	13	Event	9.700.000.000	14	Event	3.476.193.589	15	Event	3.730.092.042	65	Event	24.990.335.755								
1 02 # 16	2.1.2.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs / Cagar Budaya dalam kondisi baik	40	Situs/ Cagar	2.831.603.500	45	Situs/ Cagar	1.880.000.000	50	Situs/ Cagar	2.250.000.000	55	Situs/ Cagar	4.528.793.596	60	Situs/ Cagar	5.144.282.914	60	Situs/ Cagar	16.634.680.010								
1 02 # 17	2.1.2.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Pagelaran	11	Event	1.407.150.000	12	Event	13.623.691.652	13	Event	2.950.000.000	14	Event	5.304.000.000	15	Event	6.348.100.000	65	Event	29.632.941.652								

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab								
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021														
				Target	Anggaran		2018		2019		2020		2021													
1 02 # 18	2.1.2.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Workshop/Dialog kebudayaan Pengelolaan kekayaan budaya		0		0		0		0		0		0		0	Disparbud								
Sub Total Paqu Program SKPD					19.759.716.050		45.340.364.927		225.144		26.285.000.000		2.300.153		32.894.393.607		2.350.162		35.301.199.956		159.580.674.540					
Selisih SubTotal dgn Paqu Proq Pemda					0		0		0		0		0		0		0		0		0					
1 02 # 20	2.1.5.1	Program peningkatan efektivitas investasi	Laju pertumbuhan investasi	2,7	%	2,72	%	3.181.515.073	2,74	%	2.556.030.055	2,76	%	2.967.386.778	2,78	%	3.212.055.185	2,8	%	3.459.516.483	2,8	%	15.376.503.574			
1 02 # 20	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																								
1 02 #		Urusan Wajib																								
1 02 #		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																								
1 02 # 20	2.1.1.20	Program Peningkatan Kapasitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat		0		0	3	Nilai	1.042.386.778	3	Nilai	1.361.700.000	4	Nilai	1.464.441.000	4	Nilai	1.464.441.000	4	Nilai	3.868.527.778	DPMPTSP			
1 02 # 15	2.1.2.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi	7	Triliun	1.446.350.000	7	Triliun	1.340.609.527	8	Triliun	1.075.000.000	8	Triliun	1.019.055.185	8	Triliun	1.099.972.500	8	Triliun	1.099.972.500	8	Triliun	5.980.987.212	DPMPTSP	
1 02 # 16	2.1.2.16	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Kelataan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	90	%	1.385.165.073	92	%	1.010.735.528	93	%	850.000.000	94	%	831.300.000	95	%	895.102.983	95	%	895.102.983	95	%	4.972.303.584	DPMPTSP	
1 02 # 17	2.1.2.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Jumlah Dok. Kajian	3	Dok	350.000.000	3	Dok	204.685.000														554.685.000	DPMPTSP		
Sub Total Paqu Program SKPD						3.181.515.073			2.556.030.055	104		2.967.386.778	105		3.212.055.185	107		3.459.516.483					15.376.503.574			
Selisih SubTotal dgn Paqu Proq Pemda						0			0		0		0		0		0		0				0			
1 02 # 20	2.2.1.1	Program pemantauan kemandirian pangan	Skor PPH Konsumsi	75,86	%	83	%	49.411.669.908	86	%	48.403.177.966	89	%	38.233.445.439	92	%	30.599.639.930	94	%	33.017.280.669	94	%	199.665.213.932			
1 02 # 20	2.3.1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Skor PPH Ketersediaan	81,3	%	86	%		88,3	%		90,6	%		93	%		95,3	%		95,3	%				
2 00		Urusan Pilihan																								
2 00 02		Kelautan dan Perikanan																								
2 00 02 22	2.1.1.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya Jabatan/Kelas Penyuluh Perikanan	50	%	44.856.400			0														44.856.400	Dispangkan		
2 00 02 23	2.1.1.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat konsumsi ikan perkapita	15	Kg/Kapit a/Thn	428.016.000	17	Kg/Kapit a/Thn	1.419.310.000	18	Kg/Kapit a/Thn	1.947.700.053	20	Kg/Kapit a/Thn	1.092.143.550	22	Kg/Kapit a/Thn	1.201.327.870	22	Kg/Kapit a/Thn	1.201.327.870	22	Kg/Kapit a/Thn	6.088.497.473	Dispangkan	
1 02		Urusan Wajib																					0			
1 02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					0			
1 02 03		Pangan																					0			
1 02 03 15	2.2.1.15	Program Kelangkaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	86	%	1.482.192.586	0		0		0		0		0		86	%	1.482.192.586				1.482.192.586	Dispangkan		
1 02 03 16	2.2.1.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Skor PPH Ketersediaan	86	%	1.482.666.196	88	%	5.159.499.999	91	%	0		0		0		91	%	6.642.166.195				6.642.166.195	Dispangkan	
1 02 03 18	2.2.1.18	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat	Persentase penanganan wilayah rawan pangan			0			0		2.710.470.197		3.060.126.683		3.056.875.109								8.827.471.989	Dispangkan		
1 02 03 19	2.2.1.19	Program Pengembangan konsumsi, penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	83	%	0	86	%	0	89	%	2.947.222.880	92	%	2.483.833.282	94	%	2.800.207.310	94	%	2.800.207.310	94	%	8.231.263.472	Dispangkan	
1 02 03 22	2.2.1.20	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT)			0		0		0		0		0		0		0		0				0	Dispangkan		
2 00		Urusan Pilihan																					0			
2 00 02		Kelautan dan Perikanan																					0			
2 00 # 20	2.2.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	4	%	4.447.173.000	3	%	8.564.955.968	3	%	4.238.590.000	3	%	5.000.000.000	3	%	5.472.500.000	3	%	5.472.500.000	3	%	27.723.218.968	Dispangkan	
1 02		Urusan Wajib																					0			
1 02		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					0			
2 00		Urusan Pilihan																					0			
2 00 03		Pertanian																					0			
2 00 03 16	2.1.2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan	687549	Ton	12.291.497.924	695412	Ton	3.604.600.576				0		0								15.896.098.500	Distan		
2 00 03 18	2.1.2.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tercapainya Indeks Pertanian (IP)	2	Ppoint	13.135.755.446	2	Ppoint	7.581.500.000				0		0								20.717.255.446	Distan		
2 00 03 19	2.1.2.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Non-Pangan Utama (Perkebunan dan Hortikultura)	405505	Ton	5.796.633.206	409516	Ton	6.902.559.032	413.676	Ton	9.732.095.280	418.217	Ton	5.508.000.000	421.017	Ton	6.019.750.000	421.017	Ton	6.019.750.000	421.017	Ton	33.959.037.498	Distan	
2 00 03 30	2.1.2.30	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan			0		701.346	Ton	4.914.230.207	708.348	Ton	4.183.899.615	70.934	Ton	4.342.670.500	70.934	Ton	4.342.670.500	70.934	Ton	4.342.670.500	70.934	Ton	13.440.800.322	Distan
2 00 03 21	2.1.3.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase status kesehatan hewan Populasi Ternak Ruminansia Besar	71	%	1.238.430.000	72	%	2.105.717.000	72	%	1.193.385.526	73	%	1.234.200.000	73	%	1.324.345.000	73	%	1.324.345.000	73	%	7.097.077.526	Distan	
2 00 03 22	2.1.3.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase pelayanan pemasaran ternak	62859	Ekor	5.977.875.000	63.330	Ekor	7.683.854.000	63.805	Ekor	8.270.551.816	64.283	Ekor	6.589.036.800	65.570	Ekor	7.125.019.880	65.570	Ekor	7.125.019.880	65.570	Ekor	35.646.337.496	Distan	
2 00 03 23	2.1.3.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase pelayanan pemasaran ternak	36	%	1.400.684.460	42	%	2.855.000.000	48	%	1.449.199.500	55	%	459.000.000	64	%	547.250.000	64	%	547.250.000	64	%	6.711.133.960	Distan	
2 00 03 24	2.1.3.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase Kelompok Dalam Pemanfaatan Teknologi Peternakan	1	%	552.000.000	1	%	791.500.000			0		0		0		0		0		1	%	1.343.500.000	Distan	
2 00 03 25	2.1.3.25	Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak	Persentase produk asal hewan yang HAUS	79	%	1.132.889.690	82	%	1.734.681.411	84	%	830.000.000	85	%	989.400.000	85	%	1.127.335.000	85	%	1.127.335.000	85	%	5.814.306.101	Distan	
Sub Total Paqu Program SKPD						49.411.669.908			48.403.177.966	1.179.232		38.233.445.439	1.191.176		30.599.639.930	557.862		33.017.280.669					199.665.213.932			
Selisih SubTotal dgn Paqu Proq Pemda						0			0		0		0		0		0		0				0			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Target	Anggaran																
3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar																				
	Terdapat Desain Tata Ruang																				
3.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Moda share	1,41	1,45	301.921.859.098	1,57	378.210.086.983	1,84	292.350.371.275	2,16	291.918.536.608	2,16	275.956.702.390	2,16	444.335.548.370	2,598.273.676.344	1.538.357.556.353				
		Level of service (LOS) jalan	D	D		D		C		C		C		C							
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
1	Urusan Wajib																				
1 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																				
1 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
1 01 03 15	3.1.1.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yg terbangun di tahun rencana	100	%	24.084.737.004	100	%	59.432.217.000	100	%	11.241.300.000	100	%	52.747.000.000	100	%	52.973.800.000	100	%	200.479.054.004	DPUPR
1 02	Urusan Wajib																				
1 02 09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
1 02 09 15	3.1.1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase PJU dalam kondisi baik	35	%	26.274.530.152	35	%	15.622.967.325	36	%	32.435.528.508	36	%	25.704.000.000	37	%	27.581.400.000	37	%	127.618.425.985	DPUPR
1 01	Urusan Wajib																				
1 01 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																				
1 01 03 17	3.1.1.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap / talud / bronjong yang terbangun	100	%	46.371.602.514	100	%	42.859.817.420	100	%	35.465.283.446	100	%	18.921.000.000	100	%	21.616.375.000	100	%	165.234.078.380	DPUPR
1 01 03 18	3.1.1.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	6	%	181.379.537.238	7	%	216.980.755.300	7	%	168.422.975.884	7	%	163.252.008.287	8	%	139.449.255.270	8	%	869.484.531.979	DPUPR
1 01 03 19	3.1.1.19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase turap / talud / bronjong yang terpelihara	0	%	0	10	%	1.950.000.000	20	%	3.519.000.000	30	%	3.776.025.000	30	%	3.776.025.000	30	%	9.245.025.000	DPUPR
1 01 03 20	3.1.1.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Ketersediaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	45	%	498.650.000	50	%	564.550.000	55	%	500.000.000	60	%	510.000.000	65	%	574.612.500	65	%	2.647.812.500	DPUPR
1 01 03 21	3.1.1.21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan	persentase jalan yang tanggap darurat yang tertangani	0	%	0	10	%	1.500.000.000	20	%	1.530.000.000	30	%	1.641.750.000	30	%	1.641.750.000	30	%	4.671.750.000	DPUPR
1 01 03 22	3.1.1.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase sistem informasi/data base jalan dan jembatan	72	%	500.000.000	74	%	977.790.000	76	%	600.000.000	78	%	765.000.000	80	%	820.875.000	80	%	3.663.665.000	DPUPR
1 01 03 23	3.1.1.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	ketersediaan sarana prasarana penunjang kebinamargaan	100	%	4.796.970.000	100	%	4.158.380.000	100	%	1.403.280.000	100	%	3.060.000.000	100	%	3.557.125.000	100	%	16.975.755.000	DPUPR
1 01 03 29	3.1.1.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dan aparatur	100	%	10.952.297.000	100	%	15.853.090.000	100	%	25.300.000.000	100	%	6.783.000.000	100	%	7.825.675.000	100	%	66.714.062.000	DPUPR
1 01 03 40	3.1.1.40 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi	0	%	0			500.000.000			510.000.000			547.250.000			1.557.250.000			1.557.250.000	DPUPR
1 01 03 41	3.1.1.41 Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi bangunan	25	%	453.588.340	30	%	585.310.000	0		0		0		0		1.038.898.340			1.038.898.340	DPUPR
2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN																				
1	Urusan Wajib																				
1 02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
1 02 09	Perhubungan																				
1 02 09 17	3.1.1.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang umum	1718	Kendaraan	589.407.407	1718	Kendaraan	1.321.532.500	0		0		0		0		1718	Kendaraan	1.910.939.907	Dishub	
1 02 09 22	3.1.1.22 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan penangkutan penumpang	0		0	1718	Kendaraan	3.906.479.720	1718	Kendaraan	4.588.998.847	1718	Kendaraan	5.281.083.406	1718	Kendaraan	13.776.561.973	1718	Kendaraan	13.776.561.973	Dishub
1 02 09 15	3.2.1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan saluan ruang parkir (SRP)	49	%	919.235.443	50	%	2.741.576.000	51	%	204.477.916	52	%	1.896.079.846	53	%	1.870.871.743	53	%	7.632.240.949	Dishub
1 02 09 16	3.2.1.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase alat PKB eksisting yang dapat digunakan dengan baik	80	%	528.925.000	81	%	825.000.000	0		0		0		0		81	%	1.353.925.000	Dishub	
1 02 09 19	3.2.1.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	20	%	3.591.354.000	23	%	12.888.704.447	27	%	4.963.079.971	30	%	5.344.657.938	30	%	5.518.319.199	30	%	32.306.115.556	Dishub
1 02 09 20	3.2.1.20 Program peningkatan ke laikn peggoperasian kendaraan bermotor	Persentase KVV lulus uji berkala	100	%	981.025.000	100	%	1.398.396.991	100	%	2.185.335.000	100	%	1.363.740.000	100	%	1.203.950.000	100	%	7.132.446.991	Dishub
1 02 09 21	3.2.1.21 Program Pembinaan Keselamatan transportasi	Persentase pelaksanaan rencana aksi keselamatan (RAK) transportasi	0	%	0	55	%	1.697.630.830	57	%	1.271.051.689	60	%	1.499.435.271	60	%	1.499.435.271	60	%	4.468.117.790	Dishub

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021												
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021												
1 02 09 23 3.2.1.2.3	Program Pengembangan Layanan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan pengangkutan			0	0	8.265	Kendaraan	75.000.000	8.265	Kendaraan	153.000.000	8.265	Kendaraan	218.900.000	8.265	Kendaraan	446.900.000	Dshub					
	<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>				<b>301.921.859.098</b>				<b>376.210.086.983</b>	<b>10.810</b>	<b>0</b>	<b>292.350.371.275</b>	<b>10.843</b>	<b>0</b>	<b>291.918.536.608</b>	<b>10.876</b>	<b>0</b>	<b>275.956.702.390</b>	<b>1.538.357.556.353</b>					
	<b>Selisih SubTotal dan Pagu Proq Pemda</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					
	3.1.2.1	Program Optimalisasi Jaringan Irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	N/A	ha	40	ha	26.908.914.830	45	ha	57.739.221.500	50	ha	28.926.540.404	55	ha	21.355.559.831	60	ha	23.623.320.830	60	ha	158.553.557.396	
	1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
	1 01	Urusan Wajib																						
	1 01 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
1 01 03 24 3.1.2.2.4	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik			57	%	26.908.914.830	63	%	57.739.221.500	64	%	28.926.540.404	64	%	21.355.559.831	75	%	23.623.320.830	75	%	158.553.557.396	DPUPR	
	<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>				<b>26.908.914.830</b>			<b>57.739.221.500</b>			<b>28.926.540.404</b>			<b>21.355.559.831</b>			<b>23.623.320.830</b>			<b>158.553.557.396</b>				
	<b>Selisih SubTotal dan Pagu Proq Pemda</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>				
	3.1.3.1	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)	Akses aman terhadap air bersih	76,04	%	77,12	%	80.191.238.568	76,64	%	115.414.858.731	76,94	%	68.500.605.503	77,24	%	64.455.600.000	80	%	31.728.109.345	80	%	360.290.412.147	
			Akses aman terhadap sanitasi	70,2	%	70,51	%		90	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
			Persentase kawasan kumuh	0,72	%	0,65	%		0,49	%		0,35	%		0,25	%		0,15	%		0,15	%		
	1.4.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN																						
	1 01	Urusan Wajib																						
	1 01 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																						
1 01 04 16 3.1.1.1.6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan			14	%	29.025.830.216	15	%	29.996.240.750	15	%	18.444.994.347	16	%	19.300.000.000	17	%	7.300.315.000	17	%	104.067.380.313	Disperkintan	
1 01 04 17 3.1.1.1.7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kelompok berstrata baik dalam pengelola air bersih dan sanitasi			15	%	227.000.000	25	%	150.000.000	40	%	50.000.000	60	%	1.020.000.000	70	%	547.250.000	70	%	1.994.250.000	Disperkintan	
1 01 04 15 3.1.2.1.5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak huni			86	%	48.096.524.014	86	%	65.728.617.981	86	%	31.606.402.717	86	%	21.998.200.000	86	%	17.943.513.849	86	%	185.373.258.561	Disperkintan	
	1 02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																						
	1 02 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa																						
1 02 07 17 3.1.2.1.7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan pedesaan			5	Kegiatan	400.000.000			0					0			0		5	Kegiatan	400.000.000	Disperkintan	
	1 01	Urusan Wajib																						
	1 01 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																						
1 01 04 18 3.1.2.1.8	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam					0			60	%	0	60	%	0	60	%	0	60	%	0	60	%	0
1 01 04 22 3.1.2.2.2	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani					0			970	Ha	7.550.000.000	905	Ha	8.604.000.000	905	Ha	3.009.875.000	905	Ha	19.163.875.000	905	Ha	
1 01 04 23 3.1.2.2.3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis			100	%	136.200.000	100	%	150.000.000	100	%	50.000.000	100	%	204.000.000	100	%	328.350.000	100	%	868.550.000	Disperkintan	
1 01 04 25 3.1.2.2.5	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan data informasi kecipikaan					0			100	%	200.000.000	100	%	510.000.000	100	%	492.525.000	100	%	1.202.525.000	Disperkintan		
1 01 04 26 3.1.2.2.6	Program perencanaan pembangunan daerah Bidang Perumahan Permukiman	Persentase Keasuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.					0			100	%	60.000.000	100	%	71.400.000	100	%	65.670.000	100	%	197.070.000	Disperkintan		
1 01 04 16 3.1.3.1.6	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah penyediaan dokumen dan pemanfaatan tanah di Kab. Bandung			1	Dokumen	1.905.684.338	1	Dokumen	18.690.000.000	1	Dokumen	10.050.000.000	1	Dokumen	10.708.000.000	1	Dokumen	1.094.500.000	1	Dokumen	42.448.184.338	Disperkintan	
1 01 04 19 3.1.3.1.9	Program Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat			5	Sertifikat	400.000.000	5	Sertifikat	700.000.000	5	Sertifikat	389.208.439	5	Sertifikat	1.020.000.000	5	Sertifikat	398.860.496	5	Sertifikat	2.908.068.936	Disperkintan	
1 01 04 20 3.1.3.2.0	Program Penataan tapal batas wilayah	Persentase titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbangun					0			2	Lokasi	100.000.000	2	Lokasi	1.020.000.000	2	Lokasi	547.250.000	6	Lokasi	1.667.250.000	Disperkintan		
	<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>				<b>80.191.238.568</b>			<b>115.414.858.731</b>	<b>1.479</b>	<b>0</b>	<b>68.500.605.503</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>64.455.600.000</b>	<b>1.446</b>	<b>0</b>	<b>31.728.109.345</b>			<b>360.290.412.147</b>				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021									
		<b>Selilih SubTotal dgn Paqu Proq Pemda</b>				0		0		0		0		0		0		0
3.1.4.1	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	56 %	56,5 %	3.113.000.000	57 %	2.859.296.000	57,5 %	3.495.000.000	58 %	6.427.901.280	58 %	6.897.390.148	58 %	22.792.587.428			
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	Usuran Wajib																	
1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
1 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1 01 03 34	3.1.3.34 Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Informasi Mengenai Rencana Detai tata Ruang		44 %	1.608.727.000	50 %	1.628.074.000	55 %	1.345.000.000	60 %	2.398.901.280	65 %	2.574.115.148	65 %	9.554.817.428	DPUPR		
1 01 03 35	3.1.3.35 Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Budi Daya Non Pertanian yang Berjin Sesuai Renaca tata Ruang		57 %	713.000.000	57 %	438.355.000	58 %	300.000.000	58 %	459.000.000	59 %	492.525.000	59 %	2.402.880.000	DPUPR		
1 01 03 36	3.1.3.36 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penggunaan Lahan Sesuai Rencana Tapak		100 %	791.273.000	100 %	792.867.000	100 %	650.000.000	100 %	969.000.000	100 %	1.039.775.000	100 %	4.242.915.000	DPUPR		
1 01 03 38	3.1.3.38 Program pengawasan dan pencendalian banuunan				0		0		1.200.000.000		2.601.000.000		2.790.975.000		6.591.975.000	DPUPR		
		<b>Sub Total Paqu Program SKPD</b>			<b>3.113.000.000</b>		<b>2.859.296.000</b>	<b>213</b>	<b>3.495.000.000</b>	<b>218</b>	<b>6.427.901.280</b>	<b>224</b>	<b>6.897.390.148</b>	<b>22.792.587.428</b>				
		<b>Selilih SubTotal dgn Paqu Proq Pemda</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
3.1.5.1	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Respond time terhadap kejadian kebakaran	55,35 %	60 %	9.037.007.489	65 %	15.574.377.539	70 %	9.042.887.813	75 %	9.722.453.641	80 %	10.484.406.907	80 %	53.861.133.389			
		Persentase penanganan kebencanaan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
1.5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
1	Usuran Wajib																	
1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar																	
1 01 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1 01 04 27	3.1.2.27 Program perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana		100 %	63.056.000	100 %	525.585.000	100 %	1.072.872.062	100 %	2.083.250.895	100 %	2.050.575.699	100 %	5.795.339.656	BPBD		
1 01 04 28	3.1.2.28 Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/Sosial				0		0		0		0		0		0	BPBD		
1 01 04 15	3.2.1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				450.400.000		600.000.000		0		0		0		1.050.400.000	BPBD		
3 0 2	Perencanaan														0			
3 0 2 15	3.2.1.15 Program penneimbangan data/informasi				531.662.500		360.000.000		50.000.000		357.000.000		383.075.000		1.681.737.500	BPBD		
3 0 2 19	3.2.1.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar				600.000.000		500.000.000		0		0		0		1.100.000.000	BPBD		
1	Usuran Wajib														0			
1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar														0			
1 01 05	Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat														0			
1 01 05 15	3.2.1.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase personil yang siap diturunkan pada tahapan Pra, saat dan Pasca bencana		100 %	621.083.280	100 %	1.482.828.325	100 %	2.852.948.325	100 %	440.126.583	100 %	611.269.090	100 %	6.008.255.603	BPBD		
1 01 05 22	3.2.1.22 Program pencegahan diri dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung		100 %	3.377.072.720	100 %	4.064.342.750	100 %	1.100.000.000	100 %	2.403.517.846	100 %	2.820.167.499	100 %	13.765.100.814	BPBD		
1	Usuran Wajib														0			
1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar														0			
1 01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														0			
1 01 03 23	3.2.1.23 Program Penanganan Darurat Kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi			520.072.989		540.000.000	100 %	2.052.872.062		2.317.120.150		2.331.881.333		7.761.946.534	BPBD		
1 01 03 24	3.2.1.24 Program Penendalian Banjir				0		960.159.124		0		0		0		960.159.124	BPBD		
1.5.3	DINAS KEBAKARAN														0			
1	Usuran Wajib														0			
1 01	Usuran Wajib Pelayanan Dasar														0			
1 01 05	Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat														0			
1 01 05 19	3.1.1.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayan bencana kebakaran		55 %	2.873.660.000		6.541.462.340		0		0		0		9.415.122.340	Dikar		
1 01 05 26	3.1.1.26 Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase jenis sarana dan prasarana Cakupan Pelayanan pencegahan bahaya kebakaran			0		0	70 %	750.000.000	75 %	816.000.000	80 %	930.325.000	80 %	2.496.325.000	Dikar		



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021										
1 01 05 25 3.1.2.25	Program peningkatan kesiagaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Jumlah penanggulangan kebakaran yang dapat tercapai dalam standard respon time			0	0	1.164.195.364		1.305.438.167		1.357.113.287		3.826.746.818	Dskar					
	Sub Total Pagu Program SKPD			9.037.007.489	15.574.377.539	470	0	9.042.887.813	375	0	9.722.453.641	380	0	10.484.406.907	53.861.133.389				
	Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1.6.1	Program pemenuhan air minum	Luas penampungan	1,3 ha	1,35 ha	85.360.422.990	1,4 ha	97.674.492.735	1,44 ha	97.904.895.156	1,5 ha	87.833.000.000	1,55 ha	95.645.618.750	1,55 ha	464.418.429.631				
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1 01	Urusan Wajib																		
1 01 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1 01 03 33	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1 01 03 16 3.1.4.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Drainase Jalan yang dibangun		12 %	64.697.860.000	15 %	48.557.875.610	17 %	36.197.000.000	19 %	30.866.000.000	21 %	31.083.800.000	21 %	211.402.535.610	DPUPR			
1 01 03 26 3.1.4.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Kegiatan Pendukung Penanganan Genangan		15 %	100.000.000	20 %	1.550.000.000	25 %	12.280.568.718	30 %	14.892.000.000	35 %	17.115.243.750	35 %	45.937.812.468	DPUPR			
1 01 03 28 3.1.4.28	Program pengendalian banjir				20.562.562.990		47.566.617.125		27.700.000.000		24.429.000.000		26.651.075.000		146.909.255.115	DPUPR			
1 01 03 33 3.1.4.33	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong				0		0		21.727.326.438		17.646.000.000		20.795.500.000		60.168.826.438	DPUPR			
	Sub Total Pagu Program SKPD				85.360.422.990		97.674.492.735		42	0	97.904.895.156		49	0	87.833.000.000	56	0	95.645.618.750	464.418.429.631
	Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda				0		0		0		0		0		0		0	0	0
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				48.317.182.726		58.783.776.194		50.832.694.994		44.680.768.645		40.139.611.075		242.754.033.634				
4.1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)	Indeks kualitas air	20 %	19 %	38.233.958.421	21 %	45.321.335.294	22 %	42.728.675.461	24 %	29.057.885.336	25 %	31.368.132.242	25 %	186.709.986.754				
		Indeks kualitas udara	60 %	72 %		75 %		77 %		78 %		80 %		80 %					
		Persentase pengelolaan sampah	24 %	26 %		35 %		50 %		65 %		75 %		75 %					
2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
1 2	Urusan Wajib																		
1 2 5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
1 2 5 16 4.1.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dari Sumber Institusi		10 %	2.682.719.267	11 %	1.940.630.125	12 %	1.324.421.530	13 %	1.002.035.250	14 %	1.080.599.234	14 %	8.030.405.406	DLH			
1 2 5 19 4.1.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data terkait lingkungan hidup yang dapat diakses		100 %	550.000.000	100 %	299.800.000	100 %	450.000.000	100 %	229.627.500	100 %	246.536.809	100 %	1.775.964.309	DLH			
1 2 5 20 4.1.1.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase Penurunan Beban Pencemaran Air Sumber Institusi		10 %	4.225.341.259	11 %	3.223.370.200	12 %	823.078.470	13 %	892.657.080	14 %	962.645.333	14 %	10.127.092.342	DLH			
1 2 5 19 4.1.3.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dapat dikelola		24 %	30.775.897.895	40 %	39.857.534.969	60 %	40.131.175.461	80 %	26.933.565.506	80 %	29.078.350.866	80 %	166.776.524.696	DLH			
	Sub Total Pagu Program SKPD				38.233.958.421		45.321.335.294		184	0	42.728.675.461		206	0	29.057.885.336	208	0	31.368.132.242	186.709.986.754
	Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda				0		0		0		0		0		0		0	0	0
4.1.2.1	Program Konservasi Sumber Daya Alam	Luas ruang terbuka hijau	38,28 ha	46,55 ha	10.083.224.305	47,01 ha	13.462.440.900	47,48 ha	8.104.019.533	47,95 ha	15.622.883.310	48,43 ha	8.771.478.833	48,43 ha	56.044.046.880				
		Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31 %	0,31 %		0,31 %		0,31 %		0,31 %		0,31 %		0,31 %					
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1 01	Urusan Wajib																		
1 01 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1 01 04 37 4.1.1.37	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1 01 04 37 4.1.1.37	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ketersediaan RTH		0 2 %	1.599.500.000				0		2.142.000.000		2.298.450.000		6.039.950.000	DPUPR			
1.4.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN																		
1 01	Urusan Wajib																		
1 01 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1 01 04 20 4.1.1.20	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1 01 04 20 4.1.1.20	Program pengelolaan areal pemukiman	Persentase Luas Tempat Pemukiman Umum Yang Terpelihara		15 %	908.000.000	20 %	1.000.000.000	25 %	1.850.000.000	30 %	4.140.000.000	33 %	0	33 %	7.898.000.000	Disperkimtan			
1 01 04 24 4.1.1.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau perkotaan			4.689.687.072		4.510.000.000		3.325.000.000		8.236.500.000		5.280.962.500		26.042.149.572	Disperkimtan			
2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
1 2	Urusan Wajib																		
1 2 5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
1 2 5 17 4.1.2.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase cadangan Air yang dapat disediakan untuk air bersih			4.485.537.233		6.352.940.900		2.929.019.533		1.104.383.310		1.192.066.333		16.063.947.308	DLH			
	Sub Total Pagu Program SKPD				10.083.224.305		13.462.440.900		25	0	8.104.019.533		30	0	15.622.883.310	33	0	8.771.478.833	56.044.046.880
	Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda				0		0		0		0		0		0		0	0	0

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Anggaran														
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				352.181.639.238		407.019.146.524		336.386.878.951		364.761.993.717		358.191.048.785		1.818.540.307.216				
5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi	Nilai SAKIP kabupaten	54,61 %	57 %	309.696.124.827	63 %	356.761.145.157	68 %	290.956.433.607	72 %	327.831.197.717	77 %	318.688.670.052	77 %	1.603.933.571.361				
		Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	N/A	1,2		2	2,5		3		3,2		3,2						
		Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80,46 %		80,75 %		81,12 %		81,78 %		82,7 %		82,7 %					
	1.1.1	DINAS PENDIDIKAN																	
		Usuran Rutin																	
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	57 %	4.513.036.550	63 %	3.731.520.714	68 %	2.813.019.914	72 %	3.335.370.315	77 %	3.108.618.533	77 %	17.501.566.026	Didik
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.809.622.250		2.409.274.613		383.304.250		457.510.510		429.218.436		5.488.930.059	Didik
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		690.000.000		460.000.000		785.000.000		1.017.514.000		946.317.287		3.898.631.287	Didik
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	2	Dokumen 90.000.000	36	Dokumen 130.000.000	36	Dokumen 90.000.000	36	Dokumen 90.450.000	36	Dokumen 99.492.513	36	Dokumen 499.942.513	Didik
				1.2.1	DINAS KESEHATAN														0
					Usuran Rutin														0
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100 %	1.882.138.133	100 %	2.175.766.789	100 %	2.029.366.889	100 %	2.406.626.193	100 %	2.243.409.009	100 %	10.737.307.013	Dinkes
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	693.810.000	100 %	1.518.226.940	100 %	1.269.472.940	100 %	1.505.467.959	100 %	1.403.367.250	100 %	6.390.345.089	Dinkes
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	200.000.000	100 %	129.429.800	100 %	129.429.800	100 %	153.490.800	100 %	143.081.066	100 %	755.431.466	Dinkes
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	861.302.500	100 %	770.094.816	100 %	524.532.000	100 %	746.171.619	100 %	695.566.323	100 %	3.597.667.259	Dinkes
				1.2.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA														0
					Usuran Rutin														0
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100 %	1.351.534.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.534.755	RSUD Majalaya
x	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Majalaya
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Majalaya
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Majalaya
				1.2.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG														0
					Usuran Rutin														0
x	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	RSUD Soreang
				1.2.4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGA														0
					Usuran Rutin														0
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 %	1.366.645.554	100 %	1.552.921.780	100 %	1.220.000.000	100 %	1.533.577.438	100 %	1.422.251.945	100 %	7.095.396.716	RSUD Cicalengka
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Gedung/Kendaraan Dinas Yang Bertungsi Baik	100 %	550.000.000	100 %	225.000.000	100 %	175.000.000	100 %	355.770.000	100 %	331.641.709	100 %	1.637.411.709	RSUD Cicalengka
x	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pegawai Yang Memiliki Seragam Sesuai Standar	100 %	200.000.000	0	0	0	0	0	100.500.000	100 %	101.002.500	100 %	401.502.500	RSUD Cicalengka
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Keahlian	100 %	300.000.000	100 %	400.000.000	100 %	105.000.000	100 %	474.360.000	100 %	442.188.945	100 %	1.721.548.945	RSUD Cicalengka
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Realisasi Kinerja Dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD Cicalengka
				1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														0
					Usuran Rutin														0
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	19.402.426.480	100 %	35.350.315.007	100 %	34.094.231.500	100 %	45.334.314.997	100 %	42.033.599.872	100 %	176.214.887.825	DPUPR
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	10.538.609.000	100 %	3.147.556.125	100 %	2.035.500.000	100 %	5.070.687.312	100 %	4.938.441.207	100 %	25.730.793.644	DPUPR
x	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100 %	61.141.000	100 %	414.932.509	100 %	0	100 %	1.062.000.000	100 %	985.050.000	100 %	2.523.123.509	DPUPR

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021											
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terperuhnya diklat dan bentuk pegawai	100	%	800.000.000	100	%	1.010.123.376	100	%	300.000.000	100	%	597.645.178	100	%	582.058.179	100	%	3.289.826.732	DPUPR	
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	248.729.000	100	%	2.291.500.000	100	%	809.930.000	100	%	1.190.620.000	100	%	1.104.350.500	100	%	5.645.129.500	DPUPR	
	1.4.1	DINAS PERLUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN																			0		
x xx xx		Usuran Rutin																			0		
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100	%	1.284.829.665	100	%	1.129.805.734	100	%	1.023.047.902	100	%	1.489.228.324	100	%	1.381.322.374	100	%	6.308.233.999	Disperkimtan	
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	100	%	2.038.010.000	100	%	1.582.606.234	100	%	570.000.000	100	%	1.690.629.665	100	%	1.568.130.651	100	%	7.449.376.550	Disperkimtan	
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100	%	149.000.000	100	%	245.000.000	100	%	50.000.000	100	%	354.000.000	100	%	328.350.000	100	%	1.126.350.000	Disperkimtan	
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100	%	60.000.000	100	%	150.000.000	100	%	0	100	%	177.000.000	100	%	164.175.000	100	%	551.175.000	Disperkimtan	
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Ketersediaan pelaporan kinerja dan capaian keuangan	10	Dokumen	100.000.000	10	Dokumen	150.000.000	10	Dokumen	50.000.000	10	Dokumen	236.000.000	10	Dokumen	237.558.701	10	Dokumen	773.558.701	Disperkimtan	
3		Penunjang Usuran																			0		
3	0	Penunjang Usuran																			0		
3	0	2	Perencanaan																		0		
3	0	2	15	5.1.1.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data informasi kecipakaryaan	100	%	304.015.819	100	%	450.000.000	0		0			0	100	%	754.015.819	Disperkimtan	
3	0	2	21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.	100	%	48.520.000	100	%	50.000.000	0		0			0	100	%	98.520.000	Disperkimtan	
		1.5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		0		
x xx xx		Usuran Rutin																			0		
x xx xx 5	5.5.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	500.000.000	100	%	500.000.000	100	%	500.000.000	100	%	592.950.000	100	%	552.736.181	100	%	2.645.686.181	Satpol PP	
x xx xx 1	5.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	1.329.505.500	100	%	610.084.818	100	%	610.084.818	100	%	723.499.586	100	%	674.431.905	100	%	3.947.606.626	Satpol PP	
x xx xx 2	5.6.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	2.094.651.000	100	%	2.227.338.841	100	%	1.159.296.805	100	%	1.374.810.081	100	%	1.281.570.577	100	%	8.137.667.304	Satpol PP	
x xx xx 3	5.6.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	651.376.138	100	%	554.850.700	100	%	554.850.700	100	%	657.997.445	100	%	613.372.114	100	%	3.032.447.096	Satpol PP	
x xx xx 6	5.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	100.000.000	100	%	106.000.000	100	%	106.000.000	100	%	125.705.400	100	%	117.180.070	100	%	554.885.470	Satpol PP	
	1.5.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			0		
x xx xx		Usuran Rutin																			0		
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100	%	1.103.050.000	100	%	1.523.253.580	100	%	858.517.876	100	%	1.324.552.909	100	%	1.234.721.842	100	%	6.044.096.207	BPBD	
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	3.568.000.000	100	%	1.200.250.000	100	%	310.250.000	100	%	711.836.475	100	%	663.559.785	100	%	6.453.896.260	BPBD	
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya motivasi kerja aparatur	100	%	220.250.000	100	%	177.032.000	100	%	52.250.190	100	%	209.942.249	100	%	195.703.982	100	%	855.178.421	BPBD	
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Kinerja	100	%	156.485.822	100	%	364.390.667	100	%	187.830.667	100	%	184.799.588	100	%	172.266.495	100	%	1.065.773.239	BPBD	
	1.5.3	DINAS KEBAKARAN																			0		
x xx xx		Usuran Rutin																			0		
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	60	%	109.177.000	60	%	588.385.062	70	%	946.000.000	75	%	1.332.597.600	80	%	1.242.550.935	80	%	4.218.710.597	Diskar	
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100	%	240.363.000	100	%	2.180.000.000	100	%	1.450.000.000	100	%	1.713.655.000	100	%	497.462.563	100	%	6.081.480.563	Diskar	
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang aparatur	100	%	72.640.000	100	%	45.500.000	100	%	45.500.000	100	%	53.958.450	100	%	50.298.992	100	%	267.897.442	Diskar	
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	100	%	44.200.000	100	%	95.000.000	100	%	112.660.500	100	%	105.019.874	100	%	356.880.374	100	%	356.880.374	Diskar

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021														
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																	
	1.6.1	DINAS SOSIAL															0									
		Usuran Rutin															0									
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional Perkantoran	100	%	2.423.930.000	100	%	1.977.459.670	100	%	2.155.255.000	100	%	2.219.580.000	100	%	2.311.584.000	100	%	11.087.808.670	Dinsos	
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	100	%	440.018.480	100	%	999.400.000	100	%	8.923.717.000	100	%	1.479.369.539	100	%	1.019.966.207	100	%	12.862.471.226	Dinsos	
x	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	194.705.000	100	%	211.528.480	100	%	211.528.480	100	%	271.400.000	100	%	290.042.500	100	%	1.179.204.460	Dinsos	
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan KESSOS melalui BMTEK	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	132.720.026	100	%	442.500.000	100	%	437.800.000	100	%	1.113.020.026	Dinsos	
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan sistem pelaporan	100	%	285.400.750	100	%	250.000.000	100	%	90.990.000	100	%	118.000.000	100	%	164.175.000	100	%	908.565.750	Dinsos	
	2.1.1	DINAS TENAGA KERJA																								
		Usuran Rutin																								
x	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100	%	1.252.631.950	100	%	2.542.477.942	100	%	2.738.855.750	100	%	2.406.565.160	100	%	2.232.191.159	100	%	11.172.721.961	Dsnaker	
x	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur	100	%	618.140.000	100	%	867.000.000	100	%	910.000.000	100	%	483.800.000	100	%	448.745.000	100	%	3.327.685.000	Dsnaker	
x	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100	%	94.020.000	100	%	97.500.000	100	%	0	100	%	115.050.000	100	%	106.713.750	100	%	413.283.750	Dsnaker	
x	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	%	115.700.000	100	%	60.000.000	100	%	0	100	%	70.800.000	100	%	65.670.000	100	%	312.170.000	Dsnaker	
x	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	71.500.000	100	%	115.000.000	100	%	95.000.000	100	%	112.100.000	100	%	103.977.500	100	%	497.577.500	Dsnaker	
	2.10.1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																								
		Usuran Wajib																								
1	2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																					
1	2	#			Komunikasi dan Informatika																					
1	2	#	15	5.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Persentase kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan	100	%	3.520.219.482	100	%	7.856.683.843	0													
1	2	#	17	5.1.1.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase kegiatan peningkatan kualitas SDM bidang TK	25	%	166.920.000	28	%	309.395.200	0													
1	2	#	18	5.1.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase informasi yang dikomunikasikan	17	%	514.510.000	80	%	323.710.250	0													
1	2	#	19	5.1.1.19	Program penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik	0			0	100	%	466.004.000	100	%	269.957.280	100	%	289.674.748	100	%	1.025.636.028	100	%	1.025.636.028	Dskominfo
1	2	#	20	5.1.1.20	Program penyediaan informasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks persepsi/kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah	0			0	76	nilai rata-rata	598.598.000	77	nilai rata-rata	469.298.940	77	nilai rata-rata	503.576.167	77	nilai rata-rata	1.571.473.107	100	%	1.571.473.107	Dskominfo
1	2	#	21	5.1.1.21	Program peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK	Persentase manajemen pemerintahan yang terintegrasi	0			0	60	%	644.420.000	80	%	480.719.013	100	%	515.830.353	100	%	1.640.969.366	100	%	1.640.969.366	Dskominfo
1	2	#	23	5.1.1.23	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan NDH	jumlah dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi	3	Dokumen	25.000.000	0			0													
1	2	#	24	5.1.1.24	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian	0	3	%	147.723.000	25	%	125.000.000	49	%	153.000.000	100	%	164.175.000	100	%	589.898.000	100	%	589.898.000	Dskominfo
1	2	#	25	5.1.1.25	Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	0			0	59	%	6.787.926.055	63	%	2.671.258.874	70	%	2.137.714.273	70	%	11.596.899.202	100	%	11.596.899.202	Dskominfo
1	2	#	15	5.1.2.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	persentase ketersediaan data (statistik) penunjang perencanaan pembangunan	50	%	705.000.000	60	%	277.719.000	70	%	650.000.000	80	%	739.500.000	100	%	711.425.000	100	%	3.083.644.000	Dskominfo	
					Usuran Rutin																					
x	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100	%	680.092.554	100	%	924.574.438	100	%	764.569.500	100	%	1.088.069.214	100	%	1.009.230.300	100	%	4.466.536.006	Dskominfo	
x	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	95	%	545.910.000	95	%	481.714.500	95	%	1.118.678.253	95	%	1.359.373.742	95	%	1.009.626.998	95	%	4.515.303.493	Dskominfo	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur sesuai peraturan yang berlaku	100	%	72.545.000	100	%	172.545.000	0	%	0	0	%	0	100	%	245.090.000	Diskominfo			
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pembentukan character		%	0		%	0	25	Orang	0		%	0	0	25	Orang	0	Diskominfo		
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase jumlah dokumen laporan yang terbit	100	%	27.846.500	100	%	53.217.000	100	%	25.400.000	100	%	208.678.870	100	%	193.558.494	100	%	508.700.864	Diskominfo
	2.11.1	DINAS KOPERASIL USAHA KECIL DAN MENENGAH																				
x xx xx		Urusan Rutin																				
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	25	%	858.375.000	25	%	1.085.918.150	25	%	1.000.500.000	25	%	1.398.300.000	25	%	1.039.775.000	100	%	5.382.868.150	Diskopukm
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	25	%	350.868.143	25	%	303.007.097	25	%	310.018.143	25	%	456.681.409	25	%	350.259.858	100	%	1.770.834.649	Diskopukm
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan Operasional perkantoran	25	%	30.000.000	25	%	63.218.571	25	%	75.375.000	25	%	94.844.818	25	%	0	100	%	263.438.369	Diskopukm
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Nilai rata-rata kemampuan sumber daya aparatur		%	0		%	0	80	%	255.000.000	85	%	236.000.000	85	%	103.336.057	85	%	594.336.057	Diskopukm
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25	%	61.150.000	25	%	61.000.000	25	%	50.000.000	25	%	64.900.000	25	%	54.725.000	100	%	291.775.000	Diskopukm
	2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																				
x xx xx		Urusan Rutin																				
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	%	899.074.990	100	%	983.263.480	100	%	1.266.280.000	100	%	978.173.442	100	%	912.189.515	100	%	5.038.981.427	DPMPPTSP
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	529.131.835	100	%	783.501.250	100	%	459.400.000	100	%	397.276.500	100	%	370.333.241	100	%	2.539.642.826	DPMPPTSP
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan Pakaian Operasional Kantor	100	%	67.600.000	100	%	87.100.000	100	%	90.090.000	100	%	80.166.840	100	%	74.729.932	100	%	399.686.772	DPMPPTSP
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	165.000.000	100	%	0	100	%	0	100	%	118.590.000	100	%	110.547.236	100	%	394.137.236	DPMPPTSP
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	92.000.000	100	%	55.000.000	100	%	56.630.000	100	%	76.700.000	100	%	71.142.500	100	%	351.472.500	DPMPPTSP
	2.13.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																				
x xx xx		Urusan Rutin																				
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100	%	660.000.000	100	%	1.830.217.350	100	%	1.804.600.000	100	%	2.148.308.000	100	%	2.004.746.398	100	%	8.447.871.748	Dispora
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	170.000.000	100	%	175.000.000	100	%	200.400.000	100	%	236.472.000	100	%	219.337.800	100	%	1.001.209.800	Dispora
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100	%	25.000.000	0	%	0	100	%	0	100	%	29.500.000	100	%	27.362.500	100	%	81.862.500	Dispora
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan whtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	145.000.000	100	%	100.000.000	100	%	140.000.000	100	%	194.700.000	100	%	180.592.500	100	%	760.292.500	Dispora
	2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
x xx xx		Urusan Rutin																				
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	708.092.554	100	%	1.509.512.272	100	%	1.340.494.000	100	%	1.544.620.000	100	%	1.079.337.559	100	%	6.182.056.385	Dispusip
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	553.306.346	100	%	593.376.000	100	%	4.300.000.000	100	%	483.800.000	100	%	537.800.000	100	%	6.468.282.346	Dispusip
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	100	%	72.545.000	100	%	125.070.000	100	%	0	100	%	70.800.000	100	%	71.670.000	100	%	340.085.000	Dispusip
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan sosialisasi Perundang-undangan untuk menambah wawasan aparatur DISPUSIP	0	%	0	100	%	100.000.000	100	%	0	100	%	135.700.000	100	%	65.670.000	100	%	301.370.000	Dispusip
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	27.846.500	100	%	51.124.000	100	%	51.124.000	100	%	60.326.320	100	%	64.323.000	100	%	254.743.820	Dispusip
1		Urusan Wajib																				
1 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				
1 2 #		Kearsipan																				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
1 2 # 15 5.1.1.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang melapor/menyajikan arsip statis dan vital di Depo Arsip		100 %	138.190.000	100 %	158.900.000	100 %	115.000.000	100 %	117.300.000	100 %	155.867.500	100 %	685.257.500	Disusip						
1 2 # 5.1.1.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase pemenuhan spras penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah di Depo Arsip		100 %	450.892.000	100 %	186.673.200	100 %	110.000.000	100 %	153.000.000	100 %	204.175.000	100 %	1.104.740.200	Disusip						
1 2 # 5.1.1.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan				230.607.000		103.810.000		80.000.000		81.600.000		87.560.000		583.577.000	Disusip						
1 2 # 5.1.1.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				361.602.000		168.041.100		36.701.000		93.535.020		100.366.745		760.245.865	Disusip						
	2.3.1	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN													0							
x xx xx		Urusan Rutin													0							
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100 %	1.195.624.900	100 %	1.454.827.057	100 %	1.291.205.582	100 %	2.082.173.320	100 %	1.962.248.848	100 %	7.986.079.077	Dispangan						
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	686.935.179	100 %	1.813.329.673	100 %	707.655.710	100 %	1.304.866.820	100 %	1.380.354.152	100 %	5.893.141.534	Dispangan						
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	174.578.700	100 %	179.502.255	0	0	0	0	0	0	100 %	354.080.955	Dispangan						
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dispangan						
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	329.408.000	100 %	114.936.000	100 %	96.998.300	100 %	152.959.860	100 %	159.797.000	100 %	854.099.160	Dispangan						
	2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													0							
x xx xx		Urusan Rutin													0							
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi perkantoran	100 %	1.230.829.300	100 %	1.788.044.200	100 %	963.000.000	100 %	1.194.201.300	100 %	1.113.210.669	100 %	6.289.285.469	DLH						
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.330.849.937	100 %	849.824.734	100 %	260.000.000	100 %	897.884.598	100 %	836.990.141	100 %	4.175.549.410	DLH						
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan pakaian aparatur	100 %	60.000.000	100 %	154.000.000	100 %	0	100 %	64.038.600	100 %	59.695.508	100 %	337.734.108	DLH						
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan pelaporan	100 %	119.999.999	100 %	193.775.000	100 %	16.000.000	100 %	111.474.600	100 %	103.914.402	100 %	545.164.001	DLH						
3 0 2		Penunjang Urusan Perencanaan													0							
3 0 2 21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat terkait lingkungan hidup		0	100 %	24.600.000	0	0	0	0	0	0	100 %	24.600.000	DLH						
	2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													0							
x xx xx		Urusan Rutin													0							
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.067.298.325	100 %	2.577.264.025	100 %	2.094.599.800	100 %	1.995.560.180	100 %	2.079.613.982	100 %	11.814.336.312	Disdukcapil						
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.734.937.000	100 %	895.102.077	100 %	512.842.077	100 %	934.301.919	100 %	652.037.641	100 %	4.729.220.714	Disdukcapil						
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur	100 %	238.427.000	100 %	332.600.000	100 %	0	100 %	290.545.500	100 %	270.840.729	100 %	1.132.413.229	Disdukcapil						
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	100 %	162.302.000	100 %	145.820.000	100 %	100.000.000	100 %	177.885.000	100 %	165.328.329	100 %	751.335.329	Disdukcapil						
1		Urusan Wajib													0							
1 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													0							
1 2 6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													0							
1 2 6 15	5.2.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kebijakan Inovasi Pelayanan	1	Dokumen	11.557.842.667	3	Dokumen	14.086.600.000	1	Dokumen	6.807.800.080	1	Dokumen	6.384.262.196	1	Dokumen	6.884.816.518	7	Dokumen	45.721.321.460	Disdukcapil
	2.7.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													0							
x xx xx		Urusan Rutin													0							
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	20 %	983.887.027	20 %	742.232.518	20 %	1.037.904.626	20 %	946.067.355	20 %	941.765.584	20 %	4.651.857.110	DPMD						
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	20 %	1.370.644.000	20 %	214.955.000	20 %	360.000.000	20 %	483.800.000	20 %	404.965.000	20 %	2.834.364.000	DPMD						
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	20 %	137.500.000	20 %	109.750.000	20 %	0	20 %	177.114.641	20 %	152.552.066	20 %	576.916.706	DPMD						
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20 %	185.000.000	20 %	122.500.000	20 %	62.000.000	20 %	277.300.000	20 %	257.207.500	20 %	904.007.500	DPMD						
															0							

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab												
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																			
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021																	
	2.8.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																													
		Urusan Rutin																													
X XX XX	1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran																											
X XX XX	2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan jenis sarana dan prasarana aparatur	12	%	1.274.263.227	12	%	1.531.457.845	12	%	1.248.423.370	12	%	1.644.562.828	12	%	1.556.047.708	12	%	7.254.754.978				DP2KBP3A					
X XX XX	3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	80.000.000	100	%	84.872.000	100	%	11.550.000	100	%	105.256.000	100	%	105.290.900	100	%	386.968.900				DP2KBP3A					
X XX XX	5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	48.000.000	100	%	0	100	%	0	100	%	65.275.811	100	%	66.018.581	100	%	179.294.392				DP2KBP3A					
X XX XX	6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100	%	305.490.000	100	%	126.247.099	100	%	95.086.000	100	%	163.472.480	100	%	153.816.652	100	%	844.112.231				DP2KBP3A					
		2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN																												
			Urusan Rutin																												
X XX XX	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase aset yang dikelola dengan baik	91	%	3.165.199.475	92	%	2.904.851.154	93	%	611.460.000	94	%	839.935.800	95	%	969.135.970	95	%	8.490.582.399								Dshub	
X XX XX	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase uji berkala kinerja pegawai	91	%	2.387.975.622	92	%	1.304.292.775	93	%	2.487.142.892	94	%	3.785.567.138	95	%	3.365.297.083	95	%	13.330.275.510								Dshub	
X XX XX	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	91	%	400.240.000	92	%	360.900.000	0										0	92	%	761.140.000					Dshub		
X XX XX	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% aparatur Dishub yang mengikuti diklat teknis pehubungan	14	%	69.100.000	15	%	86.634.177	15	%	31.700.000	16	%	136.526.000	17	%	126.633.650	17	%	450.593.827							Dshub		
X XX XX	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% ketersediaan dokumen penunjang SAKIP sesuai aturan	100	%	135.000.000	100	%	160.824.150	100	%	172.776.530	100	%	194.700.000	100	%	189.622.125	100	%	852.922.805							Dshub		
X XX XX	7	5.1.1.7	Program Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis	Jumlah KWU yang melayani uji berkala dan memberi kontribusi pada PAD	0		43.415	Kendaraan/hari	2.490.928.110	45.133	Kendaraan/hari	2.107.259.510	45.943	Kendaraan/hari	2.234.614.368	46.192	Kendaraan/hari	2.223.985.594	46.192	Kendaraan/hari	9.056.787.582								Dshub		
		3.2.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																												
			Urusan Rutin																												
X XX XX	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	665.856.539	100	%	1.091.408.464	100	%	1.104.356.539	100	%	1.267.825.040	100	%	1.219.741.446	100	%	5.349.188.028								Disparbud	
X XX XX	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	193.500.000	100	%	1.447.724.564	100	%	1.051.224.564	100	%	1.246.344.320	100	%	1.232.652.168	100	%	5.171.445.616								Disparbud	
X XX XX	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	100	%	12.000.000	100	%	35.000.000	100	%	50.000.000	100	%	59.000.000	100	%	54.725.000	100	%	210.725.000								Disparbud	
X XX XX	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		0	100	%	0	100	%	118.000.000	100	%	109.450.000	100	%	227.450.000								Disparbud		
X XX XX	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	36.000.000	100	%	62.500.000	100	%	65.000.000	100	%	76.826.268	100	%	71.510.036	100	%	311.836.305								Disparbud	
		3.3.1	DINAS PERTANIAN																												
			Urusan Rutin																												
X XX XX	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	%	2.314.319.487	100	%	2.281.543.050	100	%	2.078.015.960	100	%	2.339.209.866	100	%	2.272.721.750	100	%	11.285.810.113									Distan
X XX XX	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	1.184.747.600	100	%	3.809.449.905	100	%	1.481.075.172	100	%	1.935.200.000	100	%	1.741.349.500	100	%	10.151.822.177									Distan
X XX XX	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	100	%	190.170.000	0			35.000.000			0							225.170.000								Distan		
X XX XX	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya pegawai dinas	100	%	19.999.975	100	%	20.000.000	100	%	15.000.000	100	%	194.700.000	100	%	180.592.500	100	%	430.292.475								Distan	
X XX XX	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	90.110.000	100	%	242.582.000	100	%	90.230.000	100	%	277.300.000	100	%	229.845.000	100	%	930.067.000								Distan	
		3.6.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																												
			Urusan Rutin																												
X XX XX	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.824.413.469	100	%	1.570.842.878	100	%	1.967.120.663	100	%	2.470.674.382	100	%	2.455.426.366	100	%	10.288.477.758									Disperin
X XX XX	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		480.850.000		496.113.500	#####	953.000.000	#####	480.850.000		496.113.500	#####	430.000.000		924.540.000	#####	826.675.850		3.158.179.350									Disperin	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
				Tarjet	Anggaran																	
x xx xx 2	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Pegawai	72	%	322.776.750	74	%	90.000.000	75	%	200.000.000	77	%	259.600.000	78	%	240.790.000	78	%	1.113.166.750	Disperin
x xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase kapasitas sumber daya aparatur	71	%	15.000.000		%	0	73	%	0	74	%	147.500.000	75	%	136.812.500	75	%	299.312.500	Disperin
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72	Point	78.550.000	75	Point	62.650.000	77	Point	58.441.075	80	Point	72.368.582	82	Point	67.936.461	82	Point	339.946.118	Disperin
	4.1.1	INSPEKTORAT																			0	
		Urusan Rutin																				0
x xx xx 1	5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100	%	1.140.328.400	100	%	1.171.261.208	100	%	1.070.063.969	100	%	1.268.988.860	100	%	1.182.926.144	100	%	5.833.568.580	Inspektorat
x xx xx 2	5.1.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana APJP	100	%	613.055.000	100	%	1.033.462.500	100	%	526.000.000	100	%	623.783.400	100	%	581.478.463	100	%	3.377.779.363	Inspektorat
x xx xx 3	5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan pakaian Aparatur APJP	100	%	85.000.000	100	%	155.734.000	100	%	0	100	%	213.462.000	100	%	198.985.025	100	%	653.181.025	Inspektorat
x xx xx 5	5.1.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Jumlah Peserta Sosialisasi	100	%	114.000.000	100	%	113.000.000	100	%	0	100	%	134.006.700	100	%	124.918.377	100	%	485.925.077	Inspektorat
x xx xx 6	5.1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja	9	Dokumen	70.500.000			0	9	Dokumen	72.000.000	9	Dokumen	85.384.800	9	Dokumen	79.594.010	9	Dokumen	307.478.810	Inspektorat
3 0		Penunjang Urusan																				0
3 0 1		Inspektorat																				0
3 0 1 20	5.1.1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Objek pengawasan	412	Objek	5.915.000.000	412	Objek	5.728.389.322	412	Objek	1.548.000.000	412	Objek	3.849.250.500	412	Objek	4.151.048.721	412	Objek	21.191.688.543	Inspektorat
3 0 1 21	5.1.2.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur penawasan	Jumlah Diklat yang diikuti	8	Jenis	233.081.340	12	Jenis	213.212.468	12	Jenis	213.212.468	12	Jenis	218.564.101	12	Jenis	235.700.490	12	Jenis	1.113.770.866	Inspektorat
	4.2.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																				0
		Urusan Rutin																				0
x xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	%	1.310.185.700	100	%	925.386.880	100	%	960.362.216	100	%	996.614.801	100	%	929.024.469	100	%	5.121.574.066	Bappeda
x xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	1.080.000.000	100	%	583.265.336	100	%	530.000.000	100	%	776.735.250	100	%	724.057.131	100	%	3.694.057.717	Bappeda
x xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur	100	%	100.000.000	100	%	0	100	%	0	100	%	0	100	%	0	100	%	100.000.000	Bappeda
x xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	255.000.000	100	%	134.734.300	100	%	257.888.766	100	%	159.781.406	100	%	148.945.045	100	%	966.349.517	Bappeda
3 0		Penunjang Urusan																				0
3 0 2		Perencanaan																				0
3 0 2 20	5.1.1.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase meningkatnya kemampuan teknis aparat perencanaan	100	%	200.000.000	100	%	76.390.000	100	%	61.390.000	100	%	78.307.389	100	%	84.447.033	100	%	500.534.422	Bappeda
3 0 2 15	5.2.1.15	Program pengembangan data/informasi	Prosentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan	92	%	1.350.000.000	93	%	1.245.400.000		%	0		%	0		%	0	93	%	2.595.400.000	Bappeda
3 0 2 19	5.2.1.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			%	500.000.000		%	294.646.500		%	0		%	0		%	0		%	794.646.500	Bappeda
3 0 2 21	5.2.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan	100	%	2.900.000.000	100	%	3.551.592.000	100	%	1.170.000.000	100	%	1.428.000.000	100	%	1.176.587.500	100	%	10.226.179.500	Bappeda
3 0 2 22	5.2.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi	92	%	1.450.000.000	93	%	944.267.000	94	%	924.267.000	95	%	992.983.602	95	%	938.841.196	95	%	5.250.358.798	Bappeda
3 0 2 23	5.2.1.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya	92	%	850.000.000	93	%	1.116.104.000		%	0		%	0		%	0		%	1.966.104.000	Bappeda
3 0 2 24	5.2.1.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan prasarana dan SDA	92	%	432.430.000	93	%	147.942.000		%	0		%	0		%	0	93	%	580.372.000	Bappeda



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021														
3 0 2 26	5.2.1.26	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Prosentase kesesuaian program yang diencanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial pemerintahan		0		94	%	996.540.000	95	%	1.338.518.154	95	%	1.267.468.282	95	%	3.602.526.436	Bappeda				
3 0 2 27	5.2.1.27	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase kesesuaian pembangunan prasarana dan SDA terhadap perencanaan tata ruang yang strategis	92	%	500.000.000	93	%	500.000.000	0		0	0		0	93	%	1.000.000.000	Bappeda				
3 0 2 28	5.2.1.28	Program Perencanaan pembangunan fisik	Persentase kesesuaian program yang diencanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan fisik		0		94	%	942.183.500	95	%	1.103.259.305	95	%	1.008.393.648	95	%	3.053.836.453	Bappeda				
3 0 2 29	5.2.1.29	Program Pengembangan Data/Informasi Kelitbangan	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan		0		94	%	1.010.400.000	95	%	1.127.100.000	95	%	1.169.473.250	95	%	3.306.973.250	Bappeda				
3 0 2 30	5.2.1.30	Program Pengendalian dan Evaluasi	Prosentase Renstra/Renja yang disusun Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan		0		94	%	1.120.000.000	95	%	1.340.280.000	95	%	1.233.501.500	95	%	3.693.781.500	Bappeda				
3 0 2 31	5.2.2.31	Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD		0		95	%	963.287.000	96	%	1.138.784.544	96	%	1.233.318.403	96	%	3.335.389.947	Bappeda				
3 0 2 32	5.2.2.32	Program Kerja Sama Pembangunan	Persentase Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung		0	1	Dok		150.000.000	0		0	0		0			150.000.000	Bappeda				
	4.3.1	BADAN KEUANGAN DAERAH																	0				
x xx xx		Urusan Rutin																	0				
x xx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran ( operasional perkantoran)	100	%	3.841.664.148	100	%	6.796.555.910	100	%	6.069.585.956	100	%	7.376.434.706	100	%	32.132.046.283	BKD			
x xx xx	2	5.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	2.774.515.676	100	%	1.173.879.650	100	%	1.555.700.650	100	%	1.354.733.987	100	%	1.680.933.100	100	%	8.539.763.063	BKD
x xx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100	%	165.000.000	100	%	165.000.000	100	%	165.000.000	100	%	195.673.500	100	%	182.402.940	100	%	873.076.440	BKD
x xx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencana	100	%	440.000.000	100	%	280.197.570	100	%	0	100	%	355.180.000	100	%	329.356.161	100	%	1.404.733.731	BKD
x xx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	882.328.684	100	%	434.845.184	100	%	490.845.184	100	%	643.487.847	100	%	602.334.745	100	%	3.053.841.644	BKD
	4.4.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH																	0				
3 0		Penunjang Urusan																	0				
3 0 4		Kepegawaian																	0				
3 0 4 47	1.1.1.47	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi	14	%	9.084.734.678	18	%	5.641.279.500	16,84	%	9.611.000.000	17	%	2.958.000.000	17	%	3.600.790.266	17	%	30.895.804.444	BKPPD	
3 0 4 48	1.1.1.48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi sasaran kinerja	100	%	5.180.536.178	100	%	4.226.704.128	100	%	3.108.231.077	100	%	3.223.200.000	100	%	3.458.620.000	100	%	19.197.291.383	BKPPD	
3 0 4 49	1.1.2.49	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	0		0	100	%	1.129.660.000	100	%	1.188.223.500	100	%	1.293.375.934	100	%	3.611.259.434	100	%	3.611.259.434	BKPPD	
x xx xx		Urusan Rutin																	0				
x xx xx	1	1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan operasional Administrasi perkantoran	100	%	1.075.575.732	100	%	1.421.668.063	100	%	1.265.000.000	100	%	1.593.805.297	100	%	1.558.889.182	100	%	6.914.938.274	BKPPD
x xx xx	2	1.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	100	%	546.101.000	100	%	3.303.974.312	100	%	2.185.000.000	100	%	3.145.429.240	100	%	2.454.457.985	100	%	11.634.962.537	BKPPD
x xx xx	3	1.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100	%	132.000.000	100	%	132.000.000	100	%	0	100	%	156.538.800	100	%	145.922.352	100	%	566.461.152	BKPPD
x xx xx	4	1.2.1.4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas	100	%	0	100	%	581.350.000	100	%	0	100	%	0	100	%	0	100	%	581.350.000	BKPPD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021												
				Target	Anggaran		2018		2019		2020		2021											
x	xx	5	1.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	249.582.000	100	%	247.677.000	100	%	100.000.000	100	%	236.000.000	100	%	218.900.000	100	%	1.052.159.000	BKPPD	
x	xx	6	1.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100.000.000	100	%	101.688.149	100	%	105.000.000	100	%	124.519.500	100	%	116.074.598	100	%	547.282.247	BKPPD	
			5.1.1	SEKRETARIAT DAERAH																		0		
4	0			Pendukung																		0		
4	0	1		Sekretariat Daerah																		0		
4	0	1	15	5.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			220.000.000			0					0						220.000.000	Setda	
4	0	1	16	5.1.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	22		Kegiatan 7.018.637.000	22		Kegiatan 7.349.926.934	22		Kegiatan 6.730.286.339	22		Kegiatan 5.864.222.964	22		Kegiatan 6.324.003.707	22		Kegiatan 33.287.076.944	Setda
4	0	1	17	5.1.1.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1		Kegiatan 165.000.000			0			0			0			1		Kegiatan 165.000.000	Setda	
4	0	1	18	5.1.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	100	%	400.000.000			0			0			0			100	%	400.000.000	Setda	
4	0	1	20	5.1.1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	6.909.250.000	100	%	10.265.137.648	100	%	6.079.989.099	100	%	6.116.450.706	100	%	6.596.007.424	100	%	35.966.834.877	Setda
4	0	1	21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	100	%	616.290.000	100	%	599.896.507			0			0			100	%	1.216.186.507	Setda	
4	0	1	21	5.1.1.21	Program pendidikan politik masyarakat			0			1.014.000.000			0			0						1.014.000.000	Setda
4	0	1	25	5.1.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			1.449.500.000			4.207.531.778			0			0						5.657.031.778	Setda
4	0	1	27	5.1.1.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100	%	150.000.000	100	%	349.158.425	100	%	245.482.460	100	%	283.203.816	100	%	305.408.186	100	%	1.333.252.887	Setda
4	0	1	48	5.1.1.48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100	%	317.000.000	100	%	611.018.750	100	%	431.958.300	100	%	495.599.742	100	%	534.456.937	100	%	2.390.033.729	Setda
4	0	1	49	5.1.1.49	Program Penyebarluasan Informasi			0			0	100	%	2.995.053.900	100	%	3.532.465.020	100	%	3.809.425.857	100	%	10.336.944.777	Setda
4	0	1	50	5.1.1.50	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah			0			0	100	%	711.088.966	100	%	615.647.418	100	%	663.916.805	100	%	1.990.653.189	Setda
4	0	1	26	5.1.2.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100	%	6.002.119.000	100	%	7.171.489.681	100	%	4.676.664.950	100	%	5.724.105.564	100	%	6.172.901.087	100	%	29.747.280.282	Setda
4	0	1	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			0			0	100	%	2.806.631.600	100	%	3.214.749.810	100	%	3.466.801.497	100	%	9.488.182.907	Setda
x	xx	xx		Urusan Rutin																		0		
x	xx	xx	1	5.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	17.817.819.224	100	%	16.782.520.589	100	%	12.650.887.600	100	%	15.102.857.642	100	%	14.078.581.957	100	%	76.432.667.012	Setda
x	xx	xx	2	5.1.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	11.430.396.538	100	%	11.404.644.853	100	%	7.430.455.980	100	%	8.701.389.084	100	%	8.475.621.379	100	%	47.442.507.834	Setda
x	xx	xx	3	5.1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100	%	1.796.970.000	100	%	964.020.000	100	%	366.020.000	100	%	904.574.666	100	%	843.226.332	100	%	4.874.810.998	Setda
x	xx	xx	5	5.1.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	50.000.000	100	%	150.000.000	100	%	96.840.000	100	%	140.750.400	100	%	131.204.720	100	%	568.795.120	Setda
x	xx	xx	6	5.1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	468.100.000	100	%	456.240.258	100	%	770.819.600	100	%	934.398.677	100	%	871.028.419	100	%	3.500.586.955	Setda
			5.2.1	SEKRETARIAT DPRD																		0		
4	0			Pendukung																		0		
4	0	1		Sekretariat Daerah																		0		
4	0	1	15	1.1.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	85	%	23.157.383.325	85	%	29.758.742.500	90	%	15.613.497.803	95	%	17.106.504.745	95	%	18.705.360.595	95	%	104.341.488.968	Setwan
4	0	1	25	1.1.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100		411.370.372	100		945.605.372			0			0			100		1.356.975.744	Setwan	
4	0	1	26	1.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	95		Kegiatan 907.750.300	95		Kegiatan 1.141.705.250	95		Kegiatan 1.726.100.300	95		Kegiatan 1.760.622.306	95		Kegiatan 1.889.216.778	95		Kegiatan 7.425.394.934	Setwan
4	0	1	50	1.1.1.50	Program Penyebarluasan Informasi Publik			0			0	100		Kegiatan 945.605.372	100		Kegiatan 964.517.479	100		Kegiatan 1.034.965.080	100		Kegiatan 2.945.087.931	Setwan
x	xx	xx		Urusan Rutin																		0		
x	xx	xx	1	1.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	5.851.334.000	100	%	9.993.756.210	100	%	8.259.527.675	100	%	9.603.242.353	100	%	9.376.302.650	100	%	43.084.162.888	Setwan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021														
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021														
x	xx	xx	2	1.3.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.284.008.000	100	%	6.923.226.663			3.360.043.860			3.996.351.345			4.194.065.067			19.757.694.935	Setwan	
x	xx	xx	3	1.3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pemenuhan Pakaihan Dinas dalam rangka Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Stell	282.820.000	100	Stell	396.400.000	100	Stell	525.000.000	100	Stell	709.500.000	100	Stell	721.862.500	100	Stell	2.635.582.500	Setwan	
x	xx	xx	5	1.3.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	719.246.000	100	%	795.275.000	100	%	295.257.000	100	%	538.403.260	100	%	670.408.787	100	%	3.018.590.047	Setwan	
x	xx	xx	6	1.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan Dokumen Pelaporan	100	%	579.083.500	100	%	840.788.500	100	%	440.788.500	100	%	692.130.430	100	%	820.243.013	100	%	3.373.033.943	Setwan	
				6.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
x	xx	xx			Urusan Rutin																					
x	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	%	752.890.050	20	%	980.506.683	20	%	763.390.933	20	%	993.556.237	20	%	926.173.338	20	%	4.416.517.241	Kesbangpol	
x	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	20	%	236.745.000	20	%	170.600.000	20	%	195.000.000	20	%	577.667.485	20	%	539.420.450	20	%	1.719.432.935	Kesbangpol	
x	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	20	%	52.000.000	20	%	55.100.000	20	%	0	20	%	44.026.538	20	%	41.040.661	20	%	192.167.199	Kesbangpol	
x	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Rencana dan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	20	%	45.000.000	20	%	49.056.175	20	%	66.836.700	20	%	79.261.642	20	%	73.886.124	20	%	314.040.641	Kesbangpol	
				7.1.1	KECAMATAN CILEUNYI																					
6	0				Kewilayahan																					
6	0	1			Kecamatan																					
6	0	1	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	85	%	54.999.950	90	%	30.000.000	95	%	25.000.000	95	%	25.500.000	99	%	28.457.000	99	%	163.956.950	Cileunyi	
6	0	1	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)			0			0			0			0					0		0	Cileunyi
6	0	1	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	80	%	9.999.950	85	%	10.000.000	90	%	10.000.000	95	%	10.200.000	100	%	11.492.250	100	%	51.692.200	Cileunyi	
6	0	1	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pembinaan sebagai kewenangan kepala daerah kepada Camat	85	%	170.814.925	85	%	137.675.881	90	%	155.675.881	95	%	164.464.045	100	%	182.743.692	100	%	811.374.424	Cileunyi	
6	0	1	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			0		0	0		0	0		0		0				0		0	Cileunyi
6	0	1	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat kecamatan	85	%	30.000.000	90	%	25.000.000	95	%	25.000.000	99	%	25.500.000	100	%	28.457.000	100	%	133.957.000	Cileunyi	
6	0	1	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Terusunya dapter Skala Prioritas	90	%	65.788.900	95	%	67.400.000	95	%	60.000.000	99	%	58.140.000	100	%	65.505.825	100	%	316.834.725	Cileunyi	
6	0	1	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)			0		0	0		0	0		0		0				0		0	Cileunyi
6	0	1	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH (baket)			0		0	0		0	0		0		0				0		0	Cileunyi
6	0	1	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranitbmas dan pencegahan tindak kriminal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	80	%	83.524.875	90	%	47.486.000	90	%	45.000.000	95	%	45.900.000	100	%	49.252.500	100	%	271.163.375	Cileunyi	
6	0	1	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	85	%	97.999.850	89	%	90.000.000	90	%	30.000.000	95	%	30.600.000	100	%	34.476.750	100	%	283.076.600	Cileunyi	
6	0	1	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	85	%	59.999.875	89	%	39.870.000	90	%	32.000.000	95	%	32.640.000	100	%	32.835.000	100	%	197.344.875	Cileunyi	
6	0	1	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	89	%	46.964.900	90	%	56.000.000	95	%	35.000.000	98	%	40.800.000	100	%	39.402.000	100	%	218.166.900	Cileunyi	
6	0	1	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	85	%	25.051.550	90	%	20.000.000	95	%	25.000.000	96	%	20.400.000	100	%	22.984.500	100	%	113.436.050	Cileunyi	
6	0	1	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				20.000.000			40.000.000			0		0		0		100	%		60.000.000	Cileunyi	
6	0	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya kegiatan Gebyer 1000 Anak Paud	90	%	49.999.850	92	%	35.000.000	93	%	30.000.000	94	%	30.600.000	100	%	32.835.000				178.434.850	Cileunyi

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021								
6 0 1 66 5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Jumlah pembinaan siswa Pendidikan Menengah			0		0		0		0		0			0	Cleunyi
6 0 1 69 5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			0		0		0		0		0			0	Cleunyi
x xx xx	<b>Urusan Rutin</b>																0
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran dan Perlengkapan Kantor		100 %	272.350.000	100 %	237.101.139	100 %	228.999.270	100 %	278.775.000	100 %	257.296.090	100 %	1.274.521.499		Cleunyi
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		50 %	282.136.714	60 %	158.067.215	70 %	117.100.000	80 %	155.034.613	100 %	125.867.500	100 %	838.206.042		Cleunyi
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan Cleunyi		80 %	32.550.000	85 %	33.842.710	90 %	10.000.000	95 %	33.630.000	100 %	31.193.250	100 %	141.215.960		Cleunyi
x xx xx 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		0		60.000.000		70.800.000		0			130.800.000	Cleunyi
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksanannya laporan pengingkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	21.924.400	100 %	11.972.256	100 %	11.100.000	100 %	15.340.000	100 %	13.681.250	100 %	74.017.906		Cleunyi
	7.1.10	KECAMATAN ARJASARI															0
6 0		Kewilayahan															0
6 0 1		Kecamatan															0
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase penataan administrasi kependudukan		100 %	26.453.500	100 %	26.453.500	100 %	28.000.000	100 %	28.560.000	100 %	33.491.700	100 %	142.958.700		Arjasari
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				0		0		0		0		0			0	Arjasari
6 0 1 17 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan		100 %	40.541.000		0		0		0		0	100 %	40.541.000		Arjasari
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan KDH		100 %	219.342.750	100 %	20.000.000	100 %	47.000.000	100 %	47.940.000	100 %	48.650.525	100 %	382.933.275		Arjasari
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		100 %	100.000.000		0	100 %	15.000.000	100 %	15.300.000	100 %	16.417.500	100 %	146.717.500		Arjasari
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Prosentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Pemasarakan Olah Raga		100 %	65.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 %	188.435.000		Arjasari
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	prosentase fasilitasi usulan musrenbang kecamatan		100 %	50.701.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.800.000	100 %	43.780.000	100 %	215.281.000		Arjasari
6 0 1 53 5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	prosentase penyuluhan bagi ibu hamil		100 %	19.830.250		0	100 %	63.253.500	100 %	64.853.663	100 %	72.003.889	100 %	219.941.302		Arjasari
6 0 1 54 5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	prosentase penataan pemeliharaan taman			0		0	100 %	15.000.000	100 %	15.300.000	100 %	16.417.500	100 %	46.717.500		Arjasari
6 0 1 55 5.1.2.55	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	prosentase pemberdayaan perempuan di pedesaan bidang ekonomi produktif			0		0	100 %	15.000.000	100 %	15.300.000	100 %	16.417.500	100 %	46.717.500		Arjasari
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranitbmas dan pencegahan tindak kriminal	prosentasi pencegahan tindak kriminal		100 %	70.000.000	100 %	71.500.000	100 %	80.634.500	100 %	93.666.849	100 %	101.019.408	100 %	416.820.757		Arjasari
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	prosentase wawasan kebangsaan		100 %	40.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	61.200.000	100 %	65.670.000	100 %	276.870.000		Arjasari
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	prosentase peningkatan kapasitas pemerintah desa		100 %	33.993.900		0	100 %	16.000.000	100 %	16.320.000	100 %	17.512.000	100 %	83.825.900		Arjasari
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	prosentase pembinaan organisasi perempuan		100 %	45.980.000	100 %	38.500.000	100 %	40.000.000	100 %	40.800.000	100 %	43.780.000	100 %	209.060.000		Arjasari
6 0 1 61 5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan				40.000.000		40.300.000		0		0		0			80.300.000	Arjasari
6 0 1 62 5.1.2.62	Program pencegahan dini dan pengulangan korban bencana alam				0		0		0		0		0			0	Arjasari
6 0 1 64 5.1.2.64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	prosentase peserta pelatihan kewirausahaan			0	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 %	123.435.000		Arjasari
6 0 1 79 5.1.2.79	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	prosentase pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang sosial			0	100 %	40.000.000	100 %	35.000.000	100 %	25.500.000	100 %	27.362.500	100 %	127.862.500		Arjasari
6 0 1 80 5.1.2.80	Program Kelangkaan Pangan	prosentase pelaksanaan penyuluhan pangan			0	100 %	25.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.200.000	100 %	10.945.000	100 %	56.145.000		Arjasari
6 0 1 81 5.1.2.81	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	prosentase saran penyimpanan arsip			0	100 %	10.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.160.000	100 %	8.756.000	100 %	34.916.000		Arjasari

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD											
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																
6 0 1 82	5.1.2.82	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			0		0		0		0		0		0		0	Ajasari							
6 0 1 83	5.1.2.83	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	prosentase pembangunan drainase /gorong-gorong		0	100	%	73.131.000		0		0		0		0	100	%	73.131.000	Ajasari					
<b>Usuran Rutin</b>																			0						
x xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100	%	470.075.700	100	%	451.179.329	100	%	374.416.653	100	%	445.351.651	100	%	413.082.527	100	%	2.154.105.859	Ajasari	
x xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	60.000.000	0	100	%	35.000.000	100	%	41.300.000	100	%	38.307.500	100	%	174.607.500	100	%	174.607.500	Ajasari
x xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	10.102.500	100	%	45.000.000	100	%	10.000.000	100	%	11.800.000	100	%	10.945.000	100	%	87.847.500	Ajasari	
x xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	20	%	27.000.000	40	%	4.200.000	60	%	10.000.000	80	%	11.800.000	100	%	10.945.000	100	%	63.945.000	Ajasari	
x xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	88.250.000	100	%	50.000.000	100	%	8.253.500	100	%	10.126.787	100	%	11.751.664	100	%	168.381.951	Ajasari	
			7.1.11	KECAMATAN PANGALENGAN																			0		
6 0				Kewilayahan																			0		
6 0	1			Kecamatan																			0		
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan		0	100	%	11.700.000	100	%	11.900.000	100	%	12.198.690	100	%	13.155.121	100	%	13.155.121	100	%	48.953.811	Pangalengan	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Operasional dan pemeliharaan dan Persampahan	100	%	40.900.000	100	%	19.515.000	100	%	34.625.000	100	%	35.494.088	100	%	38.276.980	100	%	38.276.980	100	%	168.811.067	Pangalengan
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan hasil daerah (PAD)	0	100	%	21.715.000	100	%	11.850.000	100	%	12.147.435	100	%	13.099.847	100	%	13.099.847	100	%	58.812.282	Pangalengan		
6 0 1 18	5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Pembinaan organisasi Perempuan	100	%	56.000.000	100	%	85.500.000	100	%	40.000.000	100	%	41.004.000	100	%	44.218.895	100	%	44.218.895	100	%	266.722.895	Pangalengan
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	100	%	153.310.000	100	%	128.530.000	100	%	150.000.000	100	%	153.765.000	100	%	165.820.854	100	%	165.820.854	100	%	751.425.854	Pangalengan
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	100	%	41.500.000	0		0		0		0		0		0	100	%	41.500.000	100	%	41.500.000	Pangalengan	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Pembinaan Olahraga			39.600.000		18.000.000			18.200.000			18.656.820			20.119.597						114.576.417	Pangalengan	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah penyelenggaraan perencanaan musrenbang	100	%	36.613.125	100	%	32.396.750	100	%	47.193.640	100	%	48.378.200	100	%	52.171.264	100	%	52.171.264	100	%	216.752.980	Pangalengan
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam siskamwarkarsa	100	%	69.100.000	100	%	74.380.000	100	%	74.500.000	100	%	76.369.950	100	%	82.357.690	100	%	82.357.690	100	%	376.707.640	Pangalengan
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	100	%	25.600.000	100	%	66.625.000	100	%	12.000.000	100	%	12.301.200	100	%	13.265.668	100	%	13.265.668	100	%	129.791.868	Pangalengan
6 0 1 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda				19.600.000		0			0		0		0		0						19.600.000	Pangalengan	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase pelaksanaan monitoring , evaluasi dan Pelaporan	100	%	74.000.000	100	%	61.450.000	100	%	46.000.000	100	%	47.154.600	100	%	50.851.729	100	%	50.851.729	100	%	279.456.329	Pangalengan
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rata rata jumlah pemuda berprestasi skala kecamatan	0	80	%	11.200.000	85	%	17.000.000	90	%	17.426.700	95	%	18.793.030								64.419.730	Pangalengan
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah pengabdian sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam	100	%	37.800.000	100	%	32.250.000	100	%	25.000.000	100	%	25.627.500	100	%	27.636.809	100	%	27.636.809	100	%	148.314.309	Pangalengan
6 0 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pengelola PAUD	100	%	48.875.000	100	%	29.200.000	100	%	37.000.000	100	%	37.928.700	100	%	40.902.477	100	%	40.902.477	100	%	193.906.177	Pangalengan
<b>Usuran Rutin</b>																							0		
x xx	xx	1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100	%	452.200.267	100	%	327.248.268	100	%	314.500.000	100	%	372.965.550	100	%	347.671.057	100	%	1.814.585.142	Pangalengan	
x xx	xx	2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	100	%	155.075.000	100	%	101.500.000	100	%	100.000.000	100	%	118.590.000	100	%	110.547.236	100	%	585.712.236	Pangalengan	
x xx	xx	3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pemenuhan disiplin penunjang aparatur	34	Stell	30.982.500	34	Stell	31.005.000	34	Stell	31.000.000	34	Stell	36.762.900	34	Stell	34.269.643	170	Stell	164.020.043	Pangalengan	
x xx	xx	5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	%	25.850.000	100	%	14.450.000	100	%	19.227.803	100	%	22.802.252	100	%	21.255.804	100	%	103.585.859	Pangalengan	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
x xx xx 6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	40.276.000	100	%	26.835.000	100	%	25.000.000	100	%	29.647.500	100	%	27.636.809	100	%	149.395.309	Pangalengan
	7.1.12	KECAMATAN CIMALING																			0	
6 0		Kewilayahan																			0	
6 0 1		Kecamatan																			0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	indeks kepuasan masyarakat			55.000.000			33.731.686			38.000.000			38.953.800			42.007.950			207.693.436	Cimaung
6 0 1 16	5.1.2.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100	%	59.395.000	100	%	55.000.000	100	%	55.000.000	100	%	56.380.500	100	%	60.800.980	100	%	286.576.480	Cimaung
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah menilensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	100	%	16.000.000	100	%	12.000.000	100	%	12.000.000	100	%	12.301.200	100	%	13.265.668	100	%	65.566.868	Cimaung
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1	Keg	218.655.000	1	Keg	155.000.000	1	Keg	155.500.000	1	Keg	158.972.102	1	Keg	183.387.716	5	Keg	871.514.818	Cimaung
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan	1	Keg	55.500.000	1	Keg	35.000.000	1	Keg	35.000.000	1	Keg	35.878.500	1	Keg	38.691.533	5	Keg	200.070.033	Cimaung
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Prosentase program pembinaan dan pemasarakan olahraga	100	%	40.500.000	100	%	39.306.345	100	%	39.306.345	100	%	40.292.934	100	%	43.452.078	100	%	202.857.701	Cimaung
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1	Keg	60.500.000	1	Keg	32.000.000	1	Keg	32.000.000	1	Keg	32.803.200	1	Keg	35.375.116	5	Keg	192.678.316	Cimaung
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1	Keg	86.625.000	1	Keg	30.185.144	1	Keg	30.185.144	1	Keg	30.942.790	1	Keg	33.368.842	5	Keg	211.306.921	Cimaung
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase program pengembangan wawasan kebangsaan	100	%	51.000.000	100	%	91.000.000	100	%	41.000.000	100	%	42.029.100	100	%	45.324.367	100	%	270.353.467	Cimaung
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	%	55.500.000	100	%	39.000.000	100	%	39.000.000	100	%	39.978.900	100	%	43.113.422	100	%	216.592.322	Cimaung
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100	%	54.000.000	100	%	70.000.000	100	%	35.000.000	100	%	35.878.500	100	%	38.691.533	100	%	233.570.033	Cimaung
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	prosentase Jumlah Pemuda berprestasi di Kecamatan	1	Keg	21.525.000	1	Keg	25.000.000	1	Keg	25.000.000	1	Keg	25.627.500	1	Keg	27.636.809	5	Keg	124.789.309	Cimaung
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase siswa yang mengikuti sosialisasi			0	100	%	31.713.688	100	%	36.000.000	100	%	36.903.600	100	%	39.797.005	100	%	144.414.293	Cimaung
x xx xx		Urusan Rutin																			0	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100	%	225.820.000	100	%	134.420.074	100	%	250.035.168	100	%	263.973.859	100	%	249.091.339	100	%	1.123.340.440	Cimaung
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	100	%	243.035.498	100	%	204.687.500	100	%	278.745.689	100	%	104.076.000	100	%	74.973.250	100	%	905.517.937	Cimaung
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	%	20.000.000	100	%	21.000.000	100	%	21.000.000	100	%	17.700.000	100	%	24.079.000	100	%	103.779.000	Cimaung
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumah pelaksanaan study banding yang dilaksanakan	1	Keg	12.000.000	1	Keg	14.740.345	1	Keg	70.000.000	1	Keg	82.600.000	1	Keg	76.615.000	5	Keg	255.955.345	Cimaung
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	21.000.000	100	%	22.250.000	100	%	22.600.000	100	%	26.668.000	100	%	24.735.700	100	%	117.253.700	Cimaung
	7.1.13	KECAMATAN BANJARAN																			0	
6 0		Kewilayahan																			0	
6 0 1		Kecamatan																			0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KK Lingkup Kecamatan Tahun Berkenaan	75	%	27.500.000	80	%	12.500.000	85	%	25.000.000	90	%	25.627.500	95	%	27.636.809	95	%	118.264.309	Banjaran
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Perentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	75	%	18.700.000	80	%	13.000.000	85	%	15.000.000	90	%	15.376.500	95	%	16.582.085	95	%	78.658.585	Banjaran

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Tarjet	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pemeliharaan Kewenangan Bupati Kepala Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan		75	%	155.000.000	80	%	74.350.000	85	%	95.850.000	90	%	98.255.835	95	%	105.959.526	95	%	529.415.361	Banjaran
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan		75	%	46.000.000	80	%	20.000.000	85	%	25.000.000	90	%	25.627.500	95	%	27.636.809	95	%	144.264.309	Banjaran
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan		75	%	49.050.000	80	%	22.194.000	85	%	54.800.000	90	%	56.175.480	95	%	60.579.885	95	%	242.799.365	Banjaran
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPd		75	%	36.375.000	80	%	28.300.000	85	%	40.000.000	90	%	41.004.000	95	%	44.218.895	95	%	189.897.895	Banjaran
6 0 1 53 5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan ibu Hamil Yang Difasilitasi Untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan		75	%	27.000.000	80	%	19.000.000	85	%	35.000.000	90	%	35.878.500	95	%	38.691.533	95	%	155.570.033	Banjaran
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deeteksi Dini		75	%	41.750.000	80	%	65.888.439	85	%	47.251.000	90	%	48.437.000	95	%	52.234.674	95	%	255.561.113	Banjaran
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)		75	%	52.025.000	80	%	79.975.125	85	%	52.000.000	90	%	53.305.200	95	%	57.484.563	95	%	294.789.888	Banjaran
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		75	%	19.500.000	80	%	12.250.000	85	%	25.000.000	90	%	25.627.500	95	%	27.636.809	95	%	110.014.309	Banjaran
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM)		75	%	28.500.000	80	%	63.500.000	85	%	45.000.000	90	%	46.129.500	95	%	49.746.256	95	%	232.875.756	Banjaran
6 0 1 61 5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan		75	%	19.500.000	80	%	7.500.000	85	%	22.500.000	90	%	23.064.750	95	%	24.873.128	95	%	97.437.878	Banjaran
6 0 1 62 5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam		75	%	7.167.000	80	%	8.000.000	85	%	20.000.000	90	%	20.502.000	95	%	22.109.447	95	%	77.778.447	Banjaran
6 0 1 67 5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah capaian masing-masing kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%		75	%	26.500.000	80	%	15.000.000	85	%	28.000.000	90	%	28.702.800	95	%	30.953.226	95	%	129.156.026	Banjaran
<b>x xx xx</b>	<b>Urusan Rutin</b>																					0
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran		20	%	456.945.000	20	%	409.799.692	20	%	284.149.646	20	%	336.973.065	20	%	314.119.580	100	%	1.801.986.983	Banjaran
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		20	%	319.680.000	20	%	71.198.207	20	%	86.000.000	20	%	101.987.400	20	%	95.070.623	100	%	673.936.230	Banjaran
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur		20	%	26.000.000	20	%	24.975.000	20	%	29.000.000	20	%	34.391.100	20	%	32.058.699	100	%	146.424.799	Banjaran
x xx xx 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur		20	%	92.540.000	20	%	60.500.000	20	%	10.500.000	20	%	12.451.950	20	%	11.607.459	100	%	187.599.409	Banjaran
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Keterlaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20	%	58.616.949	20	%	38.500.000	20	%	28.900.000	20	%	34.272.510	20	%	31.948.151	100	%	192.237.610	Banjaran
	7.1.14	KECAMATAN CICALENGA																				0
6 0 1	Kewilayahan Kecamatan																					0
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat		75	%	30.067.000	76	%	26.467.000	77	%	30.067.000	78	%	30.821.682	79	%	33.238.237	79	%	150.860.918	Cicalengka
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah		100	%	71.892.000	100	%	108.867.000	100	%	71.892.000	100	%	73.696.489	100	%	79.474.619	100	%	405.822.108	Cicalengka
6 0 1 19 5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosrntase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				0			0			0						0				0

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021													
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			100	%	183.393.750	100	%	101.872.500	100	%	59.086.915	100	%	64.773.817	100	%	69.852.369	100	%	478.979.351	Cicalengka	
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			100	%	38.612.000	100	%	11.941.000	100	%	15.000.000	100	%	15.376.500	100	%	16.582.085	100	%	97.511.585	Cicalengka	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)			100	%	27.500.000	0	100	%	20.000.000	100	%	20.400.000	100	%	16.417.500	100	%	16.417.500	100	%	84.317.500	Cicalengka
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase dokumen perencanaan yang tepat waktu			1	%	39.920.000	1	%	34.040.000	1	%	40.000.000	1	%	41.004.000	1	%	44.218.895	1	%	199.182.895	Cicalengka	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas (%)			100	%	37.626.000	100	%	45.505.000	100	%	46.000.000	100	%	47.175.000	100	%	50.895.618	100	%	227.201.618	Cicalengka	
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau			100	%	4.800.000	100	%	4.800.000	100	%	4.800.000	100	%	4.896.000	100	%	5.253.600	100	%	24.549.600	Cicalengka	
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas			100	%	42.112.000	100	%	31.659.000	100	%	37.407.000	100	%	43.166.961	100	%	46.551.440	100	%	200.896.401	Cicalengka	
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase program pengembangan wawasan kebangsaan			100	%	76.830.000	100	%	93.035.000	100	%	40.000.000	100	%	41.004.000	100	%	44.218.895	100	%	295.087.895	Cicalengka	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)			100	%	48.380.000	100	%	86.875.000	100	%	32.703.000	100	%	28.686.480	100	%	30.918.115	100	%	227.562.595	Cicalengka	
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepeduaan	Jumlah organisasi kepeduaan (orang)			100	%	46.425.600	100	%	13.250.000	100	%	20.000.000	100	%	20.502.000	100	%	22.109.447	100	%	122.287.047	Cicalengka	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan			100	%	29.420.000	100	%	7.000.000	100	%	15.000.000	100	%	11.296.500	100	%	12.204.085	100	%	74.920.585	Cicalengka	
6 0 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini			100	%	36.726.000	100	%	10.851.000	100	%	15.000.000	100	%	15.376.500	100	%	16.582.085	100	%	94.535.585	Cicalengka	
x xx xx		Urusan Rutin																						0	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			100	%	278.834.408	100	%	293.233.438	100	%	289.736.444	100	%	342.347.649	100	%	320.163.962	100	%	1.525.315.901	Cicalengka	
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur			100	%	319.799.242	100	%	161.035.000	100	%	120.283.888	100	%	141.477.675	100	%	136.778.576	100	%	879.374.381	Cicalengka	
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase penunjang kerja aparatur			100	%	20.800.000	100	%	21.600.000	100	%	20.550.000	100	%	27.026.720	100	%	25.068.428	100	%	115.045.148	Cicalengka	
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentasi peningkatan kapasitas aparatur			100	%	32.742.000	100	%	28.134.000	100	%	28.134.000	100	%	33.198.120	100	%	30.792.663	100	%	153.000.783	Cicalengka	
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100	%	13.340.000	100	%	12.600.000	100	%	12.600.000	100	%	14.868.000	100	%	13.790.700	100	%	67.198.700	Cicalengka	
	7.1.15	KECAMATAN RANCAEKEK																						0	
6 0 1		Kewilayahan																						0	
6 0 1		Kecamatan																						0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			100	%	50.000.000	100	%	52.545.000	100	%	53.000.000	100	%	54.366.000	100	%	58.555.750	100	%	268.466.750	Rancaekek	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan			100	%	60.000.000	100	%	14.218.000	100	%	50.000.000	100	%	51.000.000	100	%	54.725.000	100	%	229.943.000	Rancaekek	
6 0 1 15	5.1.2.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah Anak Usia Dini mengikuti Pendidikan			100	%	50.000.000	100	%	47.822.000	100	%	50.000.000	100	%	51.255.000	100	%	55.272.250	100	%	254.349.250	Rancaekek	
6 0 1 15	5.1.2.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terberdayakan			100	%	50.000.000	100	%	40.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.600.000	100	%	32.835.000	100	%	183.435.000	Rancaekek	
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			100	%	5.000.000	100	%	5.304.500	100	%	5.000.000	100	%	5.100.000	100	%	5.472.500	100	%	25.877.000	Rancaekek	
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			100	%	925.621.150	100	%	942.665.195	100	%	341.604.050	100	%	350.220.266	100	%	385.822.462	100	%	2.945.933.123	Rancaekek	



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021												
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021												
6 0 1 21	5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100	%	30.000.000	100	%	35.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.600.000	100	%	32.835.000	100	%	158.435.000	Rancaekek		
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan			0			0			0		0			0			0	Rancaekek			
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)	100	%	45.000.000	100	%	23.204.580	100	%	30.000.000	100	%	30.600.000	100	%	32.835.000	100	%	161.639.580	Rancaekek		
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	100	%	60.000.000	100	%	59.025.000	100	%	60.000.000	100	%	61.506.000	100	%	66.326.700	100	%	306.857.700	Rancaekek		
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persiapan oleh tenaga kesehatan (orang)	100	%	69.500.000	100	%	35.000.000	100	%	70.000.000	100	%	71.757.000	100	%	77.381.150	100	%	323.638.150	Rancaekek		
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH (paket)	100	%	58.600.000	100	%	21.200.000	100	%	21.200.000	100	%	21.732.120	100	%	23.422.300	100	%	146.154.420	Rancaekek		
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	100	%	65.945.000	100	%	58.629.500	100	%	145.250.000	100	%	148.206.000	100	%	131.951.826	100	%	549.982.326	Rancaekek		
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase program pengembangan wawasan kebangsaan	100	%	30.000.000	100	%	95.218.000	100	%	45.218.000	100	%	46.308.000	100	%	49.936.563	100	%	266.680.563	Rancaekek		
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina (orang)			0	100	%	47.500.000	100	%	70.000.000	100	%	71.400.000	100	%	76.615.000	100	%	265.515.000	Rancaekek		
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100	%	40.000.000	100	%	108.705.200	100	%	85.000.000	100	%	86.700.000	100	%	93.032.500	100	%	413.437.700	Rancaekek		
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Peserta pembinaan pemuda (orang)	100	%	25.000.000	100	%	10.609.000	100	%	10.609.000	100	%	10.863.000	100	%	11.711.150	100	%	68.792.150	Rancaekek		
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan (jenis)			0	100	%	7.956.750	100	%	7.950.000	100	%	8.109.000	100	%	8.756.000	100	%	32.771.750	Rancaekek		
x xx	xx	Usuran Rutin																			0			
x xx	xx	1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	100	%	484.358.150	100	%	422.170.873	100	%	553.374.214	100	%	651.814.253	100	%	605.492.596	100	%	2.717.210.086	Rancaekek	
x xx	xx	2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	436.591.885	100	%	881.549.129	100	%	843.825.000	100	%	1.008.192.000	100	%	963.833.118	100	%	4.133.991.132	Rancaekek	
x xx	xx	3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur	100	%	57.200.000	100	%	48.400.000	100	%	81.750.000	100	%	96.465.000	100	%	89.475.375	100	%	373.290.375	Rancaekek	
x xx	xx	5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				0		0			0		0			0			0	Rancaekek			
x xx	xx	6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	12.000.000	100	%	19.096.200	100	%	19.000.000	100	%	22.538.000	100	%	21.014.400	100	%	93.648.600	Rancaekek	
		7.1.16	KECAMATAN CIKANJUNG																		0			
6 0			Kewilayahan																		0			
6 0	1		Kecamatan																		0			
6 0	1	15	5.1.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan	100	%	20.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	51.255.000	100	%	55.273.618	100	%	226.528.618	Cikancung
6 0	1	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100	%	100.000.000	100	%	25.000.000	100	%	15.363.650	100	%	20.400.000	100	%	21.890.000	100	%	182.653.650	Cikancung
6 0	1	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	20.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.376.500	100	%	16.582.085	100	%	81.958.585	Cikancung
6 0	1	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	%	161.792.196	100	%	99.175.000	100	%	75.000.000	100	%	77.010.000	100	%	83.184.736	100	%	496.161.932	Cikancung
6 0	1	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	%	20.000.000	100	%	39.000.000	100	%	29.000.000	100	%	29.778.900	100	%	32.168.422	100	%	149.947.322	Cikancung
6 0	1	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Olah Raga prestasi Yang Dibina Oleh Kecamatan	100	%	100.000.000	100	%	47.875.000	100	%	40.000.000	100	%	41.055.000	100	%	44.328.618	100	%	273.258.618	Cikancung

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Tarjet	Anggaran	2018		2019		2020		2021											
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Usulan Kecamatan Yang Diakomodir Oleh Perangkat Daerah	100	%	40.000.000	100	%	27.879.151	100	%	28.481.026	100	%	29.195.900	100	%	31.484.987	100	%	157.041.063	Cikancing	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persalinan yang ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompoten skala Kecamatan	100	%	20.000.000	100	%	20.000.000	100	%	20.000.000	100	%	20.502.000	100	%	22.109.447	100	%	102.611.447	Cikancing	
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Peran Masyarakat Yang Mengikuti Pengelolaan RTH	0	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.376.500	100	%	16.582.085	100	%	61.958.585	100	%	61.958.585	Cikancing
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dimiditaksi dini	100	%	100.000.000	100	%	51.425.000	100	%	45.000.000	100	%	46.180.500	100	%	49.855.980	100	%	292.461.480	Cikancing	
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	100	%	80.000.000	100	%	90.000.000	100	%	33.145.460	100	%	30.804.000	100	%	33.273.895	100	%	267.223.355	Cikancing	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	100	%	25.000.000	100	%	40.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.600.000	100	%	32.835.000	100	%	158.435.000	Cikancing	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100	%	50.000.000	100	%	71.500.000	100	%	15.363.650	100	%	18.717.418	100	%	18.122.553	100	%	173.703.621	Cikancing	
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100	%	20.000.000	0	100	%	76.490.890	100	%	80.361.329	100	%	90.542.401	100	%	267.394.620	100	%	267.394.620	Cikancing
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100	%	100.000.000	0	100	%	54.636.350	100	%	51.000.000	100	%	54.725.000	100	%	260.361.350	100	%	260.361.350	Cikancing
<b>Urusan Rutin</b>																						0	
x xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi	100	%	248.132.000	100	%	173.002.569	100	%	182.205.519	100	%	215.002.512	100	%	199.423.941	100	%	1.017.766.541	Cikancing
x xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.370.000.000	100	%	236.250.000	100	%	115.000.000	100	%	135.700.000	100	%	125.867.500	100	%	1.982.817.500	Cikancing
x xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	26.000.000	100	%	33.000.000	100	%	33.000.000	100	%	39.134.700	100	%	36.480.588	100	%	167.615.288	Cikancing
x xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	50.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	35.577.000	100	%	33.164.171	100	%	178.741.171	Cikancing
x xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	100	%	19.000.000	100	%	12.000.000	100	%	12.000.000	100	%	14.230.800	100	%	13.265.668	100	%	70.496.468	Cikancing
7.1.17 KECAMATAN NAGREG																						0	
Kewilayahan																						0	
Kecamatan																						0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi kependudukan	60	%	50.000.000	65	%	25.000.000	70	%	25.000.000	75	%	25.627.500	80	%	27.636.809	80	%	153.264.309	Nagreg	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	3	Unit	30.000.000	3	Unit	30.000.000	3	Unit	30.000.000	3	Unit	30.753.000	3	Unit	33.164.171	3	Unit	153.917.171	Nagreg	
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	60	%	10.000.000	65	%	9.000.000	70	%	10.000.000	75	%	10.251.000	80	%	11.054.724	80	%	50.305.724	Nagreg	
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	140.965.236	100	%	149.979.236	100	%	140.965.236	100	%	144.503.463	100	%	155.833.172	100	%	732.246.343	Nagreg	
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peserta yang mengikuti Bimtek Kelembagaan Desa	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.627.500	100	%	27.636.809	100	%	128.264.309	Nagreg	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Meningkatnya Kegiatan di berbagai cabang OR	100	%	80.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.753.000	100	%	33.164.171	100	%	203.917.171	Nagreg	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pembangunan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	100	Jenis	30.000.000	100	Jenis	27.985.000	100	Jenis	30.000.000	100	Jenis	30.753.000	100	Jenis	33.164.171	100	Jenis	151.902.171	Nagreg	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021										
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Peserta yang mengikuti Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	60	50.000.000	60	22.500.000	60	25.000.000	65	25.627.500	70	27.636.809	70	150.764.309	Nagreg			
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH / Pembelian Lahan Untuk Ajun-Ajun	100	50.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	153.264.309	Nagreg			
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dinideteleksi dini	100	70.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	173.264.309	Nagreg			
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	100	100.000.000	100	75.000.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	253.264.309	Nagreg			
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang dibina (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nagreg			
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100	50.000.000	100	52.500.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	180.764.309	Nagreg			
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang ikut dalam kegiatan	100	50.000.000	100	13.107.139	100	13.107.139	100	0	14.489.580	100	90.703.858	Nagreg				
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam yang dilaksanakan pengadaannya	100	25.000.000	100	23.900.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	127.164.309	Nagreg			
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	persentase Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100	50.000.000	100	24.000.000	100	25.000.000	100	25.627.500	100	27.636.809	100	152.264.309	Nagreg			
6 0 1 67	5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nagreg			
6 0 1 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nagreg			
x xx xx		<b>Usuran Rutin</b>																	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Pelayanan Perkantoran	100	297.835.976	100	328.733.823	100	354.420.124	100	420.306.824	100	391.801.651	100	1.793.098.398	Nagreg			
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100	285.000.000	100	203.675.176	100	115.000.000	100	136.378.500	100	127.129.322	100	867.182.998	Nagreg			
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100	31.500.000	100	33.800.000	100	31.320.000	100	37.142.388	100	34.623.394	100	168.385.782	Nagreg			
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pelaksanaan Bimtek Pearturan Perundang-undangan	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	47.436.000	100	44.218.895	100	211.654.895	Nagreg			
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100	15.416.700	100	14.371.141	100	68.787.841	Nagreg			
	7.1.18	<b>KECAMATAN BALEENDAH</b>																	
6 0 1		<b>Kewilayahan</b>																	
6 0 1		<b>Kecamatan</b>																	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	75	56.000.000	80	57.120.000	85	61.292.000	85	174.412.000	Baleendah					
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pemenuhan pengelolaan persampahan	98	10.000.000	98	16.000.000	98	40.000.000	98	20.400.000	98	43.780.000	98	130.180.000	Baleendah			
6 0 1 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	98	6.000.000	98	14.000.000	98	16.320.000	98	15.323.000	98	51.643.000	Baleendah				
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan HDH	Persentase pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	4.145.901.376	3.757.637.030	2.001.702.215	1.997.723.883	2.284.218.972	14.187.183.475										
6 0 1 49	5.1.2.49	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan	Persentase Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan	98	10.000.000	0	8.000.000	98	10.200.000	0	98	28.200.000	98	161.912.000	Baleendah				
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		20.000.000	16.000.000	986.420.000	1.008.188.400	1.090.581.690	3.121.190.090										
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	Persentase Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	0	98	66.000.000	98	58.000.000	98	20.400.000	98	17.512.000	98	161.912.000	Baleendah				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021														
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90	%	30.292.500	90	%	90.000.000	90	%	90.000.000	90	%	91.800.000	90	%	101.241.250	90	%	403.333.750	Baleendah	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100	%	10.000.000	0	100	%	12.000.000	0	100	%	10.945.000	100	%	10.945.000	100	%	32.945.000	Baleendah		
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	98	%	110.000.000	98	%	100.000.000	98	%	106.000.000	98	%	87.720.000	98	%	21.890.000	98	%	425.610.000	Baleendah	
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				10.000.000			25.806.000			10.000.000			20.400.000			21.890.000			88.096.000	Baleendah	
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0	98	%	50.000.000	98	%	100.000.000	98	%	115.260.000	98	%	123.678.500	98	%	388.938.500	Baleendah	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			0	98	%	118.000.000	98	%	58.000.000	98	%	164.220.000	98	%	107.261.000	98	%	447.481.000	Baleendah	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				20.000.000			62.000.000			68.000.000			89.760.000			74.426.000			314.186.000	Baleendah	
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan				0			8.000.000			6.000.000			6.120.000			8.756.000			28.876.000	Baleendah	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	98	%	50.000.000	98	%	100.000.000	98	%	80.000.000	98	%	102.000.000	98	%	103.977.500	98	%	435.977.500	Baleendah	
6 0 1 64	5.1.2.64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				5.000.000			0			10.000.000			0			10.945.000			25.945.000	Baleendah	
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase kegiatan pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan			0			0	98	%	12.000.000	98	%	0	98	%	10.945.000	98	%	22.945.000	Baleendah	
6 0 1 68	5.1.2.68	Program Pennebangan Linukunan Sehat				10.000.000			20.000.000			20.000.000			10.200.000			21.890.000			82.090.000	Baleendah	
6 0 1 73	5.1.2.73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi			0	0	1	Keg			8.000.000	1	Keg	8.160.000	1	Keg	8.756.000	3	Keg	24.916.000	Baleendah	
6 0 1 75	5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				0			6.000.000			6.000.000			6.120.000			6.567.000			24.687.000	Baleendah	
x xx xx		Urusan Rutin																			0		
x xx xx 1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Penuhan Administrasi Perkantoran	100	%	1.230.954.028	100	%	1.824.499.862	100	%	1.719.813.200	100	%	2.061.628.587	100	%	1.927.476.000	100	%	8.764.371.677	Baleendah	
x xx xx 2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96	%	1.090.458.973	96	%	2.208.879.957	96	%	1.710.834.671	96	%	2.073.161.753	96	%	1.925.615.653	96	%	9.008.951.007	Baleendah	
x xx xx 3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	116.800.000	100	%	182.200.000	100	%	182.200.000	100	%	149.919.000	100	%	141.245.225	100	%	772.364.225	Baleendah	
x xx xx 5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	0	96	%	20.000.000	96	%	23.600.000	96	%	21.890.000	96	%	65.490.000	96	%	65.490.000	Baleendah
x xx xx 6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	39.000.000	100	%	9.150.000	100	%	39.500.000	100	%	46.610.000	100	%	43.232.750	100	%	177.492.750	Baleendah	
		7.1.19	KECAMATAN PACET																		0		
6 0		Kewilayahan																			0		
6 0 1		Kecamatan																			0		
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan			50.000.000			25.000.000			25.000.000			30.600.000			27.362.500			157.962.500	Pacet	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan Pelayanan Sampah Skala Kecamatan	100	%	100.000.000	0	100	%	50.500.000	100	%	51.510.000	100	%	64.028.250	100	%	266.038.250	100	%	266.038.250	Pacet
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				12.000.000			0			0			0			0			12.000.000	Pacet	
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				149.093.934			70.500.000			0			0			0			219.593.934	Pacet	
6 0 1 22	5.1.2.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				0			0			0			0			0			0	Pacet	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Club Olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	100	%	75.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.000.000	100	%	25.500.000	100	%	27.362.500	100	%	177.862.500	Pacet	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah usulan kegiatan yang diakomodir RRPD	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000	100	%	40.000.000	100	%	40.800.000	100	%	43.780.000	100	%	214.580.000	Pacet	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah penyuluhan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100	%	40.000.000			0			0			0			0	100	%	40.000.000	Pacet	
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH tingkat kecamatan	2	buah	36.000.000	3	buah	33.243.460			0			0			0			69.243.460	Pacet	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	20	Orang	114.600.000	25	Orang	108.467.500	30	Orang	108.321.247	35	Orang	107.551.710	40	Orang	114.457.411	40	Orang	553.397.868	Pacet	
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan			63.600.000			50.000.000			50.000.000			51.000.000			54.725.000			269.325.000	Pacet	
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				41.000.000			0			0			0			0			41.000.000	Pacet	
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan Organisasi perempuan tingkat kecamatan	100	%	40.000.000	100	%	85.500.000	100	%	80.000.000	100	%	81.600.000	100	%	87.560.000	100	%	374.660.000	Pacet	
6 0 1 61 5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	10	Unit	25.000.000	15	Unit	25.000.000	20	Unit	25.000.000	30	Unit	25.500.000	30	Unit	27.362.500	30	Unit	127.862.500	Pacet	
6 0 1 62 5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan Kejadian bencana alam	100	%	20.000.000			0			0			0			0			20.000.000	Pacet	
x xx xx	<b>Urusan Rutin</b>																			0		
x xx xi 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	100	%	321.467.820	100	%	236.105.693	100	%	231.205.693	100	%	275.182.718	100	%	257.432.631	100	%	1.321.394.555	Pacet	
x xx xi 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	%	207.500.000	100	%	129.856.100	100	%	115.156.100	100	%	135.479.721	100	%	126.038.351	100	%	714.030.273	Pacet	
x xx xi 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur				16.500.000			30.235.650			30.000.000			35.678.067			32.610.860			145.024.577	Pacet	
x xx xi 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				15.000.000			15.913.500			15.713.260			18.541.647			0			65.168.407	Pacet	
x xx xi 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.000.000			8.381.110			7.000.000			8.260.000			7.661.500			44.302.610	Pacet	
					7.12															0		
6 0	<b>KECAMATAN CLENGKRANG</b>																			0		
6 0 1	<b>Kecamatan</b>																			0		
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase program penataan administrasi kependudukan	100	%	32.800.000	100	%	28.500.000	100	%	28.500.000	100	%	29.215.350	100	%	31.505.962	100	%	150.521.312	Olangkrang	
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	100	%	30.150.000	100	%	24.550.000	100	%	25.000.000	100	%	25.627.500	100	%	27.636.809	100	%	132.964.309	Olangkrang	
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	136.598.712	100	%	76.675.000	100	%	78.010.000	100	%	80.114.574	100	%	86.553.134	100	%	457.951.420	Olangkrang	
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	%	19.500.000	100	%	17.500.000	100	%	17.500.000	100	%	17.939.250	100	%	19.345.766	100	%	91.785.016	Olangkrang	
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	100	%	20.000.000	100	%	20.000.000	100	%	20.000.000	100	%	20.502.000	100	%	22.109.447	100	%	102.611.447	Olangkrang	
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1	Keg	35.600.000	1	Keg	34.800.000	1	Keg	35.600.000	1	Keg	36.493.560	1	Keg	39.354.816	1	Keg	181.848.376	Olangkrang	
6 0 1 53 5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100	%	26.000.000	100	%	26.000.000	100	%	26.000.000	100	%	26.652.600	100	%	28.742.281	100	%	133.394.881	Olangkrang	
6 0 1 54 5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Program Pengelolaan RTH	100	%	19.500.000	100	%	22.375.000	100	%	22.375.000	100	%	22.936.613	100	%	24.734.944	100	%	111.921.556	Olangkrang	
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100	%	67.160.000	100	%	34.360.000	100	%	34.360.000	100	%	35.222.436	100	%	37.984.030	100	%	209.086.466	Olangkrang	
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya peningkatan toleransi antar umat beragama	2	Keg	34.360.000	2	Keg	78.303.750	2	Keg	34.360.000	2	Keg	35.222.436	2	Keg	37.984.030	2	Keg	220.230.216	Olangkrang	
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	%	19.750.000	100	%	19.389.994	100	%	19.389.994	100	%	19.876.682	100	%	21.435.102	100	%	99.841.772	Olangkrang	
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				34.000.000			42.925.000			22.375.000			22.936.613			24.734.944			146.971.556	Olangkrang	
6 0 1 61 5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan				19.500.000			19.375.000			19.750.000			20.245.725			21.833.078			100.703.803	Olangkrang	
6 0 1 62 5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	tersedianya sarana dan prasarana	1	Keg	49.000.000	1	Keg	16.848.809	1	Keg	16.848.809	1	Keg	17.271.714	1	Keg	18.625.892	1	Keg	118.595.224	Olangkrang	
6 0 1 65 5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0	25	%	25.575.000	25	%	26.000.000	25	%	26.652.600	25	%	28.742.281	25	%		25	%	106.969.881	Olangkrang
6 0 1 66 5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100	%	26.000.000			0			0			0			0	100	%	26.000.000	Olangkrang	
x xx xx	<b>Urusan Rutin</b>																			0		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021										
x xxx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran			279.564.472	100	%	308.144.546	100	%	236.010.000	100	%	279.671.800	100	%	258.860.195	100	%	1.362.251.013	Cilengkrang	
x xxx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			325.392.666	100	%	151.800.000	100	%	219.000.000	100	%	259.417.100	100	%	241.549.829	100	%	1.197.159.595	Cilengkrang	
x xxx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Peningkatan disiplin aparatur			22.000.000	100	%	25.740.000	100	%	26.730.000	100	%	31.541.400	100	%	29.255.985	100	%	135.267.385	Cilengkrang	
x xxx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	Dok	2.000.000	1	Dok	2.000.000	1	Dok	10.451.444	1	Dok	12.890.026	1	Dok	14.122.792	1	Dok	41.464.262	Cilengkrang	
	7.1.20	KECAMATAN KERTASARI																			0		
6 0 1		Kewilayahan																			0		
6 0 1		Kecamatan																			0		
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase kegiatan penataan administrasi kependudukan	1	Keg	40.000.000	1	Keg	22.000.000	1	Keg	22.000.000	1	Keg	20.400.000	1	Keg	21.890.000	1	Keg	126.290.000	Kertasari	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pengembangan kinerja pengelola persampahan	70	%	30.000.000	90	%	20.000.000	90	%	20.000.000	95	%	24.480.000	100	%	27.362.500	100	%	121.842.500	Kertasari	
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan	100	%	12.000.000	100	%	11.669.900	100	%	11.669.900	100	%	12.240.000	100	%	13.134.000	100	%	60.713.800	Kertasari	
6 0 1 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tercapainya program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	100	%	30.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.300.000	100	%	16.417.500	100	%	91.717.500	Kertasari	
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	112.500.000	100	%	65.000.000	100	%	103.174.750	100	%	92.032.130	100	%	106.193.389	100	%	478.900.268	Kertasari	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah cabang olahraga dan atlet yang berpotensi di tingkat Kecamatan	100	%	25.000.000	100	%	23.000.000	100	%	13.000.000	100	%	15.300.000	100	%	18.606.500	100	%	94.906.500	Kertasari	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	100	%	50.000.000	100	%	41.000.000	100	%	41.000.000	100	%	40.800.000	100	%	43.780.000	100	%	216.580.000	Kertasari	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeter skala Kecamatan	30	%	42.000.000	30	%	10.396.201	0	%	0	0	%	0	30	%	52.396.201	30	%	52.396.201	Kertasari	
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Asri	0	50	%	60.000.000	50	%	10.000.000	50	%	12.240.000	50	%	18.606.500	50	%	100.846.500	50	%	100.846.500	Kertasari
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini.	80	%	62.000.000	100	%	80.000.000	80	%	80.000.000	80	%	78.540.000	80	%	63.481.000	80	%	364.021.000	Kertasari	
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	80	%	37.000.000	80	%	60.000.000	80	%	30.000.000	80	%	32.640.000	80	%	38.307.500	80	%	197.947.500	Kertasari	
6 0 1 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	persentase warga masyarakat/Tenaga Kerja yang berwirausaha	20	%	30.000.000	20	%	21.000.000	20	%	10.000.000	20	%	20.400.000	20	%	21.890.000	20	%	103.290.000	Kertasari	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur	100	%	24.000.000	100	%	19.188.450	100	%	34.188.615	100	%	34.680.000	100	%	36.665.750	100	%	148.722.815	Kertasari	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100	%	37.000.000	100	%	65.001.750	100	%	23.339.800	100	%	26.010.000	100	%	32.835.000	100	%	184.186.550	Kertasari	
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Tercapainya program peningkatan peran serta kepemudaan	100	%	13.000.000	100	%	11.669.900	100	%	11.669.900	100	%	10.761.612	100	%	10.945.000	100	%	58.046.412	Kertasari	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tenwujudnya kegiatan sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0	0	%	0	0	%	10.000.000	30	%	10.200.000	30	%	10.945.000	30	%	31.145.000	30	%	31.145.000	Kertasari
6 0 1 63	5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tenwujudnya kegiatan penyuluhan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0	0	%	0	0	%	12.000.000	30	%	12.240.000	30	%	13.134.000	30	%	37.374.000	30	%	37.374.000	Kertasari
6 0 1 74	5.1.2.74	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah sosialisasi peningkatan kesehatan masyarakat	4	Keg	0	4	Keg	21.000.000	4	Keg	0	0	%	0	0	%	21.000.000	4	Keg	21.000.000	Kertasari	
6 0 1 75	5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	100	%	25.000.000	0	0	0	0	%	0	0	%	0	0	%	25.000.000	100	%	25.000.000	Kertasari	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab								
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021															
6 0 1 78	5.1.2.78	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			0	100	%	19.174.750			0			0	100	%	19.174.750	Kertasari					
6 0 1 82	5.1.2.82	Program Peningkatan Kesemestaan Kerja				0			0			0			0			0	Kertasari					
<b>Usuran Rutin</b>																		0						
x xxx	xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran		100	%	299.341.965	100	%	210.567.209	100	%	237.936.800	100	%	336.874.424	100	%	297.963.179	100	%	1.382.683.577	Kertasari
x xxx	xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tercapainya program Sarana dan Prasarana Aparatur		100	%	259.395.000	100	%	171.636.000	100	%	156.071.780	100	%	139.038.598	100	%	133.417.799	100	%	859.559.176	Kertasari
x xxx	xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya program peningkatan disiplin aparatur		100	%	30.500.000	100	%	30.800.000	100	%	21.500.000	100	%	12.390.000	100	%	23.531.750	100	%	118.721.750	Kertasari
x xxx	xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1	%	27.500.000	1	%	35.000.000	1	%	42.500.000	1	%	54.870.000	1	%	51.441.500	1	%	211.311.500	Kertasari
x xxx	xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	3.500.000	100	%	3.500.000	100	%	3.500.000	100	%	4.130.000	100	%	3.830.750	100	%	18.460.750	Kertasari
7.1.21 KECAMATAN CIPARAY																								
6 0 1 1 Kewilayahan																								
6 0 1 1 Kecamatan																								
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	persentase kepemilikan KTP		66	%	36.300.000	66	%	36.300.000	67	%	30.000.000	67	%	30.600.000	67	%	32.835.000	67	%	166.035.000	Ciparay	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	prosentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		12	%	25.000.000	12	%	25.000.000	13	%	25.000.000	13	%	25.500.000	13	%	27.362.500	13	%	127.862.500	Ciparay	
6 0 1 16	5.1.2.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaku UMKM (Unit)		0	42	Unit	12.300.000			0			0	42	Unit	12.300.000			0	42	Unit	12.300.000	Ciparay
6 0 1 17	5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang keukunan dalam kehidupan beragama		50	%	67.700.000	50	%	108.287.500	50	%	48.950.000	50	%	49.929.000	50	%	53.575.775	50	%	328.442.275	Ciparay	
6 0 1 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	Ciparay
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah evaluasi berkala		14	Desa	156.293.934	14	Desa	124.209.115	14	Desa	124.000.000	14	Desa	126.480.000	14	Desa	135.718.000	14	Desa	666.701.049	Ciparay	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga	Jumlah pengiriman atlet pelajar dan pelatih dan popwilda jaber		10	Orang	30.000.000	10	Orang	29.475.000		0		0	20	Orang	59.475.000		0	20	Orang	59.475.000	Ciparay	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase program kegiatan yang terakomodir		90	%	45.000.000	90	%	45.000.000	90	%	30.000.000	90	%	30.600.000	90	%	32.835.000	90	%	183.435.000	Ciparay	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil k4		74	%	50.000.000	74	%	50.000.000	74	%	30.000.000	74	%	30.600.000	74	%	32.835.000	74	%	193.435.000	Ciparay	
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas		20	%	42.980.000	20	%	42.980.000	20	%	40.000.000	20	%	40.800.000	20	%	43.780.000	20	%	210.540.000	Ciparay	
6 0 1 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda bagi pemuda pelajar usia 16-30 th, FKWM dan FKRR (orang)		280	Orang	24.650.000	280	Orang	24.650.000		0		0	280	Orang	49.300.000		0	280	Orang	49.300.000	Ciparay	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur		60	%	25.000.000	60	%	25.000.000	61	%	25.000.000	61	%	25.500.000	61	%	27.362.500	61	%	127.862.500	Ciparay	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)		420	Orang	50.000.000	420	Orang	97.087.500	420	Orang	50.000.000	420	Orang	51.000.000	420	Orang	54.725.000	420	Orang	302.812.500	Ciparay	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana alam		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	Ciparay
6 0 1 63	5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase korban bencana yang tertangani		20	%	12.300.000		0		0		0		0		0		0	20	%	12.300.000	Ciparay	
6 0 1 70	5.1.2.70	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		0		0		0		20	%	12.980.000	20	%	13.239.600	20	%	14.206.610	20	%	40.426.210	Ciparay	
6 0 1 72	5.1.2.72	Program Penciptaan Klim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang maju dan kondusif		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	Ciparay
6 0 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase anak putus sekolah		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	Ciparay
<b>Usuran Rutin</b>																								
x xxx	xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran		90	%	236.620.021	90	%	211.789.646	90	%	283.532.498	90	%	340.230.119	90	%	342.745.640	90	%	1.414.917.924	Ciparay

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab										
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD												
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021														
x xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			90	%	448.260.591	90	%	116.513.362	90	%	188.510.000	90	%	222.441.800	90	%	184.434.195	90	%	1.160.159.948	Ciparay		
x xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			90	%	18.150.000	90	%	18.150.000	90	%	18.150.000	90	%	21.417.000	90	%	19.865.175	90	%	95.732.175	Ciparay		
x xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			90	%	45.000.000	90	%	45.000.000	90	%	45.000.000	90	%	53.100.000	90	%	49.252.500	90	%	237.352.500	Ciparay		
x xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90	%	17.000.000	90	%	17.000.000	90	%	8.500.000	90	%	10.030.000	90	%	9.303.250	90	%	61.833.250	Ciparay		
		7.1.22	KECAMATAN MAJALAYA																							
6	0		Kewilayahan																							
6	0	1	Kecamatan																							
6	0	1	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan			0			0	1	Keg	10.000.000	1	Keg	10.200.000	1	Keg	11.502.467	3	Keg	31.702.467	Majalaya		
6	0	1	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			1	Keg	90.368.979	1	Keg	82.684.898	1	Keg	50.000.000	1	Keg	51.000.000	1	Keg	54.725.000	5	Keg	328.778.877	Majalaya
6	0	1	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1	Keg	295.260.606			0	1	Keg	60.000.000	1	Keg	61.710.000	1	Keg	67.311.750	4	Keg	484.282.356	Majalaya
6	0	1	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			0			0	1	Keg	14.345.898	1	Keg	14.750.252	1	Keg	16.417.500	3	Keg	45.513.650	Majalaya		
6	0	1	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga			0			0	1	Keg	20.000.000	1	Keg	20.400.000	1	Keg	21.890.000	3	Keg	62.290.000	Majalaya		
6	0	1	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah			1	Keg	60.000.000	1	Keg	47.352.200	1	Keg	42.000.000	1	Keg	42.840.000	1	Keg	45.969.000	5	Keg	238.161.200	Majalaya
6	0	1	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			0			0	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.600.000	1	Keg	32.835.000	3	Keg	93.435.000	Majalaya		
6	0	1	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			1	Keg	126.440.000	1	Keg	265.225.000	1	Keg	150.000.000	1	Keg	155.040.000	1	Keg	166.364.000	5	Keg	863.069.000	Majalaya
6	0	1	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan			0	1	Keg	50.000.000	1	Keg	50.000.000	1	Keg	51.000.000	1	Keg	54.725.000	3	Keg	205.725.000	Majalaya		
6	0	1	58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			1	Keg	65.000.000	1	Keg	57.740.500	1	Keg	47.500.000	1	Keg	48.654.000	1	Keg	52.536.000	5	Keg	271.430.500	Majalaya
6	0	1	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			1	Keg	50.000.000	1	Keg	96.240.500	1	Keg	50.000.000	1	Keg	51.000.000	1	Keg	55.272.250	5	Keg	302.512.750	Majalaya
6	0	1	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan			0			0	1	Keg	22.981.000	1	Keg	23.460.000	1	Keg	25.173.500	3	Keg	71.614.500	Majalaya		
6	0	1	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			2	Keg	189.000.000			0	2	Keg	20.000.000	2	Keg	20.400.000	2	Keg	21.890.000	6	Keg	251.290.000	Majalaya
6	0	1	74	5.1.2.74	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat			30.000.000			0			0											30.000.000	Majalaya
6	0	1	83	5.1.2.83	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			0			51.000.000			0											51.000.000	Majalaya
6	0	1	89	5.1.2.89	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong			100.000.000			0			0											100.000.000	Majalaya
x xx	xx		Urusan Rutin																						0	
x xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	%	280.134.426	100	%	153.950.358	100	%	159.339.874	100	%	188.961.156	100	%	176.145.827	100	%	968.531.641	Majalaya	
x xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			6	Keg	201.000.000	6	Keg	340.548.899	6	Keg	340.548.899	6	Keg	403.856.939	6	Keg	376.467.395	30	Keg	1.662.422.132	Majalaya	
x xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur			2	Keg	24.500.000	2	Keg	24.931.150	2	Keg	24.931.150	2	Keg	29.565.850	2	Keg	27.560.696	10	Keg	131.488.846	Majalaya	
x xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			2	Keg	15.750.000	2	Keg	15.913.500	2	Keg	15.913.500	2	Keg	18.871.819	2	Keg	17.591.934	10	Keg	84.040.753	Majalaya	



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggungjawab														
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
				Tarjet	Anggaran	2018		2019		2020		2021																					
x	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan			4	Keg	9.360.000	4	Keg	8.381.110	4	Keg	8.381.110	4	Keg	9.939.158	4	Keg	9.265.085	20	Keg	45.326.462	Majalaya						
				7.1.23	KECAMATAN IBUN																						0						
				6	0	1																					0						
				6	0	1																					0						
				6	0	1	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase penataan administrasi kependudukan					0												0	Ibun					
				6	0	1	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan					100.000.000			56.340.000			45.000.000						50.347.000	302.687.000	Ibun				
				6	0	1	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					7.500.378			8.000.000			25.500.000						27.909.750	94.920.128	Ibun				
				6	0	1	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					142.000.000			68.001.120			75.000.000						82.087.500	443.588.620	Ibun				
				6	0	1	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan					75.000.000			35.000.000			32.000.000						35.024.000	209.664.000	Ibun				
				6	0	1	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga	Prosentase pembinaan dan pemsyarakatan olahraga					100.000.000			14.000.000			42.000.000						45.969.000	244.809.000	Ibun				
				6	0	1	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah					59.000.000			70.800.000			35.781.000						44.352.786	255.833.786	Ibun				
				6	0	1	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak					50.000.000			25.000.000			55.000.000						60.197.500	234.715.405	Ibun				
				6	0	1	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau RTH)					130.444.000			45.000.000			0						0	175.444.000	Ibun				
				6	0	1	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal					100.000.000			90.000.000			22.000.000						24.079.000	258.519.000	Ibun				
				6	0	1	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan					75.000.000			70.000.000			38.900.000						34.578.000	41.481.550	259.959.550	Ibun			
				6	0	1	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa					250.000.000			90.000.000			42.000.000						42.840.000	45.969.000	470.809.000	Ibun			
				6	0	1	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					75.000.000			44.283.550			32.000.000						35.024.000	218.947.550	Ibun				
				6	0	1	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan					0			0			45.000.000						50.347.000	146.347.000	Ibun				
				6	0	1	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					0			10.000.000			32.000.000						35.024.000	109.664.000	Ibun				
				6	0	1	66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase pendidikan menengah					50.000.000			30.000.000			50.620.120						51.632.522	55.403.721	237.656.364	Ibun			
				x	xx	xx			Urusan Rutin																			0					
				x	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					100	%	186.750.250	100	%	189.261.968	100	%	695.178.000	100	%	826.211.090	100	%	771.846.635	100	%	2.669.267.943	Ibun
				x	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100	%	286.125.000	100	%	680.978.000	100	%	80.000.000	100	%	94.400.000	100	%	87.560.000	100	%	1.229.063.000	Ibun
				x	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur					100	%	28.000.000	100	%	29.500.000	100	%	75.000.000	100	%	88.500.000	100	%	82.087.500	100	%	303.087.500	Ibun
				x	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					100	%	18.000.000	100	%	19.000.000	100	%	75.000.000	100	%	88.500.000	100	%	82.087.500	100	%	282.587.500	Ibun
				x	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100	%	29.000.000	100	%	33.600.000	100	%	75.000.000	100	%	88.500.000	100	%	82.087.500	100	%	308.187.500	Ibun
								7.1.24	KECAMATAN PASEH																			0					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab								
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021													
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																
6 0																		0							
6 0																		0							
6 0	1 7	5.1.1.7	Kewilayahan Program penataan administrasi kependudukan			80	%	35.000.000	85	%	20.000.000	85	%	20.000.000	90	%	20.400.000	90	%	21.890.000	90	%	117.290.000	Paseh	
6 0	1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			85	%	50.000.000	87	%	20.000.000	87	%	20.000.000	90	%	20.400.000	90	%	21.890.000	90	%	132.290.000	Paseh	
6 0	1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			90	%	30.000.000	91	%	25.000.000	92	%	25.000.000	92	%	25.500.000	92	%	27.362.500	92	%	132.862.500	Paseh	
6 0	1 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					0			0			0			0		0			0	Paseh		
6 0	1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			90	%	173.908.511	91	%	128.153.139	92	%	128.153.139	92	%	133.812.172	92	%	146.924.417	92	%	710.951.378	Paseh	
6 0	1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			90	%	42.000.000	90	%	20.000.000	91	%	20.000.000	91	%	20.400.000	91	%	21.890.000	91	%	124.290.000	Paseh	
6 0	1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga			85	%	68.000.000	87	%	40.000.000	87	%	40.000.000	90	%	40.800.000	90	%	43.780.000	90	%	232.580.000	Paseh	
6 0	1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah			80	%	45.000.000	85	%	40.000.000	85	%	40.000.000	90	%	40.800.000	90	%	43.780.000	90	%	209.580.000	Paseh	
6 0	1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			92	%	60.000.000	92	%	48.940.000	93	%	50.000.000	93	%	51.000.000	93	%	54.725.000	93	%	264.665.000	Paseh	
6 0	1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			90	%	40.000.000	91	%	40.000.000	91	%	40.000.000	92	%	40.800.000	92	%	43.780.000	92	%	204.580.000	Paseh	
6 0	1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			91	%	80.000.000	91	%	40.000.000	92	%	40.000.000	92	%	40.800.000	92	%	43.780.000	92	%	244.580.000	Paseh	
6 0	1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan			85	%	30.000.000	87	%	95.000.000	87	%	45.000.000	90	%	45.900.000	90	%	49.252.500	90	%	265.152.500	Paseh	
6 0	1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			85	%	150.000.000	85	%	34.149.500	90	%	35.000.000	90	%	35.700.000	90	%	38.307.500	90	%	293.157.000	Paseh	
6 0	1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			90	%	50.000.000	91	%	90.218.750	91	%	50.000.000	92	%	51.000.000	92	%	54.725.000	92	%	295.943.750	Paseh	
6 0	1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan			85	%	36.000.000	87	%	18.900.000	87	%	18.900.000	90	%	19.278.000	90	%	20.686.050	90	%	113.764.050	Paseh	
6 0	1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			90	%	44.000.000	90	%	35.000.000	91	%	35.000.000	92	%	35.700.000	92	%	38.307.500	92	%	188.007.500	Paseh	
6 0	1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini					0			0			0			0		0			0	Paseh		
6 0	1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah			2	Keg	40.000.000			0			0			0		2	Keg		40.000.000	Paseh		
6 0	1 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					0			0			0			0		0			0	Paseh		
6 0	1 72	5.1.2.72	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					0			0			0			0		0			0	Paseh		
6 0	1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal					0			0			0			0		0			0	Paseh		
x xx	xx		Usuran Rutin																				0		
x xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			90	%	220.149.650	90	%	179.262.680	92	%	192.555.680	92	%	229.417.113	92	%	214.846.206	92	%	1.036.231.329	Paseh

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021										
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90	%	85.000.000	90	%	136.219.560	90	%	136.219.560	90	%	160.739.081	149.092.308			667.270.509	Paseh		
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur	90	%	25.000.000	90	%	14.852.600	92	%	14.852.600	92	%	17.526.068	16.256.171			88.487.439	Paseh		
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur	90	%	20.000.000	92	%	20.157.100	92	%	20.157.100	92	%	23.785.378	22.061.946	92	%	106.161.524	Paseh		
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91	%	20.000.000	91	%	9.335.920	92	%	9.335.920	92	%	11.016.386	10.218.164	92	%	59.906.390	Paseh		
	7.1.25	KECAMATAN SOLOKAN JERUK																	0			
6 0 0 1		Kewilayahan																	0			
6 0 0 1		Kecamatan																	0			
6 0 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	persentase masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan	70	%	40.000.000	75	%	35.500.000	80	%	25.000.000	85	%	25.500.000	38.307.500	87	%	164.307.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	persentase cakupan pelayanan persampahan	60	%	150.000.000	61	%	7.340.000	61	%	59.000.000	62	%	34.680.000	42.685.500	65	%	293.705.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	prosentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan	80	%	10.000.000	81	%	10.000.000	82	%	5.000.000	83	%	6.120.000	10.945.000	83	%	42.065.000	Solokanjeruk		
6 0 0 1 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	prosentase kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa			0			0			0			0				0	Solokanjeruk		
6 0 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	prosentase kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa	85	%	158.361.064	86	%	75.000.000	86	%	50.000.000	87	%	61.200.000	98.505.000	87	%	443.066.064	Solokanjeruk		
6 0 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	70	%	40.000.000	71	%	35.000.000	72	%	20.000.000	72	%	15.300.000	21.890.000	73	%	132.190.000	Solokanjeruk		
6 0 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	4	Club	50.000.000	5	Club	29.850.000	5	Club	30.000.000	6	Club	30.600.000	6	Club	43.780.000	6	Club	184.230.000	Solokanjeruk
6 0 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	prosentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPDP	90	%	50.000.000	90	%	40.000.000	90	%	35.000.000	90	%	35.700.000	43.780.000	90	%	204.480.000	Solokanjeruk		
6 0 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan	75	%	50.000.000	76	%	30.000.000	78	%	20.000.000	80	%	20.400.000	27.362.500	82	%	147.762.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tingkat Kecamatan Solokanjeruk			0			0			0			16.417.500				16.417.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	80	%	65.000.000	81	%	90.000.000	81	%	85.000.000	82	%	81.600.000	93.032.500	83	%	414.632.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	80	%	50.000.000	81	%	100.000.000	81	%	30.000.000	82	%	30.600.000	49.252.500	83	%	259.852.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	persentase kesesuaian kapasitas sumber daya aparatur	70	%	40.000.000	71	%	30.000.000	72	%	20.000.000	73	%	20.400.000	21.890.000	74	%	132.290.000	Solokanjeruk		
6 0 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	jumlah kelembagaan organisasi perempuan di tingkat kecamatan (LSM/Non LSM) (Organisasi)	2	Org	40.000.000	2	Org	64.500.000	2	Org	56.000.000	2	Org	59.160.000	71.142.500	2	Org	290.802.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	jumlah pemuda berprestasi skala kecamatan (orang)	5	Org	30.000.000	5	Org	20.000.000	6	Org	15.000.000	7	Org	15.300.000	16.417.500	7	Org	96.717.500	Solokanjeruk		
6 0 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			0			0			0	2	Jenis	16.417.500	2	Jenis	16.417.500	Solokanjeruk			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab									
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD											
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021																
6 0 1 72	5.1.2.72	Program Penciptaan Klim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase jumlah UMKM yang maju			0		0		0				21.890.000			21.890.000	Solokanjeruk							
6 0 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Anak Putus Sekolah			0		0		0				0			0	Solokanjeruk							
<b>Urusan Rutin</b>																		0							
x xxx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	90	%	228.977.972	90	%	345.820.739	90	%	270.784.675	90	%	363.922.146	90	%	464.134.370	90	%	1.673.639.902	Solokanjeruk		
x xxx xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	90	%	406.000.000	90	%	271.160.000	90	%	376.000.000	90	%	389.400.000	90	%	52.536.000	90	%	1.495.096.000	Solokanjeruk		
x xxx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	90	%	18.000.000	90	%	18.650.000	90	%	10.000.000	90	%	23.600.000	90	%	30.098.750	90	%	100.348.750	Solokanjeruk		
x xxx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	90	%	24.000.000	90	%	55.000.000	90	%	10.000.000	90	%	42.480.000	90	%	51.988.750	90	%	183.468.750	Solokanjeruk		
x xxx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90	%	10.000.000	90	%	9.200.000	90	%	8.000.000	90	%	9.440.000	90	%	10.945.000	90	%	47.585.000	Solokanjeruk		
		7.1.26	<b>KECAMATAN PASIR JAMBU</b>																						
6 0 1			<b>Kewilayahan</b>																						
6 0 1			<b>Kecamatan</b>																						
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	100	%	15.000.000	100	%	25.000.000	100	%	15.000.000	100	%	15.300.000	100	%	16.417.500	100	%	86.717.500	Pasirjambu			
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100	%	25.000.000	100	%	30.000.000	100	%	27.424.352	100	%	29.424.024	100	%	34.248.288	100	%	146.094.663	Pasirjambu			
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	100	%	13.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.200.000	100	%	10.945.000	100	%	54.145.000	Pasirjambu			
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100	%	477.240.404	100	%	158.713.475	100	%	72.985.850	100	%	77.631.226	100	%	86.736.779	100	%	873.307.734	Pasirjambu			
6 0 1 22	5.1.2.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100	%	15.000.000	0	100	%	29.389.712	100	%	21.594.832	100	%	26.519.707	100	%	92.504.251	100	%	184.439.937	Pasirjambu		
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	100	%	25.000.000	100	%	44.578.150	100	%	35.513.627	100	%	37.310.617	100	%	42.037.543	100	%	129.304.177	Pasirjambu			
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Pembinaan cabang olahraga prestasi	100	%	28.000.000	100	%	35.250.000	100	%	21.863.454	100	%	22.300.723	100	%	21.890.000	100	%	129.304.177	Pasirjambu			
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	100	%	35.000.000	100	%	40.000.000	100	%	40.000.000	100	%	40.800.000	100	%	43.780.000	100	%	199.580.000	Pasirjambu			
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)	100	Orang	50.000.000	100	Orang	40.000.000	100	Orang	30.000.000	100	Orang	30.600.000	100	Orang	32.835.000	100	Orang	183.435.000	Pasirjambu			
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH			0		4	Unit	33.709.080		4	Unit	35.720.759		4	Unit	29.848.514		4	Unit	99.278.354	Pasirjambu		
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	100	%	37.000.000	100	%	30.000.000	100	%	48.298.533	100	%	50.742.439	100	%	57.171.058	100	%	223.212.029	Pasirjambu			
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase program pengembangan wawasan kebangsaan	100	%	31.000.000	100	%	90.000.000	0		0		0	100	%	121.000.000	100	%	174.007.500	Pasirjambu				
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	100	%	30.000.000	100	%	35.000.000	100	%	35.000.000	100	%	35.700.000	100	%	38.307.500	100	%	130.652.692	Pasirjambu			
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	100	%	40.000.000	100	%	77.436.000	100	%	4.243.600	100	%	4.328.472	100	%	4.644.620	100	%	126.227.510	Pasirjambu			
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	Peningkatan Peran serta Perempuan	100	%	15.000.000	100	%	24.639.395	100	%	26.771.811	100	%	28.126.464	100	%	31.689.840	100	%	126.227.510	Pasirjambu			
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam			0		0		0		0		0		0		0		0		0			
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Persentase Jumlah Pembinaan Pendidikan Menengah	100	%	38.000.000	100	%	50.000.000	100	%	45.011.611	100	%	43.273.537	100	%	35.769.938	100	%	212.055.086	Pasirjambu			
6 0 1 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			0		100	%	158.445.415				100	%	166.462.753			100	%	187.552.116	100	%	512.460.283	Pasirjambu
<b>Urusan Rutin</b>																									
																		0							

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	415.250.000	100	%	272.826.377	100	%	267.000.000	100	%	315.060.000	100	%	292.231.500	100	%	1.562.367.877	Pasirjambu
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	%	142.625.994	100	%	92.674.583	100	%	92.674.583	100	%	111.700.598	100	%	105.792.619	100	%	545.468.377	Pasirjambu
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	100	%	8.500.000	100	%	19.096.200	100	%	19.096.200	100	%	22.533.516	100	%	20.900.791	100	%	90.126.707	Pasirjambu
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	8.500.000	100	%	9.017.650			0			0			0	100	%	17.517.650	Pasirjambu
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	9.600.000	100	%	9.600.000	100	%	9.600.000	100	%	11.328.000	100	%	10.507.200	100	%	50.635.200	Pasirjambu
	7.1.27	KECAMATAN CIWIDEY																			0	
6 0 0 1		Kecamatan																			0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1	Keg	25.000.000	1	Keg	20.500.000	1	Keg	15.500.000	1	Keg	16.320.000	1	Keg	18.059.250	1	Keg	95.379.250	Ciwidey
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan program pengelolaan persampahan	1	Keg	5.375.000	1	Keg	2.500.000	1	Keg	2.500.000	1	Keg	2.562.750	1	Keg	2.763.680	1	Keg	15.701.430	Ciwidey
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kegiatan peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah	1	Keg	15.000.000	1	Keg	6.000.000	1	Keg	6.000.000	1	Keg	6.150.600	1	Keg	6.632.834	1	Keg	39.783.434	Ciwidey
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kegiatan penataan administrasi kependudukan	9	Bulan	112.153.000	12	Bulan	62.150.000	12	Bulan	42.143.000	12	Bulan	50.251.676	12	Bulan	49.412.912	12	Bulan	316.110.588	Ciwidey
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan peranan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	80	%	44.890.000	80	%	30.245.000	80	%	25.000.000	80	%	26.520.000	80	%	29.004.250	80	%	155.659.250	Ciwidey
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemasarakan olah raga	2	Keg	56.000.000	2	Keg	40.000.000	2	Keg	40.000.000	2	Keg	41.004.000	2	Keg	44.218.895	10	Keg	221.222.895	Ciwidey
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1	Keg	50.000.000	1	Keg	38.000.000	1	Keg	38.000.000	1	Keg	38.953.800	1	Keg	42.007.950	5	Keg	206.961.750	Ciwidey
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	Keg	57.900.000	1	Keg	9.679.885	1	Keg	35.000.000	1	Keg	36.720.000	1	Keg	40.496.500	5	Keg	179.796.385	Ciwidey
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau	3	%	116.800.000			0			0						0	3	%	116.800.000	Ciwidey
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2	Keg	94.000.000	2	Keg	94.000.000	2	Keg	94.000.000	2	Keg	96.359.400	2	Keg	103.914.402	10	Keg	482.273.802	Ciwidey
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pencembangan wawasan kebangsaan				86.850.000			123.249.000			116.400.000			122.400.000			132.434.500			581.333.500	Ciwidey
6 0 1 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kegiatan peningkatan polansi pemuda	1	Keg	38.800.000	1	Keg	28.800.000	1	Keg	28.800.000	1	Keg	29.522.880	1	Keg	31.837.604	5	Keg	157.760.484	Ciwidey
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	1	Keg	43.900.000	1	Keg	33.900.000	1	Keg	30.000.000	1	Keg	34.750.890	1	Keg	37.475.513	5	Keg	180.026.403	Ciwidey
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1	Keg	63.000.000	1	Keg	75.458.000	1	Keg	70.000.000	1	Keg	72.930.000	1	Keg	78.804.000	5	Keg	360.192.000	Ciwidey
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah prosentase pencegahan dini dan penanggulangan pencegahan bencana alam	1	Keg	50.000.000	1	Keg	10.000.000	1	Keg	10.000.000	1	Keg	10.251.000	1	Keg	11.054.724	5	Keg	91.305.724	Ciwidey
x xx xx		Urusan Rutin																			0	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100	%	296.974.244	100	%	344.321.490	100	%	308.355.740	100	%	343.841.833	100	%	321.986.529	100	%	1.615.479.836	Ciwidey

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		80	%	156.500.000	80	%	84.700.000	80	%	82.200.000	80	%	99.265.730	80	%	93.633.509	80	%	516.299.239	Cwidey
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		80	%	30.000.000	80	%	30.000.000	80	%	30.000.000	80	%	35.577.000	80	%	33.164.171	80	%	158.741.171	Cwidey
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100	%	22.400.000	100	%	15.750.000	100	%	15.750.000	100	%	18.677.925	100	%	17.411.189	100	%	89.989.114	Cwidey
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	18.000.000	100	%	24.988.115	100	%	25.800.000	100	%	30.444.000	100	%	28.238.100	100	%	127.470.215	Cwidey
	7.1.28	KECAMATAN RANCABALI																			0	
6 0		Kewilayahan																			0	
6 0 1		Kecamatan																			0	
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan				0	100	%	38.075.000	100	%	50.000.000	100	%	51.000.000	100	%	54.725.000	100	%	193.800.000	Rancabali
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				0	100	%	94.400.000	100	%	97.000.000	100	%	98.940.000	100	%	106.166.500	100	%	396.506.500	Rancabali
6 0 1 16	5.1.2.16	Program Penelolaaan Kekayaan Budaya							24.000.000			0			0						24.000.000	Rancabali
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		2	Keg	20.000.000			0	2	Keg	21.854.500	2	Keg	22.960.373	2	Keg	25.115.710	8	Keg	89.930.584	Rancabali
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		13	Keg	184.100.887	19	Keg	250.000.000	19	Keg	228.145.500	19	Keg	232.039.627	19	Keg	248.509.290	89	Keg	1.142.795.303	Rancabali
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		1	Keg	30.000.000	4	Keg	50.000.000	4	Keg	50.000.000	4	Keg	51.000.000	4	Keg	54.725.000	17	Keg	235.725.000	Rancabali
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga		2	Keg	75.000.000	2	Keg	120.000.000	2	Keg	120.000.000	2	Keg	122.400.000	2	Keg	131.340.000	10	Keg	568.740.000	Rancabali
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah		100	%	20.000.000	100	%	58.509.000	100	%	58.509.000	100	%	59.679.180	100	%	64.038.101	100	%	260.735.281	Rancabali
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		252	Org	50.000.000	225	Org	71.033.000	225	Org	75.000.000	225	Org	76.500.000	225	Org	82.087.500	225	Org	354.620.500	Rancabali
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranribmas dan pencegahan tindak kriminal		100	%	120.000.000	100	%	187.586.375	100	%	200.000.000	100	%	204.000.000	100	%	218.900.000	100	%	930.486.375	Rancabali
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan				0	2	Keg	214.181.075	2	Keg	167.401.626	2	Keg	177.828.003	2	Keg	198.449.737	2	Keg	757.860.441	Rancabali
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		2	Keg	50.000.000	2	Keg	78.800.000	2	Keg	80.000.000	2	Keg	81.600.000	2	Keg	87.560.000	5	Keg	377.960.000	Rancabali
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		7	Keg	45.000.000	2	Keg	107.500.000	2	Keg	90.000.000	2	Keg	91.800.000	2	Keg	98.505.000	15	Keg	432.805.000	Rancabali
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan		1	Keg	40.000.000	1	Keg	46.126.000	1	Keg	50.000.000	1	Keg	51.000.000	1	Keg	54.725.000	5	Keg	241.851.000	Rancabali
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				0	17	Jenis	100.000.000	17	Jenis	100.000.000	17	Jenis	102.000.000	17	Jenis	109.450.000	68	Jenis	411.450.000	Rancabali
x xx xx		Urusan Rutin																			0	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		13	Keg	212.637.500	13	Keg	268.711.400	13	Keg	285.500.000	13	Keg	340.609.649	13	Keg	319.397.265	13	Keg	1.426.855.814	Rancabali
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		6	Keg	434.000.000	6	Keg	156.949.076	6	Keg	256.949.076	6	Keg	303.199.910	6	Keg	281.230.764	6	Keg	1.432.328.825	Rancabali
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		4	Jenis	28.500.000	4	Jenis	34.000.000	4	Jenis	34.000.000	4	Jenis	40.120.000	4	Jenis	37.213.000	4	Jenis	173.833.000	Rancabali
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				8.000.000			18.780.000			20.000.000			23.600.000			21.890.000			92.270.000	Rancabali
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4	Keg	4.000.000	4	Keg	34.000.000	4	Keg	34.000.000	4	Keg	40.120.000	4	Keg	37.213.000	20	Keg	149.333.000	Rancabali
	7.1.29	KECAMATAN SOREANG																			0	
6 0		Kewilayahan																			0	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021										
6 0 1	Kecamatan																		0			
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki adm kependudukan		76	%	25.000.000	77	%	24.400.000	78	%	60.000.000	79	%	56.100.000	80	%	60.197.500	80	%	225.697.500	Soreang
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		2	Keg	25.000.000	2	Keg	89.250.000	2	Keg	110.000.000	2	Keg	51.000.000	2	Keg	54.725.000	10	Keg	329.975.000	Soreang
6 0 1 17 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1	Keg	5.000.000			0	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.600.000	1	Keg	32.835.000	4	Keg	98.435.000	Soreang
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		25	Keg	110.853.776	25	Keg	97.438.582	25	Keg	106.285.862	25	Keg	266.249.099	25	Keg	236.443.283	100	Keg	817.270.602	Soreang
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina		100	Org	30.000.000	100	Org	0	100	Org	30.000.000	100	Org	30.600.000	100	Org	32.835.000	500	Org	123.435.000	Soreang
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)		4	Cabor	50.000.000	6	Cabor	57.800.000	2	Cabor	60.000.000	3	Cabor	61.200.000	3	Cabor	90.574.135	18	Cabor	319.574.135	Soreang
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik		1	Keg	63.999.850	1	Keg	57.700.000	1	Keg	60.000.000	1	Keg	66.300.000	1	Keg	68.699.206	5	Keg	316.699.056	Soreang
6 0 1 53 5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan		100	Orang	30.000.000	100	Orang	56.400.000	100	Orang	30.000.000	100	Orang	40.800.000	100	Orang	43.780.000	500	Orang	200.980.000	Soreang
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemenuhan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		12	Bulan	116.250.000	12	Bulan	94.750.000	12	Bulan	105.000.000	12	Bulan	107.100.000	12	Bulan	109.450.000	12	Bulan	532.550.000	Soreang
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah pengembangan wawasan kebangsaan		2	Keg	40.000.000	2	Keg	89.250.000	2	Keg	60.000.000	2	Keg	61.200.000	2	Keg	54.725.000	2	Keg	305.175.000	Soreang
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100	Orang	25.000.000			0	100	Orang	30.000.000	100	Orang	30.600.000	100	Orang	49.252.500	100	Orang	134.852.500	Soreang
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi gender		100	Orang	25.000.000	100	Orang	93.544.150	100	Orang	90.000.000	100	Orang	102.000.000	100	Orang	103.977.500	100	Orang	414.521.650	Soreang
6 0 1 61 5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Peserta pembinaan pemuda		100	Orang	25.000.000			0	100	Orang	30.000.000	100	Orang	30.600.000	100	Orang	27.362.500	100	Orang	112.962.500	Soreang
6 0 1 65 5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah monitoring PAUD diwilayah Kecamatan					0	1	Keg	4.000.000	1	Keg	30.000.000					21.890.000			76.290.000	Soreang
6 0 1 66 5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah		100	Orang	30.000.000	100	Orang	56.876.925	100	Orang	25.000.000	100	Orang	25.500.000	100	Orang	27.362.500	500	Orang	164.739.425	Soreang
6 0 1 68 5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah peserta sosialisasi					0			100	Orang	30.000.000	100	Orang	25.500.000	100	Orang	27.362.500	300	Orang	82.862.500	Soreang
x xx xx	Urusan Rutin																				0	
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Penilaian Administrasi Perkantoran		100	%	380.445.000	100	%	382.978.900	100	%	489.000.000	100	%	571.710.000	100	%	535.192.347	100	%	2.359.326.247	Soreang
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur		1	Keg	838.160.150	1	Keg	3.674.665.050	1	Keg	1.130.000.000	1	Keg	1.249.294.039	1	Keg	1.205.865.375	5	Keg	8.097.984.614	Soreang
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur		100	%	30.000.000	100	%	22.000.000	100	%	48.000.000	100	%	49.560.000	100	%	45.969.000	100	%	195.529.000	Soreang
x xx xx 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100	%	7.770.000			0	100	%	30.000.000	100	%	29.500.000	100	%	27.362.500	100	%	94.632.500	Soreang
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	7.700.000	100	%	9.000.000	100	%	10.000.000	100	%	11.800.000	100	%	10.945.000	100	%	49.445.000	Soreang
	7.1.3	KECAMATAN CIMENYAN																			0	
6 0 1	Kewilayahan																				0	
6 0 1	Kecamatan																				0	
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		76	%	30.000.000	77	%	25.460.800	78	%	12.730.800	79	%	13.374.978	80	%	14.782.433	80	%	96.349.011	Cimencyan
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan		100	%	1.208.119.897	100	%	1.497.161.045	100	%	1.010.266.626	100	%	1.074.161.783	100	%	1.117.222.511	100	%	5.906.931.861	Cimencyan
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Sosialisasi		100	%	30.000.000	100	%	15.000.000	100	%	31.827.000	100	%	33.437.446	100	%	36.956.081	100	%	147.220.528	Cimencyan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021									
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021												
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan Program / kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	54.725.000	100	%	255.725.000	Cimemyan
6 0 1 54 5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Pemeliharaan RTH	100	%	124.000.000	100	%	0	0		0		0		0	100	%	124.000.000	Cimemyan		
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100	%	60.000.000	100	%	63.654.000	100	%	31.827.000	100	%	33.437.446	100	%	36.956.081	100	%	225.874.528	Cimemyan
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100	%	15.000.000	100	%	79.705.200	100	%	29.705.200	100	%	31.208.283	100	%	34.492.343	100	%	190.111.026	Cimemyan
6 0 1 58 5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti kegiatan keterampilan	100	%	30.000.000	100	%	13.791.000	100	%	13.791.700	100	%	14.489.560	100	%	16.014.303	100	%	88.086.563	Cimemyan
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan	100	%	30.000.000	100	%	31.827.000	100	%	31.827.000	100	%	33.437.446	100	%	36.956.081	100	%	164.047.528	Cimemyan
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan	100	%	50.000.000	100	%	83.327.000	100	%	31.827.000	100	%	33.437.446	100	%	36.956.081	100	%	235.547.528	Cimemyan
6 0 1 65 5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan publisasi	100	%	0	100	%	10.609.000	100	%	10.609.000	100	%	11.145.815	100	%	12.176.409	100	%	44.540.224	Cimemyan
6 0 1 68 5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	100	%	30.000.000	100	%	42.436.000	100	%	42.436.000	100	%	44.583.262	100	%	49.274.775	100	%	208.730.037	Cimemyan
6 0 1 69 5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				0		0		0		0		0		0		0		0	Cimemyan	
x xx xx	<b>Usuran Rutin</b>																				
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100	%	413.535.190	100	%	379.341.246	100	%	343.075.314	100	%	416.969.016	100	%	406.098.848	100	%	1.959.019.615	Cimemyan
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98	%	603.126.977	98	%	660.956.533	98	%	721.541.190	98	%	790.221.648	98	%	751.677.747	98	%	3.527.524.096	Cimemyan
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pegawai yang memenuhi aturan kedisiplinan			16.500.000		17.504.850		18.029.996		21.913.656		21.913.656		21.342.137		95.290.639			Cimemyan	
x xx xx 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki Pengetahuan bidang peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik			15.000.000		0		18.576.359		22.577.707		21.988.868		78.142.934					Cimemyan	
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD			42.000.000		14.400.000		19.005.820		25.530.473		24.391.013		125.327.306					Cimemyan	
	7.1.30	<b>KECAMATAN CANGKUIANG</b>																			
6 0 1	<b>Kewilayahan</b>																				
6 0 1	<b>Kecamatan</b>																				
6 0 1 15 5.1.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	500	buah	35.000.000	750	Buah	39.860.000	1.000	Buah	40.000.000	1.250	Buah	40.800.000	1.500	Buah	43.780.000	1.500	Buah	199.440.000	Cangkuang
6 0 1 15 5.1.2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			40.000.000		0		17.500.000		17.850.000		26.268.000		101.618.000					Cangkuang	
6 0 1 15 5.1.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	55	%	31.600.000	45	%	22.840.000	0		0		0	55	%	54.440.000				Cangkuang	
6 0 1 16 5.1.2.16	Program pemeliharaan kantranibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	20	%	89.464.712	20	%	47.600.000	20	%	65.000.000	20	%	66.300.000	20	%	71.142.500	100	%	339.507.212	Cangkuang
6 0 1 16 5.1.2.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan	20	%	35.000.000	20	%	24.400.000	20	%	17.500.000	20	%	18.870.000	20	%	21.605.430	20	%	117.375.430	Cangkuang
6 0 1 17 5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	20	%	44.525.000	20	%	83.110.500	20	%	36.100.000	20	%	36.822.000	20	%	39.511.450	20	%	240.068.950	Cangkuang
6 0 1 17 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase jumlah data pendapatan daerah	50	%	45.000.000	50	%	21.745.000	0		0		0	50	%	66.745.000				Cangkuang	
6 0 1 18 5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20	%	75.000.000	20	%	74.500.000	20	%	75.000.000	20	%	76.500.000	20	%	82.087.500	20	%	383.087.500	Cangkuang
6 0 1 18 5.1.2.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa swakarsa-jumlah desa swasembada	0		0	1	Desa	17.500.000	1	Desa	17.850.000	1	Desa	19.153.750	1	Desa	54.503.750			Cangkuang	



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021														
6 0 0 1 20	5.1.2.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga		4	Club	68.150.000	4	Club	80.000.000	4	Club	80.000.000	4	Club	81.600.000	4	Club	87.560.000	4	Club	397.310.000	Cangukang	
6 0 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		20	%	169.875.000	20	%	150.241.253	20	%	40.000.000	20	%	51.000.000	20	%	54.725.000	20	%	465.841.253	Cangukang	
6 0 0 1 21	5.1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				0			0			0			0			0			0	Cangukang	
6 0 0 1 21	5.1.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah		20	%	50.000.000	20	%	46.786.250	20	%	40.000.000	20	%	40.800.000	20	%	43.780.000	20	%	221.366.250	Cangukang	
6 0 0 1 24	5.1.2.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				45.000.000			0			0			0			0			45.000.000	Cangukang	
x xx xx		Urusan Rutin																			0		
x xx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		30	%	308.650.000	10	%	267.454.208	15	%	254.985.711	24	%	294.918.743	21	%	301.380.200	21	%	1.427.388.862	Cangukang
x xx xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		20	%	156.525.000	20	%	70.000.000	20	%	97.500.000	20	%	169.330.000	20	%	125.648.600	20	%	619.003.600	Cangukang
x xx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		30	%	21.500.000	30	%	8.200.000	12	%	10.500.000	19	%	14.160.000	19	%	13.134.000	19	%	67.494.000	Cangukang
x xx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		17	%	44.500.000	17	%	30.000.000	22	%	55.000.000	22	%	14.750.000	22	%	13.681.250	22	%	157.931.250	Cangukang
x xx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		15	%	25.140.000	10	%	10.000.000	25	%	42.500.000	25	%	42.480.000	25	%	39.402.000	25	%	159.522.000	Cangukang
																					0		
			7.1.31																		0		
			KECAMATAN KUTAWARINGIN																		0		
6 0 0 1			Kewilayahan																		0		
6 0 0 1			Kecamatan																		0		
6 0 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan				30.000.000			15.000.000			0			0			0			45.000.000	Kutawaringin	
6 0 0 1 65	5.1.1.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini				0	55	Orang	19.250.000	44	Orang	34.636.350	44	Orang	27.903.811	44	Orang	29.004.250	187	Orang	110.794.411	Kutawaringin	
6 0 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		77	%	45.000.000	77	%	40.000.000	77	%	44.636.350	77	%	47.200.950	77	%	53.728.129	77	%	230.565.429	Kutawaringin	
6 0 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		70	%	10.000.000	70	%	8.000.000	70	%	10.927.270	70	%	11.480.190	70	%	12.934.626	70	%	53.342.086	Kutawaringin	
6 0 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		12	Urusan	116.000.000	12	Urusan	57.000.000	12	Urusan	54.078.325	12	Urusan	57.400.950	12	Urusan	64.673.143	12	Urusan	349.152.417	Kutawaringin	
6 0 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		130	Orang	40.000.000	100	Orang	15.000.000	100	Orang	21.854.540	100	Orang	22.960.380	100	Orang	25.869.257	100	Orang	125.684.177	Kutawaringin	
6 0 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga		1	Cabor	40.000.000	1	Cabor	27.500.000	1	Cabor	27.781.810	1	Cabor	29.340.569	1	Cabor	33.331.385	1	Cabor	157.953.765	Kutawaringin	
6 0 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah		72	Keg	40.000.000	75	Keg	35.000.000	75	Keg	32.781.810	75	Keg	34.440.569	75	Keg	38.803.885	75	Keg	181.026.265	Kutawaringin	
6 0 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		66	Orang	30.000.000	100	Orang	24.000.000	77	Orang	24.636.350	77	Orang	26.800.950	77	Orang	31.838.143	397	Orang	137.275.442	Kutawaringin	
6 0 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		30	Meter	30.000.000	30	Meter	18.260.000	30	Meter	21.854.540	30	Meter	22.960.380	30	Meter	25.869.257	30	Meter	118.944.177	Kutawaringin	
6 0 0 1 55	5.1.2.55	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan		33	Orang	20.000.000	33	Orang	14.300.000	33	Orang	16.390.905	44	Orang	17.220.285	44	Orang	19.401.942	44	Orang	87.313.132	Kutawaringin	
6 0 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantranitbas dan pencegahan tindak kriminal		77	Orang	68.000.000	220	Orang	38.250.000	220	Orang	33.709.080	220	Orang	35.720.759	220	Orang	40.793.514	220	Orang	216.473.354	Kutawaringin	
6 0 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan		12	Kali	30.000.000	12	Kali	70.000.000	12	Kali	26.225.448	12	Kali	27.552.455	12	Kali	31.043.109	12	Kali	184.821.012	Kutawaringin	
6 0 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		286	Orang	85.000.000	44	Orang	41.000.000	44	Orang	21.854.540	44	Orang	22.960.380	44	Orang	25.869.257	462	Orang	196.684.177	Kutawaringin	
6 0 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		12	Orang	25.000.000	2	Orang	73.500.000	2	Orang	38.245.445	2	Orang	40.180.664	2	Orang	45.271.199	20	Orang	222.197.308	Kutawaringin	
6 0 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan		77	Orang	30.000.000	66	Orang	15.000.000	66	Orang	17.318.175	66	Orang	18.500.474	66	Orang	21.391.571	341	Orang	102.210.221	Kutawaringin	
6 0 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan diri dan penanggulangan korban bencana alam		11	Unit	40.000.000	3	Unit	37.000.000	3	Unit	38.245.445	3	Unit	40.180.664	3	Unit	45.271.199	23	Unit	200.697.308	Kutawaringin	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021													
6 0 1 64 5.1.2.64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah		0	5	Orang	14.750.000	5	Orang	17.483.632	5	Orang	18.368.304	5	Orang	20.695.406	20	Orang	71.297.342	Kutawaringin		
6 0 1 66 5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Jumlah anak yang mengikuti sosialisasi		90	Orang	35.000.000	0		0				0			0	90	Orang	35.000.000	Kutawaringin		
6 0 1 68 5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah pengembangan lingkungan sehat		0	77	Orang	19.250.000	77	Orang	21.854.540	77	Orang	23.062.380	77	Orang	24.845.150	77	Orang	89.012.070	Kutawaringin		
6 0 1 72 5.1.2.72	Program Penciptaan Kilom Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UKKM		55	Orang	30.000.000	0		0				0			0	55	Orang	30.000.000	Kutawaringin		
6 0 1 75 5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bumdes		110	Orang	40.000.000	55	Orang	13.000.000	55	Orang	16.390.905	55	Orang	17.220.285	55	Orang	18.497.050	330	Orang	105.108.240	Kutawaringin
6 0 1 76 5.1.2.76	Program Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial		0	50	Orang	13.000.000	50	Orang	11.854.540	50	Orang	12.760.380	50	Orang	13.790.700	200	Orang	51.405.620	Kutawaringin		
6 0 1 80 5.1.2.80	Program Kelahanan Pangan					30.000.000	0		0				0			0			30.000.000	Kutawaringin		
6 0 1 83 5.1.2.83	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					53.000.000	0		0				0			0			53.000.000	Kutawaringin		
6 0 1 87 5.1.2.87	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					25.000.000	0		0				0			0			25.000.000	Kutawaringin		
6 0 1 92 5.1.2.92	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					30.000.000	0		0				0			0			30.000.000	Kutawaringin		
x xx xx	Urusan Rutin																			0		
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran		100	%	272.396.859	100	%	190.107.888	100	%	182.800.000	100	%	207.431.020	100	%	193.488.933	100	%	1.046.224.700	Kutawaringin
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	%	188.000.000	100	%	357.355.353	100	%	212.343.530	100	%	251.818.191	100	%	209.360.598	100	%	1.218.877.673	Kutawaringin
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah peningkatan disiplin aparatur		100	%	30.000.000	100	%	27.000.000	100	%	27.000.000	100	%	32.019.300	100	%	29.847.754	100	%	145.867.054	Kutawaringin
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	18.500.000	100	%	14.500.000	100	%	20.500.000	100	%	24.310.950	100	%	22.662.183	100	%	100.473.133	Kutawaringin
	7.1.4	KECAMATAN BOJONGSOANG																		0		
6 0 1	Kewilayahan																			0		
6 0 1	Kecamatan																			0		
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KTP dan KK Lingkup Kecamatan Tahun berkenaan		80	%	36.800.000	80	%	16.995.600	80	%	20.000.000	80	%	20.400.000	80	%	21.890.000	80	%	116.085.600	Bojongsong
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan		100	%	105.250.000	100	%	14.300.000	100	%	17.500.000	100	%	17.850.000	100	%	19.153.750	100	%	174.053.750	Bojongsong
6 0 1 15 5.1.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan		90	%	57.664.000	90	%	57.974.000	90	%	57.664.000	90	%	58.817.280	90	%	63.113.248	90	%	295.232.528	Bojongsong
6 0 1 16 5.1.2.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi dalam Pembangunan skala Kecamatan		100	%	36.000.000	0	100	%	13.500.000	100	%	13.770.000	100	%	14.775.750	100	%	78.045.750	Bojongsong		
6 0 1 17 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian Retribusi kecamatan pada tahun berkenaan		100	%	30.000.000	0		0				0			0	100	%	30.000.000	Bojongsong		
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan		10	Urusan	167.337.000	10	Urusan	91.537.000	10	Urusan	144.000.000	10	Urusan	155.805.000	10	Urusan	203.094.539	10	Urusan	761.773.539	Bojongsong
6 0 1 21 5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan potensi petugas sosial tentang PMKS		100	%	25.000.000	100	%	13.050.000	100	%	17.500.000	100	%	17.850.000	100	%	19.153.750	100	%	92.553.750	Bojongsong
6 0 1 24 5.1.2.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH		100	%	50.000.000	100	%	34.227.000	100	%	35.000.000	100	%	36.103.514	100	%	38.616.959	100	%	193.947.473	Bojongsong
6 0 1 32 5.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan		100	%	50.000.000	100	%	12.937.700	100	%	17.584.585	100	%	17.936.277	100	%	19.246.328	100	%	117.704.890	Bojongsong
6 0 1 49 5.1.2.49	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dilina		0	80	%	10.000.000	85	%	15.000.000	90	%	17.850.000	95	%	20.521.875	95	%	63.371.875	Bojongsong		
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan		90	%	24.000.000	90	%	25.461.600	90	%	25.000.000	90	%	26.010.000	90	%	28.457.000	90	%	128.928.600	Bojongsong

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021											
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan tingkat kecamatan		80	%	36.000.000	82	%	37.000.000	85	%	31.250.000	87	%	31.875.000	90	%	34.203.125	90	%	170.328.125	Bojongsong	
6 0 1 56 5.1.2.56	Program pemeliharaan kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini / deteksi dini		80	%	66.760.000	80	%	44.750.000	80	%	69.375.000	80	%	70.762.500	80	%	75.930.938	80	%	327.578.438	Bojongsong	
6 0 1 57 5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan		100	%	44.720.000	100	%	97.443.000	100	%	45.000.000	100	%	45.900.000	100	%	49.252.500	100	%	282.315.500	Bojongsong	
6 0 1 59 5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Desa Swasembada - Jumlah Desa Swakarsa		80	%	38.660.000	80	%	19.765.000	80	%	34.000.000	80	%	34.680.000	80	%	37.213.000	80	%	164.318.000	Bojongsong	
6 0 1 60 5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan		90	Kel	85.000.000	90	Kel	33.131.500	90	Kel	37.500.000	90	Kel	38.250.000	90	Kel	41.043.750	90	Kel	234.925.250	Bojongsong	
6 0 1 62 5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencanangan Kejadian Bencana Alam		90	%	82.709.477	90	%	17.220.000	90	%	21.000.000	90	%	21.420.000	90	%	22.984.500	90	%	165.333.977	Bojongsong	
6 0 1 73 5.1.2.73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase kegiatan penyuluhan pada tahun berkenaan		0	80	%	20.750.000	80	%	20.000.000	80	%	21.930.000	80	%	25.173.500	80	%	87.853.500	80	%	87.853.500	Bojongsong
6 0 1 84 5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Non-Formal		0	80	%	20.000.000	82	%	20.400.000	85	%	21.890.000	85	%	21.890.000	85	%	62.290.000	85	%	62.290.000	Bojongsong
x xx xx	<b>Urusan Rutin</b>																				0		
x xx xv 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Penataan Administrasi Perkantoran		100	%	198.070.000	100	%	264.017.703	100	%	265.447.800	100	%	313.228.404	100	%	290.532.617	100	%	1.331.296.524	Bojongsong	
x xx xv 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	%	359.500.000	100	%	517.436.100	100	%	198.500.000	100	%	225.085.000	100	%	175.917.617	100	%	1.476.438.717	Bojongsong	
x xx xv 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100	%	40.300.000	100	%	22.800.000	100	%	40.300.000	100	%	47.554.000	100	%	44.108.350	100	%	195.062.350	Bojongsong	
x xx xv 5 5.1.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik		100	%	30.000.000	100	%	14.750.000	100	%	17.500.000	100	%	20.650.000	100	%	19.153.750	100	%	102.053.750	Bojongsong	
x xx xv 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan		100	%	42.300.000	100	%	13.000.000	100	%	16.500.000	100	%	19.470.000	100	%	18.059.250	100	%	109.329.250	Bojongsong	
	7.1.5	KECAMATAN MARGAHAYU																			0		
6 0		Kewilayahan																			0		
6 0 1		Kecamatan																			0		
6 0 1 7 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah sosialisasi peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		2	Kali	15.000.000	2	Kali	22.705.000	2	Kali	25.000.000	2	Kali	25.500.000	2	Kali	27.362.500	2	Kali	115.567.500	Margahayu	
6 0 1 8 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan		2	Keg	50.000.000	4	Keg	22.705.000	6	Keg	40.000.000	8	Keg	40.800.000	10	Keg	43.780.000	30	Keg	197.285.000	Margahayu	
6 0 1 17 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		96	%	20.000.000	0	98	%	10.000.000	99	%	10.200.000	100	%	10.945.000	100	%	51.145.000	100	%	51.145.000	Margahayu
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		96	%	537.340.000	97	%	281.496.848	98	%	290.920.781	99	%	296.739.191	100	%	318.412.788	100	%	1.724.909.608	Margahayu	
6 0 1 50 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		2	Keg	30.000.000	4	Keg	22.705.000	6	Keg	15.000.000	8	Keg	15.300.000	10	Keg	16.417.500	30	Keg	99.422.500	Margahayu	
6 0 1 51 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		2	Keg	40.000.000	4	Keg	45.535.000	6	Keg	40.000.000	8	Keg	40.800.000	10	Keg	43.780.000	30	Keg	210.115.000	Margahayu	
6 0 1 52 5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik		1	Keg	47.800.000	2	Keg	38.205.000	3	Keg	50.000.000	4	Keg	51.000.000	5	Keg	54.725.000	15	Keg	241.730.000	Margahayu	
6 0 1 53 5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi keselamatan ibu melahirkan dan anak		2	Keg	52.860.000	4	Keg	22.830.000	6	Keg	50.000.000	8	Keg	51.000.000	10	Keg	54.725.000	30	Keg	231.415.000	Margahayu	
6 0 1 54 5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1	Paket	45.000.000	2	Paket	25.100.152	3	Paket	40.000.000	0	Paket	40.800.000	0	Paket	43.780.000	6	Keg	194.680.152	Margahayu	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
				Target	Anggaran		2018		2019		2020		2021										
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pemeliharaan Kantrantibmas		2	Keg	171.875.000	4	Keg	45.410.000	6	Keg	35.000.000	8	Keg	35.700.000	10	Keg	38.307.500	30	Keg	326.292.500	Margahayu
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan wawasan Kebangsaan		2	Keg	65.000.000	4	Keg	101.844.375	6	Keg	80.000.000	8	Keg	81.600.000	10	Keg	87.560.000	30	Keg	416.004.375	Margahayu
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		2	Keg	35.000.000	4	Keg	22.705.000	6	Keg	10.000.000	8	Keg	10.200.000	10	Keg	10.945.000	30	Keg	88.850.000	Margahayu
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		2	Keg	75.000.000	4	Keg	45.146.500	6	Keg	30.000.000	8	Keg	31.547.356	10	Keg	32.953.151	30	Keg	214.647.007	Margahayu
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran serta Kepemudaan		2	Keg	15.000.000	4	Keg	22.705.000	6	Keg	15.000.000	8	Keg	15.300.000	10	Keg	16.417.500	30	Keg	84.422.500	Margahayu
6 0 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan anak Usia dini		2	Keg	50.000.000	4	Keg	22.705.000	6	Keg	0			0			0	12	Keg	72.705.000	Margahayu
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah					0			22.705.000			0			0			0			22.705.000	Margahayu
6 0 1 68	5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Lingkungan Sehat		2	Keg	50.000.000	4	Keg	41.255.000	6	Keg	50.000.000	8	Keg	51.000.000	10	Keg	54.725.000	30	Keg	246.980.000	Margahayu
6 0 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan				0			0	2	Kali	40.000.000	2	Kali	40.800.000	2	Kali	43.780.000	6	Keg	124.580.000	Margahayu
6 0 1 86	5.1.2.86	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa					0			0			0			0			0			0	Margahayu
6 0 1 87	5.1.2.87	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					28.763.845			0			0			0			0			28.763.845	Margahayu
6 0 1 88	5.1.2.88	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pendataan perjinan usaha mikro kecil menengah		1	Kali	69.000.000	1	Kali	89.030.000	1	Kali	34.000.000	1	Kali	39.780.000	1	Kali	53.630.500	5	Keg	285.440.500	Margahayu
6 0 1 91	5.1.2.91	Program Penumbuhan Nilai Budaya					0			22.705.000			0			0			0			22.705.000	Margahayu
x xx xx		Urusan Rutin																				0	
x xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Program Penataan Administrasi Perkantoran		96	%	459.176.310	97	%	729.967.413	98	%	611.834.370	99	%	724.501.557	100	%	674.687.418	100	%	3.200.167.068	Margahayu
x xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		96	%	296.350.000	97	%	560.642.000	98	%	460.000.000	99	%	542.800.000	100	%	503.470.000	100	%	2.363.262.000	Margahayu
x xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur		96	%	42.000.000	97	%	41.700.000	98	%	58.000.000	99	%	70.800.000	100	%	64.028.250	100	%	276.528.250	Margahayu
x xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					20.000.000			22.705.000			0			0			0			42.705.000	Margahayu
x xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	%	33.250.000	100	%	30.084.000	100	%	31.000.000	100	%	36.580.000	100	%	33.929.500	100	%	164.843.500	Margahayu
	7.1.6	KECAMATAN MARGAASIH																				0	
6 0 1		Kewilayahan																				0	
6 0 1		Kecamatan																				0	
6 0 1 7	5.1.2.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan				0			0	1	Keg	30.000.000	1	Keg	32.130.000	1	Keg	36.200.588	3	Keg	98.330.588	Margasih
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terwujudnya Pengembangan Program Pengembangan Kinerja Persampahan.		3	Keg	60.000.000	3	Keg	27.800.000	3	Keg	30.000.000	3	Keg	30.753.000	3	Keg	33.164.171	15	Keg	181.717.171	Margasih
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tercapainya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		7	Keg	414.490.000	8	Keg	160.067.891	4	Keg	50.126.000	4	Keg	76.132.832	4	Keg	34.241.137	27	Keg	735.057.860	Margasih
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.				0			0			20.000.000	1	Keg	21.930.000	1	Keg	25.173.500	2	Keg	67.103.500	Margasih
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga yang terbina.				0	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.753.000	1	Keg	33.164.171	4	Keg	123.917.171	Margasih
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.		2	Keg	60.000.000	2	Keg	60.000.000	2	Keg	40.000.000	2	Keg	41.106.000	2	Keg	44.437.247	10	Keg	245.543.247	Margasih

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021														
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Paket	60.000.000	1	Paket	60.000.000	1	Paket	60.000.000	1	Paket	30.906.000	1	Paket	66.328.342	5	Keg	277.234.342	Margaasih	
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			0	0	1	Keg	40.000.000	1	Keg	41.820.000	1	Keg	45.969.000	3	Keg	127.789.000		Keg	127.789.000	Margaasih
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.			0	1	Keg	50.000.000	1	Keg	52.500.000	1	Keg	56.100.000	1	Keg	71.142.500	4	Keg	229.742.500	Margaasih	
6 0 1 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Tercapainya kegiatan Pelaksanaan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	1	Keg	60.000.000	1	Keg	27.650.000	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.600.000	1	Keg	32.835.000	5	Keg	181.085.000	Margaasih	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tercapainya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. TP2A.	2	Keg	60.000.000	2	Keg	61.060.433	2	Keg	60.000.000	2	Keg	61.506.000	2	Keg	66.328.342	10	Keg	308.894.775	Margaasih	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terwujudnya program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	3	Keg	48.000.000	3	Keg	20.000.000	3	Keg	38.000.897	3	Keg	39.004.800	3	Keg	42.117.673	15	Keg	187.123.370	Margaasih	
6 0 1 77	5.1.2.77	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.	1	Keg	50.000.000	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.000.000	1	Keg	30.855.000	1	Keg	33.383.618	5	Keg	174.238.618	Margaasih	
6 0 1 90	5.1.2.90	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				60.000.000			30.826.000			0		0				0		90.826.000	Margaasih		
x xx xx		<b>Urusan Rutin</b>																		0			
x xx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	234.967.184	100	%	262.623.174	100	%	253.990.168	100	%	301.206.939	100	%	280.779.111	100	%	1.333.566.576	Margaasih
x xx xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	%	300.800.000	100	%	311.400.000	100	%	132.400.000	100	%	157.013.160	100	%	146.364.541	100	%	1.047.977.701	Margaasih
x xx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Good Governance	100	%	17.000.000	100	%	24.000.000	100	%	38.000.000	100	%	45.064.200	100	%	42.007.950	100	%	166.072.150	Margaasih
x xx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan/Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	100	%	15.000.000	100	%	7.000.000	100	%	30.000.000	100	%	35.400.000	100	%	32.835.000	100	%	120.235.000	Margaasih
x xx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100	%	20.000.000	100	%	23.300.000	100	%	20.000.000	100	%	23.718.000	100	%	22.437.250	100	%	109.455.250	Margaasih
		7.1.7	KECAMATAN DAYEUKHOLOT																	0			
6 0 1		<b>Kecamatan</b>																		0			
6 0 1 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	100	%	35.000.000	100	%	76.357.800	100	%	50.000.000	100	%	51.000.000	100	%	54.725.000	100	%	267.082.800	Dayeuhkolot	
6 0 1 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				150.000.000			31.886.840			60.000.000			63.141.045			71.140.457			376.168.341	Dayeuhkolot	
6 0 1 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				15.000.000			5.304.500			5.463.635			5.740.095			6.467.314			37.975.544	Dayeuhkolot	
6 0 1 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				805.130.887			1.177.224.258			828.845.250			845.422.155			845.422.155			4.502.044.705	Dayeuhkolot	
6 0 1 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				55.000.000			65.600.000			487.700.000			497.454.000			250.000.000			1.355.754.000	Dayeuhkolot	
6 0 1 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga				60.000.000			33.948.800			54.967.264			36.736.608			41.390.812			227.043.483	Dayeuhkolot	
6 0 1 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah				40.000.000			43.882.800			50.000.000			51.000.000			51.000.000			235.082.800	Dayeuhkolot	
6 0 1 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				60.000.000			23.045.000			54.636.350			57.400.950			64.673.143			259.755.442	Dayeuhkolot	
6 0 1 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				0			243.045.000			600.000.000			612.000.000			500.000.000			1.955.045.000	Dayeuhkolot	
6 0 1 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				80.000.000			92.271.900			263.560.000			268.831.200			214.831.200			919.494.300	Dayeuhkolot	
6 0 1 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan				43.500.000			81.357.450			33.328.174			33.994.737			33.994.737			226.175.099	Dayeuhkolot	
6 0 1 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				55.000.000			30.337.400			145.894.534			148.812.425			148.812.425			528.856.783	Dayeuhkolot	
6 0 1 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				125.000.000			169.889.000			300.000.000			303.960.000			326.161.000			1.225.010.000	Dayeuhkolot	
6 0 1 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan				35.000.000			11.419.900			23.000.000			23.460.000			20.000.000			112.879.900	Dayeuhkolot	
6 0 1 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				190.040.000			24.650.000			256.790.845			261.926.662			280.000.000			1.013.407.507	Dayeuhkolot	
6 0 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah				0			0			54.636.350			57.400.950			64.673.143			176.710.442	Dayeuhkolot	
6 0 1 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				0			0			218.545.400			229.603.797			258.692.572			706.841.770	Dayeuhkolot	
x xx xx		<b>Urusan Rutin</b>																		0			
x xx xx	1	5.2.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			730.124.878			719.284.797			862.430.808			900.255.605			900.255.605			4.112.351.693	Dayeuhkolot	
x xx xx	2	5.2.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			554.461.250			2.518.856.500			393.685.847			1.142.703.098			966.621.418			5.576.328.113	Dayeuhkolot	
x xx xx	3	5.2.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur			25.000.000			52.514.550			97.000.000			65.740.969			64.026.411			304.281.931	Dayeuhkolot	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021								
x	xx	5	5.2.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		0	100.000.000		118.000.000		80.000.000		298.000.000	Dayeuhkolot	
x	xx	6	5.2.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		265.575.000		375.928.415	495.375.359		618.927.252		574.081.252		2.329.887.277	Dayeuhkolot	
			7.1.8	KECAMATAN KATAPANG													
6	0			Kewilayahan													
6	0	1		Kecamatan													
6	0	1	15	5.1.1.15	Program Administrasi kependudukan	72	25.000.000	74	22.278.900	76	22.947.267	78	24.108.399	80	27.162.720	121.947.286	Katapang
6	0	1	15	5.1.2.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		0		0	80			28.060.380	100	29.152.757	57.213.137	Katapang
6	0	1	15	5.1.2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20	28.000.000	40	82.436.000	60	43.709.080	80	43.880.759	100	51.738.514	249.764.354	Katapang
6	0	1	15	5.1.2.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	20	24.000.000		0		0	100	25.500.000	100	31.740.500	81.240.500	Katapang
6	0	1	15	5.1.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20	24.500.000		0		25.000.000	80	25.500.000	100	27.362.500	102.362.500	Katapang
6	0	1	16	5.1.2.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	20	22.290.000	40	13.900.000	60	13.659.088	80	31.372.265	100	33.680.286	114.901.639	Katapang
6	0	1	16	5.1.2.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	20	65.000.000		0		0	80	34.680.000	100	27.362.500	127.042.500	Katapang
6	0	1	16	5.1.2.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		0	40	15.913.500	60	16.390.905	80	27.420.285	100	30.386.344	90.111.034	Katapang
6	0	1	16	5.1.2.16	Program pemeliharaan kanrantribmas dan pencegahan tindak kriminal	20	76.500.000	40	71.080.300	60	72.212.709	80	73.857.272	100	86.662.011	380.312.292	Katapang
6	0	1	17	5.1.2.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		0		0		0	80	28.060.380	100	31.341.757	59.402.137	Katapang
6	0	1	17	5.1.2.17	Program pengelolaan keragaman budaya	20	50.000.000	40	37.131.500	60	38.245.445	80	41.200.664	100	46.365.699	212.943.308	Katapang
6	0	1	17	5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	20	38.000.000	40	68.035.300	60	18.576.359	80	60.316.323	100	21.988.868	206.916.850	Katapang
6	0	1	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	20	23.000.000		0		25.000.000		0		32.835.000	80.835.000	Katapang
6	0	1	18	5.1.2.18	Program Pendidikan Non Formal	20	26.500.000	40	26.000.000	60	26.000.000	80	26.800.949	100	30.743.643	136.044.591	Katapang
6	0	1	18	5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20	25.000.000	40	61.631.500	60	38.245.445	80	40.180.664	100	45.271.199	210.328.808	Katapang
6	0	1	18	5.1.2.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	20	28.000.000		0		0		30.600.000		32.835.000	91.435.000	Katapang
6	0	1	18	5.1.2.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	20	29.000.000		0		0	80	30.843.933	100	36.014.728	95.858.661	Katapang
6	0	1	19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		0		0		0	80	30.360.569	100	33.331.385	63.691.955	Katapang
6	0	1	20	5.1.2.20	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	20	22.500.000	40	25.000.000	60	27.000.000	80	26.400.285	100	30.346.942	131.247.227	Katapang

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021									
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021												
6 0 1 20 5.1.2.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan		20	68.500.000	40	%	63.654.000	60	%	65.563.620	80	%	68.881.140	100	%	77.607.772	100	%	344.206.531	Katapang
6 0 1 20 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan		20	145.000.000	40	%	140.176.500	60	%	183.851.582	80	%	105.387.408	100	%	159.815.852	100	%	734.231.341	Katapang
6 0 1 21 5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah SDM di Bidang Sosial yang Berkualitas		20	16.675.000			0			0		25.500.000			24.079.000	20	%	66.254.000	Katapang	
6 0 1 21 5.1.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Usulan program/kegiatan yang ditelapkan dalam aplikasi		20	36.825.000	40	%	29.705.200	60	%	30.596.356	80	%	40.820.759	100	%	47.161.960	100	%	185.109.275	Katapang
6 0 1 22 5.1.2.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam		20	25.000.000	40	%	33.255.000	60	%	35.000.000	80	%	36.261.899	100	%	38.502.786	100	%	168.019.685	Katapang
6 0 1 24 5.1.2.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		20	30.000.000	40	%	24.853.334	60	%	24.298.178	80	%	118.072.265	100	%	18.108.480	100	%	215.332.257	Katapang
6 0 1 29 5.1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bagi kesehatan anak dan balita		20	25.000.000			0			0		25.500.000			28.457.000	20	%	78.957.000	Katapang	
6 0 1 32 5.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan			0	40	Keg	28.000.000	60	Keg	29.000.000	80	Keg	26.734.864	100	Keg	30.395.560	100	Keg	114.130.424	Katapang
6 0 1 63 5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				0			0			0		0			0			0	Katapang	
6 0 1 65 5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini				0			0			0		0			0			0	Katapang	
x xx xx	<b>Urusan Rutin</b>																				
x xx xx 1 5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran		20	308.592.004	40	%	341.593.674	60	%	518.010.355	80	%	900.255.605	100	%	741.278.920	100	%	2.809.730.558	Katapang
x xx xx 2 5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur untuk penunjang dinas		20	375.000.000	40	%	1.532.500.000	60	%	1.365.834.650	80	%	944.126.162	100	%	996.585.913	100	%	5.214.046.725	Katapang
x xx xx 3 5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan aparatur kantor		20	44.500.000	40	%	45.853.400	60	%	45.000.000	80	%	53.100.000	100	%	79.898.500	100	%	268.351.900	Katapang
x xx xx 5 5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		20	15.000.000	40	%	10.764.125	60	%	20.927.270	80	%	29.765.604	100	%	23.879.628	100	%	100.336.627	Katapang
x xx xx 6 5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan		20	40.000.000	40	%	37.131.500	60	%	45.131.500	80	%	65.363.513	100	%	66.066.699	100	%	253.893.213	Katapang
	7.1.9	KECAMATAN PAMELUNGPEUK																			
6 0 1	<b>Kewilayahan</b>																				
6 0 1	<b>Kecamatan</b>																				
6 0 1 5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan e-KTP lingkup Kecamatan		100	37.300.000	100	%	38.045.000	100	%	39.636.350	100	%	42.100.950	100	%	48.255.643	100	%	205.337.942	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan		100	25.000.000	100	%	19.700.000	100	%	27.318.175	100	%	28.700.474	100	%	34.184.375	100	%	134.903.025	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Rumah sehat Perumahan		100	20.000.000	100	%	20.000.000	100	%	21.864.240	100	%	24.041.560	100	%	0	100	%	85.905.800	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.17	Program Pendidikan Menengah	Rata rata angka partisipasi murni jenjang Pendidikan Menengah tingkat kecamatan			0	100	%	29.730.000	100	%	44.636.350	100	%	37.000.950	100	%	0	100	%	111.367.300	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase esapan dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan		100	20.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.927.270	100	%	11.480.190	100	%	12.934.628	100	%	65.342.088	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				40.000.000			0			0		0			0			40.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1 5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan		100	110.900.000	100	%	91.511.627	100	%	128.545.400	100	%	107.203.797	100	%	116.407.572	100	%	554.568.397	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				40.000.000			23.600.000			0		0			0			63.600.000	Pameungpeuk	
6 0 1 5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah penyuluhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		1	25.000.000	1	Keg	14.520.000	1	Keg	12.781.810	1	Keg	14.040.569	1	Keg	15.066.081	5	Keg	81.408.461	Pameungpeuk
6 0 1 5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan yang dibina		100	45.000.000	100	%	35.000.000	100	%	29.172.715	100	%	31.260.854	100	%	36.315.828	100	%	176.749.397	Pameungpeuk

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
				Target	Anggaran	2018	2019	2020	2021															
6 0 1	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata rata prosentase usulan Program / kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD			100	%	50.000.000	100	%	40.000.000	100	%	43.709.080	100	%	45.920.759	100	%	51.738.514	100	%	231.368.354	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yg berkepenting skala kecamatan			100	%	25.000.000	100	%	19.160.000	100	%	22.781.810	100	%	24.240.569	100	%	27.858.885	100	%	119.041.265	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						40.000.000			0			0			0					40.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrimitbas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat			100	%	70.000.000	100	%	39.044.160	100	%	49.263.000	100	%	52.520.718	100	%	63.246.449	100	%	274.074.327	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan			100	%	75.000.000	100	%	95.000.000	100	%	108.345.430	100	%	103.321.709	100	%	116.411.657	100	%	498.078.796	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa			100	%	50.000.000	100	%	28.889.300	100	%	75.563.620	100	%	68.881.140	100	%	77.607.772	100	%	300.941.831	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan tingkat Kecamatan (Lsm/ non Lsm.organisasi)			100	%	65.000.000	100	%	49.250.000	100	%	44.636.350	100	%	47.200.950	100	%	42.783.143	100	%	248.870.442	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan			100	%	35.000.000	100	%	52.556.840			0			0			0	100	%	87.556.840	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana Alam			100	%	20.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.927.270	100	%	11.480.190	100	%	12.934.628	100	%	65.342.088	Pameungpeuk
6 0 1	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini						20.000.000			0			0			0			0		20.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						20.000.000			0			0			0			0		20.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba						25.000.000			0			0			0			0		25.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.81	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						20.000.000			0			0			0			0		20.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.93	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						30.000.000			0			0			0			0		30.000.000	Pameungpeuk	
6 0 1	5.1.2.94	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan						10.000.000			0			0			0			0		10.000.000	Pameungpeuk	
x xx xx		Usuran Rutin																				0		
x xx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran		100	%	269.954.960	100	%	239.625.409	100	%	234.459.214	100	%	285.010.345	100	%	277.577.130	100	%	1.306.667.058	Pameungpeuk
x xx xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan sarana dan Pasarana Penunjang aparatur		100	%	235.000.000	100	%	185.271.300	100	%	127.578.488	100	%	174.713.328	100	%	128.599.153	100	%	851.162.269	Pameungpeuk
x xx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja aparatur (%)		100	%	37.350.000	100	%	37.800.000	100	%	27.318.175	100	%	33.202.510	100	%	32.336.571	100	%	168.007.256	Pameungpeuk
x xx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur		100	%	79.200.000	100	%	61.500.000	100	%	40.099.985	100	%	58.705.507	100	%	49.250.457	100	%	288.755.949	Pameungpeuk
x xx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	%	44.500.000	100	%	40.000.000	100	%	38.245.445	100	%	46.483.513	100	%	45.271.199	100	%	214.500.158	Pameungpeuk
			Sub Total Pagu Program SKPD					309.696.124.827			356.761.145.157	100.170	0	290.956.433.607	102.461	0	327.831.197.717	103.752	0	318.688.670.052		1.603.933.571.361		
			Selisih Sub Total dan Pagu Prog Penda					0			0			0			0			0		0		
		5.1.2.1	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	2	Opini	1	Opini	15.499.698.749	1	Opini	13.917.384.032	1	Opini	13.177.154.346	1	Opini	14.353.677.832	1	Opini	15.185.809.182	1	Opini	72.133.724.141
		4.3.1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kemandirian fiskal	N/A	%	18	%		18,1	%		18,2	%		18,3	%		18,4	%		18,4	%	
3 0			Penunjang Urusan																					
3 0 3			Keuangan																					
3 0 3	50	5.1.1.50	Program Peningkatan Pendapatan I	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang I				0			0			971.923.885			995.683.032			1.059.650.939		3.027.257.856	BKD	
3 0 3	51	5.1.1.51	Program Peningkatan Pendapatan II	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang II				0			0			6.773.000.000			7.540.189.730			7.905.484.818		22.218.674.549	BKD	
3 0 3	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		19	%	13.176.097.466	19	%	12.044.455.032			0			0			0		25.220.552.498	BKD	
3 0 3	52	5.1.2.52	Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Capaian Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Daerah				0			0			1.180.556.993			1.216.408.133			1.310.726.129		3.707.691.255	BKD	
3 0 3	53	5.1.2.53	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				0			0			920.118.500			991.050.870			1.074.381.448		2.985.550.818	BKD	



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021												
				Target	Anggaran	2018		2019		2020		2021												
3 0 3 54	5.1.2.54	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran Daerah	Capaian Peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran daerah		0		0		1.790.000.000		1.978.800.000		2.123.330.000		5.892.130.000	BKD								
3 0 3 55	5.1.2.55	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Penataan Arsip Perangkat Daerah		189.046.283		0		0		0		0		189.046.283	BKD								
3 0 3 49	5.1.3.49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.134.555.000		1.872.929.000		1.541.554.968		1.631.546.067		1.712.235.847		8.892.820.882	BKD								
		<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>			<b>15.499.698.749</b>		<b>13.917.384.032</b>	<b>0</b>	<b>13.177.154.346</b>	<b>0</b>	<b>14.353.677.832</b>	<b>0</b>	<b>15.185.609.182</b>		<b>72.133.724.141</b>									
		<b>Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>									
	5.2.1.1	Program Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas Persentase penegakan Perda	N/A 100	% %	10 100	% %	26.985.815.662 100	15 100	% %	36.340.617.335 100	20 100	% %	32.253.290.998 100	25 100	% %	22.576.718.168 100	30 100	% %	24.316.569.551 100	30 100	% %	142.473.011.714 100	
	1.5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																						
1		Urusan Wajib																						
1 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																						
1 1 5		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																						
1 1 5 16	5.5.1.16	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal			3.037.165.000		8.086.400.000		8.541.400.000		7.692.228.000		8.254.062.300		35.611.255.300	Satpol PP								
1 1 5 20	5.5.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (nekat)			300.000.000		50.000.000		300.000.000		306.000.000		328.350.000		1.284.350.000	Satpol PP								
1 1 5 15	5.5.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			18.921.602.542		22.956.161.501		19.661.818.501		10.969.421.285		11.872.384.370		84.381.388.198	Satpol PP								
1 1 5 22	5.5.2.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			109.815.000		109.815.000		109.815.000		112.571.357		121.397.447		563.413.804	Satpol PP								
	6.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													0									
5		Urusan Wajib													0									
5 1		Urusan Pemerintahan Umum													0									
5 1 5		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													0									
5 1 5 16	5.1.1.16	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal		20	%	2.012.479.134	20	%	2.445.103.600	20	%	2.450.108.337	20	%	1.894.463.436	20	%	2.042.997.728	100	%	10.845.152.235		Kesbangpol	
5 1 5 17	5.1.1.17	Program pencembangan wawasan kebangsaan		20	%	1.874.310.036	20	%	1.874.411.611	20	%	540.000.000	20	%	734.966.188	20	%	792.590.779	100	%	5.816.278.614		Kesbangpol	
5 1 5 21	5.1.2.21	Program pendidikan politik masyarakat		20	%	730.443.950	20	%	818.725.623	20	%	650.149.160	20	%	666.467.903	20	%	718.721.928	100	%	3.584.508.564		Kesbangpol	
5 1 5 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			0		0		0		0		200.600.000		186.065.000		386.665.000							
		<b>Sub Total Pagu Program SKPD</b>			<b>26.985.815.662</b>		<b>36.340.617.335</b>		<b>32.253.290.998</b>		<b>22.576.718.168</b>		<b>24.316.569.551</b>		<b>142.473.011.714</b>									
		<b>Selisih SubTotal dgn Pagu Proq Pemda</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>									
		<b>Jumlah Total</b>			<b>1.861.019.138.515</b>		<b>2.642.918.449.920</b>		<b>1.723.687.009.096</b>		<b>1.718.655.897.471</b>		<b>1.723.495.517.500</b>		<b>9.669.776.012.502</b>									



Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kinerja dari perangkat daerah diukur dengan menggunakan indikator-indikator kinerja daerah berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran (*impact*), sampai dengan program (*outcome*). Penetapan indikator kinerja daerah ini juga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah ini dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah perlu mencantumkan indikator pada level tujuan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan indikator pada kesembilan tujuan dan menjadikan indikator-indikator tujuan ini sebagai Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU disini merupakan target pencapaian yang menjadi ukuran dari

efektivitas dan efisiensi pemerintahan secara umum. Melalui IKU dapat tergambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan indikator tujuan sebagai IKU daerah atau IKU Bupati berkaitan dengan kompleksitas dari indikator tersebut sehingga dianggap strategis untuk dijadikan IKU.

Berikut dijabarkan IKU Kabupaten Bandung yang diurutkan berdasarkan urutan tujuan per misi beserta capaian dan proyeksi nilainya sampai dengan akhir periode berlakunya RPJMD pada Tabel 8.1. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung secara keseluruhan beserta capaian dan proyeksi capaiannya dijabarkan pada Tabel 8.2.



**TABEL 8.1**  
**PROYEKSI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BANDUNG**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,69	71,02	71,35	71,84	72,32	72,80
2.	Tingkat Kemiskinan	7,61	7,36	7,13	6,9	6,68	6,41
3.	Persentase Desa Mandiri	N/A	0,37	4	8	12	16
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,33	6,17	6,175	6,18	6,185	6,19
5.	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	86	89	92	94
6.	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	60,52	60,15	61,83	70,70	71,90	73,33
7.	Indeks Kualitas Air	20	19	21	23	24	25
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	37,09	40,23	45,18	50,01
9.	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	15	20	25	30

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017

**TABEL 8.2.**  
**PROYEKSI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KABUPATEN BANDUNG**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi		Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks pendidikan	62,83	62,89	63,45	64,30	65,15	65,99
2.	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,46	8,47	8,50	8,53	8,56	8,60
3.	Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	96,81	96,88	96,92	96,97	96,99	97,05
4.	Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	96,30	96,45	96,60	96,78	96,80	97,00
5.	Persentase pemustaka	7,86	8,25	8,33	8,41	8,50	8,58
6.	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	383	154	375	163	410	175
7.	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	76,09	76,75	76,83	76,92	77,19	77,35
8.	Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	N/A	48,39	50,15	69,23	92,31	100,00
9.	Indeks kesehatan	81,69	81,74	81,78	81,83	81,87	81,91
10.	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	68	68	75	80	85
11.	Indeks pengeluaran	68,82	69,69	70,00	70,46	70,92	71,36
12.	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,73	3,60	3,50	3,40	3,30
13.	Indeks kedalaman kemiskinan	1,00	1,12	1,01	0,97	0,87	0,8
14.	Persentase Desa Mandiri	N/A	0,37	4	8	12	16



No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi		Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	4,24	4,25	4,26	4,27	4,28	4,28
16.	Nilai tukar petani	104,86	105,36	105,86	106,36	106,86	107,36
17.	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	5,90	6,00	6,08	6,12	6,19	6,22
18.	Persentase koperasi berkualitas	1,50	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50
19.	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	5,94	6,04	6,09	6,12	6,14	6,17
20.	Jumlah kunjungan wisata	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
21.	Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	6,53	6,65	6,75	6,85	6,95	7,00
22.	Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	35	45	55	65	75	85
23.	Laju pertumbuhan investasi	2,70	2,72	2,74	2,76	2,78	2,80
24.	Skor PPH Konsumsi	75,86	83	86	89	92	94
25.	Skor PPH Ketersediaan	81,3	86	88,3	90,6	93	95,3
26.	Moda share	1,41	1,45	1,57	1,84	2,16	2,16
27.	Level of service (LOS) jalan	D	D	D	C	C	C
28.	Luas sawah yang terairi irigasi	N/A	40	45	50	55	60
29.	Akses aman terhadap air bersih	76,04	77,12	76,64	76,94	77,24	80,00
30.	Akses aman terhadap sanitasi	70,20	70,51	90	100	100	100
31.	Persentase kawasan kumuh	0,72	0,65	0,49	0,35	0,25	0,15
32.	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	56	56,5	57	57,5	58	58
33.	Response time terhadap kejadian kebakaran	55,35	60	65	70	75	80
34.	Persentase penanganan bencana	100	100	100	100	100	100
35.	Luas genangan	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55
36.	Indeks kualitas air	20	19	21	22	24	25
37.	Indeks kualitas udara	60	72	75	77	78	80
38.	Persentase pengelolaan sampah	24	26	35	50	65	75
39.	Luas ruang terbuka hijau	38,283	46,546	47,01	47,48	47,95	48,43
40.	Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
41.	Nilai SAKIP kabupaten	54,61	57,00	63,00	68,00	72,00	77,00
42.	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	N/A	1,2	2,0	2,5	3,0	3,2



No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi		Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
43.	Indeks kepuasan masyarakat	N/A	80,46 (Baik)	80,75 (Baik)	81,12 (Baik)	81,78 (Baik)	82,70 (Baik)
44.	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	2	1	1	1	1	1
45.	Tingkat kemandirian fiskal	N/A	18	18,10	18,20	18,30	18,40
46.	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	N/A	10	15	20	25	30
47.	Persentase penegakan Perda	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2017



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun ke depan. Dalam implementasinya RPJMD akan menjadi dokumen acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih lanjut diturunkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Meninjau fungsi strategis RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya kesinambungan pembangunan. Maka dari itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan pedoman transisi, bahwa:

1. Seluruh ketetapan indikator kinerja, indikasi pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang termuat/tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Seluruh ketetapan indikator kinerja, indikasi pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang termuat/tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung

tahun 2016-2021 tidak dapat berubah sampai dengan akhir masa berlakunya RPJMD.

Untuk memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung bersama segenap masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Bandung yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara substansi dalam RPJMD dengan substansi dalam Renstra Perangkat Daerah;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda



terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah, penetapan

perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

7. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program/kegiatan baru diluar yang ada dalam dokumen RPJMD.

BUPATI BANDUNG  
  
DADANG M. NASER

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp								
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																BAKESBANGPOL			
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkraf																BAKESBANGPOL			
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	752.890.050	100%	980.506.683	100%	763.390.933	100%	993.556.237	100%	926.173.338	100%	4.416.517.241	BAKESBANGPOL
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	236.745.000	100%	170.600.000	100%	195.000.000	100%	577.667.485	100%	539.420.450	100%	1.719.432.935	BAKESBANGPOL
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	52.000.000	100%	55.100.000	100%	0	100%	44.026.538	100%	41.040.661	100%	192.167.199	BAKESBANGPOL
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Jml Aparatur yg mengikuti Pembinaan Karakter	0%	0%	0	0%	0	0%	0	36 orang	200.600.000	36 orang	186.065.000	100%	386.665.000	BAKESBANGPOL
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Rencana dan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	100%	100%	45.000.000	100%	49.056.175	20 persen	66.836.700	100%	79.261.642	100%	73.886.124	100%	314.040.641	BAKESBANGPOL
						Jumlah 1				1.086.635.050		1.255.262.858		1.025.227.633		1.895.111.901		1.766.585.574		7.028.823.016	BAKESBANGPOL
5	1					Usulan Wajib														BAKESBANGPOL	
5	1	5				Usulan Penunjang Umum														BAKESBANGPOL	
5	1	5	1	5		Usulan Penunjang Umum Serta Perlindungan Masyarakat														BAKESBANGPOL	
5	1	5	2		5.2.	Program Peningkatan stabilitas ketertarikan dan ketertiban wilayah														BAKESBANGPOL	
5	1	5	19	16	5.1.1.16	Program pembinaan kemitraan dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Sosial	20 persen	20 persen	2.012.479.134	20 persen	2.445.103.600	20 persen	2.450.108.337	20 persen	1.894.463.436	20 persen	2.042.997.728	20 persen	10.845.152.235	BAKESBANGPOL
5	1	5	19	17	5.1.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosetase Fasilitas Kegiatan Wawasan Kebangsaan	20 persen	20 persen	1.874.310.036	20 persen	1.874.411.611	20 persen	540.000.000	20 persen	734.966.188	20 persen	792.590.779	20 persen	5.816.278.614	BAKESBANGPOL
5	1	5	19	21	5.1.2.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Papol dan Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	20 persen	20 persen	730.443.950	20 persen	818.725.623	20 persen	650.149.160	20 persen	666.467.903	20 persen	718.721.928	20 persen	3.584.508.564	BAKESBANGPOL
						Jumlah 2			4.617.233.120		5.138.240.834		3.640.257.497		3.295.897.527		3.554.310.434		20.245.939.412	BAKESBANGPOL	
						Jumlah Total (1+2)			5.703.868.170		6.393.503.692		4.665.485.130		5.191.009.428		5.320.896.008		27.274.762.428	BAKESBANGPOL	
						5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih													BAPPEDA	
						5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkraf													BAPPEDA	
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi	100 %	100 %	1.310.185.700	100 %	925.386.880	100 %	960.362.216	100 %	996.614.801	100 %	929.024.469	100%	5.121.574.066	BAPPEDA
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	1.080.000.000	100 %	583.265.336	100 %	530.000.000	100 %	776.735.250	100 %	724.057.131	100%	3.694.057.717	BAPPEDA
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100 %	100 %	100.000.000	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100%	100.000.000	BAPPEDA
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	255.000.000	100 %	134.734.300	100 %	257.888.766	100 %	159.781.406	100 %	148.945.045	100%	956.349.517	BAPPEDA
						Jumlah 1			2.745.185.700		1.643.388.516		1.748.250.982		1.933.131.456		1.802.026.645		9.871.981.300	BAPPEDA	
3	0					Penunjang Usulan Perencanaan														BAPPEDA	
3	0	2																		BAPPEDA	
3	0	2	6	15	5.2.1.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan	92 %	92 %	1.350.000.000	93 %	1.245.400.000	94 %	0	95 %	0	0	93 %	2.595.400.000	BAPPEDA	
3	0	2	6	19	5.2.1.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar	92 %	92 %	500.000.000	93 %	294.646.500	0 %	0	0 %	0	0	93 %	794.646.500	BAPPEDA	
3	0	2	6	20	5.1.1.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase meningkatnya kemampuan teknis aparat perencanaan daerah	100 %	100 %	200.000.000	100 %	76.390.000	100 %	61.390.000	100 %	78.307.389	100 %	84.447.033	100 %	500.534.422	BAPPEDA
3	0	2	6	21	5.2.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan	100 %	100 %	2.900.000.000	100 %	3.551.592.000	100 %	1.170.000.000	100 %	1.428.000.000	100 %	1.176.587.500	100 %	10.226.179.500	BAPPEDA
3	0	2	6	22	5.2.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi	92 %	92 %	1.450.000.000	93 %	944.267.000	94 %	924.267.000	95 %	992.983.602	95 %	938.841.196	95 %	5.250.358.798	BAPPEDA
3	0	2	6	23	5.2.1.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya	92 %	92 %	850.000.000	93 %	1.116.104.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	93 %	1.966.104.000	BAPPEDA
3	0	2	6	24	5.2.1.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan prasarana dan SDA	92 %	92 %	432.430.000	93 %	147.942.000	0 %	0	0 %	0	95 %	0	93 %	580.372.000	BAPPEDA
3	0	2	6	26	5.2.1.26	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial pemerintahan	0 %	0 %	0	0 %	0	94 %	996.540.000	95 %	1.338.518.154	95 %	1.267.468.282	95 %	3.602.526.436	BAPPEDA
3	0	2	6	27	5.2.1.27	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan prasarana dan SDA terhadap perencanaan tata ruang yang ditetapkan	92 %	92 %	500.000.000	93 %	500.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	93 %	1.000.000.000	BAPPEDA



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021								
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp							
3	0	2	6	28	5.2.1.28	Program Perencanaan pembangunan fisik	0 %	0 %	0	0 %	0	94 %	942.183.500	95 %	1.103.259.305	95 %	1.008.393.648	95 %	3.053.836.453	BAPPEDA				
3	0	2	6	29	5.2.1.29	Program Pengembangan Data/Informasi Kelitbangan	0 %	0 %	0	0 %	0	94 %	1.010.400.000	95 %	1.127.100.000	95 %	1.169.473.250	95 %	3.306.973.250	BAPPEDA				
3	0	2	6	30	5.2.1.30	Program Pengendalian dan Evaluasi	0 %	0 %	0	0 %	0	94 %	1.120.000.000	95 %	1.340.280.000	95 %	1.233.501.500	95 %	3.693.781.500	BAPPEDA				
3	0	2	6	31	5.2.2.31	Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 %	0 %	0	0 %	0	95 %	963.287.000	96 %	1.138.794.544	96 %	1.233.318.403	96 %	3.335.389.947	BAPPEDA				
3	0	2	6	32	5.2.2.32	Program Kerja Sama Pembangunan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000.000	BAPPEDA				
					Jumlah 2				8.182.430.000		8.026.341.500		7.188.067.500		8.547.232.994		8.112.030.812		40.056.102.806					
					Jumlah Total (1+2)				10.927.615.700		9.660.728.016		8.936.318.882		10.480.364.450		9.914.067.457		49.928.984.106					
					5.																			
					5.1.1.1		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														BKD			
					5.1.1.1		Program Peningkatan Profesionalisme Binkorasi														BKD			
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	3.841.664.148	100 %	6.796.555.910	100 %	6.069.585.956	100 %	8.047.805.563	100 %	7.376.434.706	100%	32.132.046.283	BKD				
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	2.774.515.676	100 %	1.173.879.650	100 %	1.555.700.650	100 %	1.354.733.987	100 %	1.680.933.100	100%	8.539.763.063	BKD				
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	100 %	195.673.500	100 %	182.402.940	100%	873.076.440	BKD				
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	440.000.000	100 %	280.197.570	100 %	0	100 %	355.180.000	100 %	329.356.161	100%	1.404.733.731	BKD				
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	882.328.684	100 %	434.845.184	100 %	490.845.184	100 %	643.487.847	100 %	602.334.745	100%	3.053.841.644	BKD				
					Jumlah 2				8.103.508.508		8.850.478.314		8.281.131.790		10.596.880.897		10.171.461.651		46.003.461.160		BKD			
					5.1.2.1		Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah														BKD			
3	0	0	0		Pembinaan Urusan Keuangan																BKD			
3	0	3	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19 %	19 %	13.176.097.466	19 %	12.044.455.032	0 %	0	0 %	0	0 %	0	25.220.552.498	BKD					
3	0	3	20	49	5.1.3.49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 -	0 -	2.134.555.000	0 -	1.672.929.000	0 -	1.541.554.968	0 -	1.631.546.067	0 -	1.712.235.847	8.892.620.882	BKD					
3	0	3	20	50	5.1.1.50	Program Peningkatan Pendapatan I	0 -	0 -	0	0 -	0	0	971.923.885	0 -	995.683.032	0 -	1.059.650.939	3.027.257.856	BKD					
3	0	3	20	51	5.1.1.51	Program Peningkatan Pendapatan II	0 -	0 -	0	0 -	0	0	6.773.000.000	0 -	7.540.189.730	0 -	7.905.484.818	22.218.674.549	BKD					
3	0	3	20	52	5.1.2.52	Program Peningkatan Penerapan Akutansi dan Pelaporan	0 -	0 -	0	0 -	0	0	1.180.556.993	0 -	1.216.408.133	0 -	1.310.726.129	3.707.691.255	BKD					
3	0	3	20	53	5.1.2.53	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah	0 -	0 -	0	0 -	0	0	920.118.500	0 -	991.050.870	0 -	1.074.381.448	2.985.500.818	BKD					
3	0	3	20	54	5.1.2.54	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0 -	0 -	0	0 -	0	0	1.790.000.000	0 -	1.978.800.000	0 -	2.123.330.000	5.892.130.000	BKD					
3	0	3	24	55	5.1.2.55	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Ansp Daerah	1 Keg	1 Keg	189.046.283	0 Keg	0	0 Keg	0	0 Keg	0	0	0	189.046.283	BKD					
					Jumlah 2				15.999.698.799		13.917.384.032		13.177.154.346		14.353.677.832		15.185.809.182		77.133.724.141		BKD			
					Jumlah Total (1+2)				23.603.202.757		22.767.862.346		21.458.286.136		24.950.558.730		25.357.720.833		118.137.185.301		BKD			
					5.																BKPPD			
					5.1.1.1		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														BKPPD			
					5.1.1.1		Program Peningkatan Profesionalisme Binkorasi														BKPPD			
x	xx	xx	xx	1	1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.075.575.732	100 Persen	1.421.668.063	100 Persen	1.265.000.000	100 Persen	1.593.805.297	100 Persen	1.558.889.182	100%	6.914.938.274	BKPPD				
x	xx	xx	xx	2	1.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	546.101.000	100 Persen	3.303.974.312	100 Persen	2.185.000.000	100 Persen	3.145.429.240	100 Persen	2.454.457.985	100%	11.634.962.537	BKPPD				
x	xx	xx	xx	3	1.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	132.000.000	100 Persen	132.000.000	100 Persen	0	100 Persen	156.538.800	100 Persen	145.922.352	100%	566.461.152	BKPPD				
x	xx	xx	xx	4	1.2.1.4	Program fasilitas pindah/puma tugas ASN	100 %	100 %	0	100 %	581.350.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	581.350.000	BKPPD					
x	xx	xx	xx	5	1.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	249.582.000	100 %	247.677.000	100 %	100.000.000	100 %	236.000.000	100 %	218.900.000	100%	1.052.159.000	BKPPD				
x	xx	xx	xx	6	1.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Prosen	100 Prosen	100.000.000	100 Prosen	101.688.149	100 Prosen	105.000.000	100 Prosen	124.519.500	100 Prosen	116.074.598	100%	547.282.247	BKPPD				
					Jumlah 1				2.102.258.732		5.788.352.524		3.655.000.000		5.256.292.837		4.494.244.118		21.297.153.210		BKPPD			
3	0	0	0		Pembinaan Urusan Kepegawaian																BKPPD			
3	0	4	20	47	1.1.1.47	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	14 Persen	14 Persen	9.084.734.678	18 Persen	5.641.279.500	16,84 Persen	9.611.000.000	17 Persen	2.958.000.000	17 Persen	3.600.790.266	17 Persen	30.895.804.444	BKPPD				
3	0	4	20	48	1.1.1.48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100 Persen	100 Persen	5.180.536.178	100 Persen	4.226.704.128	100 Persen	3.108.231.077	100 Persen	3.223.200.000	100 Persen	3.458.620.000	100 Persen	19.197.291.383	BKPPD				
3	0	4	20	49	1.1.2.49	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	1.129.660.000	100 Persen	1.293.775.934	100 Persen	3.611.259.434	100 Persen	3.611.259.434	BKPPD				
					Jumlah 2				14.365.270.856		9.867.983.628		13.848.891.077		7.369.433.500		8.352.786.200		53.704.355.261		BKPPD			
					Jumlah Total (1+2)				16.368.529.588		15.656.941.152		17.503.891.077		12.625.716.317		12.847.030.318		75.001.508.471		BKPPD			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																BPBD		
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkreski																BPBD		
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	0 -	1.103.050.000	0 -	1.523.253.580	0 -	858.517.876	0 -	1.324.552.909	0 -	1.234.721.842	100%	6.044.096.207	BPBD
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	3.568.000.000	100 %	1.200.250.000	100 %	310.250.000	100 %	711.836.475	100 %	663.559.785	100%	6.453.896.260	BPBD
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	220.250.000	100 %	177.032.000	100 %	52.250.190	100 %	209.942.249	100 %	195.703.982	100%	855.178.421	BPBD
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	156.485.822	100 %	364.390.667	100 %	187.830.667	100 %	184.799.588	100 %	172.266.495	100%	1.065.773.239	BPBD
					Jumlah 1			5.047.785.822		3.264.926.247		1.408.848.733		2.431.131.220		2.266.252.105		14.418.944.127	BPBD	
					3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Kawasan Tata Ruang													BPBD	
					3.1.5.1.	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana													BPBD	
1	1					Usuran Wajib Pelayanan Dasar													BPBD	
1	1	5				Keteraturan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													BPBD	
1	1	5	19	15	3.1.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	100 %	621.083.280	100 %	1.482.828.325	100 %	2.852.948.325	100 %	440.126.583	100 %	611.269.090	100 %	6.008.255.603	BPBD
1	1	5	19	22	3.2.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 %	100 %	3.377.072.720	100 %	4.064.342.750	100 %	1.100.000.000	100 %	2.403.517.846	100 %	2.820.167.499	100 %	13.765.100.814	BPBD
1	1					Usuran Wajib Pelayanan Dasar													BPBD	
1	1	4				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													BPBD	
1	1	4	4	23	3.1.1.23	Program Penanganan Darurat Kebencanaan	100 %	100 %	520.072.989	100 %	540.000.000	100 %	2.052.872.062	100 %	2.317.120.150	100 %	2.331.881.333	100 %	7.761.946.534	BPBD
1	1	3	3	24	3.2.1.24	Program Bencanaan	0 -	0 -	0	0 -	960.159.124	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	960.159.124	BPBD
1	1	4	4	27	3.1.2.27	Program perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana	100 %	100 %	63.056.000	100 %	525.585.000	100 %	1.072.872.062	100 %	2.083.250.895	100 %	2.050.575.699	100 %	5.795.339.656	BPBD
1	2					Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar													BPBD	
1	2	7	22			Pemberdayaan Masyarakat Desa													BPBD	
1	2	7	22	15	3.1.1.23	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			450.400.000		600.000.000		0		0		0	1.050.400.000	BPBD	
3	0				4	Rencana Urusan													BPBD	
3	0	2			4.2	Perencanaan													BPBD	
3	0	2	6	15	3.2.1.15	Program pengembangan infrastruktur	0 -	0 -	531.662.500	0 -	360.000.000	0 -	50.000.000	0 -	357.000.000	0 -	383.075.000		1.681.737.500	BPBD
3	0	2	6	19	3.1.1.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100 %	100 %	600.000.000	100 %	500.000.000	0 %	0	0 %	0	0	100 %	1.100.000.000	BPBD	
					Jumlah 2			6.163.347.489		9.032.915.199		7.128.697.449		7.601.015.474		8.156.368.620		38.127.939.231	BPBD	
					Jumlah Total (1+2)			11.211.133.311		12.297.841.446		8.537.541.182		10.032.146.694		10.463.220.725		52.541.883.359	BPBD	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih													DP2KBP3A	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkreski													DP2KBP3A	
					2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													DP2KBP3A	
x	xx	xx	xx	1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 %	12 %	1.274.263.227	12 %	1.531.457.845	12 %	1.248.423.370	12 %	1.644.562.828	12 %	1.556.047.708	100%	7.254.574.978	DP2KBP3A
x	xx	xx	xx	2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	2.428.590.250	100 %	1.003.623.809	100 %	650.567.000	100 %	1.805.051.036	100 %	1.676.821.447	100%	7.564.653.542	DP2KBP3A
x	xx	xx	xx	3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	217 Orang	217 Orang	80.000.000	217 Orang	84.872.000	217 Orang	11.550.000	217 Orang	105.256.000	217 Orang	105.290.900	100%	386.968.900	DP2KBP3A
x	xx	xx	xx	5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	217 Orang	217 Orang	48.000.000	217 Orang	0	217 Orang	0	217 Orang	65.275.811	217 Orang	66.018.581	100%	179.294.392	DP2KBP3A
x	xx	xx	xx	6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 Dokumen	6 Dokumen	305.490.000	6 Dokumen	126.247.099	6 Dokumen	95.086.000	6 Dokumen	163.472.480	6 Dokumen	153.816.652	100%	844.112.231	DP2KBP3A
					Jumlah 1			4.136.343.477		2.746.200.753		2.005.626.370		3.783.618.156		3.557.995.287		16.229.784.043	DP2KBP3A	
1	2					Usuran Wajib													DP2KBP3A	
1	2					Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar													DP2KBP3A	
1	2	2			2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													DP2KBP3A	
1	2	2	10	16	1.1.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4 %	4 %	1.304.600.000	4 %	1.681.603.312	5 %	661.421.766	5 %	610.268.698	5 %	654.842.245	5 %	4.912.736.021	DP2KBP3A
					1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia													DP2KBP3A	
					1.4.	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan													DP2KBP3A	
1	2	2	10	17	1.1.2.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	6 %	6 %	410.000.000	6 %	330.852.050	6 %	207.786.409	7 %	212.962.137	7 %	228.516.725	7 %	1.390.117.321	DP2KBP3A
1	2	2	10	18	1.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	6 %	6 %	450.000.000	6 %	557.553.334	6 %	301.625.433	7 %	309.697.942	7 %	332.318.036	7 %	1.951.194.745	DP2KBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp									
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																						
	1.1.4.1	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Perseorangan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DP2KBP3A				
1	2																			DP2KBP3A				
1	2	8																		DP2KBP3A				
1	2	8	10	15	1.1.1.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	84 %	84 %	6.282.900.000		82 %	9.778.202.317	83 %	1.540.740.801	83 %	1.812.053.745	83 %	1.944.404.729	83 %	21.358.301.591	DP2KBP3A		
1	2	8	10	16	1.1.1.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	29 %	29 %	256.174.925		29 %	926.966.865	29 %	341.770.939	29 %	376.699.005	29 %	404.212.805	29 %	2.305.824.539	DP2KBP3A		
1	2	8	10	18	1.1.1.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/RK yang mandiri	Presentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	5 %	5 %	2.362.542.120		5 %	2.344.902.120	5 %	2.160.509.468	5 %	2.204.739.657	5 %	2.365.772.113	5 %	11.438.465.478	DP2KBP3A		
1	2	8	10	21	1.1.1.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Presentase Kdompok remaja yang mendapatkan pembinaan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	29 %	29 %	150.000.000		29 %	102.561.866	29 %	0	29 %	0	29 %	0	29 %	0	29 %	252.561.866	DP2KBP3A
1	2	8	10	22	1.1.1.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Presentase kelompok KBK yang mendapat pembinaan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui KKA	100%	100%	70.000.000		100%	41.063.346	100%	40.216.724	100%	42.041.058	100%	45.111.704	100%	238.432.833	DP2KBP3A		
1	2	8	10	23	1.1.1.23	Program persiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Presentase jenis kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan tentang pendampingan tentang bina keluarga	4 %	4 %	310.000.000		4 %	772.609.547	4 %	287.421.195	4 %	206.125.294	4 %	221.180.524	4 %	1.797.336.561	DP2KBP3A		
						Jumlah 2			11.986.217.045		16.536.314.757		5.541.492.733		5.774.587.537		6.196.358.881		45.644.970.955		45.644.970.955	DP2KBP3A		
						Jumlah Total (1+2)			15.737.560.572		19.287.515.510		7.547.119.105		9.558.205.692		9.759.354.168		61.874.751.998		61.874.751.998	DP2KBP3A		
						5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DPMPTSP	
						5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																DPMPTSP	
							Usuan Batin																DPMPTSP	
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	100 %	899.074.990		100 %	983.263.480	100 %	1.266.280.000	100 %	978.173.442	100 %	912.189.515	100%	5.038.981.427	DPMPTSP		
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	529.131.835		100 %	783.501.250	100 %	459.400.000	100 %	397.276.500	100 %	370.333.241	100%	2.539.642.826	DPMPTSP		
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan Pakaian Operasional Kantor	100 %	100 %	67.600.000		100 %	87.100.000	100 %	90.090.000	100 %	80.166.840	100 %	74.729.932	100%	399.686.772	DPMPTSP		
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	165.000.000		100 %	0	100 %	0	100 %	118.590.000	100 %	110.547.236	100%	394.137.236	DPMPTSP		
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	92.000.000		100 %	55.000.000	100 %	56.630.000	100 %	76.700.000	100 %	71.142.500	100%	351.472.500	DPMPTSP		
						Jumlah			1.752.806.825		1.908.864.730		1.872.400.000		1.650.906.782		1.538.942.424		8.723.920.761		8.723.920.761	DPMPTSP		
						2.	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing																DPMPTSP	
						2.1.5.1	Program peningkatan efektivitas investasi																DPMPTSP	
							Usuan Wajib																DPMPTSP	
							Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DPMPTSP	
							Pemanaan Modal																DPMPTSP	
1	2	12	16	15	2.1.2.15	Program Peningkatan Promosi dan Kredivasi Investasi	Nilai Investasi	7 Trilyun	7 Trilyun	1.446.350.000		7 Trilyun	1.340.609.527	8 Trilyun	1.075.000.000	8 Trilyun	1.019.055.185	8 Trilyun	1.099.972.500	8 Trilyun	5.980.987.212	DPMPTSP		
1	2	12	16	16	2.1.2.16	Program Peningkatan Idlim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase Peningkatan Ketepatan Laporan Kegiatan Pemanaan Modal	90 %	90 %	1.385.165.073		92 %	1.010.735.528	93 %	850.000.000	94 %	831.300.000	95 %	895.102.983	95 %	4.972.303.584	DPMPTSP		
1	2	12	16	17	2.1.2.17	Program penyajian potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Jumlah Dok. Kajian	3 Dok. kajian	3 Dok. kajian	350.000.000		3 Dok. kajian	204.685.000	0 Dok. kajian	0	0 Dok. kajian	0	0 Dok. kajian	0	3 Dok. kajian		554.685.000	DPMPTSP	
1	2	12	16	20	2.1.1.20	Program Peningkatan Kapasitas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	3 Nilai	0		3 Nilai	0	3 Nilai	1.042.386.778	3 Nilai	1.361.700.000	4 Nilai	1.464.441.000	4 Nilai	3.868.527.778	DPMPTSP		
						Jumlah 2			2.181.515.072		2.556.020.055		2.967.386.778		2.712.055.185		3.459.516.483		15.326.502.574		15.326.502.574	DPMPTSP		
						Jumlah Total (1+2)			4.934.321.898		4.464.894.783		4.839.786.778		4.862.961.967		4.998.458.907		24.100.424.335		24.100.424.335	DPMPTSP		
						5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DPUPR	
						5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																DPUPR	
							Usuan Batin																DPUPR	
							Usuan Batin																DPUPR	
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	100 %	19.402.426.450		100 %	35.350.315.007	100 %	34.094.231.500	100 %	45.334.314.997	100 %	42.033.599.872	100%	176.214.887.825	DPUPR		
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	10.538.609.000		100 %	3.147.556.125	100 %	2.035.500.000	100 %	5.070.687.312	100 %	4.938.441.207	100%	25.730.793.644	DPUPR		
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Penunjang Kerja Aparatur	100 %	100 %	61.141.000		100 %	414.932.509	100 %	0	100 %	1.062.000.000	100 %	985.050.000	100%	2.523.123.509	DPUPR		
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhiya diklat dan bintek pegawai	100 %	100 %	800.000.000		100 %	1.010.123.376	100 %	300.000.000	100 %	597.645.178	100 %	582.058.179	100%	3.289.826.732	DPUPR		
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	248.729.000		100 %	2.291.500.000	100 %	809.930.000	100 %	1.190.620.000	100 %	1.104.350.500	100%	5.645.129.500	DPUPR		
						Jumlah			31.050.905.450		42.714.427.017		37.739.661.500		52.755.267.486		49.643.499.758		213.203.761.211		213.203.761.211	DPUPR		
						3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu																DPUPR	
						3.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Transporasi																DPUPR	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1																						
1	1																					
1	1	3																				
1	1	3	3	15	3.1.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yg terbangun di tahun rencana	100 %	100 %	24.084.737.004	100 %	59.432.217.000	100 %	11.241.300.000	100 %	52.747.000.000	100 %	52.973.800.000	100 %	200.479.054.004	DPUPR	
1	1	3	3	17	3.1.1.17	Program pembangunan jalan/talud/bronjong	persentase turap / talud / bronjong yang terpelihara	100 %	100 %	46.371.602.514	100 %	42.859.817.420	100 %	35.465.283.446	100 %	18.921.000.000	100 %	21.616.375.000	100 %	165.234.078.380	DPUPR	
1	1	3	3	18	3.1.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	persentase jalan yang terpelihara	6 %	6 %	181.379.537.238	7 %	216.980.755.300	7 %	168.422.975.884	7 %	163.252.008.287	8 %	139.449.255.270	8 %	869.484.531.979	DPUPR	
1	1	3	3	19	3.1.1.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	persentase turap / talud / bronjong yang terpelihara	0 %	0 %	0	0 %	0	10 %	1.950.000.000	20 %	3.519.000.000	30 %	3.776.025.000	30 %	9.245.025.000	DPUPR	
1	1	3	3	20	3.1.1.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	ketersediaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	45 %	45 %	498.650.000	50 %	564.550.000	55 %	500.000.000	60 %	510.000.000	65 %	574.612.500	65 %	2.647.812.500	DPUPR	
1	1	3	3	21	3.1.1.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	persentase jalan yang tanggap darurat yang tertangani	0 %	0 %	0	0 %	0	10 %	1.500.000.000	20 %	1.530.000.000	30 %	1.641.750.000	30 %	4.671.750.000	DPUPR	
1	1	3	3	22	3.1.1.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase sistem informasi/data base jalan dan jembatan	72 %	72 %	500.000.000	74 %	977.790.000	76 %	600.000.000	78 %	765.000.000	80 %	820.875.000	80 %	3.663.665.000	DPUPR	
1	1	3	3	23	3.1.1.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	ketersediaan sarana prasarana penunjang kebinamargaan	100 %	100 %	4.796.970.000	100 %	4.158.380.000	100 %	1.403.280.000	100 %	3.060.000.000	100 %	3.557.125.000	100 %	16.975.755.000	DPUPR	
1	1	3	3	29	3.1.1.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dan aparatur	0 %	0 %	10.952.297.000	0 %	15.853.090.000	100 %	25.300.000.000	100 %	6.783.000.000	100 %	7.825.675.000	100 %	66.714.062.000	DPUPR	
1	1	3	3	40	3.1.1.40	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	peningkatan kualitas jasa konstruksi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	500.000.000	0 %	510.000.000	0 %	547.250.000	0 %	1.557.250.000	DPUPR	
3	0	2																				
3	0	2																				
3	0	2	6	41	3.1.1.41	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan data/informasi bangunan	25 %	25 %	453.588.340	30 %	585.310.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1.038.898.340	DPUPR	
1																						
1	2				2	Usulan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DPUPR	
1	2	9			2.9	Perhubungan															DPUPR	
1	2	9	9	15	3.1.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase PJU dalam kondisi baik.	35 %	35 %	26.274.530.152	35 %	15.622.967.325	36 %		32.435.528.508	36 %	25.704.000.000	37 %	27.581.400.000	37 %	127.618.425.985	DPUPR
					3.1.2.1	Program Optimalisasi Jaringan Irigasi																DPUPR
1	1	3	3	24	3.1.2.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan terapan pemukiman lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	57 %	57 %	26.908.914.830	63 %	57.739.221.500	64 %	28.926.540.404	64 %	21.355.559.831	75 %	23.623.320.830	75 %	158.553.557.396	DPUPR	
					3.1.4.1	Program peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang																DPUPR
1	1	3	5	34	3.1.3.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang	44 %	44 %	1.608.727.000	50 %	1.628.074.000	55 %	1.345.000.000	60 %	2.398.901.280	65 %	2.574.115.148	65 %	9.554.817.428	DPUPR	
1	1	3	5	35	3.1.3.35	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Budi Daya Non Pertanian yang Berjalan Sesuai Rencana tata Ruang	57 %	57 %	713.000.000	57 %	438.355.000	58 %	300.000.000	58 %	459.000.000	59 %	492.525.000	59 %	2.402.880.000	DPUPR	
1	1	3	5	36	3.1.3.36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penggunaan Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	791.273.000	100 %	792.867.000	100 %	650.000.000	100 %	969.000.000	100 %	1.039.775.000	100 %	4.242.915.000	DPUPR	
1	1	3	5	38	3.1.3.38	Program pengawasan dan pengendalian bangunan		0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	1.200.000.000	0 -	2.601.000.000	0 -	2.790.975.000	0 -	6.591.975.000	DPUPR	
					3.1.5.1	Program pengawasan dan pengendalian bangunan																DPUPR
1	1	3	3	16	3.1.4.16	Program Pembangunan saluran drainase/perovon-orovon	Persentase Drainase Jalan yang dibangun	12 %	12 %	64.697.860.000	15 %	48.557.875.610	17 %	36.197.000.000	19 %	30.866.000.000	21 %	31.083.800.000	21 %	211.402.535.610	DPUPR	
1	1	3	3	26	3.1.4.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Kegiatan Pendukung Penanganan Genangan	15 %	15 %	100.000.000	20 %	1.550.000.000	25 %	12.280.568.718	30 %	14.892.000.000	35 %	17.115.243.750	35 %	45.937.812.468	DPUPR	
1	1	3	3	28	3.1.4.28	Program pengendalian banjir	Persentase Penanganan Dronodindalan Banjir	10 %	10 %	20.562.562.990	11 %	47.566.617.125	12 %	27.700.000.000	13 %	24.429.000.000	14 %	26.651.075.000	14 %	146.909.255.115	DPUPR	
1	1	3	3	33	3.1.4.33	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase jalan yang terpelihara	0 %	0 %	0	0 %	0	61 %	21.727.326.438	61 %	17.646.000.000	62 %	20.795.500.000	62 %	60.168.826.438	DPUPR	
					4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup																DPUPR
					4.1.2.1	Program Konservasi Sumber Daya Alam																DPUPR
1	2	5				Usulan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DPUPR
1	2	5				Usulan Hidup																DPUPR
1	2	5	8	37	4.1.1.37	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ketersediaan RTH	2 %	2 %	0	2 %	1.599.500.000	0 %	0	0 %	2.142.000.000	0 %	2.298.450.000	0 %	6.039.950.000	DPUPR	
					Jumlah 2				410.694.250.068		516.907.387.280		409.644.803.398		395.059.469.399		388.828.922.498		2.121.134.832.643			DPUPR
					Jumlah Total (1+2)			441.745.155.518		559.121.814.297		446.884.464.898		448.314.736.884		438.472.422.256		2.334.538.593.853				DPUPR
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DINKES
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binklasifikasi Usulan Rutin																DINKES
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.882.138.133	100 %	2.175.766.789	100 %	2.029.366.889	100 %	2.406.626.193	100 %	2.243.409.009	100%	10.737.307.013		DINKES
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	100 %	693.810.000	100 %	1.518.226.940	100 %	1.269.427.940	100 %	1.505.467.959	100 %	1.403.367.250	100%	6.390.345.089		DINKES
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	200.000.000	100 %	129.429.800	100 %	129.429.800	100 %	153.490.800	100 %	143.081.066	100%	755.431.466		DINKES
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	861.302.500	100 %	770.094.816	100 %	524.532.000	100 %	746.171.619	100 %	695.566.323	100%	3.597.667.259		DINKES
					Jumlah 1				3.637.250.633.000		4.593.518.345		3.952.801.629		4.811.756.571		4.485.423.648		21.480.750.828			DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DINKES		
	1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																	DINKES		
	1.1.3.2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DINKES		
	1.1.1.2.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	77 %	77 %	4.919.195.250	76 %	5.826.807.250	77 %	1.094.500.000	77 %	1.267.860.000	77 %	1.404.243.500	77 %	14.512.606.000			DINKES		
	1.1.1.2.5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar	Persentase Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dibangun sesuai standar	100 %	100 %	21.321.302.500	76 %	17.694.387.500	100 %	17.640.715.000	100 %	18.360.000.000	100 %	19.810.450.000	100 %	94.826.855.000			DINKES		
	1.1.1.2.8	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penguatan pelayanan kesehatan primer	65 %	65 %	8.278.826.500	73 %	8.321.409.550	81 %	8.458.936.000	89 %	8.672.872.830	100 %	8.781.452.659	100 %	42.513.497.539			DINKES		
	1.1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase : Yankes Penderita Hipertensi	100 %	100 %	223.772.930.223	100 %	214.674.556.963	100 %	127.508.928.492	100 %	131.171.318.164	100 %	133.148.397.373	100 %	830.276.131.215			DINKES		
	1.1.3.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	55 %	55 %	988.390.000	60 %	2.093.780.000	65 %	555.130.000	70 %	652.800.000	75 %	722.370.000	75 %	5.012.470.000			DINKES		
	1.1.4.1	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Penduduk																	DINKES		
	1.1.1.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata - Rata Belanja Obat yang bermutu per kapita (Rp/Kap)	4630 Rp/kapita	4630 Rp/kapita	9.474.095.263	4775 Rp/kapita	11.789.683.769	4924 Rp/kapita	8.520.563.910	5.077 Rp/kapita	5.542.457.710	5.236 Rp/kapita	5.967.397.602	5.236 Rp/kapita	41.294.198.255			DINKES		
	1.1.1.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Produk olahan makanan dan minuman yang telah teridentifikasi layak edar	40 %	40 %	140.000.000	45 %	180.000.000	48 %	197.840.000	50 %	224.400.000	52 %	243.008.472	52 %	985.248.472			DINKES		
	1.1.2.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	100 %	948.579.300	100 %	1.022.918.500	100 %	1.026.632.000	100 %	1.224.000.000	100 %	1.346.235.000	100 %	5.568.364.800			DINKES		
	1.1.2.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV	100 %	100 %	2.840.412.000	100 %	2.611.209.925	100 %	2.525.199.250	100 %	2.928.420.000	100 %	3.245.192.500	100 %	14.150.433.675			DINKES		
	1.1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Yankes Balita	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	0			DINKES		
	1.1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut Usia	100 %	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	127.200.000	100 %	255.000.000	100 %	273.625.000	100 %	955.825.000			DINKES		
	1.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Yankes Ibu Hamil	100 %	100 %	31.258.208.000	100 %	26.995.842.000	100 %	1.401.585.000	100 %	1.637.495.966	100 %	1.765.882.875	100 %	63.059.013.841			DINKES		
	1.1.3.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pencapaian target hygiene dan sanitasi di rumah tangga dan tempat-tempat umum	100 %	100 %	1.370.000.000	100 %	1.344.222.000	100 %	1.400.000.000	100 %	469.200.000	100 %	1.669.112.500	100 %	6.252.534.500			DINKES		
	1.2.1.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat																	DINKES		
	1.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan kurat	100 %	100 %	21.185.098.915	100 %	34.124.852.600	100 %	21.845.123.000	100 %	22.527.559.860	100 %	24.336.041.574	100 %	124.018.675.949			DINKES		
		Jumlah 2				326.597.037.951,0		326.879.670,057		192.302.352,652		194.833.384,530		201.713.489,855		1.243.825.854,245			DINKES		
		Jumlah 1(+2)				330.243.288,584,0		311.474.188,402		196.255.154,981		199.745.181,102		207.198.832,203		1.264.506,905,072			DINKES		
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DINSOS		
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DINSOS		
x	xx	xx	xx																DINSOS		
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Operasional Perkantoran	100 %	100 %	2.423.930.000	100 %	1.977.459.670	100 %	2.155.255.000	100 %	2.311.584.000	100%	11.087.808.670			DINSOS
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan aparatur(%)	100 %	100 %	440.018.480	100 %	999.400.000	100 %	8.923.717.000	100 %	1.479.369.539	100%	12.862.471.226			DINSOS
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	194.705.000	100 %	211.528.480	100 %	211.528.480	100 %	271.400.000	100%	1.179.204.460			DINSOS
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan KKSOS melalui BKMTK(%)	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	132.720.026	100 %	442.500.000	100%	1.113.020.026			DINSOS
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan sistem pelaporan(%)	100 %	100 %	285.400.750	100 %	250.000.000	100 %	90.990.000	100 %	118.000.000	100%	908.565.750			DINSOS
					Jumlah 1														DINSOS		
					1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia													DINSOS		
					1.2.2.1	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemecatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat														DINSOS	
						Usuan Waib													DINSOS		
						Usuan Waib Pelayanan Dasar Sosial													DINSOS		
1	1	6	13	15	1.1.1.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi	16 %	16 %	25.910.864.250	16 %	36.670.337.758	17 %	4.411.902.000	17 %	5.161.873.000	18 %	76.824.617.008			DINSOS
1	1	6	13	16	1.1.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Mampu Menghadapi Situasi Krisis Termasuk Kurban Bencana	15 Porsen	15 Porsen	5.513.530.000	21 Porsen	5.079.510.661	28 Porsen	7.849.908.873	35 Porsen	8.745.568.204	43 Porsen	9.978.555.000	43 Porsen	37.167.072.738	DINSOS
1	1	6	13	17	1.1.1.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Edukatifnya	17 Porsen	17 Porsen	796.736.518	18 Porsen	1.083.938.879	24 Porsen	1.860.000.000	29 Porsen	2.733.200.000	35 Porsen	2.531.278.026	35 Porsen	9.005.153.423	DINSOS
1	1	6	13	18	1.1.1.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase PMKS Penandang Disabilitas Yang Berfungsi Secara Baik	54 Porsen	54 Porsen	1.930.400.000	62 Porsen	1.850.381.254	63 Porsen	1.695.591.127	65 Porsen	2.249.100.000	66 Porsen	2.373.275.284	66 Porsen	10.098.747.665	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1 1 6 13 19	1.1.2.19	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	48 Porsen	48 Porsen	80.000.000	54 Porsen	130.000.000	46 Porsen		133.150.000	62 Porsen	341.700.000	78 Porsen	366.657.500	78 Porsen	1.051.507.500	DINSOS
1 1 6 13 20	1.1.1.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKKS) yang mampu Berintegrasi Sosial	78 Porsen	78 Porsen	350.000.000	68 Porsen	177.155.988	75 Porsen		525.000.000	82 Porsen	459.000.000	89 Porsen	629.337.500	89 Porsen	2.140.493.488	DINSOS
1 1 6 13 21	1.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	35 Porsentase	35 Porsentase	2.752.050.000	38 Porsentase	3.315.666.020	39 Porsentase		4.758.072.500	40 Porsentase	6.923.840.000	41 Porsentase	7.439.817.416	41 Porsen	25.189.445.936	DINSOS
		Jumlah 2				37.333.580.768		48.306.990.560			21.233.624.500		26.122.048.204		28.480.793.725		161.477.037.757	DINSOS
		Jumlah Total (1+2)				40.727.634.998		51.795.378.710			32.747.835.006		30.652.897.742		32.704.361.432		188.628.107.889	DINSOS
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISDIK
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi Urusan Rutin																DISDIK
x xx xx xx	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi		57 %	57 %	4.513.036.550	63 %	3.731.520.714	68 %		2.813.019.914	72 %	3.335.370.315	77 %	3.108.618.533	100%	17.501.566.026	DISDIK
x xx xx xx	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0 -	0 -	1.809.622.250	0 -	2.409.274.613	0 -		383.304.250	0 -	457.510.510	0 -	429.218.436	100%	5.488.930.059	DISDIK
x xx xx xx	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0 -	0 -	690.000.000	0 -	460.000.000	0 -		785.000.000	0 -	1.017.514.000	0 -	946.317.287	100%	3.898.831.287	DISDIK
x xx xx xx	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	0 -	0 -	90.000.000	0 -	130.000.000	36 -		90.000.000	36 -	90.450.000	36 -	99.942.513	100%	499.942.513	DISDIK
		Jumlah 1				7.102.658.800		6.730.795.327			4.071.324.164		4.900.844.825		4.583.646.768		27.389.768.885	DISDIK
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																DISDIK
	1.1.1.1	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat																DISDIK
		Usuran Wajib																DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peserta didik PAUD	55 %	55 %	10.740.290.823	57 %	10.834.606.693	59 %		12.596.972.955	60 %	10.585.466.437	61 %	11.371.414.806	61 %	56.128.751.715	DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.1.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD	95 %	95 %	138.565.129.458	95 %	500.771.445.700	95 %		59.252.569.052	95 %	45.049.945.021	95 %	48.760.461.225	95 %	792.399.550.456	DISDIK
	1.1.2.1	Program Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal																DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.2.18	Program Pendidikan Non Formal	persentase lembaga pendidikan non formal berkreditasi A	0 -	0 -	14.154.054.000	0 -	17.114.021.905	0 -		5.668.102.810	0 -	14.872.256.190	0 -	16.038.306.688		67.846.741.594	DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.2.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROSENTASE GURU DAN KEPALA SEKOLAH SD SESUAI KUALITAS	0 -	0 -	5.003.148.528	0 -	5.095.745.027	0 -		3.763.580.200	0 -	5.285.106.117	0 -	5.700.249.639		24.847.829.511	DISDIK
		Revitalisasi peran pengawas sekolah SMP sebagai Entitas Quality Assurance	Jumlah pengawas SMP yang mengikuti Bintek revitalisasi	100 pengawas	100 pengawas				100 pengawas		0	100 pengawas	204.000.000					DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.2.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	jumlah dokumen kelembagaan pendidikan	0 -	0 -	2.131.000.000	0 -	2.012.707.350	0 -		3.879.944.873	0 -	9.164.062.500	0 -	9.843.710.680		27.631.425.403	DISDIK
	1.2.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat																DISDIK
1 1 1 1 1	1.1.3.25	Program Bantuan Bidang Pendidikan		0 -	0 -	0	0 -	0	0 -		16.500.000.000	0 -	17.952.000.000	0 -	19.263.200.000		53.715.200.000	DISDIK
		Jumlah 2				170.593.622.809		535.828.526.675			101.661.169.890		102.908.836.266		110.977.343.038		1.021.969.498.678	DISDIK
		Jumlah Total (1+2)				177.696.281.609		542.559.322.002			105.732.494.054		107.809.681.091		115.560.989.806		1.049.358.768.563	DISDIK
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISDUKCAPIL
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi Urusan Rutin																DISDUKCAPIL
x xx xx xx	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi	persentase pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	3.067.298.325	100 %	2.577.264.025	100 %		2.094.599.800	100 %	1.995.560.180	100 %	2.079.613.982	100%	11.814.336.312	DISDUKCAPIL
x xx xx xx	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.734.937.000	100 %	895.102.077	100 %		512.842.077	100 %	934.301.919	100 %	652.037.641	100%	4.729.220.714	DISDUKCAPIL
x xx xx xx	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	238.427.000	100 %	332.600.000	100 %		0	100 %	290.545.500	100 %	270.840.729	100%	1.132.413.229	DISDUKCAPIL
x xx xx xx	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dinas	persentase laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	100 %	100 %	162.302.000	100 %	145.820.000	100 %		100.000.000	100 %	177.885.000	100 %	165.328.329	100%	751.335.329	DISDUKCAPIL
		Jumlah 1				5.202.964.325		3.950.786.102			2.707.441.872		3.398.292.599		3.167.820.682		18.427.305.584	DISDUKCAPIL
		Usuran Wajib																DISDUKCAPIL
1 2		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Publik																DISDUKCAPIL
1 2 6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15	5.2.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kebijakan Inovasi Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	11.557.842.667	3 dokumen	14.086.600.000	1 Dokumen		6.807.800.080	1 dokumen	6.384.262.196	1 dokumen	6.884.816.518	1 dokumen	45.721.321.460	DISDUKCAPIL
			Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk						100 %									DISDUKCAPIL
			Persentase Penerbitan Dokumen Pengaturan Sipil						100 %									DISDUKCAPIL
			Persentase Implementasi Sistem Administrasi						95,50 %									DISDUKCAPIL
			Jumlah aka perkawinan non muslim yang diterbitkan						432									DISDUKCAPIL
			Jumlah aka kematian yang diterbitkan						1800									DISDUKCAPIL
		Jumlah 2				11.557.842.667		14.086.600.000			6.807.800.080		6.384.262.196		6.884.816.518		45.721.321.460	DISDUKCAPIL
		Jumlah Total (1+2)				16.760.806.992		19.097.396.102			9.515.241.957		9.782.554.794		10.057.637.199		64.148.627.045	DISDUKCAPIL
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp								
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp										
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrazi															DISHUB						
x	xx	xx	xx	1													DISHUB						
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	% aset yang dikelola dengan baik	91 %	91 %	3.165.199.475	92 %	92 %	2.904.851.154	93 %	611.460.000	839.935.800	95 %	969.135.970	100%	8.490.582.399	DISHUB		
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	91 %	91 %	2.387.975.622	92 %	93 %	1.304.292.775	93 %	2.487.142.892	94 %	3.785.567.138	95 %	3.365.297.083	100%	13.330.275.510	DISHUB	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	91 %	91 %	400.240.000	92 %	0 %	360.900.000	0 %	0	0	0 %	0	0 %	0	100%	761.140.000	DISHUB
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% aparatour Dishub yang mengikuti diklat teknis/publikasi	14 %	14 %	69.100.000	15 %	15 %	86.634.177	15 %	31.700.000	16 %	136.526.000	17 %	126.633.650	100%	450.593.827	DISHUB	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% ketersediaan dokumen penunjang SAKIP sesuai aturan	100 %	100 %	135.000.000	100 %	100 %	160.824.150	100 %	172.776.530	100 %	194.700.000	100 %	189.622.125	100%	852.922.805	DISHUB	
x	xx	xx	xx	7	5.1.1.7	Program Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis	Jumlah KMU yang melayani uji berkala dan memberi kontribusi pada PAD	0	0	434.15	0	451.33	2.490.928.110	451.33	2.107.259.510	45.943	2.234.614.368	46.192	2.223.985.594	100%	9.056.787.582	DISHUB	
					<b>Jumlah 1</b>					6.157.515.097			7.308.430.366		5.410.338.932		7.191.343.306		6.874.674.422		32.942.302.123	DISHUB	
					3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Danan Tata Ruang															DISHUB		
					3.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi															DISHUB		
1						Usuan Wajib															DISHUB		
1	2					Usuan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DISHUB		
1	2	9				Perhubungan															DISHUB		
1	2	9	15		3.2.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% ketersediaan satuan ruang parkir (SRP)	49 %	49 %	919.235.443	50 %	51 %	2.741.576.000	51 %	204.477.916	1.896.079.846	53 %	1.870.871.743	53 %	7.632.240.949	DISHUB		
1	2	9	16		3.2.1.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas L1A1	Persentase alat PKB eksisting yang dapat digunakan dengan baik	80 %	80 %	528.925.000	81 %	82 %	825.000.000	82 %	0	83 %	0	84 %	0	81 %	1.353.925.000	DISHUB	
1	2	9	17		3.1.1.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang, barang, dan petak	1718	1718	589.407.407	1718	0 Kendaraan	1.321.532.500	0 Kendaraan	0	0 Kendaraan	0	0 Kendaraan	0	1718	1.910.939.907	DISHUB	
1	2	9	19		3.2.1.19	Program pengendalian dan penanganan lalu lintas	persentase ketersediaan pencahayaan jalan	20 %	20 %	3.591.354.000	23 %	27 %	12.888.704.447	27 %	4.963.079.971	30 %	5.344.657.938	30 %	5.518.319.199	30 %	32.306.115.556	DISHUB	
1	2	9	20		3.2.1.20	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase KWI lulus uji berkala	100 %	100 %	981.025.000	100 %	100 %	1.398.396.991	100 %	2.185.335.000	100 %	1.363.740.000	100 %	1.203.950.000	100 %	7.132.446.991	DISHUB	
1	2	9	21		3.2.1.21	Program Pembinaan Keselamatan transportasi	Persentase pelaksanaan rencana aksi keselamatan (RAK) transportasi	0 %	0 %	0	0 %	55 %	1.697.630.830	57 %	1.271.051.689	60 %	1.499.435.271	60 %	4.468.117.790	DISHUB			
1	2	9	21		3.1.1.22	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang	Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang, barang, dan petak	0 Kendaraan	0	0	0 Kendaraan	1718	3.906.479.720	1.718	4.588.998.847	1.718	5.281.083.406	1.718	13.776.561.973	DISHUB			
1	2	9	23		3.2.1.23	Program Pengembangan Layanan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan pengangkutan	0 Kendaraan	0	0 Kendaraan	0	8265	75.000.000	8.265	75.000.000	153.000.000	8.265	218.900.000	8.265	446.900.000	DISHUB		
					<b>Jumlah 7</b>					6.600.946.030			10.125.400.938		13.022.900.497		14.617.536.370		15.592.530.620		69.027.248.105	DISHUB	
					<b>Jumlah Total (1-7)</b>					12.767.461.947			26.483.640.304		18.442.342.369		21.838.671.626		22.467.234.042		101.966.550.285	DISHUB	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DISKAR		
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrazi															DISKAR		
					1.5	Keteramran dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															DISKAR		
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	60 %	60 %	109.177.000	60 %	70 %	588.385.062	70 %	946.000.000	75 %	1.332.597.600	80 %	1.242.550.935	100%	4.218.710.597	DISKAR	
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100 %	100 %	240.363.000	100 %	100 %	2.180.000.000	100 %	1.450.000.000	100 %	1.713.655.000	100 %	497.462.563	100%	6.081.480.563	DISKAR	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang aparatur	1 Paket	1 Paket	72.640.000	1 Paket	1 Paket	45.500.000	1 Paket	45.500.000	1 Paket	53.958.450	1 Paket	50.298.992	100%	267.897.442	DISKAR	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	0	100 %	100 %	44.200.000	100 %	95.000.000	100 %	112.660.500	100 %	105.019.874	100%	356.880.374	DISKAR	
					<b>Jumlah 1</b>					422.180.000			2.858.085.062		2.536.500.000		3.212.871.550		1.895.332.365		10.924.968.977	DISKAR	
1	1					Usuan Wajib															DISKAR		
1	1	4				Usuan Wajib Pelayanan Dasar															DISKAR		
1	1	4				Penumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															DISKAR		
1	1	4	19		3.1.1.19	Program peningkatan kesiagaan dan penanganan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	55 %	55 %	2.873.660.000	0 %	0 %	6.541.462.340	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	9.415.122.340	DISKAR	
					3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Danan Tata Ruang															DISKAR		
					3.1.5.1	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana															DISKAR		
1	1					Usuan Wajib															DISKAR		
1	1					Usuan Wajib Pelayanan Dasar															DISKAR		
1	1	5				Keteramran dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															DISKAR		
1	1	5	4	25	3.1.2.25	Program peningkatan kesiagaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Jumlah penanggulangan kebakaran yang dapat tercapai dalam standar respon time	0 -	0 -	0	0 -	0	1.164.195.364	0 -	1.305.438.167	0 -	1.357.113.287	0 -	3.826.746.818	DISKAR			
1	1	5	4	26	3.1.1.26	Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase jenis sarana dan prasarana Cakupan Pelayanan pencegahan bahaya kebakaran	60 %	60 %	0	65 %	0	70 %	750.000.000	75 %	816.000.000	80 %	930.325.000	80 %	2.496.325.000	DISKAR		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab							
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021										
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		Jumlah 2																				
		Jumlah Total (1+2)																				
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrafasi Ususan Rutin																			
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100 %	680.092.554	100 %	924.574.438	100 %	764.569.500	100 %	1.088.069.214	100 %	1.009.230.300	100%	4.466.536.006	DISKOMINFO	
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	95 %	95 %	545.910.000	95 %	481.714.500	95 %	1.118.678.253	95 %	1.359.373.742	95 %	1.009.626.998	100%	4.515.303.493	DISKOMINFO	
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur sesuai peraturan yang berlaku	100 %	100 %	72.545.000	100 %	172.545.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100%	245.090.000	DISKOMINFO	
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pembentukan character	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	DISKOMINFO
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase jumlah dokumen laporan yang terbit	100 %	100 %	27.846.500	100 %	53.217.000	100 %	25.400.000	100 %	208.678.870	100 %	193.558.494	100%	508.700.864	DISKOMINFO	
		Jumlah 1																				
		Jumlah 1																				
1	2																					
1	2	10																				
1	2	10	25	15	5.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.520.219.482	100 %	7.856.683.843	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	11.376.903.325	DISKOMINFO	
1	2	10	25	17	5.1.1.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase kegiatan peningkatan kualitas SDM bidang TI/IT	25	25	166.920.000	28	309.395.200	0	0	0	0	0	28	476.315.200	DISKOMINFO		
1	2	10	25	18	5.1.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase informasi yang dikomunikasikan	17 %	17 %	514.510.000	80 %	323.710.250	0 %	0	0 %	0	0 %	80 %	838.220.250	DISKOMINFO		
1	2	10	25	19	5.1.1.19	Program penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik	17 persen	17 persen	0	80 persen	0	100 persen	466.004.000	100 persen	269.957.280	100 persen	289.674.748	100 persen	1.025.636.028	DISKOMINFO	
1	2	10	25	20	5.1.1.20	Program penyediaan informasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks persepsi kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah	0 nilai rata-rata	0 nilai rata-rata	0	0 nilai rata-rata	76 nilai rata-rata	598.598.000	77 nilai rata-rata	469.298.940	77 nilai rata-rata	503.576.167	77 nilai rata-rata	1.571.473.107	DISKOMINFO		
1	2	10	25	21	5.1.1.21	Program peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TI/IT	Persentase manajemen pemerintahan yang terintegrasi	20 %	20 %	0	40 %	0	60 %	644.420.000	80 %	480.719.013	100 %	515.830.353	100 %	1.640.969.366	DISKOMINFO	
1	2	10	20	23	5.1.1.23	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan SDM	Jumlah dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	25.000.000	DISKOMINFO	
1	2	10	25	25	5.1.1.25	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Data yang memadai (Komunikasi DTKO)	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	52 - %	52 - %	0	56 - %	0	59 - %	6.787.926.055	63 - %	2.671.258.874	70 - %	2.137.714.273	70 - %	11.596.899.202	DISKOMINFO	
1	2																					
1	2																					
1	2	15																				
1	2	15	25	24	5.1.1.24	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian	0 persen	0 persen	0	3 persen	147.723.000	25 persen	125.000.000	49 persen	153.000.000	100 %	164.175.000	100 %	589.898.000	DISKOMINFO	
1	2																					
1	2																					
1	2	14																				
1	2	14	6	15	5.1.2.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	persentase ketersediaan data (statistik) penunjang perencanaan pembangunan	50 -data	50 -data	705.000.000	60 -data	277.719.000	70 -data	650.000.000	80 -data	739.500.000	100 -data	711.425.000	100 -data	3.083.644.000	DISKOMINFO	
		Jumlah 2																				
		Jumlah Total (1+2)																				
		Jumlah 2																				
		Jumlah Total (1+2)																				
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrafasi Ususan Rutin																			
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan persyaratan perangkat lunak	25 %	25 %	858.375.000	25 %	1.085.918.150	25 %	1.000.500.000	25 %	1.398.300.000	25 %	1.039.775.000	100%	5.382.868.150	DISKOPUKM	
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	25 %	25 %	350.868.143	25 %	303.007.097	25 %	310.018.143	25 %	456.681.409	25 %	350.259.858	100%	1.770.834.649	DISKOPUKM	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	25 %	25 %	30.000.000	25 %	63.218.571	25 %	75.375.000	25 %	94.844.818	25 %	0	100%	263.438.389	DISKOPUKM	
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Nilai rata-rata kemampuan sumber daya aparatur	0 Nilai	0 Nilai	0	75 Nilai	0	80 Nilai	255.000.000	85 Nilai	236.000.000	85 Nilai	103.336.057	100%	594.336.057	DISKOPUKM	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25 %	25 %	61.150.000	25 %	61.000.000	25 %	50.000.000	25 %	64.900.000	25 %	54.725.000	100%	291.775.000	DISKOPUKM	
		Jumlah 1																				
		Jumlah 1																				
1	2																					
1	2	11																				
1	2	11	15	15	2.1.1.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Usaha mikro Kecil menengah	6 %	6 %	192.000.000	8 %	420.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	6 %	612.000.000	DISKOPUKM	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1 2 11 15 16	2.2.1.16	Program Pengembangan Kevirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha Kecil	0 Rp.	0 Rp.	2.412.000.000	0 Rp.	1.724.371.566	4 Rp.	2.283.815.511	5 Rp.	1.342.607.145	6 Rp.	1.363.464.441	9.126.258.663	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 17	2.1.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah umkm yang mengikuti kegiatan sosialisasi PIRTT dan talak	110 umkm	110 umkm	130.251.831	28 umkm	1.017.621.318	0 umkm	0	0 umkm	0	0 umkm	0	1.147.873.149	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 18	2.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Baru	20 Koperasi	20 Koperasi	1.197.000.000	25 Koperasi	2.412.635.961	25 Koperasi	900.136.315	35 Koperasi	1.107.046.870	50 Koperasi	1.229.821.631	50 Koperasi	6.846.640.778	DISKOPIKUM
1 2 11 15 19	2.1.1.19	Program Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	450.000.000	21 %	1.173.000.000	22 %	1.313.400.000	22 %	2.936.400.000	DISKOPIKUM	
		Jumlah 2				3.931.251.831		5.574.628.845		3.633.951.826		3.622.546.016		3.906.686.072	20.669.172.589	DISKOPIKUM	
		Jumlah Total (1+2)				5.231.644.974		7.087.772.663		5.324.844.969		5.873.380.242		5.454.781.987	28.972.424.835	DISKOPIKUM	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														DISNAKER	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														DISNAKER	
x xx xx xx	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi	100 Persen	100 Persen	1.252.631.950	100 Persen	2.542.477.942	100 Persen	2.738.855.750	100 Persen	2.406.565.160	100 Persen	2.232.191.159	100%	11.172.721.961	DISNAKER
x xx xx xx	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 Persen	100 Persen	618.140.000	100 Persen	867.000.000	100 Persen	910.000.000	100 Persen	483.800.000	100 Persen	448.745.000	100%	3.327.685.000	DISNAKER
x xx xx xx	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 Persen	100 Persen	94.020.000	100 Persen	97.500.000	100 Persen	0	100 Persen	115.050.000	100 Persen	106.713.750	100%	413.283.750	DISNAKER
x xx xx xx	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 Persen	100 Persen	115.700.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	0	100 Persen	70.800.000	100 Persen	65.670.000	100%	312.170.000	DISNAKER
x xx xx xx	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	71.500.000	100 Persen	115.000.000	100 Persen	95.000.000	100 Persen	112.100.000	100 Persen	103.977.500	100%	497.577.500	DISNAKER
		Jumlah 1				2.151.991.950		3.681.977.942		3.743.855.750		3.188.315.160		2.957.297.409	15.723.438.211	DISNAKER	
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia														DISNAKER	
	1.2.2.1	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat														DISNAKER	
		Usuran Wajib														DISNAKER	
		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar														DISNAKER	
1 2 1		Tenaga Kerja														DISNAKER	
1 2 1 14 15	1.1.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20 Persen	20 Persen	17.253.353.907	25 Persen	6.052.044.225	30 Persen	8.947.783.000	35 Persen	8.874.000.000	0,40	9.522.150.000	0,40	50.649.331.132	DISNAKER
1 2 1 14 16	1.1.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	71 Persen	71 Persen	12.506.483.500	72 Persen	14.867.449.047	73 Persen	19.195.429.000	74 Persen	6.560.678.505	0,75	7.276.495.280	0,75	60.406.535.332	DISNAKER
1 2 1 14 17	1.1.2.17	Program Perindungan dan Pengembangan Lembaga Keternakawanan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bercasua	51 Persen	51 Persen	3.149.000.000	52 Persen	4.426.197.650	53 Persen	3.835.139.500	54 Persen	3.694.266.597	0,55	3.846.073.000	0,55	18.950.676.747	DISNAKER
	3	URUSAN PILIHAN														DISNAKER	
	3.8	Transmigrasi														DISNAKER	
		Usuran Pilihan														DISNAKER	
		Transmigrasi														DISNAKER	
2 0 8		Usuran Pilihan														DISNAKER	
2 0 8		Transmigrasi														DISNAKER	
2 0 8 2.8 17	1.1.1.17	Program transmigrasi regional	Jumlah transmigrasi yang ditempatkan	5 kk	5 kk	350.000.000	5 kk	318.270.000	5 kk	1.150.000.000	5 kk	222.360.000	5 kk	238.601.000	5 kk	2.279.231.000	DISNAKER
		Jumlah 2				33.258.837.407		25.663.960.922		33.128.351.500		19.351.305.102		20.883.319.280	132.285.774.211	DISNAKER	
		Jumlah Total (1+2)				35.410.829.357		29.345.939.864		36.872.207.250		22.539.620.262		23.840.616.689	148.809.212.432	DISNAKER	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														DISPANGKAN	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														DISPANGKAN	
x xx xx xx	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran	100 %	100 %	1.195.624.900	100 %	1.454.827.057	100 %	1.291.205.582	100 %	2.082.173.320	100 %	1.962.248.848	100%	7.986.079.707	DISPANGKAN
x xx xx xx	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 -	100 -	686.935.179	100 -	1.813.329.673	100 -	707.655.710	100 -	1.304.866.820	100 -	1.380.354.152	100%	5.893.411.534	DISPANGKAN
x xx xx xx	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	100 %	174.578.700	100 %	179.502.255	100 %	0	100 %	0	100 %	0	354.080.955	DISPANGKAN	
x xx xx xx	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	329.408.000	100 %	114.936.000	100 %	96.998.300	100 %	152.959.860	100 %	159.797.000	100%	854.099.160	DISPANGKAN
		Jumlah 1				2.386.546.779		3.562.594.985		2.095.859.592		3.540.000.000		3.502.400.000	15.087.401.350	DISPANGKAN	
	2.	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Sahaja														DISPANGKAN	
	2.2.1.1	Program pematapan kemandirian pangan														DISPANGKAN	
		Usuran Wajib														DISPANGKAN	
		Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar														DISPANGKAN	
1 2 3		Pangan														DISPANGKAN	
1 2 3 21 18	2.2.1.18	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat	Persentase penanganan wilayah rawan pangan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	2.710.470.197	0 %	3.060.126.683	0 %	3.056.875.109	8.827.471.989	DISPANGKAN	
1 2 3 21 19	2.2.1.19	Program Pengembangan konsumsi, pengkarakagaman dan Keamanan Pangan	Skor PPH Konsumsi	83 %	83 %	0	86 %	0	89 %	2.947.222.880	92 %	2.843.833.282	94 %	2.800.207.310	94 %	8.231.263.472	DISPANGKAN
	3	URUSAN PILIHAN														DISPANGKAN	
	3.1	Kelautan dan Perikanan														DISPANGKAN	
		Usuran Pilihan														DISPANGKAN	
2 0 1		Usuran Pilihan														DISPANGKAN	
2 0 1		Kelautan dan Perikanan														DISPANGKAN	
2 0 1 2.5 20	2.2.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	4 %	4 %	4.447.173.000	3 %	8.564.955.968	3 %	4.238.590.000	3 %	5.000.000.000	3 %	5.472.500.000	3 %	27.723.218.968	DISPANGKAN
2 0 1 2.5 22	2.1.1.22	Program pengembangan sistem pemuliharaan perikanan	Meningkatnya Jabatan/Kelas Pemuluh Perikanan	50 %	50 %	44.856.400	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	44.856.400	DISPANGKAN	
2 0 1 2.5 23	2.1.1.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat konsumsi ikan perkapita	15 kg/kapita/tahun	15 kg/kapita/tahun	428.016.000	17 kg/kapita/tahun	1.419.310.000	18 kg/kapita/tahun	1.947.700.053	20 kg/kapita/tahun	1.092.143.550	22 kg/kapita/tahun	1.201.327.870	92 kg/kapita/tahun	6.088.497.473	DISPANGKAN
	3.3	Pertanian														DISPANGKAN	
		Usuran Wajib														DISPANGKAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2			Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DISPANGKAN			
1	2	3		Rencana															DISPANGKAN			
1	2	3	21	15	2.2.1.15	Program Ketahanan Pangan Usuran Pilihan	Skor PPH Ketersediaan	86 %	86 %	1.482.192.586	88 %	0	91 %	0	93 %	0	95 %	0	86 %	1.482.192.586	DISPANGKAN	
2	0	3			Pertanian															DISPANGKAN		
2	0	3	21	16	2.2.1.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Sekeloa/Pemukim)	Skor PPH Ketersediaan	86 %	86 %	1.482.666.196	88 %	0	93 %	0	95 %	0	88 %	6.642.166.195	DISPANGKAN			
					Jumlah 7															DISPANGKAN		
					Jumlah Total (1+2)																DISPANGKAN	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DISPARBUD	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi Usuran Pilihan															DISPARBUD	
x	xx	xx	xx		5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	665.856.539	100 %	1.091.408.464	100 %	1.104.356.539	100 %	1.267.825.040	100 %	1.219.741.446	100 %	5.349.188.028	DISPARBUD	
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	193.500.000	100 %	1.447.724.564	100 %	1.051.224.564	100 %	1.246.344.320	100 %	1.232.652.168	100 %	5.171.445.616	DISPARBUD	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	12.000.000	100 %	35.000.000	100 %	50.000.000	100 %	59.000.000	100 %	54.725.000	100 %	210.725.000	DISPARBUD	
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 -%	100 -%	0	100 -%	0	100 -%	0	100 -%	118.000.000	100 -%	109.450.000	100 %	227.450.000	DISPARBUD	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 -%	100 -%	36.000.000	100 -%	62.500.000	100 -%	65.000.000	100 -%	76.826.268	100 -%	71.510.036	100 %	311.836.305	DISPARBUD	
					Jumlah 1																DISPARBUD	
																					DISPARBUD	
					2.	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing															DISPARBUD	
					2.1.4.1	Program Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah															DISPARBUD	
1	2				Usuran Wajib																DISPARBUD	
1	2				Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DISPARBUD	
1	2	16			Kebudayaan																DISPARBUD	
1	2	16	17	15	2.1.2.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event Pagelaran Seni / Budaya	11 Event	11 Event	4.336.840.000	12 Event	3.747.210.125	13 Event	9.700.000.000	14 Event	3.476.193.589	15 Event	3.730.092.042	15 Event	24.990.335.755	DISPARBUD	
1	2	16	17	16	2.1.2.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs / Cagar Budaya	40 Situs/ Cagar	40 Situs/ Cagar	2.831.603.500	45 Situs/ Cagar	1.880.000.000	50 Situs/ Cagar	2.250.000.000	55 Situs/ Cagar	4.528.793.596	60 Situs/ Cagar	5.144.282.914	60 Situs/ Cagar	16.634.680.010	DISPARBUD	
1	2	16	17	17	2.1.2.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Pagelaran	11 -Event	11 -Event	1.407.150.000	12 -Event	13.623.691.652	13 -Event	2.950.000.000	14 -Event	5.304.000.000	15 -Event	6.348.100.000	15 -Event	29.632.941.652	DISPARBUD	
					2.1.2.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Workshop/Dialog kebudayaan Pengelolaan kekayaan budaya	0 -	0 -	0	0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARBUD
					Usuran Pilihan																DISPARBUD	
2	0	2			Usuran Pilihan																DISPARBUD	
2	0	2			Pariwisata																DISPARBUD	
2	0	2	2.4	15	2.1.1.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2150000 -Orang	2150000 -Orang	2.090.000.000	2200000 -Orang	2.716.755.700	2250000 -Orang	2.725.000.000	2.300.000 -Orang	3.957.079.936	2350000 -Orang	4.761.075.000	2350000 -Orang	16.249.910.636	DISPARBUD	
2	0	2	2.4	16	2.1.1.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata	66 -Objek Wisata	66 -Objek Wisata	8.149.335.000	66 -Objek Wisata	22.622.707.450	68 -Objek Wisata	6.760.000.000	70 -Objek Wisata	12.874.326.486	72 -Objek Wisata	12.362.500.000	72 -Objek Wisata	62.768.868.936	DISPARBUD	
2	0	2	2.4	17	2.1.1.17	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah MOU yang terjalin	0 -MOU	0 -MOU	944.787.550	0 -MOU	750.000.000	0 -MOU	1.900.000.000	0 -MOU	2.754.000.000	0 -MOU	2.955.150.000	0 -MOU	9.303.927.550	DISPARBUD	
					Jumlah 2																DISPARBUD	
					Jumlah Total (1+2)																DISPARBUD	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DISPERIN	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi Usuran Pilihan															DISPERIN	
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Operasional Perkantoran	100 %	100 %	1.824.413.469	100 %	1.570.842.878	100 %	1.967.120.663	100 %	2.470.674.382	100 %	2.455.426.366	100 %	10.288.477.758	DISPERIN	
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70 %	70 %	480.850.000	72 %	496.113.500	73 %	430.000.000	75 %	924.540.000	77 %	826.675.850	100 %	3.158.179.350	DISPERIN	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	72 %	72 %	322.776.750	74 %	90.000.000	75 %	200.000.000	77 %	259.600.000	78 %	240.790.000	100 %	1.113.166.750	DISPERIN	
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase kapasitas sumber daya aparatur	71 %	71 %	15.000.000	73 %	0	73 %	0	74 %	147.500.000	75 %	136.812.500	100 %	299.312.500	DISPERIN	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Petindustrian	72 point	72 point	78.550.000	75 point	62.650.000	77 point	58.441.075	80 point	72.368.582	82 point	67.936.461	100 %	339.946.118	DISPERIN	
					Jumlah 1																DISPERIN	
					2.	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing															DISPERIN	
					2.1.2.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa yang Kompetitif															DISPERIN	
2	0				Usuran Pilihan																DISPERIN	
2	0				Usuran Pilihan																DISPERIN	
2	0	6			Perdagangan																DISPERIN	
2	0	6	2.6	15	2.2.1.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Presentase Alat UTTP yang Bertanda tera yang sah	5 %	5 %	243.000.000	10 %	1.673.672.563	12 %	1.336.727.500	15 %	1.826.542.050	20 %	1.840.587.268	20 %	6.920.529.381	DISPERIN	
2	0	6	2.6	17	2.1.1.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Miava	854796852 \$	854796852 \$	205.000.000	863712617 \$	248.953.450	868476968 \$	470.000.000	897.710.575 \$	714.000.000	906687681 \$	809.930.000	06687681 \$	2.447.883.450	DISPERIN	
2	0	6	2.6	18	2.2.2.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Presentase kontribusi Perdagangan ke dalam negeri	6 %	6 %	4.653.045.226	6 %	4.691.401.155	6 %	8.718.812.984	6 %	7.936.956.606	6 %	8.319.799.251	6 %	34.320.015.222	DISPERIN	
					3.	JIRISAN PILIHAN															DISPERIN	
					3.5	Emas dan Sumberdaya Mineral															DISPERIN	
2	0				Usuran Pilihan																DISPERIN	
2	0	5			Emas dan Sumberdaya Mineral																DISPERIN	
2	0	5	2.3	17	2.4.1.17	Program pembenahan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Program pembenahan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	92 %	92 %	100.000.000	93 %	99.937.000	93 %	550.000.000	94 %	1.020.000.000	95 %	437.800.000	95 %	2.207.737.000	DISPERIN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp								
2.1.3.1	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif																		DISPERIN		
2.0	Urusan Pilihan																		DISPERIN		
2.0.6	Urusan Pilihan																		DISPERIN		
2.0.6.2.6	19	2.2.3.19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10 %	10 %	454.000.000	15 %	447.646.700	20 %	75.000.000	25 %	515.100.000	30 %	612.263.300	30 %	2.104.010.000		DISPERIN		
2.0.7	3.7	Perindustrian																	DISPERIN		
2.0.7.2.7	15	2.3.1.15	Program peningkatan kapasitas glikol sistem produksi	Persentase Kontribusi sub sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bandung	6 %	6 %	2.340.000.000	6 %	2.737.234.250	6 %	2.462.750.000	6 %	2.845.800.000	6 %	3.283.500.000	6 %	13.669.284.250		DISPERIN		
2.0.7.2.7	16	2.3.2.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan IKM Restora Salon	5 %	5 %	478.000.000	6 %	211.865.900	7 %	790.000.000	7 %	841.500.000	8 %	843.859.500	8 %	3.165.225.400		DISPERIN		
2.0.7.2.7	17	2.3.3.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk	1 %	1 %	1.742.000.000	2 %	1.881.335.324	4 %	2.399.200.000	5 %	3.825.000.000	6 %	4.172.020.000	6 %	14.019.555.324		DISPERIN		
			Jumlah 2				10.215.025.228		11.992.026.242		16.802.490.484		19.574.888.656		20.319.759.318		78.854.240.028		DISPERIN		
			Jumlah Total (1+2)				12.936.635.445		14.711.652.720		19.458.052.722		23.399.581.621		24.047.400.495		94.053.322.503		DISPERIN		
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISPERKIMTAN		
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Burekrasi																DISPERKIMTAN		
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100 %	100 %	1.284.829.665	100 %	1.129.805.734	100 %	1.023.047.902	100 %	1.489.228.324	100 %	6.308.233.999		DISPERKIMTAN	
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	100 %	100 %	2.038.010.000	100 %	1.582.606.234	100 %	570.000.000	100 %	1.690.629.665	100 %	7.449.376.550		DISPERKIMTAN	
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	100 %	149.000.000	100 %	245.000.000	100 %	50.000.000	100 %	354.000.000	100 %	1.126.350.000		DISPERKIMTAN	
x	xx	xx	xx	5	5.1.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100 %	100 %	60.000.000	100 %	150.000.000	100 %	0	100 %	177.000.000	100 %	551.175.000		DISPERKIMTAN	
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan pelaporan kinerja dan capaian keuangan	10 dokumen	10 dokumen	100.000.000	10 dokumen	150.000.000	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	236.000.000	10 dokumen	237.558.701	100 %	773.558.701	DISPERKIMTAN
						Jumlah 1			3.631.839.665		3.257.411.968		1.693.047.902		3.946.857.989		16.208.694.250		DISPERKIMTAN		
		4	URUSAN PEMUNJANG																DISPERKIMTAN		
		4.2	Bencanaan																DISPERKIMTAN		
3	0		Penyusunan Usulan																DISPERKIMTAN		
3	0	2	Penyusunan Usulan																DISPERKIMTAN		
3	0	2	6	15	5.1.1.1.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data informasi kepraktisanaan	100 %	100 %	304.015.819	100 %	450.000.000	100 %	-	100 %	-	100 %	754.015.819		DISPERKIMTAN	
3	0	2	6	21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah	100 %	100 %	48.520.000	100 %	50.000.000	0 %	-	0 %	-	100 %	98.520.000		DISPERKIMTAN	
		3.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																DISPERKIMTAN		
		3.1.3.1	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman (RAKSA, PERBUKIMTAN)																DISPERKIMTAN		
1	1		Urusan Wajib																DISPERKIMTAN		
1	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																DISPERKIMTAN		
1	1	4	Penumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																DISPERKIMTAN		
1	1	4	15	3.1.2.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah layak huni	86 %	86 %	48.096.524.014	86 %	65.728.617.981	86 %	31.606.402.717,00	86 %	21.998.200.000	86 %	17.943.513.849	86 %	185.373.258.561	DISPERKIMTAN	
1	1	4	16	3.1.1.16	Program Lingkungan Sehat	Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan	14 %	14 %	29.025.830.216	15 %	29.996.240.750	15 %	18.444.994.347	16 %	19.300.000.000	17 %	7.300.315.000	17 %	104.067.380.313	DISPERKIMTAN	
1	1	4	17	3.1.1.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kelompok berstrata baik dalam pengelola air bersih dan sanitasi	15 %	15 %	227.000.000	25 %	150.000.000	40 %	50.000.000	60 %	1.020.000.000	70 %	547.250.000	70 %	1.994.250.000	DISPERKIMTAN	
1	1	4	18	3.1.2.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam	Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam	0 rumah	0 rumah	-	0 rumah	-	0	-	0	-	-	-	0	DISPERKIMTAN		
1	1	4	22	3.1.2.22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang terapakan	1149 ha	1149 ha	0	1052 ha	0	970 ha	7.550.000.000	905 ha	8.604.000.000	33 %	3.009.875.000	33 %	19.163.875.000	DISPERKIMTAN	
1	1	4	23	3.1.2.23	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis	100 %	100 %	136.200.000	100 %	150.000.000	100 %	50.000.000	100 %	204.000.000	1 Dokumen	328.350.000	1 Dokumen	868.550.000	DISPERKIMTAN	
1	1	4	25	3.1.2.25	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan data informasi kepraktisanaan	0 %	0 %	-	0 %	-	200.000.000	100 %	510.000.000	100 %	492.525.000	100 %	1.202.525.000		DISPERKIMTAN	
1	1	4	26	3.1.2.26	Program perencanaan pembangunan daerah Bidang Perumahan Permukiman	Persentase Kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah	0 %	0 %	-	0 %	-	60.000.000	100 %	71.400.000	100 %	65.670.000	100 %	197.070.000		DISPERKIMTAN	
1	1	4	19	3.1.3.19	Program Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	5 Sertifikat	5 Sertifikat	400.000.000	5 Sertifikat	700.000.000	5 Sertifikat	389.208.439	5 Sertifikat	1.020.000.000	5 Sertifikat	398.860.496	5 Sertifikat	2.908.068.936	DISPERKIMTAN	
1	1	4	20	3.1.3.20	Program Penataan tapal batas wilayah	Persentase titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbaharui	0 lokasi	0 lokasi	-	0 lokasi	-	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	1.020.000.000	2 lokasi	547.250.000	4 lokasi	1.667.250.000	DISPERKIMTAN	
1	2	4		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														DISPERKIMTAN		
1	2	4	16	3.1.3.16	Program penataan penguasaan, penilaian, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah penyediaan dokumen dan pemanfaatan tanah di Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	1.905.684.338	1 Dokumen	18.690.000.000	1 Dokumen	10.050.000.000	1 Dokumen	1.094.500.000	1 Dokumen	42.448.184.338		DISPERKIMTAN		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebudayaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 2																			DISPERKIMTAN
1 2 7	2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa																	DISPERKIMTAN
1 2 7	17	3.1.2.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan pedesaan dan perdesaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	400.000.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan						0 Kegiatan	5 Kegiatan	400.000.000		DISPERKIMTAN
		4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup																DISPERKIMTAN
		4.1.2.1	Program Konservasi Sumber Daya Alam															0	DISPERKIMTAN
			Usuan Walsh																DISPERKIMTAN
1 1			Usuan Walsh Pelayanan Dasar																DISPERKIMTAN
1 1 4			Pemukiman Rakyat dan Kawasan Perkotaan																DISPERKIMTAN
1 1 4	20	4.1.1.20	Program pengelolaan areal pemukiman	Persentase Luas Tempat Pemakaman Umum Yang Terawat/baik	15 %	15 %	908.000.000	20 %	1.000.000.000	25 %	1.850.000.000	30 %	4.140.000.000		30 %	7.898.000.000		DISPERKIMTAN	
1 2			Usuan Walsh Bukan Pelayanan Dasar																DISPERKIMTAN
1 2 5			Lingkungan Hidup																DISPERKIMTAN
1 2 5	24	4.1.1.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau pedesaan	5 %	5 %	4.689.687.072	10 %	4.510.000.000	15 %	3.325.000.000	20 %	6.236.500.000	25 %	5.280.962.500	25 %	26.042.149.572		DISPERKIMTAN
			Jumlah 7				86.141.461.459		121.424.858.731		73.675.605.503		76.837.100.000		37.009.071.845		395.683.097.538		DISPERKIMTAN
			Jumlah Total (1+2)				89.773.301.124		124.662.270.693		75.368.653.405		80.778.957.989		40.688.608.971		411.291.791.768		DISPERKIMTAN
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISTAN
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																DISTAN
x xx xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.314.319.487	100 %	2.281.543.050	100 %	2.078.015.960	100 %	2.339.209.866	100 %	2.272.721.750	100%	11.285.810.113		DISTAN
x xx xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	1.184.747.600	100 %	3.809.449.905	100 %	1.481.075.172	100 %	1.935.200.000	100 %	1.741.349.500	100%	10.151.822.177		DISTAN
x xx xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	-Terperuhinya kebutuhan pakailan disiplin	100 %	100 %	190.170.000	0 %	0	100 %	35.000.000	100 %	0	100 %	0	100%	225.170.000		DISTAN
x xx xx	5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya personal dinas	100 %	100 %	19.999.975	100 %	20.000.000	100 %	15.000.000	100 %	194.700.000	100 %	180.592.500	100%	430.292.475		DISTAN
x xx xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	90.110.000	100 %	242.582.000	100 %	90.230.000	100 %	277.300.000	100 %	229.845.000	100%	930.067.000		DISTAN
			Jumlah 2				3.799.347.062		6.353.574.955		3.699.321.132		4.746.409.866		4.424.508.750		23.023.161.765		DISTAN
		2.	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing																DISTAN
		2.2.1.1	Program pematapan kemandirian pangan																DISTAN
			Usuan Pilihan																DISTAN
2 0			Pertanian																DISTAN
2 0 3	2.1.16	2.1.2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (ketahanan/perkebunan)	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan	687549 Ton	687549 Ton	12.291.497.924	695412 Ton	3.604.600.576	0 Ton	0	0 Ton	0	0 Ton	0	695412 Ton	15.896.098.500		DISTAN
2 0 3	2.1.18	2.1.2.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tercapainya Indeks Pertanian (IP)	2 point	2 point	13.135.755.446	2 point	7.581.500.000	0 point	0	0 point	0	0 point	0	2 point	20.717.255.446		DISTAN
2 0 3	2.1.19	2.1.2.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produk Non-Pangan Utama (Perkebunan dan Hortikultura)	405505 ton	405505 ton	5.796.633.206	409516 ton	6.902.559.032	413676 ton	9.732.095.260	418.217 ton	5.508.000.000	421.017 ton	6.019.750.000	421.017 ton	33.959.037.498		DISTAN
2 0 3	2.1.20	2.2.1.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Penyuluh Yang Naik Jabatan fungsional	22 %	22 %	826.335.163	40 %	1.602.120.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	40 %	2.428.455.163		DISTAN
2 0 3	2.1.21	2.1.3.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase status kesehatan hewan	71 %	71 %	1.239.430.000	72 %	2.105.717.000	72 %	1.193.385.526	73 %	1.234.200.000	73 %	1.324.345.000	73 %	7.097.077.526		DISTAN
2 0 3	2.1.22	2.1.3.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Ternak Ruminansia Besar	62859 ekor	62859 ekor	5.977.875.000	63330 ekor	7.683.854.000	63805 ekor	8.270.551.816	64.283 ekor	6.589.036.800	65.570 ekor	7.125.019.880	65.570 ekor	35.646.337.496		DISTAN
2 0 3	2.1.23	2.1.3.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase pemasaran peternakan	36 %	36 %	1.400.684.460	42 %	2.855.000.000	48 %	1.449.199.500	55 %	459.000.000	64 %	547.250.000	64 %	6.711.133.960		DISTAN
2 0 3	2.1.24	2.1.3.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase Kelompok Dalam Pemanfaatan Teknologi Peternakan	1 %	1 %	552.000.000	1 %	791.500.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	1 %	1.343.500.000		DISTAN
2 0 3	2.1.25	2.1.3.25	Program Penjaminan Produk Asal Hewan Ternak	Persentase produk asal hewan ternak	79 %	79 %	1.132.889.690	82 %	1.734.681.411	84 %	830.000.000	85 %	989.400.000	85 %	1.127.335.000	85 %	5.814.306.101		DISTAN
2 0 3	2.1.30	2.1.2.30	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan	0 ton	0 ton	0	0 ton	0	701346 ton	4.914.230.207	708.348 ton	4.183.899.615	709348 ton	4.342.670.500	709348 ton	13.440.800.322		DISTAN
		2.1.1.1	Program Pengembangan Pertanian Berdaya Saing Berbasis Organik																DISTAN
2 0 3	2.1.15	2.2.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas	26 %	26 %	618.583.072	36 %	2.075.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	36 %	2.693.583.072		DISTAN
2 0 3	2.1.17	2.2.2.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen	1 %	1 %	355.000.000	1 %	2.216.225.000	1 %	1.888.410.500	1 %	2.142.000.000	1 %	2.298.450.000	1 %	8.900.085.500		DISTAN
2 0 3	2.1.29	2.2.2.29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas produk unggulan pertanian	0 %	0 %	0	0 %	0	2 %	2.246.202.250	3 %	2.708.100.000	3 %	2.905.897.500	3 %	7.860.199.750		DISTAN
2 0 3	2.1.31	2.2.1.31	Program Peningkatan pemberdayaan penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas	26 %	26 %	0	36 %	0	45 %	1.186.385.980	55 %	1.861.500.000	55 %	1.997.462.500	55 %	5.045.348.480		DISTAN
			Jumlah 2				43.326.683.961		39.152.757.019		31.710.461.039		25.675.136.415		27.688.180.380		167.553.218.814		DISTAN
			Jumlah Total (1+2)				47.126.031.023		45.506.331.974		35.409.782.171		30.421.546.281		32.112.689.130		190.576.380.579		DISTAN
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																DISPORPAR
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																DISPORPAR
x xx xx			Usuan Bakti																DISPORPAR
x xx xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	660.000.000	100 %	1.830.217.350	100 %	1.804.600.000	100 %	2.148.308.000	100 %	2.004.746.398	100%	8.447.871.748		DISPORPAR
x xx xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	170.000.000	100 %	175.000.000	100 %	200.400.000	100 %	236.472.000	100 %	219.337.800	100%	1.001.209.800		DISPORPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikator	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
x xx xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	29.500.000	100 %	27.362.500	100%	81.862.500	DISPORPAR	
x xx xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	145.000.000	100 %	100.000.000	100 %	140.000.000	100 %	194.700.000	100 %	180.592.500	100%	760.292.500	DISPORPAR	
Jumlah 1						1.000.000.000		2.105.217.350		2.145.000.000		2.608.980.000		2.432.039.198		10.291.236.548	DISPORPAR	
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia															DISPORPAR	
	1.1.2.1	Program Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal															DISPORPAR	
1		Usuan Wajib															DISPORPAR	
1 2		Usuan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DISPORPAR	
1 2 13		Kemudahan dan Olahraga															DISPORPAR	
1 2 13 18 15	1.1.1.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Prosentase Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pemuda	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	383.835.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	1.300.500.000	100 Persen	1.477.575.000	100 Persen	3.361.910.000	DISPORPAR	
1 2 13 18 16	1.1.1.16	Program peningkatan peran serta perempuan	Jumlah Pemuda yang dibina	100 Persen	100 Persen	3.505.876.983	100 Persen	2.650.682.613	100 Persen	2.800.000.000	100 Persen	4.303.500.000	100 Persen	4.815.800.000	100 Persen	18.075.859.596	DISPORPAR	
1 2 13 18 17	1.1.1.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Peserta Pemuda yang Mengikuti Bincak Kewirausahaan dan keterampilan	0 Orang Peserta	0 Orang Peserta	0	130 Orang Peserta	150.000.000	320 Orang Peserta	150.000.000	350 Orang Peserta	706.567.626	675 Orang Peserta	867.624.771	675 Orang Peserta	1.874.192.398	DISPORPAR	
1 2 13 18 18	1.1.1.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Berkurangnya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	164.147.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	4 Kegiatan	164.147.000	DISPORPAR	
1 2 13 18 19	1.1.2.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Terukurnya Standarisasi Sertifikat Profesi Olahraga dan Terukurnya Pengembangan dan Evaluasi Keolahragaan	0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	1.060.000.000	DISPORPAR	
1 2 13 18 20	1.1.2.20	Program Pembinaan dan Pemasayakatan Olah Raga	Peningkatan atlet berprestasi dan peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga	230 Orang	230 Orang	2.757.250.000	210 Orang	1.517.891.875	300 Orang	780.000.000	350 Orang	3.780.000.000	350 Orang	4.159.100.000	350 Orang	12.994.241.875	DISPORPAR	
1 2 13 18 21	1.1.2.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terleksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	7 Kegiatan	7 Kegiatan	22.311.174.103	4 Kegiatan	62.051.300.000	4 Kegiatan	21.875.712.613	4 Kegiatan	15.479.475.710	4 Kegiatan	16.531.656.271	4 Kegiatan	138.249.318.697	DISPORPAR	
Jumlah 2						28.274.301.086		66.977.856.488		25.905.712.613		25.920.043.336		28.201.756.043		175.279.669.565	DISPORPAR	
Jumlah Total (1+2)						29.274.301.086		69.083.073.839		28.050.712.613		28.529.023.336		30.623.795.240		186.070.906.113	DISPORPAR	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DISPUSIP	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkorasi															DISPUSIP	
x xx xx		Usuan Rutin															DISPUSIP	
x xx xx		Usuan Rutin															DISPUSIP	
x xx xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	708.092.554	100 %	1.509.512.272	100 %	1.340.494.000	100 %	1.544.620.000	100 %	1.079.337.559	100%	6.182.056.385	DISPUSIP	
x xx xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	553.306.346	100 %	593.376.000	100 %	4.300.000.000	100 %	483.800.000	100 %	537.800.000	100%	6.468.282.346	DISPUSIP	
x xx xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase disiplin aparatur	100 %	100 %	72.545.000	100 %	125.070.000	100 %	0	100 %	70.800.000	100 %	71.670.000	100%	340.085.000	DISPUSIP	
x xx xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan sosialisasi Perundang-undangan untuk menambah wawasan aparatur	0 %	0 %	0	100 %	100.000.000	100 %	0	100 %	135.700.000	100 %	65.670.000	100%	301.370.000	DISPUSIP	
x xx xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	27.846.500	100 %	51.124.000	100 %	51.124.000	100 %	60.326.320	100 %	64.323.000	100%	254.743.820	DISPUSIP	
Jumlah 1						1.361.790.400		2.379.082.272		5.691.618.000		2.295.246.320		1.818.800.559		13.546.537.551	DISPUSIP	
1		Keasrian															DISPUSIP	
1 2		Usuan Wajib															DISPUSIP	
1 2		Usuan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DISPUSIP	
1 2 18		Keasrian															DISPUSIP	
1 2 18 24 15	5.1.1.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase Perangkat Daerah yang mdepor/ menyipar asip statis dan vital di Depo Arsip	100 %	100 %	138.190.000	100 %	158.900.000	100 %	115.000.000	100 %	117.300.000	100 %	155.867.500	100 %	685.257.500	DISPUSIP	
1 2 18 24 16	5.1.1.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase pemenuhan spras penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah di Depo Arsip	100 %	100 %	450.892.000	100 %	186.673.200	100 %	110.000.000	100 %	153.000.000	100 %	204.175.000	100 %	1.104.740.200	DISPUSIP	
1 2 18 24 17	5.1.1.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		0 -	0 -	230.607.000	0 -	103.810.000	0 -	80.000.000	0 -	81.600.000	0 -	87.560.000	0 -	583.577.000	DISPUSIP	
1 2 18 24 18	5.1.1.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		0 -	0 -	361.602.000	0 -	168.041.100	0 -	36.701.000	0 -	93.535.020	0 -	100.366.745	0 -	760.245.865	DISPUSIP	
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia															DISPUSIP	
	1.1.2.1	Program Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal															DISPUSIP	
1		Usuan Wajib															DISPUSIP	
1 2		Usuan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DISPUSIP	
1 2 17		Perustakaan															DISPUSIP	
1 2 17 26 21	1.1.1.21	Pengembangan budaya baca dan kebiasaan masyarakat	Jumlah Pemustaka	31 %	31 %	1.214.141.400	32 %	1.359.000.900	32 %	1.362.770.526	33 %	1.315.595.972	34 %	1.312.955.102	34 %	6.564.463.901	DISPUSIP	
Jumlah 2						2.395.432.400		1.976.425.200		1.704.471.526		1.761.030.992		1.860.924.347		9.698.284.465	DISPUSIP	
Jumlah Total (1+2)						3.757.222.800		4.355.507.472		7.396.089.526		4.056.277.312		3.679.724.906		23.244.822.016	DISPUSIP	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DLH	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkorasi															DLH	
x xx xx		Usuan Rutin															DLH	
x xx xx		Usuan Rutin															DLH	
x xx xx		Usuan Rutin															DLH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
x xx xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.230.829.300	100 Persen	1.788.044.200	100 Persen		963.000.000	100 Persen	1.194.201.300	100 Persen	1.113.210.669	100%	6.289.285.469	DLH			
x xx xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyelesaian sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	1.330.849.937	100 Persen	849.824.734	100 Persen		260.000.000	100 Persen	897.884.598	100 Persen	836.990.141	100%	4.175.549.410	DLH			
x xx xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan pakaian aparatur	100 Persen	100 Persen	60.000.000	100 Persen	154.000.000	100 Persen	0	0	100 Persen	64.038.600	100 Persen	59.695.508	100%	337.734.108	DLH			
x xx xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan pelaporan	100 Persen	100 Persen	119.999.999	100 Persen	193.775.000	100 Persen		16.000.000	100 Persen	11.474.600	100 Persen	103.914.402	100%	545.164.001	DLH			
		Jumlah 1				2.741.679.236		2.985.643.934			1.239.000.000		2.267.599.098		2.113.810.720		11.347.732.988	DLH			
3	0		Penunjang Urusan Pemerintahan															DLH			
3	0	2	6	21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	- Persentase penyelenggaraan sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat terkait lingkungan hidup	0 Persen	0 Persen	0	100 Persen	24.600.000	0 Persen	0	0	0	24.600.000	DLH			
		1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup															DLH			
		4.1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)															DLH			
1	2		Usuan Wajib															DLH			
1	2	5	Usuan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															DLH			
1	2	5	8	15	4.1.3.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Damsasman	Persentase volume sampah yang dapat dikelola	24 Persen	24 Persen	30.775.897.899,00	40 Persen	39.857.534.969,00	60 Persen	40.131.175.461,00	80 Persen	26.933.565.506	100 Persen	29.078.350.866	100 Persen	166.776.524.696	DLH
1	2	5	8	16	4.1.1.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dari Sumber Insitusi	10 Persen	10 Persen	2.682.719.267,00	11 Persen	1.940.630.125,00	12 Persen	1.324.421.530,00	13 Persen	1.002.035.250	13 Persen	1.080.599.234	13 Persen	8.930.405.406	DLH
1	2	5	8	19	4.1.1.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data terkait lingkungan hidup yang dapat diakses	100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	100 Persen	299.800.000,00	100 Persen	450.000.000,00	100 Persen	229.627.500	100 Persen	246.536.809	100 Persen	1.775.964.309	DLH
1	2	5	8	20	4.1.1.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase Penurunan Beban Pencemaran Air Sumber Insitusi	10 Persen	10 Persen	4.225.341.259,00	11 Persen	3.223.370.200,00	12 Persen	823.078.470,00	13 Persen	892.657.080	13 Persen	962.645.333	13 Persen	10.127.092.342	DLH
		4.1.2.1	Program Konservasi Sumber Daya Alam															DLH			
1	2	5	8	17	4.1.2.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase cadangan Air yang dapat disediakan untuk air bersih	0 Persen	0 Persen	4.485.537.233,00	0 Persen	6.352.940.900,00	0 Persen	2.929.019.532,90	0 Persen	1.104.383.310	0	1.192.066.333		16.063.947.308	DLH
			Jumlah 2																		
			Jumlah Total (1+2)																		
			5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															DPMD		
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																DPMD		
x	xx	xx		Usuan Rutin															DPMD		
x	xx	xx		Usuan Rutin															DPMD		
x	xx	xx	xx	1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	20 %	20 %	983.887.027	20 %	742.232.518	20 %	1.037.904.626	20 %	946.067.355	20 %	941.765.584	100%	4.651.857.110	DPMD
x	xx	xx	xx	2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	20 %	20 %	1.370.644.000	20 %	214.955.000	100 %	360.000.000	20 %	483.800.000	20 %	404.965.000	100%	2.834.364.000	DPMD
x	xx	xx	xx	3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	20 %	20 %	137.500.000	20 %	109.750.000	100 %	0	20 %	177.114.641	20 %	152.552.066	100%	576.916.706	DPMD
x	xx	xx	xx	6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20 %	20 %	185.000.000	20 %	122.500.000	100 %	62.000.000	20 %	277.300.000	20 %	257.207.500	100%	904.007.500	DPMD
			Jumlah 1																		
			Jumlah Total (1+2)																		
			1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia															DPMD		
		1.3.1.1	Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Berkeadilan																DPMD		
1	2		Usuan Rutin																DPMD		
1	2	7	Usuan Rutin																DPMD		
1	2	7	22	15	1.1.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase rata-rata kegiatan APBDes tahunan yang sesuai KRW	20 %	20 %	4.975.699.188	20 %	3.288.582.700	20 %	1.926.000.000	20 %	2.410.062.897	20 %	2.243.725.000	20 %	14.844.069.785	DPMD
1	2	7	22	16	1.1.1.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pertanian	Persentase bumdes yang di lath	20 %	20 %	175.838.933	20 %	99.700.000	20 %	916.000.000	20 %	1.122.000.000	20 %	1.030.877.586	20 %	3.344.416.519	DPMD
1	2	7	22	17	1.1.2.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat	10 %	10 %	2.720.000.000	10 %	2.164.349.500	10 %	1.830.000.000	10 %	2.040.000.000	10 %	2.024.825.000	10 %	10.779.174.500	DPMD
1	2	7	22	18	1.1.1.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase perangkat desa yang sudah mendapat pelatihan	20 %	20 %	1.640.000.000	20 %	1.429.922.000	20 %	1.133.887.326	20 %	1.377.000.000	20 %	1.094.500.000	20 %	6.675.309.326	DPMD
			Jumlah																		
			Jumlah Total (1+2)																		
			5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															INSPEKTORAT		
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																INSPEKTORAT		
x	xx	xx		Usuan Rutin															INSPEKTORAT		
x	xx	xx		Usuan Rutin															INSPEKTORAT		
x	xx	xx	xx	1	5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1.140.328.400	100	1.171.261.208	100 Presentase	1.070.063.969	100 Presentase	1.268.988.860	100 Presentase	1.182.926.144	100%	5.833.568.580	INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	2	5.1.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana APSP	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana APSP	100	100	613.055.000	100	1.033.462.500	100 Presentase	526.000.000	100 Presentase	623.783.400	100 Presentase	581.478.463	100%	3.377.779.363	INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	3	5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur APSP	Persentase Pemenuhan pakaian Aparatur APSP	100	100	85.000.000	100	155.734.000	100 Presentase	0	100 Presentase	213.462.000	100 Presentase	198.985.025	100%	653.181.025	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
x xx xx xx 5	5.1.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persentase	100 Persentase	114.000.000	113.000.000	100 Persentase	0	100 Persentase	134.006.700	100 Persentase	124.918.377	100%	485.925.077	INSPEKTORAT			
x xx xx xx 6	5.1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9 Jumlah	9 Jumlah	70.500.000	0	9 Jumlah	72.000.000	9 Jumlah	85.384.800	9 Jumlah	79.594.010	100%	307.478.810	INSPEKTORAT			
Jumlah 1					2.022.883.400	2.473.457.708		1.688.063.969		2.325.625.760		2.187.902.019		10.457.932.855	INSPEKTORAT			
3 0 0		Penunjang Urusan													INSPEKTORAT			
3 0 1		Inspektorat													INSPEKTORAT			
3 0 1 20 20	5.1.1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan/KM	Jumlah Objek pengawasan	412 Jumlah	412 Jumlah	5.915.000.000	5.728.389.322	412 Jumlah	1.548.000.000	412 Jumlah	3.849.250.500	412 Jumlah	4.151.048.721	412 Jumlah	21.191.688.543	INSPEKTORAT		
3 0 1 20 21	5.1.2.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Presentase Diklat yang diikuti	8 Jenis	8 Jenis	233.081.340	213.212.468	12 Jenis	213.212.468	12 Jenis	218.564.101	12 Jenis	235.700.490	12 Jenis	1.113.770.866	INSPEKTORAT		
Jumlah 2					6.148.081.340	5.941.601.790		1.761.417.468		4.067.814.610		4.386.749.411		22.305.459.405	INSPEKTORAT			
Jumlah Total (1+2)					8.170.964.740	8.415.059.498		3.449.476.437		6.393.440.360		6.554.651.229		32.863.392.265	INSPEKTORAT			
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih													RSUD CICALENGA			
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi Urusan Rutin													RSUD CICALENGA			
x xx xx xx		Urusan Rutin													RSUD CICALENGA			
x xx xx xx 1	5.1.1.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.366.645.554	1.552.921.780	12 Bulan	1.220.000.000	12 Bulan	1.533.577.438	12 Bulan	1.422.251.945	100%	7.095.396.716	RSUD CICALENGA		
x xx xx xx 2	5.1.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Gedung/Kendaraan Dinas Yang Berfungsi Baik	12 Bulan	12 Bulan	550.000.000	225.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	355.770.000	12 Bulan	331.641.709	100%	1.637.411.709	RSUD CICALENGA		
x xx xx xx 3	5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Pegawai Yang Memiliki Seragam Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	0	12 Bulan	0	12 Bulan	100.500.000	12 Bulan	101.002.500	100%	401.502.500	RSUD CICALENGA		
x xx xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Keahlian	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	400.000.000	12 Bulan	105.000.000	12 Bulan	474.360.000	12 Bulan	442.188.945	100%	1.721.548.945	RSUD CICALENGA		
x xx xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Realisasi Kinerja Dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	-	0	RSUD CICALENGA			
Jumlah 1					2.416.645.554	2.177.921.780		1.500.000.000		2.464.207.438		2.297.085.098		10.855.859.870	RSUD CICALENGA			
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia													RSUD CICALENGA			
	1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat													RSUD CICALENGA			
1 1 1		Urusan Wajib													RSUD CICALENGA			
1 1 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar													RSUD CICALENGA			
1 1 2		Kesehatan													RSUD CICALENGA			
1 1 2 2 16	1.1.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	33.588.529.000	30.000.000.000	12 Bulan	32.000.000.000	12 Bulan	35.000.000.000	12 Bulan	38.000.000.000	60 Bulan	168.588.529.000	RSUD CICALENGA		
1 1 2 2 23	1.1.3.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Akreditasi	12 Bulan	12 Bulan	700.000.000	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	60 Bulan	700.000.000	RSUD CICALENGA		
1 1 2 2 26	1.1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Presentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Medik	1 tahun	1 tahun	2.968.250.000	21.536.166.000	1 tahun	0	1 tahun	2.740.000.000	1 tahun	0	1 tahun	27.244.416.000	RSUD CICALENGA		
1 1 2 2 33	1.1.1.33	Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Pertumbuhan Jumlah Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	60 Bulan	60.000.000	RSUD CICALENGA		
	1.2.1.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat													RSUD CICALENGA			
1 1 2 2 24	1.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Produktif Mekanik	Presentase Pelayanan Kesehatan Produktif Mekanik	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000.000	3.000.000.000	12 Bulan	3.000.000.000	12 Bulan	3.075.300.000	12 Bulan	3.316.417.088	60 Bulan	15.391.717.088	RSUD CICALENGA		
Jumlah 2					40.316.779.000	54.536.166.000		35.000.000.000		40.815.300.000		41.316.417.088		211.984.662.088	RSUD CICALENGA			
Jumlah Total (1+2)					42.733.424.554	56.714.087.780		36.500.000.000		43.279.507.438		43.613.502.186		222.840.521.958	RSUD CICALENGA			
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih													RSUD MAJALAYA			
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi													RSUD MAJALAYA			
x xx xx xx 1	5.1.1.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	0 -	0 -	1.351.534.755	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	100%	1.351.534.755	RSUD MAJALAYA		
x xx xx xx 3	5.1.1.13	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pegawai Memiliki Seragam Lengkap	100 orang	100 orang	0	100 orang	0	100 orang	0	100 orang	0	0	0	0	RSUD MAJALAYA		
x xx xx xx 5	5.1.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentasi SDM yang memiliki Kompetensi Keahlian	75 -	75 -	0	76 -	0	78 -	0	80 -	0	0	0	0	RSUD MAJALAYA		
x xx xx xx 6	5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Kinerja	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	0	0	RSUD MAJALAYA		
Jumlah 1					1.351.534.755	0		0		0		0		0	1.351.534.755	RSUD MAJALAYA		
	1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia													RSUD MAJALAYA			
	1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat													RSUD MAJALAYA			
1 1 1		Urusan Wajib													RSUD MAJALAYA			
1 1 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar													RSUD MAJALAYA			
1 1 2		Kesehatan													RSUD MAJALAYA			
1 1 2 2 16	1.1.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien yang dapat dijangkau	100 %	100 %	90.000.000.000	96.000.000.000	100 %	102.000.000.000	100 %	108.325.000.000	100 %	114.325.000.000	100 %	510.650.000.000	RSUD MAJALAYA		
1 1 2 2 19	1.1.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100.000.000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	100%	100.000.000	RSUD MAJALAYA		
1 1 2 2 26	1.1.1.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar	76 %	76 %	2.351.516.000	22.000.146.166	77 %	0	78 %	0	80 %	0	77 %	24.351.662.166	RSUD MAJALAYA		
1 1 2 2 27	1.1.1.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS yang dilakukan Pemeliharaan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	RSUD MAJALAYA		
	1.2.1.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat													RSUD MAJALAYA			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
1	1	2	2	24	1.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Produktif & Miskin	Prosentase masyarakat miskin yang tercapai	100 %	100 %	10.000.000.000	100 %	6.000.000.000	100 %		6.000.000.000	100 %	7.317.100.000	100 %	6.632.834.175	100 %	35.949.934.175	RSUD MAJALAYA	
							Jumlah ?			107.251.516.000		174.000.146.166		108.000.000.000		115.642.100.000		120.957.834.175		571.051.596.341	RSUD MAJALAYA		
							Jumlah Total (1+2)			103.803.050.755		174.000.146.166		108.000.000.000		115.642.100.000		120.957.834.175		572.203.131.096	RSUD MAJALAYA		
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															RSUD SOREANG		
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi															RSUD SOREANG		
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Soreang	63 NILAI	63 NILAI	0	65 NILAI	0	66 NILAI	0	68 NILAI	0	70 NILAI	0	0	0	0	RSUD SOREANG	
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Aset Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	300.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	RSUD SOREANG
							Jumlah 1			300.000.000		0		0		0				0	300.000.000	RSUD SOREANG	
					1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																RSUD SOREANG	
					1.1.3.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																RSUD SOREANG	
					1	Usuan Walsh																RSUD SOREANG	
					1	Usuan Walsh Pelayanan Dasar																RSUD SOREANG	
1	1	2	2	16	1.1.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jumlah Pasien Yang Terlayani	100 %	100 %	72.269.520.184	100 %	76.268.000.000	100 %		77.246.400.000	100 %	81.108.720.000	100 %	93.212.168.742	100 %	400.104.808.926	RSUD SOREANG	
1	1	2	2	19	1.1.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Media Informasi Sadar Hidup Sehat	3 PAKET	3 PAKET	100.000.000	5 PAKET	150.000.000	5 PAKET		150.000.000	5 PAKET	153.765.000	5 PAKET	165.820.854	5 PAKET	719.585.854	RSUD SOREANG	
1	1	2	2	26	1.1.2.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terlaksananya Pembangunan RS	100 %	100 %	21.671.665.481	100 %	103.394.413.834	100 %		130.666.100.000	100 %	103.192.819.110	100 %	111.283.591.390	100 %	470.208.589.815	RSUD SOREANG	
					1.2.1.1	Program Jaminan Sosial Masyarakat																RSUD SOREANG	
1	1	2	2	24	1.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Produktif & Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Terlayani	12 BULAN	12 BULAN	10.000.000.000	12 BULAN	5.000.000.000	12 BULAN		5.000.000.000	12 BULAN	6.747.674.400	12 BULAN	5.527.361.813	60 bulan	32.275.036.213	RSUD SOREANG	
							Jumlah ?			104.041.185.665		184.812.413.834		213.062.500.000		191.202.978.510		210.188.942.799		903.308.020.808	RSUD SOREANG		
							Jumlah Total (1+2)			104.341.185.665		184.812.413.834		213.062.500.000		191.202.978.510		210.188.942.799		903.608.020.808	RSUD SOREANG		
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																SAPOLPP	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																SAPOLPP	
x	xx	xx	xx			Usuan Rutin																SAPOLPP	
x	xx	xx	xx			Usuan Rutin																SAPOLPP	
x	xx	xx	xx	1	5.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.329.505.500	100 %	610.084.818	100 %		610.084.818	100 %	723.499.586	100 %	674.431.905	100%	3.947.606.626	SAPOLPP	
x	xx	xx	xx	2	5.6.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	2.094.651.000	100 %	2.227.338.841	100 %		1.159.296.805	100 %	1.374.810.081	100 %	1.281.570.577	100%	8.137.667.304	SAPOLPP	
x	xx	xx	xx	3	5.6.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	651.376.138	100 %	554.850.700	100 %		554.850.700	100 %	657.997.445	100 %	613.372.114	100%	3.032.447.096	SAPOLPP	
x	xx	xx	xx	5	5.5.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Sdipol PP Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	0 %		500.000.000	0 %	592.950.000	0 %	552.736.181	100%	2.645.686.181	SAPOLPP	
x	xx	xx	xx	6	5.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	106.000.000	100 %		106.000.000	100 %	125.705.400	100 %	117.180.070	100%	554.885.470	SAPOLPP	
							Jumlah 1			4.675.532.638		3.998.274.359		2.930.232.323		3.474.962.511		3.239.290.848		18.318.292.679	SAPOLPP		
					5.2.1.1	Program Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah																SAPOLPP	
						Usuan Walsh																SAPOLPP	
						Usuan Walsh Pelayanan Dasar																SAPOLPP	
1	1	5				Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																SAPOLPP	
1	1	5	19	15	5.5.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	18.921.602.542	100 %	22.956.161.501	100 %		19.661.818.501	100 %	10.969.421.285	100 %	11.872.384.270	100 %	84.381.388.198	SAPOLPP	
1	1	5	19	16	5.5.1.16	Program pemeliharaan ketertibnaan dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Patroli Petugas (kali/hari)	3 kali/hari	3 kali/hari	3.037.165.000	3 kali/hari	8.086.400.000	3 kali/hari		8.541.400.000	3 kali/hari	7.692.228.000	3 kali/hari	8.254.062.300	3 kali/hari	35.611.255.300	SAPOLPP	
1	1	5	19	20	5.5.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Kelompok Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Mtas dan Narkoba	1 Kelompok	1 Kelompok	300.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok		300.000.000	1 Kelompok	306.000.000	1 Kelompok	328.350.000	1 Kelompok	1.284.350.000	SAPOLPP	
1	1	5	19	22	5.5.2.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Linmas Siaga Bencana	100 %	100 %	109.815.000	100 %	109.815.000	100 %		109.815.000	100 %	112.571.357	100 %	121.397.447	100 %	563.413.804	SAPOLPP	
							Jumlah ?			22.368.582.542		31.202.376.501		28.613.033.501		19.080.220.641		20.576.194.117		121.840.407.302	SAPOLPP		
							Jumlah Total (1+2)			27.044.115.180		35.200.650.860		31.543.265.824		22.555.183.152		23.815.484.964		140.130.699.981		140.130.699.981	SAPOLPP
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																SETDA	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																SETDA	
x	xx	xx	xx			Usuan Rutin																SETDA	
x	xx	xx	xx			Usuan Rutin																SETDA	
x	xx	xx	xx	1	5.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	17.817.819.225	100 %	16.782.520.589	100 %		12.650.887.600	100 %	15.102.857.642	100 %	14.078.581.957	100%	76.432.667.013	SETDA	
x	xx	xx	xx	2	5.1.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	11.430.396.538	100 %	11.404.644.853	100 %		7.430.455.980	100 %	8.701.389.084	100 %	8.475.621.379	100%	47.442.507.834	SETDA	
x	xx	xx	xx	3	5.1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	1.796.970.000	100 %	964.020.000	100 %		366.020.000	100 %	904.574.666	100 %	843.226.332	100%	4.874.810.998	SETDA	
x	xx	xx	xx	5	5.1.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	100 %		96.840.000	100 %	140.750.400	100 %	131.204.720	100%	568.795.120	SETDA	



Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
x	xx	xx	xx	6	5.1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	terwujudnya pengembangan sistem laporan capaian kinerja	100 %	100 %	468.100.000	100 %	456.240.258	100 %	770.819.600	100 %	934.398.677	100 %	871.028.419	100%	3.500.586.955	SETDA	
					Jumlah 1					31.563.285.763		29.757.425.700		21.315.023.180		25.783.970.469		24.399.662.807		132.819.367.919	SETDA	
4	0				Pendukung																SETDA	
4	0	1			Sekretariat Daerah																SETDA	
4	0	1	20	16	5.1.1.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	meningkatkan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	22 kegiatan	22 kegiatan	7.018.637.000	22 kegiatan	7.349.926.934	22 kegiatan	6.730.286.339	22 kegiatan	5.864.222.964	22 kegiatan	6.324.003.707	22 kegiatan	33.287.076.944	SETDA	
4	0	1	20	20	5.1.1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	100 %	100 %	6.909.250.000	100 %	10.265.137.648	100 %	6.079.989.099	100 %	6.116.450.706	100 %	6.596.007.424	100 %	35.966.834.877	SETDA	
4	0	1	19	21	5.1.2.21	Program pendidikan politik masyarakat					100	1.014.000.000									1.014.000.000	SETDA
4	0	1	20	25	5.1.2.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					100	1.449.500.000	100	4.207.531.778							5.657.031.778	SETDA
4	0	1	20	26	5.1.2.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	tercapainya penataan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	6.002.119.000	100 %	7.171.489.681	100 %	4.676.664.950	100 %	5.724.105.564	100 %	6.172.901.087	100 %	29.747.280.282	SETDA	
4	0	1	20	27	5.1.1.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya penataan daerah otonomi baru	100 %	100 %	150.000.000	100 %	349.158.425	100 %	245.482.460	100 %	283.203.816	100 %	305.408.186	100 %	1.333.252.887	SETDA	
3	0				Usulan Penunjang																0	SETDA
3	0	4			Kepesawahan																0	SETDA
3	0	4	20	48	5.1.1.48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pendukung	terciptanya pembinaan dan pengembangan aparatur	100 %	100 %	317.000.000	100 %	611.018.750	100 %	431.958.300	100 %	495.599.742	100 %	534.456.937	100 %	2.390.033.729	SETDA	
4	0				Pendukung																0	SETDA
4	0	1			Sekretariat Daerah																0	SETDA
4	0	1	25	49	5.1.1.49	Program Penyebarluasan Informasi	terwujudnya penyebaran informasi secara luas	100 %	100 %	0	100 %	0	2.995.053.900	100 %	3.532.465.020	100 %	3.809.425.857	100 %	10.336.944.777	SETDA		
4	0	1	6	50	5.1.1.50	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	tercapainya perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	0	100 %	0	711.088.966	100 %	615.647.418	100 %	663.916.805	100 %	1.990.653.189	SETDA		
4	0	1	20	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah dan Jasa	tercapainya pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100 %	100 %	0	100 %	0	2.806.631.600	100 %	3.214.749.810	100 %	3.466.801.497	100 %	9.488.182.907	SETDA		
1					Usulan Wajib																0	SETDA
1	2				Usulan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																0	SETDA
1	2	10			Komunikasi dan Informatika																0	SETDA
1	2	10	25	15	5.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					220.000.000										220.000.000	SETDA
1	2	10	25	17	5.1.1.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Telaksananya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	165.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	165.000.000	SETDA	
1	2	10	25	18	5.1.1.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Telaksananya kerjasama informasi dengan mas media	100 %	100 %	400.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	400.000.000	SETDA	
3	0				Usulan Penunjang																0	SETDA
3	0	2			Pencanaaan																0	SETDA
3	0	2	6	21	5.1.1.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Telaksananya perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	616.290.000	100 %	599.896.507	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	1.216.186.507	SETDA	
					Jumlah 2					23.247.796.000		31.568.159.723		24.677.155.614		25.846.445.040		27.872.921.498		133.212.477.875	SETDA	
					Jumlah Total (1+2)					54.811.081.763		61.325.585.423		45.992.178.794		51.630.415.509		52.272.584.305		266.031.845.794	SETDA	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																SETWAN
x	xx	xx			5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																SETWAN
x	xx	xx			Usulan Rutin																	SETWAN
x	xx	xx			Usulan Rutin																	SETWAN
x	xx	xx	1		1.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan administrasi kantor	100 kegiatan	100 kegiatan	5.851.334.000	100 kegiatan	9.993.756.210	100 kegiatan	8.259.527.675	100 kegiatan	9.603.242.353	100 kegiatan	9.376.302.650	100%	43.084.162.888	SETWAN	
x	xx	xx	2		1.3.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 kegiatan	100 kegiatan	1.284.008.000	100 kegiatan	6.923.226.663	100 kegiatan	3.360.043.860	100 kegiatan	3.996.351.345	100 kegiatan	4.194.065.067	100%	19.757.694.935	SETWAN	
x	xx	xx	3		1.3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pemenuhan Fiskalis Dinas dalam rangka Peningkatan Disiplin Aparatur	100 stel	100 stel	282.820.000	100 stel	396.400.000	100 stel	525.000.000	100 stel	709.500.000	100 stel	721.862.500	100%	2.635.582.500	SETWAN	
x	xx	xx	3		1.3.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	0 -	0 -	719.246.000	0 -	795.275.000	0 -	295.257.000	0 -	538.403.260	0 -	670.408.787	100%	3.018.590.047	SETWAN	
x	xx	xx	6		1.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan	100 dokumen	100 dokumen	579.083.500	100 dokumen	840.788.500	100 dokumen	440.788.500	100 dokumen	692.130.430	100 dokumen	820.243.013	100%	3.373.033.943	SETWAN	
					Jumlah 1					8.716.491.500		18.949.446.373		12.880.617.035		15.539.627.388		15.782.882.016		71.869.064.313	SETWAN	
4	0				Pendukung																	SETWAN
4	0	2			Sekretariat DPRD																	SETWAN
4	0	2	20	15	1.1.1.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	persentase pemenuhan peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	85 -	85 -	23.157.383.325	85 -	29.758.742.500	90 -	15.613.497.803	95 -	17.106.504.745	95 -	18.705.360.595	95 -	104.341.488.968	SETWAN	
4	0	1	20	25	1.1.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi	100	100	411.370.372	100	945.605.372	100	0	100	0	100	0	100	1.356.975.744	SETWAN	
4	0	1	20	26	1.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penataan peraturan Perundang-undangan	95 kegiatan	95 kegiatan	907.750.300	95 kegiatan	1.141.705.250	95 kegiatan	1.726.100.300	95 kegiatan	1.760.622.306	95 kegiatan	1.889.216.778	95 kegiatan	7.425.394.934	SETWAN	
4	0	2	20	50	1.1.1.50	Program Penyebarluasan Informasi Publik	Jumlah Penyebarluasan Informasi Publik	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	100 Kegiatan	945.605.372	100 Kegiatan	964.517.479	100 Kegiatan	1.034.965.080	100 Kegiatan	2.945.087.931	SETWAN	
					Jumlah 2					24.476.503.997		31.846.051.172		18.285.203.475		19.831.644.451		21.625.532.453		116.068.947.578	SETWAN	
					Jumlah Total (1+2)					33.192.995.497		50.795.499.495		31.165.820.510		35.371.271.919		37.412.424.470		187.938.011.890	SETWAN	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. ARJASARI
x	xx	xx			5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																KEC. ARJASARI
x	xx	xx			Usulan Rutin																	KEC. ARJASARI
x	xx	xx			Usulan Rutin																	KEC. ARJASARI
x	xx	xx	1		5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100 %	100 %	470.075.700	100 %	451.179.329	100 %	374.416.653	100 %	445.351.651	100 %	413.082.527	100%	2.154.105.859	KEC. ARJASARI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuluan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp								
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	60.000.000	0 %	0	100 %	35.000.000	100 %	41.300.000	100 %	38.307.500	100%	174.607.500	KEC. ARJASARI				
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	10.102.500	100 %	45.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.800.000	100 %	10.945.000	100%	87.847.500	KEC. ARJASARI				
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20 %	20 %	27.000.000	40 %	4.200.000	60 %	10.000.000	80 %	11.800.000	100 %	10.945.000	100%	63.945.000	KEC. ARJASARI				
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	88.250.000	100 %	50.000.000	100 %	8.253.500	100 %	10.126.787	100 %	11.751.664	100%	168.381.951	KEC. ARJASARI				
Jumlah 1						655.428.700		550.379.373		437.670.153		520.378.438		485.031.691		2.648.887.810	KEC. ARJASARI				
6	0		Kewilayahan														KEC. ARJASARI				
6	0		Kecamatan														KEC. ARJASARI				
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kewilayahan	-	0 -	0 -	26.453.500	0 -	26.453.500	0 -	28.000.000	0 -	28.560.000	0 -	33.491.700	142.958.700	KEC. ARJASARI	
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendololan perizinan	-	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	0	0	KEC. ARJASARI	
6	0	1	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kawasan daerah	Jumlah pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan	100 %	100 %	40.541.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	100 %	40.541.000	KEC. ARJASARI	
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawas internal dan pendataan pelaksanaan kebijakan KMD	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	100 %	100 %	219.342.750	100 %	20.000.000	100 %	47.000.000	100 %	47.940.000	100 %	48.650.525	100 %	382.933.275	KEC. ARJASARI
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	0 kegiatan	0	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.300.000	1 kegiatan	16.417.500	1 kegiatan	146.717.500	KEC. ARJASARI
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Pemasyarakatan Olah Raga	100 persen	100 persen	65.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.600.000	1	32.835.000		188.435.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase fasilitasi usulan masyarakat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50.701.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.800.000	1 kegiatan	43.780.000	1 kegiatan	215.281.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase penyuluhan bagi ibu hamil	2 kali	2 kali	19.830.250	2 kali	0	2 kali	63.253.500	2 kali	64.853.663	2 kali	72.003.889	2 kali	219.941.302	KEC. ARJASARI
6	0	1	8	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	persentase penataan penataan pemeliharaan taman	0 Taman	0 Taman	0	0 Taman	0	1 Taman	15.000.000	1 Taman	15.300.000	1 Taman	16.417.500	1 Taman	46.717.500	KEC. ARJASARI
6	0	1	22	55	5.1.2.55	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	persentase pemberdayaan perempuan di pedesaan bidang aksesori produktif	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.300.000	1 kegiatan	16.417.500	1 kegiatan	46.717.500	KEC. ARJASARI
6	0	1	19	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/bimas dan pencegahan tindak kriminal	persentase pencegahan tindak kriminal	2 kegiatan	2 kegiatan	70.000.000	2 kegiatan	71.500.000	2 kegiatan	80.634.500	2 kegiatan	93.666.849	2 kegiatan	101.019.408	2 kegiatan	416.820.757	KEC. ARJASARI
6	0	1	19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	persentase wawasan kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000	0 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	60.000.000	2 kegiatan	61.200.000	2 kegiatan	65.670.000	2 kegiatan	276.870.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	22	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	persentase peningkatan kapasitas pemerintah desa	1 kegiatan	1 kegiatan	33.993.900	0 kegiatan	0	1 kegiatan	16.000.000	1 kegiatan	16.320.000	1 kegiatan	17.512.000	1 kegiatan	83.825.900	KEC. ARJASARI
6	0	1	11	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	persentase pembinaan organisasi perempuan	1 kegiatan	1 kegiatan	45.980.000	1 kegiatan	38.500.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.800.000	1 kegiatan	43.780.000	1 kegiatan	209.060.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	18	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	-	0 -	0 -	40.000.000	0	40.300.000	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	80.300.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	19	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	0	KEC. ARJASARI
6	0	1	15	64	5.1.2.64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	persentase peserta pelatihan kewirausahaan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.600.000	1 kegiatan	32.835.000	1 kegiatan	123.435.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	13	79	5.1.2.79	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya	persentase pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang sosial	0 kegiatan	0 kegiatan	0	2 kegiatan	40.000.000	2 kegiatan	35.000.000	2 kegiatan	25.500.000	2 kegiatan	27.362.500	2 kegiatan	127.862.500	KEC. ARJASARI
6	0	1	21	80	5.1.2.80	Program Ketahanan Pangan	persentase pelaksanaan penyuluhan pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.200.000	1 kegiatan	10.945.000	1 kegiatan	56.145.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	24	81	5.1.2.81	Program perbaikan sistem administrasi kependudukan	persentase saran penyimpanan an	0 Buah	0 Buah	0	2 Buah	10.000.000	1 Buah	8.000.000	1 Buah	8.160.000	1 Buah	8.756.000	1 Buah	34.916.000	KEC. ARJASARI
6	0	1	14	82	5.1.2.82	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	0	KEC. ARJASARI
6	0	1	3	83	5.1.2.83	Program Pembangunan saluran distribusi/perdagangan	persentase pembangunan saluran distribusi/perdagangan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	73.131.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	1 kegiatan	73.131.000	KEC. ARJASARI
Jumlah 2						751.842.400		494.884.500		532.888.000		545.100.512		587.893.522		2.912.608.934	KEC. ARJASARI				
Jumlah Total (1+2)						1.407.270.600		1.045.263.873		970.558.153		1.065.478.950		1.072.925.213		5.561.496.745	KEC. ARJASARI				
			5.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. BALEENDAH	
			5.1.1.1		Program Peningkatan Profesionalisme BinaKasi Ususan Rutin															KEC. BALEENDAH	
x	xx	xx			Ususan Rutin															KEC. BALEENDAH	
x	xx	xx	xx	1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	0 -	0 -	1.230.954.028	0 -	1.824.499.862	0 -	1.719.813.200	0 -	2.061.628.587	0 -	1.927.476.000	100%	8.764.371.677	KEC. BALEENDAH
x	xx	xx	xx	2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96	96	1.090.458.973	96	2.208.879.957	96	1.710.834.671	96	2.073.161.753	96	1.925.615.653	100%	9.008.951.007	KEC. BALEENDAH
x	xx	xx	xx	3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	116.800.000	100 Persen	182.200.000	100 Persen	182.200.000	100 Persen	149.919.000	100 Persen	141.245.225	100%	772.364.225	KEC. BALEENDAH
x	xx	xx	xx	5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	96 Persen	20.000.000	96 Persen	23.600.000	96 Persen	21.890.000	100%	65.490.000	KEC. BALEENDAH
x	xx	xx	xx	6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	0 -	0 -	39.000.000	0 -	9.150.000	0 -	39.500.000	0 -	46.610.000	0 -	43.232.750	100%	177.492.750	KEC. BALEENDAH
Jumlah 1										2.477.213.001		4.224.729.819		3.672.347.871		4.354.919.340		4.059.459.628		18.788.669.659	KEC. BALEENDAH
6	0				Kewilayahan															KEC. BALEENDAH	
6	0				Kecamatan															KEC. BALEENDAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	-	0 -	0 -	0	0	75	56.000.000	80	57.120.000	85	61.292.000	85	174.412.000	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pelayanan masyarakat	-	98 Persen	98 Persen	10.000.000	98 Persen	16.000.000	98 Persen	40.000.000	98 Persen	20.400.000	0,98	43.780.000	0,98	130.180.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0 Persen	0 Persen	0	98 Persen	6.000.000	98 Persen	14.000.000	98 Persen	16.320.000	1,0	15.323.000	1,0	51.643.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KRM	-	0 -	0 -	4.145.901.376	0 -	3.757.637.030	0 -	2.001.702.215	0 -	1.997.723.883	0 -	2.284.218.972	0 -	14.187.183.475	KEC. BALEENDAH
6 0 1 6 49	5.1.2.49	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan	Prosentase Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan	98 Persen	98 Persen	10.000.000	0 Persen	0	98 Persen	8.000.000	98 Persen	10.200.000	0	0	0	28.200.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	0 -	0 -	20.000.000	0 -	16.000.000	0 -	986.420.000	0 -	1.008.188.400	0 -	1.090.581.690	0 -	3.121.190.090	KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	0 Persen	0 Persen	0	98 Persen	66.000.000	98 Persen	58.000.000	98 Persen	20.400.000	1	17.512.000	1	161.912.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90 Persen	90 Persen	30.292.500	90 Persen	90.000.000	90 Persen	90.000.000	90 Persen	91.800.000	1	101.241.250	1	403.333.750	KEC. BALEENDAH
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100 Persen	100 Persen	10.000.000	0 Persen	0	0 Persen	12.000.000	0 Persen	0	0	0	10.945.000	32.945.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	98 Persen	98 Persen	110.000.000	98 Persen	100.000.000	98 Persen	106.000.000	98 Persen	87.720.000	1	21.890.000	1	425.610.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kemitrasnas dan pencegahan tindak kriminal	-	0 -	0 -	10.000.000	0 -	25.806.000	0 -	10.000.000	0 -	20.400.000	0 -	21.890.000	0 -	88.096.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 Persen	0 Persen	0	98 Persen	50.000.000	98 Persen	100.000.000	98 Persen	115.260.000	1	123.678.500	1	388.938.500	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Prosentase Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	0 persen	0 persen	0	98 persen	118.000.000	98 persen	58.000.000	98 persen	164.220.000	1	107.261.000	1	447.481.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	0 -	0 -	20.000.000	0 -	62.000.000	0 -	68.000.000	0 -	89.760.000	0 -	74.426.000	0 -	314.186.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	-	0 -	0 -	0	0	8.000.000	0 -	6.000.000	0 -	6.120.000	0 -	8.756.000	0 -	28.876.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	98 Persen	98 Persen	50.000.000	98 Persen	100.000.000	98 Persen	80.000.000	98 Persen	102.000.000	1	103.977.500	1	435.977.500	KEC. BALEENDAH
6 0 1 15 64	5.1.2.64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	98 -	98 -	5.000.000	98 -	0	98 -	10.000.000	98 -	0	98 -	10.945.000	98 -	25.945.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase kegiatan pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	98 Persen	12.000.000	98 Persen	98%	10.945.000	98%	22.945.000	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 2 68	5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	0 -	0 -	10.000.000	0 -	20.000.000	0 -	20.000.000	0 -	10.200.000	0 -	21.890.000	0 -	82.090.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 73	5.1.2.73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah kegiatan sosialisasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.000.000	1 Kegiatan	8.160.000	1 Kegiatan	8.756.000	1 Kegiatan	24.916.000	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 75	5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	-	0 -	0 -	0	0	6.000.000	0 -	6.000.000	0 -	6.120.000	0 -	6.567.000	0 -	24.687.000	KEC. BALEENDAH
		Jumlah 2				4.431.193.876		4.441.443.030		3.750.122.215		3.832.112.283		4.145.875.912		20.600.747.315	KEC. BALEENDAH
		Jumlah Total (1+2)				6.908.406.877		8.666.172.849		7.422.470.086		8.187.031.622		8.205.335.540		39.389.416.974	KEC. BALEENDAH
		5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. BANJARAN
		5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkrazi															KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	KEC. BANJARAN
		Jumlah 1				553.781.949		604.972.892		438.549.646		520.076.025		484.804.512		3.002.185.031	KEC. BANJARAN
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KK Lingkkup Kecamatan Tahun Berjalan	75 %	75 %	27.500.000	80 %	12.500.000	85 %	25.000.000	90 %	25.627.500	95 %	27.636.809	95 %	118.264.309	KEC. BANJARAN
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berjalan	75 %	75 %	18.700.000	80 %	13.000.000	85 %	15.000.000	90 %	15.376.500	95 %	16.582.085	95 %	78.658.585	KEC. BANJARAN
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KRM	Prosentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan	75 %	75 %	155.000.000	80 %	74.350.000	85 %	95.850.000	90 %	98.255.835	95 %	105.959.526	95 %	529.415.361	KEC. BANJARAN
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	75 %	75 %	46.000.000	80 %	20.000.000	85 %	25.000.000	90 %	25.627.500	95 %	27.636.809	95 %	144.264.309	KEC. BANJARAN
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	75 %	75 %	49.050.000	80 %	22.194.000	85 %	54.800.000	90 %	56.175.480	95 %	60.579.885	95 %	242.799.365	KEC. BANJARAN
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan program/kegiatan Kecamatan yang di realisasikan Dalam RPJMD	75 %	75 %	36.375.000	80 %	28.300.000	85 %	40.000.000	90 %	41.004.000	95 %	44.218.895	95 %	189.897.895	KEC. BANJARAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Ibu Hamil Yang Difasilitasi Untuk Persalinan Dini Tenaga Kesehatan	75 %	75 %	27.000.000	80 %	19.000.000	85 %	35.000.000	90 %	35.878.500	95 %	38.691.533	95 %	155.570.033	KEC. BANJARAN
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan karnitribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	75 %	75 %	41.750.000	80 %	65.888.439	85 %	47.251.000	90 %	48.437.000	95 %	52.234.674	95 %	255.561.113	KEC. BANJARAN
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)	75 %	75 %	52.025.000	80 %	79.975.125	85 %	52.000.000	90 %	53.305.200	95 %	57.484.563	95 %	294.789.888	KEC. BANJARAN
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	75 %	75 %	19.500.000	80 %	12.250.000	85 %	25.000.000	90 %	25.627.500	95 %	27.636.809	95 %	110.014.309	KEC. BANJARAN
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan (LSM dan PKK)	75 %	75 %	28.500.000	80 %	63.500.000	85 %	45.000.000	90 %	46.129.500	95 %	49.746.256	95 %	232.875.756	KEC. BANJARAN
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Frekwensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan	75 %	75 %	19.500.000	80 %	7.500.000	85 %	22.500.000	90 %	23.064.750	95 %	24.873.128	95 %	97.437.878	KEC. BANJARAN
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam	75 -	75 -	7.167.000	80 -	8.000.000	85 -	20.000.000	90 -	20.500.000	95 -	22.109.447	95 -	77.778.447	KEC. BANJARAN
6 0 1 1 67	5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah capaian masing-masing kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	75 %	75 %	26.500.000	80 %	15.000.000	85 %	28.000.000	90 %	28.702.800	95 %	30.923.226	95 %	129.156.026	KEC. BANJARAN
		Jumlah 3				154.567.000		441.457.564		530.401.200		543.714.065		586.343.645		2.856.483.275	KEC. BANJARAN
		Jumlah Total (1+2)				1.508.348.949		1.046.430.463		968.950.646		1.063.790.090		1.071.148.157		5.658.668.305	KEC. BANJARAN
		5.	Mevujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. BOJONGSOANG
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Bimkrasi														KEC. BOJONGSOANG
		7	KEMASYARAKATAN														KEC. BOJONGSOANG
		7.1	Kecamatan														KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	198.070.000	100 persen	264.017.703	100 persen	265.447.800	100 persen	313.228.404	100 persen	290.532.617	100%	1.331.296.524	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	359.500.000	100 Persen	517.436.100	100 Persen	198.500.000	100 Persen	225.085.000	100 Persen	175.917.617	100%	1.476.438.717	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	40.300.000	100 Persen	22.800.000	100 Persen	40.300.000	100 Persen	47.554.000	100 Persen	44.108.350	100%	195.062.350	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 5	5.1.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	100 Persen	100 Persen	30.000.000	90 Persen	14.750.000	100 Persen	17.500.000	100 Persen	20.650.000	100 Persen	19.153.750	100%	102.053.750	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	42.300.000	100 Persen	13.000.000	100 Persen	16.500.000	100 Persen	19.470.000	100 Persen	18.059.250	100%	109.329.250	KEC. BOJONGSOANG
		Jumlah 1				670.170.000		832.003.803		538.247.800		625.987.404		547.771.584		3.214.180.591	KEC. BOJONGSOANG
		1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														KEC. BOJONGSOANG
		1.2	Kesehatan														KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 2 32	5.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	90 Persen	12.937.700	90 Persen	17.584.585	90 Persen	17.936.277	90 Persen	19.246.328	90 Persen	117.704.890	KEC. BOJONGSOANG
		1.6	Sosial														KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 13 21	5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan potensi petugas sosial tentang PMKS	100 Persen	100 Persen	25.000.000	0 Persen	13.050.000	0 Persen	17.500.000	0 Persen	17.850.000	0	19.153.750		92.553.750	KEC. BOJONGSOANG
		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														KEC. BOJONGSOANG
		2.5	Lingkungan Hidup														KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 8 24	5.1.2.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	34.227.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	36.103.514	100 Persen	38.616.959	100 Persen	193.947.473	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi penduduk	Cakupan penataan KTP dan KK Lingkup Kecamatan Tahun sebelumnya	80 %	80 %	36.800.000	80 %	16.995.600	80 %	20.000.000	80 %	20.400.000	80 %	21.890.000	80 %	116.085.600	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja organisasi pemerintahan	Cakupan pelayanan sampai skala kecamatan	100 Persen	100 Persen	105.250.000	100 Persen	14.300.000	100 Persen	17.500.000	100 Persen	17.850.000	100 Persen	19.153.750	100 Persen	174.053.750	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 22 15	5.1.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan	90 Persen	90 Persen	57.664.000	90 Persen	57.974.000	90 Persen	57.664.000	90 Persen	58.817.280	90 Persen	63.113.248	90 Persen	295.232.528	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 18 16	5.1.2.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi dalam Pembangunan skala kecamatan	100 Persen	100 Persen	36.000.000	100 Persen	0	100 Persen	13.500.000	100 Persen	13.770.000	100 Persen	14.775.750	100 Persen	78.045.750	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase capaian Retribusi kecamatan pada tahun sebelumnya	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	1	0	100 Persen	30.000.000	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	10 Urusan	10 Urusan	167.337.000	10 Urusan	91.537.000	10 Urusan	144.000.000	10 Urusan	155.805.000	10 Urusan	203.094.539	10 Urusan	761.773.539	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 6 49	5.1.2.49	Program Pembiayaan Pedagog Kaki Lima dan asongan	Persentase Pedagog Kaki Lima dan Asongan yang dibina	0 Persen	0 Persen	0	80 Persen	10.000.000	85 Persen	15.000.000	90 Persen	17.850.000	100 Persen	20.521.875	100 Persen	63.371.875	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembiayaan dan Pemasaryakan Olahraga	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	90 Persen	90 Persen	24.000.000	90 Persen	25.461.600	90 Persen	25.000.000	90 Persen	26.010.000	100 Persen	28.457.000	100 Persen	128.928.600	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan perencanaan yang dilaksanakan lingkup kecamatan	80 %	80 %	36.000.000	82 %	37.000.000	85 %	31.250.000	87 %	31.875.000	90 %	34.203.125	90 %	170.328.125	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan karnitribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini / deteksi dini	80 %	80 %	66.760.000	80 %	44.750.000	80 %	69.375.000	80 %	70.762.500	80 %	75.930.938	80 %	327.578.438	KEC. BOJONGSOANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp					
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	44.720.000	100 Persen	97.443.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.900.000	1	49.252.500	1	282.315.500	KEC. BOJONGSOANG	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa - Jumlah Desa Swakarsa	- Jumlah Desa Swakarsa	80 %	80 %	38.660.000	80 %	19.765.000	80 %	34.000.000	80 %	34.680.000	80 %	37.213.000	80 %	164.318.000	KEC. BOJONGSOANG	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan	90 kelompok	90 kelompok	85.000.000	90 kelompok	33.131.500	90 kelompok	37.500.000	90 kelompok	38.250.000	90 kelompok	41.043.750	90 kelompok	234.925.250	KEC. BOJONGSOANG	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan Kejadian Bencana Alam	90 %	90 %	82.709.477	90 %	17.220.000	90 %	21.000.000	90 %	21.420.000	90 %	22.984.500	90 %	165.333.977	KEC. BOJONGSOANG	
6 0 1 18 73	5.1.2.73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase kegiatan penyuluhan pada tahun berkenaan	0 %	0 %	0	80 %	20.750.000	80 %	20.000.000	80 %	21.930.000	80 %	25.173.500	80 %	87.853.500	KEC. BOJONGSOANG	
6 0 1 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Non-Formal	0 %	0 %	0	0 %	0	80 %	20.000.000	82 %	20.400.000	85 %	21.890.000	85 %	62.290.000	KEC. BOJONGSOANG	
		Jumlah 2				935.900.477		546.542.400		640.873.585		667.609.571		755.714.512		3.546.640.544	KEC. BOJONGSOANG	
		Jumlah Total (1+2)				1.606.070.477		1.378.546.203		1.179.121.385		1.293.596.975		1.303.486.096		6.760.821.135	KEC. BOJONGSOANG	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. CANGKUIANG	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkres															KEC. CANGKUIANG	
	7	KEWILAYAHAN															KEC. CANGKUIANG	
	7.1	Kecamatan															KEC. CANGKUIANG	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Capaian Pelayanan	30 %	30 %	308.650.000	10 %	267.454.208	15 %	254.985.711	24 %	294.918.743	21 %	301.380.200	100%	1.427.388.862	KEC. CANGKUIANG	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	20 %	20 %	156.525.000	20 %	70.000.000	20 %	97.500.000	20 %	169.330.000	20 %	125.648.600	100%	619.003.600	KEC. CANGKUIANG	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	30 %	30 %	21.500.000	30 %	8.200.000	12 %	10.500.000	19 %	14.160.000	19 %	13.134.000	100%	67.494.000	KEC. CANGKUIANG	
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	17 %	17 %	44.500.000	17 %	30.000.000	22 %	55.000.000	22 %	14.750.000	22 %	13.681.250	100%	157.931.250	KEC. CANGKUIANG	
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	15 %	15 %	25.140.000	10 %	10.000.000	25 %	42.500.000	25 %	42.480.000	25 %	39.402.000	100%	159.522.000	KEC. CANGKUIANG	
		Jumlah 1				556.315.000		385.654.208		460.485.711		525.638.743		493.246.050		2.431.139.712	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 19 16	5.1.2.16	Program pemeliharaan kantribimas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kearsyafatan dini/deteksi dini	20 %	20 %	89.464.712	20 %	47.600.000	20 %	65.000.000	20 %	66.300.000	20 %	71.142.500	100%	339.507.212	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 19 17	5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	20 %	20 %	44.525.000	20 %	83.110.500	20 %	36.100.000	20 %	36.822.000	20 %	39.511.450	100%	240.068.950	KEC. CANGKUIANG	
	2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															KEC. CANGKUIANG	
	2.13	Kepedulikan (ap. Dak. dan Kemudahan															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 18 16	5.1.2.16	Program peningkatan peran serta kemudaraan	Persentase peningkatan peran serta kemudaraan	20 persen	20 persen	35.000.000	20 persen	24.400.000	20 persen	17.500.000	20 persen	18.870.000	0	21.605.430	0	117.375.430	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 18 20	5.1.2.20	Program Pembinaan dan Penasyaratan Olah Raga	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	4 klub	4 klub	68.150.000	4 klub	80.000.000	4 klub	80.000.000	4 klub	81.600.000	4 klub	87.560.000	4 klub	397.310.000	KEC. CANGKUIANG	
	2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 11 18	5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20 %	20 %	75.000.000	20 %	74.500.000	20 %	75.000.000	20 %	76.500.000	20 %	82.087.500	100%	383.087.500	KEC. CANGKUIANG	
	2.5	Industri, Perdagangan dan Jasa															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 8 15	5.1.2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Bersampahan	0 %	0 %	40.000.000	0 %	0	35 %	17.500.000	35 %	17.850.000	30 %	26.268.000	30 %	101.618.000	KEC. CANGKUIANG	
	2.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 10 15	5.1.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	500 buah	500 buah	35.000.000	750 buah	39.860.000	1000 buah	40.000.000	1.250 buah	40.800.000	1.500 buah	43.780.000	1.500 buah	199.440.000	KEC. CANGKUIANG	
	2.7	Pembinaan Masyarakat Desa															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 22 15	5.1.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	55 %	55 %	31.600.000	45 %	22.840.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	54.440.000	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 22 18	5.1.2.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa swakarsa-jumlah desa swasembada	3 desa	3 desa	0	0 desa	0	1 desa	17.500.000	1 desa	17.850.000	1 desa	19.153.750	1 desa	54.503.750	KEC. CANGKUIANG	
	4	URUSAN KEWILAYAHAN															KEC. CANGKUIANG	
	4.2	Pencapaian															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 6 21	5.1.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase jumlah usulan yang terakomodir	20 %	20 %	50.000.000	20 %	46.786.250	20 %	40.000.000	20 %	40.800.000	20 %	43.780.000	20 %	221.366.250	KEC. CANGKUIANG	
	4.3	Kepulauan															KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase jumlah data pendapatan daerah	50 %	50 %	45.000.000	50 %	21.745.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	50 %	66.745.000	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPI	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	20 %	20 %	169.875.000	20 %	150.241.253	20 %	40.000.000	20 %	51.000.000	20 %	54.725.000	20 %	465.841.253	KEC. CANGKUIANG	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	35	35	45.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	45.000.000	KEC. CANGKUIANG	
		Jumlah 2				728.614.712		591.083.003		428.600.000		448.392.000		489.613.630		2.686.303.345	KEC. CANGKUIANG	
		Jumlah Total (1+2)				1.284.929.712		976.737.211		889.085.711		984.030.743		982.859.680		5.117.643.057	KEC. CANGKUIANG	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. CICALENGA	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkres															KEC. CICALENGA	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	100 %	279.834.408	100 %	293.233.438	100 %	289.736.444	100 %	342.347.649	100 %	320.163.962	100%	1.525.315.901	KEC. CICALENGA	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	25 %	25 %	319.799.242	25 %	161.035.000	25 %	120.283.888	25 %	141.477.675	25 %	136.778.576	100%	879.374.381	KEC. CICALENGA	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	100 %	100 %	20.800.000	100 %	21.600.000	100 %	20.550.000	100 %	27.026.720	100 %	25.068.428	100%	115.045.148	KEC. CICALENGA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021									
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebudayaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp								
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentasi peningkatan kapasitas aparatur	100 %	100 %	32.742.000	100 %	28.134.000	100 %	28.134.000	100 %	33.198.120	100 %	30.792.663	100%	153.000.783	KEC. CICALENGA
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	13.340.000	100 %	12.600.000	100 %	12.600.000	100 %	14.868.000	100 %	13.790.700	100%	67.198.700	KEC. CICALENGA
						Jumlah 1			666.519.650		516.602.438		471.304.332		558.918.164		516.594.329		2.739.934.913	KEC. CICALENGA	
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 %	75 %	30.067.000	76 %	26.467.000	77 %	30.067.000	78 %	30.821.682	79 %	33.238.237	79 %	150.660.918	KEC. CICALENGA
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	presentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	100 persen	100 persen	71.892.000	100 persen	108.867.000	100 persen	71.892.000	100 persen	73.696.489	100 persen	79.474.619	100 persen	405.822.108	KEC. CICALENGA
6	0	1	22	19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Presentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	0 Kegiatan-	0 Kegiatan-	0	0 Kegiatan-	0	0 Kegiatan-	0	0 Kegiatan-	0	0 Kegiatan-	0	0	0	KEC. CICALENGA
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPNH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPNH	100 persen	100 persen	183.393.750	100 persen	101.872.500	100 persen	59.086.915	100 persen	64.773.817	100 persen	69.852.369	100 persen	478.799.351	KEC. CICALENGA
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	100 persen	100 persen	38.612.000	100 persen	11.941.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.376.500	100 persen	16.582.085	100 persen	97.511.585	KEC. CICALENGA
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Diabirana	Jumlah cabang olahraga prestasi Diabirana	100 persen	100 persen	27.500.000	100 persen	0	100 persen	20.000.000	100 persen	20.400.000	100 persen	16.417.500	100 persen	84.317.500	KEC. CICALENGA
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	1 %	1 %	39.920.000	1 %	34.040.000	1 %	40.000.000	1 %	41.004.000	100 persen	44.218.895	100 persen	199.182.895	KEC. CICALENGA
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas (%)	100 persen	100 persen	37.626.000	100 persen	45.505.000	100 persen	46.000.000	100 persen	47.175.000	100 persen	50.895.618	100 persen	227.201.618	KEC. CICALENGA
6	0	1	8	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	100 %	100 %	4.800.000	100 %	4.800.000	100 %	4.800.000	100 %	4.896.000	100 %	5.253.600	100 persen	24.549.600	KEC. CICALENGA
6	0	1	19	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantritasmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas	100 %	100 %	42.112.000	100 %	31.659.000	100 %	37.407.000	100 %	43.166.961	100 %	46.551.440	100 persen	200.896.401	KEC. CICALENGA
6	0	1	19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase program pengembangan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	76.830.000	100 %	93.035.000	100 %	40.000.000	100 %	41.004.000	100 %	44.218.895	100 persen	295.087.895	KEC. CICALENGA
6	0	1	11	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)	100 %	100 %	48.380.000	100 %	86.875.000	100 %	32.703.000	100 %	28.686.480	100 %	30.918.115	100 persen	227.562.595	KEC. CICALENGA
6	0	1	18	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta masyarakat	Jumlah organisasi kemasyarakatan	100 %	100 %	46.425.600	100 %	13.250.000	100 %	20.000.000	100 %	20.502.000	100 %	22.109.447	100 persen	122.287.047	KEC. CICALENGA
6	0	1	19	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam	100 %	100 %	29.420.000	100 %	7.000.000	100 %	15.000.000	100 %	11.296.500	100 %	12.204.085	100 persen	74.920.585	KEC. CICALENGA
6	0	1	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini	100 %	100 %	36.726.000	100 %	10.851.000	100 %	15.000.000	100 %	15.376.500	100 %	16.582.085	100 persen	94.535.585	KEC. CICALENGA
						Jumlah 2			713.704.350		576.163.500		446.955.915		458.115.920		458.516.930		2.683.515.684	KEC. CICALENGA	
						Jumlah Total (1+2)			1.380.220.000		1.092.765.938		918.260.247		1.017.024.093		1.015.111.319		5.923.450.597	KEC. CICALENGA	
					5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. CIKANCUNG	
					5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														KEC. CIKANCUNG	
					7	Kecamatan														KEC. CIKANCUNG	
					7.1	Kecamatan														KEC. CIKANCUNG	
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	248.132.000	100 %	173.002.569	100 %	182.205.519	100 %	215.002.512	100 %	199.423.941	100%	1.017.766.541	KEC. CIKANCUNG
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase capaian masing-masing kegiatan dibagi jumlah kegiatan dibagi 100%	100 persen	100 persen	1.370.000.000	100 persen	236.250.000	100 persen	115.000.000	100 persen	135.700.000	100 persen	125.867.500	100%	1.982.817.500	KEC. CIKANCUNG
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 persen	100 persen	26.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	39.134.700	100 persen	36.480.588	100%	167.615.288	KEC. CIKANCUNG
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 0	0 0	50.000.000	0 0	30.000.000	0 0	30.000.000	0 0	35.577.000	0 0	33.164.171	100%	178.741.171	KEC. CIKANCUNG
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen	100 persen	19.000.000	100 persen	12.000.000	100 persen	12.000.000	100 persen	14.230.800	100 persen	13.265.668	100%	70.496.468	KEC. CIKANCUNG
						Jumlah 1			1.713.132.000		484.252.569		372.205.519		439.645.012		408.201.868		3.417.436.968	KEC. CIKANCUNG	
						URUSAN WAJIB BUKAN PERAWATAN JAKSA														KEC. CIKANCUNG	
6	0	1	10	15	5.1.1.15	Program Penataan Administrasi Pemerintahan	Presentase Penataan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	20.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	51.255.000	100 persen	55.273.618	100 persen	226.528.618	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Presentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100 persen	100 persen	100.000.000	100 persen	25.000.000	100 persen	15.363.650	100 persen	20.400.000	100 persen	21.890.000	100 persen	182.653.650	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	10	7	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	20.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.376.500	100	16.582.085	100 persen	81.958.585	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPNH	Presentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KPNH	100 persen	100 persen	161.792.196	100 persen	99.175.000	100 persen	75.000.000	100 persen	77.010.000	100 persen	83.184.736	100 persen	496.161.932	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	39.000.000	43790980 rupiah	29.000.000	45.020.352 rupiah	29.778.900	47.271.370 rupiah	32.168.422	47.271.370 rupiah	149.947.322	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Diabirana	Jumlah Olah Raga prestasi Yang Diabirana Oleh Kecamatan	100 persen	100 persen	100.000.000	100 persen	47.875.000	100 persen	40.000.000	100 persen	41.055.000	100 persen	44.328.618	100 persen	273.258.618	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Usulan Kecamatan Yang Diakomodir Oleh Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	40.000.000	100 persen	27.879.151	100 persen	28.481.026	100 persen	29.195.900	100 persen	31.484.987	100 persen	157.041.063	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persalinan yang ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	100 100	100 100	20.000.000	100 100	20.000.000	100 100	20.000.000	100 100	20.502.000	100 100	22.109.447	100 100	102.611.447	KEC. CIKANCUNG
6	0	1	8	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Peran Masyarakat Yang Mengikuti Pengelolaan RTH	100 persen	100 persen	0	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.376.500	100%	16.582.085	100 persen	61.958.585	KEC. CIKANCUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantarintribas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kevaspadan dini/deteksi dini	100 persen	100 persen	100	100.000.000	100 persen	51.425.000	100 persen	45.000.000	100 persen	46.180.500	100 persen	49.855.980	100 persen	292.461.480	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	100 persen	100 persen	100	80.000.000	100 persen	90.000.000	100 persen	33.145.460	100 persen	30.804.000	100 persen	33.273.895	100 persen	267.223.355	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	100 100	100 100	100	25.000.000	100 100	40.000.000	100 100	30.000.000	100 100	30.600.000	100 100	32.835.000	100 persen	158.435.000	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 persen	100 persen	100	50.000.000	100 persen	71.500.000	100 persen	15.363.650	100 persen	18.717.418	100 persen	18.122.553	100 persen	173.703.621	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	Persentase Peningkatan Peran Serta Perempuan	100 persen	100 persen	100	20.000.000	0	0	100 persen	76.490.890	100 persen	80.361.329	100 persen	90.542.401	100 persen	267.394.620	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 persen	100 persen	100	100.000.000	100 persen	0	100 persen	54.636.350	100 persen	51.000.000	100 persen	54.725.000	100 persen	260.361.350	KEC. CIKANCUNG
		Jumlah 2					856.792.196		591.854.151		542.481.026		557.613.047		602.958.827		3.151.699.248	KEC. CIKANCUNG
		Jumlah Total (1+2)					2.569.924.196		1.076.106.720		914.686.545		997.258.060		1.011.160.695		6.569.136.216	KEC. CIKANCUNG
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. CILENGKRANG
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																KEC. CILENGKRANG
	7	KEWILAYAHAN																KEC. CILENGKRANG
	7.1	Kecamatan																KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pemenuhan kebutuhan perkantoran	100 %	100 %	100 %	279.564.472	100 %	308.144.546	100 %	236.010.000	100 %	279.671.800	100 %	258.860.195	100%	1.362.251.013	KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 1	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	325.392.666	100 %	151.800.000	100 %	219.000.000	100 %	259.417.100	100 %	241.549.829	100%	1.197.159.595	KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	-Tersedianya Peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	22.000.000	100 %	25.740.000	100 %	26.730.000	100 %	31.541.400	100 %	29.255.985	100%	135.267.385	KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 1	1 1	1 1	2.000.000	1 1	2.000.000	1 1	10.451.444	1 1	12.890.026	1 1	14.122.792	100%	41.464.262	KEC. CILENGKRANG
		Jumlah 1					628.957.138		487.684.546		492.191.444		583.520.326		543.788.801		2.736.142.250	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program pembinaan administrasi kependudukan	Persentase program pinalatan administrasi kependudukan	100 %	100 %	100 %	32.800.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000	100 %	29.215.350	100 %	31.505.962	100 %	150.521.312	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pelayanan persampahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	100 100	100 100	100 100	30.150.000	100 100	24.550.000	100 100	25.000.000	100 100	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	132.964.309	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100 %	100 %	100 %	136.598.712	100 %	76.675.000	100 %	78.010.000	100 %	80.114.574	100 %	86.553.134	100 %	457.951.420	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 %	100 %	100 %	19.500.000	100 %	17.500.000	100 %	17.500.000	100 %	17.939.250	100 %	19.345.766	100 %	91.785.016	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100 %	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.502.000	100 %	22.109.447	100 %	102.611.447	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya kegiatan musebang tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	35.600.000	1 kegiatan	34.800.000	1 kegiatan	35.600.000	1 kegiatan	36.493.560	1 kegiatan	39.354.816	1 kegiatan	181.848.376	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100 %	100 %	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.652.600	100 %	28.742.281	100 %	133.394.881	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengendalian ruang terbuka hijau (RTH)	-Persentase Program Pengendalian RTH	100 %	100 %	100 %	19.500.000	100 %	22.375.000	100 %	22.375.000	100 %	22.936.613	100 %	24.734.944	100 %	111.921.556	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantarintribas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pemeliharaan kantarintribas dan pencegahan tindak kriminal	100 -	100 -	100 -	67.160.000	100 -	34.360.000	100 -	34.360.000	100 -	35.222.436	100 -	37.984.030	100 %	209.086.466	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terkasukannya peningkatan toleransi antar umat beragama	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	34.360.000	2 kegiatan	78.303.750	2 kegiatan	34.360.000	2 kegiatan	35.222.436	2 kegiatan	37.984.030	2 kegiatan	220.230.216	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	100 %	100 %	100 %	19.750.000	100 %	19.389.994	100 %	19.389.994	100 %	19.876.682	100 %	21.435.102	100 %	99.841.772	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	0 -	0 -	0 -	34.000.000	0 -	42.925.000	0 -	22.375.000	0 -	22.936.613	0 -	24.734.944	100 %	146.971.556	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	-	0 -	0 -	0 -	19.500.000	0 -	19.375.000	0 -	19.750.000	0 -	20.245.725	0 -	21.833.078	100 %	100.703.803	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	tersedianya sarana dan prasarana	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	49.000.000	1 kegiatan	16.848.809	1 kegiatan	16.848.809	1 kegiatan	17.271.714	1 kegiatan	18.625.892	1 kegiatan	118.595.224	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase bimbingan teknis PAUD dan lembaga	0 %	0 %	0 %	25.575.000	25 %	26.000.000	25 %	26.000.000	25 %	28.742.821	25 %	30.969.881	25 %	106.969.881	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Persentase pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	100 %	100 %	100 %	26.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	26.000.000	KEC. CILENGKRANG
		Jumlah 2					569.918.712		487.177.553		426.068.803		436.909.652		471.322.518		2.391.397.238	KEC. CILENGKRANG
		Jumlah Total (1+2)					1.198.875.950		974.862.099		918.260.247		1.020.429.978		1.015.111.319		5.127.539.493	KEC. CILENGKRANG
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. CILEUYI
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																KEC. CILEUYI
	7	KEWILAYAHAN																KEC. CILEUYI
	7.1	Kecamatan																KEC. CILEUYI
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran dan pembangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	272.350.000	100 %	237.101.139	100 %	228.999.270	100 %	278.775.000	100 %	257.296.090	100%	1.274.521.499	KEC. CILEUYI
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50 %	50 %	60 %	282.136.714	60 %	158.067.215	70 %	117.100.000	80 %	155.034.613	100 %	125.867.500	100%	838.206.042	KEC. CILEUYI
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan Cileunyi	80 %	80 %	85 %	32.550.000	85 %	33.842.710	90 %	10.000.000	95 %	33.630.000	100 %	31.193.250	100%	141.215.960	KEC. CILEUYI
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah pelaksanaan study banding yang dilaksanakan	0	0	1 -	0	1 -	60.000.000	1 -	0	1 -	70.800.000	0	100%	130.800.000	KEC. CILEUYI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	21.924.400	100 %	11.972.256	100 %	11.100.000	100 %	15.340.000	100 %	13.681.250	100%	74.017.906	KEC. CILEUNYI					
		Jumlah 1			608.961.114		440.981.320		427.199.270		553.579.613		428.038.090		2.458.761.407	KEC. CILEUNYI					
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	85 %	85 %	54.999.950	90 %	30.000.000	95 %	25.500.000	99 %	28.457.000	99 %	163.956.950	KEC. CILEUNYI			
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan pemerintahan	0 %	0 %	0	0 %	0	90 %	0	0	100 %	0	100 %	0	KEC. CILEUNYI		
6	0	1	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	80 %	80 %	9.999.950	85 %	10.000.000	90 %	10.000.000	95 %	10.200.000	100 %	11.492.250	100 %	51.692.200	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	85 %	85 %	170.814.925	85 %	137.675.881	90 %	155.675.881	95 %	164.464.045	100 %	182.743.692	100 %	811.374.424	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0 %	0 %	0	0 %	0	80 %	0	0	100 %	0	0	0	KEC. CILEUNYI		
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	85 %	85 %	30.000.000	90 %	25.000.000	95 %	25.000.000	99 %	25.500.000	100 %	28.457.000	100 %	133.957.000	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	90 %	90 %	65.788.900	95 %	67.400.000	95 %	60.000.000	99 %	58.140.000	100 %	65.505.825	100 %	316.834.725	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	0 %	0 %	0	0 %	0	80 %	0	0	100 %	0	0	0	0	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	8	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0 %	0 %	0	0 %	0	80 %	0	0	100 %	0	0	0	0	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	19	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantirantibias dan pencegahan tindak kriminal	80 %	80 %	83.524.875	90 %	47.486.000	90 %	45.000.000	95 %	45.900.000	100 %	49.252.500	100 %	271.163.375	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	85 %	85 %	97.999.850	89 %	90.000.000	90 %	30.000.000	95 %	30.600.000	100 %	34.476.750	100 %	283.076.600	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	22	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	85 %	85 %	59.999.875	90 %	39.870.000	95 %	32.000.000	98 %	32.640.000	100 %	32.835.000	100 %	197.344.875	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	11	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	89 %	89 %	46.964.900	90 %	56.000.000	95 %	35.000.000	98 %	40.800.000	100 %	39.402.000	100 %	218.166.900	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	18	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	85 %	85 %	25.051.550	90 %	20.000.000	95 %	25.000.000	96 %	20.400.000	100 %	22.984.500	100 %	113.436.050	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	90 %	90 %	49.999.850	92 %	35.000.000	93 %	30.000.000	94 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 %	178.434.850	KEC. CILEUNYI	
6	0	1	19	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0 %	0 %	20.000.000	0 %	40.000.000	90 %	0	0	90 %	0	90 %	0	100 %	60.000.000	KEC. CILEUNYI
6	0	1	1	66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	0 %	0 %	0	0 %	0	75 %	0	0	85 %	0	90 %	0	0	0	KEC. CILEUNYI
6	0	1	3	69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0 %	0 %	0	0 %	0	85 %	0	0	90 %	0	100 %	0	0	0	KEC. CILEUNYI
		Jumlah 2				715.144.625		508.431.881		472.675.881		484.744.045		538.441.517		2.799.437.945	KEC. CILEUNYI				
		Jumlah Total (1+2)				1.324.105.739		1.033.415.201		899.875.151		1.038.323.558		956.479.607		5.458.199.355	KEC. CILEUNYI				
		5.			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih												KEC. CIMAUNG				
		5.1.1.1			Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi												KEC. CIMAUNG				
		7.			KEMHI BAYAN												KEC. CIMAUNG				
		7.1			Kecamatan												KEC. CIMAUNG				
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 lembar	100 lembar	225.820.000	100 lembar	134.420.074	100 lembar	250.035.168	100 lembar	263.973.859	100 lembar	249.091.339	100%	1.123.340.440	KEC. CIMAUNG	
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 -	100 -	243.035.498	100 -	204.687.500	100 -	278.745.689	100 -	104.076.000	100 -	74.973.250	100%	905.517.937	KEC. CIMAUNG	
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 -	100 -	20.000.000	100 -	21.000.000	100 -	21.000.000	100 -	17.700.000	100 -	24.079.000	100%	103.779.000	KEC. CIMAUNG	
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 -	1 -	12.000.000	1 -	14.740.345	1 -	70.000.000	1 -	82.600.000	1 -	76.615.000	100%	255.955.345	KEC. CIMAUNG	
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 -	1 -	21.000.000	1 -	22.250.000	1 -	22.600.000	1 -	26.668.000	1 -	24.735.700	100%	117.253.700	KEC. CIMAUNG	
		Jumlah 1				521.855.498		397.097.919		642.380.857		495.017.859		449.494.289		2.505.846.422	KEC. CIMAUNG				
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	1 -	1 -	55.000.000	1 -	33.731.686	1 -	38.000.000	1 -	42.007.950	1 -	42.007.950	100 %	207.693.436	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	19	16	5.1.2.16	Program pemeliharaan kantirantibias dan pencegahan tindak kriminal	100 PERSEN	100 PERSEN	59.395.000	100 PERSEN	55.000.000	100 PERSEN	55.000.000	100 PERSEN	56.380.500	1	60.800.980	100 %	286.576.480	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 -	100 -	16.000.000	100 -	12.000.000	100 -	12.000.000	100 -	12.301.200	100 -	13.265.668	100 -	65.566.868	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 kegiatan	1 kegiatan	218.655.000	4 kegiatan	155.000.000	4 kegiatan	155.500.000	4 kegiatan	158.972.102	4 kegiatan	183.387.716	4 kegiatan	871.514.818	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 kegiatan	1 kegiatan	55.500.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.878.500	1 kegiatan	38.691.533	1 kegiatan	200.070.033	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1 kegiatan	1 kegiatan	40.500.000	1 kegiatan	39.306.345	1 kegiatan	39.306.345	1 kegiatan	40.292.934	1 kegiatan	43.452.078	1 kegiatan	202.857.701	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	60.500.000	1 kegiatan	32.000.000	1 kegiatan	32.000.000	1 kegiatan	32.803.200	1 kegiatan	35.375.116	1 kegiatan	192.678.316	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 kegiatan	1 kegiatan	86.625.000	1 kegiatan	30.185.144	1 kegiatan	30.185.144	1 kegiatan	30.942.790	1 kegiatan	33.368.842	1 kegiatan	211.306.921	KEC. CIMAUNG	
6	0	1	19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan	51.000.000	1 kegiatan	91.000.000	1 kegiatan	41.000.000	1 kegiatan	42.029.100	1 kegiatan	45.324.367	1 kegiatan	270.353.467	KEC. CIMAUNG	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatorif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1 kegiatan	1 kegiatan	55.500.000	1 kegiatan	39.000.000	1 kegiatan	39.000.000	1 kegiatan	39.978.900	1 kegiatan	43.113.422	1 kegiatan	216.592.322	KEC. CIMAUNG
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan	54.000.000	1 kegiatan	70.000.000	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	35.878.500	1 kegiatan	38.691.533	1 kegiatan	233.570.033	KEC. CIMAUNG
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	1 kegiatan	1 kegiatan	21.525.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.627.500	1 kegiatan	27.636.809	1 kegiatan	124.789.309	KEC. CIMAUNG
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	31.713.868	1 kegiatan	36.000.000	1 kegiatan	36.903.600	1 kegiatan	39.797.005	1 kegiatan	144.414.293	KEC. CIMAUNG
Jumlah 2					774.200.000		648.936.863		572.991.489		586.942.626		648.913.019		3.227.983.997	KEC. CIMAUNG
Jumlah Total (1+2)					1.296.055.498		1.046.034.782		1.125.372.346		1.081.960.485		1.094.407.308		5.733.830.419	KEC. CIMAUNG
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																
5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																
7 KEWILAYAHAN																
7.1 Kecamatan																
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	413.535.190		379.341.246	100 %	343.075.314	100 %	416.969.016	100 %	406.098.848	100%	1.959.019.615	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98 %	98 %	603.126.977		660.956.533	98 %	721.541.190	98 %	790.221.648	98 %	751.677.747	100%	3.527.524.096	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	0 -	0 -	16.500.000	0 -	17.504.850	0 -	18.029.996	0 -	21.913.656	0 -	21.342.137	100%	95.290.639	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 -	0 -	15.000.000	0 -	0	0 -	18.576.359	0 -	22.577.707	0 -	21.988.868	100%	78.142.934	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0 -	0 -	42.000.000	0 -	14.400.000	0 -	19.005.820	0 -	25.530.473	0 -	24.391.013	100%	125.327.306	KEC. CIMEUNYAN
Jumlah 1					1.090.162.167		1.072.202.629		1.120.228.679		1.277.212.501		1.225.498.615		5.785.304.590	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	76 -	76 -	30.000.000	77 -	25.460.800	78 -	12.730.800	79 -	13.374.978	80 -	14.782.433	80 -	96.349.011	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KKNH	100	100	1.208.119.897	100	1.497.161.045	100	1.010.266.626	100	1.074.161.783	100	1.117.222.511	100%	5.906.931.861	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	100	30.000.000	100	15.000.000	100	31.827.000	100	33.437.446	100	36.956.081	100%	147.220.528	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	51.000.000	100	54.725.000	100%	255.725.000	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)	100	100	124.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000.000	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/bumih dan pencegahan resiko kriminal	100	100	60.000.000	100	63.654.000	100	31.827.000	100	33.437.446	100	36.956.081	100%	225.874.528	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	100	100	15.000.000	100	79.705.200	100	29.705.200	100	31.208.283	100	34.492.343	100%	190.111.026	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian	100	100	30.000.000	100	13.791.000	100	13.791.000	100	14.489.560	100	16.014.303	100%	88.086.563	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	100	30.000.000	100	31.827.000	100	31.827.000	100	33.437.446	100	36.956.081	100%	164.047.528	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100	100	50.000.000	100	83.327.000	100	31.827.000	100	33.437.446	100	36.956.081	100%	235.547.528	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	0	100	10.609.000	100	10.609.000	100	11.145.815	100	12.176.409	100%	44.540.224	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 2 68	5.1.2.68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100	100	30.000.000	100	42.436.000	100	42.436.000	100	44.583.262	100	49.274.775	100%	208.730.037	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 3 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	0	KEC. CIMEUNYAN
Jumlah 2					1.657.119.897		1.912.971.045		1.796.847.326		1.773.713.466		1.456.512.099		7.687.163.836	KEC. CIMEUNYAN
Jumlah Total (1+2)					2.747.282.064		2.985.173.674		2.417.076.005		2.650.925.967		2.672.010.214		13.472.468.424	KEC. CIMEUNYAN
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																
5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																
7 KEWILAYAHAN																
7.1 Kecamatan																
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	90 %	236.620.021	90 %	211.789.646	90 %	283.532.498	90 %	340.230.119	90 %	342.745.640	100%	1.414.917.924	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90 %	90 %	448.260.591	90 %	116.513.362	90 %	188.510.000	90 %	222.441.800	90 %	184.434.195	100%	1.160.159.948	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	90 %	90 %	18.150.000	90 %	18.150.000	90 %	18.150.000	90 %	21.417.000	90 %	19.865.175	100%	95.732.175	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 %	90 %	45.000.000	90 %	45.000.000	90 %	45.000.000	90 %	53.100.000	90 %	49.252.500	100%	237.352.500	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90 %	90 %	17.000.000	90 %	17.000.000	90 %	8.500.000	90 %	10.030.000	90 %	9.303.250	100%	61.833.250	KEC. CIPARAY
Jumlah 1					765.030.612		408.453.008		543.692.498		647.218.919		695.600.780		2.969.995.797	KEC. CIPARAY
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	66 %	66 %	36.300.000	66 %	36.300.000	67 %	30.000.000	67 %	30.600.000	67 %	32.835.000	67 %	166.035.000	KEC. CIPARAY
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	12 %	12 %	25.000.000	12 %	25.000.000	13 %	25.000.000	13 %	25.500.000	13 %	27.362.500	13 %	127.862.500	KEC. CIPARAY

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6 0 1 15 16	5.1.2.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaku UMKM (Unit)	0 unit	0 unit	0	42 unit	12.300.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	12.300.000	KEC. CIPARAY		
6 0 1 19 17	5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang keukunan dalam kehidupan masyarakat	50 %	50 %	67.700.000	50 %	108.287.500	50 %	48.950.000	50 %	49.929.000	50 %	53.575.775	50 %	328.442.275	KEC. CIPARAY	
6 0 1 22 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pendololan kewirausahaan desa	Persentase kesesuaian dalam pendololan kewirausahaan desa	0 %	0 %	0	0 %	0	14 %	0	14 %	0	14 %	0	0	0	KEC. CIPARAY	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KPH	Jumlah evaluasi berkala	14 desa	14 desa	156.293.934	14 desa	124.209.115	14 desa	124.000.000	14 desa	126.480.000	14 desa	135.718.000	14 desa	666.701.049	KEC. CIPARAY	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah pengtiman atlet pelajar dan pelatih dan popwilda jajar	10 orang	10 orang	30.000.000	10 orang	29.475.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	59.475.000	KEC. CIPARAY		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase program kegiatan vanu terakomodir	90 %	90 %	45.000.000	90 %	45.000.000	90 %	30.000.000	90 %	30.600.000	90 %	32.835.000	90 %	183.435.000	KEC. CIPARAY	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	74 %	74 %	50.000.000	74 %	50.000.000	75 %	30.000.000	75 %	30.600.000	75 %	32.835.000	75 %	193.435.000	KEC. CIPARAY	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kemitrimbas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas	20 %	20 %	42.980.000	20 %	42.980.000	21 %	40.000.000	21 %	40.800.000	21 %	43.780.000	21 %	210.540.000	KEC. CIPARAY	
6 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda bagi pemuda pelajar usia 16-30 th, PKWM dan FIKR daerah	280 orang	280 orang	24.650.000	280 orang	24.650.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	49.300.000	KEC. CIPARAY		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur	60 %	60 %	25.000.000	60 %	25.000.000	61 %	25.000.000	61 %	25.500.000	61 %	27.362.500	61 %	127.862.500	KEC. CIPARAY	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)	420 orang	420 orang	50.000.000	420 orang	97.087.500	420 orang	50.000.000	420 orang	51.000.000	420 orang	54.725.000	420 orang	302.812.500	KEC. CIPARAY	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana alam	0 %	0 %	0	0 %	0	90 %	0	90 %	0	90 %	0	0	0	KEC. CIPARAY	
6 0 1 4 63	5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase korban bencana yang tertangani	20 %	20 %	12.300.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	12.300.000	KEC. CIPARAY		
6 0 1 11 70	5.1.2.70	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	0 %	0 %	0	0 %	0	20 %	12.980.000	20 %	13.239.600	20 %	14.206.610	20 %	40.426.210	KEC. CIPARAY	
6 0 1 15 72	5.1.2.72	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah vanu Knodusif	Persentase UKM yang maju dan knodusif	0 %	0 %	0	0 %	0	20 %	0	25 %	0	30 %	0	0	0	KEC. CIPARAY	
6 0 1 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase anak putus sekolah	0 %	0 %	0	0 %	0	10 %	0	8 %	0	6 %	0	0	0	KEC. CIPARAY	
		Jumlah 7				565.223.934		620.289.115		415.930.000		424.748.600		455.235.385		2.480.927.034	KEC. CIPARAY	
		Jumlah Total (1+2)				1.330.254.546		1.028.742.123		959.622.498		1.071.467.519		1.060.836.145		5.450.922.831	KEC. CIPARAY	
		5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. CIWIDEY	
		5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkasi KEWILAYAHAN															KEC. CIWIDEY	
		7.1. Kecamatan															KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100 persen	100 persen	296.974.244	100 persen	344.321.490	100 persen	308.355.740	100 persen	343.841.833	100 persen	321.986.529	100%	1.615.479.836	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80 %	80 %	156.500.000	80 %	84.700.000	80 %	82.200.000	80 %	99.265.730	80 %	93.633.509	100%	516.299.239	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	80 %	80 %	30.000.000	80 %	30.000.000	80 %	30.000.000	80 %	35.577.000	80 %	33.164.171	100%	158.741.171	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	22.400.000	100 %	15.750.000	100 %	15.750.000	100 %	18.677.925	100 %	17.411.189	100%	89.989.114	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	0 -	0 -	18.000.000	0 -	24.988.115	0 -	25.800.000	0 -	30.444.000	0 -	28.238.100	100%	127.470.215	KEC. CIWIDEY	
		Jumlah 1				523.874.244		499.759.605		462.105.740		527.806.488		494.433.497		2.507.979.574	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	20.500.000	1 kegiatan	15.500.000	1 kegiatan	16.320.000	1 kegiatan	18.059.250	1 kegiatan	95.379.250	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendololan persampahan	Jumlah kegiatan program pendololan persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.375.000	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.500.000	1 Kegiatan	2.562.750	1 Kegiatan	2.763.680	1 Kegiatan	15.701.430	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kegiatan peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	1 Kegiatan	6.150.600	1 Kegiatan	6.632.834	1 Kegiatan	39.783.434	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KPH	Persentase kegiatan penataan administrasi kependudukan	9 Bulan	9 Bulan	112.153.000	12 Bulan	62.150.000	12 Bulan	42.143.000	12 Bulan	50.251.676	12 Bulan	49.412.912	60 bulan	316.110.588	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan peranan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	80 %	80 %	44.890.000	80 %	30.245.000	80 %	25.000.000	80 %	26.520.000	80 %	29.004.250	80 %	155.659.250	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	56.000.000	2 Kegiatan	40.000.000	2 Kegiatan	40.000.000	2 Kegiatan	41.004.000	2 Kegiatan	44.218.895	2 Kegiatan	221.222.895	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	38.000.000	1 Kegiatan	38.000.000	1 Kegiatan	38.953.800	1 Kegiatan	42.007.950	1 Kegiatan	206.961.750	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.900.000	1 Kegiatan	9.679.885	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	36.720.000	1 Kegiatan	40.496.500	1 Kegiatan	179.796.385	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau	3 %	3 %	116.800.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	116.800.000	KEC. CIWIDEY		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	94.000.000	94.000.000	2 Kegiatan	94.000.000	2 Kegiatan	94.000.000	2 Kegiatan	96.359.400	2 Kegiatan	103.914.402	2 Kegiatan	482.273.802	KEC. CIWIDEY
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	0	0	86.850.000	0	0	116.400.000	0	122.400.000	0	122.400.000	0	132.434.500	0	581.333.500	KEC. CIWIDEY
6 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kirkontribusi baru pemuda	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	38.800.000	28.800.000	1 Kegiatan	28.800.000	1 Kegiatan	28.800.000	1 Kegiatan	29.522.880	1 Kegiatan	31.837.604	1 Kegiatan	157.760.484	KEC. CIWIDEY
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43.900.000	33.900.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	34.750.890	1 Kegiatan	37.475.513	1 Kegiatan	180.026.403	KEC. CIWIDEY
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.000.000	75.458.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	72.930.000	1 Kegiatan	78.804.000	1 Kegiatan	360.192.000	KEC. CIWIDEY
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.251.000	1 Kegiatan	11.054.724	1 Kegiatan	91.305.724	KEC. CIWIDEY
Jumlah 7						859.668.000	574.481.885		553.243.000		584.696.996		628.117.013		3.200.306.894		KEC. CIWIDEY	
Jumlah Total (1+2)						1.383.542.244	1.074.241.490		1.015.486.240		1.112.503.484		1.172.550.510		5.798.386.468		KEC. CIWIDEY	
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. DAYEUKHKOLOT
5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																		KEC. DAYEUKHKOLOT
7.1 KEWILAYAHAN																		KEC. DAYEUKHKOLOT
7.1 Kecamatan																		KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 %	100 %	817.624.878	719.284.797	60 %	862.430.808	80 %	900.255.605	80 %	900.255.605	100 %	900.255.605	100 %	4.199.851.693	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2	5.2.2.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	0	0	516.986.250	2.518.856.500	0	393.685.847	0	1.142.703.098	0	966.621.418	0	966.621.418	100 %	5.538.853.113	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 3	5.2.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	100 %	100 %	25.000.000	52.514.550	100 %	97.000.000	0	65.740.969	0	64.026.411	100 %	304.281.931	100 %	304.281.931	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	0	0	0	0	0	100.000.000	0	118.000.000	0	118.000.000	100 %	80.000.000	100 %	298.000.000	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6	5.2.2.6	Program peningkatan pelaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	100 %	100 %	215.550.000	375.928.415	0	495.375.359	0	618.927.252	0	618.927.252	100 %	574.081.252	100 %	2.279.862.277	KEC. DAYEUKHKOLOT
Jumlah 1						1.575.161.128	3.666.584.262		1.948.492.014		2.845.626.924		2.584.984.686		12.620.849.014		KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	-	100 kegiatan	100 kegiatan	35.000.000	76.357.800	100 %	50.000.000	100 %	51.000.000	100 %	51.000.000	100 %	54.725.000	100 %	267.082.800	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan pemerintahan	-	100 %	100 %	150.000.000	31.886.840	0	60.000.000	0	63.141.045	0	71.140.457	100 %	375.168.341	100 %	375.168.341	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	100 kali	100 kali	15.000.000	5.304.500	0	5.463.635	0	5.740.095	0	6.467.314	100 %	37.975.544	100 %	37.975.544	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan APBD	-	100 kegiatan	100 kegiatan	805.130.887	1.177.224.258	100	828.845.250	0	845.422.155	0	845.422.155	100 %	4.502.044.705	100 %	4.502.044.705	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	100 orang/kegiatan	100 orang/kegiatan	55.000.000	65.600.000	100 %	487.700.000	0	497.454.000	0	250.000.000	100 %	1.355.754.000	100 %	1.355.754.000	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan	-	100 kegiatan	100 kegiatan	60.000.000	33.948.800	0	54.967.264	0	36.736.608	0	41.390.812	100 %	227.043.483	100 %	227.043.483	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	-	100 kegiatan	100 kegiatan	40.000.000	43.682.800	100 %	50.000.000	0	51.000.000	0	51.000.000	100 %	235.682.800	100 %	235.682.800	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	-	100 orang	100 orang	60.000.000	23.045.000	0	54.636.350	0	57.400.950	0	64.673.143	100 %	259.755.442	100 %	259.755.442	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-	0	0	0	243.045.000	100 %	600.000.000	0	612.000.000	0	612.000.000	100 %	1.955.045.000	100 %	1.955.045.000	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	100 orang	100 orang	80.000.000	92.271.900	100 %	263.560.000	0	268.831.200	0	214.831.200	100 %	919.494.300	100 %	919.494.300	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	100 kali	100 kali	43.500.000	81.357.450	100 %	33.328.174	0	33.994.737	0	33.994.737	100 %	226.175.099	100 %	226.175.099	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	-	100 orang/kegiatan	100 orang/kegiatan	55.000.000	30.337.400	100 %	145.894.534	0	148.812.425	0	148.812.425	100 %	528.856.748	100 %	528.856.748	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	100 kegiatan	100 kegiatan	125.000.000	169.889.000	0	300.000.000	0	303.960.000	0	326.161.000	100 %	1.225.010.000	100 %	1.225.010.000	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan	-	100 kegiatan	100 kegiatan	35.000.000	11.419.900	0	23.000.000	0	23.460.000	0	20.000.000	100 %	112.879.900	100 %	112.879.900	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	100 kegiatan	100 kegiatan	190.040.000	24.650.000	0	256.790.845	0	261.926.662	0	280.000.000	100 %	1.013.407.507	100 %	1.013.407.507	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 1 68	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	-	0	0	0	0	0	54.636.350	0	57.400.950	0	64.673.143	100 %	176.710.442	100 %	176.710.442	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 3 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	0	0	0	0	0	218.545.400	0	228.693.797	0	258.692.572	100 %	706.841.770	100 %	706.841.770	KEC. DAYEUKHKOLOT
Jumlah 7						1.748.670.887	2.110.020.648		3.487.367.802		3.241.984.622		3.211.984.657		14.125.927.012		KEC. DAYEUKHKOLOT	
Jumlah Total (1+2)						3.323.832.015	5.776.604.910		5.435.859.816		6.393.511.548		5.816.968.642		26.746.776.931		KEC. DAYEUKHKOLOT	
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. IBUN
5.1.1.1 Program Peningkatan Profesionalisme Binkrasi																		KEC. IBUN
7.1 KEWILAYAHAN																		KEC. IBUN
7.1 Kecamatan																		KEC. IBUN
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 %	100 %	186.750.250	189.281.968	100	695.178.000	100	826.211.090	100	771.846.635	100 %	2.669.267.943	100 %	2.669.267.943	KEC. IBUN
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	0	0	286.125.000	680.978.000	0	80.000.000	0	94.400.000	0	87.560.000	100 %	1.229.063.000	100 %	1.229.063.000	KEC. IBUN
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	0	0	28.000.000	29.500.000	0	75.000.000	0	88.500.000	0	82.087.500	100 %	303.087.500	100 %	303.087.500	KEC. IBUN
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	0	0	18.000.000	19.000.000	0	75.000.000	0	88.500.000	0	82.087.500	100 %	282.587.500	100 %	282.587.500	KEC. IBUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp				
			0 -	0 -	29.000.000	0	33.600.000	0 -	75.000.000	0 -	88.500.000	0 -	82.087.500	100%	308.187.500	KEC. IBUN	
		Jumlah 1			547.875.250	0	952.359.968		3.000.178.000		1.186.111.090		1.105.669.135		4.792.193.443	KEC. IBUN	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi pemerintahan	0 -	0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KEC. IBUN	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	0 %	0 %	100.000.000	0 %	56.340.000	0 %	45.000.000	0 %	51.000.000	0 %	50.347.000	100 %	302.687.000	KEC. IBUN	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	7.500.378	0	8.000.000	0	25.500.000	0	26.010.000	0	27.909.750	100 %	94.920.128	KEC. IBUN	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KMD	0	0	142.000.000	0	68.001.120	0	75.000.000	0	76.500.000	0	82.087.500	100 %	443.588.620	KEC. IBUN	
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0 -	0 -	75.000.000	0	35.000.000	0 -	32.000.000	0 -	32.640.000	0 -	35.024.000	100 %	209.664.000	KEC. IBUN	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Penguatan Ombudsman	0	0	100.000.000	0	14.000.000	0	42.000.000	0	42.840.000	0	45.969.000	100 %	244.809.000	KEC. IBUN	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	0	0	59.000.000	0	70.800.000	0	35.781.000	0	45.900.000	0	44.352.786	100 %	255.833.786	KEC. IBUN	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	0	0	50.000.000	0	25.000.000	0	55.000.000	0	44.517.905	0	60.197.500	100 %	234.715.405	KEC. IBUN	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0 -	0 -	130.444.000	0 -	45.000.000	0 -	0	0 -	0	0	0	100 %	175.444.000	KEC. IBUN	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/mas dan pencegahan tindak kriminal	0 -	0 -	100.000.000	0 -	90.000.000	0 -	22.000.000	0 -	22.440.000	0 -	24.079.000	100 %	258.519.000	KEC. IBUN	
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0	0	75.000.000	0	70.000.000	0	38.900.000	0	34.578.000	0	41.481.550	100 %	259.959.550	KEC. IBUN	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0	0	250.000.000	0	90.000.000	0	42.000.000	0	42.840.000	0	45.969.000	100 %	470.809.000	KEC. IBUN	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	0 -	0 -	75.000.000	0 -	44.283.550	0 -	32.000.000	0 -	32.640.000	0 -	35.024.000	100 %	218.947.550	KEC. IBUN	
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	51.000.000	0	50.347.000	100 %	146.347.000	KEC. IBUN	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0 -	0 -	0	0 -	10.000.000	0 -	32.000.000	0 -	32.640.000	0 -	35.024.000	100 %	109.664.000	KEC. IBUN	
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	0 -	0 -	50.000.000	0 -	30.000.000	0 -	50.620.120	0 -	51.632.522	0 -	55.403.721	100 %	237.656.364	KEC. IBUN	
		Jumlah 2			1.213.944.378		656.474.670		572.801.120		587.128.428		633.215.807		3.663.564.403	KEC. IBUN	
		Jumlah Total (1+2)			1.761.819.628		1.608.784.638		3.572.979.120		3.773.289.518		3.738.884.942		8.455.757.846	KEC. IBUN	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. KATAPANG	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Pemfasiliasasi Rinkansi														KEC. KATAPANG	
	7	KEMASYARAKATAN														KEC. KATAPANG	
	7.1	Kerjasama														KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1	5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Kelembagaan	20 %	20 %	308.592.004	40 %	341.593.674	60 %	518.010.355	80 %	900.255.605	100 %	741.278.920	100%	2.809.730.558	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20 %	20 %	375.000.000	40 %	1.532.500.000	60 %	1.365.834.650	80 %	944.126.162	100 %	996.585.913	100%	5.214.046.725	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	20 %	20 %	44.500.000	40 %	45.853.400	60 %	45.000.000	80 %	53.100.000	100 %	79.898.500	100%	268.351.900	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20 %	20 %	15.000.000	40 %	10.764.125	60 %	20.927.270	80 %	29.765.604	100 %	23.879.628	100%	100.336.627	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20 %	20 %	40.000.000	40 %	37.131.500	60 %	45.131.500	80 %	65.363.513	100 %	66.606.699	100%	253.693.213	KEC. KATAPANG	
		Jumlah 1			783.092.004		1.967.842.699		1.994.903.775		1.992.610.835		1.907.709.660		8.646.159.023	KEC. KATAPANG	
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														KEC. KATAPANG	
	1.1	Pendidikan														KEC. KATAPANG	
6 0 1 1 18	5.1.2.18	Program Pendidikan Non Formal	20 %	20 %	26.500.000	40 %	26.000.000	60 %	26.000.000	80 %	26.800.949	100 %	30.743.643	100 %	136.044.591	KEC. KATAPANG	
	1.2	Kesehatan														KEC. KATAPANG	
6 0 1 2 29	5.1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	20 %	20 %	25.000.000	0 %	0	0 %	0	80 %	25.500.000	100 %	28.457.000	100 %	78.957.000	KEC. KATAPANG	
6 0 1 2 32	5.1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	40 Kegiatan	28.000.000	60 Kegiatan	29.000.000	80 Kegiatan	26.734.864	100 Kegiatan	30.395.560	100 %	114.130.424	KEC. KATAPANG	
	1.6	Sosial														KEC. KATAPANG	
6 0 1 13 21	5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	20 %	20 %	16.675.000	0 %	0	0 %	0	80 %	25.500.000	100 %	24.079.000	100 %	66.254.000	KEC. KATAPANG	
	2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														KEC. KATAPANG	
	2.1	Tenaga Kerja														KEC. KATAPANG	
6 0 1 14 15	5.1.2.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	28.060.380	100 %	29.152.757	100 %	57.213.137	KEC. KATAPANG	
	2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														KEC. KATAPANG	
6 0 1 15 15	5.1.2.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang produktif	20 %	20 %	24.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	25.500.000	100 %	31.740.500	100 %	81.240.500	KEC. KATAPANG	
6 0 1 15 16	5.1.2.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0 %	0 %	0	40 %	15.913.500	60 %	16.390.905	80 %	27.420.285	100 %	30.386.344	100 %	90.111.034	KEC. KATAPANG	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
6	0	1	18	17	5.1.2.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kerajinan hirtun pemuda Kesatuan dan Olah Raga	Prosentase pemuda yang memiliki usaha di wilayah kecamatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	28.060.380	100 %	31.341.757	100 %	59.402.137	KEC. KATAPANG
6	0	1	18	18	5.1.2.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Prosentase Pemuda yang mengikuti Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba	20 %	20 %	29.000.000	0 %	0	0 %	0	80 %	30.843.933	100 %	36.014.728	100 %	95.898.661	KEC. KATAPANG
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	20 %	20 %	68.500.000	40 %	63.654.000	60 %	65.563.620	80 %	68.881.140	100 %	77.607.772	100 %	344.206.531	KEC. KATAPANG
6	0	1	17	17	5.1.2.17	Program pengelolaan keragaman budaya	Prosentase Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	20 %	20 %	50.000.000	40 %	37.131.500	60 %	38.245.445	80 %	41.200.664	100 %	46.365.699	100 %	212.943.308	KEC. KATAPANG
6	0	1	11	18	5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi)	20 %	20 %	25.000.000	40 %	61.631.500	60 %	38.245.445	80 %	40.180.664	100 %	45.271.199	100 %	210.328.808	KEC. KATAPANG
6	0	1	9	16	5.1.2.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Peserta yang Mengikuti Penyuluhan tentang Pertanahan	20 %	20 %	22.290.000	40 %	13.900.000	60 %	13.659.088	80 %	31.372.265	100 %	33.680.286	100 %	114.901.639	KEC. KATAPANG
6	0	1	8	15	5.1.2.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengembangan pencolokan persampahan	20 %	20 %	28.000.000	40 %	82.436.000	60 %	43.709.060	80 %	43.680.759	100 %	51.738.514	100 %	249.764.354	KEC. KATAPANG
6	0	1	8	16	5.1.2.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian dan pemantauan dan persusakan lingkungan hidup	20 %	20 %	65.000.000	0 %	0	0 %	0	80 %	34.680.000	100 %	27.362.500	100 %	127.042.500	KEC. KATAPANG
6	0	1	8	24	5.1.2.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase RTH Kecamatan sesuai Perdesentral	20 %	20 %	30.000.000	40 %	24.853.334	60 %	24.298.178	80 %	118.072.265	100 %	18.108.480	100 %	215.332.257	KEC. KATAPANG
6	0	1	10	15	5.1.1.15	Program Administrasi Kependudukan	Prosentase masyarakat yang memiliki KTP dan KK	72 %	72 %	25.000.000	74 %	22.278.900	76 %	22.947.267	78 %	24.108.399	80 %	27.162.720	100 %	121.497.286	KEC. KATAPANG
6	0	1	22	18	5.1.2.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	20 %	20 %	28.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	30.600.000	0 %	32.835.000	100 %	91.435.000	KEC. KATAPANG
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program Pengembangan Masyarakat	Prosentase Pemuda yang Kreatif, berprestasi dan mandiri	20 %	20 %	22.500.000	40 %	25.000.000	60 %	27.000.000	80 %	26.400.285	100 %	30.346.942	100 %	131.247.227	KEC. KATAPANG
6	0	1	6	21	5.1.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Usulan program/kegiatan yang ditetapkan dalam aplikasi	20 %	20 %	36.825.000	40 %	29.705.200	60 %	30.596.356	80 %	40.820.759	100 %	47.161.960	100 %	185.109.275	KEC. KATAPANG
6	0	1	19	15	5.1.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase masyarakat yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20 %	20 %	24.500.000	0 %	0	0 %	25.000.000	80 %	25.500.000	100 %	27.362.500	100 %	102.362.500	KEC. KATAPANG
6	0	1	19	16	5.1.2.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Diri/Deteksi Diri	20 %	20 %	76.500.000	40 %	71.080.300	60 %	72.212.709	80 %	73.857.272	100 %	86.662.011	100 %	380.312.292	KEC. KATAPANG
6	0	1	19	17	5.1.2.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)	20 %	20 %	38.000.000	40 %	68.035.300	60 %	18.576.359	80 %	60.316.323	100 %	21.988.868	100 %	206.916.850	KEC. KATAPANG
6	0	1	19	22	5.1.2.22	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan kejadian bencana alam	20 %	20 %	25.000.000	40 %	33.255.000	60 %	35.000.000	80 %	36.261.899	100 %	38.502.786	100 %	168.019.685	KEC. KATAPANG
6	0	1	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kawasan desa	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berjalan	20 %	20 %	23.000.000	0 %	0	0 %	25.000.000	80 %	0	0 %	32.835.000	100 %	80.835.000	KEC. KATAPANG
6	0	1	22	19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan desa	Prosentase aparatur desa yang berprestasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	30.360.569	100 %	33.331.385	100 %	63.691.955	KEC. KATAPANG
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Prosentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Sesuai Kewenangan	20 %	20 %	145.000.000	40 %	140.176.500	60 %	183.851.582	80 %	105.387.408	100 %	159.815.852	100 %	734.231.341	KEC. KATAPANG
6	0	1	4	63	5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	-	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	KEC. KATAPANG
6	0	1	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	KEC. KATAPANG
						Jumlah			854.790.000		743.051.030		715.286.034		1.076.301.460		1.110.450.264		4.510.389.829	KEC. KATAPANG	
						Jumlah Total (1+2)			1.637.382.004		2.710.893.733		2.730.199.803		3.068.932.345		3.018.160.424		13.165.548.515	KEC. KATAPANG	
						5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih														KEC. KERTASARI
						5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														KEC. KERTASARI
						7.	KEMALYAHAN														KEC. KERTASARI
						7.1	Kecamatan														KEC. KERTASARI
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100 Persen	100 Persen	299.341.965	100 Persen	210.567.209	100 Persen	237.936.800	100 Persen	336.874.424	100 Persen	297.963.179	100%	1.382.683.577	KEC. KERTASARI
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tercapainya program Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	259.395.000	100 Persen	171.636.000	100 Persen	156.071.780	100 Persen	139.038.598	100 Persen	133.417.799	100%	859.559.176	KEC. KERTASARI
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya program peningkatan disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	30.500.000	100 Persen	30.800.000	100 Persen	21.500.000	100 Persen	12.390.000	100 Persen	23.531.750	100%	118.721.750	KEC. KERTASARI
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 persen	1 persen	27.500.000	1 persen	35.000.000	1 persen	42.500.000	1 persen	54.870.000	1 persen	51.441.500	100%	211.311.500	KEC. KERTASARI
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	3.500.000	100 Persen	3.500.000	100 Persen	3.500.000	100 Persen	4.130.000	100 Persen	3.830.750	100%	18.460.750	KEC. KERTASARI
						Jumlah 1			620.236.965		451.501.209		461.508.580		547.903.022		510.184.977		2.580.736.753	KEC. KERTASARI	
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	prosentase kegiatan penataan administrasi kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	22.000.000	1 kegiatan	22.000.000	1 kegiatan	20.400.000	1 kegiatan	21.890.000	100%	126.290.000	KEC. KERTASARI
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase pengembangan kinerja pengelola persampahan	70 Persen	70 Persen	30.000.000	90 Persen	20.000.000	90 Persen	20.000.000	95 Persen	24.480.000	1	27.362.500	100%	121.842.500	KEC. KERTASARI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp				
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 Persen	100 Persen	12.000.000	100 Persen	11.669.900	100 Persen	11.669.900	100 Persen	12.240.000	1	13.134.000	100%	60.713.800	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	100 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.000.000	100 persen	15.300.000	1	16.417.500	100%	91.717.500	KEC. KERTASARI	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100 Persen	100 Persen	112.500.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	103.174.750	100 Persen	92.032.130	1	106.193.389	100%	478.900.268	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100 persen	100 persen	25.000.000	100 persen	23.000.000	100 persen	13.000.000	100 persen	15.300.000	1	18.606.500	100%	94.906.500	KEC. KERTASARI	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	41.000.000	100 Persen	41.000.000	100 Persen	40.800.000	1	43.780.000	100%	216.580.000	KEC. KERTASARI	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	30 Persen	30 Persen	42.000.000	30 Persen	10.396.201	30 Persen	0	30 Persen	0	0	0	100%	52.396.201	KEC. KERTASARI	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50 Persen	50 Persen	0	50 Persen	60.000.000	50 Persen	10.000.000	50 Persen	12.240.000	1	18.606.500	100%	100.846.500	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kerentanan dan pencegahan tindak kriminal	80 Persen	80 Persen	62.000.000	100 Persen	80.000.000	80 Persen	80.000.000	80 Persen	78.540.000	1	63.481.000	100%	364.021.000	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	37.000.000	100 Persen	60.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	32.640.000	1	38.307.500	100%	197.947.500	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan keragaman hidup pemuda	20 Persen	20 Persen	30.000.000	20 Persen	21.000.000	20 Persen	10.000.000	20 Persen	20.400.000	0	21.890.000	100%	103.290.000	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 Persen	100 Persen	24.000.000	100 Persen	19.188.450	100 Persen	34.188.615	100 Persen	34.680.000	1	36.665.750	100%	148.722.815	KEC. KERTASARI	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 Persen	100 Persen	37.000.000	100 Persen	65.001.750	100 Persen	23.339.800	100 Persen	26.010.000	1	32.835.000	100%	184.186.550	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	100 Persen	100 Persen	13.000.000	100 Persen	11.669.900	100 Persen	11.669.900	100 Persen	10.761.612	1	10.945.000	100%	58.046.412	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	30 Persen	10.000.000	30 Persen	10.200.000	0	10.945.000	100%	31.145.000	KEC. KERTASARI	
6 0 1 4 63	5.1.2.63	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	30 Persen	12.000.000	30 Persen	12.240.000	0	13.134.000	100%	37.374.000	KEC. KERTASARI	
6 0 1 2 74	5.1.2.74	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	4 Kegiatan	0	4 Kegiatan	0	4 Kegiatan	0	0	0	0	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 75	5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	100%	25.000.000	KEC. KERTASARI		
6 0 1 18 78	5.1.2.78	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, Kota	0 Persen	0 Persen	0	100 Persen	19.174.750	0 Persen	0	0 Persen	0	0	100%	19.174.750	KEC. KERTASARI		
6 0 1 2 74	5.1.2.74	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100%	30.000.000	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 14 82	5.1.2.82	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	21.000.000	KEC. KERTASARI		
		Jumlah 7			599.500.000		565.100.951		447.042.965		458.263.742		494.193.639		2.564.101.296	KEC. KERTASARI	
		Jumlah Total (1+2)			1.219.736.965		1.016.604.160		908.551.545		1.005.566.763		1.004.378.616		5.154.838.049	KEC. KERTASARI	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. KUTAWARINGIN	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binasasi KEWILAYAHAN														KEC. KUTAWARINGIN	
	7															KEC. KUTAWARINGIN	
	7.1	Kecamatan														KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	272.396.859	100 Persen	190.107.888	100 Persen	182.800.000	100 Persen	207.431.020	100 Persen	193.488.933	100%	1.046.224.700	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 -	100 -	188.000.000	100 -	357.355.353	100 -	212.343.530	100 -	251.818.191	100 -	209.360.598	100%	1.218.877.673	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	27.000.000	100 Persen	27.000.000	100 Persen	32.019.300	100 Persen	29.947.754	100%	145.867.054	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	18.500.000	100 Persen	14.500.000	100 Persen	20.500.000	100 Persen	24.310.950	100 Persen	22.662.183	100%	100.473.133	KEC. KUTAWARINGIN	
		Jumlah 4			508.896.859		588.963.241		442.643.530		515.579.461		455.559.468		2.511.442.560	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	0 0	0 0	30.000.000	0 0	15.000.000	0 0	0	0 0	0	0	0	0	45.000.000	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	77 -	77 -	45.000.000	77 -	40.000.000	77 -	44.636.350	77 -	47.200.950	77 -	53.728.129	77 -	230.565.429	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	70 orang	70 orang	10.000.000	70 orang	8.000.000	70 orang	10.927.270	70 orang	11.480.190	70 orang	12.934.626	70 orang	53.342.086	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	12 Urusan	12 Urusan	116.000.000	12 Urusan	57.000.000	12 Urusan	54.078.325	12 Urusan	57.400.950	12 Urusan	64.673.143	12 Urusan	349.152.417	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	130 orang	130 orang	40.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	21.854.540	100 orang	22.960.380	100 orang	25.869.257	100 orang	125.684.177	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	40.000.000	1 cabang olahraga	27.781.810	1 cabang olahraga	27.781.810	1 cabang olahraga	29.340.569	1 cabang olahraga	33.331.385	1 cabang olahraga	157.953.765	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	72 -	72 -	40.000.000	75 -	35.000.000	75 -	32.781.810	75 -	34.440.569	75 -	38.803.885	75 -	181.026.265	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	66 orang	66 orang	30.000.000	100 orang	24.000.000	77 orang	24.636.350	77 orang	26.800.950	77 orang	31.838.143	77 orang	137.275.442	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	30 METER	30 METER	30.000.000	30 METER	18.260.000	30 METER	21.854.540	30 METER	22.960.380	30 METER	25.869.257	30 METER	118.944.177	KEC. KUTAWARINGIN	

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6 0 1 22 55	5.1.2.55	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	33 Orang	33 Orang	20.000.000	33 Orang	14.300.000	33 Orang	16.390.905	44 Orang	17.220.285	44 Orang	19.401.942	44 Orang	87.313.132	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kuantitas dan pencegahan tidak kriminal	77 orang	77 orang	68.000.000	220 orang	38.250.000	220 orang	33.709.080	220 orang	35.720.759	220 orang	40.793.514	220 orang	216.473.354	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	12 kali	12 kali	30.000.000	12 kali	70.000.000	12 kali	26.225.448	12 kali	27.552.455	12 kali	31.043.109	12 kali	184.821.012	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	286 Orang	286 Orang	85.000.000	44 Orang	41.000.000	44 Orang	21.854.540	44 Orang	22.960.380	44 Orang	25.869.257	44 Orang	196.684.177	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	12 orang	12 orang	25.000.000	2 orang	73.500.000	2 orang	38.245.445	2 orang	40.180.664	2 orang	45.271.199	2 orang	222.197.308	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	77 orang	77 orang	30.000.000	66 orang	15.000.000	66 orang	17.318.175	66 orang	18.500.474	66 orang	21.391.571	66 orang	102.210.221	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	11 unit	11 unit	40.000.000	3 unit	37.000.000	3 unit	38.245.445	3 unit	40.180.664	3 unit	45.271.199	3 unit	200.697.308	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 15 64	5.1.2.64	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	0 orang	0 orang	0	5 orang	14.750.000	5 orang	17.483.632	5 orang	18.368.304	5 orang	20.695.406	5 orang	71.297.342	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 1 65	5.1.1.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0 orang	0 orang	0	55 orang	19.250.000	44 orang	34.636.350	44 orang	27.903.811	44 orang	29.004.250	44 orang	110.794.411	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	90 orang	90 orang	35.000.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	35.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 2 68	5.1.2.68	Program Pengembangan Produk Usaha Kecil Menengah	0 Orang	0 Orang	0	77 Orang	19.250.000	77 Orang	21.854.540	77 Orang	23.062.380	77 Orang	24.845.150	77 Orang	89.012.070	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 15 72	5.1.2.72	Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	55 ORANG	55 ORANG	30.000.000	0 ORANG	0	0 ORANG	0	0 ORANG	0	0 ORANG	0	0 ORANG	30.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 22 75	5.1.2.75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Berbasis	110 orang	110 orang	40.000.000	55 orang	13.000.000	55 orang	16.390.905	55 orang	17.220.285	55 orang	18.497.050	55 orang	105.108.240	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 13 76	5.1.2.76	Program Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0 Orang	0 Orang	0	50 Orang	13.000.000	50 Orang	11.854.540	50 Orang	12.760.380	50 Orang	13.790.700	50 Orang	51.405.620	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 21 80	5.1.2.80	Program Ketahanan Pangan	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 3 83	5.1.2.83	Program Pembangunan saluran drainase/peririgirigasi	0	0	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 17 87	5.1.2.87	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
6 0 1 13 92	5.1.2.92	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	KEC. KUTAWARINGIN		
		Jumlah 2			922.000.000		608.060.000		832.760.000		554.215.776		682.823.174		2.239.957.950	KEC. KUTAWARINGIN		
		Jumlah Total (1+2)			1.340.896.859		1.197.023.241		1.665.520.530		1.069.795.247		1.078.781.642		5.751.400.510	KEC. KUTAWARINGIN		
		5.														KEC. MAJALAYA		
		5.1.1.1														KEC. MAJALAYA		
		7.														KEC. MAJALAYA		
		7.1														KEC. MAJALAYA		
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	280.134.426	0	153.950.358	0	159.339.874	0	188.961.156	0	176.145.827	100%	958.531.641	KEC. MAJALAYA		
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6 Kegiatan	6 Kegiatan	201.000.000	6 Kegiatan	340.548.899	7 Kegiatan	340.548.899	7 Kegiatan	403.856.939	7 Kegiatan	376.467.395	100%	1.662.422.132	KEC. MAJALAYA		
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	24.500.000	2 Kegiatan	24.931.150	2 Kegiatan	24.931.150	2 Kegiatan	29.565.850	2 Kegiatan	27.560.696	100%	131.488.846	KEC. MAJALAYA		
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.750.000	2 Kegiatan	15.913.500	2 Kegiatan	15.913.500	2 Kegiatan	18.871.819	2 Kegiatan	17.591.934	100%	84.040.753	KEC. MAJALAYA		
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	9.360.000	4 Kegiatan	8.381.110	4 Kegiatan	8.381.110	4 Kegiatan	9.939.158	4 Kegiatan	9.265.085	100%	45.326.462	KEC. MAJALAYA		
		Jumlah 1			530.744.426		543.725.017		549.114.533		651.194.922		607.030.937		2.881.809.834	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kewilayahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	10.200.000	1 Kegiatan	10.200.000	1 Kegiatan	11.502.467	1 Kegiatan	11.502.467	1 Kegiatan	31.702.467	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.368.979	1 Kegiatan	82.684.898	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	54.725.000	1 Kegiatan	328.778.877	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	295.260.606	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	61.710.000	1 Kegiatan	67.311.750	1 Kegiatan	484.282.356	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	14.345.898	1 Kegiatan	14.750.252	1 Kegiatan	16.417.500	1 Kegiatan	45.513.650	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.400.000	1 Kegiatan	21.890.000	1 Kegiatan	62.290.000	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	47.352.200	1 Kegiatan	42.000.000	1 Kegiatan	42.840.000	1 Kegiatan	45.969.000	1 Kegiatan	238.161.200	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.600.000	1 Kegiatan	32.835.000	1 Kegiatan	93.435.000	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	126.440.000	1 Kegiatan	265.225.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	155.040.000	1 Kegiatan	166.364.000	1 Kegiatan	863.069.000	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	54.725.000	1 Kegiatan	205.725.000	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	57.740.500	1 Kegiatan	47.500.000	1 Kegiatan	48.654.000	1 Kegiatan	52.536.000	1 Kegiatan	271.430.500	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	96.240.500	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	55.272.250	1 Kegiatan	302.512.750	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	22.981.000	1 Kegiatan	23.460.000	1 Kegiatan	25.173.500	1 Kegiatan	71.614.500	KEC. MAJALAYA		
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2 Kegiatan	2 Kegiatan	189.000.000	2 Kegiatan	0	2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	20.400.000	2 Kegiatan	21.890.000	2 Kegiatan	251.290.000	KEC. MAJALAYA		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6 0 0 1 2 74	5.1.2.74	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	KEC. MAJALAYA	
6 0 0 1 3 83	5.1.2.83	Program Pembangunan saluran drainase/perumahan	0 -	0 -	0 -	51.000.000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	51.000.000	KEC. MAJALAYA	
6 0 0 1 3 89	5.1.2.89	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0 -	0 -	100.000.000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	100.000.000	KEC. MAJALAYA	
		Jumlah 2			576.069.585		650.243.028		566.826.898		581.054.252		626.611.467		3.400.805.300	KEC. MAJALAYA		
		Jumlah Total (1+2)			1.506.814.011		1.193.968.115		1.115.941.431		1.232.249.173		1.233.642.404		6.282.615.134	KEC. MAJALAYA		
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. MARGAASIH	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi															KEC. MARGAASIH	
	7	KEWILAYAHAN															KEC. MARGAASIH	
	7.1	Kecamatan															KEC. MARGAASIH	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	234.967.184	100 %	262.623.174	100 %	253.990.168	100 %	301.206.939	100 %	280.779.111	100%	1.333.566.576	KEC. MARGAASIH		
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	300.800.000	100 %	311.400.000	100 %	132.400.000	100 %	157.013.160	100 %	146.354.541	100%	1.047.977.701	KEC. MARGAASIH		
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	17.000.000	100 %	24.000.000	100 %	38.000.000	100 %	45.064.200	100 %	42.007.950	100%	166.072.150	KEC. MARGAASIH		
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	15.000.000	100 %	7.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.400.000	100 %	32.835.000	100%	120.235.000	KEC. MARGAASIH		
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	23.300.000	100 %	20.000.000	100 %	23.718.000	100 %	22.437.250	100%	109.455.250	KEC. MARGAASIH		
		Jumlah 1			587.767.184		628.323.174		474.390.168		567.407.299		524.473.851		2.777.306.676	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 10 7	5.1.2.7	Program penataan administrasi pemerintahan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 -	0 -	0 -	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	36.200.588	1 Kegiatan	32.130.000	1 Kegiatan	98.330.588	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	60.000.000	3 Kegiatan	27.800.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.753.000	3 Kegiatan	33.164.171	3 Kegiatan	181.717.171	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7 kegiatan	7 kegiatan	414.490.000	8 kegiatan	160.067.891	4 kegiatan	50.126.000	4 kegiatan	76.132.832	4 kegiatan	34.241.137	4 kegiatan	735.057.860	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 -	0 -	0 -	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	21.930.000	1 Kegiatan	25.173.500	1 Kegiatan	67.103.500	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 -	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.753.000	1 Kegiatan	33.164.171	1 Kegiatan	123.917.171	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	40.000.000	2 Kegiatan	41.106.000	2 Kegiatan	44.437.247	2 Kegiatan	245.543.247	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	30.906.000	1 Paket	66.328.342	1 Paket	277.234.342	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 -	1 Kegiatan	0 -	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	41.820.000	1 Kegiatan	45.969.000	1 Kegiatan	127.789.000	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 -	0 -	0 -	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	52.500.000	1 Kegiatan	56.100.000	1 Kegiatan	229.742.500	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 18 58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	27.650.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.600.000	1 Kegiatan	32.835.000	1 Kegiatan	181.085.000	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	61.060.433	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	61.506.000	2 Kegiatan	66.328.342	2 Kegiatan	308.894.775	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	3 Kegiatan	3 Kegiatan	48.000.000	3 Kegiatan	20.000.000	3 Kegiatan	38.000.897	3 Kegiatan	39.004.800	3 Kegiatan	42.117.673	3 Kegiatan	187.123.370	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 18 77	5.1.2.77	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	0 Kegiatan	30.000.000	0 Kegiatan	30.855.000	0 Kegiatan	33.383.618	0 Kegiatan	174.238.618	KEC. MARGAASIH		
6 0 0 1 2 90	5.1.2.90	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	0 -	0 -	60.000.000	0 -	30.826.000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	90.826.000	KEC. MARGAASIH		
		Jumlah 2			872.490.000		857.404.324		510.626.897		523.596.632		564.485.289		3.028.603.141	KEC. MARGAASIH		
		Jumlah Total (1+2)			1.460.257.194		1.185.727.498		985.017.065		1.085.998.931		1.088.909.140		5.305.909.818	KEC. MARGAASIH		
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. MARGAHAYU	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi															KEC. MARGAHAYU	
	7	KEWILAYAHAN															KEC. MARGAHAYU	
	7.1	Kecamatan															KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 persen	96 persen	459.176.310	97 persen	729.967.413,00	98 persen	611.834.370	99 persen	724.501.557	100 persen	674.687.418	100%	3.200.167.068	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96 persen	96 persen	296.350.000	97 persen	560.642.000,00	98 persen	460.000.000	99 persen	542.800.000	100 persen	503.470.000	100%	2.363.262.000	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	96 persen	96 persen	42.000.000	97 persen	41.700.000,00	98 persen	58.000.000	99 persen	70.800.000	100 persen	64.028.250	100%	276.528.250	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 -	0 -	20.000.000	0 -	22.705.000,00	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	42.705.000	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen	100 persen	33.250.000	100 persen	30.084.000,00	100 persen	31.000.000	100 persen	36.580.000	100 persen	33.929.500	100%	164.843.500	KEC. MARGAHAYU		
		Jumlah 1			850.776.310		1.385.098.413,00		1.160.834.370		1.374.681.557		1.276.115.168		6.047.505.818	KEC. MARGAHAYU		
6 0 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2 kali	2 kali	15.000.000	2 kali	22.705.000,00	2 kali	25.000.000	2 kali	25.500.000	2 kali	27.362.500	2 kali	115.567.500	KEC. MARGAHAYU		
6 0 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000	4 Kegiatan	22.705.000,00	6 Kegiatan	40.000.000	8 Kegiatan	40.800.000	10 Kegiatan	43.780.000	10 Kegiatan	197.285.000	KEC. MARGAHAYU		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp			
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	96 Persen	96 Persen	20.000.000	0,00	98 Persen	10.000.000	99 Persen	10.200.000	1	10.945.000	51.145.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	96 persen	96 persen	537.340.000		97 persen	281.496.849,00	98 persen	290.920.781	1	318.412.788	1.724.909.609	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2 kegiatan	2 kegiatan	30.000.000		6 kegiatan	22.705.000,00	8 kegiatan	15.300.000	10 kegiatan	16.417.500	99.422.500	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000		4 kegiatan	45.535.000,00	6 kegiatan	40.000.000	8 kegiatan	40.800.000	43.780.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.800.000		2 Kegiatan	38.205.000,00	3 Kegiatan	50.000.000	4 Kegiatan	51.000.000	54.725.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2 kegiatan	2 kegiatan	52.860.000		4 kegiatan	22.830.000,00	6 kegiatan	50.000.000	8 kegiatan	51.000.000	54.725.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 paket	1 paket	45.000.000		2 paket	25.100.152,00	3 paket	40.000.000	0 paket	40.800.000	43.780.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2 kegiatan	2 kegiatan	171.875.000		4 kegiatan	45.410.000,00	6 kegiatan	35.000.000	8 kegiatan	35.700.000	38.307.500	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	65.000.000		4 kegiatan	101.844.375,00	6 kegiatan	80.000.000	8 kegiatan	81.600.000	87.560.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	2 kegiatan	2 kegiatan	35.000.000		6 kegiatan	22.705.000,00	8 kegiatan	10.000.000	10.200.000	10.945.000	88.850.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2 kegiatan	2 kegiatan	75.000.000		4 kegiatan	45.146.500,00	6 kegiatan	30.000.000	8 kegiatan	31.547.356	32.953.151	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	2 kegiatan	2 kegiatan	15.000.000		4 kegiatan	22.705.000,00	6 kegiatan	15.000.000	8 kegiatan	15.300.000	16.417.500	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000		4 Kegiatan	22.705.000,00	6 Kegiatan	0	8 Kegiatan	0	10 Kegiatan	72.705.000	KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	0	0	0		0	22.705.000,00	0	0	0	0	22.705.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 2 68	5.1.2.68	Program Pengembangan Lulusan Sehat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000		4 Kegiatan	41.255.000,00	6 Kegiatan	50.000.000	8 Kegiatan	51.000.000	54.725.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	0 kali	0 kali	0		0	0,00	2 kali	40.000.000	2 kali	40.800.000	43.780.000	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 22 86	5.1.2.86	Program Pembinaan dan fasilitas kesehatan Kawasan Desa	0 -	0 -	0 -		0,00	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 17 87	5.1.2.87	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0 -	0 -	28.763.845		0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	28.763.845	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 15 88	5.1.2.88	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1 kali	1 kali	69.000.000		1 kali	89.030.000,00	1 kali	34.000.000	1 kali	39.780.000	53.630.500	1 kali	285.440.500	KEC. MARGAHAYU
6 0 1 17 91	5.1.2.91	Program Pengembangan Nilai Budaya	0 -	0 -	0 -		0 -	22.705.000,00	0 -	0 -	0 -	0 -	22.705.000	KEC. MARGAHAYU		
		Jumlah 2			1.397.638.845			917.492.876,00		854.920.781		878.066.546	952.246.440	5.000.365.488	KEC. MARGAHAYU	
		Jumlah Total (1+2)			2.248.415.155			2.307.991.289,00		2.015.255.151		2.757.748.103	2.728.361.607	11.047.871.305	KEC. MARGAHAYU	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih													KEC. NAGREG	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi KEWILAYAHAN													KEC. NAGREG	
	7.	Kecamatan													KEC. NAGREG	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	297.835.976		100 %	328.733.823	100 %	354.420.124	100 %	420.306.824	391.801.651	100%	1.793.098.398	KEC. NAGREG
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	285.000.000		100 %	203.675.176	100 %	115.000.000	100 %	136.378.500	127.129.322	100%	867.182.998	KEC. NAGREG
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 -	100 -	31.500.000		100 -	33.800.000	100 -	31.320.000	100 -	37.142.388	34.623.394	100%	168.385.782	KEC. NAGREG
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	40.000.000		100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	47.436.000	44.218.895	100%	211.654.895	KEC. NAGREG
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50 angka	50 angka	13.000.000		52 angka	13.000.000	54 angka	13.000.000	55 angka	15.416.700	14.371.141	100%	68.787.841	KEC. NAGREG
		Jumlah 3			667.335.976			619.208.999		553.740.124		656.680.412	612.144.402		3.109.109.914	KEC. NAGREG
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	60 %	60 %	50.000.000		65 %	25.000.000	70 %	25.000.000	75 %	25.627.500	27.636.809	80 %	153.264.309	KEC. NAGREG
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pelayanan masyarakat	3 unit	3 unit	30.000.000		0 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	0 unit	30.753.000	33.164.171	5 unit	153.917.171	KEC. NAGREG
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60 %	60 %	10.000.000		65 %	9.000.000	65 %	10.000.000	65 %	10.251.000	11.054.724	65 %	50.305.724	KEC. NAGREG
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2 Kegiatan	2 Kegiatan	140.965.236		2 Kegiatan	149.979.236	2 Kegiatan	140.965.236	2 Kegiatan	144.503.463	155.833.172	2 Kegiatan	732.246.343	KEC. NAGREG
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 %	100 %	25.000.000		100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	27.636.809	100 %	128.264.309	KEC. NAGREG
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	100	100	80.000.000		100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.753.000	33.164.171	100	203.917.171	KEC. NAGREG
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	100 jenis	100 jenis	30.000.000		100 jenis	27.985.000	100 jenis	30.000.000	100 jenis	30.753.000	33.164.171	100 jenis	151.902.171	KEC. NAGREG
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	60 %	60 %	50.000.000		60 %	22.500.000	60 %	25.000.000	70 %	25.627.500	27.636.809	70 %	150.764.309	KEC. NAGREG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100 %	100 %	50.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	153.264.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrintibmas dan pencegahan tindak kriminal	100 %	100 %	70.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	173.264.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	75.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	253.264.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	KEC. NAGREG	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.500.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	180.764.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	13.107.139	100 %	13.107.139	100 %	13.107.139	100 %	14.489.580	100 %	14.489.580	100 %	90.703.858	KEC. NAGREG	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 %	100 %	25.000.000	100 %	23.900.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	127.164.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	100 %	100 %	50.000.000	100 %	24.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	152.264.309	KEC. NAGREG	
6 0 1 1 67	5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	KEC. NAGREG	
6 0 1 3 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0 meter	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	0	50 meter	0	100 meter	0	100 meter	0	0	0	KEC. NAGREG	
		Jumlah 2			810.965.236		557.971.375		479.072.175		477.660.963		529.601.270		2.855.271.219		5.964.381.133	KEC. NAGREG	
		Jumlah Total (1+2)			1.478.301.212		1.177.180.373		1.032.812.499		1.134.341.376		1.141.745.672		5.964.381.133		5.964.381.133	KEC. NAGREG	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. PACET	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme/Integritas																KEC. PACET	
	7	KEWIBAWAHAN																KEC. PACET	
	7.1	Kecamatan																KEC. PACET	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	321.467.820	100 %	236.105.693	100 %	231.205.693	100 %	231.205.693	100 %	275.182.718	100 %	257.432.631	100 %	1.321.394.555	KEC. PACET	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	207.500.000	100 %	129.856.100	100 %	115.156.100	100 %	115.156.100	100 %	135.479.721	100 %	126.038.351	100 %	714.030.273	KEC. PACET	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	0 -	0 -	16.500.000	0 -	30.235.650	0 -	30.000.000	0 -	35.678.067	0 -	32.610.860	100 %	145.024.577	100 %	145.024.577	KEC. PACET	
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000	15.913.500	15.000.000	15.913.500	100 %	15.713.260	100 %	18.541.647	100 %	18.541.647	100 %	18.541.647	100 %	65.168.407	100 %	44.302.610	KEC. PACET
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0 -	0 -	13.000.000	0 -	8.381.110	0 -	7.000.000	0 -	8.260.000	0 -	7.661.500	100 %	7.661.500	100 %	44.302.610	KEC. PACET	
		Jumlah 1			573.467.820		420.492.053		399.075.053		473.142.153		423.743.342		2.289.920.421		2.289.920.421	KEC. PACET	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	15000 buah	15000 buah	50.000.000	16000 buah	25.000.000	17000 buah	25.000.000	18.000 buah	30.600.000	19.000 buah	27.362.500	100 %	157.962.500	100 %	157.962.500	KEC. PACET	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan pemerintahan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	0	100 %	50.500.000	100 %	51.510.000	100 %	64.028.250	100 %	266.038.250	100 %	266.038.250	KEC. PACET	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	12.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	KEC. PACET	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KfDit	100 %	100 %	149.093.934	100 %	70.500.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	219.593.934	100 %	219.593.934	KEC. PACET	
6 0 1 20 22	5.1.2.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	0 -	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	KEC. PACET	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100 %	100 %	75.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.362.500	100 %	177.862.500	100 %	177.862.500	KEC. PACET	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.800.000	100 %	43.780.000	100 %	214.580.000	100 %	214.580.000	KEC. PACET	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100 -	100 -	40.000.000	100 -	0	100 -	0	100 -	0	100 -	0	100 -	40.000.000	100 %	40.000.000	KEC. PACET	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2 buah	2 buah	36.000.000	3 buah	33.243.460	4 buah	0	5 buah	0	6 buah	0	6 buah	69.243.460	100 %	69.243.460	KEC. PACET	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantrintibmas dan pencegahan tindak kriminal	20 orang	20 orang	114.600.000	25 orang	108.467.500	30 orang	108.321.247	35 orang	107.551.710	40 orang	114.457.411	40 orang	553.397.868	100 %	553.397.868	KEC. PACET	
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	0 kali	0 kali	63.600.000	0 kali	50.000.000	0 kali	50.000.000	0 kali	51.000.000	0 kali	54.725.000	0 kali	269.325.000	100 %	269.325.000	KEC. PACET	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0 -	0 -	41.000.000	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	41.000.000	100 %	41.000.000	KEC. PACET	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	85.500.000	100 %	80.000.000	100 %	81.600.000	100 %	87.560.000	100 %	374.660.000	100 %	374.660.000	KEC. PACET	
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	10 unit	10 unit	25.000.000	15 unit	25.000.000	20 unit	25.000.000	25 unit	25.500.000	30 unit	27.362.500	30 unit	127.862.500	100 %	127.862.500	KEC. PACET	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 %	100 %	20.000.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	KEC. PACET	
		Jumlah 2			811.293.934		467.710.960		403.821.247		414.061.710		446.638.161		2.543.526.012		2.543.526.012	KEC. PACET	
		Jumlah Total (1+2)			1.384.761.754		888.203.013		802.896.300		887.203.863		870.381.503		4.833.446.433		4.833.446.433	KEC. PACET	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. PAMEUNGPEUK	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp								
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																	KEC. PAMEUNGPEUK		
	7	KEWILAYAHAN																	KEC. PAMEUNGPEUK		
	7.1	Kecamatan																	KEC. PAMEUNGPEUK		
x	xx	xx	xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsitas pemenuhan operasional administrasi	100 %	100 %	269.954.960	100 %	239.625.409	100 %	234.499.214	100 %	285.010.345	100 %	277.577.130	100%	1.306.667.058	KEC. PAMEUNGPEUK
x	xx	xx	xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Proporsitas Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang aparatur(%)	100 %	100 %	235.000.000	100 %	185.271.300	100 %	127.578.488	100 %	174.713.328	100 %	128.599.153	100%	851.162.269	KEC. PAMEUNGPEUK
x	xx	xx	xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Proporsitas Penunjang Kerja aparatur. (%)	100 %	100 %	37.350.000	100 %	37.800.000	100 %	27.318.175	100 %	33.202.510	100 %	32.336.571	100%	168.007.256	KEC. PAMEUNGPEUK
x	xx	xx	xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Proporsitas pemenuhan kualitas sumber daya aparatur (%)	100 %	100 %	79.200.000	100 %	61.500.000	100 %	40.099.985	100 %	58.705.507	100 %	49.250.457	100%	288.755.949	KEC. PAMEUNGPEUK
x	xx	xx	xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	proporsitas ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	44.500.000	100 %	40.000.000	100 %	38.245.445	100 %	46.483.513	100 %	45.271.199	100%	214.500.158	KEC. PAMEUNGPEUK
						Jumlah			666.004.960		561.196.709		467.741.307		598.115.203		533.034.510		2.829.092.690	KEC. PAMEUNGPEUK	
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		KEC. PAMEUNGPEUK	
	1.1	Pendidikan																		KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	1	17	5.1.2.17	Program Pendidikan Menengah	Rata rata angka partisipasi mumi jenjang Pendidikan Menengah tingkat kecamatan (%)					29.730.000	100 %	44.636.350	100 %	37.000.950	0		111.367.300	KEC. PAMEUNGPEUK	
					1.4	Penumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman														KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	4	16	5.1.2.16	Program Lingkungan Sehat Pemukiman	Proporsitas Lingkungan Rumah yang diutamakan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.864.240	100%	24.041.560			85.905.800	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan e-KTP lingkup Kecamatan (%)	100 %	100 %	37.300.000	100 %	38.045.000	100 %	39.636.350	100 %	42.100.950	100 %	48.255.643	100 %	205.337.942	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendololan pemerintahan	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	100 %	100 %	25.000.000	100 %	19.700.000	100 %	27.318.175	100 %	28.700.474	100 %	34.184.375	100 %	134.903.025	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsitas capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.927.270	100 %	11.480.190	100 %	12.934.628	100 %	65.342.088	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	22	19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitasi pendololan keuangan desa	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0 0	0 0	40.000.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	40.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPI	Proporsitas pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)	100 %	100 %	110.900.000	100 %	91.511.627	100 %	128.545.400	100 %	107.203.797	100 %	116.407.572	100 %	554.568.397	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	25	23	5.1.2.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0 0	0 0	40.000.000	0 0	23.600.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	63.600.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah penyuluhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	14.520.000	1 Kegiatan	12.781.810	1 Kegiatan	14.040.569	1 Kegiatan	15.066.081	5 Kegiatan	81.408.461	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Proporsitas klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan yang dibina	100 Rp	100 Rp	45.000.000	100 Rp	35.000.000	100 Rp	29.172.715	100 Rp	31.260.854	100 %	36.315.828	100 %	176.749.397	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata rata prosentase usulan Program / kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD (%)	100 %	100 %	50.000.000	100 %	40.000.000	100 %	43.709.080	100 %	45.920.759	100 %	51.738.514	100 %	231.368.354	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	2	53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Proporsitas persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yg berkepenting skala kecamatan (%)	100 %	100 %	25.000.000	100 %	19.160.000	100 %	22.781.810	100 %	24.240.569	100 %	27.858.885	100 %	119.041.265	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	8	54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	19	56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Proporsitas penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat	100 %	100 %	70.000.000	100 %	39.044.160	100 %	49.263.000	100 %	52.520.718	100 %	63.246.449	100 %	274.074.327	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Proporsitas jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	75.000.000	100 %	95.000.000	100 %	108.345.430	100 %	103.321.709	100 %	116.411.657	100 %	498.078.796	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	22	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Proporsitas aparatur yang memiliki kemampuan dalam pendololan keuangan desa (%)	100 %	100 %	50.000.000	100 %	28.889.300	100 %	75.563.620	100 %	68.881.140	100 %	77.607.772	100 %	300.941.831	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	11	60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan tingkat Kecamatan (Lsm/ non Lsm,organisasi) (orang)	100 %	100 %	65.000.000	100 %	49.250.000	100 %	44.636.350	100 %	47.200.950	100 %	42.783.143	100 %	248.870.442	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	18	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan	100 %	100 %	35.000.000	100 %	52.556.840	100 %	0	100 %	0	100 %	0	87.556.840	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	19	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Proporsitas Penanganan Kejadian Bencana Alam. (%)	100 %	100 %	20.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.927.270	100 %	11.480.190	100 %	12.934.628	100 %	65.342.088	KEC. PAMEUNGPEUK
6	0	1	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	1	67	5.1.2.67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	18	73	5.1.2.73	Program upaya pencegahan pemalihan jabatan	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	24	81	5.1.2.81	Program perbaikan sistem administrasi keagamaan	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0 0	0 0	20.000.000	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	20.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	19	93	5.1.2.93	Program peningkatan kesamaan dan kesetaraan lingkungan	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
6	0	1	24	94	5.1.2.94	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Proporsitas cakupan pelayanan pemerintahan (%)	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	KEC. PAMEUNGPEUK	
						Jumlah 2			918.200.000		616.006.972		670.108.870		649.395.379		656.745.176		3.509.456.351	KEC. PAMEUNGPEUK	
						Jumlah Total (1+2)			1.584.204.960		1.180.203.636		1.137.850.177		1.247.510.582		1.188.779.686		6.338.549.041	KEC. PAMEUNGPEUK	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. PANGALANGAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp						
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi																	KEC. PANGALENGAN
	7	KEWILAYAHAN																	KEC. PANGALENGAN
	7.1	Kecamatan																	KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx	1	5.2.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran	100 %	100 %	452.200.267	100 %	327.248.268	100 %	314.500.000	100 %	372.965.550	100 %	347.671.057	100%	1.814.585.142	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx	2	5.2.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan perbaikan dan perlengkapan perkantoran	100 persen	100 persen	155.075.000	100 persen	101.500.000	100 persen	100.000.000	100 persen	118.590.000	100 persen	110.547.236	100%	585.712.236	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx	3	5.2.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pemenuhan disiplin aparatur	34 stel	34 stel	30.982.500	34 stel	31.005.000	34 stel	31.000.000	34 stel	36.762.900	34 stel	34.269.643	100%	164.020.043	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx	5	5.2.3.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM Aparatur	100 %	100 %	25.850.000	100 %	14.450.000	100 %	19.227.803	100 %	22.802.252	100 %	21.255.804	100%	103.585.859	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx	6	5.2.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 thn	1 thn	40.276.000	1 thn	26.835.000	1 thn	25.000.000	1 thn	29.647.500	1 thn	27.636.809	100%	149.395.309	KEC. PANGALENGAN	
			Jumlah 1				704.383.767		501.038.268		489.727.803		580.788.202		541.380.550		2.817.298.590	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 10	17	5.1.1.7	Program penataan administrasi penyelenggaraan	Persentase Penataan Administrasi Penyelenggaraan	0 Persen	0 Persen	0	100 Persen	11.700.000	100 Persen	11.900.000	100 Persen	12.198.690	1	13.155.121	100 %	48.953.811	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengadilan persampahan	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan dan Peremajaan	100 %	100 %	40.900.000	100 %	19.515.000	100 %	34.625.000	100 %	35.494.088	100 %	38.276.980	100 %	168.811.067	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kawasan daerah	Jumlah Intensifikasi dan edensifikasi pendapatan hasil daerah (PAD)	100 %	100 %	0	100 %	21.715.000	100 %	11.850.000	100 %	12.147.435	100 %	13.099.847	100 %	58.812.282	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 11	18	5.1.2.18	Program peningkatan peran serta dan kecerdasan jender dalam pembangunan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	100 %	100 %	56.000.000	100 %	85.500.000	100 %	40.000.000	100 %	41.004.000	100 %	44.218.895	100 %	266.722.895	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	100 Rp	100 Rp	153.310.000	100 Rp	128.530.000	100 Rp	150.000.000	100 Rp	153.765.000	100 %	165.820.854	100 %	751.425.854	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		0	0	41.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	41.500.000	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Pembinaan Olah raga	0 kali	0 kali	39.600.000	0 kali	18.000.000	0 kali	18.200.000	0 kali	18.656.820	0 kali	20.119.597		114.576.417	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 6	52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah penyenggaraan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	36.613.125	100 %	32.396.750	100 %	47.193.640	100 %	48.378.200	100 %	52.171.264	100 %	216.752.980	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 19	56	5.1.2.56	Program pemberdayaan kemitraan dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam sidikawakarsa	100 %	100 %	69.100.000	100 %	74.380.000	100 %	74.500.000	100 %	76.369.950	100 %	82.357.690	100 %	376.707.640	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 19	57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	25.600.000	100 %	66.625.000	100 %	12.000.000	100 %	12.301.200	100 %	13.265.668	100 %	129.791.868	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 18	58	5.1.2.58	Program peningkatan upaya perubahan kewifaudan dan kecakapan hidup pemuda		0 -	0 -	19.600.000	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0		19.600.000	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 22	59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan Pelaporan	100 %	100 %	74.000.000	100 %	61.450.000	100 %	46.000.000	100 %	47.154.600	100 %	50.851.729	100 %	279.456.329	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 18	61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Rata-rata Jumlah pemuda perempuan pada kecamatan	75	75	0	80	11.200.000	85	17.000.000	90	17.426.700	95	18.793.030	95	64.419.730	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 19	62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana evaluasi korban bencana alam	100 %	100 %	37.800.000	100 %	32.250.000	100 %	25.000.000	100 %	25.627.500	100 %	27.636.809	100 %	148.314.309	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pengelola PAUD	100 persen	100 persen	48.875.000	100 persen	29.200.000	100 persen	37.000.000	100 persen	37.928.700	100 persen	40.902.477	100 %	193.906.177	KEC. PANGALENGAN	
			Jumlah 7				647.898.125		597.461.750		575.268.640		538.452.883		580.669.967		2.879.751.360	KEC. PANGALENGAN	
			Jumlah Total (1-2)				1.247.281.892		1.093.500.018		1.014.996.443		1.119.221.084		1.122.050.512		5.897.049.949	KEC. PANGALENGAN	
		5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. PASEH	
		5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Binkresi															KEC. PASEH	
		7	KEWILAYAHAN															KEC. PASEH	
		7.1	Kecamatan															KEC. PASEH	
x xx xx xx	1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	90 %	90 %	220.149.650	90 %	179.262.680	92 %	192.555.680	92 %	229.417.113	92 %	214.846.206	100%	1.036.231.329	KEC. PASEH	
x xx xx xx	2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90 %	90 %	85.000.000	90 %	136.219.560	90 %	136.219.560	92 %	160.739.081	92 %	149.092.308	100%	667.270.509	KEC. PASEH	
x xx xx xx	3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase program peningkatan disiplin aparatur	90 %	90 %	25.000.000	90 %	14.852.600	92 %	14.852.600	92 %	17.526.068	92 %	16.256.171	100%	88.487.439	KEC. PASEH	
x xx xx xx	5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur	90 %	90 %	20.000.000	92 %	20.157.100	92 %	20.157.100	92 %	23.785.378	92 %	22.061.946	100%	106.161.524	KEC. PASEH	
x xx xx xx	6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91 %	91 %	20.000.000	91 %	9.335.920	92 %	9.335.920	92 %	11.016.386	92 %	10.218.164	100%	59.906.390	KEC. PASEH	
			Jumlah 7				370.149.650		359.827.860		373.120.860		447.484.075		417.474.796		1.958.057.191	KEC. PASEH	
6 0 1 10	7	5.1.1.7	Program penataan administrasi penyelenggaraan	Persentase Jumlah yang memiliki KTP	80 %	80 %	35.000.000	85 %	20.000.000	85 %	20.000.000	90 %	20.400.000	90 %	21.890.000	90 %	117.290.000	KEC. PASEH	
6 0 1 8	8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengadilan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengadilan persampahan	85 %	85 %	50.000.000	87 %	20.000.000	87 %	20.000.000	90 %	20.400.000	90 %	21.890.000	90 %	132.290.000	KEC. PASEH	
6 0 1 20	17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kawasan daerah	Rata-rata persentase capaian dan retribusi Kecamatan pada Tahun berjalan	90 %	90 %	30.000.000	91 %	25.000.000	92 %	25.000.000	92 %	25.500.000	92 %	27.362.500	92 %	132.862.500	KEC. PASEH	
6 0 1 22	19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan kawasan desa	Persentase kesesuaian dalam pengelolaan kawasan Desa	0 %	0 %	0	0 %	0	0	17 %	0	17 %	0	17 %	0	0	KEC. PASEH	
6 0 1 20	20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rata-rata persentase Palmpihan kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan TK Kecamatan	90 %	90 %	173.908.511	92 %	128.153.139	92 %	128.153.139	92 %	133.812.172	92 %	146.924.417	92 %	710.951.378	KEC. PASEH	
6 0 1 22	50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	rata-rata persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan	90 %	90 %	42.000.000	91 %	20.000.000	91 %	20.000.000	91 %	20.400.000	91 %	21.890.000	91 %	124.290.000	KEC. PASEH	
6 0 1 18	51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Rata-rata Jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga TK Kecamatan	85 %	85 %	68.000.000	87 %	40.000.000	87 %	40.000.000	90 %	40.800.000	90 %	43.780.000	90 %	232.580.000	KEC. PASEH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp					
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase usulan program/kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	80 %	80 %	45.000.000	85 %	40.000.000	85 %	40.000.000	90 %	40.800.000	90 %	43.780.000	90 %	209.580.000	KEC. PASEH	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rata-rata persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkemampuan skala Kecamatan	92 %	92 %	60.000.000		48.940.000	93 %	50.000.000	93 %	51.000.000	93 %	54.725.000	93 %	264.665.000	KEC. PASEH	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan RTH	90 %	90 %	40.000.000	91 %	40.000.000	91 %	40.000.000	92 %	40.800.000	92 %	43.780.000	92 %	204.580.000	KEC. PASEH	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/teras dan pencegahan tindak kriminal	rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	91 %	91 %	80.000.000	91 %	40.000.000	92 %	40.000.000	92 %	40.800.000	92 %	43.780.000	92 %	244.580.000	KEC. PASEH	
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan Kebangsaan	85 %	85 %	30.000.000	87 %	95.000.000	87 %	45.000.000	90 %	45.900.000	90 %	49.252.500	90 %	265.152.500	KEC. PASEH	
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rata-rata persentase jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Sosialisasi	85 %	85 %	150.000.000	85 %	34.149.500	90 %	35.000.000	90 %	35.700.000	90 %	38.307.500	90 %	293.157.000	KEC. PASEH	
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan TK Kecamatan (LSM/non LSM, Organisasi)	90 %	90 %	50.000.000	91 %	90.218.750	91 %	50.000.000	92 %	51.000.000	92 %	54.725.000	92 %	295.943.750	KEC. PASEH	
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta masyarakat	rata-rata persentase jumlah organisasi skala Kecamatan	85 %	85 %	36.000.000	87 %	18.900.000	87 %	18.900.000	90 %	19.278.000	90 %	20.686.050	90 %	113.764.050	KEC. PASEH	
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rata-rata persentase penanggulangan kejadian bencana alam	90 %	90 %	44.000.000	90 %	35.000.000	91 %	35.000.000	92 %	35.700.000	92 %	38.307.500	92 %	188.007.500	KEC. PASEH	
6 0 1 1 65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata persentase pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0 %	0 %	0	0 %	0	90 %	0	90 %	0	91 %	0	0	0	KEC. PASEH	
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Rata-rata angka partisipasi murni jenjang SMP/Sejerajat Tingkat Kecamatan (%)	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	2 kegiatan	40.000.000	KEC. PASEH	
6 0 1 3 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rata-rata persentase jalan mantap (baik/dan sedang) Kabupaten Lingkup Kecamatan (%)	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0	KEC. PASEH	
6 0 1 15 72	5.1.2.72	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	persentase UMKM yang maju	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	0	0	KEC. PASEH	
6 0 1 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	persentase anak putus sekolah	0 %	0 %	0	0 %	0	10 %	0	9 %	0	8 %	0	0	0	KEC. PASEH	
		Jumlah 2				973.908.511		695.361.389		607.053.139		622.250.172		671.080.467		3.569.693.678	KEC. PASEH	
		Jumlah Total (1+2)				1.344.058.161		1.055.189.249		980.173.999		1.064.774.197		1.083.355.263		5.527.750.869	KEC. PASEH	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. PASIR JAMBU	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Pinalaksi															KEC. PASIR JAMBU	
	7.	KEWILAYAHAN															KEC. PASIR JAMBU	
	7.1.	Kecamatan															KEC. PASIR JAMBU	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	415.250.000	12 bulan	272.826.377	12 bulan	267.000.000	12 bulan	315.060.000	12 bulan	292.231.500	100%	1.562.367.877	KEC. PASIR JAMBU	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	142.625.994	100 Persen	92.674.583	100 Persen	92.674.583	100 Persen	111.700.598	100 Persen	105.792.619	100%	545.468.377	KEC. PASIR JAMBU	
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	8.500.000	100 Persen	19.096.200	100 Persen	19.096.200	100 Persen	22.533.516	100 Persen	20.900.791	100%	90.126.707	KEC. PASIR JAMBU	
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 -	0 -	8.500.000	0 -	9.017.650	0 -	0	0 -	0	0 -	0	100%	17.517.650	KEC. PASIR JAMBU	
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	9.600.000	100 Persen	9.600.000	100 Persen	9.600.000	100 Persen	11.328.000	100 Persen	10.507.200	100%	50.635.200	KEC. PASIR JAMBU	
		Jumlah 1				584.475.994		403.214.810		388.370.783		460.622.114		429.432.110		2.266.115.811	KEC. PASIR JAMBU	
	1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															KEC. PASIR JAMBU	
	1.5	Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 19 22	5.1.2.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 Persen	100 Persen	15.000.000	0 Persen	0	100 Persen	29.389.712	100 Persen	21.594.832	100 persen	26.519.707	100 persen	92.504.251	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 3 69	5.1.2.69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	158.445.415	100 Persen	166.462.753	100 persen	187.552.116	100 persen	512.460.283	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	100 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	25.000.000	100 Persen	15.000.000	100 Persen	15.300.000	100 persen	16.417.500	100 persen	86.717.500	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendataan pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan (jumlah)	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	27.424.352	100 Persen	29.424.024	100 persen	34.246.288	100 persen	146.094.663	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persen interefikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	100 Persen	100 Persen	13.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.000.000	100 Persen	10.200.000	100 persen	10.945.000	100 persen	54.145.000	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	100 Persen	100 Persen	477.240.404	100 Persen	158.713.475	100 Persen	72.985.850	100 Persen	77.631.226	100 persen	86.736.779	100 persen	873.307.734	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	44.578.150	100 Persen	35.513.627	100 Persen	37.310.617	100 persen	42.037.543	100 persen	184.439.937	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan cabang olahraga prestasi	100 Persen	100 Persen	28.000.000	100 Persen	35.250.000	100 Persen	21.863.454	100 Persen	22.300.723	100 persen	21.890.000	100 persen	129.304.177	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan keuangan publik	100 Persen	100 Persen	35.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	40.800.000	100 persen	43.780.000	100 persen	199.580.000	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.600.000	100 persen	32.835.000	100 persen	183.435.000	KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH (roket)	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	33.709.080	100 Persen	35.720.759	100 persen	29.848.514	100 persen	99.278.354	KEC. PASIR JAMBU	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/tilmas dan pencegahan tindak kriminal	100 Persen	100 Persen	37.000.000	100 Persen	30.000.000	100 Persen	48.298.533	100 Persen	50.742.439	100 persen	57.171.058	100 persen	223.212.029	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	100 Persen	100 Persen	31.000.000	100 Persen	90.000.000	0 Persen	0	0 Persen	0	100 persen	0	100 persen	121.000.000	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	35.000.000	100 Persen	35.700.000	100 persen	38.307.500	100 persen	174.007.500	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	77.436.000	100 Persen	4.243.600	100 Persen	4.328.472	100 persen	4.644.620	100 persen	130.652.692	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	100 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	24.639.395	100 Persen	26.771.811	100 Persen	28.126.464	100 persen	31.689.840	100 persen	126.227.510	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 Persen	100 Persen	0	0	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 persen	0	0	0	KEC. PASIR JAMBU		
6 0 1 1 66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	100 Persen	100 Persen	38.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	45.011.611	100 Persen	43.273.537	100 persen	35.769.938	100 persen	212.055.086	KEC. PASIR JAMBU		
Jumlah ?					874.740.404		690.617.020		633.657.045		649.515.845		700.351.402		3.548.491.716	KEC. PASIR JAMBU		
Jumlah Total (1+2)					1.456.716.398		1.093.831.820		1.022.027.828		1.110.137.959		1.129.823.512		5.814.537.527	KEC. PASIR JAMBU		
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. RANCAEBALI		
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														KEC. RANCAEBALI		
	7	KEWILAYAHAN														KEC. RANCAEBALI		
	7.1	Kecamatan														KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Kegiatan	13 Kegiatan	212.637.500	268.711.400	13 Kegiatan	285.500.000	13 Kegiatan	340.609.649	13 Kegiatan	319.397.265	100%	1.426.855.814	KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	6 kegiatan	6 kegiatan	434.000.000	156.949.076	6 kegiatan	256.949.076	6 kegiatan	303.199.910	6 kegiatan	281.230.764	100%	1.432.328.825	KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	4 Jenis	4 Jenis	28.500.000	34.000.000	4 Jenis	34.000.000	4 Jenis	40.120.000	4 Jenis	37.213.000	100%	173.833.000	KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 5	5.1.2.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	180 Orang	180 Orang	8.000.000	18.780.000	130 Orang	20.000.000	130 Orang	23.600.000	130 Orang	21.890.000	100%	92.270.000	KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4.000.000	34.000.000	4 Kegiatan	34.000.000	4 Kegiatan	40.120.000	4 Kegiatan	37.213.000	100%	149.333.000	KEC. RANCAEBALI		
Jumlah 1					687.137.500		512.440.476		630.449.076		747.649.559		696.944.028		3.274.620.639	KEC. RANCAEBALI		
	2	URUSAN WAJIB BUJAN PELAYANAN DASAR														KEC. RANCAEBALI		
	2.16	Kebudayaan														KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 17 16	5.1.2.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	100 Persen	100 Persen	24.000.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	24.000.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kesepuluh	Persentase Sosialisasi Administrasi Kesepuluh	0 Persen	0 Persen	0	38.075.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	51.000.000	100 Persen	54.725.000	100 Persen	193.800.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan pemerintahan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan pemerintahan daerah	0 -	0 -	0	94.400.000	0 -	97.000.000	0 -	96.940.000	0 -	106.166.500	100 Persen	396.506.500	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	21.854.500	0 Kegiatan	22.960.373	0 Kegiatan	25.115.710	100 Persen	89.930.584	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KCH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KCH	13 Kegiatan	13 Kegiatan	184.100.887	250.000.000	19 Kegiatan	228.145.500	19 Kegiatan	232.039.627	19 Kegiatan	248.509.209	100 Persen	1.142.795.303	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	50.000.000	4 Kegiatan	50.000.000	4 Kegiatan	51.000.000	4 Kegiatan	54.725.000	100 Persen	235.725.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.000.000	120.000.000	2 Kegiatan	120.000.000	2 Kegiatan	122.400.000	2 Kegiatan	131.340.000	100 Persen	568.740.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	20.000.000	58.509.000	100 Persen	58.509.000	100 Persen	59.679.180	1	64.038.101	100 Persen	260.735.281	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	252 Org	252 Org	50.000.000	71.033.000	225 Org	75.000.000	225 Org	76.500.000	225 Org	82.087.500	100 Persen	354.620.500	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantin/tilmas dan pencegahan tindak kriminal	-	0 -	0 -	120.000.000	187.586.375	0 -	200.000.000	0 -	204.000.000	0 -	218.900.000	100 Persen	930.486.375	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	214.181.075	2 Kegiatan	167.401.626	2 Kegiatan	177.828.003	2 Kegiatan	198.449.737	100 Persen	757.860.441	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fasilitas Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000	78.800.000	2 Kegiatan	80.000.000	2 Kegiatan	81.600.000	2 Kegiatan	87.560.000	100 Persen	377.960.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	45.000.000	107.500.000	2 Kegiatan	90.000.000	2 Kegiatan	91.800.000	2 Kegiatan	98.505.000	100 Persen	432.805.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	Fasilitas Peningkatan peran serta perempuan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000	46.126.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	51.000.000	1 Kegiatan	54.725.000	100 Persen	241.851.000	KEC. RANCAEBALI		
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penanggulangan korban bencana alam	0 Jenis	0 Jenis	0	100.000.000	17 Jenis	100.000.000	17 Jenis	102.000.000	17 Jenis	109.450.000	100 Persen	411.450.000	KEC. RANCAEBALI		
Jumlah ?					658.100.887		1.416.210.450		1.387.910.626		1.427.747.183		1.534.296.838		6.319.265.983	KEC. RANCAEBALI		
Jumlah Total (1+2)					1.345.238.387		1.928.650.926		2.018.359.702		2.170.396.741		2.211.240.866		9.693.886.622	KEC. RANCAEBALI		
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. RANCAEBALI		
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														KEC. RANCAEBALI		
	7	KEWILAYAHAN														KEC. RANCAEBALI		
	7.1	Kecamatan														KEC. RANCAEBALI		
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	484.358.150	422.170.873	100 %	553.374.214	100 %	651.814.253	100 %	605.492.596	100%	2.717.210.086	KEC. RANCAEBALI		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	436.591.885	100 %	881.549.129	100 %	843.825.000	100 %	1.008.192.000	100 %	963.833.118	100 %	4.133.991.132	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	57.200.000	100 %	48.400.000	100 %	81.750.000	100 %	96.465.000	100 %	89.475.375	100 %	373.290.375	KEC. RANCAEKEK
	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -		KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	19.096.200	100 %	19.000.000	100 %	22.538.000	100 %	21.014.400	100 %	93.648.600	KEC. RANCAEKEK
		Jumlah 1			990.150.035		1.371.216.202		1.497.949.214		1.779.009.253		1.679.815.489		7.318.140.192	KEC. RANCAEKEK
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														KEC. RANCAEKEK
	1.1	Pendidikan														KEC. RANCAEKEK
6 0 1 1 15	5.2.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	100 %	50.000.000	100 %	47.822.000	100 %	50.000.000	100 %	51.255.000	100 %	55.272.250	100 Persen	254.349.250	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100 %	100 %	0	100 %	7.956.750	100 %	7.950.000	100 %	8.109.000	100 %	8.756.000	100 Persen	32.771.750	KEC. RANCAEKEK
	1.6	Sosial														KEC. RANCAEKEK
6 0 1 13 15	5.1.2.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terberdayakan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	40.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 Persen	183.435.000	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 13 21	5.1.2.21	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 Persen	158.435.000	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Peningkatan Olahraga Prestasi	100 %	100 %	45.000.000	100 %	23.204.580	100 %	30.000.000	100 %	30.600.000	100 %	32.835.000	100 Persen	161.639.580	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	52.545.000	100 %	53.000.000	100 %	54.366.000	100 %	58.555.750	100 Persen	268.466.750	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendolopon pemerintahan	100 %	100 %	60.000.000	100 %	14.218.000	100 %	50.000.000	100 %	51.000.000	100 %	54.725.000	100 Persen	229.943.000	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.304.500	100 %	5.000.000	100 %	5.100.000	100 %	5.472.500	100 Persen	25.877.000	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pendendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100 %	100 %	925.621.150	100 %	942.665.195	100 %	341.604.050	100 %	350.220.266	100 %	385.822.462	100 Persen	2.945.933.123	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0	0	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	60.000.000	100 %	59.025.000	100 %	60.000.000	100 %	61.506.000	100 %	66.326.700	100 Persen	306.857.700	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100 %	100 %	69.500.000	100 %	35.000.000	100 %	70.000.000	100 %	71.757.000	100 %	77.381.150	100 Persen	323.638.150	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	100 %	100 %	58.600.000	100 %	21.200.000	100 %	21.200.000	100 %	21.732.120	100 %	23.422.300	100 Persen	146.154.420	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kemitimbalan dan pencegahan tindak kriminal	100 %	100 %	65.945.000	100 %	58.629.500	100 %	145.250.000	100 %	148.206.000	100 %	131.951.826	100 Persen	549.982.326	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	95.218.000	100 %	45.218.000	100 %	46.308.000	100 %	49.936.563	100 Persen	266.680.563	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0 %	0 %	0	100 %	47.500.000	100 %	70.000.000	100 %	71.400.000	100 %	76.615.000	100 Persen	265.515.000	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program peningkatan peran serta dan keaktifan jender dalam pembangunan	100 %	100 %	40.000.000	100 %	108.705.200	100 %	85.000.000	100 %	86.700.000	100 %	93.032.500	100 Persen	413.437.700	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta masyarakat	100 %	100 %	25.000.000	100 %	10.609.000	100 %	10.609.000	100 %	10.863.000	100 %	11.711.150	100 Persen	68.792.150	KEC. RANCAEKEK
		Jumlah 2			1.564.666.150		1.604.607.725		1.104.831.050		1.130.372.386		1.197.486.150		6.601.908.461	KEC. RANCAEKEK
		Jumlah Total (1+2)			2.554.816.185		2.975.818.927		2.602.780.264		2.909.331.639		2.877.301.639		13.920.048.653	KEC. RANCAEKEK
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														KEC. SOLOKAN JERUK
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Pinalaksi														KEC. SOLOKAN JERUK
	7	KEWILAYAHAN														KEC. SOLOKAN JERUK
	7.1	Kecamatan														KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 persen	90 persen	228.977.972	90 persen	345.820.739	90 persen	270.784.675	90 persen	363.922.146	90 persen	464.134.370	100 %	1.673.639.902	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90 persen	90 persen	406.000.000	90 persen	271.160.000	90 persen	376.000.000	90 persen	389.400.000	90 persen	52.536.000	100 %	1.495.096.000	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	90 persen	90 persen	18.000.000	90 persen	18.650.000	90 persen	10.000.000	90 persen	23.600.000	90 persen	30.098.750	100 %	100.248.750	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 persen	90 persen	24.000.000	90 persen	55.000.000	90 persen	10.000.000	90 persen	42.480.000	90 persen	51.988.750	100 %	183.468.750	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90 persen	90 persen	10.000.000	90 persen	9.200.000	90 persen	8.000.000	90 persen	9.440.000	90 persen	10.945.000	100 %	47.585.000	KEC. SOLOKAN JERUK
		Jumlah 1			686.977.972		699.830.739		674.784.675		828.842.146		609.702.870		3.500.138.402	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi kependudukan	70 persen	70 persen	40.000.000	75 persen	35.500.000	80 persen	25.000.000	85 persen	25.500.000	100 %	38.307.500	100 %	164.307.500	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pendolopon pemerintahan	60 persen	60 persen	150.000.000	61 persen	7.340.000	61 persen	59.000.000	62 persen	34.680.000	1	42.865.500	100 %	293.705.500	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	80 persen	80 persen	10.000.000	81 persen	10.000.000	82 persen	5.000.000	83 persen	6.120.000	1	10.945.000	100 %	42.065.000	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 22 19	5.1.2.19	Program pembinaan dan fasilitas pendolopon keuangan desa	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0	0	KEC. SOLOKAN JERUK



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	85 persen	85 persen	158.361.064	86 persen	75.000.000	86 persen	86 persen	50.000.000	87 persen	61.200.000	1	98.505.000	100%	443.066.064	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	70 persen	70 persen	40.000.000	71 persen	35.000.000	72 persen	72 persen	20.000.000	72 persen	15.300.000	1	21.890.000	100%	132.190.000	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4 CLUB	4 CLUB	50.000.000	5 CLUB	29.850.000	5 CLUB	30.000.000	6 CLUB	30.600.000	6 CLUB	43.780.000	100%	184.230.000	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	90 persen	90 persen	50.000.000	90 persen	40.000.000	90 persen	35.000.000	90 persen	35.700.000	1	43.780.000	100%	204.480.000	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	75 persen	75 persen	50.000.000	76 persen	30.000.000	78 persen	20.000.000	80 persen	20.400.000	1	27.362.500	100%	147.762.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 8 54	5.1.2.54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0 Rp	0 Rp	0	0 Rp	0	0 Rp	0	0 Rp	0	15.000.000 Rp	0	16.417.500	100%	16.417.500	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantirimbias dan pencegahan tindak kriminal	80 persen	80 persen	65.000.000	81 persen	90.000.000	81 persen	85.000.000	82 persen	81.600.000	1	93.032.500	100%	414.632.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	80 persen	80 persen	50.000.000	81 persen	100.000.000	81 persen	30.000.000	82 persen	30.600.000	1	49.252.500	100%	259.852.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	70 persen	70 persen	40.000.000	71 persen	30.000.000	72 persen	20.000.000	73 persen	20.400.000	1	21.890.000	100%	132.290.000	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2 organisasi	2 organisasi	40.000.000	2 organisasi	64.500.000	2 organisasi	56.000.000	2 organisasi	59.160.000	2 organisasi	71.142.500	100%	290.802.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	5 orang	5 orang	30.000.000	5 orang	20.000.000	6 orang	15.000.000	7 orang	15.300.000	7 orang	16.417.500	100%	96.717.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 19 62	5.1.2.62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0 jenis	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	2 jenis	16.417.500	100%	16.417.500	KEC. SOLOKAN JERUK		
6 0 1 15 72	5.1.2.72	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	0 Rp	0 Rp	0	0 Rp	0	0 Rp	0	0 Rp	0	20.000.000 Rp	0	21.890.000	100%	21.890.000	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 1 84	5.1.2.84	Program Pendidikan Non Formal	0 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	KEC. SOLOKAN JERUK	
		Jumlah 2			773.361.064		567.190.000			450.000.000		436.560.000		633.715.500		2.860.826.564	KEC. SOLOKAN JERUK	
		Jumlah Total (1+2)			1.460.339.036		1.267.020.739			1.124.784.675		1.265.402.146		1.243.418.370		6.360.964.966	KEC. SOLOKAN JERUK	
	5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. SOREANG	
	5.1.1.1	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi															KEC. SOREANG	
	7	KEWILAYAHAN															KEC. SOREANG	
	7.1	Kecamatan															KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1	5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	380.445.000	100 %	382.978.900	100 %	489.000.000	100 %	571.710.000	100 %	535.192.347	100%	2.359.326.247	KEC. SOREANG		
x xx xx xx 2	5.2.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1 paket	838.160.150	1 paket	3.674.665.050	1 paket	1.130.000.000	1 paket	1.249.294.039	1 paket	1.205.865.375	100%	8.097.984.614	KEC. SOREANG		
x xx xx xx 3	5.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	0 -	0 -	30.000.000	0 -	22.000.000	0 -	48.000.000	0 -	45.969.000	0 -	195.529.000	100%	195.529.000	KEC. SOREANG		
x xx xx xx 5	5.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 -	0 -	7.770.000	0 -	0	0 -	30.000.000	0 -	29.500.000	0 -	27.362.500	100%	94.632.500	KEC. SOREANG		
x xx xx xx 6	5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0 -	0 -	7.700.000	0 -	9.000.000	0 -	10.000.000	0 -	11.800.000	0 -	10.945.000	100%	49.445.000	KEC. SOREANG		
		Jumlah 1			1.204.025.150		4.088.643.950		1.707.000.000		1.911.894.039		1.824.314.222		10.296.917.361	KEC. SOREANG		
6 0 1 10 7	5.1.1.7	Program penataan administrasi pemerintahan	76 %	76 %	25.000.000	77 %	24.400.000	78 %	60.000.000	79 %	56.100.000	80 %	60.197.500	80 %	225.697.500	KEC. SOREANG		
6 0 1 8 8	5.1.2.8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	25.000.000	2 KEGIATAN	89.250.000	2 KEGIATAN	110.000.000	2 KEGIATAN	51.000.000	2 KEGIATAN	54.725.000	2 KEGIATAN	329.975.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 20 17	5.1.2.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kawasan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.600.000	1 Kegiatan	32.835.000	1 Kegiatan	98.435.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 20 20	5.1.2.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	25 Kegiatan	25 Kegiatan	110.853.776	25 Kegiatan	97.438.582	25 Kegiatan	106.285.862	25 Kegiatan	266.249.099	25 Kegiatan	236.443.283	25 Kegiatan	817.270.602	KEC. SOREANG		
6 0 1 22 50	5.1.2.50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100 orang	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.600.000	100 orang	32.835.000	100 orang	123.435.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 18 51	5.1.2.51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4 Cabor	4 Cabor	50.000.000	6 Cabor	57.800.000	2 Cabor	60.000.000	3 Cabor	61.200.000	3 Cabor	90.574.135	3 Cabor	319.574.135	KEC. SOREANG		
6 0 1 6 52	5.1.2.52	Program perencanaan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.999.850	1 Kegiatan	57.700.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	66.300.000	1 Kegiatan	68.699.206	1 Kegiatan	316.699.056	KEC. SOREANG		
6 0 1 2 53	5.1.2.53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	100 orang	100 orang	30.000.000	100 orang	56.400.000	100 orang	30.000.000	100 orang	40.800.000	100 orang	43.780.000	100 orang	200.980.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 19 56	5.1.2.56	Program pemeliharaan kantirimbias dan pencegahan tindak kriminal	12 bulan	12 bulan	146.250.000	12 bulan	94.750.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	107.100.000	12 bulan	109.450.000	60 bulan	532.550.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 19 57	5.1.2.57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000	2 Kegiatan	89.250.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	61.200.000	2 Kegiatan	54.725.000	10 Kegiatan	305.175.000	KEC. SOREANG		
6 0 1 22 59	5.1.2.59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	0	100 orang	30.000.000	100 orang	30.600.000	100 orang	49.252.500	500 orang	134.852.500	KEC. SOREANG		
6 0 1 11 60	5.1.2.60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	93.544.150	100 orang	90.000.000	100 orang	102.000.000	100 orang	103.977.500	500 orang	414.521.650	KEC. SOREANG		
6 0 1 18 61	5.1.2.61	Program peningkatan peran serta perempuan	100 orang	100 orang	25.000.000	100 orang	0	100 orang	30.000.000	100 orang	30.600.000	100 orang	27.362.500	500 orang	112.962.500	KEC. SOREANG		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Rp	Target	Rp									
6	0	1	1	65	5.1.2.65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah monitoring PAUD di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	4.000.000	1 kegiatan		30.000.000	1 kegiatan	20.400.000	1 kegiatan	21.890.000	5 Kegiatan	76.290.000	KEC. SOREANG
6	0	1	1	66	5.1.2.66	Program Pendidikan Menengah	Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	100 ORANG	100 ORANG	30.000.000	100 ORANG	56.876.925	100 ORANG		25.000.000	100 ORANG	25.500.000	100 ORANG	27.362.500	500 orang	164.739.425	KEC. SOREANG
6	0	1	2	68	5.1.2.68	Program Pengembangan Pendidikan Sektoral	Jumlah peserta sosialisasi	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang		30.000.000	100 Orang	25.500.000	100 Orang	27.362.500	500 orang	82.862.500	KEC. SOREANG
						Jumlah 2				601.103.626	721.409.657				886.285.862		1.005.749.099		1.041.471.624		4.256.019.867	KEC. SOREANG
						Jumlah Total (1+2)				1.365.178.776	4.810.053.607				2.593.285.862		2.917.613.138		2.866.805.845		15.052.937.228	KEC. SOREANG
						<b>Jumlah Belanja Langsung</b>				<b>1.861.019.138.515</b>	<b>2.642.918.449.921</b>				<b>1.723.687.009.096</b>		<b>1.718.655.897.471</b>		<b>1.723.495.517.500</b>		<b>9.668.776.012.502</b>	